

STRATEGIC ROLES

FOR BETTER PERFORMANCE

2020

Laporan Tahunan

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB



Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") tahun 2020 ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan PPA yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana PPA menjalankan kegiatannya. PPA tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu persis sesuai yang diharapkan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PPA" atau "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) secara umum.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh dalam situs web resmi PPA dengan alamat www.ptppa.com.



PENJELASAN TEMA

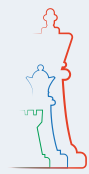


PERAN STRATEGIS UNTUK KINERJA YANG LEBIH BAIK

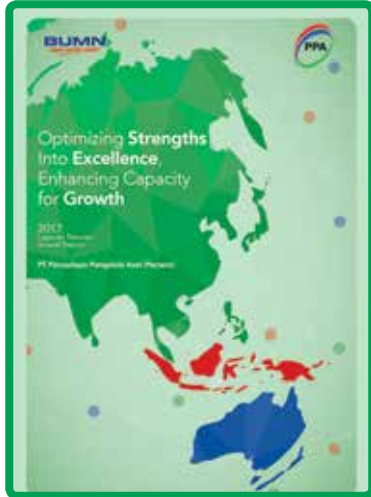
Tahun 2020 menjadi tahun yang penting bagi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA"). Di tengah kemunculan pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa berdampak terhadap peradaban khususnya bagi perekonomian, PPA dipercaya oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri BUMN selaku pemegang saham, untuk melaksanakan penugasan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Titip Kelola sebagai perluasan dari peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang sebelumnya telah dijalankan oleh PPA. Penugasan BUMN Titip Kelola menjadi cermin kepercayaan besar pemegang saham kepada PPA untuk dapat melakukan pembenahan, *rightsizing* dan penguatan BUMN Indonesia. Terutama dengan peran BUMN sebagai agen perubahan dan lokomotif bagi perekonomian Indonesia, penguatan BUMN tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya untuk bangkit dari keterpurukan pasca pukulan besar pandemi COVID-19.

Penugasan BUMN Titip Kelola ini juga dibarengi dengan kebijakan transformasi BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN melalui rencana pembentukan *Holding Strategis*, dimana PT Danareksa (Persero) dipersiapkan untuk menjadi *holding*, dengan PPA yang akan bersinergi dalam *holding* tersebut dan berperan mengimplementasikan *centre of excellence* dalam kegiatan restrukturisasi aset dan manajemen aset BUMN. Pada beberapa kesempatan di triwulan III 2020, PPA dan Danareksa melaksanakan berbagai program sinergi guna memperlancar rencana realisasi pembentukan *holding* yang diharapkan dapat terwujud di tahun 2021.

Tak hanya itu, pada 1 September 2020 PPA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 senilai Rp642,10 miliar yang ditawarkan melalui 3 (tiga) seri. Di samping memperkuat struktur permodalan jangka panjang, penerbitan Obligasi ini juga membawa PPA ke level berikutnya, yang akan memberikan dampak yang besar bagi organisasi dan kepatuhan PPA sebagai emiten yang memperdagangkan surat utangnya kepada masyarakat.



KESINAMBUNGAN TEMA



Optimizing Strengths Into Excellence, Enhancing Capacity For Growth

Tahun 2017 mengambil tema “*Optimizing Strengths Into Excellence. Enhancing Capacity for Growth*”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis serta kajian yang komprehensif terhadap fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan pada 2017. Selain itu, tema tersebut juga dipilih dengan mempertimbangkan proyeksi keberlanjutan bisnis Perusahaan.

2017



Repositioning For The Future Growth

Tahun 2018, Perusahaan memperkuat eksistensi dengan menjadikan investasi sebagai landasan bagi pengembangan ke depan. Tema “*Repositioning for the Future Growth*” memberikan gambaran tentang kinerja Perusahaan di tahun 2018, sebagai hasil dari keputusan investasi yang telah dilakukan di tahun 2017.

2018



Strengthening The Strength

Tema “*Strengthening the Strength*” menjadi gambaran bahwa di tahun 2019, PPA terus meningkatkan kerja sama dalam rangka membangun aliansi strategis dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, untuk memperkuat jaringan internasional di bidang pengelolaan aset. PPA juga terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam melaksanakan amanah Pemerintah sebagai agen restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN.

2019



2020





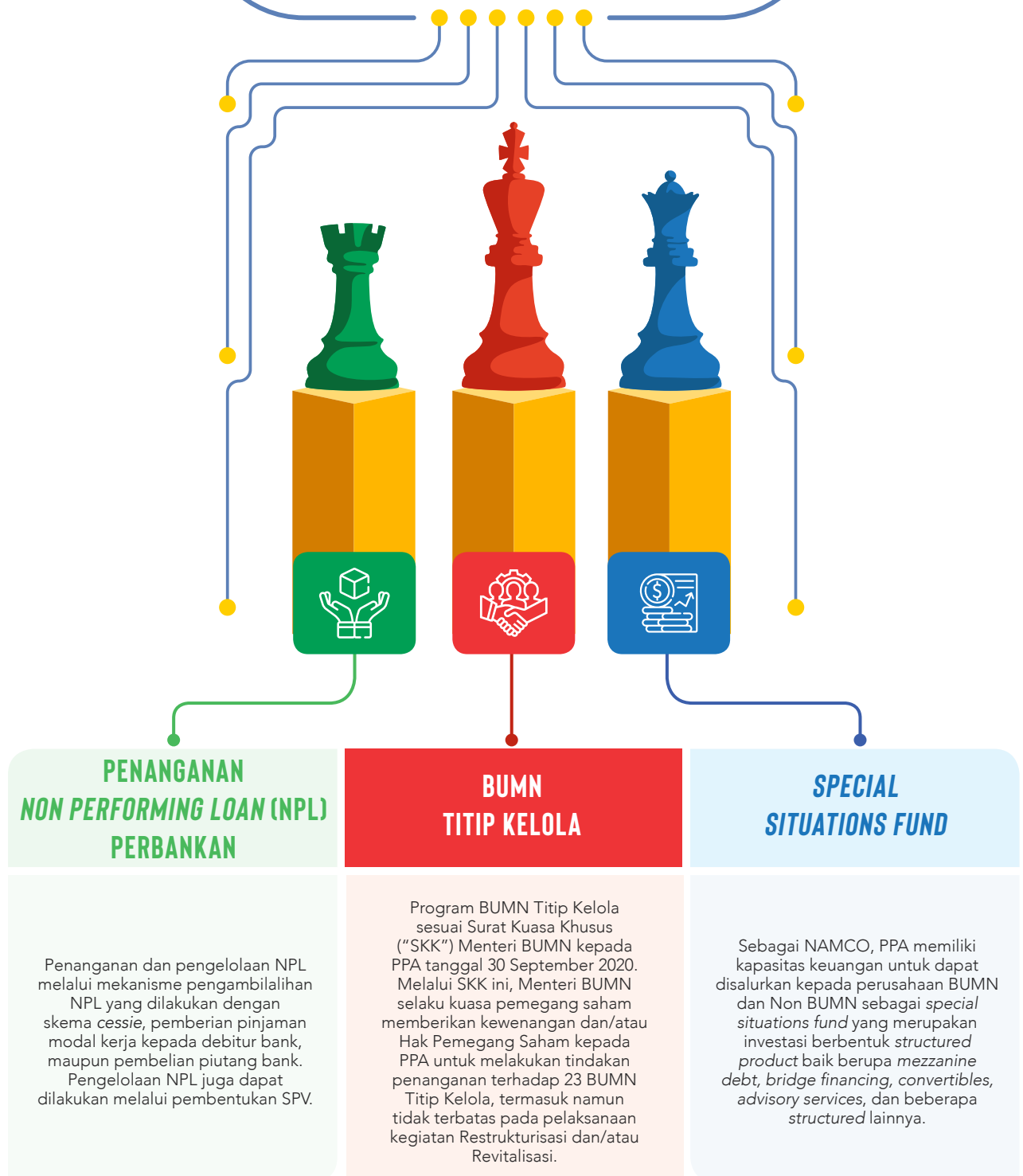
2020: MELETAKKAN FONDASI MENUJU PPA BARU

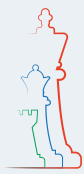


“Di tengah pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan seluruh asumsi positif akan perekonomian tahun 2020, PPA justru dipercaya untuk melaksanakan penugasan BUMN Titip Kelola, dengan tujuan besar memperkuat BUMN agar mampu menjadi agen bagi pembangunan dan pemerataan ekonomi yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia. Bagi PPA, program BUMN Titip Kelola akan memperkuat posisi PPA ke depan untuk terus menciptakan nilai tambah, baik bagi pemegang saham maupun berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.”



3 PILAR BISNIS KEGIATAN PPA





PENCAPAIAN KINERJA 2020



"Menghadapi pandemi COVID-19 yang menciptakan ketidakpastian, PPA tetap mampu menjaga kelangsungan usahanya, termasuk memetakan potensi risiko-risiko yang timbul dari adanya kejadian luar biasa ini. Hal ini menunjukkan bahwa PPA memiliki fondasi yang kuat, yang dapat menghadapi situasi sesulit apapun".

**26,19%** ↑

Kenaikan Pendapatan dari segmen Investasi, yang mengindikasikan keberhasilan PPA Group dalam menjalankan bisnis investasi di tengah pandemi COVID-19.

**RP105,77 MILIAR**

Meskipun pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap perekonomian, industri dan korporasi, di tahun 2020 PPA mampu mencetak laba sebesar Rp105,77 miliar.

**33,95%** ↓

Penurunan Beban Usaha, dari Rp6,29 triliun di tahun 2019 menjadi Rp4,15 triliun di tahun 2020. PPA juga mampu menjaga rasio BOPO dengan baik, sebesar 94,47%.

**13,21%** ↑

Laju Pertumbuhan Majemuk Rata-rata Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) Aset PPA 5 (lima) tahun terakhir.

**RP642,10 MILIAR**

Nilai Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang diterbitkan di tahun 2020. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, Obligasi PPA justru diserap oleh pasar modal. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik kepada PPA yang kedepannya akan menjadi *National Asset Management Company* (NAMCO).

**4,46%** ↑

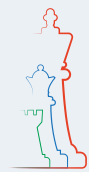
Kenaikan Rasio Lancar, dari 122,10% di tahun 2019 menjadi 127,55% di tahun 2020. Kenaikan Rasio Lancar mengindikasikan peningkatan kemampuan likuiditas PPA.

**90,06 "SANGAT BAIK"**

Skor *assessment* penerapan GCG tahun 2020, meningkat dari skor tahun 2019 sebesar 88,53. *Assessment* menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Kenaikan skor ini menunjukkan komitmen PPA untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG berdasarkan praktik terbaik.

**83,25**

Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan, dengan hasil kategori sebagai BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA". Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.



DAFTAR ISI



- 2 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
- 3 Penjelasan Tema
- 4 Kesenambungan Tema
- 6 2020: Meletakkan Fondasi Menuju PPA Baru
- 8 Pencapaian Kinerja 2020
- 10 Daftar Isi

01 KILAS KINERJA 2020

- 14 Ikhtisar Keuangan dan Operasi
- 20 Ikhtisar Saham
- 21 Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
- 22 Pendanaan lainnya
- 23 Kilas Peristiwa 2020

02 LAPORAN MANAJEMEN

- 38 Laporan Dewan Komisaris
- 48 Laporan Direksi
- 58 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
- 59 Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

03 PROFIL PERUSAHAAN

- 62 Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
- 63 Riwayat Singkat PPA
- 66 Jejak Langkah
- 68 Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang Dilayani
- 72 Visi, Misi, Budaya dan Nilai Perusahaan
- 74 Makna Logo Perusahaan
- 76 Struktur Organisasi
- 78 Profil Dewan Komisaris
- 80 Profil Direksi
- 83 Profil Manajemen Senior
- 85 Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi
- 92 Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko
- 96 Komposisi Pemegang Saham
- 97 Struktur Grup dan Kelompok Usaha
- 97 Entitas Induk, Entitas Anak dan Ventura Bersama
- 107 Informasi Tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham
- 107 Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
- 108 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
- 110 Penghargaan dan Sertifikasi
- 111 Informasi pada Situs Web Perusahaan

**04 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN**

- 114** Tinjauan Perekonomian dan Industri
- 116** Kebijakan Strategis Tahun 2020
- 118** Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
- 125** Aspek Pemasaran
- 128** Tinjauan Keuangan Dan Informasi Material Lainnya
- 172** Tingkat Kesehatan Perusahaan
- 173** Informasi Kelangsungan Usaha
- 174** Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang

05 TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 179** Pencapaian Penerapan GCG PPA Tahun 2020
- 180** Komitmen Penerapan GCG Secara Berkelanjutan
- 182** Penerapan GCG Secara Berkelanjutan di PPA
- 199** Struktur dan Mekanisme GCG
- 202** Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
- 211** Dewan Komisaris
- 219** Komisaris Independen
- 220** Direksi
- 227** Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
- 254** Organ Pendukung Dewan Komisaris
- 275** Organ Pendukung Direksi
- 290** Audit Independen/Akuntan Publik
- 293** Manajemen Risiko
- 300** Sistem Pengendalian Internal
- 303** Corporate Social Responsibility
- 304** Perkara Penting

- 307** Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 310** Tata Kelola Teknologi dan Informasi
- 317** Kode Etik
- 321** Pengendalian Gratifikasi
- 323** Pedoman Perusahaan Terkait Keterlibatan Dalam Aktivitas Politik
- 324** Kebijakan Anti Korupsi
- 325** Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
- 326** Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- 328** Whistleblowing System
- 332** Transparansi Praktik *Bad Governance*

06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 336** Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 341** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia
- 343** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil
- 345** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
- 347** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 354** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen dan Pemasok
- 356** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat

07 LAPORAN KEUANGAN

- 360** Laporan Keuangan

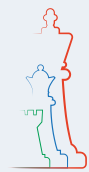


KILAS KINERJA 2020

Pada tanggal 30 September 2020 Menteri BUMN memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PPA yang memberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham untuk melakukan tindakan penanganan terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.







IKHTISAR KEUANGAN DAN OPERASI

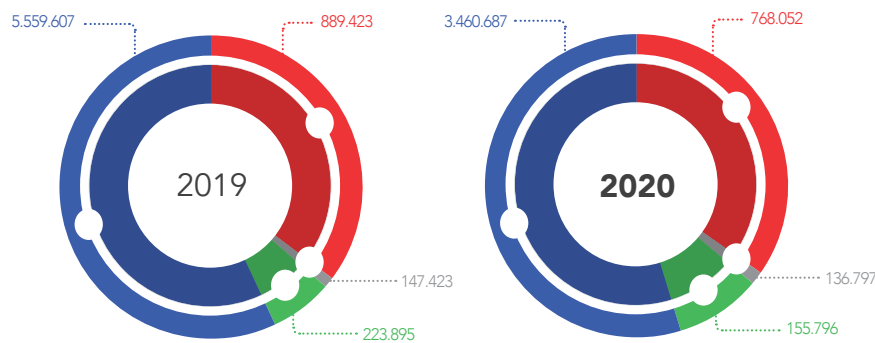
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

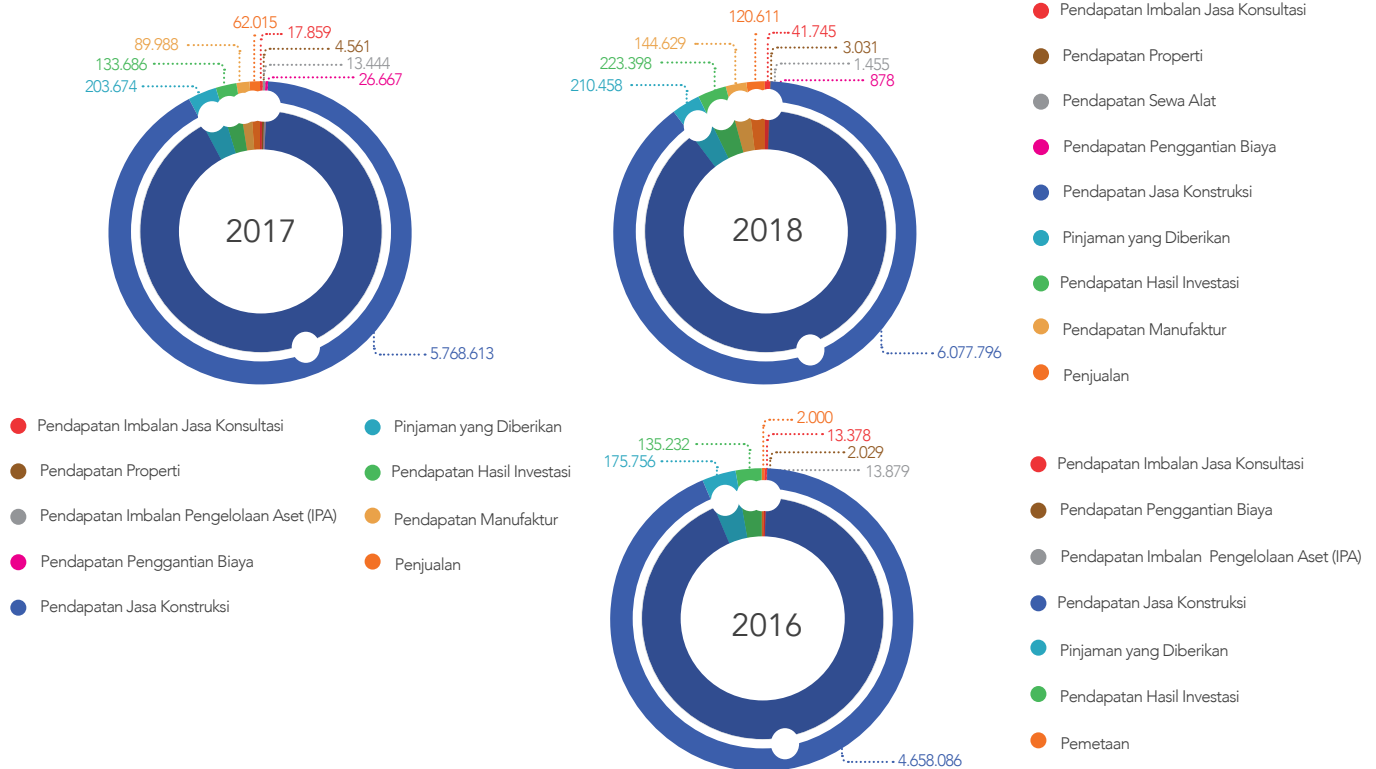
(Dalam Jutaan Rupiah)	2020	2019	2018	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Pendapatan Usaha							
Investasi	768.052	889.423	-	-	-	-13,65%	↓
Pembiayaan	136.797	147.423	-	-	-	-7,21%	↓
Fabrikasi Beton	155.796	223.895	-	-	-	-30,42%	↓
Konstruksi	3.460.687	5.559.607	-	-	-	-37,75%	↓
Eliminasi	(123.488)	(150.891)	-	-	-	-18,16%	↓
Pendapatan Jasa Konstruksi	-	-	6.077.796	5.768.613	4.658.086	-	-
Pinjaman yang Diberikan	-	-	210.458	203.674	175.756	-	-
Pendapatan Hasil Investasi	-	-	223.398	133.686	135.232	-	-
Pendapatan Manufaktur	-	-	144.629	89.988	-	-	-
Penjualan	-	-	120.611	62.015	-	-	-
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi	-	-	41.745	17.859	13.378	-	-
Pendapatan Properti	-	-	3.031	4.561	-	-	-
Pendapatan Sewa alat	-	-	1.455	-	-	-	-
Pendapatan Penggantian Biaya	-	-	878	26.667	2.029	-	-
Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA)	-	-	-	13.444	13.879	-	-
Pemetaan	-	-	-	-	2.000	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha	4.397.844	6.669.457	6.824.001	6.355.757	5.000.360	-34,06%	↓
Beban Usaha	(4.154.610)	(6.289.762)	(6.292.565)	(5.782.914)	(4.586.191)	-33,95%	↓
Laba Usaha	243.234	379.695	531.436	572.843	414.169	-35,94%	↓
Penghasilan Bunga	14.419	15.424	15.514	10.785	11.618	-6,52%	↓
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	237	-	-	-	-100,00%	↓
Beban Bunga dan Keuangan	(91.805)	(89.230)	(76.004)	(65.334)	(103.880)	2,89%	↑
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	26.169	41.528	75.448	11.977	3.273	-36,98%	↓
Beban Pajak Final	(101.709)	(159.199)	(174.168)	(16.337)	(137.840)	-36,11%	↓
Bagian Laba Ventura Bersama	87.905	66.706	106.821	133.038	63.283	31,78%	↑
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(15.200)	80.548	(37.387)	(162.042)	(65.404)	-118,87%	↓
Laba Sebelum Pajak	163.013	335.709	441.660	332.930	283.400	-51,44%	↓
Pajak Penghasilan	(57.244)	(8.639)	(12.860)	(6.445)	(2.134)	562,62%	127,58%
Laba Tahun Berjalan	105.769	327.070	428.800	326.485	281.266	-67,66%	↓
Penghasilan Komprehensif Lain	3.450	(10.119)	61.779	250.968	15.750	-134,09%	↓
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	109.219	316.953	490.579	577.453	297.016	-65,54%	↓



(Dalam Jutaan Rupiah)	2020	2019	2018	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Penghasilan Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	105.341	324.913	426.077	324.045	279.466	-67,58%	-21,64%
Kepentingan Non-Pengendali	428	2.099	2.723	2.440	1.800	-80,18%	-30,17%
Jumlah	105.769	327.012	428.800	326.485	281.266	-67,66%	-21,69%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	108.749	314.854	467.878	572.411	295.242	-65,46%	-22,10%
Kepentingan Non-Pengendali	470	2.097	22.701	5.042	1.774	-77,61%	-28,26%
Jumlah	109.219	316.951	490.579	577.453	297.016	-65,54%	-22,13%
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)	35.152	108.424	142.183	108.134	93.258	-67,58%	-21,65%



*) Belum termasuk eliminasi (transaksi antar entitas dalam grup)

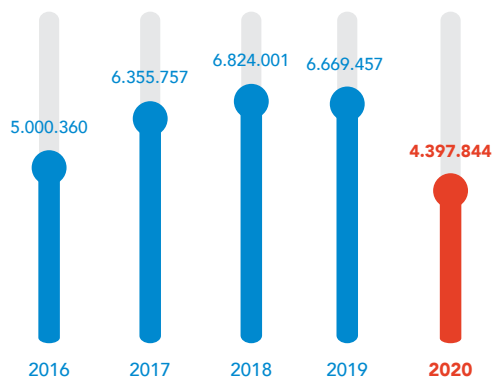


Sejak tahun 2019, PPA menerapkan pencatatan Pendapatan Usaha berdasarkan Segmen Operasi



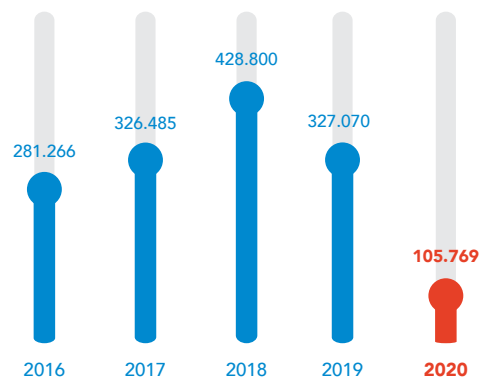
Pendapatan Usaha 2016-2020

(Rp-juta)



Laba Tahun Berjalan 2016-2020

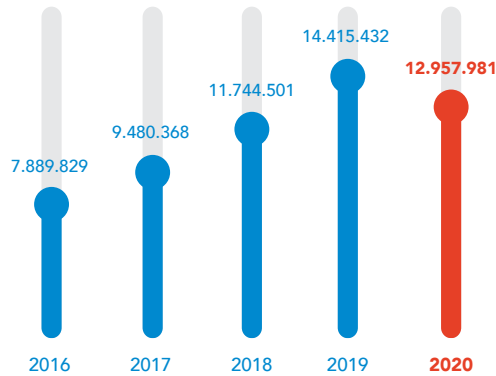
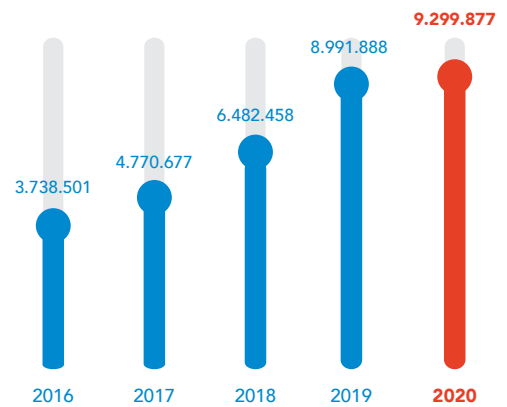
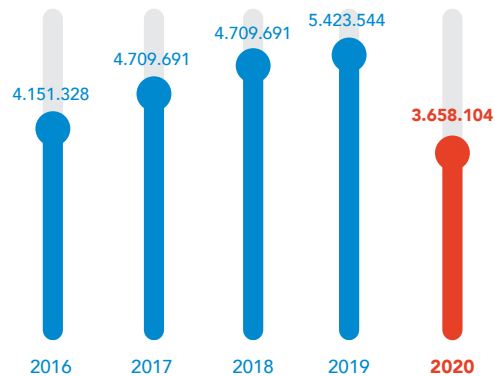
(Rp-juta)



Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam Jutaan Rupiah)	2020	2019	2018*)	2017*)	2016	YoY 2019-2020 (%)		CAGR 2016-2020 (%)	
Aset									
Kas dan Setara Kas	774.100	1.107.636	1.365.617	1.694.156	1.534.252	-30,11%	↓	-15,72%	↓
Pinjaman investasi Jangka Pendek	1.531.707	1.445.630	445.264	288.944	57.741	5,95%	↑	126,95%	↑
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	340.087	223.046	215.581	207.115	219.215	52,47%	↑	11,60%	↑
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	536.683	1.416.472	1.388.273	1.356.385	1.351.876	-62,11%	↓	-20,62%	↓
Pinjaman investasi Jangka Panjang	681.689	299.854	265.053	134.375	8.000	127,34%	↑	203,83%	↑
Investasi pada Ventura Bersama	344.740	321.808	336.085	348.689	340.884	7,13%	↑	0,28%	↑
Investasi Jangka Panjang Lainnya	546.776	102.940	138.053	41.818	42.535	431,16%	↑	89,35%	↑
Aset Tetap	564.701	1.556.796	1.068.044	716.622	386.165	-63,73%	↓	9,97%	↑
Jumlah Aset Lancar	8.020.825	8.671.359	7.280.098	6.015.024	5.296.363	-7,50%	↓	10,93%	↑
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.937.156	5.744.073	4.464.403	3.465.344	2.593.466	-14,05%	↓	17,46%	↑
Jumlah Aset	12.957.981	14.415.432	11.744.501	9.480.368	7.889.829	-10,11%	↓	13,21%	↑
Liabilitas dan Ekuitas									
Liabilitas Jangka Pendek	6.288.396	7.101.678	5.440.230	3.715.530	3.109.266	-11,45%	↓	19,25%	↑
Liabilitas Jangka Panjang	3.011.481	1.890.210	1.042.228	1.055.147	629.235	59,32%	↑	47,91%	↑
Jumlah Liabilitas	9.299.877	8.991.888	6.482.458	4.770.677	3.738.501	3,43%	↑	25,59%	↑
Jumlah Ekuitas	3.658.104	5.423.544	5.262.043	4.709.691	4.151.328	-32,55%	↓	-3,11%	↓
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.957.981	14.415.432	11.744.501	9.480.368	7.889.829	-10,11%	↓	13,21%	↑

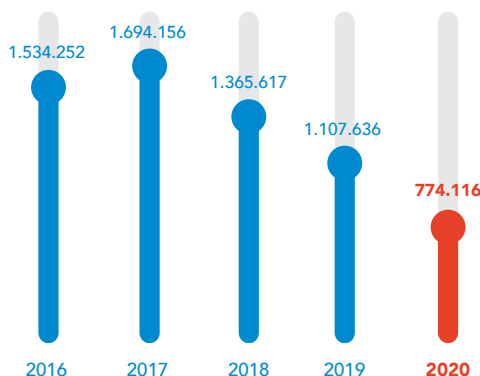
*) Pos akun Aset mengalami reklasifikasi.

**Jumlah Aset 2016-2020**
(Rp-juta)**Jumlah Liabilitas 2016-2020**
(Rp-juta)**Jumlah Ekuitas 2016-2020**
(Rp-juta)**Arus Kas Konsolidasian**

(Dalam Jutaan Rupiah)	2020	2019	2018	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.042.361)	(381.389)	(24.606)	(17.640)	(438.710)	173,31% ↑	24,15% ↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(636.511)	(1.488.651)	(1.205.286)	(946.654)	(190.898)	-57,24% ↓	35,13% ↑
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.362.879	1.612.059	916.612	1.124.198	(183.029)	-15,46% ↓	N.A
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(315.993)	(257.981)	(313.280)	159.904	(812.637)	22,49% ↑	-21,03% ↓
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.107.636	1.365.617	1.694.156	1.534.252	2.346.889	-18,89% ↓	-17,11% ↓
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun dari Entitas yang Konsolidasi (Tidak Dikonsolidasi)	(17.527)	-	-	-	-	-100,00% ↓	N.A
Kas Airbone (Pelepasan Saham Airbone)	-	-	(16.926)	-	-	-	N.A
Penambahan dari Akuisisi	-	-	1.667	-	-	-	N.A
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	774.116	1.107.636	1.365.617	1.694.156	1.534.252	-30,11% ↓	-15,72% ↓

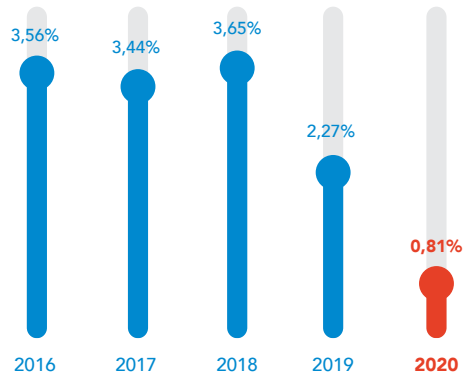
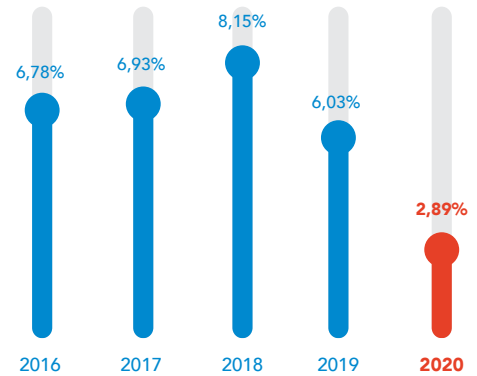
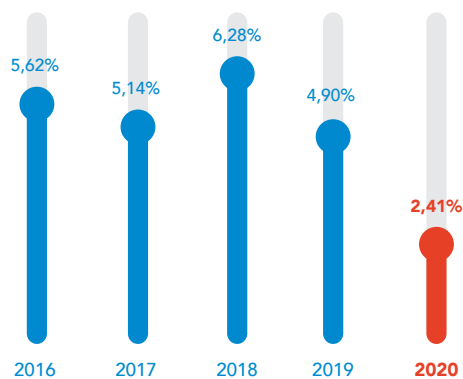
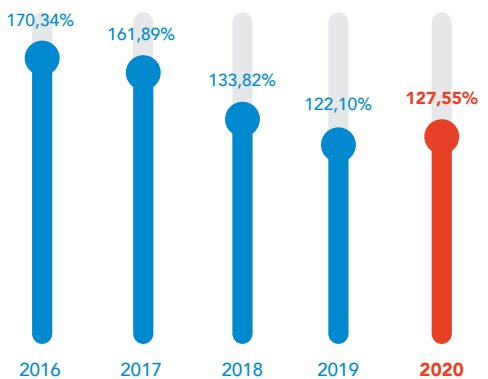


Kas dan Setara Kas Akhir Tahun



Rasio-rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

	2020	2019	2018	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Rasio Profitabilitas dan Operasi							
Rasio Laba Bersih terhadap Aset, atau <i>Return On Asset</i> (ROA) (%)	0,82%	2,27%	3,65%	3,44%	3,56%	-64,02% ↓	-30,83% ↓
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas, atau <i>Return On Equity</i> (ROE) (%)	2,89%	6,03%	8,15%	6,93%	6,78%	-52,05% ↓	-19,18% ↓
Marjin Laba Usaha (%)	5,53%	5,69%	7,79%	9,01%	8,28%	-2,85% ↓	-9,60% ↓
Marjin Laba Bersih (%)	2,41%	4,90%	6,28%	5,14%	5,62%	-50,96% ↓	-19,14% ↓
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	94,47%	94,31%	92,21%	90,99%	91,72%	0,17% ↑	0,74% ↑
Produktivitas Tenaga Kerja (Rp-juta)	5.049	3.896	2.508	1.765	1.894	29,59% ↑	27,78% ↑
Rasio Likuiditas							
Rasio Lancar (%)	127,55%	122,10%	133,82%	161,89%	170,34%	4,46% ↑	-6,98% ↓
Rasio Kas	12,31%	16,59%	26,60%	47,84%	52,43%	-25,78% ↓	-30,39% ↓
Rasio Solvabilitas							
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	254,23%	165,79%	123,19%	101,29%	90,06%	53,34% ↑	29,62% ↑
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%)	71,77%	62,38%	55,20%	50,32%	47,38%	15,06% ↑	10,94% ↑
Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset	28,23%	37,62%	44,80%	49,68%	52,62%	-24,97% ↓	-14,41% ↓
Rasio Pertumbuhan							
Pendapatan Usaha (%)	-34,06%	-2,26%	7,37%	27,11%	25,97%	-1.403,94% ↓	N.A
Beban Usaha (%)	-33,95%	-0,04%	8,81%	26,09%	27,09%	-76.107,76% ↓	N.A
Laba Usaha (%)	-35,94%	-28,55%	-7,23%	38,31%	14,75%	-25,87% ↓	N.A
Laba Bersih (%)	-67,66%	-23,72%	31,34%	16,08%	64,52%	-185,20% ↓	N.A
Laba Bersih yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (%)	-67,58%	-23,74%	31,49%	15,95%	64,13%	-184,62% ↓	N.A
Laba per Saham (%)	-67,58%	-23,74%	31,49%	15,95%	9,36%	-184,62% ↓	N.A
Aset (%)	-10,11%	22,74%	23,88%	20,16%	8,08%	-144,46% ↓	N.A
Liabilitas (%)	3,43%	38,71%	35,88%	27,61%	8,81%	-91,15% ↓	-21,04% ↓
Ekuitas (%)	-32,55%	3,07%	11,73%	13,45%	7,42%	-1.160,59% ↓	N.A

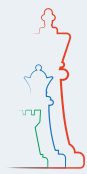
**Return On Asset (ROA)****Return On Equity (ROE)****Marjin Laba Bersih 2016-2020****Rasio Lancar 2016-2020****IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI**

	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Karyawan	169	176	171	183	177
Penugasan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja	96,62	101,40	104,84	102,35	97,9
Tingkat Kesehatan Perusahaan*	83,25	90,00	93,50	94,00	92,50
Assessment Penerapan GCG**	90,065	88,53	88,13	88,04	87,47
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)***	-	511,25	507,50	477,75	437,25

*) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100 MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

**) Assessment penerapan GCG menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

***) Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penilaian kinerja Perusahaan. KPKU dilandasi pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.



IKHTISAR SAHAM

INFORMASI JUMLAH SAHAM

Hingga 31 Desember 2020, PPA tidak menerbitkan saham kepada publik dan tidak mencatat/memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun. Jumlah keseluruhan saham PPA sebanyak 2.996.688 lembar saham dimiliki 100,00% atau seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia.

DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2020, Pemegang Saham memutuskan tentang penggunaan laba Perusahaan untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut: menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp324.913 juta seluruhnya sebagai cadangan.

Realisasi pembagian Dividen Saham tunai untuk hasil usaha tahun buku 2019 yang dibagikan di tahun 2020 serta untuk hasil usaha tahun buku 2018 yang dibagikan di tahun 2019 dan Dividen Saham adalah sebagai berikut:

Dividen Saham	2020 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2019)	2019 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2018)
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta)	Sesuai keputusan RUPS, PPA tidak membagikan dividen saham tunai di tahun 2020	42.608
Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham)		14.218
Rasio Pembayaran Dividen		10,00%
Tanggal Pengumuman	29 Juni 2020	3 Mei 2019
Tanggal Pembayaran	-	28 Mei 2019

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI SAHAM

PPA tidak melakukan aksi korporasi di sepanjang tahun 2019 dan 2020. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan serta volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. PPA juga tidak memiliki informasi terkait aksi penghentian sementara perdagangan saham (*Suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*Delisting*).



IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI



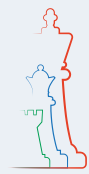
Di tahun 2020 PPA menerbitkan Obligasi dalam rangka memperkuat struktur pendanaannya



DAFTAR OBLIGASI YANG DITERBITKAN PPA DAN MASIH BEREDAR UNTUK PERIODE 2019-2020

Tahun Penerbitan	Kode Obligasi	Nama Obligasi	Nilai Outstanding (Rp)	Tingkat Bunga per Tahun	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu (Tahun)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat dari Pefindo	Bursa Perdagangan	Status
2020	PPAP	Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)								
		Seri A	100.000.000.000	9,95%	1 September 2020	3	19 Agustus 2023	idA (Single A)	Bursa Efek Indonesia	Aktif
		Seri B	345.000.000.000	10,55%	1 September 2020	5	19 Agustus 2025	idA (Single A)	Bursa Efek Indonesia	Aktif
		Seri C	197.100.000.000	11,00%	1 September 2020	7	19 Agustus 2027	idA (Single A)	Bursa Efek Indonesia	Aktif
Jumlah			642.100.000.000							

Selain obligasi di atas, PPA tidak menerbitkan efek lainnya seperti sukuk maupun obligasi konversi. Tentang rincian kronologi penerbitan obligasi yang dilakukan PPA dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.



PENDANAAN LAINNYA



PPA memanfaatkan instrumen keuangan lainnya untuk memperkuat permodalan, dengan menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) dan Surat Berharga Komersial (SBK).



PPA telah menerbitkan surat utang jangka menengah, atau *Medium Term Notes* (MTN) serta Surat Berharga Komersial (SBK) dengan rincian sebagai berikut:

Surat Utang Lainnya	Nilai (Rp-juta)	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga per Tahun	Peringkat dari Pefindo	Status
MTN I PPA Tahun 2019 Seri A	300.000	8 November 2019	2 tahun	8 November 2021	10,05%	idA (Single A)	Aktif
MTN I PPA Tahun 2019 Seri B	450.000	8 November 2019	3 tahun	8 November 2022	10,30%	idA (Single A)	Aktif
Surat Berharga Komersial	100.000	27 November 2019	1 tahun	28 November 2020	7,50%	idA (Single A)	Lunas



KILAS PERISTIWA 2020

JANUARI



PPA Peduli Korban Banjir Jabodetabek

PPA menyalurkan bantuan kebutuhan pasca bencana banjir senilai Rp50 Juta dalam bentuk alat-alat kebersihan, detergen, pembersih lantai, seragam sekolah, tikar lipat dan makanan siap santap melalui Posko BUMN Peduli Bencana Banjir di kantor PT Jakarta Outer Ring Road, Jatiasih, Bekasi pada 7 Januari 2020.



Town Hall Meeting I Tahun 2020

Gelaran *Town Hall Meeting* di kantor PPA, 21 Januari 2020. Pada kesempatan ini, Direksi menyampaikan ringkasan kilas balik capaian tahun 2019 dan 2018 kepada seluruh karyawan PPA dan entitas anak, yaitu PT PPA Finance dan PT PPA Kapital.



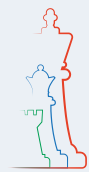
PPA Peduli Korban Banjir dan Longsor di Lebak, Banten

Pada 16 Januari 2020, PPA menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat di Kampung Somang, Desa Sukarama, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang terkena musibah banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bantuan senilai Rp50 Juta diberikan dalam bentuk terpal, perlengkapan kebersihan diri, makan siang untuk masyarakat, selimut, makanan bayi, dan bahan makanan lainnya.



RUPS RKAP Tahun Buku 2020

Bertempat di Kementerian BUMN, telah dilaksanakan RUPS atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PPA Tahun Buku 2020, 22 Januari 2020. RUPS dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris beserta perangkat, Direksi, Direksi entitas anak usaha; sedangkan dari Pemegang Saham diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN beserta jajarannya.



Workshop Executing Business Strategy

Direksi menggelar *Workshop Executing Business Strategy* untuk merumuskan strategi dan komitmen pencapaian target tahun 2020, di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 30-31 Januari 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Komisaris beserta organ, Direksi, Direksi entitas anak usaha, para pimpinan lingkup Grup, seluruh Kepala Divisi, Kepala Grup, serta Kepala unit.



Pembahasan Program Milenial Tahun 2020

Pada 12 Februari 2020, bertempat di kantor PPA, karyawan generasi milenial PPA dan entitas anak berkumpul untuk mendiskusikan rencana program tahun 2020. Forum yang dibentuk sebagai wadah bersosialisasi baik internal maupun eksternal, internalisasi tata nilai SEEIT, dan menuangkan ide kreatif ini menyiapkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Selain kegiatan internal, wadah milenial PPA juga telah menyusun rencana kegiatan yang melibatkan pihak eksternal atau bersinergi dengan BUMN lain.

FEBRUARI



Penandatanganan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang dengan Bank BTN

Pada 6 Februari 2020 bertempat di Menara BTN Jakarta Pusat telah dilaksanakan penandatanganan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang antara PT PPA dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Direktur Investasi PPA Nasrizal Nazir dengan Direktur Finance, Planning, and Treasury Bank BTN Nixon Lambok Pahotan Napitupulu. Terdapat 4 hal yang sepakat untuk diperbaharui antara lain jangka waktu perjanjian, tugas pengelola piutang (dalam hal ini Bank BTN), target dana hasil koleksi, serta denda dan imbalan jasa pengelola piutang.



Donor Darah Rangkaian HUT Ke-16 PPA

Salah satu rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-16 PPA yaitu donor darah telah diselenggarakan pada 18 Februari 2020 bertempat di kantor PPA. Para karyawan bersama jajaran Direksi turut mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Sebanyak 120 kantong darah berhasil terkumpul pada kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta tersebut.



Pengarahan Peserta Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB)

Pada 18 Februari 2020 bertempat di kantor PPA, seluruh Direksi memberikan pengarahan sekaligus menyambut para peserta Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB). PMMB merupakan program dari Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Pada PMMB kali ini, PPA menerima 22 mahasiswa dari 12 universitas seluruh Indonesia yang berasal dari 9 jurusan yang berbeda.



Kunjungan Direksi PT PPA ke PT Ade Textile Industries dan PT Primarindo Asia Infrastructure

Pada 24 Februari 2020 Direktur Utama Iman Rachman dan Direktur Konsultasi dan Aset Manajemen Dikdik Permadi didampingi oleh Kepala Divisi Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen 1 beserta tim mengunjungi fasilitas produksi PT Ade Textile Industries (PT Adetex) dan PT Primarindo Asia Infrastructure (PT PAI) yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.



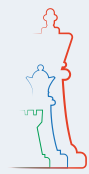
Kick Off Meeting Penerbitan Obligasi PT PPA Tahun 2020

Pada 21 Februari 2020 bertempat di kantor PPA telah dilaksanakan *Kick Off Meeting* Penerbitan Obligasi PT PPA Tahun 2020. Acara tersebut dihadiri oleh Direksi PPA, Direksi entitas anak usaha, para Kepala Divisi, serta perwakilan para lembaga dan profesi penunjang pasar modal. PPA menargetkan untuk menerbitkan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 dan menerima dana efektif pada 15 Mei 2020 mendatang. Penerbitan obligasi ini telah mendapat persetujuan Kementerian BUMN melalui RUPS RKAP 2020.



Syukuran HUT Ke-16 PT PPA

Pada 27 Februari 2020 bertempat di kantor PPA, seluruh insan PPA mengikuti acara syukuran hari ulang tahun ke-16 PPA. Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Plt. Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aditya Dhanwantara, Dewan Komisaris dan Direksi PPA, Direksi PPA periode 2004-2019 dan Direksi entitas anak usaha.



Penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek kepada PT Alim Investindo

Pada 28 Februari 2020 bertempat di kantor PPA telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek kepada PT Alim Investindo. Penandatanganan dilaksanakan antara Direktur Investasi Nasrizal Nazir dengan Direktur Utama PT Alim Investindo Alim Markus yang juga Presiden Direktur Maspion Grup. PT PPA memberikan dukungan pembiayaan jangka pendek kepada PT Alim Investindo dengan *plafond* sebesar Rp300 Miliar.



Penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit Demand Loan dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Pada 28 Februari 2020 bertempat di kantor PPA telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit Demand Loan antara PPA dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan *plafond* sebesar Rp140 Miliar. Hadir untuk menandatangani perjanjian ini adalah Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja R. Muhammad Irwan dengan Synergy Marketing Division Head Bank Woori Kwon Hyeongjun sebagai Kuasa dari Credit Management Division Head Lee Chang Sup serta tim teknis Bank Woori dan Tim dari PPA. Penandatanganan ini merupakan bagian dari program PPA dalam memberikan dukungan kegiatan investasi kepada perusahaan BUMN dan Non BUMN.

MARET



Family Day 2020

Pada 1 Maret 2020 seluruh karyawan PPA dan entitas anak beserta keluarga mendapatkan kesempatan menikmati kebersamaan dan keseruan dalam acara *Family Day* 2020. Lebih dari 800 orang karyawan beserta keluarga hadir mengikuti acara yang diselenggarakan di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Komisaris Utama dan seluruh Direksi juga hadir membawa serta keluarganya. PPA *Family Day* 2020 menjadi wujud apresiasi dari manajemen kepada karyawan beserta keluarganya yang selalu mendukung tiada henti.



PPA Raih Penghargaan BUMN Performance Excellence Awards 2020

Pada 4 Maret 2020 PPA menerima penghargaan dalam acara BUMN Performance Excellence Awards 2020 bertempat di Hotel Kempinski, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) bersama dengan Majalah Infobank. Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja R. Muhammad Irwan hadir menerima penghargaan tersebut. PPA menerima penghargaan sebagai BUMN 'Good Performance' atas hasil *assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun buku 2018 yang dinilai pada tahun 2019 dengan capaian skor sebesar 511,25 dengan kategori "Good Performance". Capaian tersebut meningkat dari tahun buku 2017 yaitu sebesar 507,50 kategori 'Good Performance'.



Sharing Knowledge Penyehatan BUMN oleh PT PPA kepada Kementerian BUMN

Pada 6 Maret 2020, Kementerian BUMN dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I mengundang PPA untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan *Sharing Knowledge* Deteksi Cepat Permasalahan di Perusahaan, Skema Restrukturisasi, serta Studi Kasus Restrukturisasi di BUMN dan Cara Penanganannya. Pada kegiatan tersebut, Direktur Utama Iman Rachman, Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Dikdik Permadi Yoffana, Investment Manager Divisi KBAM 2 Emirio Fajar, dan Investment Manager Divisi KBAM 3 Daniel Pandapotan berkesempatan untuk berbagi ilmu dan wawasan terkait analisa laporan keuangan dan *best practice* langkah-langkah restrukturisasi/revitalisasi (R/R) BUMN yang selama ini dilakukan oleh PPA.



Rangkaian Upaya Penanganan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Grup PPA

Di sepanjang Maret 2020 PPA melakukan berbagai rangkaian upaya penanganan penyebaran COVID-19 di lingkungan Grup PPA, mulai dari sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran COVID-19, penutupan beberapa fasilitas umum dan pembersihan beberapa fasilitas publik yang berada di lokasi kantor PPA, dan penyediaan sarana pendukung untuk pelaksanaan *Work From Home* (WFH). Manajemen juga menetapkan serangkaian kebijakan terkait penanganan penyebaran COVID-19, baik surat edaran, video sosialisasi, juga himbauan kepada seluruh karyawan Grup PPA.

APRIL



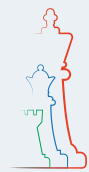
Penandatanganan Akta Addendum IV Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman kepada PT National Utility Helicopters

Pada 18 Maret 2020 bertempat di kantor PPA telah dilaksanakan penandatanganan Akta Addendum IV Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman kepada PT National Utility Helicopters ("PT NUH") yang dilakukan oleh Direktur Investasi Nasrizal Nazir dan *Human Resources Manager* Endra Maryanti yang bertindak mewakili Direksi PT NUH disaksikan oleh Notaris. PPA memberikan tambahan *plafond* berupa Fasilitas Pinjaman Tranche-X dengan nilai pinjaman sebesar Rp65 miliar (*revolving*).



Penandatanganan Adendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang dengan Bank BTN

Pada 8 April 2020 telah dilaksanakan penandatanganan Adendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang antara PPA dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dilakukan antara Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Dikdik Permadi Yoffana dengan Direktur Finance, Planning and Treasury Bank BTN Nixon Lambok Pahotan Napitupulu. Penandatanganan ini merupakan adendum perjanjian terkait ketentuan dana hasil koleksi dan perubahan jangka waktu menjadi sampai dengan 31 Desember 2020.



MEI



PPA Perluas Kerjasama Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) dengan Bank BTN

Pada 12 Mei 2020 bertempat di Kementerian BUMN telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PPA tentang Pengambilalihan dan Pengelolaan Aset Bermasalah, yang antara Direktur Utama Iman Rachman dengan Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury. Sinergi ini bertujuan untuk membantu bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), dalam hal ini Bank BTN, terkait pengelolaan aset bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) sesuai spesialisasi dan pengalaman PPA.



PPA Salurkan Donasi THR untuk Bantuan Sembako

Bekerja sama dengan DKM Masjid Al Bakrie Taman Rasuna Said, PPA menyalurkan bantuan paket sembako hasil donasi Tunjangan Hari Raya (THR) Dewan Komisaris dan Direksi kepada warga di sekitar tempat tinggal di Jakarta Selatan pada 14 Mei 2020.



PPA Distribusikan Bantuan Kemanusiaan Penanganan Pandemi COVID-19

Hingga Mei 2020 PPA telah menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1,137 miliar. Bantuan disalurkan dalam bentuk Alat Pelindung Diri (APD) dan paket nutrisi untuk tenaga medis di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan beberapa rumah sakit di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. PPA juga menyalurkan bantuan paket sembako dan/atau santunan sebesar untuk masyarakat pekerja harian, anak yatim, dhuafa, pondok pesantren, panti asuhan dan kelompok masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat khususnya pedalaman Mentawai. Penyaluran bantuan ke berbagai wilayah dilakukan secara langsung maupun bekerja sama dengan lembaga penyalur yang menjadi mitra Program Bina Lingkungan PPA.



Donasi Karyawan PPA untuk Petugas Makam dan Relawan RS Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet

Karyawan Grup PPA berinisiatif untuk mengumpulkan donasi dan memberikannya kepada para petugas pemakaman di TPU Tegal Alur Jakarta Barat dan relawan medis maupun non medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Donasi terkumpul sebesar Rp14,3 juta disalurkan kepada petugas makam berupa 90 paket bingkisan Lebaran berisi bahan pangan dan kepada relawan Wisma Atlet berupa 200 paket makanan tambahan nutrisi. Apresiasi disampaikan secara langsung oleh perwakilan karyawan milenial dibantu oleh Yayasan Turun Tangan.



Penandatanganan Addendum IV Perjanjian Pinjaman dengan PT Polowijo Gosari

Pada 27 Mei 2020 bertempat di kantor PPA telah dilaksanakan penandatanganan Addendum IV Perjanjian Pinjaman antara PPA dengan PT Polowijo Gosari, yang dilakukan oleh Direktur Investasi PPA Nasrizal Nazir dengan Direktur Utama PT Polowijo Gosari Deddy Harnoko Sucahyo.

JUNI



Penandatanganan Addendum II Perjanjian Kerjasama dengan PT Matoa Kidung Samudera dan PT Matoa Kidung Bahtera

Pada 5 Juni 2020 bertempat di kantor PPA telah dilaksanakan penandatanganan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja Kapal Isap Produksi (KIP) Matoa 1 dengan PT Matoa Kidung Samudera (MKS) berdasarkan Akta No. 03 tanggal 5 Juni 2020, dan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal KIP Matoa 2 dengan PT Matoa Kidung Bahtera (MKB) berdasarkan Akta No. 04 tanggal 5 Juni 2020. Penandatanganan dilakukan antara Direktur Investasi PPA Nasrizal Nazir dengan Direktur PT MKS dan PT MKB Antonius Rudolphus Albertus Setyo Legowo.



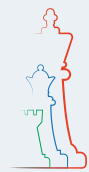
Kick Off, Executive Briefing dan Pelatihan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Pada 7 Juni 2020 diselenggarakan kegiatan *Kick Off, Executive Briefing*, dan pelatihan implementasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara virtual yang diikuti oleh Direksi PPA, Direksi entitas anak usaha, serta para Kepala Divisi. Paparan dilakukan oleh Tim Konsultan Aurora Bisnis Internasional tentang pentingnya manajemen anti penyuapan hingga *timeline* persiapan sertifikasi ISO 37001 bagi PPA. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan *training* implementasi ISO 37001 yang diikuti oleh seluruh karyawan PPA, PPA Finance, dan PPA Kapital.



Rapid Test untuk Seluruh Karyawan PPA

Sebagai salah satu upaya menekan potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan PPA dan mempersiapkan operasional PPA menuju tatanan normal baru, PPA melaksanakan *rapid test* COVID-19 yang diikuti oleh seluruh karyawan PPA, PPA Finance, PPA Kapital, Direksi, Dewan Komisaris, dan tenaga *outsourcing* pada 10-11 Juni 2020. Pelaksanaan *rapid test* bekerja sama dengan RS Pertamina Jaya.

**Webinar Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19**

Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Dikdik Permadi menjadi pembicara dalam webinar bertajuk 'Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19' yang diselenggarakan oleh Institute Certified Management Accountant (ICMA) Australia Indonesia pada 20 Juni 2020. Webinar tersebut diikuti oleh 95 peserta yang berasal dari berbagai kalangan meliputi anggota ICMA Australia Indonesia, profesional perusahaan, akademisi dan Insan PPA. Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Dikdik Permadi menyampaikan analisis dampak dan prediksi ketahanan perekonomian Indonesia, kebijakan pemulihan ekonomi dan peran PPA, serta pengalaman restrukturisasi perusahaan oleh PPA.

**RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 PPA**

RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 PPA dilaksanakan pada 29 Juni 2020. Pelaksanaan RUPS secara virtual melalui *video conference* dipimpin oleh Asisten Deputy Bidang Perbankan dan Pembiayaan Kementerian BUMN Muhammad Khoerur Roziqin selaku Kuasa Pemegang Saham beserta jajarannya, yang dihadiri oleh Dewan Komisaris PPA beserta organnya dan Direksi PPA.

JULI**Penyaluran Paket Sembako di Way Kanan, Lampung**

PPA menyalurkan bantuan kemanusiaan di masa pandemi COVID-19 berupa 1.000 paket sembako untuk warga di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada 25 Juni 2020. Penyaluran bantuan dilakukan bekerja sama dengan Yayasan PKBM Prioritas Maju.

**Penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Talangan (Bridging Loan) kepada Perum Perumnas**

Pada 6 Juli 2020 bertempat di kantor PPA telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Talangan (*Bridging Loan*) kepada Perum Perumnas yang dilakukan antara Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Dikdik Permadi Yoffana dengan Direktur Keuangan Perum Perumnas Muhammad Hanugroho. PPA memberikan pinjaman kepada Perum Perumnas dengan plafon maksimal Rp140 miliar dan sifat fasilitas pinjaman *non revolving*.



PPA Ikuti IPAF Virtual Summit Meeting 2020

PPA sebagai General Member International Public Asset Management Company Forum (IPAF) turut serta dalam IPAF Virtual Summit Meeting 2020 yang mengusung tema *Staying Connected in Challenging Times*. Acara tersebut diselenggarakan secara virtual pada 22 Juli 2020. Direktur Investasi Nasrizal Nazir mewakili Direksi mengikuti acara tersebut serta menyampaikan sambutan sebagai anggota baru IPAF.



PPA Raih Dua Penghargaan pada Ajang Anugerah BUMN 2020

PPA berhasil meraih dua penghargaan pada ajang Anugerah BUMN 2020 yang diselenggarakan oleh BUMN Track. Plt. Direktur Utama PPA R. Muhammad Irwan hadir menerima penghargaan pada malam penganugerahan yang dilaksanakan pada 9 Juli 2020 bertempat di Jakarta. Pada ajang tersebut, PPA meraih penghargaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik BUMN Non Tbk, dan Iman Rachman sebagai CEO Visioner Terbaik.



Sosialisasi Core Values KBUMN 'AKHLAK', Logo Baru Kementerian BUMN dan Slogan BUMN untuk Indonesia

Plt. Direktur Utama R. Muhammad Irwan memimpin sosialisasi *core values* Kementerian BUMN 'AKHLAK', logo baru Kementerian BUMN dan slogan BUMN untuk Indonesia kepada seluruh karyawan PPA, PPA Finance dan PPA Kapital melalui *video conference* pada 10 Juli 2020. Logo baru Kementerian BUMN dan slogan BUMN untuk Indonesia yang baru tersebut mengusung semangat kontribusi dan inovasi terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia.

AGUSTUS



Penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Hutang PT Niaga Bumi Energi

Pada 13 Agustus 2020 bertempat di kantor PPA lantai 10 telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Hutang PT Niaga Bumi Energi yang dilakukan antara Direktur Investasi 1 Andy Setiawan dengan Direktur Utama PT Niaga Bumi Energi Donny Chrisdianto.



Serah Terima Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

Pada 13 Agustus 2020 bertempat di kantor PPA telah diselenggarakan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang dilakukan oleh Direktur TUV NORD Indonesia selaku lembaga sertifikasi ISO 37001-2016 Bayu Wicaksono dan diterima oleh Direktur Hukum dan SDM R. Muhammad Irwan. Komisaris Utama PPA Bapak Edy Putra Irawady menyaksikan penyerahan sertifikat tersebut. PPA berhasil menyelesaikan seluruh proses Audit Stage-1 dan Audit Stage-2 hingga memperoleh sertifikat SMAP 37001:2016.



Upacara Peringatan HUT Republik Indonesia ke-75

Bertempat di Conference Room PPA, seluruh Direksi mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020. Acara dilakukan secara daring melalui video conference.

SEPTEMBER



Town Hall Meeting Triwulan III tahun 2020

Pada 7 September 2020 jajaran Direksi PPA menggelar Town Hall Meeting untuk menyampaikan arahan kepada seluruh karyawan mengenai proyeksi PPA di masa mendatang, khususnya di tahun 2021 saat masih menghadapi pandemi COVID-19.

OKTOBER



FGD Penanganan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dengan Komisi VI DPR-RI

Pada 6 Oktober 2020 bertempat di Aston Lake Sentul Bogor, PPA menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi VI DPR-RI untuk membahas penanganan restrukturisasi BUMN oleh PPA. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Direksi PPA, pimpinan dan anggota Komisi VI DPR-RI. Selain pembahasan tentang kinerja PPA, FGD juga mendiskusikan rencana penugasan Kementerian BUMN kepada PPA terkait likuidasi 14 BUMN dan penggabungan BUMN non kluster menjadi anggota holding PPA-Danareksa.



Town Hall Meeting Perkenalan Direksi Baru PPA

Pada 12 Oktober 2020 diselenggarakan *Town Hall Meeting* secara daring dalam rangka perkenalan Direksi baru PPA. Hadir dalam acara tersebut Direksi yang purna tugas yaitu Ari Soerono, R. M. Irwan, Teguh Wirahadikusumah dan Andry Setiawan. Direktur Utama baru Yadi J. Ruchandi memperkenalkan anggota Direksi baru yaitu Adi Pamungkas Daskian sebagai Direktur Investasi 2 kepada Insan PPA.

NOVEMBER



Kunjungan Direksi PPA dan Danareksa ke PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

Pada 6 November 2020, Direktur Utama PPA bersama Direksi Danareksa melakukan kunjungan ke kantor PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) ("KBI") di Gedung Graha Mandiri, Jakarta. Kunjungan perdana ini dilakukan setelah PPA menerima kuasa khusus dari Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham untuk melakukan tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham melalui Surat Kuasa Khusus untuk PT KBI No. SKK-35/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020. Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan KBI sebagai "Perusahaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Komoditas dan Keuangan Terbaik di Indonesia".



Kunjungan Direksi PPA dan Danareksa ke PT Virama Karya (Persero)

Pada 19 November 2020, Direktur Utama PPA bersama Direksi Danareksa melakukan kunjungan ke kantor sementara PT Virama Karya (Persero) ("VK") di Jakarta Selatan. Kunjungan perdana ini dilakukan setelah PPA menerima Surat Kuasa Khusus dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untuk melakukan tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham melalui Surat Kuasa Khusus untuk VK No. SKK-49/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020. Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan dapat menjadikan VK sebagai "Perusahaan Konsultan Nasional Terdepan, Terbesar, dan Terkemuka yang Bertaraf Internasional."

DESEMBER



Town Hall Meeting di Penghujung Tahun 2020

Pada 30 Desember 2020, Direktur Utama Yadi J. Ruchandi menyapa Insan PPA melalui acara *Town Hall Meeting* yang dilaksanakan secara virtual. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Yadi J. Ruchandi menyampaikan penjelasan dan arahan terkait rencana pembentukan *holding* BUMN dimana PPA akan memiliki peran yang strategis. Untuk itu, Direksi berharap Insan PPA dapat semakin meningkatkan kompetensinya dalam mendukung peran strategis yang akan diemban PPA.



LAPORAN MANAJEMEN

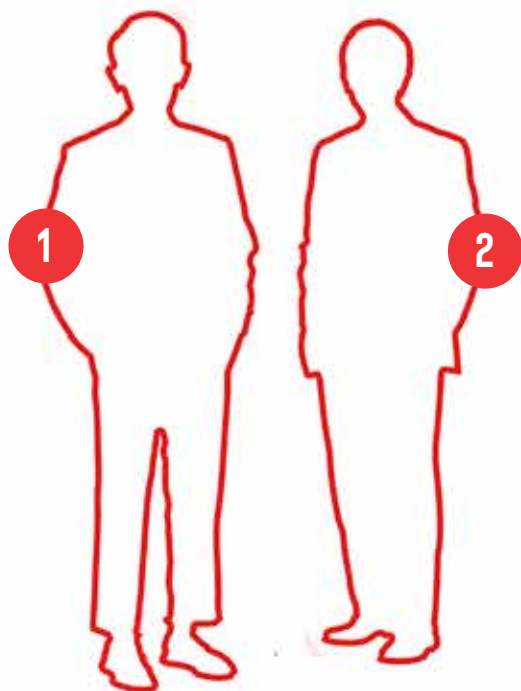
Kunci utama dari keberhasilan penerapan kebijakan strategis oleh manajemen terletak pada kolaborasi yang harmonis antara Dewan Komisaris dan Direksi.







DEWAN KOMISARIS



1

KRISNA WIJAYA

KOMISARIS UTAMA MERANGKAP KOMISARIS INDEPENDEN

2

MARWANTO HARJOWIRYONO

KOMISARIS





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

KRISNA WIJAYA

KOMISARIS UTAMA
MERANGKAP
KOMISARIS
INDEPENDEN

PPA menyambut baik kepercayaan yang diberikan Pemerintah melalui penerbitan SKK ini. Sebagai Langkah pelaksanaannya, PPA melakukan beberapa kebijakan strategis khususnya dalam hal restrukturisasi. Pertama, PPA akan mengkaji bidang usaha BUMN untuk menemukan potensi unggul dari setiap BUMN.





Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Fokus pengembangan usaha melalui mandat restrukturisasi dan revitalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membawa PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga “Perusahaan” atau “PPA”, berkontribusi aktif terhadap perkembangan korporasi BUMN untuk kedepannya akan menjadi Manager Investasi Nasional atau *National Asset Management Company* (NAMCO). Di tengah perkembangan Perusahaan, Dewan Komisaris berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan operasi dan bisnis yang dilakukan Direksi. Untuk itu, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan sekilas laporan fungsi pengawasan dalam laporan tahunan Perusahaan tahun 2020 ini; sekaligus sebagai bagian dari pelaporan pengawasan atas kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2020.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Pembentukan organ Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perusahaan merupakan bagian dari kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi berperan mengelola operasi dan bisnis Perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris memiliki peran untuk mengawasi pengelolaan operasi dan bisnis yang dijalankan Direksi.

Hubungan kerja antara kedua organ ini dibangun dengan saling menghormati antar keduanya. Terdapat batasan dari tanggung jawab dan peran yang dijalankan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan dan kelompok usaha oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

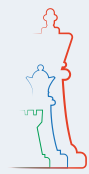
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu “melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pemenuhan aspirasi pemegang saham yang tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta pengawasan atas pelaksanaan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan.

Sesuai Anggaran Dasar, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 24 kali rapat yang terdiri dari Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, dan Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali, termasuk pembahasan tentang penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 yang telah diterbitkan pada 1 September 2020, serta penugasan BUMN Titip Kelola sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK) Menteri BUMN kepada PPA tanggal 30 September 2020.

Kunci utama dari keberhasilan penerapan kebijakan strategis oleh manajemen terletak pada kolaborasi yang harmonis antara Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui rapat-rapat seperti yang telah dijelaskan di atas, Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi, sekaligus membuka ruang diskursus terhadap permasalahan yang dihadapi Direksi. Pengawasan atas implementasi strategi oleh Direksi juga dilakukan Dewan Komisaris pada lingkup pelaksanaan prinsip GCG untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan nilai budaya perusahaan.

Beberapa pandangan, saran dan masukan yang diberikan Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas pengawasan atas kebijakan strategis yang dilakukan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Aset, Liabilitas dan Arus Kas
 - a. Direksi diminta untuk mengupayakan program-program strategis yang dapat mengatasi permasalahan *missmatch* antara sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan usaha PT PPA sehingga dapat dikelola pada tingkat yang optimal guna mencapai pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable growth*).
 - b. Direksi disarankan meningkatkan pengelolaan kas berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential*), dan melakukan *monitoring cash flow* baik di PT PPA Induk maupun entitas anak, antara lain dengan melakukan (1) pengetatan pengeluaran biaya-biaya, (2) mencari sumber dana dengan biaya yang paling efisien termasuk menegosiasikan kembali sumber-sumber pendanaan dengan biaya tinggi, (3) meninjau kembali investasi yang hasilnya tidak akan berdampak secara langsung pada penerimaan tunai, dan (4) fokus pada kegiatan usaha yang dapat memberikan pendapatan tunai dalam jangka pendek.



2. Pengelolaan Aset eks BPPN

Direksi disarankan melakukan penawaran jasa pengelolaan aset baik eks BPPN maupun aset milik Kementerian Keuangan lainnya dengan mengedepankan konsep *business to business*, sehingga dapat memberikan imbal hasil yang optimal.

3. Pelaksanaan RR BUMN

a. Direksi disarankan terus meningkatkan efektivitas fungsi penagihan (*collection*) atas tagihan-tagihannya yang telah jatuh tempo, serta memastikan bahwa penjadwalan kembali piutang (*rescheduling*) yang telah dilakukan dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

b. Direksi disarankan menyiapkan opsi-opsi program RR BUMN yang dapat memberikan solusi penyelesaian bagi RR BUMN yang dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman yang telah cukup lama *outstanding* nya di PT PPA, yang dapat menguntungkan baik bagi PT PPA maupun bagi BUMN bersangkutan.

4. Investasi dan Pengelolaan Aset

a. Disarankan agar Direksi dapat menyeimbangkan antara kegiatan investasi yang dapat memberikan hasil secara berkelanjutan (*recurring income*) dan investasi jangka pendek yang memberikan imbal hasil (*return*) tinggi dengan tetap memperhatikan faktor risiko dan kemampuan perusahaan.

b. Direksi disarankan melakukan evaluasi yang sangat cermat atas kegiatan-kegiatan investasi yang menjadi targetnya, terutama terkait imbal hasil investasi.

c. Melakukan evaluasi kembali atas Kebijakan Investasi yang telah dimilikinya (*termasuk Standard Operating Procedure/"SOP"*), terutama terkait dengan kegiatan pembelian *distressed aset* / NPL dari perbankan, dan menyiapkan opsi-opsi yang paling optimal untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut, terutama dalam hal kewajiban pembentukan CKPN.

5. Perbendaharaan

a. Sehubungan dengan kegiatan *trading* surat berharga, Direksi disarankan untuk melakukan manajemen kegiatan *trading* tersebut dengan baik, termasuk keputusan untuk melakukan penghentian kerugian (*cut loss*) atas surat berharga yang memiliki potensi imbal hasil negatif. Dengan demikian seluruh kewajiban PT PPA kepada pihak ketiga dapat dipenuhi sesuai dengan perjanjian dengan tepat waktu.

b. Direksi disarankan untuk meningkatkan *monitoring* secara periodik atas pendapatan yang bersifat *accrual* terutama dari BUMN-BUMN RR.

6. Pengelolaan Perusahaan Anak

a. Direksi agar melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kinerja perusahaan anak, baik pencapaian pendapatan usaha maupun pengendalian atas biaya/beban, agar tidak membebani perusahaan.

b. Direksi hendaknya mengembangkan mitigasi risiko yang memadai untuk dapat mengambil langkah-langkah penanganan secara dini apabila timbul permasalahan pada masing-masing perusahaan anak. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan Anak dapat dikelola dengan baik.

7. Dukungan Kinerja

a. Mengingat sebagian besar kegiatan bisnis (investasi dan RR BUMN) dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman, Direksi PT PPA disarankan untuk segera menyesuaikan kebijakan akuntansi dan keuangan, yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan PT PPA utamanya dalam memperhitungkan dampak atas penerapan PSAK.

b. Sesuai Kebijakan Kementerian BUMN, Direksi diminta untuk mengimplementasikan BUMN *Talent Management System* secara berkesinambungan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Direksi agar dapat mempercepat proses ketersediaan sistem pelaporan dan analisis data terintegrasi berbasis Teknologi Informasi ("TI").

d. Direksi disarankan untuk dapat lebih meningkatkan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Divisi Manajemen Risiko khususnya dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan, khususnya penerapan ISO 37001 terkait sistem Manajemen Anti Penyuapan.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Dengan peran utama untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, Dewan Komisaris secara tidak langsung merepresentasikan cara pandang pemegang saham untuk melihat sejauh mana Direksi mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Representasi ini menjadi faktor mendasar bagi Dewan Komisaris untuk melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

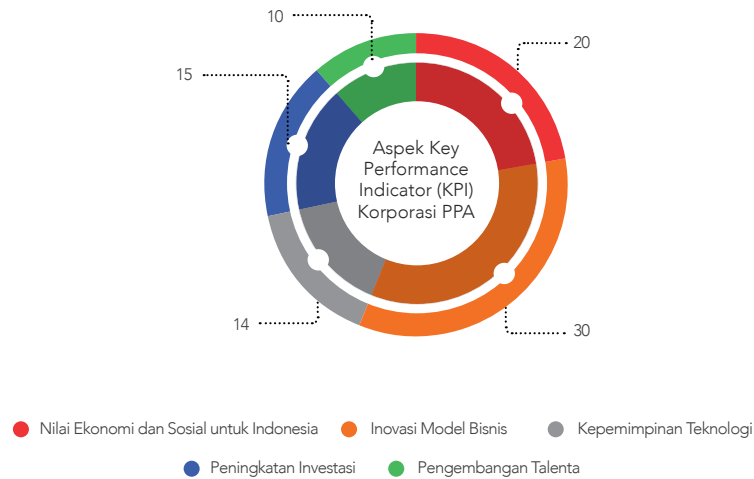
Pengukuran pencapaian kinerja oleh Direksi dirumuskan melalui pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta target-target, khususnya target yang disusun oleh Direksi terkait target korporasi Perusahaan. Hasil kajian kemudian dituangkan pada rencana target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang kemudian dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris untuk dapat disetujui dan diajukan kepada pemegang saham. Di dalam RKAP tersebut tercantum Kontrak Manajemen yang menyepakati target-target dalam RKAP menjadi salah satu bentuk penilaian atas pencapaian kinerja Perusahaan.

Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2020;
2. Pencapaian Kinerja Operasional dan Keuangan tahun 2020;
3. Pelaksanaan implementasi GCG tahun 2020.



KPI Kontrak Manajemen, sebagaimana telah dicantumkan dalam Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 dan Kontrak Manajemen Perusahaan yang telah ditetapkan melalui Surat Menteri BUMN No. S-1093/MBU/11/2020 tanggal 30 November 2020 mengenai persetujuan penetapan Revisi KPI Direksi secara kolegal Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), terdiri dari 5 (lima) aspek utama yang kemudian terbagi ke dalam beberapa aspek penilaian turunan.



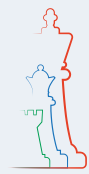
Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris mampu membawa Perusahaan mencapai KPI Korporat dengan skor sebesar 96,62.

Hasil Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2020



Target dan evaluasi kinerja formal tersebut menjadi hal mendasar bagi Direksi sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk dapat mewujudkan aspirasi pemegang saham. Hal ini terlihat dari hak pemegang saham untuk dapat menerima atau menolak laporan kinerja korporasi Perusahaan pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur pertimbangan bagi pemegang saham untuk memutuskan kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas pencapaian KPI tahun 2020 seperti yang terlihat di atas, meskipun terdapat beberapa pencapaian yang menjadi catatan sebagai bagian dari evaluasi dan Dewan Komisaris berharap bahwa Direksi terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dalam memenuhi aspirasi pemegang saham.



PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA DARI PERUSAHAAN YANG DISUSUN DIREKSI

Dalam rencana pengembangan tahun 2021 yang tertuang dalam RKAP tahun 2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham, melalui Aspirasi Pemegang Saham (APS) No. S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021, Perusahaan diharapkan mampu memenuhi beberapa hal yang menjadi aspirasi pemegang saham, baik dalam hal pencapaian kinerja keuangan maupun pengelolaan proses bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Dewan Komisaris menyambut baik beberapa rencana strategis yang telah disusun oleh Direksi. Optimalisasi bisnis yang telah dijalankan saat ini, yaitu pengelolaan aset, restrukturisasi dan/ atau revitalisasi, investasi, konsultasi (*advisory*), pengelolaan NPL Perbankan, dan pengelolaan RR BUMN Titip Kelola, diharapkan dapat memberikan pertumbuhan bagi kinerja keuangan Perusahaan. Di samping itu, optimalisasi bisnis entitas anak juga diharapkan mampu menciptakan peluang bagi peningkatan kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris telah menyetujui beberapa proyeksi kinerja keuangan Perusahaan, baik proyeksi Aset tumbuh hingga 63,34%, Pendapatan Usaha meningkat 53,64%, serta Laba Bersih diharapkan dapat tumbuh hingga 12,09% dari realisasi tahun 2020. Dewan Komisaris memandang bahwa proyeksi ini sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki Perusahaan, khususnya dalam menghadapi tantangan di tahun 2021.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham dari Pemerintah Republik Indonesia, dan regulator yang berkepentingan pada perkembangan dunia usaha Indonesia, telah berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip dan praktik GCG sebagai sebuah nilai yang wajib diemban oleh seluruh BUMN. Perusahaan menyambut dengan tangan terbuka atas niat baik dari regulator, terutama karena penerapan GCG melalui 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, terbukti memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi.

Di samping memperkuat struktur permodalan Perusahaan, penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 juga berimbas pada status Perusahaan yang kini menjadi emiten dan bergabung dalam korporasi yang tercatat di pasar modal. Hal ini juga berdampak pada meluasnya kepatuhan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, khususnya kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan pasar modal.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris memandang implementasi GCG di lingkup Perusahaan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, khususnya di tahun 2020 dimana Perusahaan tercatat sebagai emiten. Pengembangan struktur organ dan perangkat kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan GCG, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik GCG di seluruh elemen operasi dan bisnis Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & GCG, dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dibentuk di tahun 2020 dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit memiliki fungsi utama untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit guna mendapatkan kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Pemantau Risiko & GCG membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik di lingkup Perusahaan; termasuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi menjalankan fungsi tata kelola nominasi dan remunerasi di lingkup Perusahaan, khususnya dalam hal suksesi Direksi.

Kunci utama dari pelaksanaan prinsip GCG adalah pengelolaan risiko di hulu sebagai *early warning system*, membentuk dan menjalankan kesadaran risiko operasional Perusahaan dan pengelolaan keuangan, serta proses atau tahapan audit di hilir; baik audit secara internal maupun audit independen yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Keberadaan Komite Pemantau Risiko & GCG di bawah Dewan Komisaris, serta fungsi Manajemen Risiko dan Komite Investasi & Manajemen



Risiko di bawah Direksi telah menunjukkan keseriusan Perusahaan dalam pengelolaan risiko yang berimbang. Pada tingkat audit, Komite Audit di bawah Dewan Komisaris dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di bawah Direksi membentuk komposisi pengelolaan audit yang baik, yang dibarengi dengan audit independen atas laporan keuangan Perusahaan oleh Akuntan Publik.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah manajemen untuk melakukan *assessment* atau penilaian penerapan GCG secara periodik tahunan, yang didasarkan pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. *Assessment* penerapan GCG untuk tahun 2020 dilakukan melalui metode *Self Assessment* oleh tim internal dengan capaian skor sebesar 90,06 dengan predikat "Sangat Baik", mengalami peningkatan dari skor *assessment* penerapan GCG oleh pihak independen pada tahun 2019 dengan skor 88,53 juga dengan predikat "Sangat Baik". *Assessment* penerapan GCG dapat memberikan gambaran tentang kemajuan penerapan GCG yang telah dilakukan Perusahaan, yang didapatkan dari rekomendasi yang menjadi evaluasi dan peningkatan penerapan GCG Perusahaan di masa mendatang.

Lebih dari itu semua, Dewan Komisaris memandang penerapan prinsip GCG terletak pada komitmen seluruh Insan PPA untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan fundamental ini menjadi tanggung jawab Direksi untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang dilandasi oleh integritas seluruh pihak. Dewan Komisaris berkomitmen untuk bahu-membahu bersama-sama dengan Direksi dalam upaya meletakkan fondasi tersebut, dan memperkuat pertumbuhan kinerja Perusahaan dengan basis fondasi yang kuat.

Dewan Komisaris berharap, seluruh upaya untuk mengembangkan penerapan GCG oleh Direksi turut memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WHISTLEBLOWING SYSTEM PERUSAHAAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan pengaduan atau pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkup Perusahaan dengan mengutamakan kerahasiaan identitas pelapor. Perusahaan telah memiliki WBS yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-3/PPA/0119 tanggal 14 Januari 2019 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*-WBS), yang memperbarui pedoman WBS sebelumnya.

Mekanisme WBS Perusahaan diterapkan dalam rangka menegakkan peraturan serta semangat keterbukaan terhadap pelaporan dari pihak manapun. Pihak pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim); terkecuali jika terdapat langkah hukum yang mengharuskan identitas pelapor menjadi terbuka di hadapan pengadilan. Perusahaan memiliki Fungsi Penerima Laporan yang berasal dari Divisi Satuan Pengawasan Intern ("SPI"). Fungsi ini dibentuk secara khusus untuk mengelola seluruh pengaduan laporan yang masuk untuk diverifikasi dan diproses ke tahapan selanjutnya. Dalam mekanisme WBS yang berlaku di Perusahaan, Dewan Komisaris berperan sebagai pemantau akhir, terutama jika terdapat pelaporan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS yang memiliki tingkat urgensi tinggi. Selain itu, Dewan Komisaris juga menjadi penerima laporan di tingkat puncak, apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi. Sebaliknya, jika yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama. Laporan yang masuk kepada Dewan Komisaris akan diverifikasi dan ditelaah lebih lanjut, dan akan mengambil langkah-langkah terbaik jika diperlukan.

Di sepanjang tahun 2020, terdapat 2 (dua) pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS, dan telah ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang masih dalam proses lanjutan.



PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Seperti dijelaskan sebelumnya, Dewan Komisaris membentuk 4 (empat) organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & GCG, dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dibentuk di tahun 2020. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui Komite dilakukan atas aspek-aspek strategis dan operasional Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komite. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & GCG, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, mengadakan rapat-rapat dengan manajemen, serta bersama-sama melakukan telaahan terhadap usulan aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi, mengevaluasi laporan berkala yang disampaikan manajemen, *monitoring* tindak lanjut hasil auditor/assessor baik internal maupun eksternal, serta mendampingi Komisaris dalam kunjungan kerja. Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & GCG dan Komite Nominasi dan Remunerasi pada periode tahun 2020 tergolong sangat baik dengan pencapaian nilai masing-masing di atas 97% terhadap target rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2020 Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan perubahan jumlah dan susunan Dewan Komisaris, dengan kronologi sebagai berikut.

Kronologi Perubahan Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2020

Periode 1 Januari - 27 April 2020	Periode 27 April - 9 Oktober 2020	Periode 9 Oktober - 31 Desember 2020	Keterangan
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama)	Edy Putra Irawady (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)		Pada 27 April 2020, Pemegang Saham menunjuk Edy Putra Irawady yang sebelumnya telah menjadi Komisaris Utama untuk merangkap Komisaris Independen. Edy Putra Irawady tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen.
Didyk Choirel (Komisaris)	Didyk Choirel (Komisaris)		Didyk Choirel tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020.
Tirta Hidayat (Komisaris Independen)	Tirta Hidayat (Komisaris Independen)		Tirta Hidayat tidak lagi menjabat sebagai Independen sejak 9 Oktober 2020.
	Himawan Hariyoga Djojokusumo (Komisaris)		Pada 27 April 2020, Pemegang Saham mengangkat Himawan Hariyoga Djojokusumo untuk menjabat Komisaris. Himawan Hariyoga Djojokusumo tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020.
		Krisna Wijaya (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	Pada 27 April 2020, Pemegang Saham mengangkat Krisna Wijaya untuk menjabat Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
		Marwanto Harjowirjono (Komisaris)	Pada 27 April 2020, Pemegang Saham mengangkat Marwanto Harjowirjono untuk menjabat Komisaris.



Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Krisna Wijaya (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025	Ke-1
Marwanto Harjowirjono (Komisaris)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025	Ke-1

PENUTUP

Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris menghaturkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian pula kepada regulator dan para pemangku kepentingan, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. Kepada Direksi dan karyawan, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan rasa bangga atas sinergi yang telah tercipta. Semoga hubungan yang harmonis ini mampu menjadi dasar bagi Perusahaan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

Jakarta, 27 April 2021

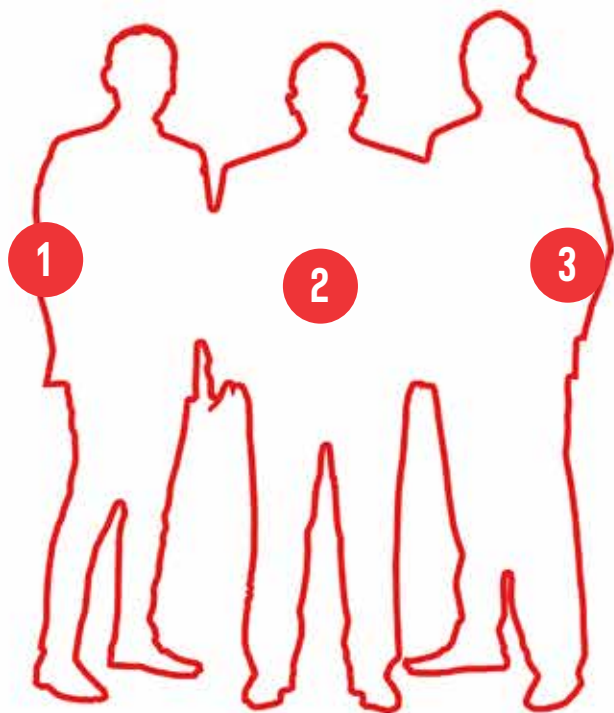
Atas nama Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero),

Krisna Wijaya

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen



DIREKSI



1

RIZWAN RIZAL ABIDIN

DIREKTUR INVESTASI 1 & RESTRUKTURISASI

2

YADI JAYA RUCHANDI

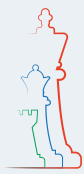
DIREKTUR UTAMA

3

ADI PAMUNGKAS DASKIAN

DIREKTUR INVESTASI 2





LAPORAN DIREKSI

YADI JAYA RUCHANDI

DIREKTUR UTAMA

Peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN semakin diperluas melalui SKK Menteri BUMN kepada PPA pada 30 September 2020. Melalui SKK ini, Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham memberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham kepada PPA untuk melakukan tindakan penanganan terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.





Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan keunggulan kompetitif pada bidang pengelolaan dan restrukturisasi aset, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berperan dalam perkembangan korporasi Indonesia khususnya BUMN, yang kedepannya akan menjadi Manager Investasi Nasional atau *National Asset Management Company* (NAMCO) dengan spesialisasi menjalankan program *turn around* untuk mendapatkan solusi atas penanganan BUMN restrukturisasi, *Special Situation Fund* (SSF) dan pengelolaan *non-performing loan* (NPL) Perbankan. Izinkan saya mewakili Direksi dan seluruh jajaran untuk menyampaikan berbagai pencapaian Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, serta intisari laporan kinerja Perusahaan di tahun buku 2020.

2020: MELETAKKAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU NAMCO

Tahun 2020 menjadi fondasi penting bagi perjalanan PPA ke depan. Di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian global dan nasional, PPA semakin mendapatkan kepercayaan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian BUMN selaku pemegang saham, untuk melaksanakan penugasan BUMN Titip Kelola sesuai Surat Kuasa Khusus ("SKK") Menteri BUMN kepada PPA tanggal 30 September 2020. SKK ini memberikan PPA peranan yang lebih luas setelah sebelumnya menjalankan peran dalam menjalankan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN. Penugasan BUMN Titip Kelola menunjukkan kepercayaan besar pemegang saham kepada PPA untuk dapat melakukan *rightsizing* dan penguatan BUMN Indonesia. Dengan peran BUMN sebagai agen perubahan dan lokomotif bagi akselerasi perekonomian Indonesia, kebijakan *rightsizing* BUMN tentunya akan memberikan dorongan yang kuat bagi pemulihan dan perkembangan perekonomian Indonesia pasca pandemi.

Penugasan BUMN Titip Kelola kepada PPA ini tidak terlepas dari kebijakan transformasi BUMN oleh Kementerian BUMN melalui rencana pembentukan *Holding Strategis*, dimana PT Danareksa (Persero) dipersiapkan sebagai *holding*, dengan PPA yang akan bersinergi dalam *holding* tersebut dan berperan mengimplementasikan *centre of excellence* dalam kegiatan restrukturisasi aset dan manajemen aset BUMN.

Sebagai langkah strategis menuju NAMCO, PPA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 senilai Rp642,10 miliar yang ditawarkan melalui 3 (tiga) seri pada 1 September 2020. Penerbitan obligasi korporasi

perdana sepanjang sejarah Perusahaan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan jangka Panjang Perusahaan. Penerbitan obligasi ini juga akan membawa PPA ke level berikutnya dengan memberikan dampak yang besar bagi organisasi dan kepatuhan PPA sebagai emiten yang memperdagangkan surat utangnya kepada publik.

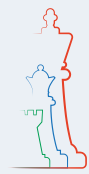
Berbagai peristiwa penting di tahun 2020 ini menjadi langkah besar bagi PPA dalam memperkuat posisinya ke depan, terutama dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan kepada pemegang saham, serta berkontribusi bagi pembangunan dan pemerataan ekonomi yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia melalui penguatan korporasi BUMN.

MEMPERKUAT KORPORASI BUMN: INISIASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020

Sebagai entitas usaha yang memiliki jejak sejarah dari lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, PPA dipercaya untuk berperan dalam melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, yang kemudian diperluas dengan peran melakukan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN; termasuk kegiatan investasi dan pengelolaan aset BUMN yang ditugaskan oleh Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham.

Selain itu, PPA juga mengembangkan model bisnis baru, yaitu penanganan *non-performing loan* (NPL) perbankan. Inisiatif ini tak lepas dari upaya PPA dalam menerjemahkan aspirasi pemegang saham, khususnya dalam pengelolaan NPL perbankan di Indonesia.

Di tahun 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN semakin diperluas melalui Surat Kuasa Khusus ("SKK") yang diterbitkan Menteri BUMN kepada PPA pada 30 September 2020. SKK ini tak lepas dari kebijakan strategis Menteri BUMN untuk mendukung pelaksanaan program *rightsizing* BUMN. Melalui SKK ini, Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham memberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham kepada PPA untuk melakukan tindakan penanganan terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham yang dimaksud adalah



sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan beberapa batasan yakni perihal permodalan dan eksistensi BUMN masih sepenuhnya dalam kewenangan Menteri BUMN.

PPA menyambut baik kepercayaan yang diberikan Pemerintah melalui penerbitan SKK ini. Sebagai Langkah pelaksanaannya, PPA melakukan beberapa kebijakan strategis khususnya dalam hal restrukturisasi. Pertama, PPA akan mengkaji bidang usaha BUMN untuk menemukan potensi unggul dari setiap BUMN. PPA juga akan melakukan klasifikasi BUMN per sektor dan melihat peluang apakah BUMN tersebut dapat dikerjasamakan dengan BUMN lain yang bergerak di dalam sektor usaha serupa. Selain itu, PPA akan mengembalikan fokus BUMN tersebut pada *core business*-nya.

PPA mengklasifikasikan BUMN Titip Kelola dalam Kelompok Restrukturisasi ke dalam 2 kelompok tipe pengelolaan, yakni:

1. BUMN *Turn-around* dan Restrukturisasi
Merupakan kelompok BUMN Restrukturisasi yang memiliki isu kritikal pada neraca keuangan yang membutuhkan pengelolaan untuk mendapatkan model bisnis yang berkelanjutan;
2. BUMN Divestasi/Penutupan Usaha
Merupakan kelompok BUMN Restrukturisasi yang berdasarkan hipotesis awal sudah tidak memiliki prospek usaha, rendah dalam kapasitas usaha dan kekuatan keuangan yang buruk.

Tindak lanjut PPA atas SKK ini juga berjalan beriringan dengan kebijakan transformasi BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN melalui rencana pembentukan *Holding Strategis*, di mana PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") dipersiapkan untuk menjadi *holding*, dengan PPA yang akan bersinergi dalam *holding* tersebut dan berperan mengimplementasikan *centre of excellence* dalam kegiatan restrukturisasi aset dan manajemen aset BUMN. Selain itu, PPA juga akan berperan aktif dalam pengelolaan NPL Perbankan dan pelaksanaan SSF.

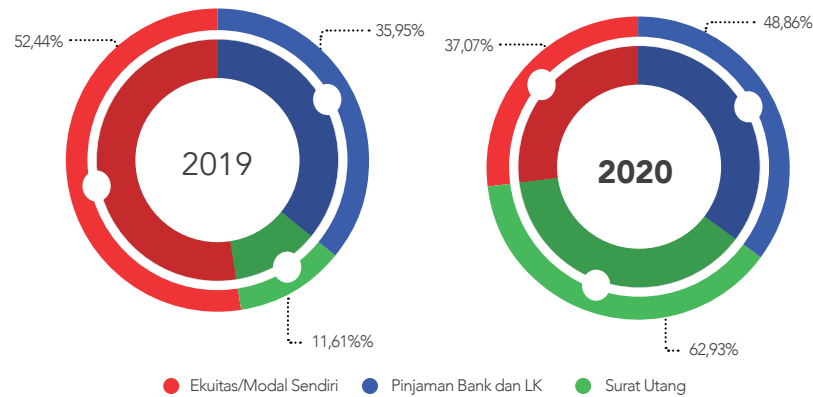
Di sepanjang tahun 2020, Danareksa dan PPA telah melaksanakan berbagai program sinergi guna memperlancar rencana realisasi pembentukan *holding* di tahun 2021. Di bulan November 2020, Danareksa bersama PPA telah menyusun strategi besar dan *Roadmap Holding Strategis*. Hingga akhir tahun 2020, Danareksa bersama PPA sedang menyusun Buku Putih kajian rencana inbreng saham PPA kepada Danareksa. Langkah selanjutnya adalah Rapat Terbatas dengan Presiden tentang pembentukan *Holding Strategis* Danareksa-PPA.

Pada aspirasi pemegang saham kepada PPA terkait penanganan dan pengelolaan NPL perbankan, PPA memandang kegiatan ini merupakan tanggung jawab yang besar, khususnya dalam membantu pemerintah melakukan upaya preventif dari dampak sistemik perbankan. Pada kegiatan ini, PPA memiliki peran untuk menangani dan mengelola aset NPL beberapa perbankan, dengan tujuan membersihkan perbankan dari beban aset yang tidak produktif dan meningkatkan postur perbankan untuk dapat kembali ke jalur yang tepat. Kegiatan ini telah berjalan sejak tahun sebelumnya, dimana beberapa lembaga perbankan telah bekerja sama dengan PPA dalam penanganan NPL yang dimilikinya, baik melalui pengambilalihan NPL yang dilakukan dengan skema *cessie* untuk selanjutnya PPA melakukan penambahan modal kerja debitur bank, penanganan NPL melalui pemberian pinjaman modal kerja kepada debitur bank, maupun penanganan NPL melalui pembelian piutang bank. Dengan adanya beberapa portofolio yang telah berjalan, PPA berkeyakinan bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, terutama melalui sinergi dengan Danareksa dalam pembentukan *Holding Strategis* yang akan memperkuat PPA sebagai NAMCO.

Tahun 2020 juga menjadi tahun penting bagi PPA. Di tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian, pada tanggal 1 September 2020, PPA menerbitkan obligasi korporasi di BEI dengan nama Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020. Obligasi ini mendapatkan peringkat idA (*Single A*) dari pemeringkat PEFINDO. Jumlah pokok Obligasi ini senilai Rp642,10 miliar yang ditawarkan melalui 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp100 miliar dengan kupon tetap sebesar 9,55% per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan jatuh tempo pada 1 September 2023;
2. Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp345 miliar dengan kupon tetap sebesar 10,55% per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan jatuh tempo pada 1 September 2025; dan
3. Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp197,10 miliar dengan kupon tetap sebesar 11,00% per tahun untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun yang akan jatuh tempo pada 1 September 2027.

Penerbitan Obligasi ini berdampak positif pada Perusahaan. Selain memperkuat struktur pendanaan dengan kupon kompetitif dan memiliki jangka yang panjang, penerbitan obligasi memberikan gambaran bagi PPA akan kepercayaan publik, khususnya investor pasar modal dalam memandang kegiatan operasi dan bisnis serta proyeksi PPA. Penerbitan obligasi yang dilakukan PPA juga memperkuat struktur permodalan yang dimiliki, khususnya dalam menjalankan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN serta penanganan NPL perbankan.

**Struktur Permodalan PPA**

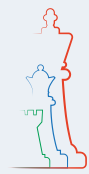
Dari bagan di atas, dapat dilihat bahwa penerbitan obligasi juga berpengaruh pada komposisi permodalan PPA dimana total surat utang yang diterbitkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,46% dibandingkan tahun 2019. Obligasi ini diterbitkan dengan tujuan agar PPA memiliki permodalan murah dengan tempo yang lebih lama. Struktur permodalan penting untuk menggambarkan kekuatan PPA dalam melaksanakan penugasan yang diberikan dan memenuhi aspirasi dari pemegang saham.

Dari sisi proses bisnis, PPA terus melakukan inovasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif dan meningkatkan daya saing Perusahaan guna menjawab kebutuhan-kebutuhan di industri yang semakin dinamis dan menantang. Kebutuhan akan korporasi yang gesit, tangguh, efisien dan efektif, serta siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman, menjadi suatu keharusan yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta modernisasi sistem melalui implementasi Teknologi Informasi serta penerapan kultur digital di lingkungan kerja PPA.

Satu hal yang patut dibanggakan dari PPA di tahun 2020 adalah raihan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik Tahun 2020 dengan klasifikasi "Cukup Informatif" pada 25 November 2020, yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Komisi Informasi Pusat. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi KIP Tahun 2020 diikuti oleh 348 Badan Publik yang terdiri dari sektor Pemerintah Provinsi, Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Penghargaan yang diterima PPA ini menunjukkan keberhasilan PPA dalam mengelola keterbukaan informasi kepada publik, khususnya bagi PPA yang di tahun 2020 telah menyandang status sebagai emiten yang memperdagangkan obligasi di Bursa Efek Indonesia.

Adanya pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap industri dan korporasi di Indonesia. Hal ini tercermin melalui pendapatan dari segmen Konstruksi yang dikonsolidasikan dari entitas anak, PT Nindya Karya, yang mengalami penurunan hingga berdampak terhadap pendapatan konsolidasian PPA. Meskipun demikian, di tengah kondisi yang penuh tantangan, PPA tetap mampu membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp105,77 miliar

Pada posisi keuangan, di tahun 2020 jumlah Aset PPA sebesar Rp12,96 triliun, Liabilitas sebesar Rp9,30 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp3,66 triliun. Terdapat kenaikan pada jumlah Liabilitas sejalan dengan penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020.



PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Rencana kerja dan target kinerja PPA tahun 2020 tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pada akhir Oktober 2019, PPA telah menyelesaikan RKAP 2020 yang disusun berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Munculnya Pandemi COVID-19 pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020 memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian khususnya kinerja finansial dan operasional keseluruhan BUMN, yang kemudian disikapi oleh Kementerian BUMN dengan mengeluarkan Surat No.S-46/Wk.2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Perubahan RKAP 2020 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II dan surat No.S-2/Wk.2.MBU.A/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan/Revisi RKAP Tahun 2020. Berdasarkan surat ini, serta mempertimbangkan potensi risiko atas dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja Perusahaan, maka PPA melakukan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2020 ("Revisi RKAP 2020").

Berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), atau Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan dalam Perubahan/Revisi RKAP Tahun 2020, PPA mampu mencatat skor 96,62 dari target skor 100. KPI terbagi ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Dari masing-masing aspek diterjemahkan kembali ke dalam beberapa indikator yang memberikan gambaran tentang lingkup tugas dan target capaian yang diberikan.

Pada aspek finansial yang termasuk dalam Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, PPA mampu membukukan skor di atas target. Target pendapatan usaha, tingkat imbal aset atau *Return on Asset* (ROA), serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mencatat pencapaian di atas target, sedangkan rasio utang terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER) tercatat belum mencapai target.

Aspek sosial juga menjadi salah satu indikator tahun 2020 yang termasuk dalam Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia. Pada aspek ini, PPA ditargetkan mampu mengembangkan kerja sama melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada wilayah kerja PPA Group serta penanganan pandemi COVID-19. Kedua indikator ini berhasil dibukukan dengan pencapaian di atas target.

Pencapaian target penting lainnya adalah Inovasi Model Bisnis, dimana di dalamnya tercakupkan indikator penyampaian Rencana Pengembangan Model Bisnis

PPA sebagai *National Asset Management Company* (NAMCO) kepada Kementerian BUMN, termasuk rencana integrasi penggabungan PT Danareksa (Persero) dan PT PPA (Persero) dan integrasi Kluster-kluster BUMN inbreg ke dalam entitas baru PPA-Danareksa; *Framework Risk Management* dan *Good Corporate Governance* (GCG); serta penyelesaian Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Nindya Karya. Dari target, PPA mampu membukukan skor 5,4 sehubungan dengan penyelesaian Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2019 yang masih dalam proses.

Indikator lainnya yang tak kalah penting adalah target perolehan mandat untuk menjadi *arranger* transaksi pendanaan alternatif (*alternative financing*), target perolehan mandat untuk menjadi *coordinating/financial advisor* dalam transaksi merger, akuisisi, *Pre-IPO*, *pre-IPO financing* dan IPO, penyelesaian restrukturisasi atas aset investasi tidak produktif, dengan target 25% dari total aset investasi tidak produktif, dimana dari ketiga indikator ini PPA mampu membukukan pencapaian di atas target.

Di samping itu, PPA juga memantau target melalui indikator Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2020, PPA memperoleh skor 83,25 dari target skor sebesar 86 yang ditetapkan dalam Perubahan/Revisi RKAP Tahun 2020. Perolehan skor 83,25 ini juga memastikan PPA termasuk dalam BUMN dengan kategori "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA".

KENDALA, TANTANGAN, DAN PENYELESAIANNYA

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tantangan terbesar dari pelaksanaan tugas yang diberikan kepada PPA adalah pengelolaan struktur permodalan dan optimalisasi sumber pendanaan. Dengan penugasan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN dan kegiatan pengelolaan NPL perbankan, PPA membutuhkan permodalan yang besar dengan termin jangka panjang dan bunga yang kompetitif.

Secara bertahap, tantangan ini mampu dijawab melalui penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan 3 (tiga) seri Obligasi yang memiliki durasi jatuh tempo yang variatif serta bunga yang cukup kompetitif, PPA berhasil mengumpulkan pendanaan yang cukup murah dibandingkan skema pendanaan yang selama ini dilakukan.



Di samping itu, penguatan struktur modal melalui penerbitan Obligasi dengan skema panjang dan bunga yang kompetitif ini berimbang penting dalam proses bisnis PPA. Pengelolaan permodalan akan menjadi sebuah fondasi penting bagi PPA untuk dapat melakukan serangkaian kebijakan strategis terkait penugasan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN dan kegiatan pengelolaan NPL perbankan, khususnya dalam rangka mewujudkan cita-cita PPA untuk menjadi *National Asset Management Company*.

Tantangan lainnya adalah bagaimana PPA dapat bersinergi dengan korporasi lainnya, khususnya BUMN, untuk mewujudkan penguatan korporasi BUMN Indonesia. Sinergi yang telah dilakukan dengan Danareksa menjadi sebuah landasan kuat bagi peta jalan pengembangan bisnis PPA ke depan, khususnya dalam pembentukan *Holding Strategis*. Diterbitkannya SKK oleh Menteri BUMN kepada PPA tentu harus dibarengi dengan keinginan kuat dari berbagai BUMN yang akan masuk dalam program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi untuk dapat berkolaborasi dan menemukan keunggulan kompetitif masing-masing, serta mampu mencapai kinerja yang diharapkan.

PROSPEK USAHA TAHUN 2021

Sebagai entitas usaha yang mendukung penguatan korporasi di Indonesia khususnya korporasi BUMN, PPA mendukung optimisme Pemerintah Indonesia untuk dapat menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 melalui program vaksinasi nasional dan penurunan jumlah kasus COVID-19. Penanggulangan pandemi COVID-19 diharapkan akan mendorong kembali aktivitas masyarakat seperti sedia kala, khususnya aktivitas korporasi sebagai gerbang bagi gerak laju perekonomian negara.

PPA telah menyelesaikan RKAP tahun 2021 yang disusun sesuai Aspirasi Pemegang Saham (APS) No. S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.

Pada RKAP tahun 2021 tersebut PPA diharapkan menjadi perusahaan dengan spesialisasi *turn-around* terbesar di Indonesia yang senantiasa mengedepankan fokus kegiatan usaha dalam pelaksanaan *turn-around* dan membangun kinerja perusahaan dengan menitikberatkan pada terciptanya suatu solusi atas NPL, restrukturisasi, transformasi perusahaan dan pengelolaan aset dan saham minoritas.

Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan diharapkan dapat merealisasikan langkah strategis sebagai berikut:

1. Turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui pengelolaan NPL Perbankan.
2. Memperkuat posisi PPA sebagai *Asset Management Company* (AMC) dan mengoptimalkan manfaat melalui pengelolaan NPL untuk memberikan nilai bagi pemangku kepentingan.

3. Menciptakan sinergi dengan mitra strategis pada sektor keuangan.
4. Menciptakan nilai ekonomi yang optimal dan bertumbuh.
5. Mencapai pengelolaan aset yang optimal melalui, namun tidak terbatas pada, program special situation fund (SSF).
6. Mengoptimalkan kapasitas pendanaan dan struktur modal.
7. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, serta mencerminkan budaya akhlak.

Untuk mencapai hal tersebut, PT PPA dan Entitas Anak Perusahaan telah menyusun berbagai strategi usaha dan kebijakan perusahaan yang sejalan dengan program kerja atau program kegiatan baik yang akan dilaksanakan di PPA Induk maupun di Entitas Anak Perusahaan. Adapun target keuangan konsolidasian pada RKAP 2021 adalah sebagai berikut:

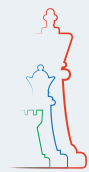
(dalam jutaan rupiah)

IKHTISAR KEUANGAN RKAP 2021 – KONSOLIDASIAN		
1	Total Aset	21.839.792
2	Total Liabilitas	15.071.146
3	Total Ekuitas	6.768.646
4	Pendapatan Usaha	6.774.942
5	Beban Usaha	6.374.913
6	Laba Usaha	400.029
7	Laba Bersih Tahun Berjalan	122.551

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2020

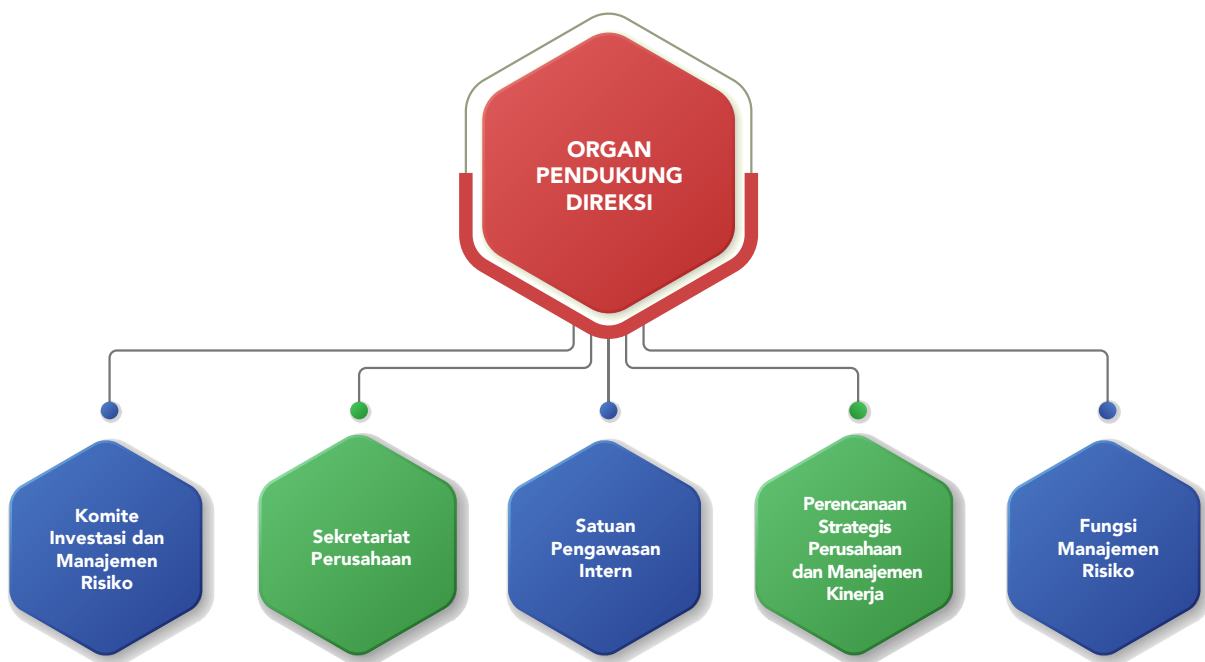
Penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 tidak hanya memberikan dampak yang baik terhadap penguatan struktur permodalan PPA, namun juga menghadirkan tantangan baru tentang pengelolaan berbasis kepatuhan terhadap regulator pasar modal dan pasar keuangan. Sejak diterbitkannya Obligasi tersebut, PPA menyandang status emiten yang berdampak besar terhadap penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya terkait kepatuhan. Penerapan prinsip GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan menyandang status sebagai emiten sekaligus sebagai BUMN yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia, PPA memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen telah mengupayakan untuk melaksanakan seluruh prinsip GCG yang dituangkan dalam skema organisasi dan perangkat kebijakan, maupun berbagai program dan kegiatan. Pada perangkat kebijakan, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun



berbagai pedoman dan peraturan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perusahaan. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ dapat terjalin dengan harmonis, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Perusahaan juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham untuk menentukan beberapa kebijakan strategis terbatas bagi kelangsungan Perusahaan.

Keberadaan berbagai organ pendukung Direksi seperti Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis Manajemen dan Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko, hingga Komite Investasi dan Manajemen Risiko, menandakan keseriusan manajemen untuk melakukan pengelolaan organisasi yang akuntabel dan memiliki prinsip kehati-hatian. Organ pendukung ini menciptakan pola pengendalian internal yang sistematis; mulai dari pengelolaan risiko di hulu hingga audit internal di hilir.



Agar Struktur Tata Kelola yang tergambar pada bagan di atas, serta Proses atau Mekanisme Tata Kelola sebagai aturan main yang tertuang dalam perangkat kebijakan dapat berjalan dengan baik, PPA melakukan evaluasi atas Hasil Tata Kelola yang dapat memberikan gambaran sejauh mana penerapan prinsip CGG telah berjalan. Hasil Tata Kelola kemudian dievaluasi melalui *assessment* penerapan GCG, yang didasarkan pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Penilaian meliputi 6 (enam) aspek yaitu aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, aspek Direksi, aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta aspek lainnya.

Berdasarkan hasil *assessment* atas penerapan prinsip GCG di PPA untuk tahun 2020 yang dilakukan secara mandiri, PPA berhasil meraih skor 90,065 atau dengan predikat "Sangat Baik". Penerapan prinsip GCG PPA mengalami peningkatan sebesar 1,53 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesungguhan jajaran Direksi untuk fokus dalam penerapan prinsip GCG di PPA. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak independen maupun secara mandiri, implementasi GCG PPA selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa GCG telah menyatu dalam budaya kerja Perusahaan. Terkait dengan status PPA sebagai emiten obligasi, PPA secara berkala memenuhi kewajibannya dalam bentuk penyampaian laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia. Pada akhirnya, faktor integritas menjadi kunci bagi penerapan prinsip GCG. Manajemen menekankan pentingnya integritas sebagai hal mendasar dalam pembentukan etika seluruh insan PPA, baik etika usaha maupun etika keseharian. Dengan integritas yang tinggi, PPA akan mampu mewujudkan keinginannya untuk memperkuat keunggulan kompetitif, dan menjadi mitra bagi korporasi lain.



UPAYA MEMBANGUN KEBERLANJUTAN

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui disahkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

PPA berupaya untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui komitmen atas keberadaannya yang harus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan operasi dan bisnis yang beretika, sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, menjadi salah satu bentuk komitmen kuat PPA untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan rantai operasi dan bisnis PPA.

Tak hanya itu, sebagai perusahaan BUMN, PPA telah mengembangkan program tanggung jawab sosial yang efektif dan tepat sasaran melalui penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hingga akhir tahun 2020, PPA telah menyalurkan dana Program Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kepada 1062 mitra binaan yang tersebar di 18 provinsi dengan nilai penyaluran lebih dari Rp80 miliar. Pada Program Pembiayaan Non-UMK, PPA mengembangkan berbagai program seperti Program Bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah, Program Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Program Bantuan Peningkatan Kesehatan, Program Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Program Bantuan Sarana Ibadah, Program Bantuan Pelestarian Alam, Program Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dengan total penyaluran sebesar Rp32 miliar.

Ke depan, dengan perluasan bisnis inti dalam pengelolaan dan optimalisasi korporasi BUMN, PPA berkomitmen untuk mendorong seluruh BUMN yang berada di bawah pengelolaan PPA untuk dapat bersinergi dan terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat terwujud secara utuh.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR DI TAHUN 2020

Di sepanjang tahun 2020 Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan perubahan nomenklatur jabatan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Iman Rachman sebagai Direktur Utama PPA.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi PPA:
 - Sdr. Nasrizal Nazir sebagai Direktur Investasi;
 - Sdr. Dikdik Permadi Yoffana sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen;
- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PPA sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Investasi	Direktur Investasi 1
	Direktur Investasi 2
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen	Direktur Restrukturisasi
---	Direktur Hukum dan SDM

- Mengalihkan penugasan Sdr. R. M. Irwan, semula Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja menjadi Direktur Hukum dan SDM PPA.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PPA, yaitu:
 - Sdr. Ari Soerono - sebagai Direktur Utama;
 - Sdr. Andry Setiawan - sebagai Direktur Investasi 1;
 - Sdr. Yadi J. Ruchandi - sebagai Direktur Investasi 2;
 - Sdr. Rizwan Rizal Abidin - sebagai Direktur Restrukturisasi;
 - Sdr. Muhamad Teguh Wirahadikusumah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:



- a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi PPA:
- Sdr. Ari Soerono - sebagai Direktur Utama;
 - Sdr. Muhamad Teguh Wirahadikusumah - sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - Sdr. R. M. Irwan - sebagai Direktur Hukum dan SDM;
 - Sdr. Andry Setiawan - sebagai Direktur Investasi 1.
- b. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PPA, sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Restrukturisasi	Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi

- c. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PPA:
- Sdr. Yadi J. Ruchandi, semula sebagai Direktur Investasi 2 menjadi Direktur Utama;
 - Sdr. Rizwan Rizal Abidin, semula sebagai Direktur Restrukturisasi menjadi Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi.
- d. Mengangkat Sdr. Adi Pamungkas Daskian sebagai Direktur Investasi 2 PPA.

Berikut disampaikan kronologi susunan Direksi di sepanjang tahun 2020.

Kronologi Pergantian Susunan Direksi dan Perubahan Nomenklatur Jabatan di Sepanjang Tahun 2020

Periode 1 Januari - 12 Juni 2020	Periode 12 Juni - 6 Agustus 2020	Periode 6 Agustus - 9 Oktober 2020	Periode 9 Oktober - 31 Desember 2020	Keterangan
Iman Rachman (Direktur Utama)				Iman Rachman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 12 Juni 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero)
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi)			Nasrizal Nazir tidak lagi menjabat sebagai Direktur Investasi sejak 6 Agustus 2020 karena adanya pertimbangan penataan Direksi PPA oleh Pemegang Saham.
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)			Dikdik Permadi Yoffana tidak lagi menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen sejak 6 Agustus 2020 karena adanya pertimbangan penataan Direksi PPA oleh Pemegang Saham.
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)	R. Muhammad Irwan (Plt. Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)	R. Muhammad Irwan (Direktur Hukum dan SDM)		• Pada 12 Juni 2020, Dewan Komisaris PPA menunjuk R. Muhammad Irwan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja. • Pada 6 Agustus 2020, Pemegang Saham memutuskan pengalihan nomenklatur jabatan R. Muhammad Irwan, dari semula Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja menjadi Direktur Hukum dan SDM. • R. Muhammad Irwan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Hukum dan SDM sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur SDM dan Hukum PT Danareksa (Persero).
		Ari Soerono (Direktur Utama)		• Ari Soerono menjabat Direktur Utama sejak 6 Agustus 2020. • Ari Soerono tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Danareksa (Persero).
		Andry Setiawan (Direktur Investasi 1)		• Andry Setiawan menjabat Direktur Investasi 1 sejak 6 Agustus 2020. • Andry Setiawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Investasi 1 sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Investasi PT Danareksa (Persero).
		Yadi J. Ruchandi (Direktur Investasi 2)	Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	• Yadi J. Ruchandi menjabat Direktur Investasi 2 sejak 6 Agustus 2020. • Pada 9 Oktober 2020, Pemegang Saham memutuskan pengalihan nomenklatur jabatan Yadi J. Ruchandi, dari semula Direktur Investasi 2 menjadi Direktur Utama.
		Rizwan Rizal Abidin (Direktur Restrukturisasi)	Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi)	• Rizwan Rizal Abidin menjabat Direktur Restrukturisasi sejak 6 Agustus 2020. • Pada 9 Oktober 2020, Pemegang Saham memutuskan pengalihan nomenklatur jabatan Rizwan Rizal Abidin, dari semula Direktur Restrukturisasi menjadi Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi.



Kronologi Pergantian Susunan Direksi dan Perubahan Nomenklatur Jabatan di Sepanjang Tahun 2020

Periode 1 Januari - 12 Juni 2020	Periode 12 Juni - 6 Agustus 2020	Periode 6 Agustus - 9 Oktober 2020	Periode 9 Oktober - 31 Desember 2020	Keterangan
		Muhamad Teguh Wirahadikusumah (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)		- Muhamad Teguh Wirahadikusumah menjabat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sejak 6 Agustus 2020. - Muhamad Teguh Wirahadikusumah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero).
			Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	Adi Pamungkas Daskian menjabat Direktur Investasi 2 sejak 9 Oktober 2020.

Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Direksi	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	- Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 - Sebagai Direktur Utama: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025	Ke-1
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi)	- Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 - Sebagai Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025	Ke-1
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025	Ke-1

Tidak terdapat pergantian Direksi sejak 31 Desember 2021 sampai dengan disahkannya laporan tahunan ini.

AKHIR KATA

Secara khusus Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris sebagai representasi Pemegang Saham, atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perusahaan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan, khususnya dalam penugasan PPA untuk berkontribusi bagi penguatan korporasi BUMN Indonesia. Kepada seluruh karyawan Insan PPA, izinkan Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan.

Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kepada investor dan mitra korporasi baik BUMN maupun sektor swasta. Demikian pula kepada regulator, pemasok, dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah tercipta. Semoga segala pencapaian PPA di tahun 2020 dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja terbaik PPA di masa yang akan datang.

Jakarta, 27 April 2021

Atas nama Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero),


Yadi Jaya Ruchandi
 Direktur Utama



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2021

Krisna Wijaya

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Marwanto Harjowiryo

Komisaris



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2021

Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama

Rizwan Rizal Abidin
Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi

Adi Pamungkas Daskian
Direktur Investasi 2



PROFIL PERUSAHAAN

Di tahun 2020, melalui SKK Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.







INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

	Nama Perusahaan	:	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
	Tanggal Pendirian	:	27 Februari 2004
	Status dan Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas (PT) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Dasar Hukum Pembentukan	:	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008.
	Maksud dan Tujuan Pendirian	:	Pengelolaan Aset ex. BPPN, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset BUMN
	Kepemilikan Saham	:	Pemerintah Republik Indonesia, 100,00%
	Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp2.996.688.000.000
	Rating Perusahaan	:	idA Stable Outlook dari PEFINDO
	Obligasi	:	Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Seri A, Seri B dan Seri C; kode obligasi: PPAP: peringkat: idA (Single A) dari PEFINDO
	Jumlah Karyawan	:	169 orang
	Jaringan Usaha	:	3 (tiga) Entitas Anak Langsung dan 5 (lima) Entitas Anak Tidak Langsung
	Alamat	:	Sampoerna Strategic Square North Tower 9th - 12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Pusat 12930, DKI Jakarta Indonesia Per 1 Maret 2021 Alamat Kantor PPA berubah menjadi Menara Mandiri II Lantai 7-9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190, DKI Jakarta Indonesia
	Telepon	:	+61 21 5798 2222
	Faksimili	:	+61 21 577 2443
	Surel	:	corpsec@ptppa.com
	Situs Web	:	www.ptppa.com
	Media Sosial	:	@ptppapersero @ptppapersero @ptppapersero
	Kontak Perusahaan	:	Sekretaris Perusahaan: Agus Widjaja Email: agus.widjaja@ptppa.com



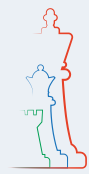
RIWAYAT SINGKAT PPA



SEKILAS TENTANG PPA

Dengan tujuan melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga dengan "Perusahaan" atau "PPA" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Perusahaan didirikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004. Selanjutnya Perusahaan menerima tugas dari Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan aset eks BPPN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan Perusahaan.



Melihat kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset eks BPPN, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas tambahan kepada Perusahaan terutama untuk membantu Pemerintah dalam upaya penyehatan BUMN yang bermasalah. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perusahaan. Selanjutnya Pemerintah memperluas maksud dan tujuan Perusahaan dengan menambah ruang lingkup tugas Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sehingga maksud dan tujuan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Negara eks BPPN;
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN;
3. Kegiatan investasi; serta
4. Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perusahaan menerbitkan Keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) No. KEP-164/MBU/2008 dan dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H. tanggal 5 September 2008. Keputusan tersebut kemudian mengubah masa tugas Perusahaan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Pada tahun 2014, melalui kajian yang mendalam, dan untuk mendukung pengembangan rencana bisnis dan usaha Perusahaan, Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada 12 Februari 2014 melalui Surat No. S-68/MBU/2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang dituangkan dalam Akta No. 62 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M. Hum., M.M., Notaris di Jakarta.

Perubahan tersebut memperluas maksud dan tujuan Perusahaan sehingga selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan yaitu melalui:

1. Jasa Konsultansi berupa:
 - a. Konsultansi Bisnis dan Manajemen;
 - b. Konsultansi Penjualan dan/atau Pengembangan Aset.
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
 - b. Melakukan penyewaan aset;
 - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
 - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
 - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

Seiring dengan perkembangan tersebut, daya saing Perusahaan terus diperkuat baik dari sisi keuangan, operasional hingga pada aspek sumber daya manusia dengan pembentukan budaya Perusahaan yang kuat.

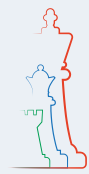


Di tahun 2020, melalui Surat Kuasa Khusus (“SKK”) Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Di samping itu, untuk memperkuat struktur pendanaannya, di tanggal 19 Agustus 2020 PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terbagi 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, B dan C.

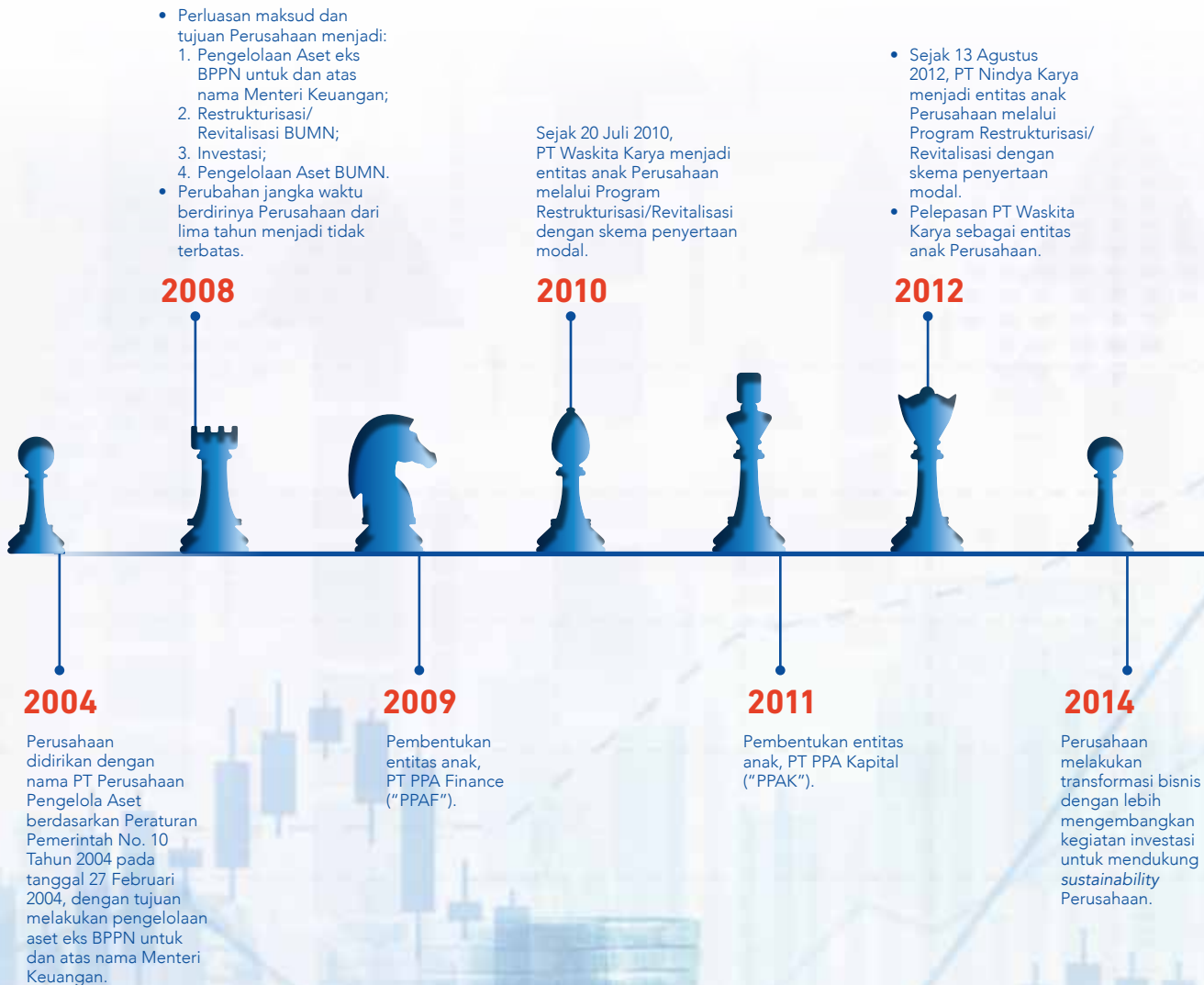
INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sejak berdirinya sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama.





JEJAK LANGKAH





- Pelaksanaan kegiatan investasi yang diimplementasikan melalui sejumlah penandatanganan kerja sama.
- Melakukan pengelolaan aset dengan menciptakan nilai investasi guna mendukung Perusahaan dalam *creating value*.
- Perusahaan menjalankan model bisnis secara konsisten sesuai visi dan misi.

Pendirian PT Magnesium Gosari International (entitas anak PPAK), PT SIPPA Kemasan International (entitas anak PPAK) dan pengambilalihan PT Bondi Syad Mulia oleh PPAK.

- Untuk memperkuat struktur pendanaannya, di tanggal 19 Agustus 2020, PT PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terbagi 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, B dan C.
- Melalui Surat Kuasa Khusus ("SKK") Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

2015

Perusahaan mulai melakukan penetrasi ke pasar investasi sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP").

2016**2017**

Perusahaan menginisiasi pengembangan segmen bisnis baru pada industri pupuk.

2018**2019**

- Perusahaan melakukan perbaikan struktur pendanaan dengan menerbitkan *Medium Term Notes* ("MTN") dan Surat Berharga Komersial ("SBK").
- Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan merevitalisasi BUMD di Jawa Barat dengan dukungan dari Bank BJB.
- Perusahaan menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam pengelolaan *Non Performing Loan*.
- Perusahaan merintis kerja sama dengan Korea Asset Management Corporation (KAMCO). Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pengembangan kompetensi karyawan dan penajakan peluang investasi pada *Non Performing Loan* (NPL) perbankan antara kedua belah pihak.
- Perusahaan bergabung dalam keanggotaan *International Public AMC Forum* ("IPAF") dalam rangka memperkuat jaringan internasional di bidang pengelolaan aset.

2020



BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA PASAR YANG DILAYANI

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dengan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029777 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, hingga 31 Desember 2020. Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

Kegiatan Usaha	Telah/ Belum Dijalankan	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2020
Kegiatan Usaha Utama		
Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan	√	Perusahaan melakukan pengelolaan aset eks BPPN antara lain: 1. Melakukan divestasi saham bank, diantaranya Saham Bank Permata, saham Bank Danamon, saham Bank BCA, saham Bank BII, saham Bank Niaga, saham Bank BTPN dan saham Bank Maybank Indonesia; 2. Melakukan divestasi saham non bank, diantaranya saham PT Bali Nirwana Resort dan saham PT Dipasena Citra Darmaja; 3. Melakukan pengamanan, pemutakhiran dokumen dan penjualan aset properti; 4. Melakukan pengelolaan Grup Texmaco; 5. Melakukan pengelolaan dan restrukturisasi Grup Tuban Petro; 6. Melakukan pengelolaan Grup Sejahtera Eka Graha.
Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	√	Perusahaan melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN antara lain: 1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk • Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; • Setelah sehat Waskita Karya dikembalikan ke Pemerintah dan kemudian melakukan <i>Initial Public Offering</i> ("IPO"); 2. PT Nindya Karya (Persero) (PT NK) • Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; • Saat ini kondisi PT NK sudah sehat dan siap dikembalikan ke Pemerintah. 3. Melakukan R/R terhadap PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PT DI) termasuk memberikan pembiayaan modal kerja dan memfasilitasi kerja sama antara PT DI dengan Airbus Military, Spanyol. 4. Melakukan R/R terhadap PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (PT IKI) termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. 5. Melakukan R/R terhadap PT PAL Indonesia (Persero), termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. 6. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (PT MNA) • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan dengan melakukan pembayaran atas hak-hak normatif karyawan; • Melakukan pendampingan dalam mencari mitra strategis untuk mengoperasikan kembali PT MNA; • Melakukan pendampingan PT MNA pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"); • Melakukan pendampingan dalam proses kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) dan beberapa BUMN lain dalam bidang usaha pengangkutan kargo. 7. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (PT KKA) • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; • Membantu upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas PT KKA dengan tahap awal restrukturisasi melakukan optimalisasi fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dioperasikan kombinasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dalam rangka sinergi BUMN dengan Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN).



Kegiatan Usaha	Telah/ Belum Dijalankan	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2020
Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	√	8. PT Kertas Leces (Persero) • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; • Melakukan pendampingan dalam proses PKPU. 9. PT Iglas (Persero) • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; • Melakukan pendampingan dalam penanganan aset berstatus sengketa dengan Pemerintah Kota Surabaya; • Melakukan kajian transformasi bisnis. 10. PT Survai Udara Panas (Persero), membantu program restrukturisasi SDM dan keuangan, serta organisasi dan manajemen. 11. PT Boma Bisma Indra (Persero), melakukan R/R dan pembiayaan modal kerja. 12. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) (PT PANN), menyusun kajian restrukturisasi dan penanganan PT PANN secara menyeluruh, baik keuangan maupun operasional.
Kegiatan investasi	√	Kegiatan investasi Perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa: • Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya; • Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya; • Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset; • Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali. 2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa: • Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan • Pembelian saham, <i>warrant</i> dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek. Kegiatan investasi yang dilakukan Perusahaan antara lain pada: 1. PT PPA Kapital (entitas anak). Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp551.012 juta. 2. PT Bondi Syad Mulia, bergerak di bidang jasa <i>galvanizing</i> untuk produk besi dan baja di daerah Rungkut Surabaya. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp47.000 juta (jangka panjang) dan Rp106.220 juta (jangka pendek). 3. PT PPAF adalah entitas anak di bidang usaha <i>Leasing</i>, <i>Consumer Financing</i>, dan <i>Factoring</i>. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp688.949 juta. 4. PT Wisarada Sarana Aviasi, bidang jasa sewa helikopter. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp26.765 juta. 5. PT Rejeki Inti Logam Jaya, bidang usaha produsen dan pengolahan aluminium di daerah Tangerang, Banten. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp128.437 juta (jangka Panjang). 6. PT Varia Intra Finance, bidang usaha pembiayaan <i>multi finance</i> berdomisili di Jakarta. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp160.000 juta (jangka pendek). 7. PT Lintas Samudra Sejahtera, perusahaan kapal dan pendukung pembangkit tenaga listrik internasional. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp432.935 juta (jangka pendek). 8. PT Magnesium Gosari International, bidang usaha industri pupuk di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp44.951 juta (jangka pendek) dan Rp154.691 juta (jangka panjang). 9. PT Polowijo Gosari, bidang usaha industri pupuk di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp131.742 juta (jangka pendek). 10. PT Widodo Makmur Unggas, bidang usaha peternakan ayam di daerah Jawa Barat. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp99.750 juta (jangka panjang). 11. PT National Utility Helicopters bidang jasa sewa helikopter di Kalimantan. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp174.293 juta (jangka panjang). Perusahaan berinvestasi dalam bentuk saham dengan total investasi sebesar Rp38.945 juta.
Kegiatan pengelolaan aset BUMN	√	PT Pertamina (Persero), dimana Perusahaan melaksanakan pengelolaan aset properti milik PT Pertamina (Persero)



Kegiatan Usaha	Telah/ Belum Dijalankan	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2020
Kegiatan Usaha Penunjang		
1. Jasa Konsultansi, berupa jasa konsultansi: a. Bisnis dan manajemen b. Penjualan dan/atau pengembangan aset	√	1. Pemberian Jasa Penasehat Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero). 2. Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pencarian Investor dalam rangka Kerja Sama Pendayagunaan Aset Area Non Pabrik Milik PT Pupuk Kujang, anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero). 3. Pemberian Jasa Kajian Restrukturisasi Hutang PT Petro Energy. 4. Pemberian Jasa Konsultansi Restrukturisasi dan Optimalisasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 5. Pemberian Jasa kepada PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia dalam Rangka Restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 6. Pemberian Jasa Konsultansi Penyusunan Draft SOP Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Pendampingan Pelaksanaan Pendayagunaan Lahan PT KS Tahap II. 7. Program Penjualan Aset Milik Pertamina Foundation. 8. Jasa Konsultansi Kajian Alternatif Pengelolaan Aset Melalui Pihak Ketiga dan Perusahaan Manajemen Aset Yang didirikan oleh LPS. 9. Pemberian Jasa Kajian Kelayakan atas Rencana Pembangunan Pabrik Katalis PT Pupuk Kujang. 10. Pemberian Jasa Konsultansi Restrukturisasi Hutang PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. 11. Pemberian Jasa Konsultansi Restrukturisasi Hutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor.
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang b. Melakukan penyewaan aset c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang d. Melakukan restrukturisasi perusahaan e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain	√	1. Restrukturisasi utang PT Prabu Wahana International. 2. Restrukturisasi utang PT Carpediem Mandiri.

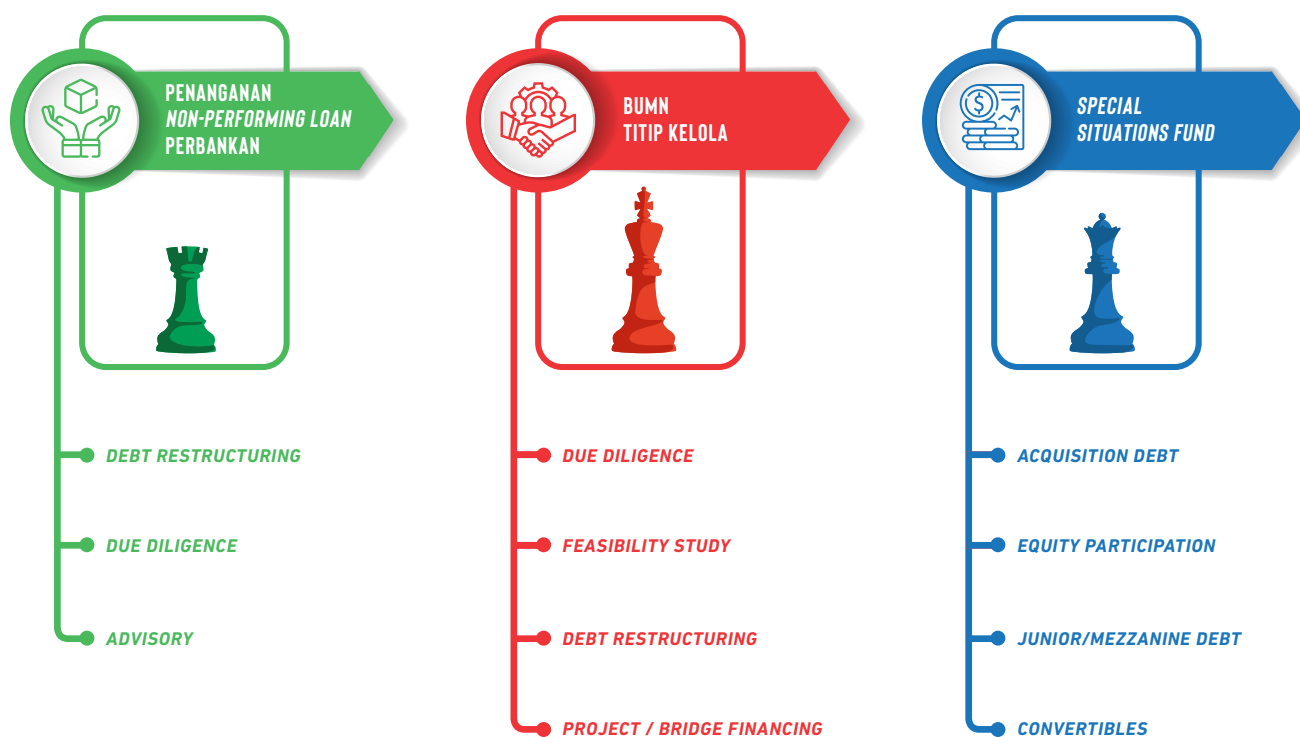
Perusahaan senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis guna memanfaatkan usaha yang tepat, antara lain dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan menerapkan praktik usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan secara konsisten. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, Perusahaan mengedepankan kerja sama dengan berbagai pihak dan mitra kerja strategis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.



Secara garis besar, bidang usaha sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan saat ini adalah:

Pengelolaan Aset eks BPPN	R/R BUMN	Investasi	Pengelolaan Aset BUMN dan lainnya
- Melakukan penjualan aset properti, saham dan piutang. - Melakukan penyewaan aset properti. - Melakukan penagihan piutang. - Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset. - Melakukan restrukturisasi atas aset properti, saham dan piutang guna meningkatkan nilainya.	- Restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN. - Revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN.	- Investasi langsung maupun tidak langsung. - Investasi pada instrumen surat berharga.	- Pengembangan dan pendayagunaan aset untuk meningkatkan nilainya. - Jasa konsultasi bisnis dan manajemen. - Pengelolaan aset milik Pemda, BUMD, dan Swasta termasuk entitas anak BUMN.

PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA

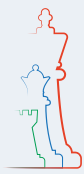


INISIASI STRATEGIS

- PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 senilai Rp642,10 miliar.
- PPA melakukan kegiatan penanganan terhadap 23 BUMN Titip Kelola sebagai tindak lanjut dari pemberian SKK oleh Menteri BUMN kepada PPA.

PASAR YANG DILAYANI

Sesuai dengan uraian bidang usaha dan layanan di atas, Perusahaan memberikan layanan kepada korporasi di Indonesia, baik BUMN maupun swasta.



VISI, MISI, BUDAYA DAN NILAI PERUSAHAAN

VISI

Menjadi **Perusahaan investasi terkemuka** dan **Mitra terpercaya** dalam restrukturisasi korporasi

MISI

1. Memberikan **pertumbuhan yang berkesinambungan** bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan *advisory*.
2. Menciptakan **sumber daya manusia yang unggul**, profesional dan memiliki integritas tinggi.
3. Menerapkan **manajemen yang terbuka** sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
4. Memberikan **kontribusi** kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.





PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS VISI, MISI, BUDAYA KERJA, DAN NILAI PERUSAHAAN

Seluruh hal yang tercantum dalam visi, misi, dan nilai budaya atau filosofi Perusahaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Relevansi Visi, Misi dan Budaya Perusahaan secara tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan tahun 2020 yang disusun berdasarkan Surat Kementerian BUMN No.S-46/Wk.2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II dan surat No.S-2/Wk.2.MBU.A/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Perubahan/Revisi RKAP Tahun 2020.

PENINJAUAN ATAS VISI, MISI, BUDAYA KERJA, DAN NILAI PERUSAHAAN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

Visi, misi, budaya kerja dan nilai perusahaan sebagaimana tertuang dalam RJPP tahun 2020-2024 merupakan peninjauan atas visi dan misi sebelumnya sebagaimana tertuang dalam RJPP tahun 2018-2022.

BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki Budaya Kerja yang baik. Demi terbentuk budaya kerja yang baik, Perusahaan secara berkelanjutan dan terstruktur menanamkan nilai-nilai (*Core Values*) Perusahaan yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Agar AKHLAK menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh insan PPA, maka telah dilaksanakan program internalisasi *Core Values*, sebagai berikut:

1. Sosialisasi *Core Values*;
2. Pembentukan Tim *Core Values* yang bertugas menyusun program kerja internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada seluruh insan Perusahaan.

NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Perusahaan merupakan fondasi dan panduan dari setiap insan Perusahaan dalam melakukan pekerjaan untuk mendorong tercapainya tujuan Perusahaan. Nilai-nilai Perusahaan harus dapat memotivasi insan Perusahaan guna mencapai tujuan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misi Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan sangat berkaitan dengan tujuan Perusahaan. Untuk itu, setiap individu dalam Perusahaan harus memahami tujuan Perusahaan dengan baik. Adanya pemahaman yang sama di antara manajemen dan karyawan, akan membentuk budaya kerja Perusahaan yang kondusif dan inovatif. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan dedikasi dan semangat yang tinggi serta berorientasi pada hasil (*result oriented*). Berdasarkan keputusan Direksi No. SK-73/PPA/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tata Nilai Perusahaan adalah sebagai berikut:

"AKHLAK"



AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan



KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas



HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan



LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara



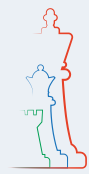
ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan



KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis



MAKNA LOGO PERUSAHAAN



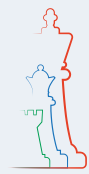
Logo PT PPA merupakan identitas utama perusahaan sebagai pengenalan kepada publik dan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) yang ditampilkan secara jelas dan konsisten.



Logo Perusahaan memiliki 3 (tiga) elemen utama, yaitu: tiga garis lengkung - dua di atas dan satu di bawah - yang secara utuh melambangkan perputaran roda; tulisan PPA di tengah lengkungan; dan *logotype* yang terdiri dari nama serta keterangan bentuk perusahaan di samping kanan logogram. Tiga garis lengkung tersebut memiliki warna merah, biru dan hijau dengan tulisan PPA dan nama serta slogan perusahaan menggunakan warna hitam.

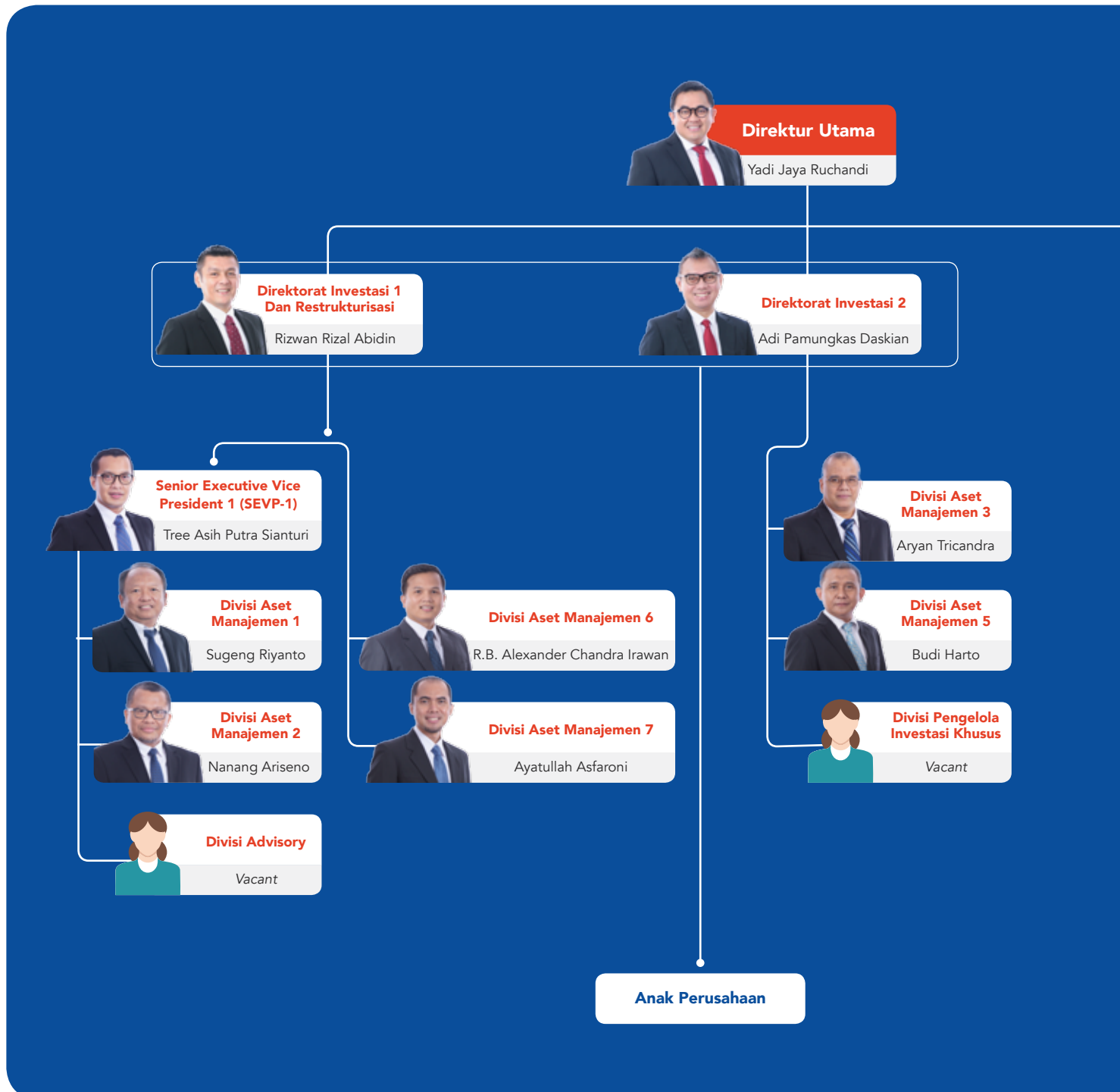
Logotype 'PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) *State-Owned Asset Management Company*' ditempatkan sejajar dengan sumbu tengah logogram untuk mewakili kesejajaran di antara semua anggota perusahaan, baik dalam posisi pimpinan maupun karyawan sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik dalam memberikan solusi inovatif bagi para mitra usaha.



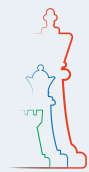


STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2020 telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. SK-84/PPA/1120 tanggal 6 November 2020 Tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).







PROFIL DEWAN KOMISARIS



Krisna Wijaya

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Periode Jabatan: 9 Oktober 2020 s.d RUPS Tahun 2025, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 65 tahun
Kelahiran Jakarta, 22 Juli 1955

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Jabatan ini merupakan periode pertama. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris

Koordinator anggota Dewan Komisaris, serta membidangi terkait organisasi dan *Corporate Strategic Planning and Monitoring*, Dukungan Kerja, unit *Legal & Corp. Secretary*.

Pendidikan

Sarjana (S1) Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1980); Magister (S2) Manajemen bidang Agribisnis dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (tahun lulus), dan Doktor (S3) Studi Antar Bidang dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2009)

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang Pemasaran, Manajemen Risiko, Audit, dan Keuangan Mikro

Pengalaman Kerja

Direktur LPPI (2014-sekarang), Komisaris Utama/Independen PT Danareksa Persero (Mei 2020 sd Oktober 2020), Komisaris Utama / Independen PT Bank Negara Indonesia Life (2015-2018), Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2015), Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2008-2010), Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2005-2007), Direktur Bisnis Mikro dan Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2005), Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Republik Indonesia (2003-2004), Direktur Operasional PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk (2000-2003).

Rangkap Jabatan

Direktur LPPI (2014-sekarang).
Rangkap jabatan ini tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.



Marwanto Harjowiryo

Komisaris

Periode Jabatan: 9 Oktober 2020 s.d RUPS Tahun 2025, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun
Kelahiran Yogyakarta, 6 Juni 1959

Domisili

Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Jabatan ini merupakan periode pertama. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris

Koordinasi terkait fungsi Keuangan dan Investasi, serta unit *Internal Auditor/SPI*, Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen, serta unit *Risk Management*.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi dari Gajah Mada Yogyakarta (1983); Master (S2) of Arts (M.A.) bidang *Economic Development and Fiscal Policy* dari Vanderbilt University, Amerika Serikat (1991); dan Doktor (S3) bidang Konsentrasi Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Fiskal dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2009).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang Audit dan Keuangan.

Pengalaman Kerja

Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2020), Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (2013-2019), Komisaris PT Sucofindo (Persero) (2003-2018), Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2014-2017), Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2017), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2011-2013), Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) (2009-2012), Ketua Komite Etik Asian Development Bank (ADB) (2009-2012), Anggota Panitia Penelaah Anggaran Asian Development Bank (ADB) (2009-2011), Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI (2007-2009), Senior Advisor Menteri Keuangan RI (2006-2009), Direktur Hubungan Anggota The National Social Security Council (2006-2008), Masyarakat Kementerian Keuangan RI (2004-2006), Direktur Kerjasama Internasional (2003-2005), Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (1999-2003), dan Direktur Anggaran Kementerian Keuangan RI (1998-2003).

Rangkap Jabatan

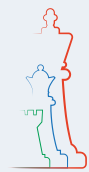
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.



PROFIL DIREKSI



Yadi Jaya Ruchandi

Direktur Utama

Periode Jabatan: 6 Agustus 2020 - RUPS Tahun 2025, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Biak, 27 Mei 1971

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Pertama kali menjabat dalam jajaran Direksi sebagai Direktur Investasi 2 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, dengan masa jabatan 6 Agustus 2020 - RUPS Tahun 2025. Melalui Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-325/MBU/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, Yadi Jaya Ruchandi dipercaya untuk menjabat Direktur Utama untuk masa jabatan meneruskan masa jabatan sebelumnya. Jabatan ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1995); *Master of International Management (MBA)* dengan fokus *International Finance and International Operation*, dari Thunderbird-The American Graduate School of International Management, Arizona, Amerika Serikat (1997).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan manajemen bisnis

Pengalaman Kerja

Senior Executive Vice President Bank Exim (2019-2020), Chief Financial Officer PT Tuban Petrochemicals Industries (2016-2019), Chief Operating Officer pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2010-2016), Executive Vice President Pengembangan Proyek pada PT Cardig International Aviation (2009), Corporate Finance Group Head (Deputy CFO) pada PT Cardig International (2004-2006), Senior Investment Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2004), Capital Market Dealer pada American Express Bank Jakarta (1999-2000), dan Assistant Manager Treasury Analyst pada American Express Bank Jakarta (1997-1999).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.



Rizwan Rizal Abidin

Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi

Periode Jabatan: 6 Agustus 2020 - RUPS Tahun 2025, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 48 tahun

Kelahiran Jakarta, 6 November 1972

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Pertama kali menjabat dalam jajaran Direksi sebagai Direktur Restrukturisasi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, dengan masa jabatan 6 Agustus 2020 s.d RUPS Tahun 2025. Melalui Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-325/MBU/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, Rizwan Rizal Abidin dipercaya untuk menjabat Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi untuk masa jabatan meneruskan masa jabatan sebelumnya. Jabatan ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Trisakti (1996); dan Master (S2) Business & Administration (MBA) bidang Finance and Artificial Intelligence dari Southern New Hampshire University Graduate School USA (1999).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan restrukturisasi perusahaan.

Pengalaman Kerja

Managing Director IndoSterling Capital (2019-2020), Direktur Investasi NWP Retail Warburg Pincus (2017-2019), Direktur Merger & Akuisisi CIMB (2015-2017), Direktur Corporate Client Solution CIMB (2013-2015), Vice President Corporate Client Solutions CIMB (2009-2013), Vice President Investment Banking (2007-2009), Vice President Corporate Finance CIMB (2005-2007), Associate Director Corporate Finance Noble Capital (2004-2005), Investment Officer Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2004), dan Relationship Manager Citibank (1999-2000).

Rangkap Jabatan

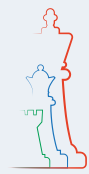
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.



Adi Pamungkas Daskian

Direktur Investasi 2

Periode Jabatan: 9 Oktober 2020 - RUPS Tahun 2025, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun
Kelahiran Semarang, 22 Mei 1981

Domisili

Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur Investasi 2 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, untuk masa jabatan 9 Oktober 2020 - RUPS Tahun 2025. Jabatan ini merupakan periode pertama.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik jurusan *Electrical and Electronics Engineering* dari Nanyang Technological University, Singapura (2003); dan *Master of Business Administration* dari Nyenrode Business University, Belanda (2008).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi dan bisnis manajemen

Pengalaman Kerja

Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Juli-Oktober 2020), *Independent Financial Advisor* Singapura dan Indonesia (2015-2020), *Direktur* PT Meranti Putra Indonesia (2009-2015), *Business Development Manager* PT Rizki Kacida Reana (2009-2015), *Thesis Project* Mercurious (September 2008-Desember 2008), *Sales Manager* Wavelength Technology Pte Ltd (2006-2007), *Financial Analyst* PT Delta Advisory Indonesia (2004-2006).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

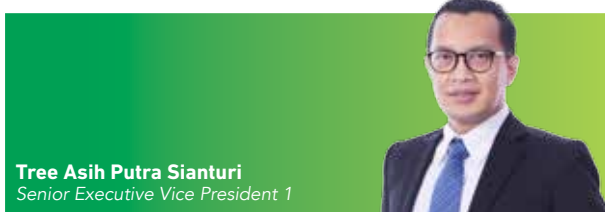
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.



PROFIL MANAJEMEN SENIOR



Tree Asih Putra Sianturi
Senior Executive Vice President 1

Menjabat Sejak : 1 Januari 2021

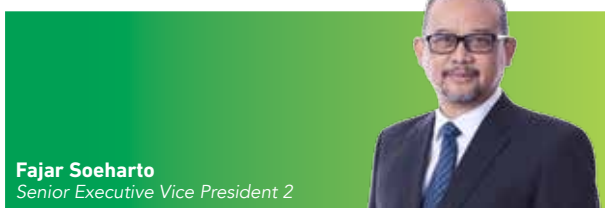
Bergabung di Perusahaan : 1 Januari 2021



Marti Tri Handoko
Kepala Divisi Hukum

Menjabat Sejak : 7 Januari 2020

Bergabung di Perusahaan : 15 Maret 2004



Fajar Soeharto
Senior Executive Vice President 2

Menjabat Sejak : 16 November 2020

Bergabung di Perusahaan : 16 November 2020



Sarda Yunus
Kepala Divisi Manajemen Risiko

Menjabat Sejak : 11 September 2016

Bergabung di Perusahaan : 1 Juni 2004



Wahyu Widodo
Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern

Menjabat Sejak : 10 Desember 2020

Bergabung di Perusahaan : 8 Juni 2010



Pramuwati
Kepala Divisi Perencanaan Strategis
Perusahaan dan Manajemen Kinerja

Menjabat Sejak : 9 April 2018

Bergabung di Perusahaan : 9 April 2018



Agus Widjaja
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Menjabat Sejak : 1 Oktober 2020

Bergabung di Perusahaan : 1 Juni 2009



Nanang Ariseno
Kepala Divisi Aset Manajemen 2

Menjabat Sejak : 1 Oktober 2019

Bergabung di Perusahaan : 1 Juli 2011


Sugeng Riyanto

Kepala Divisi Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen 2


 Menjabat Sejak : 1 Oktober 2019
 Bergabung di Perusahaan : 15 September 2010

Yuliza Sukmasari

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi


 Menjabat Sejak : 7 Januari 2020
 Bergabung di Perusahaan : 15 Maret 2004

RB Alexander Chandra Irawan

Kepala Divisi Aset Manajemen 6


 Menjabat Sejak : 1 Oktober 2019
 Bergabung di Perusahaan : 29 September 2014

Rita Herawati

Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis


 Menjabat Sejak : 7 Januari 2020
 Bergabung di Perusahaan : 15 Maret 2004

Aryan Tricandra

Kepala Divisi Aset Manajemen 3


 Menjabat Sejak : 1 Oktober 2019
 Bergabung di Perusahaan : 15 Maret 2004

Indra Budi Cahyono

Kepala Divisi SDM dan Umum


 Menjabat Sejak : 14 Juni 2019
 Bergabung di Perusahaan : 14 Maret 2019

Budi Harto

Kepala Divisi Aset Manajemen 5


 Menjabat Sejak : 1 Juni 2019
 Bergabung di Perusahaan : 4 Mei 2004

Lie Tjauw Hap

Kepala Divisi Treasury


 Menjabat Sejak : 1 Mei 2020
 Bergabung di Perusahaan : 15 Juni 2007

Ayatullah Asfaroni

Kepala Divisi Aset Manajemen 7

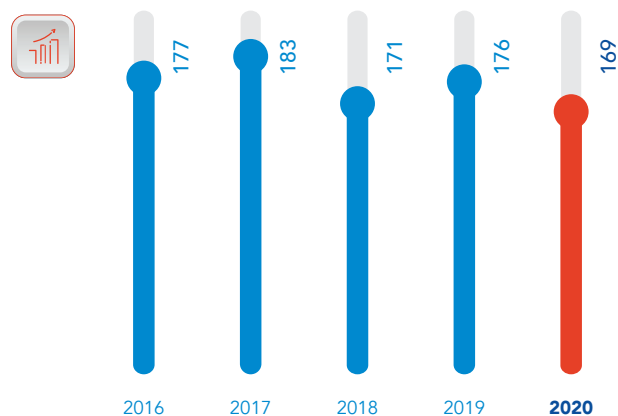

 Menjabat Sejak : 2 Juni 2020
 Bergabung di Perusahaan : 1 Mei 2009



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 169 orang, mengalami penurunan 3,98% atau sebanyak 7 (tujuh) orang dari jumlah karyawan pada 2019 sebanyak 176 orang.

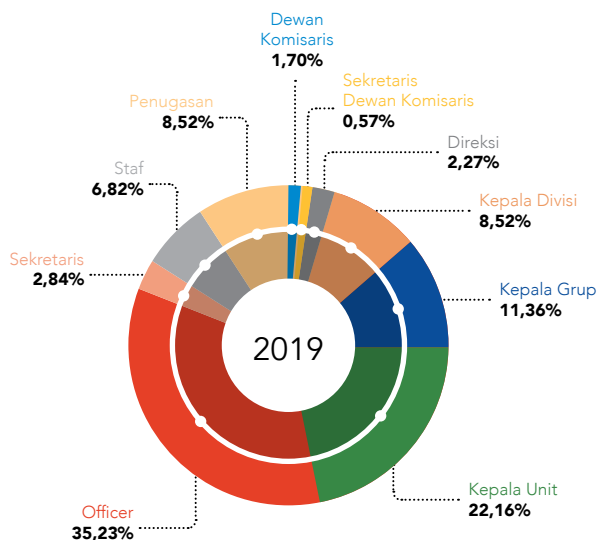
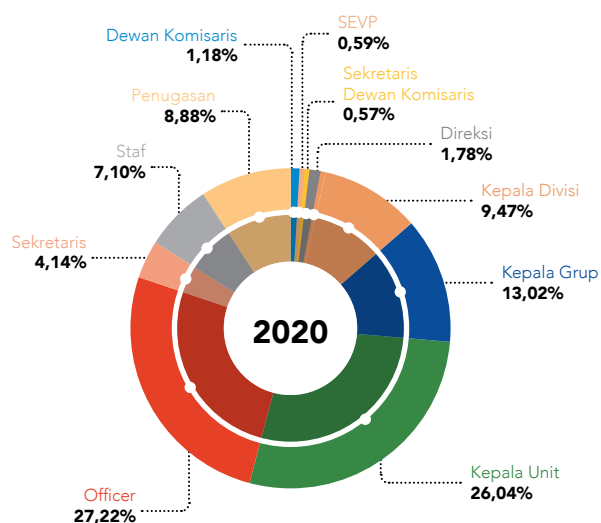


Perkembangan jumlah dan demografi karyawan Perusahaan dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN (ORANG)

Level Organisasi/ Jabatan	2020				2019				Kenaikan (Penurunan)		
	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)	
Dewan Komisaris	2	-	2	1,18%	3	-	3	1,70%	(1)	-33,33%	
Sekretaris Dewan Komisaris	-	1	1	0,59%	1	-	1	0,57%	-	-	
Direksi	3	-	3	1,78%	4	-	4	2,27%	(1)	-25,00%	↓
SEVP	1	-	1	0,59%	-	-	-	-	1	-	
Kepala Divisi	11	5	16	9,47%	10	5	15	8,52%	1	6,67%	↑
Kepala Grup	15	7	22	13,02%	15	5	20	11,36%	2	10,00%	↑
Kepala Unit	23	21	44	26,04%	21	18	39	22,16%	5	12,82%	↑
Officer	29	17	46	27,22%	37	25	62	35,23%	(16)	-25,81%	↓
Sekretaris	-	7	7	4,14%	0	5	5	2,84%	2	40,00%	↑
Staf	7	5	12	7,10%	7	5	12	6,82%	-	-	
Penugasan	13	2	15	8,88%	15	-	15	8,52%	-	-	
Jumlah	104	65	169	100,00%	113	63	176	100,00%	(7)	-3,98%	↓

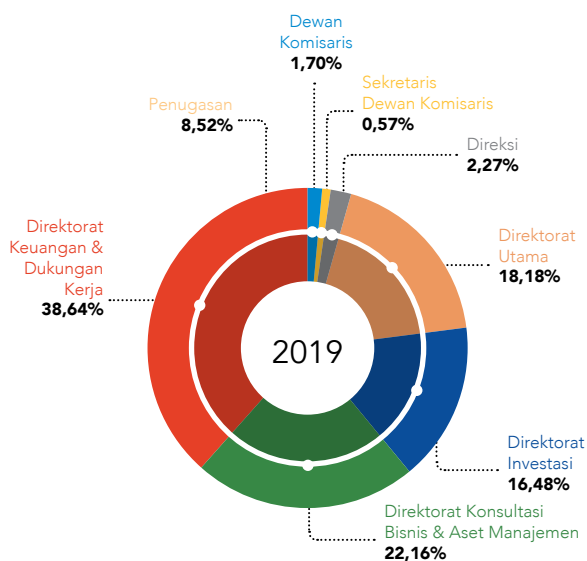
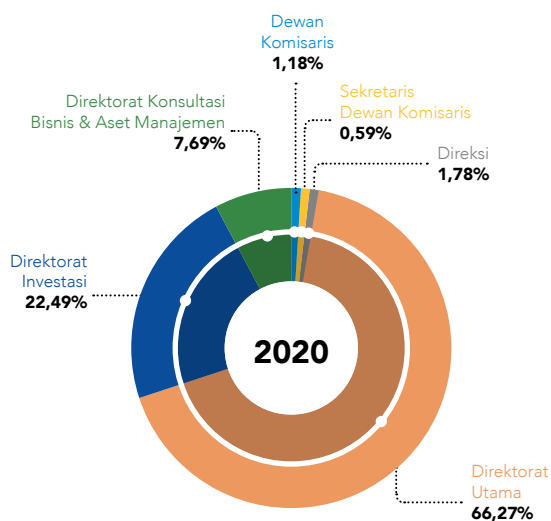
L = Laki-laki / P = Perempuan



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PENUGASAN (ORANG)

Penugasan	2020				2019				Kenaikan (Penurunan)		
	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)	
Dewan Komisaris	2	-	2	1,18%	3	-	3	1,70%	(1)	-33,33%	↓
Sekretaris Dewan Komisaris	-	1	1	0,59%	1	-	1	0,57%	-	-	
Direksi	3	-	3	1,78%	4	-	4	2,27%	(1)	-25,00%	↓
Direktorat Utama	68	44	112	66,27%	17	15	32	18,18%	80	250,00%	↑
Direktorat Investasi	24	14	38	22,49%	21	8	29	16,48%	9	31,03%	↑
Direktorat Konsultasi Bisnis & Aset Manajemen	7	6	13	7,69%	25	14	39	22,16%	(26)	-66,67%	↓
Direktorat Keuangan & Dukungan Kerja	-	-	-	-	42	26	68	38,64%	(68)	-100,00%	↓
Jumlah	104	65	169	100,00%	113	63	176	100,00%	(7)	-3,98%	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan

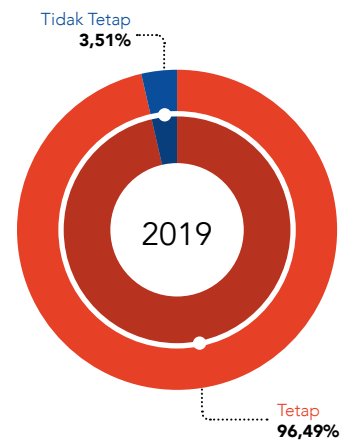
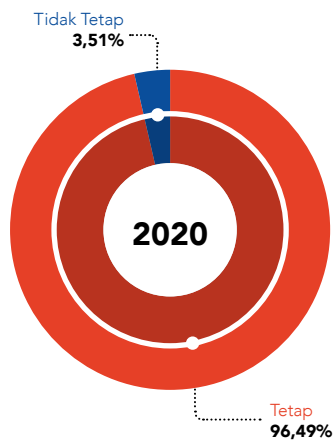




KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN (ORANG)

Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan)		
	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)	
Tetap	101	61	162	95,86%	110	60	170	96,59%	(8)	-4,71%	↓
Tidak Tetap	3	4	7	4,14%	3	3	6	3,41%	1	16,67%	↑
Jumlah	104	65	169	100,00%	113	63	176	100%	(7)	-3,98%	↓

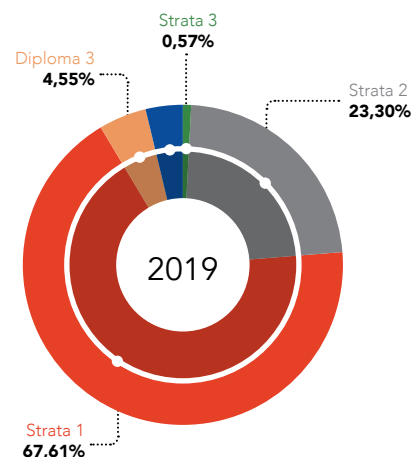
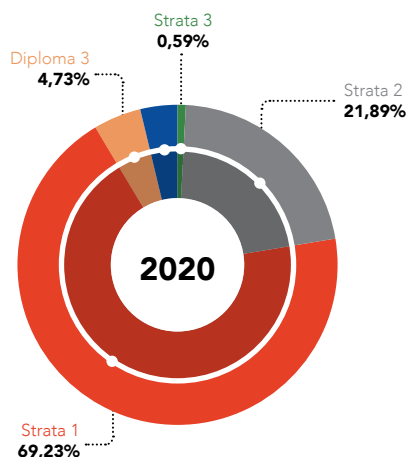
L = Laki-laki / P = Perempuan



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)

Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan)		
	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)	
Strata 3	1	-	1	0,59%	1	-	1	0,57%	-	-	
Strata 2	27	10	37	21,89%	32	9	41	23,30%	(4)	-9,76%	↓
Strata 1	71	46	117	69,23%	74	45	119	67,61%	(2)	-1,68%	↓
Diploma 3	1	7	8	4,73%	1	7	8	4,55%	-	-	
SMA	4	2	6	3,55%	5	2	7	3,98%	(1)	-14,29%	↓
Jumlah	104	65	169	100,00%	113	63	176	100%	(7)	-3,98%	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan

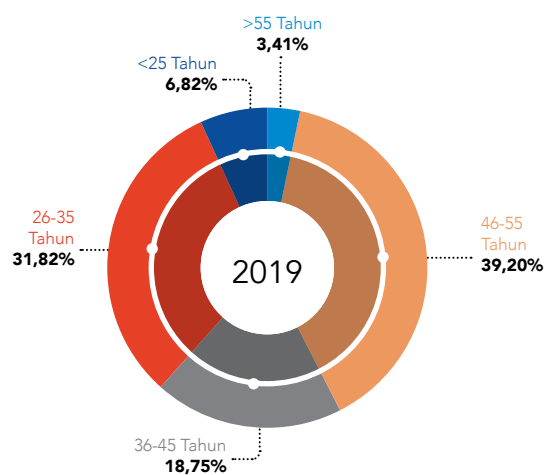
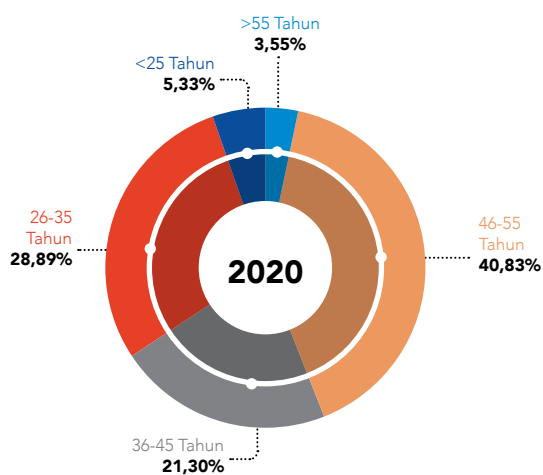




KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA (ORANG)

Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan)		
	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)	
>55 Tahun	5	1	6	3,55%	5	1	6	3,41%	-	-	
46-55 Tahun	47	22	69	40,83%	51	18	69	39,20%	-	-	
36-45 Tahun	20	16	36	21,30%	20	13	33	18,75%	3	9,09%	↑
26-35 Tahun	30	19	49	28,99%	33	23	56	31,82%	(7)	-12,50%	↓
<25 Tahun	2	7	9	5,33%	4	8	12	6,82%	(3)	-25,00%	↓
Jumlah	104	65	169	100,00%	113	63	176	100%	(7)	-3,98%	↓

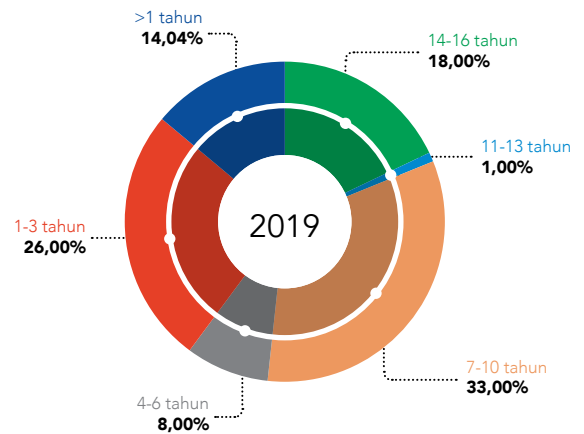
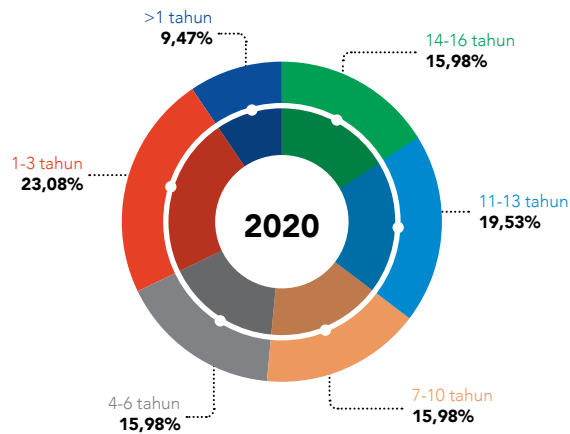
L = Laki-laki / P = Perempuan



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA (ORANG)

Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan)		
	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	L	P	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)	
14-16 tahun	21	6	27	15,98%	19	13	32	18 %	-5	-15,63%	↓
11-13 tahun	16	17	33	19,53%	1	1	2	1 %	31	1.550%	↑
7-10 tahun	13	14	27	15,98%	32	26	58	33 %	-31	-53,44%	↓
4-6 tahun	18	9	27	15,98%	10	4	14	8 %	13	92,86%	↑
1-3 tahun	26	13	39	23,08%	31	15	46	26 %	-7	-15,22%	↓
>1 tahun	10	6	16	9,47%	20	4	24	14 %	-8	-33,33%	↓
Jumlah	104	65	169	100,00%	113	63	176	100,00%	-7	-3,98%	↓

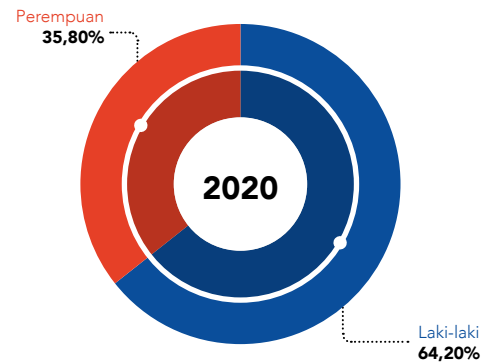
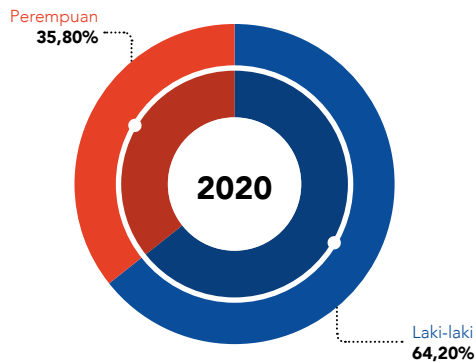
L = Laki-laki / P = Perempuan



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN (ORANG)

Status	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah	Komposisi (%)	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)	
Laki-laki	104	61,54%	113	64,20%	(9)	-7,96%	↓
Perempuan	65	38,46%	63	35,80%	2	3,17%	↑
Jumlah	169	100,0%	176	100,00%	(7)	-3,98%	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan





PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, Perusahaan melakukan pendidikan dan pelatihan berbagai bidang baik di internal maupun eksternal. Berikut ini pelaksanaan *training* yang telah dilakukan pada tahun 2020.

Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada tahun 2020 dibagi dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan Publik, adalah pelatihan yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh sumber eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll).
2. Pelatihan internal, adalah pelatihan teknis maupun non teknis yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll).
3. *Sharing Session/Friday Afternoon* adalah sarana memberikan pengetahuan secara singkat, minimal 1 jam yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll).
4. Keanggotaan adalah penggantian biaya keanggotaan (*membership*) karyawan pada suatu lembaga yang terkait dengan pekerjaannya.
5. Karyawan menjadi Narasumber, adalah di mana Karyawan memberikan *sharing* pengetahuan atau berpartisipasi aktif menjadi pembicara/narasumber.

Rangkuman dari 5 kategori kegiatan pengembangan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Subyek	Jumlah Peserta	Komposisi Karyawan yang Telah Mengikuti Pelatihan	Total Biaya
1	Pelatihan Publik	133	76	Dir. Investasi 1 & Restrukturisasi: 3,6% Dir. Investasi 2: 2,5% Dir. Utama: 93,9%	165.407.204
2	Pelatihan Internal	22	584	Dir. Investasi 1 & Restrukturisasi: 30% Dir. Investasi 2: 10,8% Dir. Utama: 59,2%	609.076.194
3	<i>Sharing Session / Friday Afternoon</i>	14	664	Dir. Investasi 1 & Restrukturisasi: 20,8% Dir. Investasi 2: 8,6% Dir. Utama: 70,6%	29.947.315
4	Keanggotaan	3	3	Dir. Utama: 100%	41.750.000
5.	Karyawan menjadi Narasumber	10	9	Dir. Investasi 1 & Restrukturisasi: 20% Dir. Investasi 2: 10% Dir. Utama: 70%	-
Total					846.180.713



Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai tambah bagi para karyawan yang dibuktikan melalui investasi pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Realisasi investasi pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp846,18 juta, mengalami penurunan 61,68% dibandingkan tahun 2019, atau mencatat pencapaian 56,40% dibandingkan anggaran tahun 2020. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)		Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%)	
	1	2	(1:2)		3	(1:3)	
Investasi Pelatihan dan Pendidikan	846	1.500	56,40%	↓	2.208	38,31%	↓

Adanya deviasi antara realisasi investasi pendidikan dan pelatihan tahun 2020 dengan anggaran serta penurunan dibandingkan tahun 2019 disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 pendidikan dan pelatihan lebih banyak dilakukan secara daring.



Uraian lengkap terkait kebijakan Perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM dapat dilihat pada pembahasan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.





PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dari Kementerian BUMN, maka Perusahaan senantiasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas masing-masing demi terealisasinya visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Selain Dewan Komisaris dan Direksi, organ penting Perusahaan lainnya seperti Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko juga mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pelatihan dan pengembangan yang telah diikuti Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Dewan Komisaris				
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Public Training	Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pasca	Jakarta, 17 Juni 2020	I'm GenZ Official
	Public Training	Reset 7 Transformasi Ekonomi (Ekonomi Reset & Transformation) Mendorong Peran Dunia Usaha dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	Jakarta, 18 Juni 2020	HIPMA - KADIN – APINDO
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain
Didyk Choirel (Komisaris)	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Public Training	Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pasca	Jakarta, 17 Juni 2020	I'm GenZ Official
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Tirta Hidayat (Komisaris Independen)	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Public Training	Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pasca	Jakarta, 17 Juni 2020	I'm GenZ Official
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain
Himawan Hariyoga Djojokusumo (Komisaris)	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Public Training	Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pasca	Jakarta, 17 Juni 2020	I'm GenZ Official
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain
Direksi				
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi)	Inhouse Training	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri	Jakarta, 18 Agustus 2020	PT Willson Properti Advisindo
	Public Training	Corporate Law for Executive Asepek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN	Jakarta, 15-18 Desember 2020	PT Pertamina Training & Consulting
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	Inhouse Training	Energi Terbarukan	Jakarta, 16 Desember 2020	PPA
Iman Rachman	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
R. Muhammad Irwan	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Public Training	Seminar Masa Depan Pengelolaan BUMN & BUMN Performance Excellence Awards 2020	Jakarta, 4 Maret 2020	Forum Ekselen BUMN
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA
Dikdik Permadi Yoffana	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Public Training	Merger & Acquisition as Part of The Corporate Strategy	Jakarta, 24 Juli 2020	Fidelitas Konsultama
Nasrizal Nazir	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Komite Audit				
Ahmad Malkan Lubis (Anggota)	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain
	Public Training	Visualizing the New in Bank Lending	Jakarta, 2 Desember 2020	Banker Association for Risk Management
Awal Susmanto (Anggota)	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain
Komite Pemantau Risiko dan GCG				
Iko Marita Mustokoweni (Anggota)	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain
	Public Training	Optimalisasi Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Selama Pandemi Covid 2020	Jakarta, 26 Agustus 2020	SustalIN
	Public Training	Visualizing the New in Bank Lending	Jakarta, 2 Desember 2020	Banker Association for Risk Management
Komite Nominasi dan Remunerasi				
Hendy M Fakhruddin (Anggota)	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Public Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 27 Juni 2020	ICMA
	Public Training	Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pasca	Jakarta, 20 Juni 2020	I'm GenZ Official
	Public Training	Compliance Risk During COVID-19 Anti Bribery Management System ISO 37001:2016	Jakarta, 21-22 Juli 2020	SAI Global dan Sustain
Sekretaris Perusahaan				
Agus Widjaja (Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan)	Inhouse Training	Media Handling and Crisis Communication	Bandung, 3 - 4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Teams for The Best Team - How to Use Microsoft Teams	Jakarta, 21 April 2020	PPA
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Sosialisasi Penerapan GCG Berdasarkan SK-16 Tahun 2012	Jakarta, 22 Juni 2020	PPA
	Inhouse Training	Digital News & Media Creative Content	Jakarta, 10 September 2020	PT Vidio Dot Com
	Inhouse Training	Leadership in the Era Crisis for Senior Managers Batch 1	Jakarta, 7 Oktober 2020	IPDC Training Institute



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Satuan Pengawas Internal				
Wahyu Widodo (Kepala Divisi Audit Internal)	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Suap	Jakarta, 6 Juli 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
Manajemen Risiko				
Sarda Yunus (Kepala Divisi Manajemen Risiko)	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30 - 31 Januari 2020	PPA
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri	Jakarta, 18 Agustus 2020	PT Willson Properti Advisindo
	Inhouse Training	Leadership in the Era Crisis for Senior Managers Batch 1	Jakarta, 7 Oktober 2020	IPDC Training Institute

Di samping itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dipercaya sebagai narasumber dalam beberapa kesempatan. Di tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi yang menjadi narasumber sebagai berikut:

Nama	Topik	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Dewan Komisaris			
Edy Putra Irawady	Prospek Industri Baja Nasional Pasca COVID-19	Jakarta, 9 Juli 2020	Forum Dialog Webinar HIPMI
Direksi			
Iman Rachman	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
Ari Soerono	Strategi Pemulihan Aset BUMN	Jakarta, 12 Agustus 2020	Squawk Box CNBC Indonesia
R. Muhammad Irwan	Know your Customer	Jakarta, 7 Februari 2020	PPA
Dikdik Permadi Yoffana	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 20 Juni 2020	ICMA Australia Indonesia



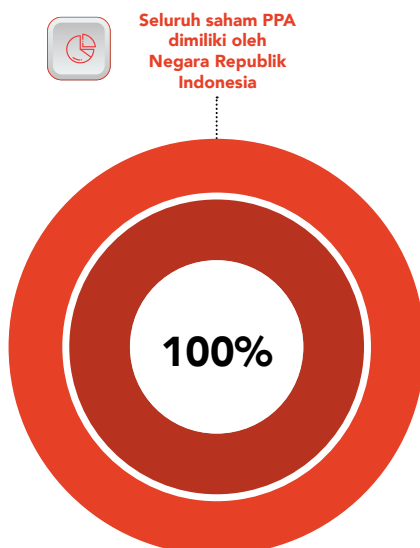
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KEPEMILIKAN SAHAM PPA DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

Kepemilikan Saham PPA per 31 Desember 2020

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham			
Negara Republik Indonesia	2.996.688	2.996.688.000.000	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2020



Seluruh saham Perusahaan atau sebanyak 100,00% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga, Negara Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN KUNCI DAN DAFTAR 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

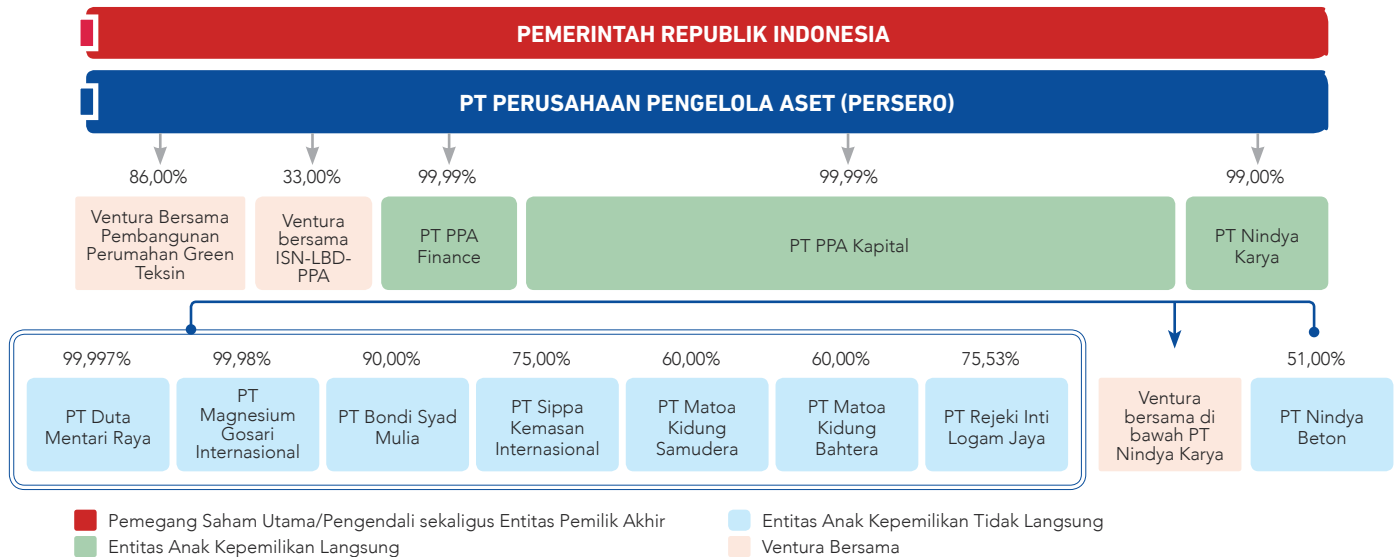
Sejak berdirinya hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek manapun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kelompok masyarakat yang memiliki saham Perusahaan

maupun daftar 20 pemegang saham terbesar selain daftar pemegang saham seperti yang telah disampaikan di atas.

Perusahaan juga tidak pernah melakukan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP), sehingga tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.



STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA



ENTITAS INDUK, ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA

ENTITAS INDUK

Seluruh saham Perusahaan atau sebanyak 100,00% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; maka Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah Republik Indonesia/ Kepresidenan	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id



ENTITAS ANAK

Nama	Bidang Usaha	Domisili	Tahun Berdiri	Tahun Beroperasi Komersial	Modal Dasar (Rp-Juta)
Kepemilikan Langsung					
PT PPA Finance	Sewa (<i>Leasing</i>); Anjak Piutang (<i>Factoring</i>); dan Pembiayaan Konsumen (<i>Consumer Financing</i>)	Jakarta	2009	2010	400.000
PT PPA Kapital	Jasa pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi); jasa konsultasi manajemen; dan jasa konsultasi keuangan.	Jakarta	2012	2012	100.000
PT Nindya Karya	Konstruksi; EPC (<i>Engineering, Procurement, dan Construction</i>); dan Investasi	Jakarta	1961	1973	7.738.000
Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT PPA Kapital					
PT Duta Mentari Raya	Pabrikasi	Jakarta	2014	2017	66.000
PT Sippa Kemasan Internasional	Pabrikasi	Jakarta	2018	2018	55.000
PT Magnesium Gosari Internasional	Pabrikasi	Gresik, Jawa Timur	2018	2018	400.000
PT Bondi Syad Mulia	Pabrikasi	Surabaya, Jawa Timur	1981	1981	200.000
PT Matoa Kidung Samudera	Kapal Isap Timah	Jakarta	2017	2018	50.000
PT Matoa Kidung Bahtera	Kapal Isap Timah	Jakarta	2017	2018	50.000
PT Rejeki Inti Logam Jaya	Pabrikasi	Tangerang	1997	1997	2.580
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT Nindya Karya					
PT Nindya Beton	Manufaktur Beton Precast	Jakarta	2013	2013	400.000



	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-Juta)	Tahun Penyertaan Modal oleh Perusahaan	Kepemilikan Perusahaan (%)				Status Operasi
			2020		2019		
			Langsung	Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	
	150.000	2009	99,99%	-	99,99%	-	Beroperasi
	100.000	2012	99,99%	-	99,99%	-	Beroperasi
	5.950.000	2012	99,00%	-	99,00%	-	Beroperasi
	33.055	2015	99,98%	-	99,98%	-	Beroperasi
	5.000	2018	99,98%	-	99,98%	-	Beroperasi
	100.000	2018	51,00%	-	51,00%	-	Beroperasi
	18.042	2018	75,00%	-	75,00%	-	Beroperasi
	31.250	2019	60,00%	-	60,00%	-	Beroperasi
	31.250	2019	60,00%	-	60,00%	-	Beroperasi
	60.000	2019	73,53%	-	73,53%	-	Beroperasi
	100.000	2013	49,00%	51,00%	49,00%	51,00%	Beroperasi



VENTURA BERSAMA

Ventura Bersama	Kegiatan	Kepemilikan Perusahaan (%)	Jumlah Investasi (Rp-juta)		Status Operasi
			2020	2019	
Ventura Bersama Langsung di Bawah Perusahaan					
Ventura Bersama - Pembangunan Perumahan Green Teksin	Proyek Pembangunan Perumahan Green Teksin	86%	60.974	60.289	Beroperasi
Ventura Bersama - ISN - LBD – PPA	Proyek Pembangunan Perumahan Bekasi	33%	41.875	45.259	Beroperasi
Ventura Bersama di Bawah Entitas Anak, PT Nindya Karya					
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Proyek Bendungan Sadawarna	60%	48.793	23.379	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Proyek Bendungan Meninting	73%	24.705	20.650	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Proyek Cisumdawu	9%	20.750	22.323	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangunnusa	Proyek Bendungan Tiusuntuk	65%	20.491	-	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - PT Modern Widya Tehnical	Proyek Fasilitas Sisi Udara Bandara Nabire Baru I	60%	11.669	-	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Proyek Bendungan Bomberay	70%	11.352	6.419	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Proyek Kalimati	60%	10.299	12.526	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Proyek Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau	70%	10.237	1.519	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	Proyek Irigasi Doplang	70%	6.140	10.893	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	Proyek Waduk Bendo	33%	8.128	-	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Proyek Pembangunan Jl.Depapre	35%	7.169	7.169	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Passokkorang	Proyek Jalan Tompe-Dalam kota Palu	70%	7.044	350	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Surya	Proyek Irigasi Lematang	70%	5.680	14.619	Beroperasi



Ventura Bersama	Kegiatan	Kepemilikan Perusahaan (%)	Jumlah Investasi (Rp-juta)		Status Operasi
			2020	2019	
Ventura Bersama Nindya - PT Rapi Tirta Treatmindo	Proyek SPAM Kalidendeng KAP.150 liter/detik	70%	5.133	-	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Proyek Jalan Rianiate	60%	4.898	4.898	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Proyek Bendungan Tanju Mila	60%	3.937	7.537	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Proyek Tol Solo - Kertosono	31%	3.823	3.823	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - PT Bumi Agung Annusa	Proyek Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika	70%	3.731	-	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Proyek Sei Wampu	45%	3.151	5.131	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	Proyek Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara	60%	3.151	1.875	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja	Proyek Tangki Balck Product RU IV Cilacap	76%	3.029	3.238	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	Proyek Pantai Marore	60%	2.854	2.910	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	Proyek Takengon - Uning	75%	2.611	2.611	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Inti	Proyek Ipai Aceh	60%	2.479	4.279	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Proyek Sukodono	70%	1.522	7.100	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Andesmont	Proyek Rembele Tahap II	70%	1.855	1.855	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Kencana	Proyek Irigasi Batang Anai Tahap 2	70%	1.738	2.612	Beroperasi
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Proyek Sungai Ciliwung	40%	1.300	1.300	Beroperasi
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)			4.222	8.479	



ENTITAS ANAK

PT PPA Finance ("PT PPAF")

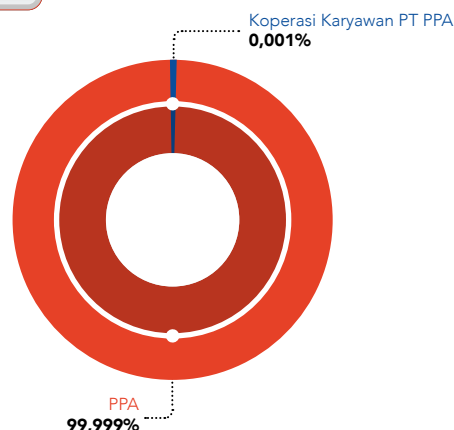
Berdasarkan persetujuan Menteri BUMN melalui surat No. S360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk entitas anak dengan nama PPAF, berkedudukan di Jakarta dengan kepemilikan saham sebesar 99,999% dan sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan Perusahaan. PPAF didirikan pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Akta No. 03 dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00096.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010. Adapun Anggaran Dasar PPAF mengalami perubahan melalui akta No. 3 tanggal 17 November 2015 dibuat di hadapan Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0946156.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 18 November 2015.

PPAF didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang pembiayaan, dengan kegiatan usaha yang mencakup:

1. Usaha Pembiayaan Investasi dengan skema Sewa Guna Usaha (*leasing*);
2. Usaha Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Anjak Piutang (*factoring*);
3. Usaha Pembiayaan Multiguna dengan skema Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.



Kepemilikan Saham PT PPAF



Alamat PT PPA Finance ("PT PPAF")

Sampoerna Strategic Square
North Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930 - Indonesia
Telp: +62 21 57951419
Faksimili: +62 21 57951420

Surel: customerservice.ppafinance@ptppa.com

Kinerja PT PPAF	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan		
			Selisih	Persentase (%)	
Keuangan					
Pendapatan Usaha (Rp-juta)	136.797	147.423	(10.626)	-7,21%	↓
Beban Usaha (Rp-juta)	(136.174)	(124.594)	(11.580)	9,29%	↑
Laba Bersih (Rp-juta)	11.202	17.044	(5.842)	-34,28%	↓
Aset (Rp-juta)	1.389.152	1.118.125	271.027	24,24%	↑
Liabilitas (Rp-juta)	1.220.696	883.192	337.504	38,21%	↑
Ekuitas (Rp-juta)	168.456	234.933	(66.477)	-28,30%	↓

Manajemen Kunci PT PPAF per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris	Heru Djojo Adhiningrat
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis

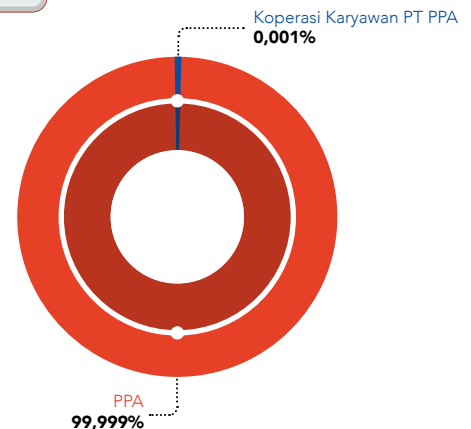
Direksi

Direktur Utama	Safei
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	FX Djonny Limena
Direktur Bisnis	Dicky Henria Nugraha

**PT PPA Kapital ("PT PPAK")**

Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, Perusahaan membentuk entitas anak dengan nama PT PPAK, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%. Sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan PPA. PT PPAK didirikan pada tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Akta No. 17 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-02691.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.

PT PPAK didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasehat keuangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT PPAK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi, dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

**Kepemilikan Saham PT PPAK****Alamat PT PPA Kapital ("PT PPAK")**

Sampoerna Strategic Square
North Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930 - Indonesia
Telp: +62 21 2512222
Faksimili: +62 21 57982555
Surel: lengga.ppak@ptppa.com

Kinerja PT PPAK	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan		
			Selisih	Persentase (%)	
Keuangan					
Pendapatan Usaha (Rp-juta)	93.625	348.786	(255.161)	-73,16%	↓
Beban Pokok Pendapatan (Rp-juta)	(67.325)	(371.100)	303.775	-81,86%	↓
Laba/(Rugi) Bersih (Rp-juta)	(42.459)	(3.317)	(39.142)	1.180,04%	↑
Aset (Rp-juta)	829.585	1.766.147	(936.562)	-53,03%	↓
Liabilitas (Rp-juta)	913.906	1.650.0156	(15.586.250)	-94,46%	↓
Ekuitas (Rp-juta)	(84.321)	116.132	(1.245.633)	-107,26%	↓

Manajemen Kunci PT PPAK per 31 Desember 2020**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama R. Muhammad Irwan

Direksi

Direktur Utama Heryanto Eko Purnomo

Direktur Lengga Nurullah

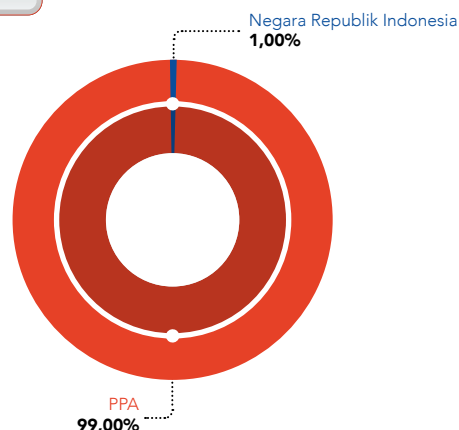


PT Nindya Karya ("PT NK")

PT NK melakukan usaha di bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, layanan jasa, pekerjaan terintegrasi, *Engineering Procurement and Construction*, rancang bangun, *building management*, industri fabrikasi, industri agro, ekspor impor, perdagangan umum, jasa penyewaan, jasa keagenan, pengelolaan Kawasan, *system development*, teknologi informasi, pengembang serta Kepariwisata dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham PT PPA pada PT NK sebesar 99,00%. Sisanya sebesar 1,00% saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.



Kepemilikan Saham PT NK



Alamat PT Nindya Karya ("PT NK")

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22
 Jakarta 13630, Indonesia
 Telp: +62 21 8093276
 Faksimili: +62 21 8093105
 Surel: nindyakarya@nindyakarya.co.id
 Situs Web: www.nindyakarya.co.id

Kinerja PT NK	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan		
			Selisih	Persentase (%)	
Operasional					
Tender yang Diikuti	28.211.167	22.449.983	5.761.184	25,66%	↑
Tender yang Dimenangkan	5,514.483	4.766.375	748.468	15,70%	↑
Nilai Kontrak Tersedia	12.745.005	14.366.296	(1.621.291)	-11,28%	↓
Keuangan					
Pendapatan Usaha (Rp-juta)	3.616.483	5.783.502	(2.167.019)	-37,47%	↓
Beban Pokok Pendapatan (Rp-juta)	(3.299.319)	(5.380.431)	2.081.112	-38,68%	↓
Laba Bersih (Rp-juta)	42.822	215.873	(173.051)	-80,16%	↓
Aset (Rp-juta)	5.486.818	6.074.322	(587.504)	-9,67%	↓
Liabilitas (Rp-juta)	3.968.743	4.386.276	(417.533)	-9,52%	↓
Ekuitas (Rp-juta)	1.518.075	1.687.935	(169.860)	-10,06%	↓

Manajemen Kunci PT NK per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Sugiyartanto
Komisaris	Rika Kiswardani
Komisaris	Andar Perdana Widiastono

Direksi

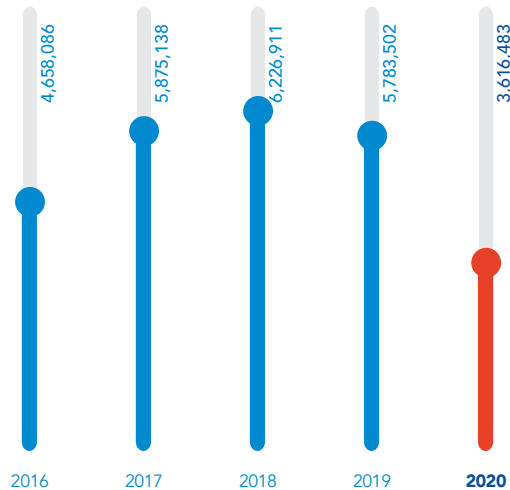
Direktur Utama	Haedar A. Karim
Direktur Keuangan dan SDM	Sri Haryanto
Direktur Produksi dan HSE	Firmansyah
Direktur Pemasaran dan Pengembangan	Moeharmein Zein Chaniago



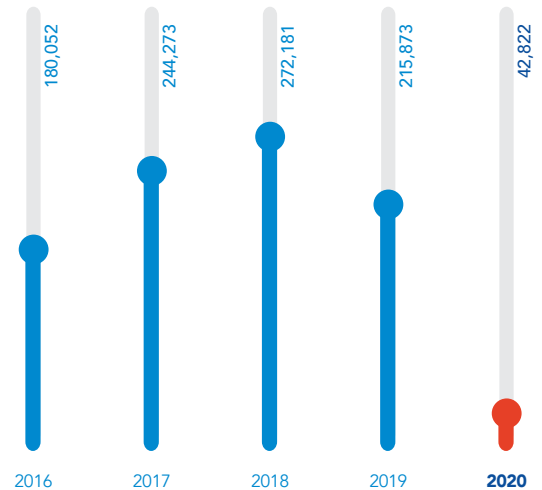
“Sejak tahun 2012, Nindya Karya menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, yang tercermin dari Pendapatan Usaha, Laba Bersih, serta nilai Aset Tetap.”



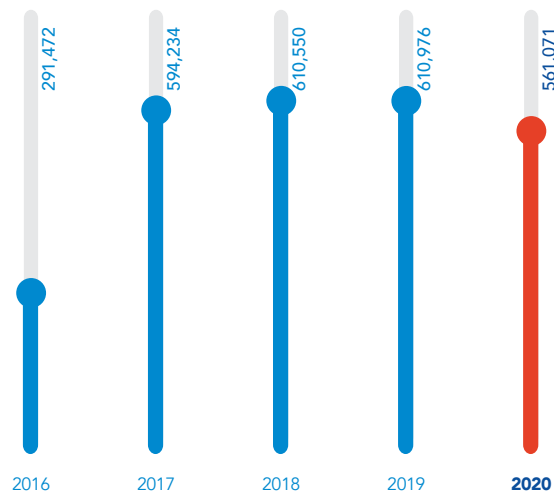
Pendapatan Usaha, 2016-2020 (Rp-juta)



Laba Bersih Tahun Berjalan, 2016-2020 (Rp-juta)



Aset Tetap, 2016-2020 (Rp-juta)



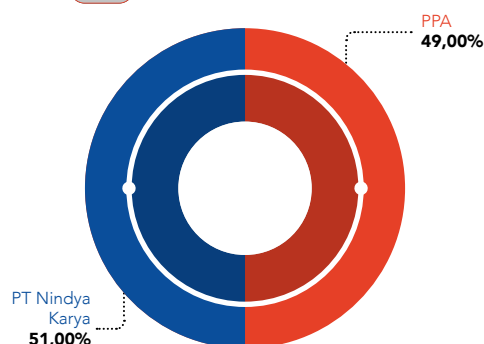


PT Nindya Beton ("PT NB")

PT NB melakukan usaha di bidang industri, fabrikasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, layanan jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), rancang bangun, *building management*, agro industri, ekspor impor, perdagangan umum, jasa penyewaan, jasa keagenan, pengelolaan Kawasan, *system development*, teknologi informasi, pengembang serta Kepariwisata untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham PT PPA pada PT NB masing-masing sebesar 49,00% dan 51,00%.



Kepemilikan Saham PT NB



Alamat PT Nindya Beton ("PT NB")

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22
 Jakarta 13630, Indonesia
 Telp: +62 21 8009070
 Faksimili: +62 21 8009073
 Surel: info.nindyabeton@gmail.com
 Situs Web: www.nindyabeton.co.id

Kinerja PT NB	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan		
			Selisih	Persentase (%)	
Operasional					
Penawaran	335.867	739.574	(403.707)	-54,59%	↓
Kontrak Didapat	279.844	452.452	(172.609)	-38,15%	↓
Keuangan					
Pendapatan (Rp-juta)	155.796	223.895	(68.099)	-30,41%	↓
Beban (Rp-juta)	(154.472)	(223.766)	69.294	-30,96%	↓
Laba (Rugi) Bersih (Rp-juta)	(16.477)	(15.461)	(1.016)	6,57%	↓
Aset (Rp-juta)	194.717	185.799	8.918	4,79%	↑
Liabilitas (Rp-juta)	172.373	131.915	40.458	30,66%	↑
Ekuitas (Rp-juta)	22.344	55.363	(33.019)	59,64%	↓

Manajemen Kunci PT NB per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Bambang Sutrisno
Komisaris	Qadrisna

Direksi

Direktur Utama	I Nengah Agus Suhada
Plt Direktur Operasional	I Nengah Agus Suhada
Direktur	Boedi Djatmiko



INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

Sejak berdirinya hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek manapun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

Perusahaan juga tidak pernah menerbitkan efek yang diperdagangkan di bursa efek manapun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis penerbitan dan pencatatan efek.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA



Untuk memperkuat struktur pendanaannya, Perusahaan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan, salah satunya melalui penerbitan surat utang obligasi di tahun 2020 serta *Medium Term Notes* dan Surat Berharga Komersial yang telah diterbitkan sejak tahun 2019.



Daftar Obligasi yang Diterbitkan Perusahaan (Bursa Perdagangan: Bursa Efek Indonesia)

Tahun Penerbitan	Kode Obligasi	Nama Obligasi	Nilai Outstanding (Rp-juta)	Tingkat Bunga per Tahun	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu (Tahun)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat dari Pefindo	Status
2020	PPAP	Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)							
		Seri A	100.000	9,95%	1 September 2020	3	31 Agustus 2023	idA (Single A)	Aktif
		Seri B	345.000	10,55%	1 September 2020	5	31 Agustus 2025	idA (Single A)	Aktif
		Seri C	197.100	11,00%	1 September 2020	7	31 Agustus 2027	idA (Single A)	Aktif
		Jumlah	642.100						

Di tahun 2020, Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp642,10 miliar dengan tanggal efektif 1 September 2020. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2020 dengan nomor Surat Pencatatan S-04942/BEI.PP3/08/2020. Obligasi ini terbagi atas 3 (tiga) seri Obligasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

Daftar Surat Utang Lainnya yang Diterbitkan Perusahaan dan Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek

Surat Utang Lainnya	Nilai (Rp-juta)	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Peringkat dari Pefindo	Status
MTN I PPA Tahun 2019 Seri A	300.000	8 November 2019	2 tahun	7 November 2021	10,05% p.a	idA (Single A)	Aktif
MTN I PPA Tahun 2019 Seri B	450.000	8 November 2019	3 tahun	7 November 2022	10,30% p.a	idA (Single A)	Aktif
Surat Berharga Komersial	100.000	27 November 2019	1 tahun	26 November 2020	7,50% p.a	idA (Single A)	Lunas



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
www.cimbniaga.co.id
Telp. +6221-2505151
Faks. +6221-2505206
Bentuk Jasa: Jasa Kustodian
Periode Penugasan: 2019
Biaya: 0,035% p.a

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Telp. +6221-29249088
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
www.trimegah.com
Bentuk Jasa: Penjamin Emisi (*underwriter*)
Periode Penugasan: 2020
Biaya: 0,35%

Wali Amanat

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Telp. 14017 / 1500017
Gedung BRI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
www.bri.co.id
Bentuk Jasa: Perbankan
Jasa Lainnya: wali amanat Obligasi
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Rp100.000.000,-

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan

Telp. +6221- 7342724
Surel Voctorian Bintaro Business Park BB 9
Jl. Bintaro Utama 3A, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15225
Bentuk Jasa: Kantor Akuntan Publik
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Rp33.000.000,-

Pemeringkat Efek

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Plaza Mandiri, 22nd Fl.
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telp. +6221- 50968469
www.pefindo.com
Bentuk Jasa : Pemeringkat Efek
Periode Penugasan: 2020
Biaya: 0,05%



Daftar Akuntan Publik 2015-2020

Tahun Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Akuntan Publik	Opini	Biaya Jasa (Rp)
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181	Benny Andria	Wajar Tanpa Pengecualian	627.000.000
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181	Benny Andria	Wajar Tanpa Pengecualian	594.000.000
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0499	Saptoto Agustomo	Wajar Tanpa Pengecualian	500.000.000
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0499	Saptoto Agustomo	Wajar Tanpa Pengecualian	528.000.000
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0499	Saptoto Agustomo	Wajar Tanpa Pengecualian	522.500.000
2015	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0499	Saptoto Agustomo	Wajar Tanpa Pengecualian	709.500.000

Konsultan Hukum

Tjajo & Partners

Telp. 0818-761890
Satrio Tower, Lantai 15,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Jakarta 12950
Bentuk Jasa: Konsultan Hukum
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Rp1.080.000.000,-

Notaris

Notaris Desman, SH, Mhum, MM

Jl. Muara Karang Raya No.10
Jakarta Utara 14450
Bentuk Jasa: Notaris
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Rp1.750.000,-

Penilai

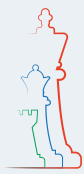
KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan

Telp. 0811-9911180
Jl. Rawa Kupa Utama No. 23 Jakarta Barat
Bentuk Jasa: Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Rp104.500.000,-

Pemeringkat Obligasi

PT Fitch Rating Indonesia

DBS Bank Tower, 24th floor, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Bentuk Jasa: Pemeringkat Obligasi
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Nilai Imbalan Jasa untuk biaya pemeringkatan obligasi yang akan diterbitkan adalah sebesar 5.00 Basis dari nilai realisasi penerbitan



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN TAHUN 2020 BERSKALA NASIONAL

BUMN 'Good Performance'

Deskripsi Penghargaan: Penghargaan BUMN Performance Excellence Awards 2020, dimana PPA menerima penghargaan sebagai BUMN 'Good Performance' atas hasil *assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun buku 2018 yang dinilai pada tahun 2019 dengan capaian skor sebesar 511,25. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 507,50 kategori 'Good Performance'.

Pemberi Penghargaan: Forum Ekselen BUMN (FEB) dan Majalah Infobank

Tanggal Diberikan: 4 Maret 2020

Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik BUMN Non Terbuka (Tbk)

Deskripsi Penghargaan: Penghargaan Anugerah BUMN 2020

Pemberi Penghargaan: BUMN Track

Tanggal Diberikan: Juli 2020

CEO Visioner Terbaik

Deskripsi Penghargaan: Penghargaan Anugerah BUMN 2020

Pemberi Penghargaan: BUMN Track

Tanggal Diberikan: Juli 2020

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2020

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang dilakukan oleh TUV NORD Indonesia selaku lembaga sertifikasi ISO 37001-2016, pada 10 Agustus 2020, berlaku hingga 9 Agustus 2023



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Dalam menerapkan prinsip keterbukaan, Perusahaan menerapkan berbagai peraturan terkait, salah satunya adalah keterbukaan dalam penyampaian informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Di samping itu, Perusahaan memiliki kebijakan terkait keterbukaan informasi yang tertuang dalam keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0516 tanggal 25 Mei 2016 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Perusahaan memiliki situs web dengan alamat www.ptppa.com. Perusahaan selalu berupaya menyempurnakan situs web tersebut secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses oleh para pemangku kepentingan. Situs web Perusahaan memiliki 2 (dua) versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Situs web Perusahaan juga memuat informasi mengenai praktik GCG yang telah diterapkan oleh Perusahaan antara lain Struktur Organisasi dan Tim Manajemen (memuat susunan terbaru dari Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham, *Core Values* serta *Governance Structure* dan dokumen-dokumen pedoman serta perangkat kebijakan seperti Pedoman GCG, *Code of Conduct*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS), dan berbagai dokumen kebijakan lainnya.

Informasi	Kesesuaian	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	√	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu "Annual Report"
Informasi mengenai menu Tata Kelola yang memuat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perusahaan	√	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Kinerja" dan "Tata Kelola yang Baik"
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	√	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu "Annual Report"
Laporan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	√	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu "Annual Report"
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	√	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu "Annual Report"
Profil Dewan Komisaris dan Direksi dan	√	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Manajemen"
Informasi mengenai <i>Board Manual</i>	√	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Tata Kelola yang Baik" kemudian menu "GCG"

√ = telah dimuat dalam situs web www.ptppa.com | x = belum termuat dalam situs web www.ptppa.com

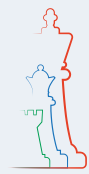


ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Munculnya pandemi COVID-19 pada awal 2020 memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian khususnya kinerja finansial dan operasional keseluruhan BUMN, yang kemudian disikapi oleh Kementerian BUMN dengan mengeluarkan surat tentang Perubahan RKAP 2020 BUMN. Berdasarkan surat tersebut, serta merespon potensi risiko atas dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja Perusahaan, PPA melakukan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2020.







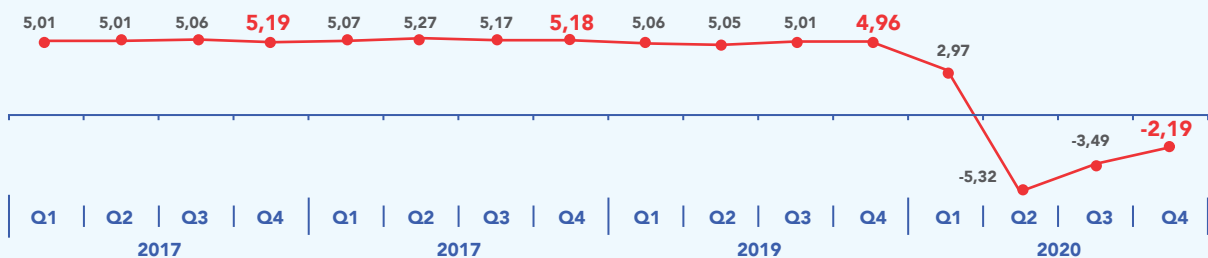
TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan sebagai akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) yang dikutip dari dokumen "Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2020" oleh Bank Indonesia, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global per Oktober 2020 di angka defisit 4,4%, tidak jauh berbeda dengan angka proyeksi yang dirilis Bank Indonesia sebesar defisit 3,8%. Defisit ini membaik dari pertengahan tahun, di mana IMF memberikan proyeksi angka pertumbuhan ekonomi global per Juni 2020 sebesar defisit 5,2%.

Kontraksi perekonomian terbesar justru terjadi pada negara-negara maju. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara maju per Oktober 2020 sebesar defisit 5,8%, jauh membaik dari kondisi di bulan Juni yang berada di angka defisit 8,1%. Kawasan Eropa dan Amerika Serikat menjadi yang paling terkena imbas, terutama dengan menyebarnya pandemi COVID-19 di wilayah Eropa. Pada saat laporan tahunan ini dibuat, data WHO menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat pandemi COVID-19 untuk 10 negara teratas adalah Amerika Serikat, diikuti oleh India, Brazil, Rusia, Inggris Raya, Perancis, Spanyol, Italia, Turki dan Jerman.

Sejalan dengan situasi tersebut, perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami perlambatan yang tercermin dari stagnansi berbagai industri dan korporasi. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak rencana dan proyeksi perekonomian baik makro maupun mikro. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Year on Year (YoY) pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, kuartal II-2020 sebesar defisit 5,32%, kuartal III-2020 sebesar defisit 3,49%, dan kuartal IV-2020 sebesar defisit 2,19%.

Pertumbuhan Ekonomi per triwulan, 2017-2020 (YoY)

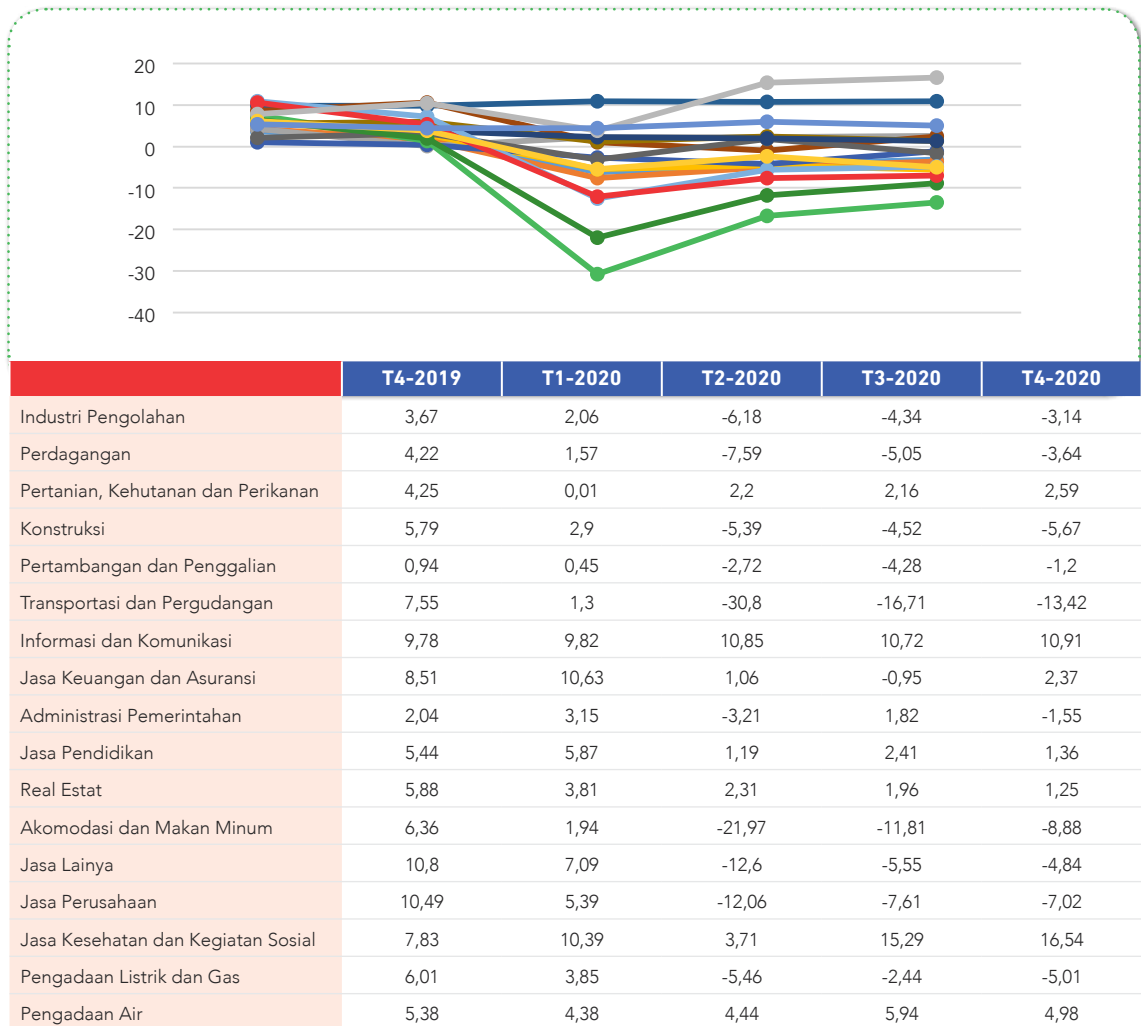


Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2021

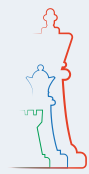
Meskipun angka resmi yang dirilis ini masih lebih baik dari perekonomian global, perekonomian yang negatif berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan penduduk miskin, khususnya yang terjadi pasca pengurangan tenaga kerja oleh banyak korporasi. Sebagaimana terlihat pada bagan di bawah, hampir seluruh perekonomian industri terkoreksi sejak kuartal I-2020, yang kemudian terkoreksi cukup dalam pada kuartal II-2020 atau di kisaran pertengahan tahun 2020. Hanya industri Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menunjukkan tren pertumbuhan, di mana ke-2 industri ini menjadi primadona di sepanjang tahun 2020.



Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 4-2019 s.d.Triwulan 4-2020 (YoY) Menurut Lapangan Usaha



Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2021



KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020

Pengembangan strategi usaha dan kebijakan untuk mencapai sasaran Perusahaan dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kegiatan utama.

Pengembangan Kebijakan Strategis Perusahaan



Berikut penjelasan dari masing-masing kegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Aset Negara Eks BPPN
Kerja sama Investasi atas aset-aset Kementerian Keuangan yang berpotensi untuk dikembangkan baik dilakukan sendiri dan/atau kerja sama dengan mitra strategis.
2. Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN ("RR")
 - a. Melaksanakan implementasi program restrukturisasi dan/atau revitalisasi secara menyeluruh pada masing-masing BUMN berdasarkan persetujuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan kerja sama melalui sinergi BUMN dan/atau mitra strategis untuk mendukung pelaksanaan program restrukturisasi dan/atau revitalisasi;
 - c. Memberikan pendanaan jangka pendek/jangka panjang baik melalui perbankan, mitra strategis atau melalui instrumen keuangan lain;
 - d. Melakukan penagihan, mengupayakan pengurangan *impairment* dan melakukan restrukturisasi pinjaman terkait kegiatan RR.
3. Kegiatan Investasi
 - a. Pengelolaan dan/atau pembelian *distressed asset* terutama melalui perbankan, dari Bank BUMN atau Himpunan Bank milik Negara ("Himbara");
 - b. Investasi melalui penyertaan modal, kerja sama dan *trading*;
 - c. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan NPL Bank Pemerintah/Swasta dan afiliasinya;
 - d. Melakukan kerjasama investasi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta untuk pembiayaan;
 - e. Melakukan kerja sama investasi dalam bentuk *Joint Venture*, KSO, dan lain-lain;
 - f. Investasi langsung dan tidak langsung untuk properti.



4. Kegiatan Jasa Konsultasi
 - a. Melakukan komunikasi intensif dengan *existing Client* untuk memperoleh proyek baru (*repeat order*);
 - b. Melakukan kerjasama dengan konsultan lain baik *team-up* maupun sebagai *coadvisor* dalam pemberian jasa *advisory* kepada pihak ketiga;
 - c. Melakukan *mapping* dan pengembangan atas jasa konsultasi yang dapat diberikan kepada calon *Client*.
5. Kegiatan Pengelolaan Anak Perusahaan
 - a. Memberikan arahan dan persetujuan dalam penyusunan RKAP anak perusahaan, untuk diselaraskan dengan kepentingan PT PPA selaku induk usaha;
 - b. Melakukan *monitoring* secara berkala atas pencapaian kinerja sesuai target baik jangka pendek maupun jangka panjang anak perusahaan;
 - c. Melakukan *monitoring* secara berkala atas penerapan *good corporate governance* pada aktivitas usaha anak perusahaan;
 - d. Menerapkan sistem deteksi dini, salah satunya berdasarkan laporan kinerja anak perusahaan yang secara berkala disampaikan;
 - e. Menindaklanjuti hasil *monitoring* dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - f. Menempatkan wakil PPA sebagai Direksi/Manajemen dan Komisaris pada anak perusahaan;
 - g. Memberikan pinjaman untuk pengembangan usaha dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pendanaan.
6. Kegiatan Dukungan Kerja
 - a. Menjaga *brand image* PPA, memelihara dan mengembangkan hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
 - b. Menyusun, dan memastikan tersedianya Kebijakan dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan penerapan manajemen risiko termasuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah ada dalam rangka memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kegiatan Perusahaan;
 - c. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan, antara lain melalui:
 - Pelaksanaan kajian risiko atas setiap usulan kegiatan/proyek yang akan dilakukan;
 - Melakukan asesmen risiko secara berkala dan menyusun laporan profil risiko.
 - d. Melakukan fasilitasi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan budaya risiko;
 - e. Memperoleh pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang baik melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan Surat Utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang Lainnya);
 - f. Mendukung kegiatan bisnis dan operasional PPA melalui *Mobile Office* dan *Mobile Platform*;
 - g. Penambahan portofolio *shared service* kepada anak perusahaan dan perusahaan kelolaan;
 - h. Mendukung kegiatan bisnis PPA melalui pengadministrasian data, dokumen dan kepatuhan bagi debitur/klien;
 - i. Pengembangan *Decision Support System (DSS)* yang diperlukan bagi manajemen dengan mengolah data antara lain data kinerja keuangan perusahaan, data *profile* masing-masing debitur/klien, data kewajiban debitur/klien, data progres proyek dan data lain yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan;
 - j. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada untuk memenuhi kegiatan bisnis perusahaan;
 - k. Membangun *Talent Pool* yang diyakini dapat membangun mewujudkan tujuan Perusahaan;
 - l. Membangun *Pool of Resources* untuk mendukung kegiatan bisnis Perusahaan;
 - m. Meningkatkan *Salary Structure* yang bersaing dalam industri dan menerapkan pengukuran kinerja yang berbasis KPI, serta pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan Karyawan yang berfokus pada kebutuhan bisnis;
 - n. Meningkatkan terus nilai indikator KPI yang belum maksimal yakni dengan mendapatkan nilai lebih baik untuk penilaian pengguna terhadap kinerja internal/*external service* dan *procurement*;
 - o. Optimalisasi aset gedung ex PT EMI dengan menyewakan kepada pihak ketiga;
 - p. Memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh Perusahaan sejalan dengan ketentuan perundangan;
 - q. Memberikan dukungan aspek hukum atas kegiatan Perusahaan melalui:
 - Penyusunan dan/atau review dokumen perjanjian transaksi dan dokumen hukum lainnya;
 - Pemberian konsultasi mengenai aspek hukum dalam seluruh aktivitas Perusahaan;
 - Pendampingan dan/atau penanganan aspek hukum dalam hal Perusahaan menghadapi permasalahan hukum.
 - r. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian/komitmen yang telah dibuat oleh Perusahaan.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Sejak Perusahaan mencatat perdagangan surat utang obligasi di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020, Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2020 menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi yang menggambarkan:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari Perusahaan);
2. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh manajemen untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
3. Tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan;
4. Segmen operasi Perusahaan terdiri dari Investasi, Pembiayaan, Fabrikasi Beton, dan Konstruksi.

Segmen Operasi PPA

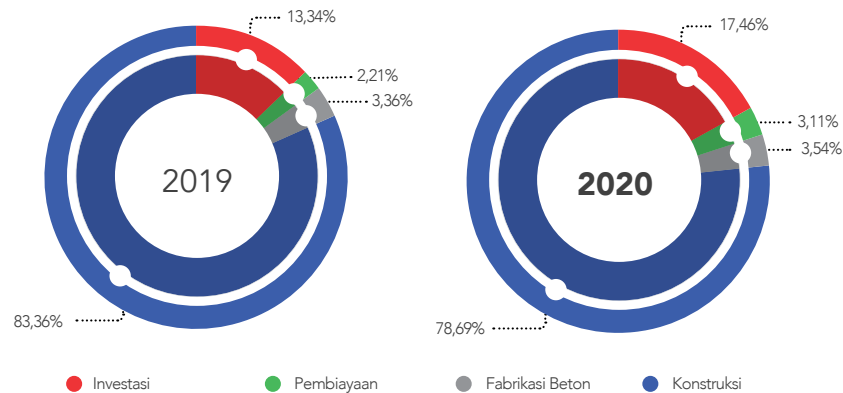


Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan struktur pendapatan Perusahaan yang menggambarkan masing-masing segmen.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Pendapatan Usaha Konsolidasian

Segmen	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4 = 3-1)	(5 = 4/3)	
Investasi	682.223	15,51%	540.637	8,11%	141.586	26,19%	↑
Pembiayaan	136.797	3,11%	147.423	2,21%	(10.626)	-7,21%	↓
Fabrikasi Beton	155.796	3,54%	223.895	3,36%	(68.099)	-30,42%	↓
Konstruksi	3.460.687	78,69%	5.559.607	83,36%	(2.098.920)	-37,75%	↓
Eliminasi*)	(131.284)	-2,99%	(150.891)	-2,26%	19.607	-12,99%	↓
Jumlah Pendapatan Usaha	4.397.844	100,00%	6.669.457	100,00%	(2.271.613)	-34,06%	↓

*) Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha

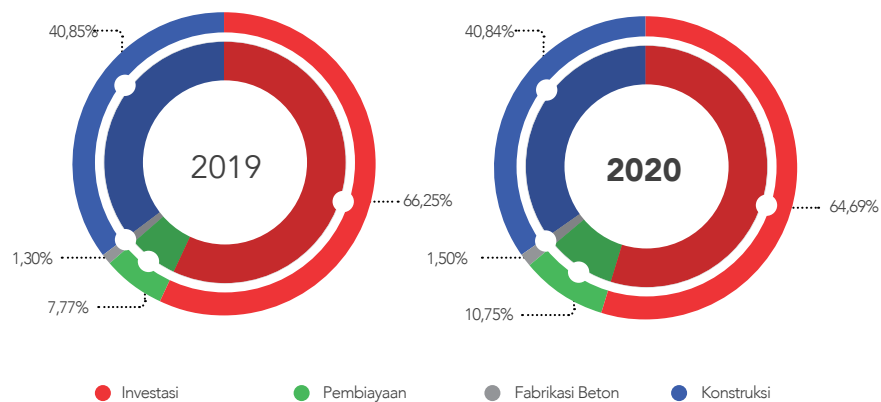
**Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Konsolidasian**

*) Belum termasuk eliminasi (transaksi antar entitas dalam grup)

Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Aset Konsolidasian

Segmen	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4 = 3 - 1)	(5 = 4 / 3)	
Investasi	8.336.223	64,33%	9.550.929	66,25%	(1.168.406)	-12,23%	↓
Pembiayaan	1.392.690	10,75%	1.120.334	7,77%	272.357	24,31%	↑
Fabrikasi Beton	194.718	1,50%	187.439	1,30%	7.279	3,88%	↑
Konstruksi	5.292.101	40,84%	5.888.883	40,85%	(596.782)	-10,13%	↓
Eliminasi*)	(3.087.336)	-23,83%	(2.332.153)	-16,18%	28.102	-1,20%	↓
Jumlah Aset	12.957.981	100,00%	14.415.432	100,00%	(1.457.451)	-10,11%	↓

*) Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha

**Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Aset Konsolidasian**

Dari tabel dan bagan bagian Pendapatan Usaha, segmen Konstruksi memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Usaha konsolidasian Perusahaan, yang mencapai masing-masing sebesar 83,36% dan 78,69% di tahun 2019 dan 2020. Sedangkan pada tabel dan bagan Aset di atas, terlihat bahwa segmen Investasi berperan besar terhadap kinerja nilai Aset Perusahaan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 66,25% dan 64,69% di tahun 2019 dan 2020.



Berikut disampaikan kinerja masing-masing segmen.

INVESTASI

Kegiatan Usaha dan Kinerja Operasi Segmen Investasi

Segmen usaha Investasi didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan, mencakup kegiatan:

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:
 - a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya;
 - c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset;
 - d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.
2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:
 - a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan
 - b. Pembelian saham, *warrant* dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

Di tahun 2020, Perusahaan melakukan investasi berupa pemberian pinjaman investasi jangka pendek kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga lainnya.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Investasi

Profitabilitas segmen Investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Investasi

	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan Usaha	768.052	889.423	(121.371)	-13,65%	↓
Beban Usaha	(648.179)	(874.624)	226.445	-25,89%	↓
Laba Usaha	119.873	14.799	105.074	710,01%	↑
Pendapatan Bunga	14.419	15.424	(1.005)	-6,52%	↓
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	237	(237)	-	
Beban Bunga dan Keuangan	(2.693)	(3.198)	505	-15,79%	↓
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	7.445	41.528	(34.083)	-	
Bagian Laba/(Rugi) Ventura Bersama	(3.437)	1.929	(5.366)	-278,18%	↓
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(45.522)	75.562	(121.084)	-160,24%	↓
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	90.085	146.281	(56.196)	-38,42%	↓
Jumlah Pajak Penghasilan	(41.792)	1.223	(43.015)	-3.517,17%	↓
Laba Tahun Berjalan	48.293	147.504	(99.211)	-67,26%	↓
Posisi Keuangan					
Total Aset	8.382.523	9.550.929	(1.168.406)	-12,23%	↓
Total Liabilitas	5.596.417	5.230.878	365.539	6,99%	↑
Total Ekuitas	2.786.106	4.320.051	(1.533.945)	-35,51%	↓
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	8.382.523	9.550.929	(1.168.406)	-12,23%	↓



Di tahun 2020, pendapatan usaha dari segmen Investasi tercatat sebesar Rp768,05 miliar, mengalami penurunan 13,65% bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp889,42 miliar. Penurunan pendapatan usaha terutama dipengaruhi oleh pendapatan bunga kontrak pinjaman investasi. Sedangkan laba bersih segmen Investasi mencatat penurunan yang terutama disebabkan adanya kenaikan beban-beban serta bagian dari ventura bersama yang mencatat kerugian.

Total aset dari segmen Investasi mengalami penurunan 12,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang terutama disebabkan oleh efek penerapan PSAK 71 dan 73 pada tahun 2020.

Rencana Pengembangan

Perusahaan melakukan kegiatan investasi dalam bentuk kerja sama pembiayaan pada perusahaan/aset dalam bidang industri yang menjadi target, baik dari portofolio *existing* maupun *special situation fund*. Dalam melakukan investasi Perusahaan secara periodik akan melakukan *review* dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, domestik dan faktor lain sesuai dengan target dan membuat batasan industri yang

tidak dapat dijadikan target investasi (*negative list*) dalam berinvestasi. Program kerja atau kegiatan dari investasi ditargetkan akan memberikan kontribusi pendapatan kepada PT PPA induk sebesar Rp762.985 juta.

PEMBIAYAAN

Kegiatan Usaha dan Kinerja Operasi Segmen Pembiayaan

Segmen usaha Pembiayaan didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas anak, PT PPA Finance ("PPAF"), mencakup kegiatan:

1. Usaha Pembiayaan Investasi dengan skema Sewa Guna Usaha (*leasing*);
2. Usaha Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Anjak Piutang (*factoring*);
3. Usaha Pembiayaan Multiguna dengan skema Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.
4. Di tahun 2020, PPAF melakukan pembiayaan antara lain kepada PT Pindad (Persero), PT Indostar Aviation dan PT Bitilasegara Indoperkasa.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Pembiayaan

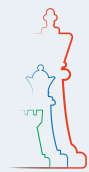
Profitabilitas segmen Pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Pembiayaan

	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan Usaha	136.797	147.423	(10.626)	-7,21%	↓
Beban Usaha	(136.227)	(124.897)	(11.330)	9,07%	↑
Laba Usaha	570	22.526	(21.956)	-97,47%	↓
Penghasilan (Beban) Lain-lain	18.806	167	18.639	11.161,08%	↑
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	19.376	22.693	(3.317)	-14,62%	↓
Jumlah Pajak Penghasilan	(8.173)	(5.649)	(2.524)	44,68%	↑
Laba Tahun Berjalan	11.203	17.044	(5.841)	-34,27%	↓
Posisi Keuangan					
Total Aset	1.392.690	1.120.334	272.357	24,31%	↑
Total Liabilitas	1.224.235	885.400	338.835	38,27%	↑
Total Ekuitas	168.455	234.934	(66.478)	-28,30%	↓
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.392.690	1.120.334	272.356	24,31%	↑

Di tahun 2020, pendapatan usaha dari segmen Pembiayaan tercatat sebesar Rp136,80 miliar, masih di bawah 7,21% bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp147,42 miliar. Adanya koreksi kinerja pendapatan usaha ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan sewa pembiayaan PT PPAF. Sedangkan laba bersih segmen Pembiayaan mencatat penurunan yang terutama disebabkan adanya kenaikan beban-beban.

Pada posisi keuangan, baik total aset maupun liabilitas dari segmen Pembiayaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman pemegang saham.



Rencana Pengembangan

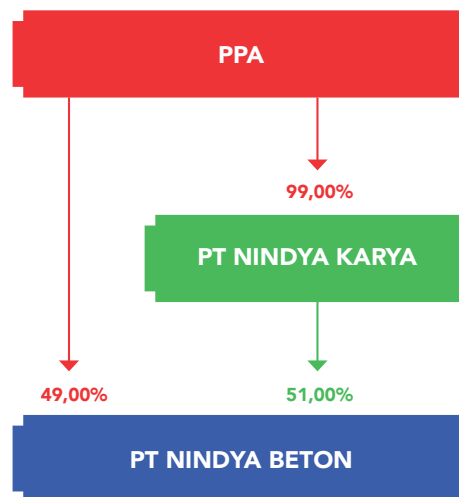
Rencana pengembangan bisnis segmen Pembiayaan yang akan dilakukan PPAF di tahun 2021 adalah:

1. *Leasing* terutama untuk pembiayaan investasi dan modal kerja antara lain dalam bentuk pembiayaan alat berat, mesin-mesin dan alat transportasi ditargetkan sebesar $\pm 21\%$ dari total pembiayaan di 2021 atau Rp200 miliar;
2. *Factoring* untuk pembiayaan modal kerja ditargetkan sebesar $\pm 78\%$ dari total pembiayaan di 2021 atau Rp740 miliar. Produk ini tetap diperlukan karena dapat menjembatani (*bridging*) kebutuhan *cash flow* perusahaan. Produk Anjak Piutang merupakan salah satu strategi untuk membuka peluang atas produk-produk pembiayaan lainnya;
3. *Consumer Finance* untuk pembiayaan konsumtif antara lain kendaraan roda 4 baik untuk kendaraan operasional atau kendaraan pribadi ditargetkan sebesar $\pm 1\%$ atau Rp10 miliar.

FABRIKASI BETON

Kegiatan Usaha dan Kinerja Operasi Segmen Fabrikasi Beton

Segmen usaha Fabrikasi Beton didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas anak, PT Nindya Beton ("PTNB") di mana Perusahaan memiliki 100% saham PTNB, yang terdiri dari 49% saham yang dimiliki langsung oleh Perusahaan dan sisanya sebesar 51% dimiliki melalui entitas anak, PT Nindya Karya.



PTNB mengembangkan fabrikasi beton dalam rangka menopang kegiatan usaha konstruksi yang dilakukan oleh NK. Di tahun 2020, kontribusi pendapatan terbesar NB tahun 2020 berasal dari penjualan *ready mix*, dan untuk meningkatkan pendapatannya, NB dengan dukungan dari NK akan menggarap pasar konstruksi dengan kontrak di bawah Rp100 miliar. Kinerja PTNB di tahun 2020 masih belum menunjukkan peningkatan berarti dibanding tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan sampai hanya mencapai 61,02% dari target revisi RKAP 2020. Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi pendapatan mengalami penurunan sebesar 30,42%. Hal tersebut antara lain disebabkan karena mundurnya beberapa proyek APBD maupun *retail* swasta dan juga efek kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengurangi jam kerja produksi. Perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp5,5 miliar, jauh dari target laba yang ditetapkan pada revisi RKAP 2020 sebesar Rp1,4 miliar.



Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Fabrikasi Beton

Profitabilitas segmen Fabrikasi Beton dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Fabrikasi Beton

	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan Usaha	155.796	223.895	(68.099)	-30,42%	↓
Beban Usaha	(154.472)	(235.492)	81.022	-34,41%	↓
Laba/(Rugi) Usaha	1.324	(11.597)	12.923	-111,41%	↓
Beban Bunga dan Keuangan	(1.290)	-	(1.290)	-	↓
Beban Pajak Final	(1.502)	-	(1.502)	-	↓
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(13.125)	-	(13.125)	-	↓
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(14.593)	(11.597)	(2.994)	25,81%	↑
Jumlah Pajak Penghasilan	(1.883)	-	(1.883)	-	↓
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(16.476)	(11.597)	(4.877)	42,05%	↑
Laba/(Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
- Pemilik Entitas Induk	(16.311)	(11.481)	(4.830)	42,07%	↑
- Kepentingan nonpengendali	(165)	(116)	(49)	42,04%	↑
	(16.476)	(11.597)	(4.879)	42,07%	↑
Posisi Keuangan					
Total Aset	194.718	187.439	7.279	3,88%	↑
Total Liabilitas	172.374	125.690	46.684	37,14%	↑
Total Ekuitas	22.344	61.749	(39.405)	-63,81%	↓
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	194.718	187.439	7.279	3,88%	↑

Di tahun 2020, pendapatan usaha dari segmen Fabrikasi Beton tercatat sebesar Rp155,80 miliar, masih di bawah bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp223,89 miliar. Adanya koreksi kinerja pendapatan usaha ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan usaha Nindya Beton.

Rencana Pengembangan

Rencana pengembangan bisnis segmen fabrikasi beton yang akan dilakukan di tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kontribusi segmen konstruksi dan meningkatkan infrastruktur *tender*.
2. Melakukan *Cost Reduction Program* (efisiensi) pada biaya produksi dan operasi salah satunya dengan skema sewa peralatan produksi dengan membeli peralatan produksi sendiri.
3. Menerapkan *cost control* secara harian pada proses operasi, sebagai bentuk pengendalian biaya dan dasar evaluasi efisiensi.
4. Menerapkan *control* mutu produk beton *readymix* secara periodik per 3 (tiga) harian, sebagai dasar evaluasi pengendalian mutu dan efisiensi

KONSTRUKSI

Kegiatan Usaha dan Kinerja Operasi Segmen Konstruksi

Segmen usaha Fabrikasi Beton didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas anak, PT Nindya Karya ("PTNK"), di mana Perusahaan memiliki saham PTNK sebesar 99,00%, sedangkan sisanya sebesar 1,00% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

PTNK melakukan usaha di bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, layanan jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), rancang bangun, *building management*, industri fabrikasi, industri agro, ekspor impor, perdagangan umum, jasa penyewaan, jasa keagenan, pengelolaan Kawasan, *system development*, teknologi informasi, pengembang serta Kepariwisata dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.



Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Konstruksi

Profitabilitas segmen Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Konstruksi

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Pendapatan Usaha	3.460.687	5.559.607	(2.098.920)	-37,75%	↓
Beban Usaha	(3.348.670)	(5.142.660)	1.793.990	-34,88%	↓
Laba Usaha	112.017	416.947	(304.930)	-73,13%	↓
Beban Bunga dan Keuangan	(87.821)	(86.032)	(1.789)	2,08%	↑
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	18.724	-	18.724	100,00%	↑
Beban Pajak Final	(100.207)	(159.199)	58.992	-37,06%	↓
Bagian Laba Ventura Bersama	91.342	64.777	26.565	41,01%	↑
Penghasilan (Beban) Lain-lain	30.641	(4.808)	35.449	-737,29%	↓
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	64.695	231.685	(166.990)	-72,08%	↓
Jumlah Pajak Penghasilan	(5.396)	(4.213)	(1.183)	28,08%	↑
Laba Tahun Berjalan	59.299	227.472	(168.173)	-73,93%	↓
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
- Pemilik Entitas Induk	58.706	225.196	(166.490)	-73,93%	↓
- Kepentingan nonpengendali	593	2.275	(1.682)	-73,93%	↓
	59.299	227.471	(168.172)	-73,93%	↓
Posisi Keuangan					
Total Aset	5.292.101	5.888.883	(596.782)	-10,13%	↓
Total Liabilitas	3.796.370	4.263.995	(467.625)	-10,97%	↓
Total Ekuitas	1.495.731	1.624.888	(129.157)	-7,95%	↓
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.292.101	5.888.883	(596.782)	-10,13%	↓

Di tahun 2020, pendapatan usaha dari segmen Konstruksi tercatat sebesar Rp3,46 triliun, masih di bawah bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp5,56 triliun. Adanya koreksi kinerja pendapatan usaha ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan konstruksi Nindya Karya.

Total aset dari segmen Konstruksi masih di bawah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang terutama disebabkan efek penerapan PSAK 71 dan 73 pada tahun 2020.

Rencana Pengembangan

Rencana pengembangan bisnis segmen Konstruksi yang akan dilakukan PTNK di tahun 2021 adalah:

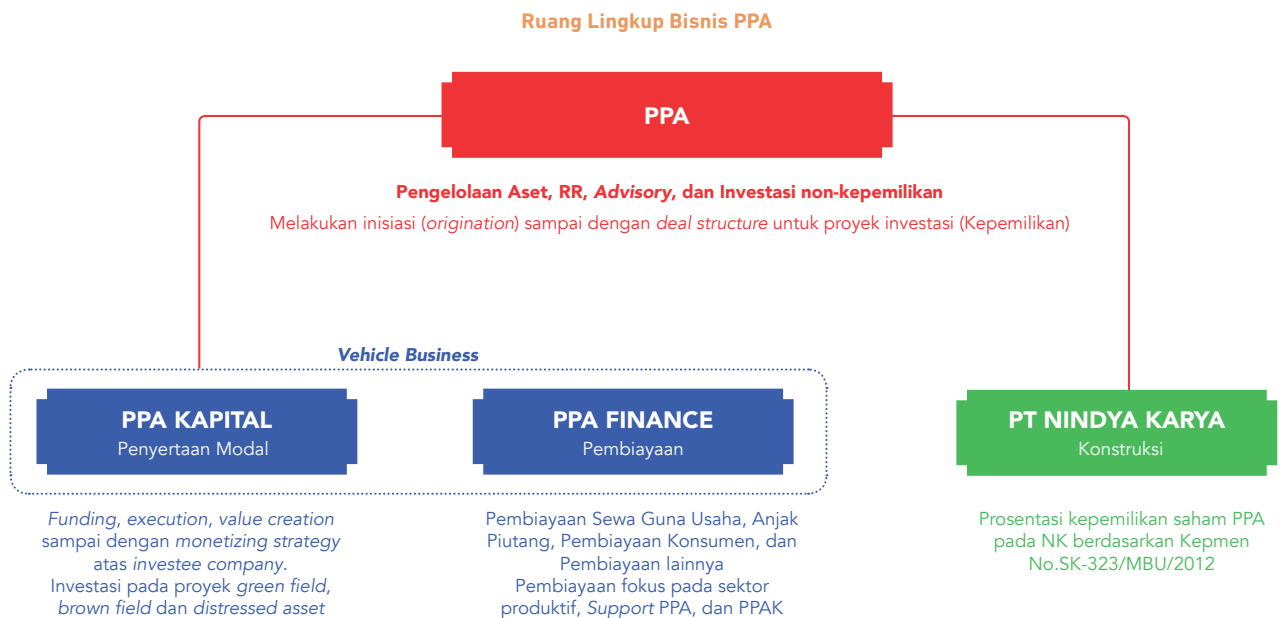
1. Melakukan usaha di bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Penguatan bidang operasional melalui aplikasi ERP terintegrasi.
3. Pengembangan Bisnis di bidang Energi, Penyewaan Alat Berat, Refinery dan bidang Properti/Realti.



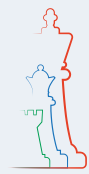
ASPEK PEMASARAN



Strategi Pemasaran



Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, di mana Perusahaan adalah satu-satunya BUMN yang mendapatkan penugasan dari Kementerian BUMN untuk melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Dengan kompetensi tersebut akan menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan klien potensial, baik dari pemerintahan, BUMN, BUMD maupun swasta.



Pangsa Pasar

Secara umum posisi Perusahaan dalam industri dapat digambarkan dengan menggunakan *industry matrix*. Dalam menyusun *industry matrix* ini, terlebih dahulu ditentukan faktor kunci sukses (*key success factors*) yaitu variabel-variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap posisi perusahaan dibandingkan pesaing dalam suatu industri. Dalam hal ini yang menjadi faktor sukses kritis adalah i) produk, ii) kualitas, iii) akses pendanaan, iv) credentials, v) regulasi dan vi) manajemen (SDM). Faktor kunci kritis selanjutnya digunakan untuk menilai kinerja di bidang investasi, pengelolaan aset dan jasa *advisory*.

Masing-masing faktor tersebut diberikan bobot dengan total 1,00. Selanjutnya masing-masing bobot diberikan peringkat dengan skala sebagai berikut:

- Nilai 1 = Kurang
- Nilai 2 = Di bawah rata-rata
- Nilai 3 = Rata-rata
- Nilai 4 = Di atas rata-rata
- Nilai 5 = Jauh di atas rata-rata



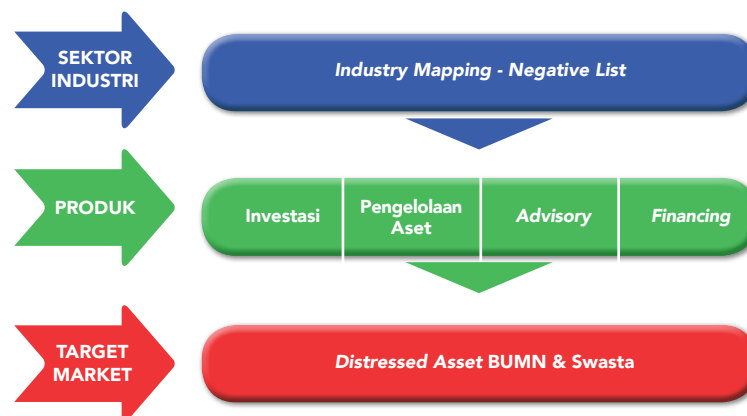
Berdasarkan hasil analisis terbatas, maka diperoleh hasil pemeringkatan *industry matrix* Perusahaan dibandingkan dengan BUMN lain maupun perusahaan anak BUMN yang memiliki bidang usaha yang sejenis atau mendekati adalah sebagai berikut:

Matrik Industri PPA

	Bobot	PPA	Bahana	Mandiri Sekuritas	Danareksa
Produk	0,2	0,34	0,40	0,36	0,40
Kualitas	0,2	0,95	0,90	0,80	1,00
Akses Pendanaan	0,1	0,30	0,34	0,40	0,34
Credentials	0,2	0,95	0,90	0,90	0,90
Regulasi	0,1	0,34	0,30	0,30	0,30
Manajemen (SDM)	0,2	0,60	0,60	0,60	0,60
	1,0	3,48	3,44	3,36	3,54

Dalam industri jasa *advisory* dan *asset management*, Perusahaan memandang beberapa pelaku usaha dalam bidang jasa konsultan dan sekuritas sebagai kompetitor, antara lain seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Dengan tingkat kompetisi yang ketat, Perusahaan memposisikan diri sebagai jasa *advisory* dan *asset management* yang unik. Berbeda dengan kompetitornya, Perusahaan akan memanfaatkan jaringan yang dimiliki berupa akses ke pasar, mitra strategis dan pendanaan, sehingga dapat memberikan solusi yang menyeluruh bagi klien.

Target pasar yang akan dituju oleh Perusahaan adalah *distressed asset* yang dimiliki oleh BUMN dan swasta. Hal tersebut sesuai dengan *core competencies* PT PPA di bidang restrukturisasi. Dalam hal ini Perusahaan bisa melakukan pengambilalihan *distressed asset*, pemberian *financing* ataupun memberikan jasa *advisory* dan pengelolaan *asset* ataupun kombinasinya.





TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 No. 00352/2.1030/AU.1/10/0181-2/1/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

KINERJA KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Posisi Keuangan Konsolidasian	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Aset					
Aset Lancar	8.020.825	8.671.359	(650.534)	-7,50%	↓
Aset Tidak Lancar	4.937.156	5.744.073	(806.917)	-14,05%	↓
Total Aset	12.957.981	14.415.432	(1.457.451)	-10,11%	↓
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek	6.288.396	7.101.678	(813.282)	-11,45%	↓
Liabilitas Jangka Panjang	3.011.481	1.890.210	1.121.271	59,32%	↑
Total Liabilitas	9.299.877	8.991.888	307.989	3,43%	↑
Total Ekuitas	3.658.104	5.423.544	(1.765.440)	-32,55%	↓
Total Liabilitas dan Ekuitas	12.957.981	14.415.432	(1.457.451)	-10,11%	↓



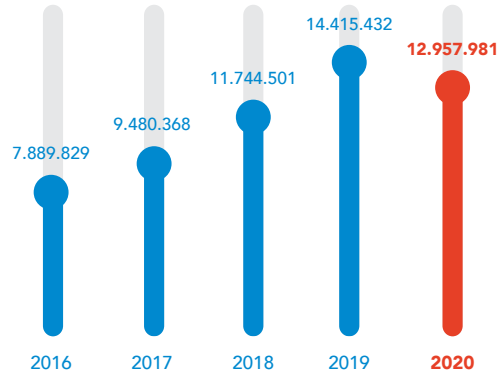
ASET

Total Aset Perusahaan per 31 Desember 2020 mencapai Rp12,96 triliun, mengalami penurunan sebesar 10,11% dibandingkan Total Aset tahun 2019 sebesar Rp14,42 triliun. Meskipun demikian, Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* untuk Total Aset Perusahaan periode 2016-2020 mencatat pertumbuhan 13,21%.



Total Aset 2016-2020

(Rp-juta)

Total Aset 2019-2020
(Rp-juta)

Aset	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Aset Lancar	8.020.825	8.671.359	(650.534)	-7,50%	↓
Aset Tidak Lancar	4.937.156	5.744.073	(806.917)	-14,05%	↓
Total Aset	12.957.981	14.415.432	(1.457.451)	-10,11%	↓

Kinerja Aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Dibandingkan tahun 2019, Total Aset Lancar tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,50%, sedangkan Total Aset Tidak Lancar tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,05% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

ASET LANCAR

Aset Lancar	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Kas dan Setara Kas	774.100	1.107.636	(333.536)	-30,11%	↓
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	1.531.707	1.445.630	86.077	5,95%	↑
Aset Keuangan Diperdagangkan	-	70.260	(70.260)	-100,00%	↓
Piutang Usaha	1.435.385	1.477.597	(42.212)	-2,86%	↓
Piutang Retensi	150.012	170.121	(20.109)	-11,82%	↓
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	306.082	296.623	9.459	3,19%	↑
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	340.087	223.046	117.041	52,47%	↑
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	2.331.224	2.418.106	(86.882)	-3,59%	↓
Persediaan	146.770	216.340	(69.570)	-32,16%	↓
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	149.655	102.187	47.468	46,45%	↑
Pajak Dibayar Di Muka	662.391	812.576	(150.185)	-18,48%	↓



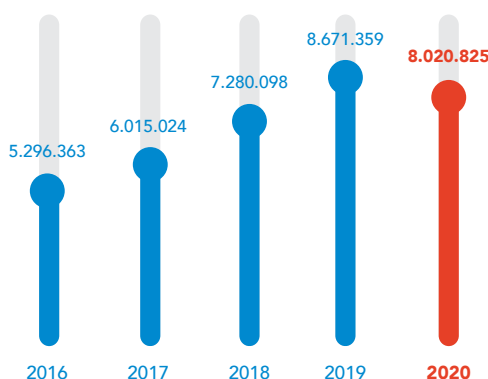
Aset Lancar	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Cessie Piutang Jangka Pendek	125.070	282.099	(157.029)	-55,66%	↓
Aset Lancar Lainnya	67.342	49.138	18.204	37,05%	↑
Jumlah Aset Lancar	8.020.825	8.671.359	(650.534)	-7,50%	↓

Jumlah Aset Lancar tahun 2020 sebesar Rp8,02 triliun, menurun 7,50% atau setara dengan Rp650,53 miliar dibandingkan Jumlah Aset Lancar tahun 2019 sebesar Rp8,67 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan kas dan setara kas, pajak dibayar dimuka, serta *cessie* piutang jangka pendek.

Perkembangan Jumlah Aset Lancar Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Aset Lancar 2016-2020
(Rp-juta)



Kas dan Setara Kas

Realisasi kas dan setara kas Perusahaan di tahun 2020 sebesar Rp774,10 miliar, mengalami penurunan 30,11% atau setara dengan Rp333,54 miliar dari tahun 2019 yang sebesar Rp1,12 triliun. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh turunnya jumlah kas dan deposito berjangka.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Pinjaman investasi jangka pendek di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,53 triliun, mengalami kenaikan 5,95% atau setara dengan Rp86 miliar dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp1,44 triliun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi adanya beberapa pinjaman baru yang diberikan Perusahaan kepada beberapa korporasi.

Piutang Usaha

Piutang usaha di tahun 2020 tercatat turun sebesar 2,86% atau setara dengan Rp42,21 miliar, dari Rp1,48 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1,44 triliun di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan Piutang Bunga dan *Monitoring*.

Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan dan entitas anak kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

Per 31 Desember 2020, Piutang Retensi tercatat sebesar Rp150,01 miliar, mengalami penurunan sebesar 11,82% atau setara dengan Rp20,11 miliar dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp170,12 miliar. Penurunan piutang retensi terutama terjadi pada piutang retensi kepada pihak berelasi yang diperoleh dari piutang kepada beberapa entitas usaha yang berada di bawah pengendalian bersama.



Piutang Ventura Bersama Konstruksi

Piutang ventura bersama konstruksi merupakan piutang kepada ventura bersama atau *Joint Venture* (JV) untuk pembelian material, biaya bank, *overhead*, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ventura bersama. Per 31 Desember 2020, piutang ventura bersama konstruksi sebesar Rp306,09 miliar, mengalami kenaikan 3,19% atau setara dengan Rp3,46 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp296,62 miliar. Kenaikan ini lebih disebabkan oleh adanya penambahan 3 (tiga) KSO baru di bawah entitas anak, PT Nindya Karya, yaitu Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangunnusa, Ventura Bersama Nindya - PT Bunga Raya Lestari, dan Ventura Bersama Nindya - Adhi - Abipraya.

Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan

Pinjaman yang diberikan - dana talangan mengalami kenaikan sebesar 52,47% atau setara dengan Rp117,04 miliar, dari Rp223,05 miliar di tahun 2019 menjadi Rp340,08 miliar di tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan adanya Pinjaman Dana Talangan yang baru diberikan Perusahaan kepada 2 (dua) entitas usaha, yaitu PT Perum Perumnas (Persero) dan PT Boma Bisma Indra (Persero).

Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan dan entitas anak yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Per 31 Desember 2020, tagihan bruto kepada pemberi kerja tercatat sebesar Rp2,33 triliun, mengalami penurunan sebesar 3,59% atau setara dengan Rp86,88 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2,42 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya konstruksi, sejalan dengan perlambatan kinerja operasional entitas anak, PT Nindya Karya, akibat dampak pandemi COVID-19 kepada sektor konstruksi nasional.

Persediaan

Persediaan terdiri atas persediaan bahan konstruksi dan persediaan *dolomit*, dimana jumlah persediaan per 31 Desember 2020 mengalami penurunan 32,16% atau setara dengan Rp69,58 miliar, dari Rp216,34 miliar per 31 Desember 2019 menjadi Rp146,77 miliar di tahun 2020. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya kinerja operasional entitas anak, PT Nindya Karya.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka dan biaya dibayar di muka terdiri atas uang muka pihak ketiga yang merupakan uang muka kepada *supplier* dan subkontraktor. Sementara biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi. Per 31 Desember 2020, jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka mengalami peningkatan 46,45% atau setara dengan Rp47,47 miliar, dari Rp102,18 miliar di tahun 2019 menjadi Rp149,66 miliar di tahun 2020.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka terdiri dari pajak Perusahaan dan pajak entitas anak, dimana jumlah pajak dibayar di muka per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp662,39 miliar, mengalami penurunan 18,48% atau setara dengan Rp150,19 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp812,58 miliar.

Cessie Piutang Jangka Pendek

Per 31 Desember 2020, jumlah *cessie* piutang jangka pendek tercatat sebesar Rp125,07 miliar, mengalami penurunan 55,66% atau setara dengan Rp157,03 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp282,10 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan saldo Cessie Piutang KPR ex. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Aset Lancar Lainnya

Jumlah aset lancar lainnya setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang untuk per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp67,34 miliar, mengalami kenaikan 37,05% atau setara dengan Rp18,20 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp49,14 miliar. Baik Piutang Proyek, Piutang Talangan Biaya BUMN maupun aset lancar lainnya mengalami peningkatan.



ASET TIDAK LANCAR

Aset Tidak Lancar	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	38.944	40.296	(1.352)	-3,36%	↓
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	536.683	1.416.472	(879.789)	-62,11%	↓
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	681.689	299.854	381.835	127,34%	↑
Properti Investasi	816.998	865.583	(48.585)	-5,61%	↓
Aset Pajak Tangguhan	73.457	42.066	31.391	74,62%	↑
Investasi pada Ventura Bersama	344.740	321.808	22.932	7,13%	↑
Piutang Lain-lain	238	238	0	0,00%	-
Investasi Jangka Panjang Lainnya	546.776	102.940	443.836	431,16%	↑
Investasi pada Efek Ekuitas	220.626	-	220.626	100,00%	↑
Aset Tetap	564.701	1.556.796	(992.095)	-63,73%	↓
Goodwill	-	370.257	(370.257)	-100,00%	↓
Cessie Piutang Jangka Panjang	247.441	283.493	(36.052)	-12,72%	↓
Aset Hak Guna	11.714	-	11.714	100,00%	↑
Aset Tidak Lancar Lainnya	853.149	444.270	408.879	92,03%	↑
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.937.156	5.744.073	(806.917)	-14,05%	↓

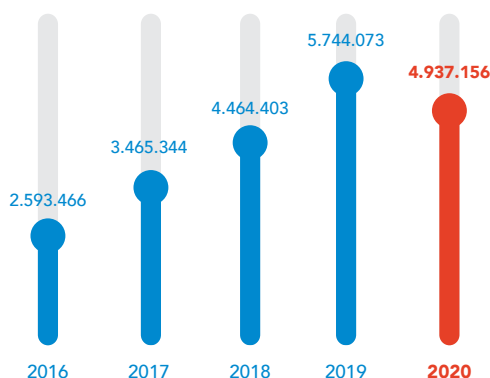
Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp4,94 triliun, menurun 14,05% atau setara dengan Rp806,92 miliar dibandingkan Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp5,74 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi serta penurunan Aset Tetap.

Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Aset Tidak Lancar 2016-2020

(Rp-juta)



Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri atas saham dan investasi melalui *fund manager* Bahana TCW Investment Management, dengan jumlah nilai wajar per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp38,34 miliar, mengalami penurunan 3,36% atau setara dengan Rp1,35 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp40,30 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya koreksi yang cukup dalam pada pasar saham. Investasi pada saham yang dilakukan Perusahaan di tahun 2020 dan 2019 merupakan investasi pada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dalam kelompok LQ 45.



Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pinjaman yang diberikan - restrukturisasi dan/atau revitalisasi terdiri dari pokok pinjaman dan piutang bunga pinjaman dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi, yang dikurangi penyisihan penurunan nilai pinjaman dan biaya perolehan yang belum diamortisasi. Jumlah pinjaman yang diberikan - restrukturisasi dan/atau revitalisasi per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp536,68 miliar, mengalami penurunan sebesar 62,11% atau setara dengan Rp879,79 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1,42 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembentukan Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman yang dilakukan Perusahaan sebesar Rp1,24 triliun. Sesuai PSAK 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020, Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi/Revitalisasi adalah aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman Investasi Jangka Panjang

Pinjaman investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp681,69 miliar, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 127,34% atau setara dengan Rp381,83 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp299,85 miliar. Kenaikan pinjaman investasi jangka panjang terutama disebabkan adanya beberapa pinjaman investasi jangka panjang yang baru dilakukan Perusahaan di tahun 2020.

Properti Investasi

Properti investasi per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp817,00 miliar, mengalami penurunan sebesar 5,61% atau setara dengan Rp48,59 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp865,58 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 71 dan 73.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan per 31 Desember 2020 sebesar Rp73,46 miliar, mengalami peningkatan 74,62% atau setara dengan Rp31,39 miliar per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp42,07 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penerapan dampak dekonsolidasi pada properti investasi.

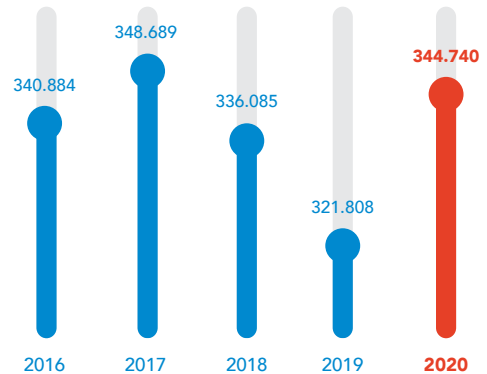
Investasi pada Ventura Bersama

Investasi pada ventura bersama per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp344,74 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,13% atau setara dengan Rp22,93 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp321,81 miliar. Peningkatan nilai investasi pada venturan bersama disebabkan karena adanya penambahan 3 (tiga) KSO baru di bawah entitas anak, PT Nindya Karya, yaitu Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangunnusa, Ventura Bersama Nindya - PT Bunga Raya Lestari, dan Ventura Bersama Nindya - Adhi - Abipraya.



Investasi pada Ventura Bersama 2016-2020

(Rp-juta)



Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain Perusahaan per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp238 miliar, yang masih sama saja dengan per 31 Desember 2019.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi jangka panjang lainnya setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai pinjaman dana per 31 Desember 2020 sebesar Rp546,78 miliar, mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni sebesar 431,16% atau setara dengan Rp443,84 dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp102,94 miliar. Hal ini disebabkan adanya investasi jangka panjang lainnya yang baru dilakukan Perusahaan di tahun 2020, berupa surat utang atas beberapa entitas usaha.

Aset Tetap

Aset tetap Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan proyek, peralatan kantor, prasarana umum, dan aset dalam penyelesaian. Per 31 Desember 2020, aset tetap Perusahaan tercatat sebesar Rp564,70 miliar, mengalami penurunan 63,73% atau setara dengan Rp992,10 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1,56 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya pencatatan dampak dekonsolidasi yang dilakukan per 31 Desember 2020.

Cessie Piutang Jangka Panjang

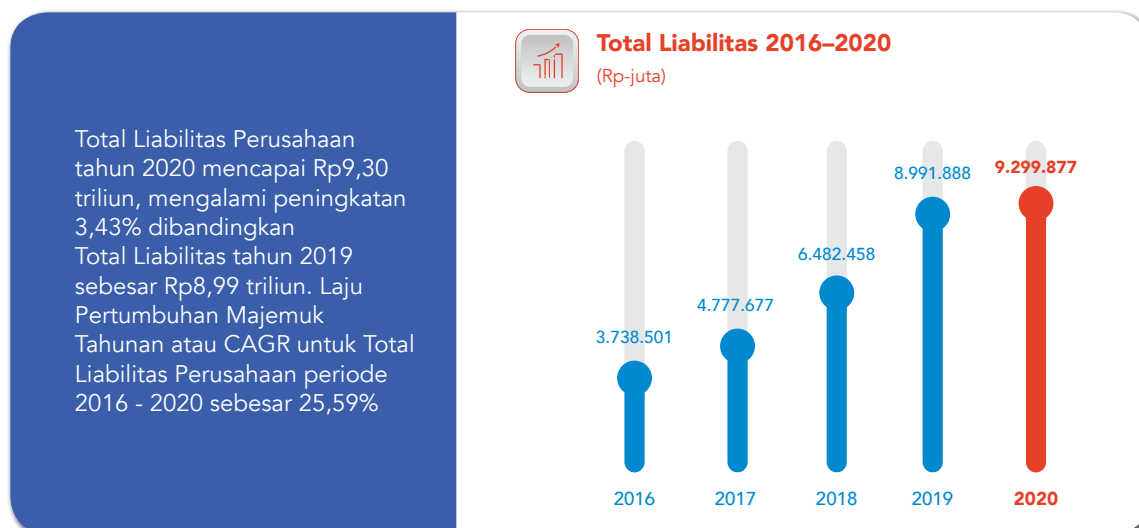
Jumlah keseluruhan cessie piutang jangka panjang Perusahaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp247,44 miliar, mengalami penurunan 12,72% atau setara dengan Rp36,05 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp283,49 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang di tahun 2020 sebesar Rp70,87 miliar.



Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya terdiri dari persediaan properti, uang jaminan, dana yang dibatasi penggunaannya, deposito berjangka yang dijamin, aset tak berwujud – software, dan lain-lain. Aset tidak lancar lainnya Perusahaan per 31 Desember 2020 tercatat Rp853,15 miliar, mengalami peningkatan 14,05% atau setara dengan Rp408,88 miliar dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp444,27 miliar. Kenaikan aset tidak lancar lainnya disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka yang dijamin.

Liabilitas



Total Liabilitas 2019–2020 (Rp-juta)

Liabilitas	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Liabilitas Jangka Pendek	6.288.396	7.101.678	(813.282)	-11,45%	↓
Liabilitas Jangka Panjang	3.011.481	1.890.210	1.121.271	59,32%	↑
Total Liabilitas	9.299.877	8.991.888	307.989	3,43%	↑

Kinerja Liabilitas dipengaruhi oleh Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Dibandingkan dengan per 31 Desember 2019, Total Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 11,45%, sedangkan Total Liabilitas Jangka Panjang tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 59,32% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

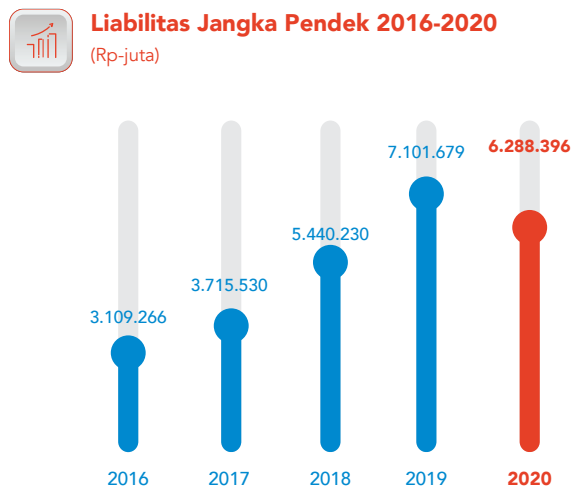
Liabilitas Jangka Pendek	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Utang Usaha	1.467.445	1.929.556	(462.111)	-23,95%	↓
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	3.538.553	2.819.958	718.595	25,48%	↑
Utang Surat Berharga Komersial	-	93.572	-	-	
Surat Utang Jangka Menengah yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-	300.000	-	-	
Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	-	17.044	-	-	



Liabilitas Jangka Pendek	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	929.472	1.342.936	(413.464)	-30,79%	↓
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	165.112	264.130	(99.018)	-37,49%	↓
Utang Pajak	22.122	74.004	(51.882)	-70,11%	↓
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	165.692	260.479	(94.787)	-36,39%	↓
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.288.396	7.101.679	(813.283)	-11,45%	↓

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp7,10 triliun, menurun sebesar 11,45% atau setara dengan Rp813,28 miliar dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp7,10 triliun. Selain akun Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, hampir seluruh akun dalam liabilitas jangka pendek mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Utang Usaha

Utang usaha Perusahaan terdiri atas utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga, di mana per 31 Desember 2020 jumlah utang usaha Perusahaan tercatat Rp1,47 triliun, mengalami penurunan 23,95% atau setara dengan Rp462,11 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1,93 triliun. Penurunan utang usaha terutama terjadi pada utang usaha kepada pihak ketiga.

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah Rp3,54 triliun, mengalami peningkatan 25,48% atau setara dengan Rp718,60 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2,82 triliun. Kenaikan jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan disebabkan oleh kebutuhan Perusahaan dan entitas anak atas modal kerja.

Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada pihak ketiga terdiri atas utang bruto kepada pihak ketiga pada entitas anak PT Nindya Karya, mencakup Wilayah I-V, Divisi EPC, Divisi Properti, Unit Penunjang Produksi, PT Nindya Beton, dan Kantor Pusat.

Per 31 Desember 2020, utang bruto kepada pihak ketiga tercatat sebesar Rp929,47 miliar, mengalami penurunan 30,79% atau setara dengan Rp413,46 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1,34 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan yang dilakukan entitas anak, PT Nindya Karya.



Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

Uang muka pemberi kerja jangka pendek per 31 Desember 2020 mengalami penurunan 37,49% atau setara dengan Rp99,02 miliar, dari Rp264,13 miliar per 31 Desember 2019 menjadi Rp165,11 miliar di tahun 2020. Uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi akan dikompensasi dengan kemajuan pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan kemajuan di lapangan.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp22,12 miliar, mengalami penurunan 70,11% atau setara dengan Rp51.88 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp74,00 miliar.

Beban Akruai dan Utang Lain-lain

Beban akrual dan utang lain-lain terdiri dari akrual biaya apresiasi karyawan, akrual biaya tantiem, utang operasional proyek, akrual bunga surat utang jangka menengah, akrual bunga bank, akrual gaji dan upah, akrual beban kantor dan umum, serta utang lain-lain. Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Sementara akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Per 31 Desember 2020 beban akrual dan utang lain-lain tercatat Rp260,48 miliar, menurun 36,39% atau setara dengan Rp94,79 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp260,48 miliar. Selain akrual bunga MTN dan obligasi, seluruh akun pada beban akrual dan utang lain-lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	13.104	23.089	(9.985)	-43,25%	↓
Pinjaman Bank Jangka Panjang	1.282.685	881.480	401.205	45,51%	↑
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	748.545	807.455	(58.910)	-7,30%	↓
Utang Obligasi	640.360	-	640.360	-	
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	312.608	176.028	136.580	77,59%	↑
Liabilitas Sewa	14.179	-	14.179	-	
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	2.158	(2.158)	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.011.481	1.890.210	1.121.271	59,32%	↑

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp3,01 triliun, meningkat 59,32% atau setara dengan Rp1,12 triliun dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,89 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan pinjaman bank jangka panjang serta penerbitan obligasi yang dilakukan di tahun 2020.

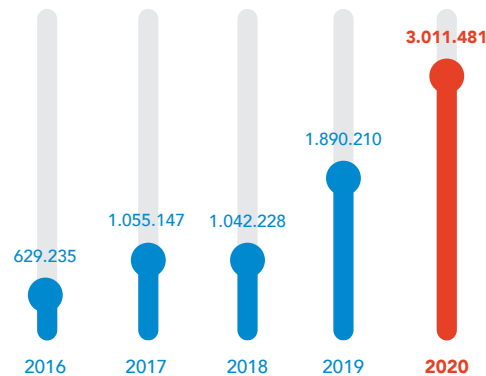


Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Liabilitas Jangka Panjang 2016-2020

(Rp-juta)



Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan terdiri atas imbalan kerja karyawan Perusahaan, dan entitas anak, yakni PT PPAF, PT PPAK, PT BSM, PT RILJ, PT NK, dan PT NB. Per 31 Desember 2020, jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan tercatat sebesar Rp13,10 miliar, mengalami penurunan 43,25% atau setara dengan Rp9,99 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp23,09 miliar. Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pascakerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Grup dengan DPLK BRI No. PPJ-39/PPA/1111 dan No. B.51DPLK/11/2011 tanggal 21 November 2011. Bagi 3 orang karyawan yang tidak diikuti dalam program tersebut, Perusahaan telah menghitung liabilitas imbalan sebesar Rp1.660 dan Rp939 per 31 Desember 2020 dan 2019.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pinjaman bank jangka panjang per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1,28 triliun, mengalami peningkatan 45,51% atau setara dengan Rp401,21 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp881,48 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya kebutuhan Perusahaan akan modal kerja yang didapatkan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan jangka panjang.

Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang

Per 31 Desember 2020, surat utang jangka menengah jangka panjang tercatat sebesar Rp748,55 miliar, mengalami penurunan sebesar 7,30% atau setara dengan Rp58,91 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp807,46 miliar yang disebabkan oleh pelunasan surat utang jangka pendek oleh entitas anak, PT Nindya Karya sebesar Rp300 miliar, serta pelunasan surat utang jangka menengah dari entitas anak, PT PPA Finance sebesar Rp60 miliar.

Utang Obligasi

Di tahun 2020, Perusahaan mencatatkan utang obligasi sebesar Rp640,36 miliar yang muncul karena penerbitan Obligasi yang dilakukan pada tanggal 1 September 2020.

Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

Uang muka pemberi kerja jangka panjang merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan (*bouwheer*) yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan. Per 31 Desember 2020, jumlah uang muka pemberi kerja jangka panjang sebesar Rp312,61 miliar, mengalami peningkatan 77,59% atau setara dengan Rp136,58 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp176,03 miliar.



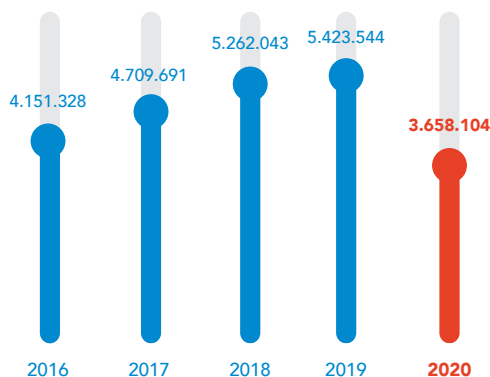
Ekuitas

Total Ekuitas Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp3,66 triliun, mengalami penurunan 32,55% dibandingkan Total Ekuitas tahun 2019 sebesar Rp5,42 triliun.



Total Ekuitas 2016-2020

(Rp-juta)



Ekuitas 2019-2020 (Rp-juta)

Ekuitas	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal Saham	2.996.688	2.996.688	0	0	-
Tambahan Modal Disetor	(308.059)	(308.059)	0	0	-
Saldo Laba:					
Telah Ditentukan Penggunaannya	299.350	299.350	0	0	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.993.291	1.993.291	0	0	-
Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih	20.800	22.152	(1.352)	-6,10%	↓
Surplus Revaluasi Aset Tetap	333.863	413.255	(79.392)	-19,21%	↓
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.655.026	5.416.677	(1.761.651)	-32,52%	↓
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	3.078	6.867	(3.789)	-55,18%	↓
Jumlah Ekuitas	3.658.104	5.423.544	(1.765.440)	-32,55%	↓

Dibandingkan dengan per 31 Desember 2019, Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 32,55% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Modal Saham

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal saham Perusahaan adalah sebesar Rp1.000.000 per saham, dimana modal ditempatkan dan disetor penuh untuk per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, masing-masing adalah 2.996.688 lembar saham sehingga modal saham Perusahaan sebesar Rp2.996.688 juta.

**Tambahan Modal Disetor**

Tambahan modal disetor per 31 Desember 2020 per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp308.059 juta, setelah pada tahun 2018 terdapat dampak divestasi entitas anak Perusahaan, PT Pratama Persada Airborne sebesar Rp2,29 miliar.

Saldo Laba

Saldo Laba terdiri dari saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Di mana per 31 Desember 2020 saldo laba Perusahaan masih sama dengan per 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual – Bersih

Laba (rugi) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual – bersih per 31 Desember 2020 adalah Rp20,80 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,10% atau setara dengan Rp1,35 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp22,15 miliar.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp333,86 miliar, mengalami penurunan 19,21% atau setara dengan Rp79,34 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp413,26 miliar.

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Dengan perubahan pada modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, laba (rugi) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual – bersih, serta surplus revaluasi aset tetap seperti yang telah dijelaskan di atas, Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2020 sebesar Rp3,66 triliun, menurun 32,52% atau setara dengan Rp1,76 triliun dibandingkan Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2019 sebesar Rp5,42 triliun

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3,08 miliar, mengalami penurunan sebesar 55,18% atau setara dengan Rp3,79 miliar dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp6,87 miliar.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Pendapatan Usaha	4.397.844	6.669.457	(2.271.613)	-34,06%	↓
Beban Usaha	(4.154.610)	(6.289.760)	2.135.150	-33,95%	↓
Laba Usaha	242.234	379.697	(137.463)	-36,20%	↓
Pendapatan Bunga	14.419	15.424	(1.005)	-6,52%	↓
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	237	(237)	-100,00%	↓
Beban Bunga dan Keuangan	(91.805)	(89.230)	(2.575)	2,89%	↑
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	26.169	41.528	(15.359)	-36,98%	↓
Beban Pajak Final	(101.709)	(159.199)	57.490	-36,11%	↓
Bagian Laba Ventura Bersama	87.905	66.706	21.199	31,78%	↑
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(15.200)	80.548	(95.748)	-118,87%	↓
Laba Sebelum Pajak	163.013	335.711	(172.698)	-51,44%	↓
Pajak Penghasilan	(40.326)	5.952	-46.278	-777,52%	↓
Manfaat (Beban) Pajak Kini	(38.319)	(17.007)	(21.312)	125,31%	↑
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	(18.925)	8.368	(27.293)	-326,16%	↓
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(57.244)	(8.639)	(48.605)	562,62%	↑
Laba Tahun Berjalan	105.769	327.072	(221.301)	-67,66%	↓



Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Pendapatan Komprehensif Lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti	4.802	(6.645)	11.447	-172,26%	↓
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(1.352)	(3.476)	2.124	-61,10%	↓
Jumlah pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.450	(10.121)	13.569	-134,09%	↓
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	109.219	316.951	(207.732)	-65,54%	↓
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada					
Pemilik Entitas Induk	105.341	324.913	(219.572)	-67,58%	↓
Kepentingan Non-Pengendali	428	2.159	(1.731)	-80,18%	↓
Jumlah	105.769	327.072	(221.303)	-67,66%	↓
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada					
Pemilik Entitas Induk	108.749	314.854	(206.105)	-65,46%	↓
Kepentingan Non-Pengendali	470	2.097	(1.627)	-77,59%	↓
Jumlah	109.219	316.951	(207.732)	-65,54%	↓
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)	35.152	108.424	(73.272)	-67,58%	↓

Pendapatan Usaha

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, pendapatan Perusahaan diperoleh dari 4 (empat) segmen operasi, yaitu segmen Investasi, Pembiayaan, Fabrikasi Beton, dan Konstruksi. Perusahaan juga menyajikan sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Jasa Konstruksi, Pinjaman yang Diberikan, Pendapatan Hasil Investasi, Penjualan, Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi, Pendapatan Properti, Pendapatan Sewa Alat, serta Pendapatan Penggantian Biaya.

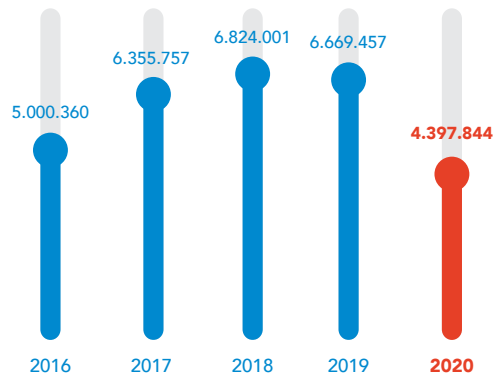
Pendapatan Usaha Konsolidasian

Sumber Pendapatan	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4 = 3-1)	(5 = 4/3)	
Jasa Konstruksi	3.616.483	82,23%	5.783.502	86,72%	(2.167.019)	-37,47%	↓
Penjualan	-	-	348.251	5,22%	(348.251)	-	
Hasil Investasi	492.371	11,20%	273.367	4,10%	219.004	80,11%	↑
Pinjaman yang Diberikan	184.829	4,20%	198.908	2,98%	(14.079)	-7,08%	↓
Keuntungan atas Investasi pada Efek Ekuitas	55.218	1,26%	-	-	55.218	-	
Imbalan Jasa Konsultasi	46.243	1,05%	60.432	0,91%	(14.189)	-23,48%	↓
Penggantian Biaya	2.700	0,06%	4.997	0,07%	(2.297)	-45,97%	↓
Jumlah Pendapatan Usaha	4.397.844	82,23%	6.669.457	100,00%	(2.271.613)	-34,06%	↓

Pendapatan Usaha tahun 2020 sebesar Rp4,40 triliun, turun 34,06% dibandingkan Pendapatan Usaha tahun 2019 sebesar Rp6,67 triliun. Lebih rendahnya pendapatan usaha terutama disebabkan penurunan signifikan pada pendapatan jasa konstruksi yang didapatkan dari entitas anak, PT Nindya Karya, yang mengalami penurunan kinerja disebabkan imbas pandemi COVID-19 pada industri konstruksi dan infrastruktur nasional.

**Perkembangan Jumlah Pendapatan 2016-2020**

(Rp-juta)

**Beban Usaha**

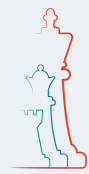
Rincian Beban Usaha Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Beban Usaha	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Beban Proyek	3.299.319	5.158.970	(1.859.651)	-36,05%	↓
Pegawai	281.716	307.175	(25.459)	-8,29%	↓
Beban Bunga Bank	446.080	304.095	141.985	46,69%	↑
Harga Pokok Penjualan	-	318.800	(318.800)	-	
Penyusutan	13.096	31.577	(18.481)	-58,53%	↓
Keperluan Kantor	38.931	41.558	(2.627)	-6,32%	↓
Sewa dan Asuransi	28.093	39.180	(11.087)	-28,30%	↓
Perjalanan Dinas	12.341	24.647	(12.306)	-49,93%	↓
Pemasaran dan Penjualan	11.009	14.239	(3.230)	-22,68%	↓
Jasa Konsultan	16.136	8.543	7.593	88,88%	↑
Investasi	11.357	16.544	(5.187)	-31,35%	↓
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	7.343	5.323	2.020	37,95%	↑
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang	(63.004)	(32.864)	(30.140)	91,71%	↑
Lain-lain (di bawah Rp 1 miliar)	52.193	51.973	220	0,42%	↑
Jumlah Beban Usaha	4.154.610	6.289.762	(2.135.152)	-33,95%	↓

Beban usaha per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4,15 triliun, mengalami penurunan 33,95% atau setara dengan Rp2,16 triliun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp6,29 triliun. Penurunan beban usaha terlihat pada beban proyek serta Harga Pokok Penjualan (HPP) yang mengalami penurunan signifikan, sejalan dengan melambatnya kegiatan konstruksi dari entitas anak, PT Nindya Karya, akibat dampak pandemi COVID-19 yang berimbas pada sektor konstruksi dan infrastruktur nasional.

Laba Usaha

Laba Usaha didapatkan dari akun pendapatan usaha yang diakumulasi dengan beban usaha. Laba Usaha tahun 2020 sebesar Rp242,23, turun 36,20% atau setara dengan Rp137,46 dibandingkan Laba Usaha tahun 2019 sebesar Rp379,70 miliar. Penurunan pendapatan Perusahaan berpengaruh terhadap laba Perusahaan di tahun 2020.



Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun 2019 sebesar Rp14,42 miliar, mengalami penurunan 6,52% atau setara dengan Rp1,01 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp15,42 miliar. Pendapatan bunga didapatkan dari kas Perusahaan yang ditempatkan di bank.

Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan tahun 2020 tercatat sebesar Rp91,80 miliar, mengalami peningkatan 2,89% atau setara dengan Rp2,58 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp89,23 miliar. Beban bunga dan keuangan didapatkan dari surat berharga yang diterbitkan.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi

Di tahun 2020, kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp26,17 miliar yang mana turun sebesar 36,98% atau setara dengan Rp15,36 miliar jika dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar Rp41,53 miliar.

Beban Pajak Final

Beban pajak final tahun 2020 sebesar Rp101,71 miliar, mengalami penurunan 36,11% atau setara dengan Rp57,50 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp159,20 miliar. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan khususnya pendapatan pada entitas anak, PT Nindya Karya.

Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian laba ventura bersama tahun 2020 tercatat sebesar Rp87,91 miliar mengalami kenaikan 31,78% atau setara dengan Rp21,20 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp66,71 miliar. Bagian laba ventura bersama didapatkan dari entitas ventura bersama atau Kerja Sama Operasi (KSO) PT Nindya Karya.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Jumlah pendapatan (beban) lain-lain tahun 2020, sebesar minus Rp15,20 miliar, mengalami penurunan 118,87% atau setara dengan Rp95,75 miliar dibandingkan tahun 2019 yang tercatat Rp80,55 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak didapatkan dari akun laba usaha yang diakumulasikan dengan pendapatan bunga, beban bunga dan keuangan, kenaikan nilai wajar atas properti investasi, beban pajak final, bagian laba ventura bersama, serta pendapatan (beban) lain-lain. Laba Sebelum Pajak tahun 2020 sebesar Rp163,01 miliar, turun 51,44% atau setara dengan Rp172,70 miliar dibandingkan Laba Sebelum Pajak tahun 2019 sebesar Rp335,71 miliar.

Pajak Penghasilan

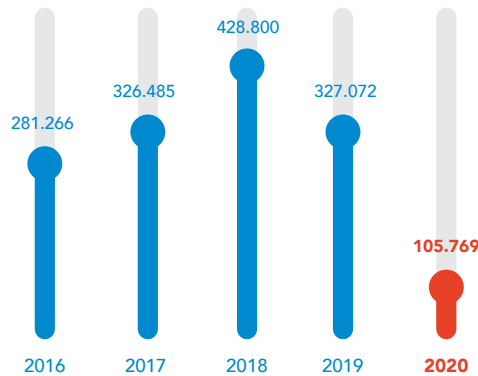
Pajak Penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan. Tahun 2020, pajak penghasilan Perusahaan tercatat sebesar minus Rp40,33 miliar, mengalami penurunan 777,52% atau setara dengan Rp46,28 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp5,95 miliar. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan khususnya pendapatan pada entitas anak, PT Nindya Karya.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan adalah laba bersih Perusahaan yang didapatkan dari akun laba sebelum pajak yang diakumulasikan dengan pajak penghasilan. Laba Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp105,77 miliar, turun 67,66% atau setara dengan Rp221,30 miliar dibandingkan Laba Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp327,07 miliar.

**Perkembangan Laba Tahun Berjalan 2016-2020**

(dalam miliar Rupiah)

**Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan**

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasi dengan penghasilan komprehensif lain. Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp109,219 miliar, turun 65,54% atau setara dengan minus Rp207,73 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp316,95 miliar.

Penghasilan Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Penghasilan berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2020 tercatat sebesar Rp324,91 miliar, mengalami penurunan sebesar 67,58% atau setara dengan minus Rp219,57 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp324,91 miliar.

Penghasilan Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Penghasilan berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2020 adalah sebesar Rp428 juta, mengalami penurunan sebesar 80,18% atau setara dengan Rp1,73 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2,16 miliar.

Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Labanya komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2020 tercatat sebesar Rp108,75 miliar, mengalami penurunan 65,46% atau setara dengan Rp206,11 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp314,85 miliar.

Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Labanya komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2020 sebesar Rp470 juta, mengalami penurunan sebesar 77,59% atau setara dengan Rp207,73 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2,10 miliar.

Labanya per Saham

Labanya per saham dihitung dari labanya tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang dibagi dengan jumlah lembar saham dalam modal saham Perusahaan.

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal	Persentase (%)	
Labanya Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	105.340.636.047	324.914.807.035	(219.574.170.988)	-67,58%	↓
Jumlah Saham (lembar)	2.996.688	2.996.688	-	0,00%	-
Labanya per Saham (Rp)	35.152	108.424	(73.272)	-67,58%	↓

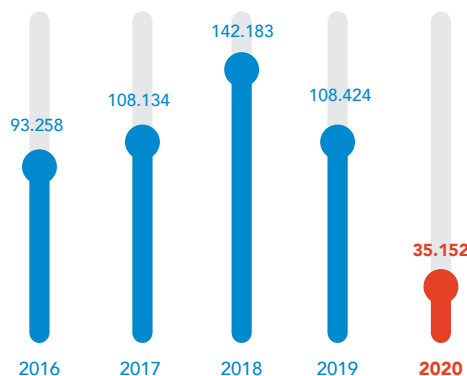


Laba per Saham tahun 2020 tercatat sebesar Rp35.152 per lembar saham, turun 67,58% atau setara dengan Rp73.272 dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp108.424 per lembar saham.



Laba per Saham 2016-2020

(dalam miliar Rupiah)



Laporan Arus Kas Konsolidasian



“Arus kas menggambarkan pemasukan dan pengeluaran kas Perusahaan dalam periode tertentu.”



Arus Kas Konsolidasian	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(1.042.361)	(381.389)	(660.972)	173,31%	↑
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(636.511)	(1.488.651)	852.140	-57,24%	↓
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.362.879	1.612.059	(249.180)	-15,46%	↓
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(315.993)	(257.981)	(58.012)	22,49%	↑
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.107.636	1.365.617	(257.981)	-18,89%	↓
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun dari entitas yang konsolidasi (tidak dikonsolidasi)	(17.527)	-	(17.527)	-100,00%	↓
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	774.116	1.107.636	(333.520)	-30,11%	↓

Arus Kas Perusahaan terdiri dari kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, kas bersih digunakan aktivitas investasi, dan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan. Kinerja arus kas Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut.



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2019-2020
(Rp-juta)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5.050.817	6.623.415	(1.572.598)	-23,74%	↓
Penyaluran Pembiayaan Konsumen	(564.728)	(497.110)	(67.618)	13,60%	↑
Penerimaan Restitusi Pajak	24.258	22.147	2.111	9,53%	↑
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(4.848.313)	(5.980.022)	1.131.709	-18,92%	↓
Pembayaran Beban Bunga	(551.619)	(363.107)	(188.512)	51,92%	↑
Pembayaran Pajak	(171.918)	(226.249)	54.331	-24,01%	↓
Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya	19.142	39.537	(20.395)	-51,58%	↓
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(1.042.361)	(381.389)	(660.972)	173,31%	↑

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp31,04 triliun, meningkat 173,31% atau setara dengan Rp660,97 miliar dibandingkan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2019 sebesar Rp380,19 miliar. Kenaikan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sejalan dengan melambatnya kegiatan bisnis konstruksi yang dijalankan entitas anak, PT Nindya Karya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2019-2020
(Rp-juta)

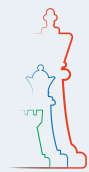
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Pengeluaran Investasi	(499.179)	(19.990)	(479.189)	2.397,14%	↑
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan	1.927.179	2.076.443	(149.264)	-7,19%	↓
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan	(2.112.652)	(3.396.545)	1.283.893	-37,80%	↓
Penerimaan Pencarian Laba Ventura Bersama	64.973	80.983	(16.010)	-19,77%	↓
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	(16.832)	(231.067)	214.235	-92,72%	↓
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	1.525	(1.525)	-100,00%	↓
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(636.511)	(1.488.651)	852.140	-57,24%	↓

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp1,04 triliun, menurun 30,04% atau setara dengan Rp447,49 miliar dibandingkan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp1,49 triliun. Penurunan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama disebabkan oleh adanya penurunan pengeluaran pinjaman yang diberikan Perusahaan di tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2019-2020
(Rp-juta)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Penerimaan Pinjaman	7.834.696	13.066.442	(5.231.746)	-40,04%	↓
Pembayaran Pinjaman	(6.653.917)	(12.011.774)	5.357.857	-44,61%	↓
Penerimaan Penerbitan Obligasi	642.100	-	642.100	100,00%	↑
Penerimaan Penerbitan Surat Utang	-	841.027	(841.027)	-100,00%	↓



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2019-2020 (Rp-juta)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Pembayaran Penerbitan Surat Utang	(460.000)	(240.000)	(220.000)	91,67%	↑
Pembayaran Dividen	-	(43.636)	43.636	-100,00%	↓
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1.362.879	1.612.059	(249.180)	-15,46%	↓

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2020 sebesar Rp1,36 triliun, menurun 15,46% atau setara dengan Rp249,18 miliar dibandingkan Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesar Rp1,61 triliun. Penurunan Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan terutama disebabkan adanya penurunan pinjaman yang diterima Perusahaan di tahun 2020.

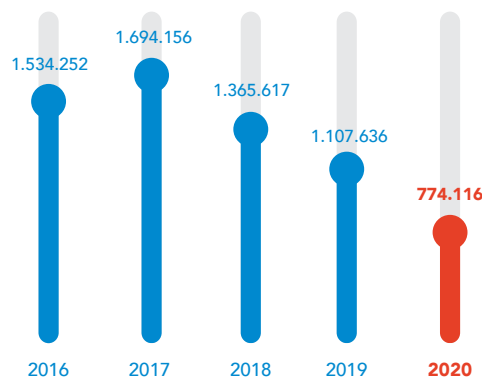
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas serta Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Dengan akumulasi pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, serta Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan seperti yang telah diuraikan di atas, Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp333,52 miliar. Dengan memperhitungkan Saldo kas dan setara kas pada awal tahun dari entitas yang konsolidasi (tidak dikonsolidasi), Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2020 menjadi sebesar Rp774,12 miliar.



Kas dan Setara Kas 2016-2020

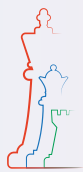
(dalam miliar Rupiah)



Berikut disampaikan rekonsiliasi kas dan setara kas yang dilakukan Perusahaan.

Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas (Rp-juta)

Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas	774.116	1.107.636	(333.520)	-30,11%	↓
Penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas	(16)	-	(16)	-100,00%	↓
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan	774.100	1.107.636	(333.536)	-30,11%	↓



KEMAMPUAN PERUSAHAAN DALAM MENGHASILKAN LABA ATAU KEUNTUNGAN

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan terlihat dari Rasio Profitabilitas yang terdiri dari Tingkat Imbal atas Aset atau *Return On Asset* (ROA), Tingkat Imbal atas Modal atau *Return On Equity* (ROE), Marjin Laba Usaha, Marjin Laba Bersih, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), serta Produktivitas Tenaga Kerja; dan Rasio Pertumbuhan yang memberikan gambaran kenaikan dan/atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari Pendapatan Usaha, Beban Usaha, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk, Laba per Saham, Aset, Liabilitas, dan Ekuitas.

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal	Persentase (%)	
Rasio Profitabilitas					
Rasio Laba Bersih terhadap Aset, atau <i>Return On Asset</i> (ROA) (%)	0,82	2,27	(1,45)	-63,88%	↓
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas, atau <i>Return On Equity</i> (ROE) (%)	2,89	6,03	(3,14)	-52,07%	↓
Marjin Laba Usaha (%)	5,53	5,69	(0,16)	-2,81%	↓
Marjin Laba Bersih (%)	2,41	4,90	(2,49)	-50,82%	↓
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	94,47	94,31	0,16	0,17%	↑
Produktivitas Tenaga Kerja (Rp-juta)	5.049	3.896	1.153	29,59%	↑
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Usaha (%)	(34,06)	(2,26)	(31,80)	-1.407,08%	↓
Beban Usaha (%)	(33,95)	(0,04)	(33,91)	-84.775,00%	↓
Laba Usaha (%)	(35,94)	(28,55)	(7,39)	-25,88%	↓
Laba Bersih (%)	(67,66)	(23,72)	(43,94)	-185,24%	↓
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (%)	(67,58)	(23,74)	(43,84)	-184,67%	↓
Laba per Saham (%)	(67,58)	(23,74)	(43,84)	-184,67%	↓
Aset (%)	(10,11)	22,74	(32,85)	-144,46%	↓
Liabilitas (%)	3,43	38,71	(35,28)	-91,14%	↓
Ekuitas (%)	(32,55)	3,07	(35,62)	-1.160,26%	↓

Rasio-rasio keuangan Perusahaan yang menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan usaha di tahun 2020 tercatat masih di bawah jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan pendapatan usaha di tahun 2020 yang terkoreksi dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya kejadian luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak luar biasa terhadap kegiatan usaha kelompok usaha PPA.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

Rasio Likuiditas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Rasio Lancar = Aset Lancar : Liabilitas Jangka Pendek

Rasio Kas = Kas dan Setara Kas+Efek : Liabilitas Jangka Pendek



	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal	Persentase (%)	
Kas dan Setara Kas (Rp-juta)	774.100	1.107.636	(333.536)	-30,11%	↓
Efek/Aset keuangan diperdagangkan (Rp-juta)	-	70.260	(70.260)	-100,00%	↓
Aset Lancar (Rp-juta)	8.020.825	8.671.359	(650.534)	-7,50%	↓
Liabilitas Jangka Pendek (Rp-juta)	6.288.396	7.101.679	-813.283	-11,45%	↓
Rasio Likuiditas					
- Rasio Lancar (%)	127,55%	122,10%	5,45%	4,46%	↑
- Rasio Kas (%)	12,31%	16,59%	-4,28%	-25,80%	↓

Kemampuan membayar utang jangka pendek Perusahaan dicerminkan dengan rasio likuiditas, di mana tingkat likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar dan rasio kas. Rasio lancar mengalami peningkatan, dari 122,10% di tahun 2019 menjadi 127,55% di tahun 2020; sedangkan rasio kas mengalami penurunan dari 16,59% di tahun 2019 menjadi 12,31% di tahun 2020. Meskipun demikian, Perusahaan tetap melakukan pengelolaan struktur permodalan dalam rangka memperkuat kemampuan membayar utangnya khususnya utang jangka pendek.

Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Debt Interest Bearing to Equity Ratio =
Total Debt Interest Bearing : Total Ekuitas

Debt Interest Bearing to Asset Ratio =
Total Debt Interest Bearing : Total Aset

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal	Persentase (%)	
Total Aset (Rp-juta)	12.957.981	14.415.432	(1.457.451)	-10,11%	↓
Total Utang Berbunga, atau <i>Debt Interest Bearing</i> (Rp-juta)	6.210.143	4.919.509	1.290.634	26,24%	↑
Total Ekuitas (Rp-juta)	3.658.104	5.423.544	(1.765.440)	-32,55%	↓
Rasio Solvabilitas					
Rasio Utang Berbunga terhadap Modal, atau <i>Debt Interest Bearing to Equity Ratio</i> (DER) (%)	169,76%	90,71%	79,06	87,16%	↑
Rasio Utang terhadap Aset, atau <i>Debt Interest Bearing to Asset Ratio</i> (DAR) (%)	47,93%	34,13%	13,80	40,43%	↑

Kemampuan membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek Perusahaan terlihat dari rasio solvabilitas yang terdiri dari rasio Utang Berbunga terhadap Modal, atau *Debt Interest Bearing to Equity Ratio* (DER), serta rasio Utang terhadap Aset, atau *Debt Interest Bearing to Asset Ratio* (DAR). Rasio Utang Berbunga terhadap Modal Perusahaan tahun 2020 sebesar 170,15%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 90,71%. Sedangkan rasio Utang Berbunga terhadap Aset Perusahaan tahun 2020 sebesar 48,03%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 34,13%. Kenaikan Utang Berbunga terutama didapatkan dari penerbitan surat utang Obligasi yang dilakukan di tahun 2020.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung Lama Penagihan Rata-rata atau *Collection Period* serta Rasio Perputaran Piutang. Semakin kecil nilai *Collection Period* atau Lama Penagihan Rata-rata menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \quad \text{Lama Penagihan Rata-rata} = \text{Rasio Perputaran Piutang} \times 365 \text{ hari}$$



Di bawah ini disampaikan tabel tingkat kolektibilitas piutang tahun 2019 dan 2020.

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal	Persentase (%)	
Piutang Usaha (Rp-juta)	1.435.385	1.477.597	-42.212	-2,86%	↓
Pendapatan Usaha (Rp-juta)	4.397.844	6.669.457	-2.271.613	-34,06%	↓
Lama Penagihan Rata-rata (hari)	119,13	80,86	38,27	47,33%	↑
Rasio Perputaran Piutang (kali)	0,33	0,22	0,10	47,32%	↑

Lama Penagihan Rata-rata tahun 2020 sebesar 119,13 hari, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 80,86 hari, yang disebabkan kenaikan Rasio Perputaran Piutang dari 0,22 kali di tahun 2019 menjadi 0,33 kali di tahun 2020. Penurunan pendapatan usaha yang lebih besar dibandingkan penurunan piutang usaha memberikan dampak terhadap tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan.

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

Umur Piutang Usaha

	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
< 12 Bulan	1.091.340	549.237	542.103	98,70%	↑
> 12 - 24 Bulan	277.433	279.662	-2.229	-0,80%	↓
> 24 Bulan	317.859	752.580	-434.721	-57,76%	↓
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(251.247)	(103.883)	-147.364	141,86%	↑
Jumlah Piutang Usaha	1.435.385	1.477.597	-42.212	-2,86%	↓

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen Perusahaan atas Struktur Modal dan Dasar Kebijakan

Tujuan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal secara efektif. Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung dengan membagi utang neto dengan jumlah ekuitas. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.



Manajemen Permodalan Perusahaan

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)		
			Nominal	Persentase (%)	
Total Liabilitas (Rp-juta)	9.299.877	8.991.888	307.989	3,43%	↑
dikurangi:					
Kas dan Setara Kas (Rp-juta)	774.100	1.107.636	-333.536	-30,11%	↓
Liabilitas Neto (Rp-juta)	8.525.777	7.884.252	641.525	8,14%	↑
Total Ekuitas (Rp-juta)	3.658.104	5.423.544	-1.765.440	-32,55%	↓
Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal (kali)	2,33	1,45	0,88	60,69%	↑

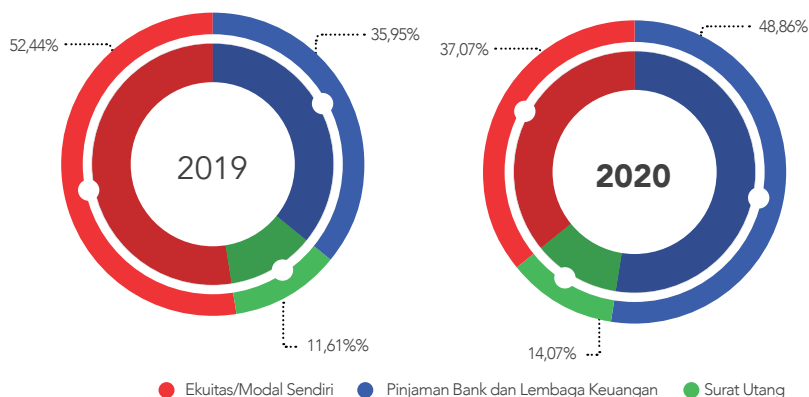
Struktur Permodalan Perusahaan

Komposisi struktur modal Perusahaan yang terdiri dari utang/modal berbasis bunga dan permodalan sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur Modal	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Komposisi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4 = 3-1)	(5 = 4/3)
Utang Berbunga, atau Debt Interest Bearing						
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	4.821.238	48,86%	3.718.482	35,95%	1.102.756	29,66%
Surat Utang	1.388.905	14,07%	1.201.027	11,61%	187.878	15,64%
Sub Jumlah Utang Berbunga, atau Debt Interest Bearing	6.210.143	62,93%	4.919.509	47,56%	1.290.634	26,24%
Ekuitas	3.658.104	37,07%	5.423.544	52,44%	(1.765.440)	-32,55%
Jumlah	9.868.247	100,00%	10.343.053	100,00%	(474.806)	-4,59%



Komposisi Struktur Modal Perusahaan



Seperti terlihat pada tabel dan bagan di atas, di tahun 2020 terdapat perubahan komposisi struktur modal Perusahaan, di mana pinjaman bank dan lembaga keuangan serta surat utang mengalami kenaikan. Penguatan struktur modal dari utang berbasis bunga ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan Perusahaan dalam melakukan kegiatannya di bidang investasi, pembiayaan, dan Restrukturisasi dan Revitalisasi.



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Perusahaan memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan Perusahaan dengan uraian sebagai berikut.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT Merpati Nusantara Airlines

Pihak 1:

PPA

Pihak 2:

PT Merpati Nusantara Airlines ("PT MNA")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan yang telah dilakukan beberapa kali sejak pertama kali pinjaman diberikan di tahun 2008. Di tahun 2019, PT MNA telah memperoleh dokumen *legal opinion* atau keabsahan proses Restrukturisasi dan Revitalisasi PT MNA dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp664 miliar. Jaminan dari PT MNA adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 32 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp27,98 miliar, hipotik atas 18 unit pesawat dengan nilai Rp13,27 miliar, fidusia mesin pesawat Boeing 737-300 dan Boeing 737-400 dengan nilai Rp68,65 miliar, gadai 99,82% saham PT Merpati Maintenance Facility dan gadai 99,86% saham PT Merpati Training Center dengan nilai total Rp349,54 miliar.

Sumber Dana:

Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT PAL Indonesia (Persero)

Pihak 1:

PPA

Pihak 2:

PT PAL Indonesia (Persero) ("PT PAL")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT PAL Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan yang telah direstrukturisasi dengan jatuh tempo perjanjian hingga 31 Desember 2030. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp211,7 miliar. Jaminan dari PT PAL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 9 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp25,19 miliar, fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai Rp190,24 miliar, dan fidusia piutang dengan nilai Rp27,70 miliar.

Sumber Dana:

Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Pihak 1:

Perusahaan

Pihak 2:

PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("PT KKA")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Kertas Kraft Aceh (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan yang telah direstrukturisasi. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp141,6 miliar. Jaminan dari PT KKA adalah berupa Surat Senior Kreditur dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memegang jaminan atas aset PT KKA dengan nilai Rp300,08 miliar.

Sumber Dana:

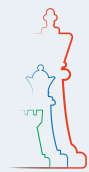
Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.



Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Pihak 1:

Perusahaan

Pihak 2:

PT Dirgantara Indonesia (Persero) ("PT DI")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pembiayaan korporasi yang diberikan Perusahaan yang telah dilakukan beberapa kali addendum perubahan atas perjanjian pembiayaan korporasi tersebut sejak pertama kali diberikan di tahun 2011. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp605 miliar. Jaminan dari PT DI adalah berupa fidusia piutang dengan nilai Rp16,48 miliar, fidusia mesin sebesar dengan nilai Rp270,37 miliar, dan PT DI telah menyerahkan 7 (tujuh) sertifikat aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp590,26 miliar yang dalam proses persetujuan pemegang saham PT DI untuk pengikatan jaminan.

Sumber Dana:

Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Pihak 1:

Perusahaan

Pihak 2:

PT Industri Kapal Indonesia (Persero) ("PT IKI")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan yang telah dilakukan restrukturisasi. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp28,5 miliar. Jaminan dari PT IKI adalah berupa hak tanggungan peringkat I dan 2 atas 4 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp185 miliar dan fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai Rp45 miliar.

Sumber Dana:

Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT Iglas (Persero)

Pihak 1:

PPA

Pihak 2:

PT Iglas (Persero) ("Iglas")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada Iglas berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan yang telah mengalami perubahan beberapa kali. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp89,1 miliar. Jaminan dari Iglas adalah berupa hak tanggungan peringkat 6 dan 7 atas 14 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp139,10 miliar. Adapun atas peringkat HT 1 sampai dengan 5 yang sebelumnya dipegang oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sudah dilakukan Roya, sehingga saat ini posisi PPA dan BNI sudah setara.

Sumber Dana:

Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

**Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT Survai Udara Penas (Persero)**

Pihak 1:

PPA

Pihak 2:

PT Survai Udara Penas (Persero) ("Penas")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada Penas berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman investasi dan pinjaman dana talangan yang diberikan Perusahaan yang telah dilakukan *addendum* di tahun 2019. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp2,36 miliar. Pada akhir Desember 2020 Penas telah melunasi pinjamannya kepada PPA. Jaminan dari Penas adalah berupa hak tanggungan peringkat I, 2 dan 3 atas 2 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp2,36 miliar, fidusia 2 airframe pesawat Cessna 402B dan C208 dengan nilai Rp2,37 miliar, fidusia 2 engine pesawat Cessna 402B dengan nilai USD93.752, fidusia 2 engine pesawat Cessna 402B dan 1 engine 208B dengan nilai Rp201 juta, gadai 90% saham PT Pratama Persada Airborne dengan nilai Rp9,01 miliar, fidusia piutang proyek dengan nilai Rp1,05 miliar, dan 1 unit Camera Large Format dan 16 peralatan IT dalam proses pengikatan jaminan fidusia dengan nilai Rp24,10 miliar.

Sumber Dana:

Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN Kepada PT Kertas Leces (Persero)

Pihak 1:

PPA

Pihak 2:

PT Kertas Leces (Persero) ("PT KL")

Tujuan Ikatan:

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Kertas Leces (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan. PT KL telah dinyatakan pailit dan sedang dalam proses pembagian hasil dana lelang eksekusi. Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp38,5 miliar. Jaminan dari PT KL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 1 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp9,50 miliar, dan fidusia mesin dengan nilai Rp50 miliar.

Sumber Dana:

Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:

Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

SALDO AKHIR ASET TETAP

Aset Tetap	Tujuan	Nilai (Rp-juta)
Tanah	Pendukung operasional Perusahaan	380,121
Bangunan	Pendukung operasional Perusahaan	137,645
Kendaraan Bermotor	Pendukung operasional Perusahaan	9,130
Peralatan Proyek	Pendukung operasional Perusahaan	173,862
Peralatan Kantor	Pendukung operasional Perusahaan	27,377
Prasarana Umum	Pendukung operasional Perusahaan	2,214
Aset dalam Penyelesaian	Pendukung operasional Perusahaan	15,168
Jumlah		745,517

Saldo akhir aset tetap yang merupakan akumulasi sejak Perusahaan berdiri hingga tahun 2020 sebesar Rp745,517 juta yang seluruhnya digunakan untuk penambahan aset tetap untuk mendukung operasional Perusahaan. Perbandingan Saldo akhir aset tetap dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Saldo Akhir Aset Tetap	745,517	647.787	97,730	15	↑

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERUSAHAAN

Risiko nilai tukar mata uang asing terjadi apabila Perusahaan memiliki posisi mata uang asing yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dengan debitor. Mitigasi risiko atas posisi mata uang asing ini antara lain melalui penetapan kebijakan *natural hedging*, yaitu pemberian pembiayaan dalam mata uang asing menggunakan sumber dana dalam mata uang asing juga.



Berikut disampaikan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat pada denominasi aset dan liabilitas Perusahaan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

	Kenaikan (Penurunan) dalam Mata Uang Asing dalam Basis Poin	Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak
31 Desember 2020	+100	29.223.800
	-100	(29.223.800)
31 Desember 2019	+100	1.400.300
	-100	(1.400.300)

Berikut ini disampaikan instrumen keuangan Perusahaan dalam mata uang asing.

	2020		2019	
	Nilai Penuh	Setara Rupiah	Nilai Penuh	Setara Rupiah
Kas dan Setara Kas	292.238	4.122.016.990	14.003	194.655.703
Aset Keuangan	292.238	4.122.016.990	14.003	194.655.703

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN

Pada segmen Konstruksi yang dikembangkan entitas anak, PT Nindya Karya, proyek-proyek yang dibangun oleh PTNK memiliki bahan baku material dengan harga yang berfluktuatif; baik disebabkan oleh ketersediaan stok barang, maupun situasi dan kondisi ekonomi politik yang berpengaruh terhadap stabilitas rantai pasokan bisnis di sektor konstruksi.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2020

Asumsi yang Mendasari Penentuan Target Tahun 2020

Rencana kerja dan target kinerja PPA tahun 2020 tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pada tanggal 30 Agustus 2019, PPA telah mengesahkan RKAP tahun 2020 yang tertuang dalam Aspirasi Pemegang Saham No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Munculnya pandemi COVID-19 pada triwulan I dan II tahun 2020 memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian khususnya kinerja finansial dan operasional keseluruhan BUMN, yang kemudian disikapi oleh Kementerian BUMN dengan mengeluarkan Surat No. S-46/Wk.2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Perubahan RKAP 2020 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II dan surat No. S-2/Wk.2.MBU.A/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan/Revisi RKAP Tahun 2020. Berdasarkan surat ini, serta mempertimbangkan potensi risiko atas dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja Perusahaan, maka PPA melakukan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2020 ("Revisi RKAP 2020").

Berikut disampaikan asumsi eksternal yang digunakan baik dalam RKAP maupun revisi RKAP tahun 2020 dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Asumsi Eksternal	RKAP Tahun 2020	Revisi RKAP Tahun 2020
Pertumbuhan Ekonomi Nasional	5,3%	2,3%
Inflasi	3,1%	3,9%
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS	Rp14.400/USD	Rp15.500/USD
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	USD63 per barrel	USD38 per barrel

Target-target di bawah ini menggunakan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKAP Tahun 2020 sebagai dokumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Perusahaan.



Pencapaian Target Bisnis Tahun 2020

Pendapatan per Entitas Usaha	Realisasi 2020	Target 2020	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(1:2)	
PT PPA (Induk) (Rp-juta)	682.223	663.736	102,79%	↑
Entitas Anak				
PT Nindya Karya (Rp-juta)	3.616.483	4.218.993	85,72%	↑
PT PPA Finance (Rp-juta)	136.797	142.636	95,91%	↑
PT PPA Kapital (Rp-juta)	93.625	46.419	201,70%	↑

Berdasarkan Revisi RKAP Tahun 2020, pendapatan dari entitas anak, PT Nindya Karya, masih berada di bawah target. Pandemi COVID-19 yang berdampak luar biasa terhadap kinerja sektor konstruksi dan infrastruktur nasional memberikan imbas yang besar terhadap kinerja PT Nindya Karya, yang kemudian tercermin dari pendapatan yang dibukukan di tahun 2020.

Pencapaian Target Operasi Tahun 2020

Operasi	Realisasi 2020	Target 2020	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(1:2)	
Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR Khusus (%)	100,00	100,00	100,00%	↑
Number of new services/products	7	7	100,00%	↑
Jumlah Perusahaan Diakuisisi/Dilepas	2	2	100,00%	↑
Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan (%)	92,70	>90	100,00%	↑
Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan (%)	99,78	>70	100,00%	↑
Tingkat Kesehatan Perusahaan (Skor)	83,25	86,00	96,80%	↑

Secara umum, target-target kinerja operasi Perusahaan dapat tercapai dengan baik. Terutama dengan berbagai penugasan yang diberikan, Perusahaan mampu menyelesaikan penugasan tersebut sesuai dengan arahan dan target yang diharapkan.

Pencapaian Target Pemasaran Tahun 2020

	Realisasi 2020	Target 2020	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(1:2)	
Pemasaran Jasa Konstruksi (Lelang dan Nilai Pekerjaan PT Nindya Karya)				
Lelang Diikuti (Rp-juta)	28.211.167	22.485.672	125,5%	↑
Lelang Dimenangkan (Rp-juta)	5.514.843	4.850.881	113,7%	↑
Tanpa Lelang / Penunjukan Langsung (Rp-juta)	335.838	259.629	129,3%	↑
% Lelang dimenangkan (%)	19,55%	21,57%		↑
Nilai Pekerjaan Tersedia				
Sisa Pekerjaan Proyek Lama (Rp-juta)	6.894.324	6.745.641	102,2%	↑
Perolehan Proyek Baru (Rp-juta)	5.850.681	5.110.510	114,5%	↑
Jumlah Nilai Pekerjaan Tersedia (Rp-juta)	12.745.005	11.856.151	107,5%	↑

Realisasi Tender yang Dimenangkan di tahun 2020 secara persentase hanya sebesar 19,55% masih dibawah target yang ditetapkan di 2020 yaitu sebesar 21,57%, meskipun secara nominal lelang yang dimenangkan lebih besar Rp664 miliar diatas target 2020 yang sebesar Rp4,8 triliun.



Jumlah kontrak tersedia yang merupakan komposisi kontrak lama dan baru pencapaiannya sedikit diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 107,5% atau Rp889 miliar di atas target yang ditetapkan di 2020 yaitu sebesar Rp11,8 triliun.

Pencapaian Target Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2020

	Realisasi 2020 1	Target 2020 2	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) (1:2)	
Jumlah Karyawan (orang)	169	185	91,35%	↑
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp-miliar)	0,85	1,50	56,67%	↑

Di tahun 2020, Perusahaan harus mengambil langkah kebijakan efisiensi di seluruh aspek. Tak terkecuali biaya pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi karyawan yang hanya terserap 56,67% terhadap anggaran. Kebijakan efisiensi merupakan salah satu upaya untuk dapat menjaga kelangsungan usaha di tengah tantangan pandemi COVID-19

Pencapaian Target Keuangan Tahun 2020: Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	Realisasi 2020 (Rp-juta) 1	Target 2020 (Rp-juta) 2	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) (1:2)	
Pendapatan Usaha	4.397.844	4.966.201	88,56%	↑
Beban Usaha	(4.154.610)	(4.739.315)	87,66%	↑
Laba Usaha	243.234	226.886	107,21%	↑
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(80.221)	(133.160)	60,24%	↑
Laba Sebelum Pajak	163.013	93.726	173,93%	↑
Manfaat (Beban) Pajak - Bersih	(57.244)	(17.055)	335,64%	↑
Laba Bersih Tahun Berjalan	105.769	76.671	137,95%	↑
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	3.450	(21.095)	116,35%	↑
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	109.219	55.576	196,52%	↑

Secara umum, kinerja laba rugi menunjukkan performa yang cukup baik. Meski pun pendapatan usaha konsolidasian hanya mampu mencapai 88,56% terhadap target Revisi RKAP 2020, Perusahaan mampu melakukan efisiensi dan pengelolaan biaya khususnya pada beban usaha dan beban lain-lain. Dengan keberhasilan pengelolaan beban-beban yang dapat ditekan di bawah target, kinerja laba Perusahaan menunjukkan pencapaian di atas target.

Pencapaian Target Keuangan Tahun 2020: Kinerja Posisi Keuangan Konsolidasian

	Realisasi 2020 (Rp-juta) 1	Target 2020 (Rp-juta) 2	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) (1:2)	
Aset Lancar	8.020.825	8.720.127	91,98%	↑
Aset Tidak Lancar	4.937.156	5.239.326	94,23%	↑
Total Aset	12.957.981	13.959.453	92,83%	↑
Liabilitas Jangka Pendek	6.288.396	5.430.845	115,79%	↑
Liabilitas Jangka Panjang	3.011.481	3.920.393	76,82%	↑
Total Liabilitas	9.299.877	9.351.237	99,45%	↑
Total Ekuitas	3.658.014	4.608.216	79,38%	↑



Secara umum, posisi keuangan Perusahaan menunjukkan indikator kinerja yang sehat. Perusahaan berupaya menjaga struktur permodalannya dalam rangka mengelola modal kerja, baik melalui pengelolaan liabilitas maupun modal sendiri.

Pencapaian Rasio-rasio Tahun 2020

	Realisasi 2020 1	Target 2020 2	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) (1:2)	
Return On Asset (%)	0,82	0,55	149,09%	↑
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	94,47	96,00	98,41%	↑
Yield on Investment (YOI) (%)	9,10	4,00	227,50%	↑
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (%)	28,23	33,00	85,55%	↑
Rasio Lancar (%)	127,55	161,00	79,22%	↑
Rasio Kas (%)	12,31	13,00	94,69%	↑

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, profitabilitas Perusahaan mampu melebihi target yang diharapkan, di mana ROA dan YOI mencatat pencapaian jauh di atas target. Hal ini menunjukkan kelangsungan usaha Perusahaan, sekaligus menunjukkan ketahanan Perusahaan khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19.

PROSPEK USAHA TAHUN 2021

Prospek Usaha dan Rencana Strategis Tahun 2021

Perusahaan telah menyusun RKAP tahun 2021 sebagai proyeksi sekaligus prospek usaha tahun 2021 berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal ("APS") No. S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.

Penyusunan prospek usaha dan RKAP Tahun 2021 mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

Asumsi Eksternal	RKAP Tahun 2021
Populasi Penduduk (juta jiwa)	274,0
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0
Inflasi (%)	3,0
Suku Bunga SBN (%)	7,29
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.600
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	45
Lifting Minyak (barel per hari)	705.000
Lifting Gas (barel setara minyak per hari)	1.007.000

Di samping asumsi eksternal, Perusahaan juga menggunakan beberapa asumsi internal untuk dapat menggambarkan prospek usaha PPA di tahun 2021, sebagai berikut:

1. Dimungkinkan adanya program-program baru dalam rangka melakukan investasi atau kegiatan bisnis lainnya untuk dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketersediaan dana dan strategi investasi;
2. Prospek tahun 2021 telah memperhitungkan adanya program-program baru di antaranya perubahan skema pembiayaan (program *special situation fund*) dalam rangka melakukan perubahan business model dan program lainnya;
3. Apabila dalam pelaksanaan program kerja atau kegiatan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan program kegiatan tidak dapat berjalan maka program kegiatan tersebut dapat digantikan dengan program kegiatan lain berikut alokasi dananya;
4. Rencana penggunaan dana PMN yang belum terealisasi termasuk perubahan jumlah Alokasi Dana PMN dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi ("RR") BUMN akan dilakukan sesuai persetujuan Kementerian BUMN/ Kementerian Keuangan atas kajian yang telah disampaikan oleh PPA, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



5. Dana PMN yang tersedia dan belum digunakan atau disalurkan akan dioptimalkan sehingga dapat memberikan pendapatan bagi Perusahaan;
6. Untuk mendukung terlaksananya program kerja atau kegiatan tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas secara optimal, PPA merencanakan memperoleh pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang baik melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya), sebesar Rp5,9 triliun. Sedangkan untuk kegiatan yang belum dapat diestimasikan secara spesifik, diperkirakan kebutuhan tambahan pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya) sebesar Rp9,1 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya) yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp15 triliun.
7. Apabila tambahan pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya) tersebut terealisasi maka terdapat potensi perubahan pada laporan keuangan yang diestimasikan dalam RKAP 2021.
8. Pada tahun 2021, PPA akan merencanakan konversi piutang entitas anak, PPA Kapital dan/atau PPA Finance menjadi tambahan setoran modal;
9. Untuk memperoleh pinjaman melalui perbankan/ menerbitkan surat utang, Perusahaan akan menjaminkan aset yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
10. Pada RKAP 2021, kerjasama investasi atas aset-aset Kementerian Keuangan yang berpotensi untuk dikembangkan baik dilakukan sendiri dan/atau kerja sama dengan mitra strategis masih dimungkinkan, walaupun tidak ditetapkan dalam target keuangan;
11. Dalam penyusunan RKAP 2021 ini, Perusahaan telah memperhitungkan:
 - a. Potensi pendapatan dari pengelolaan NPL Perbankan (sebagai *National Asset Management Company*);
 - b. Potensi pendapatan dari pengelolaan RR BUMN Titip Kelola;
 - c. *Reprofiling liabilities* PPA.
12. Dalam penyusunan RKAP 2021 ini, Perusahaan belum memperhitungkan efek pengalihan saham PT NK ke Pemerintah RI;
13. RKAP 2021 merujuk RJPP 2020-2024 yang diminta oleh Kementerian BUMN sesuai inisiatif strategis dan *roadmap* BUMN yang akan disampaikan setelah penyampaian RKAP 2021 ini.

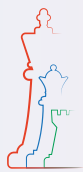
Proyeksi Kinerja Tahun 2021

Proyeksi Bisnis Tahun 2021

Pendapatan per Entitas Usaha	Realisasi 2020 1	Proyeksi 2021 2	Perbandingan Proyeksi 2021 Terhadap Target 2020 (%) (2:1)	
PT PPA (Induk) (Rp-juta)	682.223	1.281.281	187,81%	↑
Entitas Anak				
PT Nindya Karya (Rp-juta)	3.616.483	5.377.790	148,70%	↑
PT PPA Finance (Rp-juta)	136.797	134.137	98,06%	↑
PT PPA Kapital (Rp-juta)	93.625	44.616	47,65%	↑

Proyeksi Operasi Tahun 2021

Operasi	Realisasi 2020 1	Proyeksi 2021 2	Perbandingan Proyeksi 2021 Terhadap Target 2020 (%) (1:2)	
Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR Khusus (%)	100,00	100,00	100,00%	↑
Number of new services/products	7	5	100,00%	↑
Jumlah Perusahaan Diakuisisi/Dilepas	2	2	100,00%	↑
Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan (%)	92,70	>90	100,00%	↑
Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan (%)	99,78	>70	100,00%	↑
Tingkat Kesehatan Perusahaan (Skor)	83,25	88,00	105,71%	↑



Perusahaan memproyeksikan kinerja operasi dengan cukup baik, yang terlihat dari target penugasan tahun 2021 serta optimisme atas peningkatan Tingkat Kesehatan Perusahaan di tahun 2021.

Proyeksi Pemasaran Tahun 2021

	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Perbandingan Proyeksi 2021 Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(2:1)	
Pemasaran Jasa Konstruksi (Lelang dan Nilai Pekerjaan PT Nindya Karya)				
Lelang Diikuti (Rp-juta)	28.211.167	27.559.386	97,69%	↑
Lelang Dimenangkan (Rp-juta)	5.514.843	7.564.428	137,16%	↑
Tanpa Lelang/Penunjukan Langsung (Rp-juta)	335.838	182.178	54,25%	↑
% Lelang dimenangkan (%)	19,55%	27,45%		
Nilai Pekerjaan Tersedia				
Sisa Pekerjaan Proyek Lama (Rp-juta)	6.894.324	6.199.508	89,92%	↑
Perolehan Proyek Baru (Rp-juta)	5.850.681	7.746.606	132,41%	↑
Jumlah Nilai Pekerjaan Tersedia (Rp-juta)	12.745.005	13.946.114	109,42%	↑

Proyeksi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2020

	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Perbandingan Proyeksi 2021 Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(2:1)	
Jumlah Karyawan (orang)	169	195	115,38%	↑
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp-miliar)	0,85	8,02	943,53%	↑

Sejalan dengan optimisme akan kondisi di tahun 2021, Perusahaan memproyeksikan dapat menjalankan kembali pendidikan dan pelatihan sebagai pengembangan kompetensi bagi karyawan, yang terlihat dari peningkatan yang sangat tinggi atas biaya diklat tahun 2021 dibandingkan realisasi tahun 2020.

Proyeksi Keuangan Tahun 2021: Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	Perbandingan Proyeksi 2021 Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(2:1)	
Pendapatan Usaha	4.397.844	6.774.942	154,05%	↑
Beban Usaha	(4.154.610)	(6.374.913)	153,44%	↑
Laba Usaha	243.234	400.029	164,46%	↑
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(80.221)	(249.518)	311,04%	↑
Laba Sebelum Pajak	163.013	150.512	92,33%	↓
Manfaat (Beban) Pajak - Bersih	(57.244)	(27.960)	48,84%	↓
Laba Bersih Tahun Berjalan	105.769	122.551	115,87%	↑
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	3.450	-	0,00%	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	109.219	122.551	112,21%	↑

Pendapatan konsolidasian di tahun 2021 diproyeksikan mampu tumbuh, yang diiringi dengan pengelolaan beban dan pajak dalam rangka memproyeksikan pertumbuhan kinerja laba bersih Perusahaan di tahun 2021.



Proyeksi Keuangan Tahun 2021: Kinerja Posisi Keuangan Konsolidasian

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	Perbandingan Proyeksi 2021 Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(2:1)	
Aset Lancar	8.020.825	10.821.760	134,92%	↑
Aset Tidak Lancar	4.937.156	11.018.032	223,16%	↑
Total Aset	12.957.981	21.839.792	168,54%	↑
Liabilitas Jangka Pendek	6.288.396	8.144.040	129,51%	↑
Liabilitas Jangka Panjang	3.011.481	6.927.106	230,02%	↑
Total Liabilitas	9.299.877	15.071.146	162,06%	↑
Total Ekuitas	3.658.014	6.768.646	183,04%	↑

Perusahaan optimis untuk dapat memperkuat aset dan struktur permodalan, yang terlihat dari seluruh akun dalam posisi keuangan diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2020.

Proyeksi Rasio-rasio Tahun 2020

	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Perbandingan Proyeksi 2021 Terhadap Target 2020 (%)	
	1	2	(1:2)	
Return On Asset (%)	0,82	0,56	68,29%	↑
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	94,47	94,10	99,61%	↑
Yield on Investment (YOI) (%)	9,10	4,00	43,96%	↑
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (%)	28,23	30,99	109,78%	↑
Rasio Lancar (%)	127,55	132,88	104,18%	↑
Rasio Kas (%)	12,31	11,30	91,79%	↑

Perusahaan memproyeksikan di tahun 2021 dapat memperkuat struktur pendanaannya, yang tercermin dari proyeksi peningkatan rasio TATO dan rasio kas. Melalui peningkatan ke-2 rasio ini, Perusahaan memproyeksikan dapat menumbuhkembangkan ekuitas serta kas yang dimiliki di tahun 2021.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2020 hingga tanggal laporan akuntan 26 Februari 2021:

1. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Februari 2021, telah diputuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan melakukan penambahan penyertaan modal di Perusahaan yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah di PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia.
2. PT Survai Udara Panas (Persero)
Pada periode setelah pelaporan keuangan, Perusahaan telah menerima pelunasan seluruh kewajiban utang dari PT Survai Udara Panas (Persero) melalui pembayaran pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp120,54 miliar dan *Share-Settlement* Saham PT Pratama Persada Airborne sebesar Rp13,96 miliar berdasarkan Perjanjian Pelunasan Utang PT Survai Udara Panas (Persero) kepada Perusahaan No. 129 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2020.

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara tanggal laporan akuntan 26 Februari 2021 hingga disahkannya laporan tahunan ini tanggal 27 April 2021.



KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 70 s.d 73 mengatur penggunaan laba Perusahaan. Dalam Undang-undang ini, disebutkan bahwa Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perusahaan memiliki saldo laba positif, dengan besaran paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana diputuskan oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan RUPS, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen. Pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang saham, jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) Perusahaan yang diatribusikan kepada Pemegang saham.

Pembagian Dividen Tahun 2020 dan Historikalnya

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2020 yang diselenggarakan tanggal 29 Juni 2020, pemegang saham memutuskan atas laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019 seluruhnya ditempatkan sebagai cadangan pada saldo laba. Dengan demikian di tahun 2020, Perusahaan tidak membagikan dividen untuk hasil usaha tahun 2019.

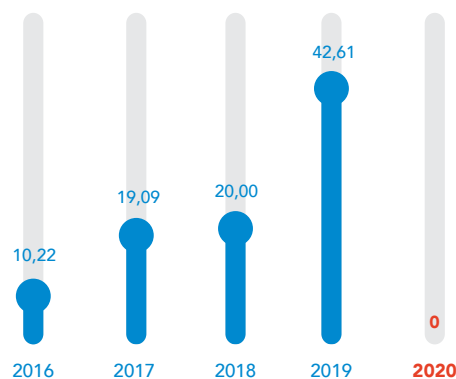
Pembagian dan pembayaran Dividen tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun Pembagian	Tahun Buku Dividen	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-miliar)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham)	Rasio Pembagian Dividen (%)
2020	2019	29 Juni 2020	-	-	-	-
2019	2018	3 Mei 2019	28 Mei 2019	42,61	14.218	10,00%
2018	2017	20 Mei 2018	31 Mei 2018	20,00	6.674	6,13%
2017	2016	18 Mei 2017	16 Juni 2017	19,09	6.370	6,79%
2016	2015	31 Mei 2016	30 Juni 2016	10,22	3.409	5,98%
2015	2014	19 Mei 2015	19 Juni 2015	11,00	5.509	9,64%



Dividen Kas yang Dibagikan

(Rp-miliar)



*) Di tahun 2020 Perusahaan tidak membagikan dividen sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.



KONTRIBUSI BAGI NEGARA: PAJAK YANG DIBAYARKAN

Sebagai Perusahaan yang patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, Perusahaan telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Perusahaan kepada negara. Berikut rincian kewajiban Perusahaan terkait kewajiban perpajakan di tahun 2020.

Jenis Pajak	Jumlah (Rp-juta)
PPh Badan (Pasal 25 dan 29)	302
PPh Pasal 21-Karyawan	52.536
PPh Pasal 21-Pihak Luar	263
PPh Pasal 22	9.070
PPh Pasal 23	33.649
PPh Pasal 25	1.581
PPh Pasal 26	14
PPh Pasal 4 (2)	108.299
PPN	475.246
Pajak Lain	1.261
Pajak Daerah	1.742
Total	683.963

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP), dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employees Stock Option Program* (ESOP).

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, Seri B dan Seri C. Penerbitan obligasi ini telah sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020, di mana pemegang saham telah menyetujui penerbitan surat utang obligasi dengan nilai Rp1 triliun.

Pada tanggal 1 September 2020 Perusahaan telah menerima dana dari hasil penerbitan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seri A sebesar Rp100 miliar dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 1 September 2020, kupon 9,95% p.a;
2. Seri B sebesar Rp345 miliar dengan tenor 5 tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 1 September 2020, kupon 10,55% p.a;
3. Seri C sebesar Rp197,10 miliar dengan tenor 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 1 September 2020, kupon 11,00% p.a.

Berikut disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. S-138/PPA/DINV1R/0121 tanggal 15 Januari 2021 tentang Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).


Realisasi Penggunaan Dana Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) per 31 Desember 2020

Tanggal Transaksi	Deskripsi	30-Sep-20	31-Oct-20	30-Nov-20	31-Dec-20
1-Sep-20	Dana efektif diterima dari penerbitan Obligasi	642.100	642.100	642.100	642.100
Penggunaan Dana Obligasi					
Dana Obligasi Seri A					
27-Nov-20	1. Pelunasan Surat Berharga Komersial	-	-	100.000	100.000
	PT Carpediem Mandiri			7.540	7.540
	PT CDM Swarnadipa			2.888	2.888
	PT DutaCipta Pakarperkasa			2.514	2.514
	PT Gali Terus Sejahtera			4.453	4.453
	PT PPAK			75.139	75.139
	Bunga Diskonto SBK			7.067	7.067
	Financial Arranger SBK			400	400
Sisa Dana Obligasi Seri A		100.000	100.000	-	-
Dana Obligasi Seri B					
1-Sep-20	1. Reimburse biaya pendaftaran OJK Pemeringkatan (Thp 1) & Pencatatan IDX	224	224	224	224
23-Sep-20	2. Pencairan Pinjaman PPAF (untuk PT Barata Indonesia (Persero))	4.761	4.761	4.761	4.761
29-Sep-20	3. Reimburse biaya Pendampingan KAP (thp 1 & 2)	385	385	385	385
7-Oct-20	4. Pembayaran biaya-biaya terkait obligasi	-	2.188	2.188	2.188
27-Oct-20	5. Pembayaran cicilan pembelian aset PT IGLAS	-	6.692	6.692	6.692
27-Oct-20	6. Penggunaan dana untuk Operasional bulan Oktober 2020	-	10.500	10.500	10.500
11-Nov-20	7. Pembayaran biaya-biaya terkait penerbitan obligasi	-	-	327	327
20-Nov-20	8. Pinjaman kepada PT PPAF (Untuk PT Perinus (Persero))	-	-	10.109	10.109
20-Nov-20	9. Pinjaman kepada PT PPAK (untuk tangan pokok & bunga novasi Mandiri)	-	-	4.933	4.933
25-Nov-20	10. Pinjaman kepada PT Energi Manajemen Indonesia	-	-	7.000	7.000
30-Nov-20	11. Penggunaan dana untuk Operasional bulan November 2020	-	-	29.161	29.161
15-Dec-20	12. Pinjaman kepada PT Artha Bangun Pratama	-	-	-	53
16-Dec-20	13. Pembayaran jasa pelaksanaan bunga Obligasi	-	-	-	11
18-Dec-20	14. Pinjaman kepada PT PPAF (untuk PT Pindad (Persero))	-	-	-	128.000
30-Dec-20	15. Penggunaan dana untuk Operasional bulan Desember 2020	-	-	-	17.725
Sisa Dana Obligasi Seri B		339.631	320.251	268.721	122.932
Dana Obligasi Seri C					
Sisa Dana Obligasi Seri C		197.100	197.100	197.100	197.100
Total Dana Obligasi yang telah digunakan untuk Ivestasi/Biaya Penerbitan		5.369	24.749	176.279	322.068
Sisa Dana Obligasi		636.731	617.351	465.821	320.032



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Berikut disampaikan informasi material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal yang terjadi di tahun 2020, khususnya yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Informasi Material Mengenai Investasi

Target Investasi sebagaimana tercantum pada Revisi RKAP 2020 adalah sebanyak 7 (tujuh) proyek. Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan telah merealisasikan 7 (tujuh) proyek yaitu:

1. PT Alim Investindo
2. PT Pupuk Kujang
3. Perum Perumnas
4. Perum Percetakan Negara RI
5. PT Djakarta Lloyd (Persero)
6. PT Energy Management Indonesia (Persero)
7. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Tidak terdapat informasi material mengenai ekspansi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2020.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Tidak terdapat informasi material mengenai divestasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2020.

Informasi Material Mengenai Penggabungan Usaha

Tidak terdapat informasi material mengenai penggabungan usaha yang dilakukan Perusahaan di tahun 2020.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Selama tahun 2020, Perusahaan, melakukan 2 (dua) akuisisi perusahaan, sesuai dengan target Revisi RKAP 2020 sebanyak 2 (dua) perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan telah merealisasikan akuisisi saham PT National Utility Helicopters melalui PT PPA Kapital dan akuisisi saham PT Pratama Pratama Persada Airborne melalui perjanjian penyelesaian utang dengan PT Survai Udara Penas tanggal 31 Desember 2020.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Tidak terdapat informasi material mengenai restrukturisasi utang/modal yang dilakukan Perusahaan di tahun 2020.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

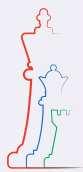
Ketentuan Pihak Berelasi

Pemenuhan kebijakan terkait transaksi pihak berafiliasi/berelasi dan transaksi benturan kepentingan mengacu kepada Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Perusahaan mendefinisikan Pihak-pihak Berelasi sebagai orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan Perusahaan jika mereka:

1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
2. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan;
3. Merupakan personel manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- a. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari Perusahaan.



Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Nama Pihak Berelasi yang Melakukan Transaksi, Sifat Hubungan Berelasi dan Tujuan Transaksi

Berikut tabel yang menginformasikan nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan dan sifat transaksi yang dilakukan.

Nama Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi
PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Piutang Usaha
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan
PT Iglas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi, Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi, Dana Talangan
PT Kertas Leces (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Survai Udara Penas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan
PT Perum Perumnas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Piutang Retensi
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman Bank dan Non Bank
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman Investasi Jangka Pendek
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Pinjaman Investasi Jangka Pendek
Perum LPPNPI (Airnav Indonesia)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi



Nama Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Tagihan Bruto
PT Bhandra Graha Reksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Tagihan Bruto
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Retensi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi, Uang Muka Jangka Pendek
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi, Uang Muka Jangka Pendek
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Tagihan Bruto, Uang Muka Jangka Panjang
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto
PT Pertamina EP (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jangka Pendek
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Pupuk Kaltim	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Tagihan Bruto, Uang Muka Jangka Panjang
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Piutang Retensi
PT Nindya Beton	Entitas Anak Perusahaan	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PT Duta Mentari Raya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Investasi
PT Bondi Syad Mulia	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Investasi
PT Magnesium Gosari Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Investasi
PT Matoa Kidung Bahtera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Investasi
PT Matoa Kidung Samudera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Investasi
PT Rejeki Intilogam Jaya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Investasi
PT SIPPA Kemasan Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	Pinjaman Investasi
KSO di bawah entitas anak, PT Nindya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	Investasi pada Ventura Bersama
KSO Nindya - Dewa Ruci	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	Piutang Retensi
KSO Nindya - PT PPA	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	Penagihan atas Jasa Konstruksi
PP - KPS KSO	Entitas Ventura Bersama Perusahaan	Piutang Usaha
PT Hakaaston	Entitas Ventura Bersama Perusahaan	Piutang Usaha



Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Realisasi Saldo dan Transaksi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi Saldo Pihak Berelasi pada Aset

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset	2020 (Rp-juta) (1)	2019 (Rp-juta) (2)	Persentase dari Aset		Kenaikan (Penurunan)		
			2020 (%)	2019 (%)	Nominal (Rp-juta) (3=1-2)	Persentase (%) (3/2)	
Kas dan Setara Kas	722.792	798.828	5,58%	5,54%	(76.036)	-9,52%	↓
Piutang Usaha	515.428	386.413	3,98%	2,68%	129.015	33,39%	↑
Piutang Retensi	42.186	68.983	0,33%	0,48%	(26.797)	-38,85%	↓
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	340.087	223.046	2,62%	1,55%	117.041	52,47%	↑
Tagihan Bruto	530.686	394.037	4,10%	2,73%	136.649	34,68%	↑
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	536.683	1.416.472	4,14%	9,83%	(879.789)	-62,11%	↓
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi	2.687.862	3.287.779	20,74%	22,81%	(599.917)	-18,25%	↓
Total Aset	12.957.981	14.415.432			(1.457.451)	-10,11%	↓

Sebagian besar saldo aset Perusahaan yang didapatkan dari pihak berelasi mengalami penurunan, termasuk Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan serta Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

Realisasi Saldo Pihak Berelasi pada Liabilitas

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas	2020 (Rp-juta) (1)	2019 (Rp-juta) (2)	Persentase dari Liabilitas		Kenaikan (Penurunan)		
			2020 (%)	2019 (%)	Nominal (Rp-juta) (3=1-2)	Persentase (%) (3/2)	
Utang Usaha	18.264	140.455	0,20%	1,56%	(122.191)	-87,00%	↓
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	3.087.063	2.403.718	33,19%	26,73%	683.345	28,43%	↑
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	13.588	10.372	0,15%	0,12%	3.216	31,01%	↑
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	23.300	35.965	0,25%	0,40%	(12.665)	-35,21%	↓
Total Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi	3.142.215	2.590.510	33,79%	28,81%	551.705	21,30%	↑
Total Liabilitas	9.299.877	8.991.888			307.988	3,43%	↑

Kenaikan total liabilitas Perusahaan juga didapatkan dari saldo liabilitas dari pihak berelasi, terutama dari kenaikan Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan yang didapatkan Perusahaan dari pihak berelasi.



Realisasi Transaksi Pihak Berelasi pada Pendapatan Usaha

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha	2020 (Rp-juta) (1)	2019 (Rp-juta) (2)	Persentase dari Pendapatan Usaha		Kenaikan (Penurunan)	
			2020 (%)	2019 (%)	Nominal (Rp-juta) (3=1-2)	Persentase (%) (3/2)
Penjualan Usaha dari Pihak Berelasi	184.829	198.908	4,20%	2,98%	(14.079)	-7,08% ↓
Total Pendapatan Usaha dari Pihak-pihak Berelasi	184.829	198.908	4,20%	2,98%	(14.079)	-7,08% ↓
Total Pendapatan Usaha	4.397.844	6.669.457			(2.271.613)	-34,06% ↓

Meskipun secara komposisi hanya sebesar 4,20% dari total pendapatan usaha Perusahaan, penurunan pendapatan usaha dari pihak berelasi memberikan gambaran tentang lesunya perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme review Perusahaan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, di mana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

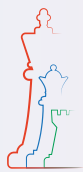
INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB) mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus *Coronavirus Disease* (COVID-19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi COVID-19, menyebabkan penurunan perekonomian nasional di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2020 disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Manajemen berpendapat bahwa rencana-rencana tersebut dapat secara efektif dilakukan dan Perusahaan dapat terus beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai di masa mendatang. Meskipun demikian, terdapat suatu ketidakpastian material mengenai dampak dari situasi saat ini terhadap bisnis dan operasi Perusahaan di masa mendatang.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perusahaan di sepanjang tahun 2020



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, serta penjelasan dampak atau pengaruh perubahan standar dan interpretasi standar tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan hasil kajian Grup terhadap 2 (dua) kriteria dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 71.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Grup pada awal penerapan PSAK 71.

Dampak atas penerapan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 pada laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019	Penerapan PSAK 71	Disesuaikan pada 1 Januari 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1.107.636	(82)	1.107.554
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	1.445.630	(99.803)	1.345.827
Piutang Usaha	1.477.597	(153.950)	1.323.647
Piutang Retensi	170.121	(27.773)	142.348
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	296.623	(77.839)	218.784
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	2.418.106	(50.959)	2.367.147
Pinjaman yang diberikan – Dana Talangan	223.046	(139.111)	83.935
Cessie Piutang Jangka Pendek	282.099	(154.704)	127.395
Aset Lancar Lainnya : Piutang Lain-lain	22.254	(101)	22.153
Aset Pajak Tangguhan (Penyisihan Penurunan Nilai)	-	(61.691)	(61.691)
Jumlah	7.443.112	(766.013)	6.677.099
ASET TIDAK LANCAR			
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	299.854	(73.866)	225.988
Pinjaman yang diberikan – Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	1.416.472	(880.238)	536.234
Cessie Piutang Jangka Panjang	283.493	(70.028)	213.465
Aset Tidak Lancar Lainnya : Deposito yang dijamin	390.786	(185)	390.601
Investasi Jangka Panjang Lainnya	102.940	(81.595)	21.345
Jumlah	2.419.648	(1.134.955)	1.366.288
EKUITAS			
Saldo Laba	1.993.291	(1.778.194)	215.097
Jumlah	1.993.291	(1.778.194)	215.097



PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Grup juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal;
- Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap PSAK 73, berikut adalah dampak terhadap laporan keuangan di saldo awal 1 Januari 2020:

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019	Penerapan PSAK 73	Disesuaikan pada 1 Januari 2020
ASET			
Aset Hak Guna	-	23.287	23.287
Jumlah	-	23.287	23.287
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Sewa	-	28.263	28.263
Jumlah	-	28.263	28.263
EKUITAS			
Saldo Laba	1.993.291	(4.975)	1.988.316
Jumlah	1.993.291	(4.975)	1.988.316

PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan**

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah

Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, dengan demikian standar ini tidak relevan untuk diterapkan.

ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan

Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, dengan demikian standar ini tidak relevan untuk diterapkan.

ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah

Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, dengan demikian standar ini tidak relevan untuk diterapkan.

ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, dan Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

Implementasi dari perubahan standar ini tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.



TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Dalam melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan, PPA mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, di mana Tingkat Kesehatan Perusahaan diukur melalui beberapa indikator, yakni aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Berikut disampaikan Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 dibandingkan target RKAP 2020.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020

	Indikator	Revisi RKAP 2020	Bobot	Target	Realisasi	Skor
Keuangan Bobot 40%	1. Yield on Investment (YOI)	4,0%	10	7	9,10%	9
	2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	96%	10	2	94,47%	2
	3. Total Modal Sendiri terhadap Total Aset	33%	10	10	28,23%	7,25
	4. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	161%	5	5	127,55%	5
	5. Rasio Kas	13%	5	2	12,31%	2
Operasional Bobot 45%	1. Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR Khusus	100%	15	15	100%	15
	2. Number of new services/products	7	15	15	7	15
	3. Jumlah Perusahaan diakuisisi/Dilepas	2 Perusahaan	10	10	2	10
	4. Realisasi Program Pelatihan Karyawan	100%	5	5	77,78%	3
Administrasi Bobot 15%	1. Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan	Tepat waktu	3	3	Tepat waktu	3
	2. Penyampaian Rancangan RKAP	Tepat waktu	3	3	Tepat waktu	3
	3. Penyampaian Laporan Periodik	Tepat waktu	3	3	Tepat waktu	3
	4. Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan	>90%	3	3	92,70%	3
	5. Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan	>70%	3	3	99,78%	3
Total Tingkat Kesehatan				86		83,25

Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 mendapatkan jumlah skor sebesar 83,25 dari target 86, maka Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA".



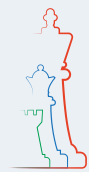
INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Keberadaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai satu-satunya agen restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN semakin kokoh. Hingga tahun 2020, Perusahaan memiliki pengendalian atas 3 entitas anak dan berhasil membukukan kinerja positif. Pencapaian ini sangat bermakna karena pada tahun pelaporan, situasi dan kondisi perekonomian nasional penuh tantangan, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Kemampuan Perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang tak terlepas dari ketepatan dalam merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target tersebut, PT PPA akan fokus pada kegiatan utama, yaitu menciptakan nilai dari pengelolaan restrukturisasi BUMN (restrukturisasi BUMN Titip Kelola beserta NPL nya), pengelolaan NPL perbankan, dan mengoptimalkan neraca dan sumber daya (melalui investasi *existing* maupun SSF, pengelolaan aset dan inisiatif lainnya).

Kegiatan pengelolaan aset yang dilakukan oleh PT PPA dapat diwujudkan melalui skema atau bentuk PT PPA menjadi *National Asset Management Company* ("NAMCO"). Untuk mewujudkan PT PPA menjadi NAMCO, PT PPA telah dan akan terus melakukan pendekatan dan kerja sama pengelolaan *distressed asset* yang berasal dari perbankan nasional. Hal ini sejalan dengan kapabilitas dan kompetensi yang secara spesifik menjadi keunggulan kompetitif PT PPA dibanding dengan pesaing. Pengelolaan *distressed asset* tersebut juga dapat dilakukan baik melalui skema investasi maupun *advisory*.

Sebagai korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan semua kebijakan strategis yang telah disepakati tersebut. Tak hanya diimplementasikan pada aspek ekonomi, tapi juga diselaraskan dengan aspek lingkungan dan sosial. Komitmen untuk menciptakan keselarasan antar ketiga aspek merupakan spirit operasional dan membawa hasil dengan semakin kokohnya kinerja perusahaan.



PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2019-2023, Perusahaan menargetkan untuk mampu menjadi NAMCO melalui kegiatan pengelolaan aset, restrukturisasi korporasi termasuk Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, *advisory* dan kegiatan investasi lainnya. Pertumbuhan Perusahaan secara konsolidasian pada periode 2015-2018 menunjukkan bahwa kegiatan dalam bidang investasi, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, pengelolaan aset eks BPPN dan jasa *advisory* telah berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RJPP 2015-2019.

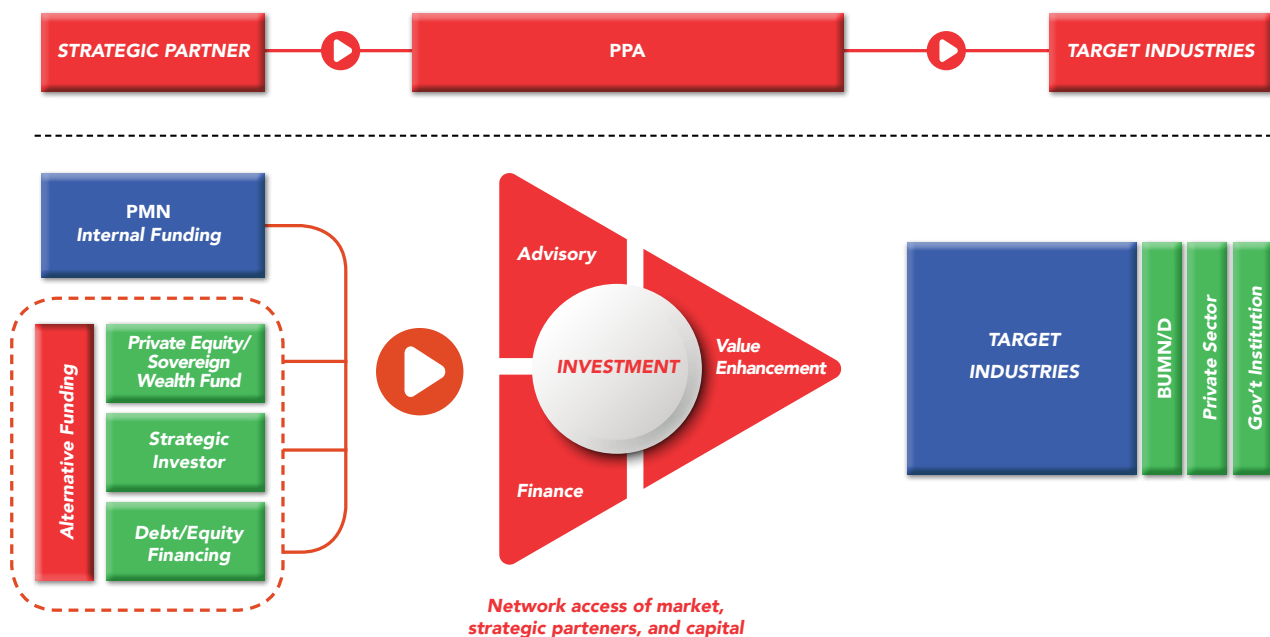
Untuk mewujudkan mimpi menjadi NAMCO, Perusahaan menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti penerapan IT 360°, penyusunan *roadmap HC for industry 4.0* dan penerapan PSAK 71, 72 dan 73 yang sejalan dengan visi perusahaan.

Kegiatan investasi dan pengelolaan aset akan berfokus pada pengelolaan NPL dari bank Himbara dan perbankan swasta lainnya yang dilakukan melalui entitas anak. Kegiatan investasi dan pengelolaan aset tersebut diproyeksikan untuk tahun-tahun berikutnya akan berkembang pesat tanpa meninggalkan amanah untuk melakukan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN.

Berkenaan dengan pelaksanaan aktivitas Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, Perusahaan mengupayakan penyehatan BUMN dilakukan dengan menggunakan skema dikelola sebagai entitas anak melalui mekanisme *inbreng*, sehingga pelaksanaan penyehatan BUMN diharapkan akan lebih optimal. Saat ini, kajian usulan penyehatan BUMN melalui mekanisme *inbreng* sedang dalam proses mendapatkan persetujuan dari regulator. Mengingat belum dapat dipastikannya persetujuan tersebut, maka dalam RJPP 2019-2023 belum memasukkan proyeksi keuangan dari BUMN yang akan di-*inbreng*-kan kepada Perusahaan.

Dengan arah dan strategi pertumbuhan yang ditetapkan, pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Perusahaan menargetkan besaran rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 33% dengan rata-rata pertumbuhan aset 3%.

Pengembangan Model Bisnis 2019-2023





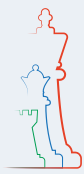


TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sejak awal berdiri pada tahun 2004, PPA memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkup Perusahaan secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya.







Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan restrukturisasi aset, maka komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan hal yang mutlak bagi PPA.



PENCAPAIAN PENERAPAN GCG PPA TAHUN 2020

Sesuai dengan *Roadmap* GCG PPA di tahun 2020 yang memasuki Tahap IV, yaitu, “GCG terintegrasi: Pelaksanaan GCG telah menjadi budaya organisasi di Entitas Induk dan Entitas Anak sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan,” PPA berhasil menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya kerja setiap Insan PPA sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja PPA. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pencapaian/penghargaan yang diberikan Pemangku Kepentingan kepada Perusahaan, antara lain:

Penghargaan “Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik BUMN Non Tbk”

PPA berhasil meraih penghargaan “Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik BUMN Non Tbk” dalam Ajang Anugerah BUMN 2020 yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track pada 9 Juli 2020 di The MAJ Senayan, Jakarta.

90,06 “Sangat Baik”

Skor *assessment* penerapan GCG tahun 2020, meningkat dari skor tahun 2019 sebesar 88,53.

83,25 “Sehat”

Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2020 dengan klasifikasi kesehatan “AA”.

Penghargaan “CEO Visioner Terbaik”

Penghargaan diberikan kepada Iman Rachman sebagai Direktur Utama PPA dalam “Ajang Anugerah BUMN 2020” yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track pada 9 Juli 2020 di The MAJ Senayan, Jakarta.

Penghargaan “Good Performance” dalam Ajang BUMN Performance Excellence Awards 2020

Penghargaan diberikan atas hasil *assessment* KPKU tahun 2018 yang dilaksanakan pada 2019 dengan skor 511,25, meningkat dari tahun 2017 dengan skor 507,50.

Penghargaan diberikan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) dan Majalah Infobank pada tanggal 4 Maret 2020 di Jakarta.

Roadmap GCG PPA

1

Pemutakhiran ketentuan terkait GCG dan melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi penilai GCG:

1. Internalisasi dan penguatan pelaksanaan GCG;
2. Terbentuknya sistem pengendalian intern yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko.

2

Penguatan sistem GCG:

1. Peningkatan operasional yang baik melalui *control* internal, pengendalian risiko dan penerapan *whistleblowing system*;
2. Penguatan sistem pengendalian internal yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko.

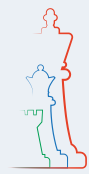
3

Terbentuknya budaya GCG:

1. Terbentuknya kesadaran akan budaya GCG;
2. Terbentuknya BUMN sebagai korporasi yang menjadi bagian masyarakat melalui pendekatan *Corporate Social Responsibility*.

4

GCG terintegrasi: Pelaksanaan GCG telah menjadi budaya organisasi di Entitas Induk dan Entitas Anak sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan.



KOMITMEN PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN

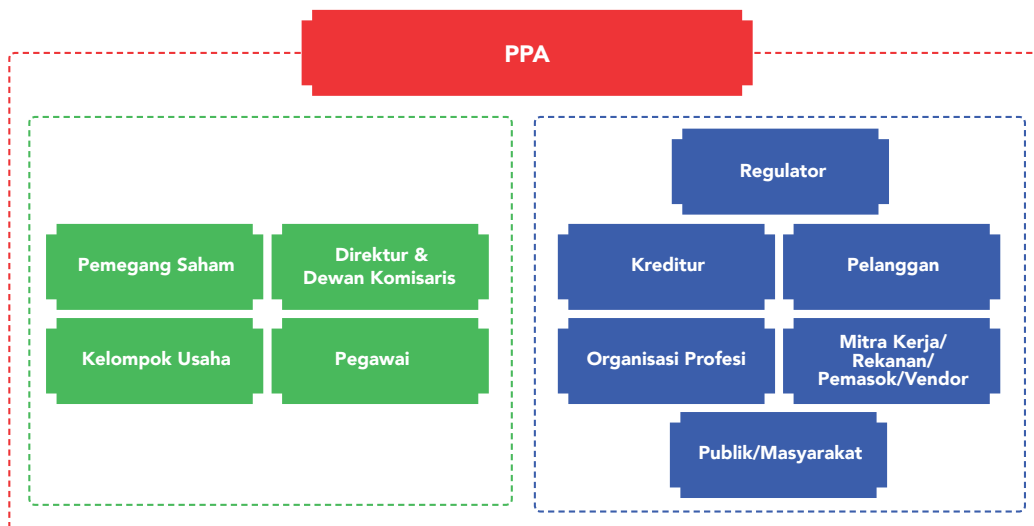
PPA memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), yakni Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan suatu rangkaian mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta patuh pada norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai perusahaan yang dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran perusahaan. Mekanisme atau sistem ini mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan dan penilaian risiko usaha, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja dan pembentukan serta pengembangan budaya kerja di lingkungan perusahaan.

Untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh dan berkesinambungan, Perusahaan terus mengembangkan penerapan GCG selaras dengan praktik terbaik dalam memaksimalkan nilai Perusahaan, melaksanakan kegiatan usaha yang efektif dan efisien, pengelolaan Perusahaan yang profesional dan mandiri, serta menciptakan pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan berdasarkan pada nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara maksimal.

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan usaha, diperlukan tata kelola perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab agar Perusahaan mampu bertahan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup GCG PT Perusahaan Pengelola Aset





TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG

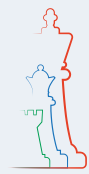
Perusahaan mengimplementasikan GCG sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan mencapai sasaran/target dan visi Perusahaan, yang diharapkan dapat menciptakan PPA sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan (*sustainable company*). Untuk itu, dengan menerapkan GCG, PPA bertujuan untuk:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Membangun mekanisme *Check and Balances* antar organ Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan dan komunikasi antar organ Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta citra dan reputasi Perusahaan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perusahaan;
4. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
5. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
6. Mendorong agar organ Perusahaan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perusahaan;
7. Memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional yang dapat dicapai melalui R/R BUMN, pengelolaan aset eks BPPN dan aset BUMN, serta kegiatan investasi; dan
8. Membantu meningkatkan iklim investasi nasional melalui program/kegiatan yang dilaksanakan.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

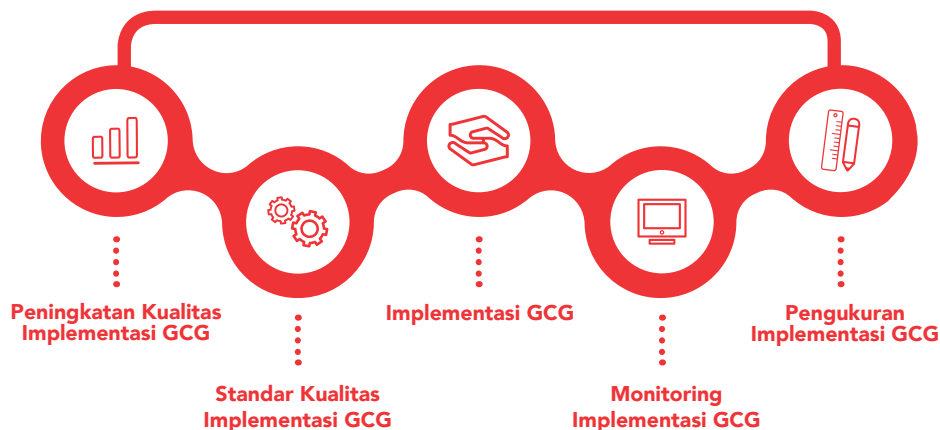
1. Undang Undang Republik Indonesia, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya:
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/06/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 - h. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006.



PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN DI PPA

Sejak awal berdiri pada tahun 2004, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkup Perusahaan secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi sebagai berikut:



STANDAR KUALITAS IMPLEMENTASI GCG

Kepatuhan Terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan BUMN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), standar Implementasi GCG di lingkup PPA mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, serta *best practices* yang berlaku di dunia usaha. Regulator, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia serta regulator industri telah memberikan penekanan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar sebagai hal yang dapat menjadi fondasi bagi pelaku usaha.

Adapun standar implementasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, mencakup 6 (enam) aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Aspek Direksi.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG DI PPA

Prinsip-prinsip GCG PPA



Bentuk komitmen nyata Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkup PPA, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Prinsip Transparansi

Pendekatan

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Perusahaan menyediakan informasi terkait kegiatan usahanya kepada *stakeholders* melalui penyediaan informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala antara lain melalui *website* Perusahaan, penerbitan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan serta laporan lainnya sesuai keperluan. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Akuntabilitas

Pendekatan

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Perusahaan memiliki mekanisme yang kuat dalam proses penerapan GCG. Mekanisme tersebut dirancang dalam bentuk kebijakan, pedoman, prosedur dan hubungan yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Perusahaan senantiasa mengkaji dan menyempurnakan *soft-structure* GCG secara berkala guna memastikan penerapan GCG sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun peraturan yang berlaku. Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*), Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Kerja/Piagam (*Charter*) untuk organ Perusahaan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris serta organ-organ Penunjang Dewan Komisaris Perusahaan. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, jika sudah menjadi budaya yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

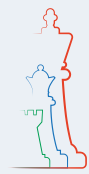
Prinsip Responsibilitas

Pendekatan

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Perusahaan dalam memenuhi kesesuaian pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, dilakukan melalui pelaksanaan audit terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya.



Prinsip Independensi

Pendekatan

Kadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Penerapan di lingkup Perusahaan

- Penerapan Independensi Dewan Komisaris Setiap anggota Dewan Komisaris harus bertindak secara independen. Independensi merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan perusahaan.
- Pemenuhan independensi Dewan Komisaris diukur berdasarkan kriteria antara lain bahwa anggota Dewan Komisaris:
 - Bukan merupakan anggota Manajemen Perusahaan;
 - Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
 - Bukan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan;
 - Bukan pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota Perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris;
 - Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris;
 - Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama.
- Penerapan independensi Direksi dalam menjalankan segala tindakan kepengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain harus bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan

Pendekatan

Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta asas kesetaraan dalam menjalankan bisnis.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan anggota Direksi, Pemegang Saham telah mempertimbangkan pemenuhan aspek keberagaman usia, pendidikan, pengalaman kerja dan jenis kelamin. Dengan keberagaman tersebut diharapkan Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan tugasnya secara lebih efektif dalam mencapai target dan kinerja Perusahaan.

SINERGI PENERAPAN GCG DI PPA GRUP (SUBSIDIARY GOVERNANCE)

Seluruh kebijakan GCG di lingkup PPA Grup juga berlaku untuk Entitas Anak, di mana pengukuran implementasi GCG menjadi salah satu indikator kinerja Entitas Anak. Tujuan Perusahaan membentuk Entitas Anak adalah untuk menyinergikan kegiatan induk dan seluruh Anak Perusahaan agar mendapatkan lompatan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian dalam hubungan kerja pengelolaan antara Perusahaan dan Entitas Anak menyelaraskan Anggaran Dasar, RJPP dan RKAP.

Meskipun demikian, tiap Entitas Anak dalam PPA Grup adalah entitas hukum terpisah dan mandiri dalam menjalankan kebijakan bisnis berdasarkan Anggaran Dasar, RJPP, dan RKAP masing-masing. Karena merupakan badan usaha yang mandiri, maka kewenangan dan kebijakan pengurusan tiap Entitas Anak berada pada Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak. Perusahaan dapat memberikan arahan kepada Entitas Anak melalui pintu kepemilikan saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS, sehingga tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

Untuk memastikan bahwa tata kelola hubungan Perusahaan dan Entitas Anak terjadi dalam kerangka GCG, maka Perusahaan mengeluarkan berbagai kebijakan di antaranya:

- Surat Keputusan Direksi No. SK-61/PPA/0916 tanggal 22 September 2016 tentang Kebijakan Penanganan Anak Perusahaan di mana di dalamnya mengatur mengenai pemberian persetujuan Perusahaan atas kegiatan Entitas Anak, baik yang terkait penyusunan dan persetujuan RKAP maupun pengkajian aksi korporasi Anak Perusahaan, kemudian juga mengatur mengenai pengangkatan dan penempatan wakil Perusahaan pada Entitas Anak, serta mekanisme pengawasan Entitas Anak, di mana Entitas Anak diwajibkan memberikan laporan baik bulanan, triwulanan, semester maupun laporan tahunan. Dengan demikian kontrol atas pengelolaan Entitas Anak dapat berjalan efektif;
- Surat Keputusan Direksi SK-69/PPA/1118 tanggal 9 November 2018 tentang Kebijakan Penunjukan Pengurus Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan. Dalam keputusan ini, Perusahaan mengatur ketentuan penunjukan pengurus Entitas Anak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga terdapat kepastian dan ketetapan dalam mekanisme penunjukan pengurus dengan landasan *merit system*.

Berlandaskan regulasi internal tersebut, Perusahaan telah menjalankan tata kelola hubungan antara Perusahaan dan Entitas Anak dengan landasan prinsip-prinsip GCG, baik dalam mekanisme pengawasan jalannya Entitas Anak, penempatan Direksi dan Komisaris Entitas Anak serta mekanisme penempatan pejabat lainnya pada Entitas Anak.



MONITORING PENERAPAN GCG

Penerapan implementasi GCG di Perusahaan dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Satuan Pengawasan Internal yang memiliki fungsi *monitoring* prinsip-prinsip GCG di PPA telah diimplementasikan secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan.

PENGUKURAN IMPLEMENTASI GCG

Perusahaan senantiasa mengupayakan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang selaras dengan *best practices*. Guna memantau peningkatan perkembangan implementasi GCG secara berkala, Perusahaan melaksanakan *assessment* atau evaluasi/penilaian terhadap penerapan GCG Perusahaan yang bertujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan prinsip GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan;
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan prinsip GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian;
3. Memantau konsistensi penerapan prinsip GCG di lingkungan organisasi Perusahaan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG;
4. Mendorong pengelolaan Perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

DASAR PENILAIAN DAN METODE

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Perusahaan melakukan pengukuran terhadap GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan/*assessment* GCG dilakukan secara berkala oleh Perusahaan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh *assessor* eksternal, dengan diselingi oleh *self assessment* yang dilakukan oleh *assessor* internal Perusahaan;
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada *point* pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 yang terdiri dari 6 (enam) aspek, 43 indikator penerapan Tata Kelola Perusahaan dan 153 parameter pengujian.

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan

Perusahaan secara umum memiliki komitmen yang baik untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan, antara lain didukung dengan adanya Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan dan panduan tambahan di antaranya seperti Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Pengadaan barang dan jasa, Kebijakan PKBL, dan Kebijakan pendukung lainnya. Sebagai perwujudan atas komitmen pelaksanaan GCG, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengungkapan informasi, pertanggungjawaban terhadap penegakkan peraturan, akuntabilitas pembagian tanggung jawab, kemandirian profesional tanpa benturan kepentingan, dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan di lingkungan Perusahaan serta melakukan pengelolaan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Perusahaan berupaya secara konsisten untuk memastikan hak-hak Pemilik/Pemegang Saham terpenuhi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan kebijakan Perusahaan. Pemenuhan hak-hak Pemilik/Pemegang Saham dilakukan antara lain melalui pemberian informasi terkini atas kondisi Perusahaan, pengambilan keputusan dalam RUPS serta Dewan Komisaris beserta perangkat pendukungnya (Komite dan Sekretaris) menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas bisnis dan operasional.

3. Aspek Dewan Komisaris
Fungsi pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan Perusahaan yang efisien dan efektif sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Latar belakang anggota Dewan Komisaris dengan kompetensi dan kualifikasi (latar belakang teknis dan regulator) yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan cukup memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, antara lain melalui pemberian masukan kepada Manajemen Perusahaan.



4. Aspek Direksi

Direksi Perusahaan sebagai fungsi pelaksana/pengurus bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Komitmen Direksi beserta jajaran Manajemen terhadap penerapan GCG dirasakan cukup baik, dengan menciptakan budaya dan etika Perusahaan, struktur, proses dan kinerja Perusahaan.

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Perusahaan senantiasa berupaya mewujudkan kemudahan akses atas informasi dan data perusahaan dengan menyediakan media-media informasi seperti intranet dan website.

6. Aspek lainnya

Perusahaan memastikan aspek-aspek penyusunan Laporan Tahunan yang sesuai dengan ketentuan.

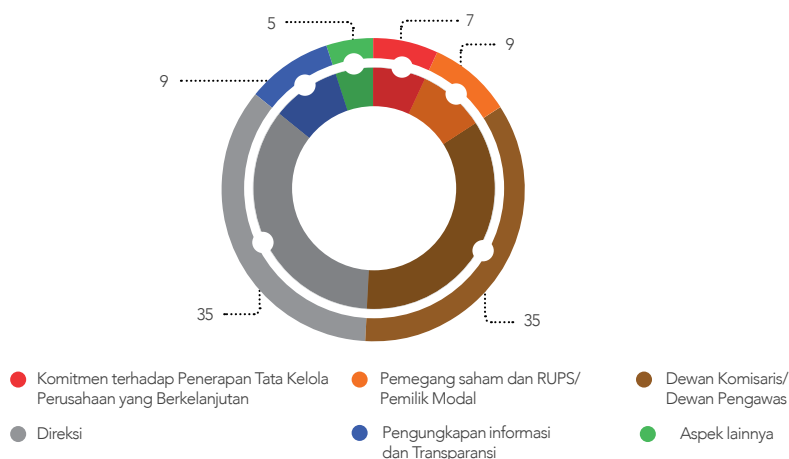
Pengukuran dilakukan melalui penelusuran kelengkapan dokumen pedoman/peraturan/kebijakan terkait Mekanisme Tata Kelola seperti yang telah dijelaskan di atas, serta wawancara kepada pihak-pihak terkait di internal Perusahaan.

6 Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	Direksi	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	Aspek lainnya



Komposisi Bobot Penilaian per Aspek



Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019: Hasil, Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2020

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam PER-01/MBU/2011 di mana penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan agar dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, dan dilakukan evaluasi untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di antara tahun dilakukannya penilaian sebagaimana tersebut di atas, maka di tahun 2019, telah dilakukan kegiatan *assessment* terhadap penerapan GCG Perusahaan.

Jenis Penilaian	: Assessment (Penilaian)
Assessor/Penilai	: PT Adikarya Gemilang Solusindo
Periode Penerapan	: 1 Januari-31 Desember 2019
Tahun Buku	: 2019
Waktu Pengukuran	: Desember 2019-Januari 2020
Waktu Terbit Laporan	: 4 Februari 2020



Berdasarkan *assessment* penerapan GCG tahun buku 2019, Perusahaan memperoleh nilai sebesar 88,53 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 88,53% atau mencapai kualifikasi “Sangat Baik”. Perolehan skor tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil *assessment* untuk penerapan GCG tahun 2018 sebesar 88,13%. Rincian hasil penilaian penerapan GCG adalah sebagai berikut:

Aspek Pengujian	Bobot	Pencapaian Tahun Buku 2019		
		Nilai	Pencapaian (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,63	94,66%	“Sangat Baik”
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,68	96,39%	“Sangat Baik”
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	32,74	93,53%	“Sangat Baik”
Direksi	35,00	32,41	92,59%	“Sangat Baik”
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	7,46	82,91%	“Baik”
Aspek Lainnya	5,00	0,63	12,50%	-
Skor Keseluruhan	100,00	88,53	88,53%	“Sangat Baik”

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Dari hasil *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2019, terdapat rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (AoI) sebagai rencana aksi perbaikan di tahun 2020. Terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut, untuk aspek Direksi yang masih dalam proses sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2019 dan Tindak Lanjutnya

No.	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2019	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2020		
		Status	Periode Tindak Lanjut	Bentuk Tindak Lanjut
Aspek Direksi				
1	Direksi agar melaksanakan audit atas TI	x	2020	Dalam Proses tindak lanjut
2	Direksi agar memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu.	x	2020	Dalam Proses tindak lanjut
3	Direksi agar melakukan evaluasi efektivitas penerapan WBS	x	2020	Dalam Proses tindak lanjut
4	Perusahaan agar memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku, serta mensosialisasikan pedoman-pedoman tersebut secara tatap muka	x	2020	Dalam Proses tindak lanjut
5	Direksi agar membuat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan dalam <i>Board Manual</i> .	x	2020	Dalam Proses tindak lanjut
6	<i>Board Manual</i> agar mengatur standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.	x	2020	Dalam Proses tindak lanjut

v = telah ditindaklanjuti | x = dalam proses tindak lanjut

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2020, dilakukan secara *self assessment* oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern PT PPA. Hasil *assessment* untuk tahun buku 2020 menunjukkan hasil dengan predikat “Sangat Baik” dengan capaian skor sebesar 90,065.



Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2020

Jenis Penilaian	: Self Assessment
Assessor/Penilai	: Divisi Satuan Pengawas Intern PT PPA
Periode Penerapan	: 1 Januari - 31 Desember 2020
Tahun Buku	: 2020
Tempat Pengukuran	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Jakarta
Waktu Pengukuran	: 12 Januari 2021 – 22 Februari 2021
Waktu Terbit Laporan	: 25 Februari 2021

Rincian hasil *Self Assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Aspek Pengujian	Bobot	Pencapaian Tahun Buku 2020		
		Skor	Pencapaian (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,455	92,21%	"Sangat Baik"
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,466	94,07%	"Sangat Baik"
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	33,673	96,21%	"Sangat Baik"
Direksi	35,00	31,605	90,30%	"Sangat Baik"
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	7,367	81,85%	"Baik"
Sub Jumlah		87,565		
Aspek Lainnya	5,00	2,500	50,00%	"Kurang Baik"
Skor Keseluruhan	100,00	90,065	90,065%	"Sangat Baik"

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Dari hasil *self assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2020, terdapat 40 (empat puluh) rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (AoI) untuk dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices* yang terus berkembang, sebagai berikut.

No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2020	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya)
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan		
1	Menyelesaikan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	v	Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dimutakhirkan dengan mengacu pada hasil kajian dari Deloitte.
2	Menyelesaikan pemutakhiran Pedoman Etika dan Perilaku di mana salah satu isi dari pemutakhiran tersebut adalah agar mencantumkan nilai-nilai perusahaan yang baru (AKHLAK).	v	Pedoman Etika dan Perilaku dimutakhirkan dengan mengacu pada hasil kajian dari Deloitte.



No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2020	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya)
3	Memutakhirkan penetapan jabatan dan pembagian tugas serta wewenang anggota Direksi sesuai struktur organisasi terbaru di mana di dalamnya meliputi tugas dan wewenang dalam kaitannya dengan penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik minimal untuk: 1) menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; dan 3) memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.	x	-
4	Memasukkan materi Pedoman Etika dan Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.	x	-
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal			
1	Memberitahukan rencana pemberhentian anggota Direksi kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.	x	Pemberitahuan pemberhentian secara lisan telah disampaikan kepada Direksi saat diselenggarakannya acara pemberitahuan rencana pemberhentian dan pembelaan Direksi PT PPA
2	Memuat alasan pemberhentian anggota Direksi dalam Keputusan RUPS.	x	-
3	Menuangkan alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.	x	-
4	Mengesahkan/menyetujui RKAP secara tepat waktu paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan	v	-
5	Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual (di samping penilaian kinerja secara kolegal yang telah dilakukan).	v	Proses penilaian kinerja Direksi kolegal dan kinerja anggota Direksi (individu) dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.
6	Menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menjadi kewenangannya.	x	-
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas			
1	Melakukan penilaian kinerja Direksi dengan juga didasarkan kepada telaahan kriteria, target, dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.	v	Dewan Komisaris belum dapat melakukan penilaian tersebut dikarenakan proses penyusunan KPI Individu masih dalam proses penyelesaian oleh Direksi. Mengenai kondisi tersebut, akan dibahas dalam rapat BOC-BOD.
2	Merevisi Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris, dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai: etika rapat; tata penyusunan risalah rapat; pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; dan pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.	v	Akan menjadi bagian dari Piagam (<i>Charter</i>) Dewan Komisaris.
3	Senantiasa melengkapi surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Dewan Komisaris serta menuangkan penjelasan ketidakhadiran tersebut dalam Risalah Rapat.	v	Untuk ke depannya, Dewan Komisaris akan memuat dan menuangkan dalam Risalah Rapat mengenai penjelasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat.
4	Mencantumkan pula: (1) pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); dan (3) keputusan rapat dalam dokumentasi hasil rapat Dewan Komisaris.	v	Untuk ke depannya Sekretaris Dewan Komisaris akan mencantumkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris mengenai pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada).



No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2020	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya)
5	Mengkaji ulang komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.	x	-
6	Menetapkan/mengesahkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.	x	-
7	Menginstruksikan kepada Komite Dewan Komisaris agar dalam laporan triwulanan dan tahunannya juga memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunannya, serta rekomendasi dari hasil kegiatannya.	x	-
IV	Direksi		
1	Membuat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan di mana kebijakan tersebut dapat dicantumkan dalam <i>Board Manual</i> yang sedang dimutakhirkan atau dituangkan dalam kebijakan tersendiri.	v	Pemutakhiran kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi mengacu pada hasil kajian dari Deloitte.
2	Memutakhirkan penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi sesuai struktur organisasi terbaru.	x	-
3	Menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu yang ditentukan.	x	-
4	Menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu yang ditentukan.	x	-
5	Melakukan penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan sehingga tidak terdapat jabatan yang kosong.	x	-
6	Melengkapi <i>database (list)</i> tentang orang yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dengan informasi/daftar mengenai siapa saja yang dapat mengambilalih pekerjaan-pekerjaan utama apabila terdapat karyawan-karyawan yang berhenti, pensiun, maupun meninggal dengan tak terduga.	x	-
7	Melengkapi Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris dengan pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi (kinerja individual).	x	-
8	Melakukan audit atas TI.	v	Akan mengupayakan peningkatan kapabilitas SDM Divisi SPI dalam melakukan audit atas TI.
9	Menetapkan secara jelas unit mana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan <i>survey</i> kepuasan pelanggan sehingga <i>survey</i> terlaksana secara sistematis dan berkala dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat ketercapaian indikator SPM	x	-
10	Melakukan sertifikasi atas kebijakan mutu, serta evaluasi dan audit secara berkala atas sistem mutu, dan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.	v	Sertifikasi kebijakan mutu direncanakan akan dilakukan setelah selesainya proses integrasi <i>holding</i> Danareksa-PPA.
11	Menetapkan kebijakan bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang dan jasa bersifat terbuka dan tidak rahasia.	x	-
12	Melakukan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan secara konsisten.	x	-
13	Melakukan evaluasi pelaksanaan program pengembangan SDM berdasarkan pencapaian target indikator keberhasilan sesuai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.	x	-
14	Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan menerbitkan <i>internal control report</i> yang mencakup penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.	x	-
15	Meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya.	x	-
16	Meningkatkan kecukupan jumlah tenaga auditor internal.	x	-



No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2020	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya)
17	Menginstruksikan pimpinan Fungsi Audit Internal untuk memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (<i>Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor</i>).	x	-
18	Melengkapi komponen isi risalah rapat Direksi dengan mencantumkan: pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada), jalannya rapat (dinamika rapat), hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, dan keputusan rapat sebelumnya.	x	-
19	Melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan di luar tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.	x	-
20	Menyelenggarakan RUPS untuk pengesahan/persetujuan RKAP paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.	x	-
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi		
1	Mempersiapkan PT PPA untuk berpartisipasi dalam <i>Annual Report Award</i> (ARA).	v	Untuk ke depannya, PT PPA akan mengupayakan untuk memperoleh penghargaan dalam <i>Annual Report Award</i> .
2	Mempersiapkan PT PPA untuk berpartisipasi dalam ajang penghargaan lain di bidang CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya.	x	-
VI	Aspek Lainnya		
1	Melakukan upaya-upaya sehingga PT PPA memperoleh pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya.	v	Untuk ke depannya, PT PPA akan mengupayakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya.

Perkembangan *Assessment* Penerapan GCG

Sejak dilakukannya *assessment* GCG pada tahun 2013, Perusahaan melakukan *assessment* guna melihat kemajuan pelaksanaan GCG dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan.

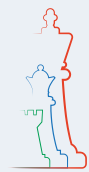
Pencapaian Hasil *Assessment* Penerapan GCG

Tahun	Jenis Penilaian	Penilai	Skor Assessment GCG							
			Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Aspek VI	Skor Akhir	Kategori
2020	Self Assessment	Tim Internal	6,455	8,466	33,673	31,605	7,367	2,500	90,065	"Sangat Baik"
2019	Assessment	PT Adikarya Gemilang Solusindo (Independen)	6,63	8,68	32,74	32,41	7,46	0,63	88,53	"Sangat Baik"
2018	Self Assessment	Tim Internal	6,550	8,481	32,291	31,869	6,441	2,500	88,13	"Sangat Baik"
2017	Assessment	PT Icon Global Solusi (Independen)	6,6577	8,3798	32,1671	31,8844	6,4522	2,5000	88,04	"Sangat Baik"
2016	Self Assessment	Tim Internal	6,385	8,649	32,239	31,622	6,823	1,750	87,47	"Sangat Baik"
2015	Assessment	PT Sinergi Daya Prima (Independen)	6,071	8,629	30,157	30,762	6,591	3,750	85,96	"Sangat Baik"
2014	Self Assessment	Tim Internal	6,24	8,48	30,32	29,87	6,82	-	81,73	"Baik"
2013	Assessment	PT Kharisma Insani Manajemen (Independen)	5,59	7,72	28,75	29,26	6,71	-	78,03	"Baik"

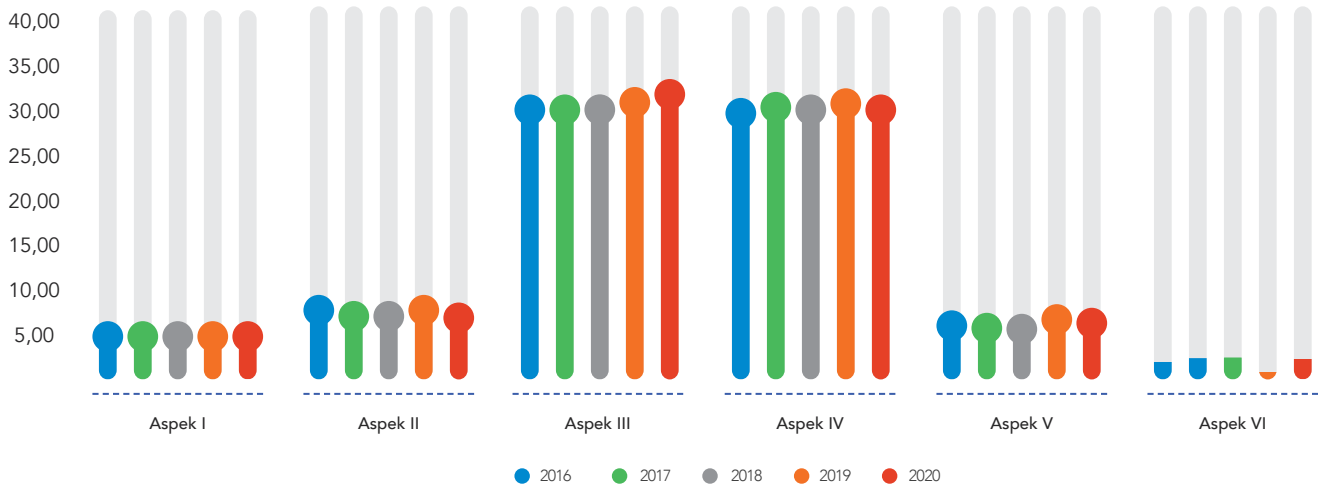
Keterangan:

Aspek I: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
 Aspek II: Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
 Aspek III: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

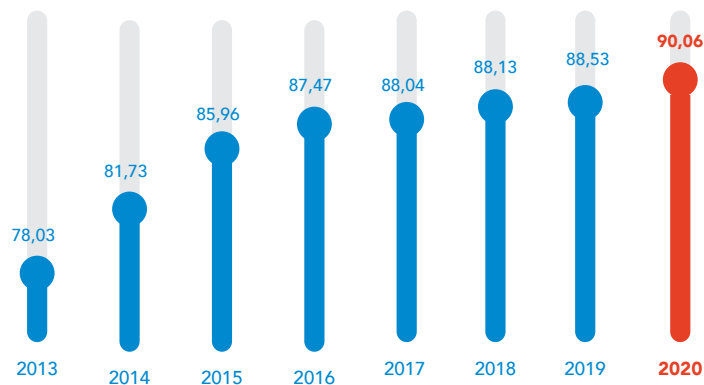
Aspek IV: Direksi
 Aspek V: Pengungkapan Informasi dan Transparansi
 Aspek VI: Aspek Lainnya



Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG per Aspek 2016-2020



Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG - Skor Akhir 2013-2020



KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Kementerian BUMN menggunakan kriteria evaluasi yang disebut Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dalam menilai kinerja BUMN. Penilaian KPKU berdasarkan surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN, yang menyatakan bahwa evaluasi BUMN menggunakan kriteria KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN, yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*".

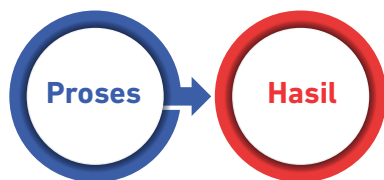
Pelaksanaan penilaian atas implementasi KPKU oleh tim evaluator mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-272/S.MBU/09/2014 tanggal 18 September 2014 yang menyebutkan bahwa tim evaluator minimal terdiri dari 5 (lima) orang Evaluator yang telah memiliki sertifikat Evaluator KPKU serta dapat terdiri dari seluruhnya berasal dari eksternal BUMN atau kombinasi dengan melibatkan minimal 1 (satu) orang dari internal BUMN.



Proses Evaluasi ini melalui 2 (dua) tahapan besar yaitu tahap “Ondesk Review” yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU tahun sebelumnya dan informasi pendukung ADLI (*Approach, Deployment, Learning, dan Integration*). Tahap berikutnya adalah “Site Visit” untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta pejabat eksekutif lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi. Laporan atas pemenuhan persyaratan pada suatu subkategori dinilai dengan mempertimbangkan:

1. Persyaratan subkategori tersebut;
2. Faktor-faktor bisnis utama yang dilaporkan dalam profil perusahaan;
3. Kesempurnaan sistem yang diterapkan di perusahaan;
4. Keluasan cakupan penerapan sistem;
5. Konsistensi peningkatan kualitas proses dan kinerja sebagaimana diatur dalam sistem pemberian skor.

Dasar Faktor Penilaian KPKU



1. Faktor Penilaian Proses

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Metode/Sistem (*Approach*) adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada:
 - Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi perusahaan;
 - Efektifitas dari penggunaan metode/sistem tersebut;
 - Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).
- b. Penerapan (*Deployment*) mengacu pada sejauh mana:
 - Metode/sistem diterapkan sesuai dengan desainnya;
 - Metode/sistem diterapkan secara konsisten;
 - Metode/sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya.
- c. Pembelajaran (*Learning*) mengacu pada:
 - Penyempurnaan metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan;
 - Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan;
 - Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam perusahaan.

d. Integrasi (*Integration*) mengacu pada:

- Keselarasan metode/sistem dengan kebutuhan perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya;
- Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses;
- Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran perusahaan.

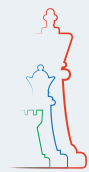
Subkategori pada faktor Proses yang terdiri dari ADLI tersebut dilakukan klarifikasi, saling dihubungkan untuk menekankan bahwa deskripsi *Approach* harus selalu menunjukkan penerapan yang konsisten dengan persyaratan spesifik suatu subkategori dan perusahaan. Seiring dengan semakin matangnya proses, maka deskripsinya juga harus menunjukkan bagaimana siklus pembelajaran (termasuk inovasi) dan juga integrasi dengan proses kerja lainnya dan dengan unit kerja lainnya.

2. Faktor Penilaian Hasil

Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LeTCI), yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Level* mengacu pada tingkat pencapaian kinerja saat ini;
- b. *Trend* mengacu pada tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan keluasan tingkat penerapan dari hasil-hasil kinerja;
- c. *Comparison* mengacu pada perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap perbandingan yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis, dan perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia;
- d. *Integration* mengacu pada ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam profil perusahaan dan subkategori serta hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang kemudian hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran perusahaan.

Subkategori pada faktor hasil tersebut diklarifikasi dengan data yang menunjukkan level kinerja, *trend* dan perbandingan yang relevan untuk ukuran dan indikator utama kinerja perusahaan serta terintegrasi dengan persyaratan utama perusahaan. Subkategori pada faktor hasil juga diklarifikasi dengan data tentang luasnya cakupan hasil kinerja yang dilaporkan. Secara langsung hal ini terkait dengan penerapan dan pembelajaran perusahaan; jika proses perbaikan disebarkan secara luas maka harusnya ada hasilnya yang sesuai.



Selain kedua faktor penting dalam evaluasi dan umpan balik yaitu proses dan hasil, terdapat pertimbangan yang kritical dan sangat penting dalam evaluasi dan umpan balik yang dilaporkan yaitu faktor-faktor bisnis utama yang harus diidentifikasi dalam profil perusahaan, persyaratan pelanggan utama, lingkungan kompetitif, kebutuhan tenaga kerja, tujuan strategis utama dan program kerja.

Penetapan Skor

Penetapan skor secara umum dilakukan berdasarkan agregat pandangan holistik dari ke-4 faktor dimensi penilaian ADLI untuk "Proses" atau LeTCI untuk "Hasil". Dalam menetapkan asumsi kisaran rentang nilai awal disarankan untuk tidak memudahkan dengan cara membandingkan atau merata-ratakan hasil penilaian dari masing-masing dimensi penilaian A, D, L pada penilaian PROSES dan I atau Le,T,C dan I pada penilaian HASIL.

Proses

Skor 50%: Mencerminkan adanya cara/metode/sistem yang menjawab seluruh pertanyaan pada kriteria persyaratan umum (*Overall Requirement*), telah dijalankan secara konsisten cara tersebut pada sebagian besar unit kerja yang harus menerapkannya, telah dilakukan beberapa kali proses perbaikan dan pembelajaran yang mengarah kepada kebutuhan utama perusahaan.

Skor >50%: Harus dapat ditunjukkan proses yang berkualitas tinggi, ditunjukkan penerapannya yang lebih baik dan tidak ditemukan kendala dalam penerapan, terjadi pembelajaran organisasi yang signifikan dan terintegrasi dengan proses-proses lainnya dan mengarah pada keberhasilan kinerja.

Hasil

Skor 50%: Mencerminkan adanya pencapaian tingkat kinerja yang baik, *trend* yang positif, dibandingkan dengan pembandingan (*benchmark*) yang sesuai untuk setiap indikator kinerja sesuai persyaratan di setiap item kategori yang keberadaannya penting bagi bisnis atau misi organisasi.

Skor >50%: Skor lebih dari 50% harus dapat ditunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang lebih baik juga *trend* yang lebih tinggi, dibandingkan kinerjanya dengan kinerja pembandingan yang lebih kuat maknanya bagi perusahaan dan memiliki jangkauan lebih luas dan integrasi dengan persyaratan atau misi organisasi.

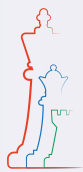
Hasil Evaluasi dan Penilaian KPKU

Selaras dengan tujuan Perseroan yaitu menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi, Perseroan secara konsisten melaksanakan penilaian KPKU yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya diselenggarakan bersama Forum Ekselen BUMN (FEB). Melalui penilaian KPKU, maka dapat diketahui posisi Perseroan, sehingga dapat dilakukan perbaikan *improvement* baik pada proses maupun hasil-hasil bisnis Perusahaan serta diharapkan dapat meningkatkan skor KPKU di tahun berikutnya.

Penilaian KPKU terakhir dilaksanakan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pada tahun 2020 Kementerian Badan Usaha Milik Negara tidak menyelenggarakan penilaian KPKU.

Meski demikian, Perseroan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan secara terus menerus baik pada proses maupun hasil, guna meningkatkan daya saing Perseroan sehingga dapat menciptakan nilai tambah Perseroan sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Keberhasilan Perseroan dalam meraih Penghargaan "*Good Performance*" dalam Ajang BUMN *Performance Excellence Awards* 2020 yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) dan Majalah Infobank pada tanggal 4 Maret 2020 di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan atas hasil *assessment* KPKU tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan skor 511,25, meningkat dari tahun 2017 sebesar 507,50.



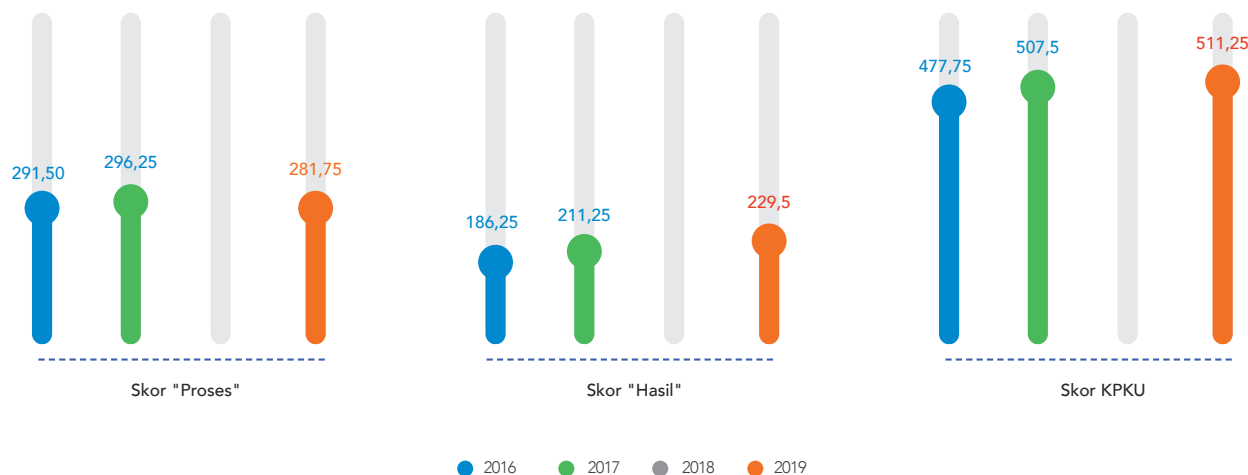
Penghargaan diberikan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) dan *Majalah Infobank* pada tanggal 4 Maret 2020 di Jakarta.

Hasil Resume Skor KPKU

No.	Kategori/Sub Kategori	Skor Maksimal	Skor Penilaian			
			2016	2017	2018	2019
1	Kepemimpinan					
1.1	Kepemimpinan Senior	70,00	38,50	38,50	-	35,00
1.2	Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat	50,00	27,50	30,00	-	27,50
2	Perencanaan Strategis					
2.1	Pengembangan Strategi	40,00	22,00	24,75	-	22,50
2.2	Implementasi Strategi	45,00	22,50	20,00	-	20,00
3	Fokus Pelanggan					
3.1	Suara Pelanggan	45,00	20,25	22,00	-	20,00
3.2	Keterikatan Pelanggan	40,00	20,00	24,75	-	24,75
4	Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan					
4.1	Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan	45,00	24,75	22,50	-	22,50
4.2	Pengelolaan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi Informasi	45,00	24,75	22,50	-	22,50
5	Fokus Tenaga Kerja					
5.1	Lingkungan Tenaga Kerja	40,00	22,00	22,00	-	22,00
5.2	Keterikatan Tenaga Kerja	45,00	22,50	22,50	-	22,50
6	Fokus Operasi					
6.1	Sistem Kerja	45,00	24,75	24,75	-	22,50
6.2	Proses Kerja	40,00	22,00	22,00	-	20,00
	Skor Proses	550,00	291,50	296,25	-	281,75
7	Hasil-Hasil					
7.1	Hasil-hasil Produk dan Proses	110,00	33,00	49,50	-	60,00
7.2	Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan	85,00	34,00	42,50	-	40,00
7.3	Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja	85,00	38,25	38,25	-	40,00
7.4	Hasil-hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola	80,00	36,00	36,00	-	40,00
7.5	Hasil-hasil Keuangan dan Pasar	90,00	45,00	45,00	-	49,50
	Skor Hasil	450,00	186,25	211,25	-	229,50
	Jumlah	1.000,00	477,75	507,50	-	511,25



Hasil Evaluasi dan Penilaian KPKU Perusahaan 2016-2020



Dari hasil penilaian tersebut, Tim Evaluator KPKU mengeluarkan umpan balik yang menghasilkan peluang perbaikan (*Opportunity for Improvements*) dan kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan *improvement* baik proses maupun *improvement* hasil-hasil bisnis Perusahaan serta diharapkan meningkatnya skor KPKU di tahun berikutnya.

Key Themes *Strengths* sesuai hasil Penilaian KPKU Tahun Buku 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Key Themes Strengths
1	Secara keseluruhan PPA telah membangun dan mengukur kinerja ekselennya dengan menampilkan 312 Grafik Kinerja dengan sebaran sebagai berikut: - Kinerja Produk dan Proses (49 Grafik Kinerja); - Kinerja Fokus Pelanggan (82 Grafik Kinerja); - Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (67 Grafik Kinerja); - Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (63 Grafik Kinerja); dan - Kinerja Keuangan dan Pasar (51 Grafik Kinerja), sudah membangun Kinerja positif secara berkesinambungan dengan pencapaian kinerja sebagai berikut : 56,6% (163 Grafik Kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) Level Good, yang meliputi kinerja Produk dan Proses (20 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (66 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (48 Grafik), Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (29 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (33 Grafik). 6,6% (59 Grafik Kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) Level Meet, yang meliputi kinerja Produk dan Proses (24 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (7 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (6 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (22 Grafik). 31,3% (32 Grafik kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukkan <i>Trend</i> positif dengan kenaikan signifikan setiap tahunnya, <i>Trend Sustain</i>, yang meliputi kinerja Produk dan Proses (0 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (9 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (10 Grafik), Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (8 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (5 Grafik). 23,3% (152 Grafik Kinerja dari 312 Grafik yang tersedia) menunjukkan <i>Trend</i> Positif yang berfluktuasi, <i>Trend Favourable</i>, yang meliputi Kinerja Produk dan Proses (32 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (38 Grafik), Kinerja Fokus Tenaga Kerja (30 Grafik), Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (29 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (23 Grafik). 5,6% (58 Grafik kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukkan <i>Trend</i> positif dengan kenaikan signifikan setiap tahunnya, <i>Trend Flat</i>, yang meliputi Kinerja Produk dan Proses (9 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (17 Grafik), Kinerja Fokus Tenaga Kerja (14 Grafik), Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (17 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (1 Grafik). 18,1% (88 Grafik kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukkan Kinerja <i>Leading</i> atau diatas pembedingnya/ Kompetitornya, meliputi kinerja Produk dan Proses (11 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (17 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (14 Grafik), Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (22 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (24 Grafik). 4,2% (29 Grafik kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukkan Kinerja <i>Equal</i> atau sama dengan pembedingnya/ Kompetitornya, meliputi Kinerja Produk dan Proses (4 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (10 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (9 Grafik), dan Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (6 Grafik). 89,2% (300 Grafik kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) memiliki proyeksi, meliputi kinerja Produk dan Proses (45 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (82 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (67 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (63 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (43 Grafik). 71,2% (212 Grafik kinerja dari 312 Grafik Kinerja yang tersedia) disegmenkan, yang meliputi kinerja Produk dan Proses (29 Grafik), Kinerja Fokus Pelanggan (71 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (63 Grafik), Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola (49 Grafik). - Data terlaporkan 94% (312 Grafik Kinerja). Secara keseluruhan selaras dengan upaya PPA membangun kinerja ekselennya sesuai dengan harapan para <i>Stakeholder</i> dan Pelanggan dalam membangun Visi, Misi dan Kompetensi Inti PPA.



Key Themes Opportunity For Improvement sesuai hasil Penilaian KPKU Tahun Buku 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

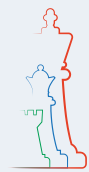
No.	Key Themes Opportunity For Improvement
1	PPA masih mengalami kendala dalam proses pengelolaan perusahaan ini berdasarkan perspektif kesisteman, dalam hal pengelolaan proses kerja PPA. Walaupun sudah dipandu dengan kebijakan perusahaan yaitu SK-62/PPA/1214 tentang Kebijakan Penyusunan Ketentuan Kegiatan Perusahaan, namun masih terdapat gap yang signifikan dalam <i>deployment</i> sistem ini sehingga banyak kegiatan-kegiatan perusahaan yang belum ditopang dengan keberadaan sistem yang handal dan terkendali (Kebijakan, SOP, Petunjuk Teknis), misalnya proses penjabaran/komunikasi visi dan tata nilai perusahaan, proses detail penyusunan strategi perusahaan maupun strategi bisnis, proses pengelolaan keluhan pelelangan, proses melekatkan pembelajaran organisasi ke dalam operasional harian, proses perencanaan suksesi pimpinan perusahaan, proses manajemen inovasi dan lain-lain. Ketiadaan sistem-sistem tersebut dapat berdampak pada penurunan daya saing perusahaan dan kegagalan perusahaan dalam mewujudkan visinya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2	Walaupun sudah dilakukan kegiatan komunikasi budaya perusahaan (SEEIT), baik melalui penerbitan Artefak (buku saku, Poster, dan lain-lain.), namun pendekatan belum sistematis. Misalnya, tidak ditemukan adanya <i>roadmap</i> rencana internalisasi, target-target, <i>action plan</i> , keterlibatan pimpinan senior dalam hal internalisasi tata nilai perusahaan maupun internalisasi visi perusahaan, tidak ditemukan pula adanya <i>systematic monitoring</i> terhadap eksekusi dari program ini. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan/ketidak tercapaian visi perusahaan, dan menghambat terwujudnya tata nilai kepemimpinan yang visioner.
3	Walaupun sudah ada sistem penyusunan RJPP untuk mengembangkan strategi, dengan mengacu pada SOP Nomor SOP-STR-PERS-02, namun sistem tersebut belum sistematis. Misalnya, tidak ada langkah-langkah analisis yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana strategis, tidak ada panduan bagaimana formulasi strategi untuk menjawab berbagai tantangan strategis PPA, tidak ada proses penentuan sistem kerja dan kompetensi inti, dan lain-lain. Hal ini dapat mengakibatkan RJPP yang dihasilkan tidak mampu menjawab dinamika lingkungan strategis serta tidak mendukung tata nilai Fokus pada Kesuksesan.
4	Walaupun PPA telah memiliki kebijakan penanganan pelanggan (sesuai SK-3/PPA/0118) yang salah satu substansinya adalah mengelola keluhan pelanggan, namun, kebijakan tersebut belum dilengkapi dengan SOP ataupun petunjuk teknis, sehingga pengelolaan pelanggan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam melayani pelanggan serta menghambat terwujudnya tata nilai Keunggulan yang Fokus pada Pelanggan.
5	PPA tidak memiliki metode sistematis untuk menggunakan pengetahuan dan sumber daya perusahaan guna melekatkan pembelajaran organisasi ke dalam operasional perusahaan. Tidak ditemukan adanya Kebijakan, SOP, ataupun Petunjuk Teknis mengenai mekanisme penggunaan pengetahuan dan sumber daya perusahaan guna melekatkan pembelajaran organisasi ke dalam operasional perusahaan. Sehingga PPA akan mengalami kesulitan dalam mempercepat <i>transfer of knowledge</i> dari karyawan senior kepada karyawan juniornya ataupun dari karyawan dengan keahlian spesifik kepada karyawan lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung transformasi PPA menjadi perusahaan Investasi.
6	Walaupun telah ditetapkan Diagram Suksesi pada SOP Pengembangan Karier (No. SK-35/PPA/No314), namun <i>Senior Leaders</i> PPA belum memiliki pendekatan sistematis untuk berpartisipasi dalam perencanaan suksesi dan pengembangan para pemimpin organisasi ke depan. Misalnya, tidak didefinisikan peran <i>senior leaders</i> PPA dalam pengembangan para pemimpin PPA ke depan. Tidak ditemukan petunjuk teknis yang secara spesifik memandu proses perencanaan suksesi/kaderisasi pimpinan. Sehingga kemungkinan PPA akan kesulitan dalam menghasilkan pimpinan-pimpinan yang unggul untuk menjawab tantangan strategis perusahaan dan mewujudkan visi perusahaan, serta menghambat terwujudnya tata nilai Kepemimpinan yang Visioner.
7	Walaupun PPA telah melaksanakan mekanisme mengejar peluang-peluang untuk inovasi melalui cara antara lain; (1) Pembentukan Tim <i>Product Development</i> . (2) Penggunaan hasil riset pasar/ <i>industry</i> untuk mengidentifikasi peluang atau mengevaluasi project. (3) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung bisnis PPA. Namun belum efektif dapat mengukur dan mengumpulkan peluang dan inovasi yang sudah ada hal ini terlihat dari Grafik 7.1.b.(1).1 Inovasi Produk (Pengembangan Produk/Jasa) yang tidak ada media pengumpulan datanya serta menunjukkan <i>trend</i> yang <i>Unfavourable</i> . Hal ini dapat mengakibatkan PPA secara organisasi kurang lincah dalam menghadapi perubahan eksternal dalam mencapai visi perusahaan, serta menghambat terwujudnya tata nilai manajemen inovasi.

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai tindak lanjut dan komitmen tinggi atas peningkatan kualitas praktik GCG pada seluruh level operasional dan entitas anak usaha, berupaya melakukan peningkatan kualitas implementasi GCG, di antaranya dengan menindaklanjuti hasil *assessment* ditambah dengan masukan dari seluruh *stakeholder*. Ada pun aspek terkait program-program peningkatan kualitas implementasi GCG meliputi:

1. Memenuhi dan mentaati seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan komitmen seluruh Insan PPA terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan.

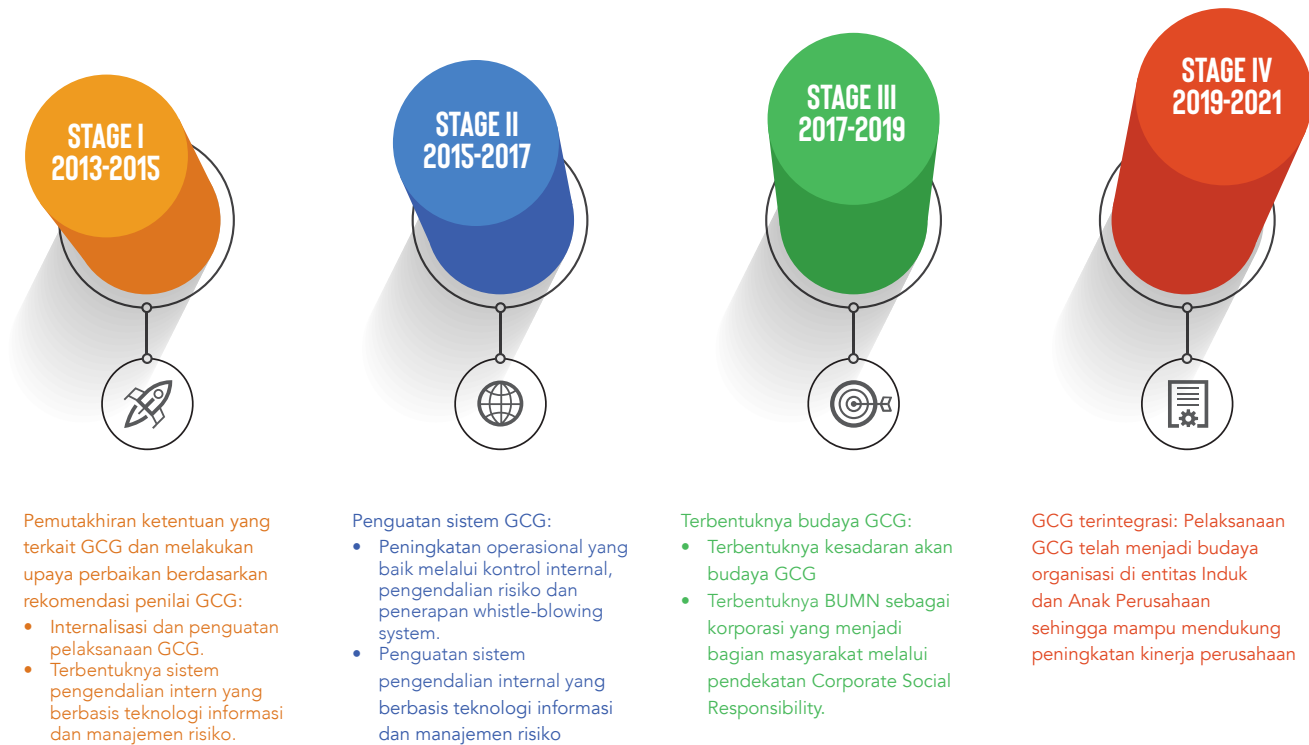
3. Berupaya memenuhi hak Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik modal.
4. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
5. Pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi.
6. Upaya Perseroan dalam pengungkapan informasi dan transparansi.
7. Pelaksanaan penilaian/evaluasi setiap kegiatan GCG berupa penyelenggaraan *Assessment* atau berpartisipasi sebagai *volunteer* dalam penilaian GCG oleh beberapa lembaga independen.
8. Menyusun *Roadmap* GCG.
9. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan GCG Perseroan kepada seluruh Insan PPA.



ROADMAP GCG

Sebagai panduan dari penerapan GCG, Perusahaan mengacu pada GCG Roadmap yang disusun untuk periode 2021-2028. Tahapan Roadmap GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

Roadmap GCG PT PPA



SOSIALISASI DAN INTERNALISASI PRINSIP-PRINSIP GCG DI PPA

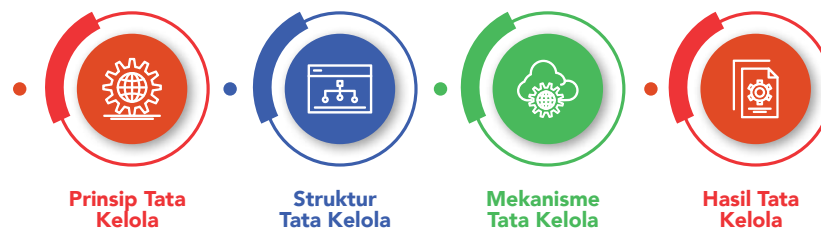
Perusahaan melakukan sosialisasi GCG dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi GCG di Perusahaan. Materi yang disampaikan antara lain, *softstructure* dan *infrastructure* GCG, *whistleblowing system*, anti gratifikasi, dan anti penyuapan.

Sosialisasi GCG menggunakan metode sosialisasi tatap muka dan menggunakan saluran komunikasi internal seperti *intranet*, *website* dan media sosial. Pada tahun 2020, sosialisasi GCG dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021 oleh konsultan PT Adikarya Gemilang Solusindo kepada seluruh Kepala Divisi dan Kepala Grup Perseroan.



STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan sehari-hari. Penerapan GCG di lingkup Perusahaan terdiri dari Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Mekanisme atau Proses Tata Kelola atau *Governance Process*, yang di mana kedua aspek ini saling berkesinambungan untuk mewujudkan komitmen sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*.



Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Mekanisme Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

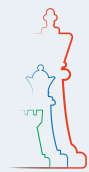
Implementasi GCG Perusahaan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara Organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan

Direksi. Dalam perkembangannya, ketiga organ tersebut membutuhkan dukungan dari infrastruktur tambahan tata kelola Perusahaan baik berupa sistem/mechanisme (*soft structure*) maupun unit kerja (*hard structure*). Pelaksanaan GCG Perusahaan tentunya mengacu pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, yang anggotanya



seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite-Komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan adalah:

1. Komite Audit

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya, seperti Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara, dan Laporan Tahunan Perusahaan.

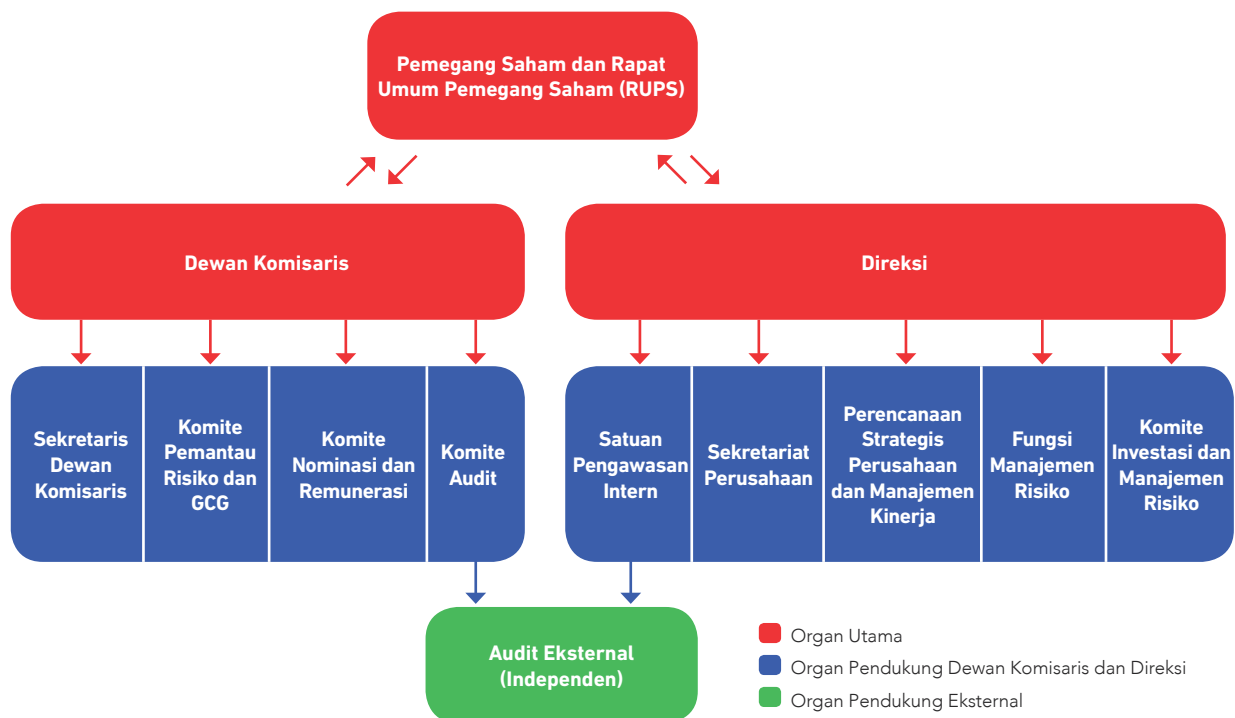
2. Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap implementasi GCG dan manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berkaitan dalam transparansi proses nominasi dan remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Struktur Tata Kelola PPA



MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme Tata Kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur pemerintahan, melainkan dibutuhkan adanya peraturan yang jelas dalam bentuk mekanisme. Mekanisme tata kelola dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.



Mekanisme Tata Kelola PPA



Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku



Anggaran Dasar Perusahaan



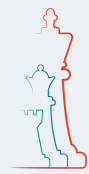
Kebijakan, Aturan dan Prosedur Tetap

Perusahaan telah menyusun dan melakukan kajian secara periodik terhadap Kebijakan, Aturan dan Prosedur Tetap, meliputi antara lain:

No.	Nomor Surat Keputusan	Perihal
1.	SK-9/PPA/0120	Piagam Audit Internal
2.	SK-14/PPA/0320	Kebijakan Manajemen Risiko
3.	SK-23/PPA/0420	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
4.	SK-28A/PPA/0520	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. SK-2/PPA/0119 tentang Kebijakan Investasi
5.	SK-33/PPA/0520	Kebijakan Anti Penyuapan
6.	SK-46/PPA/0620	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0515 tentang Kebijakan Pengadministrasian
7.	SK-48/PPA/0620	Perubahan atas Keputusan Direksi No. SK-23/PPA/0420 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
8.	SK-49/PPA/0620	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>)
9.	SK-50/PPA/0720	Kebijakan Penjualan Aset Properti
10.	SK-53/PPA/0720	Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
11.	SK-54/PPA/0720	Perubahan Kedua Atas Kebijakan Direksi No. SK-17/PPA/0315 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN
12.	SK-58/PPA/0720	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
13.	SK-63/PPA/0820	Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik
14.	SK-72/PPA/1020	Perubahan Keputusan Direksi No. SK-12/PPA/-511 tentang Pemberian Biaya Transportasi, Uang Rapat, Honor Kerja Sama, Honor Narasumber dan Biaya Lain Terkait Kegiatan Perusahaan yang Melibatkan Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara
15.	SK-81/PPA/1020	Kebijakan Penanganan BUMN Titip Kelola
16.	SK-98/PPA/1120	Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0515 tentang Kebijakan Pengadministrasian
17.	SK-99/PPA/1120	Perubahan atas Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0716 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana

Upaya Sosialisasi Keberadaan Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Kepada Pemangku Kepentingan

Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi mengenai tata kelola secara berkesinambungan dengan melakukan pemutakhiran aturan terkait tata kelola antara lain berupa Keputusan Direksi pada *website* Perusahaan.



PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

Sebagai salah satu organ utama Perusahaan, RUPS diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham Publik. Pemegang Saham Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham Pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan.

Per 31 Desember 2020, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki seluruh saham Perusahaan atau sebesar 100,00%. Negara Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

Pemegang Saham PPA (Hingga Entitas Pemilik Akhir)
per 31 Desember 2020

**Negara Republik
Indonesia**

100%

PPA

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hak Pemegang Saham

Dalam paradigma penerapan GCG, kapasitas Pemegang Saham tidak hanya sebatas pada aspek permodalan semata, Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibekali beberapa hak sebagai wujud timbal-balik kepentingan. Ruang lingkup hak Pemegang Saham terdiri atas penerimaan manfaat permodalan, pengawasan atas jalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh Direksi serta hak-hak lainnya.

Ketentuan pemberian hak-hak utama Pemegang Saham Perusahaan dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak-hak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.



Akses informasi kepada Pemegang Saham

Perusahaan memberikan jaminan terhadap akses informasi yang setara kepada seluruh Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perusahaan;
3. Laporan Manajemen Perusahaan yang disampaikan setiap triwulan; dan
4. Publikasi laporan kegiatan Perusahaan melalui media massa dan *website* Perusahaan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepemilikan saham Perusahaan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kebijakan hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Tata Aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

JENIS RUPS

RUPS Tahunan	RUPS Lainnya
Diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.	Diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, Laporan Tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukkan Akuntan Publik serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan.

Sedangkan RUPS Lainnya dapat berbentuk:

1. RUPS Luar Biasa;
2. RUPS Sirkuler.

Baik RUPS Tahunan dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur GCG sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perusahaan.

Wewenang RUPS

Wewenang RUPS yang dimaksud, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan;
2. Menetapkan pembatasan kewenangan Direksi berdasarkan jumlah dan/atau jangka waktu atas kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. Berdasarkan usulan/permintaan Direksi, RUPS dapat menyetujui pengalihan lebih dari 50% kekayaan bersih Perusahaan sebagai jaminan hutang;
4. Mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar;
5. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
6. Menyetujui laporan tahunan dan penggunaan laba bersih Perusahaan dalam RUPST;
7. Menyetujui RKAP serta RJPP; dan
8. Menetapkan Auditor Eksternal dengan mempertimbangkan pendapat Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Kewenangan tersebut harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS, Pemberitahuan RUPS dan Catatan yang Termuat dalam Surat Pemanggilan RUPST/RUPSLB

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan RUPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
4. Direksi menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS;



5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan: a) seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah; atau b) Dewan Komisaris;
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;
7. Surat tercatat yang dimaksud disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
8. Alasan permintaan penyelenggaraan RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada: a) Direksi tidak melaksanakan RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau c) dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan;
9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: a) permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
12. RUPS yang diselenggarakan Direksi hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Direksi dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Dewan Komisaris;
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu masing-masing 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan;
15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
18. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta; dan

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan isi dalam media penyampaian yang dimaksud, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Informasi Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2020 dan Tindak Lanjut Hasil RUPS oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020

Di sepanjang tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan 5 (lima) kali RUPS, yaitu:

1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Januari 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020;
2. Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 27 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen PT PPA;
3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 29 Juni 2020 tentang Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
4. Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT PPA;
5. Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT PPA.

Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS.

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Januari 2020
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. 11 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 — Jakarta 10110
Kehadiran	: Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: Aditya Dhanwantara (Plt. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SKU-3/Wk.2.MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020) Dewan Komisaris: Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Didyk Choirael (Komisaris) Tirta Hidayat (Komisaris) Direksi: Iman Rachman (Direktur Utama) Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)



Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Agenda Mata Acara 1:

Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2020.

Keputusan Mata Acara 1:

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Keuangan:

Perhitungan Laba (Rugi)

Laba Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun Rp531.988 Juta dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Usaha	: Rp10.657.914 Juta
Beban Usaha	: Rp(9.468.742) Juta
Laba/(Rugi) Usaha	: Rp1.189.172 Juta
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp(556.302) Juta
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp632.870 Juta
Pajak-Pajak	: Rp(100.882) Juta
Laba/(Rugi) Bersih	: Rp531.988 Juta

Proyeksi Neraca

Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2020 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp20.188.721 Juta dengan rincian sebagai berikut:

Aset:

Aset Lancar	: Rp10.343.533 Juta
Aset Tidak Lancar	: Rp9.845.188 Juta
Total Aset	: Rp20.188.721 Juta

Liabilitas:

Liabilitas Jangka Pendek	: Rp4.967.622 Juta
Liabilitas Jangka Panjang	: Rp9.709.661 Juta
Total Liabilitas	: Rp14.677.283 Juta

Ekuitas

Ekuitas	: Rp5.511.438 Juta
Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp20.188.721 Juta

Arus Kas

Arus Kas Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2020 dianggarkan sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	: Rp(1.154.175) Juta
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	: Rp(3.376.906) Juta
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	: Rp4.673.869 Juta
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara	: Rp142.788 Juta

Investasi

Anggaran Investasi PT PPA (Persero) Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.108.490 juta, terdiri dari:

Aset Tetap	: Rp636.990 Juta
Penyertaan	: Rp416.500 Juta
Properti Investasi	: Rp55.000 Juta

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Perusahaan telah melakukan revisi RKAP tahun 2020 sesuai surat Wakil Menteri BUMN II Nomor S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 yang menginstruksikan seluruh BUMN harus melakukan penyesuaian dalam RKAP Tahun 2020 dikarenakan pengaruh pandemi COVID-19.



Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Agenda Mata Acara 2:

Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2020.

Keputusan Mata Acara 2 :

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2020 sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan No. RIS61/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 27 November 2019 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Dana Program Kemitraan (PK)

No	Keterangan	Rp Juta
Data Tersedia		9.209
Saldo Dana Awal Tahun		705
Pendapatan Jasa Administrasi		45
Pengembalian Pokok Pinjaman		8.400
Pendapatan Bunga Jasa Giro		59
Penyaluran Dana		9.209
Pinjaman Program Kemitraan		9.000
Dana Pembinaan Kemitraan		209
Saldo Akhir		0

Dana Program Bina Lingkungan (BL)

No	Keterangan	Rp Juta
Data Tersedia		3.000
Alokasi Dana Perusahaan		3.000
Penyaluran Dana		3.000
Penyaluran Dana BL		3.000
Saldo Akhir		0

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Perusahaan telah melakukan revisi RKAP tahun 2020 sesuai surat Wakil Menteri BUMN II Nomor S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 yang menginstruksikan seluruh BUMN harus melakukan penyesuaian dalam RKAP Tahun 2020 dikarenakan pengaruh pandemi COVID-19.

Agenda Mata Acara 3:

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020.

Keputusan Mata Acara 3:

Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020.

No	Indikator	Bobot	Target
	Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR	15	100%
	Number of New Services/Product	15	5
	Jumlah Perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas	10	2 Perusahaan
	Realisasi Program Pelatihan Karyawan	5	100%

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Target pada tabel tersebut di atas telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Agenda Mata Acara 4:

Persetujuan dan pengesahan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

Keputusan Mata Acara 4:

Menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Target pada tabel tersebut di atas telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

**Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat****Agenda Mata Acara 5:**

Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020.

Keputusan Mata Acara 5:

Menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020 dengan Pemegang Saham PT PPA sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Target pada tabel tersebut di atas telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Agenda Mata Acara 6:

Persetujuan penerbitan surat utang obligasi dengan nilai Rp1 Triliun.

Keputusan Mata Acara 6:

Menyetujui penerbitan obligasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk mendukung kegiatan investasi dan pembiayaan dengan total maksimal sebesar Rp1 triliun yang akan diterbitkan pada Semester I tahun 2020 dengan rincian:

- Seri A maksimal sebesar Rp100 miliar (seratus miliar rupiah) dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan;
- Seri B maksimal sebesar Rp600 miliar (enam ratus miliar rupiah) dengan tenor 5 tahun sejak tanggal penerbitan;
- Seri C maksimal sebesar Rp300 miliar (tiga ratus miliar rupiah) dengan tenor 7 tahun sejak tanggal penerbitan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Obligasi PPA telah terbit 1 September 2020 dengan total perolehan Rp642 miliar.

Arahan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RKAP

Selain menghasilkan keputusan RUPS, RUPS Tahunan RKAP juga menghasilkan arahan Pemegang Saham. Penjelasan arahan Pemegang Saham dan tindak lanjut oleh Manajemen hingga 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

No.	Arahan RUPS	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020
1	Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris, KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2020 serta sebagai sarana pengawasan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Target-target RKAP dan KPI Korporat agar dilakukan <i>cascading & deployment</i> ke pejabat/karyawan level bawah, seluruh wilayah, dan unit kerja termasuk anak perusahaan.	-
2	Direksi dan Dewan Komisaris agar bekerja dengan sungguh-sungguh demi memajukan Perusahaan dan mengupayakan (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target RKAP dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaksanakan RKAP dengan efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap baik hati, beritikad baik, kewajaran serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. Direksi agar memiliki rencana antisipasi (<i>contingency plan</i>) sehingga dalam hal terjadi perubahan asumsi dan kondisi bisnis, RKAP target tetap dapat tercapai.	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh demi memajukan Perusahaan dan mengupayakan yang terbaik (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target RKAP dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Berkenaan dengan adanya rencana penerbitan surat utang berupa obligasi, Direksi dan Dewan Komisaris diminta: - Tetap mempertimbangkan aspek <i>timing</i>, <i>sizing</i>, dan <i>pricing</i> serta skema dan proses yang terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (<i>cost of fund</i>) agar tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. - Mengupayakan besaran tingkat bunga yang efisien serta memastikan efektivitas penggunaan dana hasil penerbitan surat utang berupa obligasi sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Perseroan. - Melaksanakan penerbitan surat utang obligasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Pemegang Saham.	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan ketiga arahan Pemegang Saham dimaksud pada penerbitan obligasi.
4	Dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan perusahaan, Direksi agar terus meningkatkan kualitas SDM yang profesional, serta membenah sistem dan prosedur operasional. Direksi diminta menerapkan mekanisme <i>reward & punishment</i> secara objektif dan sistem remunerasi berbasis kinerja yang dapat memacu produktivitas karyawan, serta kebijakan <i>pension</i> yang tepat dan tidak memberatkan perusahaan.	Direksi senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang profesional, serta membenah sistem dan prosedur operasional.
5	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan terhadap perbaikan proses dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan pengembangan usaha anak perusahaan secara berkala. Dalam hal kinerja anak perusahaan tidak sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan induk, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk menyusun strategi baru pengembangan bisnis anak perusahaan maupun pelaksanaan <i>exit</i> strategi terhadap kepemilikan pada anak perusahaan tersebut.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris berupaya mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan/ perusahaan afiliasi terhadap perbaikan proses bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan <i>monitoring</i> pengembangan usaha anak perusahaan/ perusahaan afiliasi secara berkala. Secara berkala Direksi melakukan pertemuan dengan pengurus anak perusahaan guna mengetahui perkembangan usaha anak perusahaan.



No.	Arahan RUPS	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020
6	Direksi agar mengupayakan dan mempersiapkan aset <i>recovery</i> perusahaan untuk menjaga kapasitas perusahaan, apabila proses restrukturisasi pada PT Nindya Karya telah berakhir.	Guna mengantisipasi berakhirnya proses restrukturisasi PT Nindya Karya, Direksi selalu mengupayakan dan mempersiapkan aset <i>recovery</i> perusahaan untuk menjaga kapasitas perusahaan.
7	Direksi agar arahan umum instruksi Surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.	Perusahaan Direksi Kelembagaan Surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Saham/Pemilik Modal untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.
8	Direksi diminta untuk mengendalikan nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) baik di induk maupun anak perusahaan pada angka di bawah 5% dengan melakukan upaya pengembangan bisnis portofolio dan perbaikan sistem seleksi debitur sehingga likuiditas perusahaan secara konsolidasi maupun entitas dapat terjaga.	Direksi senantiasa berupaya untuk mengendalikan nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) baik di induk maupun anak perusahaan pada angka di bawah 5%.
9	Direksi diminta untuk memperhatikan pencatatan transaksi keuangan perusahaan harus sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku dan menerapkan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 pada Tahun Buku 2020.	Direksi senantiasa memperhatikan pencatatan transaksi keuangan perusahaan harus sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku dan menerapkan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 pada Tahun Buku 2020.
10	Direksi diminta melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana tambahan PNM secara berkala dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08-MBU-06-2015 tanggal 3 Juni 2015.	Direksi telah melaporkan realisasi penggunaan dana tambahan PMN Periode I, II, dan III dan III tahun 2020 melalui surat kepada Menteri BUMN dan telah di- <i>upload</i> secara elektronik pada portal Silaba.
11	Direksi organisasi dana Restrukturisasi dan Revitalisasi (R/R) dengan memperhatikan prinsip GCG dan melakukan optimalisasi penggunaannya sesuai dengan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2009 jo. PER-05/MBU/2012 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT PPA (Persero). Pengelolaan dan optimalisasi dana R/R tersebut agar dilaporkan secara berkala kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah rekomendasi Dewan Komisaris.	Direksi senantiasa membantu dana Restrukturisasi dan Revitalisasi (R/R) dengan memperhatikan prinsip GCG dan melakukan optimalisasi pemanfaatannya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2009 jo. PER-05/MBU/2012.
12	Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan RKAP Tahun 2020, yang meliputi laporan, laporan semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan penyampaian laporan berkala secara elektronik melalui portal Silaba.	Perseroan senantiasa menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu secara elektronik. Laporan berkala yang disampaikan pada tahun 2020 adalah penyampaian Laporan Manajemen I, II, dan III Tahun 2020 melalui surat kepada Menteri BUMN dan telah di- <i>upload</i> secara elektronik pada portal Silaba.
13	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan (<i>trusted entities</i>) dengan terus meningkatkan kualitas SDM, bisnis proses, dan budaya perusahaan.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris senantiasa menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan (<i>trusted entities</i>) dengan terus meningkatkan kualitas SDM, bisnis proses, dan budaya Perusahaan.
14	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris mengawasi untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi anak terhadap perbaikan bisnis proses dan peningkatan kinerja Perusahaan dalam evaluasi kinerja dan pengembangan usaha anak perusahaan secara berkala. Dalam hal kinerja anak perusahaan tidak sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan induk, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk menyusun strategi baru pengembangan bisnis anak perusahaan maupun pelaksanaan <i>exit strategy</i> terhadap kepemilikan pada anak perusahaan tersebut.	Direksi pengawasan Dewan Komisaris berupaya mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan/perusahaan afiliasi terhadap perbaikan proses bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan <i>monitoring</i> pengembangan usaha anak perusahaan/perusahaan afiliasi secara berkala. Secara berkala Direksi melakukan pertemuan dengan pengurus anak perusahaan guna mengetahui perkembangan usaha anak perusahaan.
15	Direksi bersama Dewan Komisaris agar menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2020.	Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AAJ (RSM Indonesia) telah disampaikan secara elektronik pada portal Silaba sesuai Bukti Penerimaan Pelaporan Elektronik No. SPE-0803/3/2020 tanggal 3 Maret 2020.
16	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk menyesuaikan strategi perusahaan dengan RPJMN Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris selalu berusaha menyesuaikan strategi perusahaan dengan RPJMN Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.
17	Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi agar memperhatikan catatan dalam Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No. RIS-61/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 27 November 2019.	Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi selalu memperhatikan catatan dalam Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No. RIS-61/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 27 November 2019.
18	Tanggapan dan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat No. S-63/PPA/KOM/1119 tanggal 6 November 2019 merupakan satu kesatuan dengan Keputusan RUPS ini.	-

**RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019**

Hari/Tanggal	: Senin, 29 Juni 2020
Waktu	: Pk. 16.00 WIB s.d Selesai
Media Meeting	: Via Zoom Meeting Meeting ID : 845 7910 0016 Password : 735173
Kehadiran	: Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: Muhammad Khoerur Roziqin (Asisten Deputi Bidang Perbankan dan Pembiayaan Selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SKU-54/ MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020) Dewan Komisaris: • Edy Putra Irawady (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) • Didik Choeroel (Komisaris) • Tirta Hidayat (Komisaris Independen) • Himawan Hariyoga Djojokusumo (Komisaris) Direksi: • R. Muhammad Irwan (Plt. Direktur Utama; Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) • Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) • Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Arahan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Selain menghasilkan keputusan RUPS, RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 juga menghasilkan arahan Pemegang Saham. Penjelasan arahan Pemegang Saham dan tindak lanjut oleh Manajemen hingga 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

No.	Arahan RUPS	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020
1	Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan, Direksi beserta jajaran diminta berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara konsisten.	Direksi beserta jajaran senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara konsisten.
2	Semua temuan, catatan, dan saran/rekomendasi dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal (KAP dan BPK-RI) pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, agar menjadi prioritas penyelesaian oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2020.	Direksi dan Dewan Komisaris memprioritaskan semua temuan, catatan, dan saran/rekomendasi dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal (KAP dan BPK-RI) pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.
3	Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, Direksi dan Dewan Komisaris diminta agar dapat mengimplementasikan <i>business continuity plan</i> yang telah disusun untuk memastikan keberlangsungan layanan dalam situasi <i>new normal</i> serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan.	Direksi dan Dewan Komisaris berusaha untuk mengimplementasikan <i>business continuity plan</i> yang telah disusun untuk memastikan keberlangsungan layanan dalam situasi <i>new normal</i> serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan.
4	Direksi agar mengupayakan pencapaian efisiensi biaya pada semua aspek operasional perusahaan, melakukan pemangkasan dan penyederhanaan proses bisnis, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.	Direksi senantiasa mengupayakan pencapaian efisiensi biaya pada semua aspek operasional perusahaan, melakukan pemangkasan dan penyederhanaan proses bisnis, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
5	Dalam upaya mencukupi kebutuhan pendanaan, agar mempertimbangkan skema terbaik yang dapat memberikan efisiensi beban bunga (<i>cost of fund</i>), serta tidak memberatkan kinerja keuangan ke depan.	Dalam upaya mencukupi kebutuhan pendanaan, Direksi selalu mempertimbangkan skema terbaik yang dapat memberikan efisiensi beban bunga (<i>cost of fund</i>), serta tidak memberatkan kinerja keuangan ke depan.



No.	Arahan RUPS	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020
6	Direksi agar melakukan peninjauan sumber pendapatan usaha baru yang dapat meningkatkan profitabilitas, memperbaiki <i>cash flow</i> dan melakukan pemangkasan biaya yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas perusahaan.	Direksi berupaya untuk melakukan peninjauan sumber pendapatan usaha baru yang dapat meningkatkan profitabilitas, memperbaiki <i>cash flow</i> dan melakukan pemangkasan biaya yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas perusahaan.
7	Dalam upaya penyelesaian permasalahan piutang usaha dan <i>asset recovery</i> , Direksi perlu menyusun langkah strategi untuk mengoptimalkan <i>collection</i> dan keuntungan yang dapat diterima oleh perusahaan.	Dalam upaya penyelesaian permasalahan piutang usaha dan <i>asset recovery</i> , Direksi akan menyusun langkah strategi untuk mengoptimalkan <i>collection</i> dan keuntungan yang dapat diterima oleh perusahaan.
8	Menyusun arah pengembangan, penyelarasan visi misi dan mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan anak sehingga dapat memberikan kontribusi dan menunjang kinerja perusahaan secara konsolidasi.	Direksi secara terus-menerus menyusun arah pengembangan penyelarasan visi misi dan mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan anak sehingga dapat memberikan kontribusi dan menunjang kinerja perusahaan secara konsolidasi.
9	Dalam proses penyaluran pembiayaan dan akuisisi aset investasi baru baik di induk maupun anak perusahaan, agar proses <i>due diligence</i> dan penyusunan kajian <i>feasibility study</i> disertai dengan perhitungan analisa <i>profitability</i> dan manajemen risiko yang memadai.	Dalam proses penyaluran pembiayaan dan akuisisi aset investasi baru baik di induk maupun anak perusahaan, Direksi senantiasa melaksanakan proses <i>due diligence</i> dan penyusunan kajian <i>feasibility study</i> disertai dengan perhitungan analisa <i>profitability</i> dan manajemen risiko yang memadai.
10	Anak perusahaan harus didorong agar mampu berkinerja semakin meningkat dan mencapai target RKAP serta berkontribusi optimal bagi perusahaan induk. Untuk itu kepada Direksi diminta agar memberikan dukungan asistensi dan melakukan pengawasan secara intensif kepada manajemen anak perusahaan.	Anak perusahaan harus didorong agar mampu berkinerja semakin meningkat dan mencapai target RKAP serta berkontribusi optimal bagi perusahaan induk. Untuk itu kepada Direksi secara terus-menerus memberikan dukungan asistensi dan melakukan pengawasan secara intensif kepada manajemen anak perusahaan.
11	Melakukan evaluasi dan memastikan program sinergi BUMN dapat berjalan sesuai target dengan menjaga peran masing-masing BUMN sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, serta memastikan manfaat sinergi tersebut dapat dirasakan bagi para <i>stakeholder</i> .	Direksi selalu melakukan evaluasi dan memastikan program sinergi BUMN dapat berjalan sesuai target dengan menjaga peran masing-masing BUMN sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, serta memastikan manfaat sinergi tersebut dapat dirasakan bagi para <i>stakeholder</i> .
12	Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi agar melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.	Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi selalu berupaya melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
13	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh KAP, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang telah ditelaah Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan arahan Dewan Komisaris dalam surat Tanggapan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2019 No. S-16/PPA/KOM/0320 tanggal 26 Maret 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.	-





DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan GCG secara efektif dan berkelanjutan.

DASAR PERATURAN

Perusahaan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 6 yang mewajibkan Dewan Komisaris untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan;
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 108 hingga Pasal 121 yang mengatur seluruh aspek mengenai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas;
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

BOARD MANUAL: PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Selain diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dipertegas dan diperinci dalam *Board Manual* yang mengatur praktik GCG khusus untuk Dewan Komisaris. *Board Manual* tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala. Landasan hukum yang menjadi acuan *Board Manual* sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Pedoman GCG Perusahaan.

Board Manual mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum jabatan Anggota Dewan Komisaris;
 - b. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris;
 - c. Kewajiban Dewan Komisaris;

- d. Tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - e. Pembagian Tugas dan wewenang Dewan Komisaris;
 - f. Prinsip-Prinsip Pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
 - g. Etika jabatan Dewan Komisaris;
 - h. Rapat Dewan Komisaris;
 - i. Organ Pendukung Dewan Komisaris.
2. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi, meliputi:
 - a. Pertemuan Formal;
 - b. Pertemuan Informal;
 - c. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Program Pengenalan Perusahaan;
 - e. Pelaporan Berkala.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

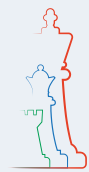
Dewan Komisaris Perusahaan diangkat berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali. Calon Anggota Dewan Komisaris harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan Pemegang Saham dalam RUPS.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Di tahun 2020 terdapat pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris dibandingkan akhir tahun 2019, dengan keputusan memberhentikan Edy Putra Irawady, Didik Choirel, Himawan Hariyoga Djojokusumo, dan Tirta Hidayat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-326/MBU/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama & Komisaris Independen serta 1 (satu) orang Komisaris. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2002 dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020.



Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris tahun 2020

Periode 1 Januari – 27 April 2020	Periode 27 April – 9 Oktober 2020	Periode 9 Oktober – 31 Desember 2020	Keterangan
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama)	Edy Putra Irawady (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)		- Pada 27 April 2020, Pemegang Saham menunjuk Edy Putra Irawady yang sebelumnya telah menjadi Komisaris Utama untuk merangkap Komisaris Independen. - Edy Putra Irawady tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020.
Didyk Choirel (Komisaris)	Didyk Choirel (Komisaris)		Didyk Choirel tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020.
Tirta Hidayat (Komisaris Independen)	Tirta Hidayat (Komisaris Independen)		Tirta Hidayat tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020.
	Himawan Hariyoga Djojokusumo (Komisaris)		- Pada 27 April 2020, Pemegang Saham mengangkat Himawan Hariyoga Djojokusumo untuk menjabat Komisaris. - Himawan Hariyoga Djojokusumo tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020.
		Krisna Wijaya (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)	Pada 9 Oktober 2020, Pemegang Saham mengangkat Krisna Wijaya untuk menjabat Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
		Marwanto Harjowirjono (Komisaris)	Pada 9 Oktober 2020, Pemegang Saham mengangkat Marwanto Harjowirjono untuk menjabat Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Krisna Wijaya	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025	Ke-1
Marwanto Harjowirjono	Komisaris	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025	Ke-1

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi Dewan Komisaris Perseroan. Berikut Tabel Status Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan komisaris yang menjabat pada 2020:

Nama	Status	Pelaksana Fit & Proper Test
Krisna Wijaya	Lulus tahun 2020	Kementrian BUMN
Marwanto Harjowirjono	Lulus tahun 2020	Kementrian BUMN

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Pemegang Saham.

KETENTUAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan melalui proses yang transparan.

1. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;

2. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

KETENTUAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Adapun alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri.



Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana maksud diatas berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015, bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri selaku RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri selaku RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:

1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang dilandasi oleh suatu mekanisme hubungan kerja yang baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu;

5. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
6. Hubungan kerja antara organ-organ di bawah Dewan Komisaris dengan organ-organ di bawah Direksi diatur berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan meningkatkan kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-masing sehingga dapat tercapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, yang tercermin pada:
 - a. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko;
 - b. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi Pemegang Saham;
 - c. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;
 - d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi Perusahaan;
 - e. Terpenuhinya pelaksanaan GCG di Perusahaan secara konsisten.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya, dan semua fungsi ini dikoordinasikan oleh Komisaris Utama. Ketentuan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertanggungjawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



Adapun tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan;
2. Menyusun Program kerja Tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
3. Membentuk Komite Audit;
4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi;
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai RJPP dan RKAP;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan Arahan RUPS dalam Pengesahan RKAP serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan;
7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
8. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
9. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
12. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan *Board Manual*, Dewan Komisaris memiliki wewenang yang meliputi:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengelolaan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

PEMBAGIAN TUGAS ANTAR DEWAN KOMISARIS

Agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembagian tugas anggota Dewan berdasarkan Berita Acara Dewan Komisaris No. BA-02/PPA/KOM/1020 tanggal 13 Oktober 2020, tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris PPA adalah sebagai berikut:

Nama	Pembagian Tugas
Krisna Wijaya (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)	Koordinator anggota Dewan Komisaris, serta membidangi terkait organisasi dan <i>Corporate Strategic Planning and Monitoring</i> , Dukungan Kerja, unit <i>Legal & Corp. Secretary</i>
Marwanto Harjowirjono (Komisaris)	Koordinasi terkait fungsi Keuangan dan Investasi, serta unit <i>Internal Auditor/SPI</i> , Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen, serta unit <i>Risk Management</i> .



Di samping itu, berdasarkan surat keputusan yang sama, di antara anggota Dewan Komisaris dilakukan pembagian tugas pemantauan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris, sebagai berikut:

No	KPI Dewan Komisaris	Target	Person In Charge
1.	Aspek Pengawasan dan Pengarahan		
	Review/analisis kinerja bulanan perusahaan	12x	Krisna Wijaya
	Pemberian nasihat/saran kepada Direksi	12x	Krisna Wijaya
	Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal	6x	Krisna Wijaya
	Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG	2x	Marwanto Harjowiryo
	Monitoring Aset kelolaan atau perusahaan yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi oleh Perusahaan melalui kunjungan berkala	3x	Krisna Wijaya
2.	Aspek Pelaporan		
	Penyusunan dan penyampaian Program kerja Tahunan	1x	Marwanto Harjowiryo
	Penyampaian laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS	7x	Marwanto Harjowiryo
	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan	4x	Marwanto Harjowiryo
3.	Aspek Dinamis dan Lain-Lain		
	Peningkatan kompetensi (masing-masing anggota Dewan Komisaris)	1x	Marwanto Harjowiryo
	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas RKAP/RJPP	1x	Krisna Wijaya

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI KOMISARIS BARU

Program pengenalan kepada pejabat baru dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan, sehingga Dewan Komisaris baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kondisi Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Dalam program pengenalan Dewan Komisaris ini pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan adalah Sekretaris Perusahaan.

Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, Kode Etik Perusahaan, SK Direksi tentang pedoman dan penerapan GCG, Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-Komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya.

Program pengenalan Dewan Komisaris telah dilaksanakan pada hari Senin, 12 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Bapak Krisna Wijaya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen serta Bapak Marwanto Harjowiryo, yang dalam program pengenalan dilakukan serah terima dokumen sebagai berikut:

1. *Company Profile*;
2. Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (*Annual Report*);
3. Laporan Auditor Independen: Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2019;
4. Laporan Auditor Independen: Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA Tahun Buku 2019;
5. Laporan Auditor Independen: Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun Buku 2019;
6. Laporan Auditor Independen: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2019;
7. Informasi Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA;
8. *Board Manual*;
9. Anggaran Dasar PT PPA dan perubahannya:
 - a. Berita Negara RI tanggal 17 Februari 2009 No 14, Tambahan Berita Negara 4837 Tahun 2009 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No 2 tanggal 10 September 2008);
 - b. Berita Negara RI tanggal 13 Juni 2014 No 47, Tambahan Berita Negara 18680 Tahun 2014 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No.62 tanggal 21 Februari 2014);
 - c. Berita Negara RI tanggal 8 Oktober 2019 No 081, Tambahan Berita Negara 035587 Tahun 2019 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No 27 tanggal 15 Februari 2016).



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Perusahaan berkomitmen untuk terus mendorong aktivitas pengembangan Dewan Komisaris melalui pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mencapai pertumbuhan Perseroan. Tentang kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Realisasinya

Dalam rangka memenuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris pada 2020, maka Dewan Komisaris telah menyusun RKA tahun 2020. RKA Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usulan RKAP Perusahaan Tahun 2020 yang disampaikan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham sesuai surat Dewan Komisaris No. S-60/KOM/10/2019 tanggal 18 Oktober 2020 perihal Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.

RKA Dewan Komisaris telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPS tertanggal 22 Januari 2020 RKA Dewan Komisaris memuat pembagian tugas Dewan Komisaris, prognosa program kerja Dewan Komisaris pada 2019, program kerja Dewan Komisaris pada 2020, anggaran biaya Dewan Komisaris serta program kerja Komite Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah melaporkan tugas pengawasan setiap bulan sebagaimana diatur dalam RUPS RKAP tahun 2020. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris sesuai dengan RKA Dewan Komisaris pada 2020 meliputi:

- Review/analisis kinerja bulanan perusahaan;
- Pemberian nasihat/saran kepada Direksi;
- Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal;
- Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG;
- Monitoring Aset kelolaan atau perusahaan yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi oleh PT PPA melalui kunjungan berkala.

2. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

Fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris juga dilakukan melalui kunjungan kerja. Berikut disampaikan kunjungan kerja yang dilakukan di tahun 2020.

No	Aktivitas	Tanggal
1.	Kunjungan Lapangan Dewan Komisaris ke PT NUH Balikpapan	Maret 2020
2.	Kunjungan Lapangan secara Virtual Dewan Komisaris ke PT Survai Udara Panas (Persero)	21 Desember 2020
3.	Kunjungan Lapangan secara Virtual Dewan Komisaris ke PT Widodo Makmur Unggas	28 Desember 2020

3. Keputusan, Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah memberikan keputusan yang bersifat pengawasan atas pengelolaan usaha Perusahaan.

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Nomor Keputusan	Perihal
1.	01/KEP.KOM/PPA/I/2020 tanggal 31 Januari 2020	Piagam Audit Internal (SK bersama Direksi)
2.	02/KEP.KOM/PPA/I/2020 tanggal 30 Januari 2020	Penetapan Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2020
3.	03/KEP.KOM/PPA/I/2020 tanggal 30 Januari 2020	Penetapan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2020
4.	03A/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 1 April 2020	Perpanjangan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA
5.	04/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 13 April 2020	Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit PT PPA
6.	05/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 13 April 2020	Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG PT PPA
7.	06/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020	Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPA



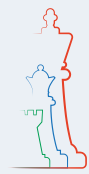
Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Nomor Keputusan	Perihal
8.	07/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020	Pengangkatan Anggota-anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPA
9.	08/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Audit PT PPA
10.	09/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG PT PPA
11.	10/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 29 April 2020	Pengangkatan Wakil Ketua dan Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPA
12.	11/KEP.KOM/PPA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020	Penunjukan Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA
13.	12/KEP.KOM/PPA/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
14.	13/KEP.KOM/PPA/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
15.	14/KEP.KOM/PPA/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
16.	15/KEP.KOM/PPA/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan <i>Good Corporate Governance</i> Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
17.	16/KEP.KOM/PPA/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
18.	17/KEP.KOM/PPA/11/2020 tanggal 13 Oktober 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
19.	18/KEP.KOM/PPA/11/2020 tanggal 13 Oktober 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset

Selain pengawasan dan arahan yang bersifat rutin, selama 2020 Dewan Komisaris juga telah memberikan persetujuan dan tanggapan yang perlu menjadi perhatian Direksi.

Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Tanggal	Perihal
1.	S-06/PPA/KOM/022020 tanggal 25 Februari 2020	Persetujuan Rencana Pemberian Apresiasi/ Insentif Kinerja Tahun 2019 dan Penyesuaian/ Kenaikan Upah Tahun 2020 bagi Karyawan PT PPA (Persero)
2.	S-07/PPA/KOM/022020 tanggal 26 Februari 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT PPA Kapital/“PT PPAK”
3.	S-12/PPA/KOM/032020 tanggal 05 Maret 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi Terkait Jadwal Penyelesaian Realisasi Penggunaan Dana PMN Tahun 2015 PT PPA (Persero)
4.	S-18/PPA/KOM/042020 tanggal 22 April 2020	Saran dan Masukan Dewan Komisaris dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja PT PPA
5.	S-38/PPA/KOM/092020 tanggal 21 September 2020	Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
6.	S-40/PPA/KOM/092020 tanggal 29 September 2020	Penetapan Honorarium (<i>Fee</i>) Jasa Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/ “PT PPA (Persero)” untuk Tahun Buku 2020
7.	S-41/PPA/KOM/102020 tanggal 14 Oktober 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT PPA (Persero) Menyesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2017
8.	S-43/PPA/KOM/102020 tanggal 27 Oktober 2020	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi PT PPA (Persero)
9.	S-47/PPA/KOM/112020 tanggal 30 November 2020	Hasil Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA Oktober 2020
10.	S-51/PPA/KOM/122020 tanggal 23 Desember 2020	Tanggapan atas Skema Penyelesaian Kewajiban PT Survei Udara Panas (Persero)
11.	S-54/PPA/KOM/122020 tanggal 28 Desember 2020	Arahan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Penyusunan Laporan Keuangan
12.	S-55/PPA/KOM/122020 tanggal 30 Desember 2020	Saran dan Masukan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)



PENILAIAN KINERJA ORGAN DAN KOMITE PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Komite Pendukung Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 tentang Indikator Metode Evaluasi Kinerja Tahunan Komite Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Dewan Komisaris melakukan penilaian realisasi atas kinerja Komite pendukung berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran rapat. Berikut hasil penilaian masing-masing Komite Pendukung.

1. Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris
Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat kesekretariatan dan Komite Dewan Komisaris, penugasan dan penyelesaian administrasi korespondensi, kekeluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris mencapai 98,20% dengan kriteria Sangat Baik.
2. Penilaian Kinerja Komite Audit
Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penugasan dan penyelesaian evaluasi audit/bisnis laporan keuangan/kajian aksi korporasi, kekeluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Audit Dewan Komisaris mencapai 99,20% dengan kriteria Sangat Baik.
3. Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG
Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penugasan dan penyelesaian evaluasi GCG/risiko/kepatuhan laporan manajemen/kajian aksi korporasi, kekeluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Dewan Komisaris mencapai 98,40% dengan kriteria Sangat Baik.



KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen sendiri dimaksudkan untuk menciptakan iklim kerja yang lebih objektif dan independen, serta mampu menjaga prinsip "*fairness*" yang berarti memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, komposisi Komisaris Independen paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Di akhir tahun 2020, Perusahaan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, atau 50% dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian, komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Komisaris Independen per 31 Desember 2020

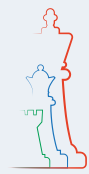
Komisaris Independen	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Krisna Wijaya	Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025, Periode ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan)

KRITERIA PENENTUAN DAN PEMENUHAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Independensi	Krisna Wijaya
Merupakan anggota Manajemen Perusahaan	x
Terikat dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	x
Sebagai pemegang saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan	x
Sebagai pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris	x
Sebagai penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris	x
Sebagai pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama	x

v = ada | x = tidak ada



DIREKSI

Direksi adalah organ GCG yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan atas Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi Perusahaan bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran dan *master plan*, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penanganan risiko usaha sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha. Setiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

BOARD MANUAL: PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Perusahaan telah memiliki *Board Manual* atau Pedoman Kerja Direksi sebagai kerangka bagi Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris serta perangkat organ lainnya. *Board Manual* yang dimiliki Direksi mengatur tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar prinsip GCG untuk mencapai visi misi Perusahaan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemegang saham serta praktik terbaik GCG.

Tujuan *Board Manual* adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Berbagai hal yang diatur dalam *Board Manual* di antaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi;
2. Tugas dan wewenang Direksi;
3. Kewajiban Direksi;
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
5. Etika jabatan;
6. Pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan oleh Direksi;
7. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi;

8. Rapat Direksi;
9. Organ Penunjang Direksi:
 - a. Divisi Satuan Pengawasan Intern;
 - b. Sekretaris Perusahaan.
10. Hubungan dengan anak perusahaan;
11. Benturan kepentingan.

Di samping itu, Direksi dalam melaksanakan tugasnya juga mengacu pada Pedoman Kerja Direksi yang telah ditetapkan dalam keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Rapat Direksi;
3. Keputusan di Luar Rapat Direksi;
4. Komunikasi Hasil Keputusan Direksi;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Ketentuan Penutup.

SUKSESI: NOMINASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal, lainnya dan materiil sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentang suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam bab ini.

KETENTUAN MASA JABATAN

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

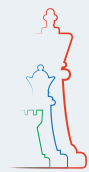
JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2020

Komposisi Direksi Perusahaan pada tahun 2020 mengalami perubahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Adapun kronologi susunan Direksi di sepanjang tahun 2020 dan susunan Direksi per 31 Desember 2020, sebagai berikut.



Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2020

Periode 1 Januari – 12 Juni 2020	Periode 12 Juni – 6 Agustus 2020	Periode 6 Agustus – 9 Oktober 2020	Periode 9 Oktober – 31 Desember 2020	Keterangan
Iman Rachman (Direktur Utama)				Iman Rachman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 12 Juni 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero).
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi)			Nasrizal Nazir tidak lagi menjabat sebagai Direktur Investasi sejak 6 Agustus 2020 karena adanya pertimbangan penataan Direksi PPA oleh Pemegang Saham.
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)			Dikdik Permadi Yoffana tidak lagi menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen sejak 6 Agustus 2020 karena adanya pertimbangan penataan Direksi PPA oleh Pemegang Saham.
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)	R. Muhammad Irwan (Plt. Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)	R. Muhammad Irwan (Direktur Hukum dan SDM)		- Pada 12 Juni 2020, Dewan Komisaris PPA menunjuk R. Muhammad Irwan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja. - Pada 6 Agustus 2020, Pemegang Saham memutuskan pengalihan nomenklatur jabatan R. Muhammad Irwan, dari semula Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja menjadi Direktur Hukum dan SDM. R. Muhammad Irwan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Hukum dan SDM sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur SDM dan Hukum PT Danareksa (Persero).
		Ari Soerono (Direktur Utama)		- Ari Soerono menjabat Direktur Utama sejak 6 Agustus 2020. - Ari Soerono tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Danareksa (Persero).
		Andry Setiawan (Direktur Investasi 1)		- Andry Setiawan menjabat Direktur Investasi 1 sejak 6 Agustus 2020. - Andry Setiawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Investasi 1 sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Investasi PT Danareksa (Persero).
		Yadi J. Ruchandi (Direktur Investasi 2)	Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	- Yadi J. Ruchandi menjabat Direktur Investasi 2 sejak 6 Agustus 2020. - Pada 9 Oktober 2020, Pemegang Saham memutuskan pengalihan nomenklatur jabatan Yadi J. Ruchandi, dari semula Direktur Investasi 2 menjadi Direktur Utama.
		Rizwan Rizal Abidin (Direktur Restrukturisasi)	Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	- Rizwan Rizal Abidin menjabat Direktur Restrukturisasi sejak 6 Agustus 2020. - Pada 9 Oktober 2020, Pemegang Saham memutuskan pengalihan nomenklatur jabatan Rizwan Rizal Abidin, dari semula Direktur Restrukturisasi menjadi Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi.
		Muhamad Teguh Wirahadikusumah (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)		- Muhamad Teguh Wirahadikusumah menjabat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sejak 6 Agustus 2020. - Muhamad Teguh Wirahadikusumah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sejak 9 Oktober 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero).
			Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	Adi Pamungkas Daskian menjabat Direktur Investasi 2 sejak 9 Oktober 2020.



Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Nama	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	- Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. Sk-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. - Sebagai Direktur Utama: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020.	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025.	Ke-1
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi)	- Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. Sk-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. - Sebagai Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020.	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025.	Ke-1
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020.	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025.	Ke-1

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Direksi dalam menjalankan segala tindakan kepengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain harus bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

TUGAS DIREKSI

Berdasarkan Pedoman Kerja Direksi disebutkan bahwa Direksi bertugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan, di mana anggota Direksi tetap harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Direktur Utama

- Menetapkan arah dan strategi Perusahaan bersama-sama dengan Direksi untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan;
- Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan;
- Menetapkan peraturan dan kebijakan Perusahaan;
- Mengkomunikasikan rencana jangka panjang, jangka pendek, arah serta strategi Perusahaan kepada seluruh jajaran;
- Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target Perusahaan;
- Menciptakan peluang bisnis bagi Perusahaan;
- Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan Sekretariat Perusahaan termasuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Satuan Pengawasan Intern dan Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi;
- Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- Bertanggung jawab terhadap implementasi asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU);
- Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai pencapaian target dan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
- Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan;
- Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan *monitoring* kinerja Entitas Anak.

Direktur Investasi 2

- Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan investasi, jasa konsultasi dan pengelolaan aset sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi;
- Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan investasi, jasa konsultasi dan pengelolaan aset;
- Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Investasi kepada seluruh jajarannya;
- Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi peluang investasi, jasa konsultasi dan pengelolaan aset sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Investasi 2;
- Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Investasi kepada Direktur Utama dan/atau Direksi;
- Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Investasi sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan;
- Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja entitas anak.

Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi

- Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, jasa konsultasi dan investasi sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi;
- Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, jasa konsultasi dan investasi;
- Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi kepada seluruh jajarannya;
- Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi peluang restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, jasa konsultasi dan investasi sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi dalam rangka mendukung pencapaian target Perusahaan;
- Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi kepada Direktur Utama dan/atau Direksi;
- Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan;
- Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak perusahaan.

Pendelegasian Wewenang

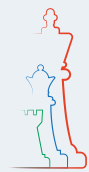
Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas semua anggota Direksi dalam mengelola Perusahaan. Terkait tugas masing-masing anggota Direksi Perusahaan, telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tentang Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi No. SK-55/PPA/0919 tertanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Jabatan dan Pembagian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi.



Nama	Pembagian Tugas
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	- Merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkomunikasikan, mengevaluasi arah dan strategi Perusahaan serta memimpin jalannya Perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan; - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan <i>monitoring</i> kinerja anak Perusahaan.
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan investasi, restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, jasa konsultasi dan investasi sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan; - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan.
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan investasi, jasa konsultasi dan pengelolaan aset sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan; - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DIREKSI

Program pengenalan kepada Direksi baru dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga Direksi yang baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kondisi Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Program pengenalan Perusahaan kepada Direksi yang baru diangkat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Direksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, Kode Etik Perusahaan, SK Direksi tentang Pedoman dan Penerapan GCG, Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya.

Program pengenalan untuk Direksi baru pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Program pengenalan Anggota Direksi telah dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang disampaikan di antaranya kepada:
 - a. Bapak Ari Sudono Soerono selaku Direktur Utama;
 - b. Bapak Muhammad Teguh Wirahadikusumah selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

- c. Bapak Rizwan Rizal Abidin selaku Direktur Restrukturisasi;
- d. Bapak Andry Setiawan selaku Direktur Investasi 1;
- e. Bapak Yadi Jaya Ruchandi selaku Direktur Investasi 2.

Dalam program pengenalan tersebut dilakukan serah terima dokumen sebagai berikut:

- a. *Company Profile*;
- b. Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (*Annual Report*);
- c. Laporan Auditor Independen: Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2019;
- d. Laporan Auditor Independen: Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA Tahun Buku 2019;
- e. Laporan Auditor Independen: Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun Buku 2019;
- f. Laporan Auditor Independen: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2019;
- g. Informasi Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA;
- h. *Board Manual*;
- i. Anggaran Dasar PT PPA dan perubahannya:
 - Berita Negara RI tanggal 17 Februari 2009 No 14, Tambahan Berita Negara 4837 Tahun 2009 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No. 2 tanggal 10 September 2008);
 - Berita Negara RI tanggal 13 Juni 2014 No. 47, Tambahan Berita Negara 18680 Tahun 2014 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No. 62 tanggal 21 Februari 2014);
 - Berita Negara RI tanggal 8 Oktober 2019 No. 081, Tambahan Berita Negara 035587 Tahun 2019 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No. 27 tanggal 15 Februari 2016).

2. Adapun Program pengenalan Anggota Direksi juga telah dilaksanakan pada hari Senin, 12 Oktober 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Bapak Adi Pamungkas Daskian selaku Direktur Investasi 2.



Dalam program pengenalan tersebut dilakukan serah terima dokumen sebagai berikut:

- Company Profile*;
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (*Annual Report*);
- Laporan Auditor Independen: Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2019;
- Laporan Auditor Independen: Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA Tahun Buku 2019;
- Laporan Auditor Independen: Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun Buku 2019;
- Laporan Auditor Independen: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2019;
- Informasi Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA;
- Board Manual*;
- Anggaran Dasar PT PPA dan perubahannya:
 - Berita Negara RI tanggal 17 Februari 2009 No 14, Tambahan Berita Negara 4837 Tahun 2009 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No. 2 tanggal 10 September 2008);
 - Berita Negara RI tanggal 13 Juni 2014 No 47, Tambahan Berita Negara 18680 Tahun 2014

(Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No. 62 tanggal 21 Februari 2014);

- Berita Negara RI tanggal 8 Oktober 2019 No 081, Tambahan Berita Negara 035587 Tahun 2019 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PPA No 27 tanggal 15 Februari 2016).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

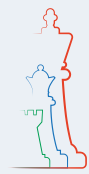
Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020 pelaksanaan tugas Direksi di luar pelaksanaan tugas rutin dan yang bersifat teknis, dapat dilihat pada keputusan yang dikeluarkan. Berikut adalah rincian Surat Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

KEPUTUSAN DIREKSI TAHUN 2020

No	Nomor Surat Keputusan	Perihal
1.	SK-9/PPA/0120	Piagam Audit Internal
2.	SK-14/PPA/0320	Kebijakan Manajemen Risiko
3.	SK-23/PPA/0420	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
4.	SK-28A/PPA/0520	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. SK-2/PPA/0119 tentang Kebijakan Investasi
5.	SK-33/PPA/0520	Kebijakan Anti Penyuapan
6.	SK-46/PPA/0620	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0515 tentang Kebijakan Pengadministrasian
7.	SK-48/PPA/0620	Perubahan atas Keputusan Direksi No. SK-23/PPA/0420 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
8.	SK-49/PPA/0620	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)
9.	SK-50/PPA/0720	Kebijakan Penjualan Aset Properti
10.	SK-53/PPA/0720	Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
11.	SK-54/PPA/0720	Perubahan Kedua Atas Kebijakan Direksi No. SK-17/PPA/0315 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN
12.	SK-58/PPA/0720	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
13.	SK-63/PPA/0820	Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik
14.	SK-72/PPA/1020	Perubahan Keputusan Direksi No. SK-12/PPA/-511 tentang Pemberian Biaya Transportasi, Uang Rapat, Honor Kerja Sama, Honor Narasumber dan Biaya Lain Terkait Kegiatan Perusahaan yang Melibatkan Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara
15.	SK-81/PPA/1020	Kebijakan Penanganan BUMN Titip Kelola
16.	SK-98/PPA/1120	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0515 tentang Kebijakan Pengadministrasian
17.	SK-99/PPA/1120	Perubahan Atas Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0716 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana



PENILAIAN KINERJA KOMITE DAN ORGAN DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka menjalankan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan No. SK-52/PPA/0919 tanggal 9 September 2019 dengan tugas dan tanggung jawab Komite sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan saran/ rekomendasi kepada Direksi Perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan Investasi atas:
 - a. Usulan kegiatan Investasi yang diajukan oleh Direktorat Investasi ("D-Investasi") dan Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen ("D-KBAM");
 - b. Usulan penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, antara lain pelampauan limit/batasan transaksi yang diatur dalam Pedoman.
2. Investasi, penyimpangan ketentuan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan, penyimpangan atas ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian transaksi (perjanjian pinjaman/penerbitan surat utang, dll); melakukan pembahasan dan memberikan saran/masukan atas usulan kegiatan Investasi dari Entitas Anak;
3. Memberikan masukan/saran atas Kebijakan Investasi dan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Memberikan masukan/saran atas Pedoman Investasi antara lain tingkat pengembalian minimal investasi, batas investasi per sektor industri, dan *negative list* investasi.

Namun, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung juga oleh beberapa organ pendukung seperti Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja dan Fungsi Manajemen Risiko.



TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman pendidikan, keahlian dan pengalaman merupakan hal positif dan sangat diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam mengefektifkan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi yang diharapkan mampu memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh manajemen, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Tahun 2020 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PPA

Nama	Kewarganegaraan	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian	Usia	Jenis Kelamin
Dewan Komisaris						
Krisna Wijaya (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)	Indonesia	Sarjana (S1) Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1980); Magister (S2) Manajemen bidang Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1990), dan Doktor (S3) Studi Antar Bidang dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009)	Berpengalaman sebagai Direktur LPPI (2014-sekarang), Komisaris Utama/Independen PT Danareksa Persero (Mei 2020-Oktober 2020), Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia Life (2015-2018), Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2015), Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2008-2010), Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2005-2007), Direktur Bisnis Mikro dan Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2005), Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Republik Indonesia (2003-2004), Direktur Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2000-2003)	Memiliki keahlian di bidang Pemasaran, Manajemen Risiko dan Audit serta Keuangan Mikro	65	Laki-laki
Marwanto Harjowiryo (Komisaris)	Indonesia	Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Ekonomi dari Gadjah Mada Yogyakarta (1983); <i>Master (S2) of Arts (M.A.)</i> bidang <i>Economic Development and Fiscal Policy</i> dari Vanderbilt University, Amerika Serikat (1991); dan Doktor (S3) bidang Ilmu Studi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009)	Berpengalaman sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2020), Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (2013-2019), Komisaris PT Sucofindo (Persero) (2003-2018), Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2017), Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2014-2017), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2011-2013), Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) (2009-2012), Ketua Komite Etik Asian Development Bank (ADB) (2009-2012), Anggota Panitia Penelaah Anggaran Asian Development Bank (ADB) (2009-2011), Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI (2007-2009), Senior Advisor Menteri Keuangan RI (2006-2009), Anggota The National Social Security Council (2006-2008), Direktur Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan RI (2004-2006), Direktur Kerjasama Internasional (2003-2005) Kementerian Keuangan RI, Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (1999-2003), Direktur Anggaran Kementerian Keuangan RI (1998-2003)	Memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan kebijakan	61	Laki-laki



Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PPA

Nama	Kewarganegaraan	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian	Usia	Jenis Kelamin
Direksi						
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	Indonesia	Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1995); <i>Master (S2) of International Management (MBA)</i> dengan fokus <i>International Finance and International Operation</i> , dari Thunderbird-The American Graduate School of International Management, Arizona, Amerika Serikat (1997)	Berpengalaman sebagai Direktur Investasi 1 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Agustus-Oktober 2020), Senior Executive Vice President Bank Exim (2019-2020), Chief Financial Officer PT Tuban Petrochemicals Industries (2016-2019), Chief Operating Officer pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2010-2016), Executive Vice President Pengembangan Proyek pada PT Cardig International Aviation (2009), Corporate Finance Group Head (Deputy CFO) pada PT Cardig International (2004-2006), Senior Investment Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2004), Capital Market Dealer pada American Express Bank Jakarta (1999-2000), dan Assistant Manager Treasury Analyst pada American Express Bank Jakarta (1997-1999)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan manajemen bisnis	49	Laki-laki
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	Indonesia	Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Trisakti (1996) dan <i>Master (S2) Business & Administration (MBA)</i> in Finance and Artificial Intelligence dari Southern New Hampshire University Graduate School USA (1999)	Berpengalaman sebagai Managing Director IndoSterling Capital (2019-2020), Direktur Investasi NWP Retail Warburg Pincus (2017-2019), Direktur Merger & Akuisisi CIMB (2015-2017), Direktur Corporate Client Solution CIMB (2013-2015), Vice President Corporate Client Solutions CIMB (2009-2013), Vice President Investment Banking (2007-2009), Vice President Corporate Finance CIMB (2005-2007), Associate Director Corporate Finance Noble Capital (2004-2005), Investment Officer Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2004), dan Relationship Manager Citibank (1999-2000)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan restrukturisasi perusahaan	48	Laki-laki
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	Indonesia	Sarjana (S1) Teknik jurusan <i>Electrical and Electronics Engineering</i> dari Nanyang Technological University, Singapura (2003); dan <i>Master of Business Administration</i> dari Nyenrode Business University, Belanda (2008)	Berpengalaman sebagai Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Juli-Oktober 2020), Independent Financial Advisor Singapura dan Indonesia (2015-2020), Direktur PT Meranti Putra Indonesia (2009-2015), Business Development Manager PT Rizki Kacida Reana (2009-2015), Thesis Project Mercurious (September 2008-Desember 2008), Sales Manager Wavelength Technology Pte Ltd (2006-2007), dan Financial Analyst PT Delta Advisory Indonesia (2004-2006)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi dan bisnis manajemen	39	Laki-laki

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS. Pertanggungjawaban ini menjadi dasar dalam menentukan diterima atau tidaknya hasil kinerja oleh pemegang saham; serta besaran tantiem dan insentif kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahunnya secara kolegal oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Penilaian realisasi kinerja Dewan Komisaris juga bersifat kolegal berdasarkan RKA dalam KPI yang dilakukan secara tahunan dan mandiri.

Perusahaan telah memiliki kebijakan Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam Kontrak Manajemen *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris yang mengacu pada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Berita Acara Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris tahun 2020.

Kontrak Manajemen *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris tahun 2020 telah disetujui oleh RUPS tanggal 22 Januari 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2020.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Dewan Komisaris juga melakukan penilaian independen terhadap pencapaian indikator penilaian kinerja.



Tabel KPI Dewan Komisaris tahun 2020

No	KPI	Target		Realisasi	
		Satuan	Bobot	Satuan	Skor
A. Aspek Pengawasan dan Pengarahan					
1	Review/Analisis Kinerja Perusahaan	12 kali	10,0	12 kali	10,0
2	Rapat Dewan Komisaris				
	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris	12 kali	5,0	16 kali	5,0
	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	12 kali	5,0	21 kali	5,0
	Kehadiran*)	100%	5,0	99,05%	4,95
3	Memberi Nasihat/Saran Kepada Direksi	9 kali	10,0	13 kali	14,44
4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/ Eksternal	4 kali	5,0	2 kali	2,5
5	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Assessment GCG	2 kali	5,0	2 kali	5,0
6	Kegiatan Kunjungan Lapangan (Site Visit) dalam Rangka Monitoring Kegiatan Usaha PT PPA	3 kali	5,0	3 kali	5,0
	Sub Total		50,0		51,89
B. Aspek Pelaporan					
1	Menyusun dan Menyampaikan Program Kerja Tahunan	1 kali	5,0	1 kali	5,0
2	Menyampaikan Rekomendasi atas RKAP	1 kali	5,0	2 kali	10,0
3	Menyampaikan Laporan/ Pendapat/Saran kepada Pemegang Saham/RUPS	7 kali	15,0	9 kali	19,3
4	Menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan	4 kali	10,0	4 kali	10,0
	Sub Total		35,0		44,3
C. Aspek Dinamis/Lain-lain					
1	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris	1 kali	5,0	8 kali	5,0
2	Skor Hasil Asesmen Gcg untuk Aspek Dewan Komisaris	90	10,0	96,21	10,69
	Sub Total		15,0		15,69
	TOTAL		100		111,88

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegial maupun individual oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja oleh pemegang saham dilakukan dalam RUPS Tahunan tentang Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perusahaan atas segala hasil pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang telah dilakukan. Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Kontrak Manajemen tahun 2020;
2. Pencapaian kinerja operasional dan keuangan tahun 2020;
3. Pelaksanaan implementasi GCG tahun 2020.



Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2020

No.	Keterangan	Target (Revisi RKAP 2020)	Bobot	Pencapaian		Skor
				Jumlah	%	
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia					
	Finansial					
1	Net Income	76.671	2	105.769	> 100%	2,20
2	Debt to Equity Ratio	1,26	2	1,52	> 100%	1,58
3	Return on Asset (ROA)	0,55%	2	0,82%	> 100%	2,20
4	BOPO	96%	2	95,47%	> 100%	2,03
	Sosial					
5	Kerja Sama PKBL pada wilayah kerja PPA Grup	2.000	6	2.000	100%	6,00
6	Penanganan COVID-19	370	6	484	> 100%	6,60
	Jumlah		20			20,62
B	Inovasi Model Bisnis					
1	Penyampaian Rencana Pengembangan Model Bisnis PPA sebagai <i>National Asset Management Company</i> (NAMCO) kepada Kementerian BUMN, termasuk rencana integrasi penggabungan PT Danareksa (Persero) dan PT PPA (Persero) dan integrasi Klaster-Klaster BUMN Inbreng ke dalam entitas baru PPA-Danareksa	November 2020	12	November 2020	100%	12,00
2	<i>Framework Risk Management</i> dan <i>Good Corporate Governance</i>	Desember 2020	12	Desember 2020	100%	12,00
3	Penyelesaian PP No. 69 Tahun 2012	Desember 2020	6	90%	< 100%	5,40
	Jumlah		30			29,40
C	Kepemimpinan Teknologi					
1	Digitalisasi layanan/proses (Peluncuran aplikasi 'PPA Mobile')	1	7	1	100%	7,00
2	Pengembangan <i>Dashboard Information System Management</i>	1	7	1	100%	7,00
	Jumlah		14			14,00
D	Peningkatan Investasi					
1	Memperoleh mandat untuk menjadi <i>arrange</i> transaksi pendanaan alternative (<i>alternative financing</i>)	1	11	1	100%	7,00
2	Memperoleh mandat untuk menjadi <i>coordinating financial advisor</i> dalam transaksi merger, akuisisi, Pre-IPO, pre-IPO <i>financing</i> dan IPO	1	9	1	100%	9,00
3	Menyelesaikan restrukturisasi atas aset investasi tidak produktif, dengan target 25% dari total aset investasi tidak produktif	25%	6	37%	< 100%	6,60
	Jumlah		15			26,60
E	Pengembangan Talenta					
1	Pengesahan pembentukan Klaster/Subklaster, MOU, <i>Launching</i> Lingkup Klaster/Subklaster	Desember 2020	5	Desember 2020	< 100%	3,00
2	Persetujuan Kementerian BUMN untuk Program Pengembangan Talenta Lingkup Klaster/Subklaster, termasuk di dalamnya program sukses Direksi dan pengembangan <i>top talent</i> muda (≤ 40 tahun)	Desember 2020	5	Desember 2020	< 100%	3,00
	Jumlah		10			6,00
	Total		100			96,62



Berdasarkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 dan Kontrak Manajemen Perusahaan yang telah ditetapkan Surat Kementerian BUMN No. S-1093/MBU/11/2020 tanggal 30 November 2020 mengenai persetujuan penetapan Revisi KPI Direksi secara kolegal Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan mendapat jumlah skor sebesar 96,62.

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2020, dilakukan dengan *Self Assessment* oleh Divisi Satuan Pengawas Intern. Hasil *Self Assessment* untuk tahun buku 2020 menunjukkan hasil dengan predikat “Sangat Baik” dengan capaian skor sebesar 90,065 Khusus untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing memperoleh skor 33,673 dan 31,605 dengan kategori “Sangat Baik” untuk kedua aspek tersebut.

Penilaian Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan melakukan *assessment* implementasi GCG untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada alat uji keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 pada 6 Juni 2012, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki porsi tersendiri terkait sejauh mana Dewan Komisaris memenuhi standar penerapan GCG.

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2020

Jenis Penilaian	: Self Assessment
Assessor/Penilai	: Divisi Satuan Pengawas Intern
Periode Penerapan	: 1 Januari - 31 Desember 2020
Tahun Buku	: 2020
Tempat	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Jakarta
Waktu Pengukuran	: 12 Januari 2021 – 22 Februari 2021
Waktu Terbit Laporan	: 25 Februari 2021

Rincian hasil *Assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Aspek Pengujian	Bobot	Pencapaian Tahun Buku 2020		
		Nilai	Pencapaian (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,455	92,21%	“Sangat Baik”
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,466	94,07 %	“Sangat Baik”
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	33,673	96,21%	“Sangat Baik”
Direksi	35,00	31,605	90,30%	“Sangat Baik”
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	7,367	81,85%	“Baik”
Aspek Lainnya	5,00	2,500	50,00%	“Kurang Baik”
Skor Keseluruhan	100,00	90,065	90,065%	“Sangat Baik”

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik



Informasi mengenai rekomendasi terhadap aspek Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (AoI) dapat dilihat pada bagian “Hasil Tata Kelola: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik” dalam bab ini.

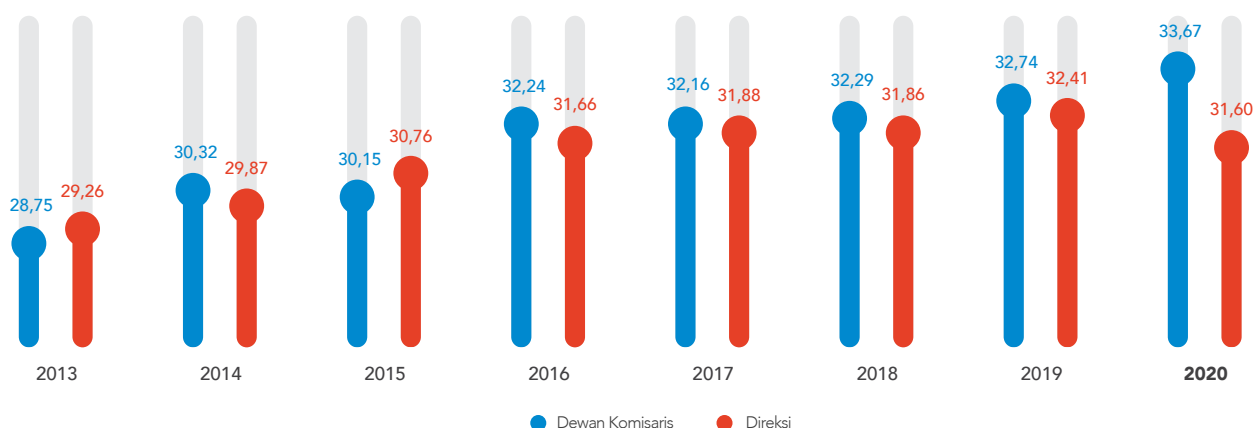
Perkembangan penilaian *assessment* penerapan GCG khusus untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bawah ini.

Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG

Tahun	Jenis Penilaian	Penilai	Skor Assessment GCG		
			Aspek Dewan Komisaris	Aspek Direksi	Kategori
2020	Self Assessment	Tim Internal	33,673	31,605	“Sangat Baik”
2019	Assessment	PT Adikarya Gemilang Solusindo	32,74	32,41	“Sangat Baik”
2018	Self Assessment	Tim Internal	32,291	31,869	“Sangat Baik”
2017	Assessment	PT Icon Global Solusi (Independen)	32,1671	31,8844	“Sangat Baik”
2016	Self Assessment	Tim Internal	32,239	31,622	“Sangat Baik”
2015	Assessment	PT Sinergi Daya Prima (Independen)	30,157	30,762	“Sangat Baik”
2014	Self Assessment	Tim Internal	30,32	29,87	“Sangat Baik”
2013	Assessment	PT Kharisma Insani Manajemen (Independen)	28,75	29,26	“Sangat Baik”



Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi 2013-2020



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/MBU/06/2018, PER-01/MBU/05/2019 dan PER-12/MBU/11/2020 serta Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN No. S-496/MBU/D6/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 Hal: Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun, Perusahaan menganggarkan rencana kenaikan penghasilan bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang besarnya disesuaikan dengan pertumbuhan Perusahaan, besarnya target yang ditetapkan serta perkembangan *salary* bagi CEO di *market*.

1. Berdasarkan pencapaian kinerja dan KPI tahunan, kemampuan keuangan Perusahaan serta kewajaran besarnya penghasilan pada industri/perusahaan sejenis di *market* Direksi mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada RUPS;



2. Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris selanjutnya Dewan Komisaris mengusulkan besaran penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan dalam RUPS Laporan Tahunan;
3. RUPS/Menteri menetapkan penghasilan bagi Direksi Dan Dewan Komisaris.

Jenis Penghasilan Direksi Dan Dewan Komisaris

Jenis penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/MBU/06/2018, PER-01/MBU/05/2019 dan PER-12/MBU/11/2020 serta Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN No. S-496/MBU/D6/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 terdiri dari:

1. Penghasilan Direksi:
 - a. Gaji yang besarnya ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
 - b. Tunjangan:
 - Tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji per tahun;
 - Tunjangan perumahan sebesar 40% dari gaji maksimal Rp27.500.000;
 - Asuransi purna jabatan besarnya premi per tahun 25% kali Gaji setahun.
 - c. Fasilitas:
 - Fasilitas kendaraan berupa 1 unit Toyota Alphard 2500cc beserta biaya perbaikan dan operasional kendaraan;
 - Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan rawat inap, penggantian rawat jalan dan *medical check up*;
 - Fasilitas bantuan hukum berupa pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum.
 - d. Tantiem/insentif kinerja yang besarnya ditetapkan RUPS/Menteri.
 - e. Lain-lain:
 - Hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja;
 - Biaya operasional untuk biaya komunikasi, pakaian dinas, keanggotaan perkumpulan profesi, *club membership* dan biaya representasi yang besarnya sesuai dengan anggaran dalam RKAP;
 - Pajak atas gaji dan tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja menjadi beban penerima;
 - Diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. Penghasilan Dewan Komisaris:
 - a. Honorarium yang besarnya sesuai dengan komposisi faktor jabatan.

- b. Tunjangan
 - Tunjangan hari raya sebesar 1 kali honorarium per tahun;
 - Tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium;
 - Asuransi purna jabatan besarnya premi per tahun 25% kali honorarium setahun.
- c. Fasilitas
 - Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan rawat inap, penggantian rawat jalan dan *medical check up*;
 - Fasilitas bantuan hukum berupa pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum.
- d. Tantiem/insentif kinerja besarnya sesuai dengan komposisi faktor jabatan.
- e. Lain-lain:
 - Biaya operasional untuk pakaian dinas dalam perkumpulan profesi yang besarnya sesuai dengan anggaran dalam RKAP;
 - Pajak atas honorarium dan tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja menjadi beban penerima.

Komposisi Faktor Jabatan

Besarnya penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris atas gaji/honorarium mengikuti komposisi faktor jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS/Menteri atau Peraturan Menteri BUMN yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh RUPS/Menteri;
2. Gaji Direktur yang membawahi bidang sumber daya manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama;
3. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama;
4. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama;
5. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Besarnya penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris atas tantiem/insentif kinerja mengikuti komposisi faktor jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS/Menteri atau Peraturan Menteri BUMN yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Total tantiem/insentif kinerja ditetapkan oleh RUPS/Menteri;
2. Tantiem/insentif kinerja Direktur Utama 100%;
3. Tantiem/insentif kinerja Direktur yang membawahi bidang sumber daya manusia sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Direktur Utama;
4. Tantiem/insentif kinerja anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari tantiem/insentif kinerja Direktur Utama;
5. Tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur Utama;
6. Tantiem/insentif kinerja anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama.



Realisasi Penghasilan Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun 2020

Direksi	Jumlah	Dewan Komisaris	Jumlah
Gaji	7.056.872.176	Honorarium	2.692.446.428
Tunjangan Perumahan	1.318.759.391	Tunjangan <i>Transport</i>	538.489.284
THR	0	THR	0
Tunjangan Pakaian	180.000.000	Tunjangan Pakaian	120.000.000
Asuransi Purna Jabatan	3.885.750.000	Asuransi Purna Jabatan	820.390.125
Kesehatan Rawat Jalan	364.847.650	Kesehatan Rawat Jalan	268.825.200
Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan	160.153.584	Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan	108.169.791
BPJS Ketenagakerjaan	294.889.143	BPJS Ketenagakerjaan	111.661.799
Uang Saku dan <i>Transport</i> Perjalanan Dinas	28.900.000	Uang Saku dan <i>Transport</i> Perjalanan Dinas	4.900.000
Operasional Kendaraan	763.823.302		
Tantiem (Netto) Tahun Sebelumnya	5.136.072.576	Tantiem (Netto) Tahun Sebelumnya	2.159.092.159
Pajak Penghasilan	7.487.840.609	Pajak Penghasilan	2.184.008.012
Jumlah Direksi	26.677.908.431	Jumlah Dewan Komisaris	9.007.982.798

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-255/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 Hal: Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara tahun 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan THR tahun 2020. Alokasi biaya THR Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020 dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait dengan penanggulangan COVID-19.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN No. S-496/MBU/D6/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 Hal: Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama tahun 2019 naik sebesar 10%;
2. Total tantiem/insentif kinerja tahun 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp12.859.000.000.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Internal Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis. Seorang anggota Dewan komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris yang asli disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan didokumentasikan, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir menandatangani surat kuasa dalam rangka pemenuhan GCG untuk kepastian pengambilan keputusan dalam setiap rapat.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris, sebagai berikut:



Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)*	11	11	100
Krisna Wijaya (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)**	5	5	100
Didyk Choirel (Komisaris)***	11	11	100
Himawan Hariyoga Djojokusumo (Komisaris)****	7	7	100
Tirta Hidayat (Komisaris Independen)*****	11	10	90,9
Marwanto Harjowirjono (Komisaris)*****	5	5	100
Rata-rata			98,48

*) Edy Putra Irawady tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020

**) Krisna Wijaya menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020

***) Didyk Choirel tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020

****) Himawan Hariyoga Djojokusumo diangkat sebagai Komisaris sejak 27 April dan berhenti menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020

*****) Tirta Hidayat tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020

*****) Marwanto Harjowirjono menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #01	
Tanggal Dan tempat Rapat: 30 Januari 2020; Ruang Rapat Pendulun-Gedung IPC Bogor-Jawa Barat Nomor Risalah Rapat: No.RIS.INT-01/PPA/KOM/0120 Agenda Rapat: - Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Desember Tahun 2019 (<i>Unaudited</i>); - Proses Assessment GCG Perusahaan; dan - Lain-lain.	Peserta Rapat: - Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choirel - Organ Dewan Komisaris Dewan Komisaris yang Tidak Hadir: - -
RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #02	
Tanggal Dan tempat Rapat: 25 Februari 2020; Ruang Rapat Dewan Komisaris PT PPA (Persero) Sampoerna Strategi Square Lt. 9 Nomor Risalah Rapat: No.RIS.INT-02/PPA/KOM/0220 Agenda Rapat: - Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. bulan Januari Tahun 2020; - Program Sinergi BUMN/BUMD/BUMS Tahun 2020; - Pembahasan atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2019; - Lain-lain.	Peserta Rapat: - Edy Putra Irawady - Didyk Choirel - Organ Dewan Komisaris Dewan Komisaris yang Tidak Hadir: - Tirta Hidayat, dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. -
RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #03	
Tanggal Dan tempat Rapat: 30 Maret 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Nomor Risalah Rapat: No.RIS.INT-03/PPA/KOM/0320 Agenda Rapat: - Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. bulan Februari Tahun 2020; - Tindak Lanjut Assessment GCG Tahun 2019 ; - Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Kapital dan PT PPA Finance; - Skenario Dampak dan Risiko Kondisi Darurat COVID-19 terhadap <i>Business</i> maupun <i>Cashflow</i> (Kinerja Keuangan); dan - Lain-lain.	Peserta Rapat: - Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choirel - Organ Dewan Komisaris Dewan Komisaris yang Tidak Hadir: - -



RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #04

Tanggal Dan tempat Rapat:

15 April 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom

Nomor Risalah Rapat:

No.RIS.INT-04/PPA/KOM/0420

Agenda Rapat:

- Tindak Lanjut *Mini Expose* Penerbitan Obligasi I PT PPA;
- Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPA; dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Edy Putra Irawady
- Tirta Hidayat
- Didyk Choeroel
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #05

Tanggal Dan tempat Rapat:

28 April 2020; Video Conference dengan Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No.RIS.INT-05/PPA/KOM/0420

Agenda Rapat:

- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
- Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan I Tahun 2020;
- Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi;
- Pelaksanaan *Business Plan* PMN Tahun 2015 per Triwulan I/2020; dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Edy Putra Irawady
- Tirta Hidayat
- Didyk Choeroel
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #06

Tanggal Dan tempat Rapat:

12 Mei 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom

Nomor Risalah Rapat:

No.RIS.INT-06/PPA/KOM/0520

Agenda Rapat:

Pembahasan Peran PT PPA (Persero) terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Dampak COVID-19.

Peserta Rapat:

- Edy Putra Irawady
- Tirta Hidayat
- Didyk Choeroel
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #07

Tanggal Dan tempat Rapat:

3 Juni 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom

Nomor Risalah Rapat:

No.RIS.INT-07/PPA/KOM/0620

Agenda Rapat:

- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
- Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. April Tahun 2020;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta Kebijakan Mutu dan Pelayanan;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko; dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Edy Putra Irawady
- Tirta Hidayat
- Didyk Choeroel
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #08

Tanggal Dan tempat Rapat:

30 Juni 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom

Nomor Risalah Rapat:

No.RIS.INT-08/PPA/KOM/0620

Agenda Rapat:

- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
- Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Mei Tahun 2020;
- Perkembangan Program Investasi Lainnya (*New Program*) RKAP Tahun 2020;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Edy Putra Irawady
- Tirta Hidayat
- Didyk Choeroel
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -



RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #09

Tanggal Dan tempat Rapat:28 Juli 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom**Nomor Risalah Rapat:**

No.RIS.INT-09/PPA/KOM/0720

Agenda Rapat:

- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
- Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan II Tahun 2020;
- Pengelolaan Kegiatan Usaha PT Nindya Karya;
- Pelaksanaan *Business Plan* PMN Tahun 2015 per Triwulan II/2020;
- Perubahan RKAP 2020;
- Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyupaan); dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Edy Putra Irawady
- Tirta Hidayat
- Didyk Choirel
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #10

Tanggal Dan tempat Rapat:28 Agustus 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom**Nomor Risalah Rapat:**

No.RIS.INT-10/PPA/KOM/0820

Agenda Rapat:

- Pembahasan Terkait Arahan Kementerian BUMN;
- Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT PPA (Persero); dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Edy Putra Irawady
- Tirta Hidayat
- Didyk Choirel
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #11

Tanggal Dan tempat Rapat:16 Oktober 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom**Nomor Risalah Rapat:**

No.RIS.INT-11/PPA/KOM/1120

Agenda Rapat:

Pembahasan Terkait Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT PPA (Persero)

Peserta Rapat:

- Krisna Wijaya
- Marwanto Harjowiryo
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #12

Tanggal Dan tempat Rapat:23 November 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom**Nomor Risalah Rapat:**

No.RIS.INT-12/PPA/KOM/1120

Agenda Rapat:

- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
- Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Oktober Tahun 2020;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Krisna Wijaya
- Marwanto Harjowiryo
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #13

Tanggal Dan tempat Rapat:22 Desember 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom**Nomor Risalah Rapat:**

No.RIS.INT-13/PPA/KOM/1220

Agenda Rapat:

- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
- Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. November Tahun 2020;
- Evaluasi Program Investasi Lainnya dalam RKAP Tahun 2020;
- Agenda RUPS RKAP Tahun Buku 2021; dan
- Lain-lain.

Peserta Rapat:

- Krisna Wijaya
- Marwanto Harjowiryo
- Organ Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

- -
- -



Rapat Gabungan: Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Dewan Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat. Rapat gabungan dapat juga dilakukan atas usulan Direksi.

Selama tahun 2020, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 18 (delapan belas) kali rapat. Risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris			
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)*	14	14	100%
Krisna Wijaya (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)**	4	4	100%
Didyk Choirel (Komisaris)***	14	14	100%
Himawan Hariyoga Djojokusumo (Komisaris)****	9	9	100%
Tirta Hidayat (Komisaris Independen)*****	14	13	92,6%
Marwanto Harjowirjono (Komisaris)*****	4	4	100%
Direksi			
Iman Rachman (Direktur Utama))*****	8	8	100
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi))*****	10	10	100
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)*****	10	10	100
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) *****	14	14	100
Ari Soerono (Direktur Utama)*****	4	4	100
Andry Setiawan (Direktur Investasi 1)*****	4	4	100
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)*****	8	8	100
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi) *****	8	8	100
Muhamad Teguh Wirahadikusumah (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)*****	4	4	100
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2) *****	4	4	100
Rata-rata			99,55

*) Edy Putra Irawady tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020

**) Krisna Wijaya menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020

***) Didyk Choirel tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020

****) Himawan Hariyoga Djojokusumo diangkat sebagai Komisaris sejak 27 April 2020 dan berhenti menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020

*****) Tirta Hidayat tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 9 Oktober 2020

*****) Marwanto Harjowirjono menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Oktober 2020

*****) Iman Rachman tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 12 Juni 2020.

*****) Nasrizal Nazir tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 6 Agustus 2020.

*****) Dikdik Permadi Yoffana tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 6 Agustus 2020.

*****) R. Muhammad Irwan tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Ari Soerono tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Andry Setiawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Rizwan Rizal Abidin menjabat sebagai Direktur sejak 12 Juni 2020.

*****) Muhamad Teguh Wirahadikusumah tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Adi Pamungkas Daskian menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.



Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir
30 Januari 2020	Ruang Rapat Pendulun, Gedung IPC Bogor- Jawa Barat	RIS.GAB-01/PPA/KOM/0120	- Evaluasi Tindak lanjut Hasil Rapat Bulan Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Desember Tahun 2019 (<i>Unaudited</i>); - Progress Assessment GCG Perusahaan; - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	
25 Februari 2020	Ruang Rapat Conference PT PPA di Gedung Sampoerna Strategic Square Lt. 9	RIS.GAB-02/PPA/KOM/0220	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas Bulan Januari Tahun 2020; - Program Sinergi BUMN/BUMD/BUMS Tahun 2020; - Pembahasan atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2019; - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Didyk Choeroel - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	
30 Maret 2020	Ruang Rapat Conference PT PPA di Gedung Sampoerna Strategic Square Lt. 9	RIS.GAB-03/PPA/KOM/0320	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas Bulan Februari Tahun 2020; - Tindak Lanjut Assessment GCG Tahun 2019; - Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Kapital dan PT PPA Finance; - Skenario Dampak dan Risiko Kondisi Darurat Covid 19 terhadap <i>Business</i> maupun <i>Cashflow</i> (Kinerja Keuangan) PT PPA dan Entitas Anak; dan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	
17 April 2020	Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams	No. RIS. GAB-04/PPA/KOM/0420	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap <i>Cash Flow</i> Perusahaan	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	
28 April 2020	Ruang Rapat Conference PT PPA di Gedung Sampoerna Strategic Square Lt. 9	RIS.GAB-04/PPA/KOM/0420	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan I Tahun 2020; - Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi; - Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN Tahun 2015 per Triwulan I/2020; dan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	
13 Mei 2020	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting	No. RIS. GAB-06/PPA/KOM/0520	Pembahasan Peran PT PPA terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Dampak COVID-19	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	



Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir
3 Juni 2020	Ruang Rapat Conference PT PPA di Gedung Sampoerna Strategic Square Lt. 9	RIS.GAB-05/PPA/KOM/0520	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan April Tahun 2020; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta Kebijakan Mutu dan Pelayanan; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko; - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	
12 Juni 2020	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting	No. RIS. GAB-08/PPA/KOM/0620	Koordinasi Penunjukan Plt. Direktur Utama PT PPA (Persero)	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Iman Rachman - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana R. Muhammad Irwan	
30 Juni 2020	Ruang Rapat Conference PT PPA di Gedung Sampoerna Strategic Square Lt. 9	RIS.GAB-06/PPA/KOM/0620	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan Mei Tahun 2020; - Perkembangan Program Investasi Lainnya (New Initiative Program) RKAP Tahun 2020; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan; - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana	
28 Juli 2020	Ruang Rapat Conference PT PPA di Gedung Sampoerna Strategic Square Lt. 9	RIS.GAB-07/PPA/KOM/0720	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan II Tahun 2020; - Pengelolaan Kegiatan Usaha PT Nindya Karya; - Pelaksanaan Business Plan PMN Tahun 2015 per TW II/2020; - Perubahan RKAP 2020, dan. - Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana	
28 Agustus 2020	Ruang Rapat Stewardship PT PPA di Gedung Sampoerna Strategic Square Lt.12	RIS.GAB-08/PPA/KOM/0820	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan Juli Tahun 2020; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Karir dan Suksesi Manajemen; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal; dan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Ari Soerono R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi Jaya Ruchandi - Rizwan Rizal Abidin - Teguh Wirahadikusuma	
14 September 2020	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting	No. RIS. GAB-12/PPA/KOM/0920	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Juli Tahun 2020; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Karir dan Suksesi Manajemen; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal; dan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Ari Soerono R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan 8Yadi Jaya Ruchandi - Rizwan Rizal Abidin - Teguh Wirahadikusuma	



Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir
21 September 2020	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting	No. RIS. GAB-13/PPA/KOM/0920	Presentasi Terkait Penanganan 41 BUMN yang akan di-Inbrenkan ke PT PPA (Persero)	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Ari Soerono R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi Jaya Ruchandi - Rizwan Rizal Abidin - Teguh Wirahadikusuma	
28 September 2020	Zoom Meeting, Meeting ID: 81676300361; Passcode: 610373	RIS.GAB-09/PPA/KOM/0920	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan Agustus Tahun 2020; - Perkembangan Rencana Penugasan kepada PPA; dan - Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan PT Nindya Karya.	- Edy Putra Irawady - Tirta Hidayat - Didyk Choeroel - Himawan Hariyoga - Ari Soerono R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi Jaya Ruchandi - Rizwan Rizal Abidin - Teguh Wirahadikusuma	
27-28 Oktober 2020	Teleconference/ Video Conference	RIS.GAB-10/PPA/KOM/1020	- Struktur Organisasi ALCO; - RKAP Tahun 2020, Prognosa 2020, KPI 2021; - RR BUMN Titip Kelola; - Penanganan NPL.	- Krisna Wijaya - Marwanto Harjowiryo - Yadi Jaya Ruchandi - Rizwan Rizal Abidin - Adi Pamungkas Daskian	
25 November 2020	Zoom Meeting; Meeting ID: 86207157781; Passcode: 798284	RIS.GAB-11/PPA/KOM/1120	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan Oktober Tahun 2020; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan - Lain-lain.	- Krisna Wijaya - Marwanto Harjowiryo - Yadi Jaya Ruchandi - Rizwan Rizal Abidin - Adi Pamungkas Daskian	
29 Desember 2020	Zoom Meeting; Meeting ID: 82403832615; Passcode: 319837	RIS.GAB-12/PPA/KOM/1220	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan November Tahun 2020; - Evaluasi Program Investasi Lainnya dalam RKAP Tahun 2020; - Agenda RUPS RKAP Tahun Buku 2021; dan - Lain-lain.	- Krisna Wijaya - Marwanto Harjowiryo - Yadi Jaya Ruchandi - Rizwan Rizal Abidin - Adi Pamungkas Daskian	

Rapat Direksi

Sesuai Keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:

- Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi;
 - Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris; atau
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Rapat Direksi harus diselenggarakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali sebulan.



Selama tahun 2020, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) kali. Risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Direksi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Iman Rachman (Direktur Utama)*	25	25	100%
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi)**	39	39	100%
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)***	39	39	100%
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)****	11	11	100%
Ari Soerono (Direktur Utama)*****	14	14	100%
Andry Setiawan (Direktur Investasi 1)*****	14	14	100%
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)*****	34	34	100%
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	34	34	100%
Muhamad Teguh Wirahadikusumah (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)*****	14	14	100%
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)*****	23	23	100%
Rata-rata			100%

*) Iman Rachman tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 12 Juni 2020.

**) Nasrizal Nazir tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 6 Agustus 2020.

***) Dikdik Permadi Yoffana tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 6 Agustus 2020.

****) R. Muhammad Irwan tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Ari Soerono tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Andry Setiawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Rizwan Rizal Abidin menjabat sebagai Direktur sejak 6 Agustus 2020.

*****) Muhamad Teguh Wirahadikusumah tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

*****) Adi Pamungkas Daskian menjabat sebagai Direktur sejak 9 Oktober 2020.

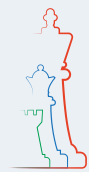
Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
6 Januari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-1/PPA/BOD/0120	- Pembahasan Bahan RUPS RKAP 2020; - Ijin Prinsip Restrukturisasi Utang PT Krakatau Steel kepada SCB; - Pembahasan SDM.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
14 Januari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-2/PPA/BOD/0120	- Pembahasan NPF Pengelolaan Anak Perusahaan : PT PPA Finance; - Addendum Perjanjian Pengelolaan Aset dengan Bank BTN; - Lain-lain.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
20 Januari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-3/PPA/BOD/0120	- Presentasi Konsultan SDM : SRW & Co; - Pembahasan Materi RUPS RKAP; - Pengelolaan Anak Perusahaan: Pembahasan Perkembangan PT PPAF dan PT PPAK.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
29 Januari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-4/PPA/BOD/0120	- Interview Kandidat Calon Direksi Anak/Cucu Perusahaan; - Pembahasan rencana kerja sama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero); - Pembahasan Bahan <i>Workshop</i> Tanggal 30-31 Januari 2020 di Bogor; - Pembahasan Bahan BOC – BOD Meeting Tanggal 30 Januari 2020 di Bogor; - Updating Skema Exit PT Nindya Karya.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
4 Februari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-5/PPA/BOD/0220	- Presentasi Kajian Remunerasi Direksi oleh Konsultan; - Presentasi <i>Holding</i> Pengelolaan BUMN oleh Konsultan; - Presentasi Website oleh Konsultan; - Updating Acara Ultah PPA; - Updating Skema Exit PT Nindya Karya; - Pemberian <i>Bridging Loan</i> kepada PT Istaka Karya (Persero); - Lain-lain.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
12 Februari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-6/PPA/BOD/0220	Pembahasan Tanggapan dan Rencana Aksi atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
13 Februari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-7/PPA/BOD/0220	- Pembahasan Bahan RUPS RKAP 2020; - Ijin Prinsip Restrukturisasi Utang PT Krakatau Steel kepada SCB; - Pembahasan SDM.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
13 Februari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-13/PPA/BOD/0320	- Pembahasan Permohonan <i>Bridging Loan</i> PT National Utility Helicopters (NUH); - Peserta Rapat:	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	Rapat dibatalkan
18 Februari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-8/PPA/BOD/0220	- Pembahasan Pertanyaan Anggota BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI yang disampaikan dalam RDP dengan PPA tanggal 12 Februari 2020; - Pembahasan Pengelolaan Rekening PKBL; - Pembahasan <i>Treasury</i>; - Pembahasan Proposal Maspion Grup; - Pembahasan <i>Update</i> tentang PT AKR dan PT Alter Abadi; - Pembahasan SDM.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
25 Februari 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-9/PPA/BOD/0220	Pembahasan SDM	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
3 Maret 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-10/PPA/BOD/0320	• Presentasi dari SKHA dan Danareksa tentang Usulan Pembiayaan Proyek PT Nindya Karya; • Pembahasan PT Nusantara Turbin Propulsi; • Pembahasan PT CDM Swarnadipa; • Pembahasan SDM PPAK dan PipeLine Bisnis PPAK.	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
4 Maret 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-11/PPA/BOD/0320	Pembahasan Pencairan Fasilitas Pinjaman kepada Maspion Group	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
10 Maret 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-12/PPA/BOD/0320	• Presentasi Pelatihan dan Pengembangan Karyawan; • Pembahasan PT Survai Udara Panas dan PT Merpati Nusantara Airlines.	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
13 Maret 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-14/PPA/BOD/0320	Pembahasan Permohonan <i>Bridging Loan</i> PT National Utility Helicopters	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
17 Maret 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-15/PPA/BOD/0320	Presentasi dari Konsultan SKHA	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
24 Maret 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-16/PPA/BOD/0320	• Presentasi RILJ; • Pembahasan PT Brahman Farm; • Presentasi Potensi Risiko COVID-19 terhadap Bisnis dan Cash Flow PPA.	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
7 April 2020	Media Video Conference di Ruang Entrepreneurship Lantai 11, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-17/PPA/BOD/0420	Presentasi Bisnis Model Polowijo Gosari Grup.	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-
14 April 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-18/PPA/BOD/0420	Penawaran Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp200 Miliar	• Iman Rachman • Nasrizal Nazir • R. Muhammad Irwan • Dikdik Permadi Yoffana • Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
21 April 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-19/PPA/BOD/0420	- Pembahasan Pengelolaan Anak Perusahaan: PT PPA Kapital – Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT National Utility Helicopters Tahun 2020; - Pembahasan Pengelolaan Anak Perusahaan: PT PPA Kapital – Proyeksi <i>cashflow</i> dan efisiensi biaya PT Rejeki Intilogam Jaya.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
28 April 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-20/PPA/BOD/0420	- Pengelolaan Anak Perusahaan: Pembahasan Program Asset Disposal PT PPA Finance dan PT PPA Kapital; - Pembahasan SDM.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
29 April 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-21/PPA/BOD/0420	Pembahasan Prioritas Penggunaan Dana Pinjaman BNI	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
5 Mei 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-22/PPA/BOD/0520	- Update Progress Penerbitan Obligasi dan Kondisi Pasar; - Pembahasan Asset Disposal PPA; - Pembahasan SDM.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
12 Mei 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-23/PPA/BOD/0520	- Rencana Marketing Obligasi; - Update rencana MKS/MKB.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
19 Mei 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-24/PPA/BOD/0520	- Presentasi Dashboard Keuangan; - Pembahasan PT Industri Sandang Nusantara; - Pembahasan SDM.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
2 Juni 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-25/PPA/BOD/0620	- Presentasi dari SKHA terkait Peran PPA dalam PEN; - Pembahasan Bahan Rapat Gabungan BOC BOD	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
9 Juni 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-26/PPA/BOD/0620	- Pembahasan Materi Presentasi Wamen 2 BUMN; - Pembahasan Cascading KPI; - Pembahasan Anak Perusahaan PPAK; - Progres Program Penjualan PT Sippa Kemasan Internasional; - Progres Penanganan KSO PT Duta Mentari Raya; - Progres Penanganan PT Matoa Kidung Bahtera/PT Matoa Kidung Samudera; - Progres Penanganan PT Rejeki Intilogam Jaya.	- Iman Rachman - Nasrizal Nazir R. Muhammad Irwan - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
16 Juni 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-27/PPA/BOD/0620	- Pembahasan PT Batam Island Marina (BIM); - Pembahasan <i>Update Tim Task Force</i> terkait Obligasi.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
19 Juni 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-28/PPA/BOD/0620	Progres Kesiapan PT PPA sebagai <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) dalam Program PEN untuk UMKM.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
23 Juni 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-29/PPA/BOD/0620	- Perubahan Kebijakan Akuntansi pada PPAK; - Paparan Konsultan EY Dalam Rangka Program PEN; - Rencana Skema Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Ekuitas; - Rencana Pemberian Dana Talangan & Pinjaman Modal Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas); - Pembahasan Divisi SDM dan Umum.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
24 dan 25 Juni 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-30/PPA/BOD/0620	<i>Pricing bookbuilding</i> Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
30 Juni 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-31/PPA/BOD/0620	- Pembahasan <i>Pre Launching</i> PEN; - Pembahasan Bahan BOD BOC Meeting; - Rencana Pemberian <i>Bridging Finance</i> ke Perumnas; - Lain-lain.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
7 Juli 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-32/PPA/BOD/0720	<i>Cascading KPI</i>; - Perkembangan <i>Book Building</i> Obligasi I PPA 2020; - Lain-lain.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
14 Juli 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-33/PPA/BOD/0720	Pembentukan Tim Kerja (<i>Task Force</i>) Penanganan Investasi Non Produktif pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT PPA Finance dan PT PPA Kapital.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
17 Juli 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-34/PPA/BOD/0720	Revisi RKAP 2020.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
17 Juli 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-35/PPA/BOD/0720	Pembahasan Hasil Book Building Obligasi PPA.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
21 Juli 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-36/PPA/BOD/0720	- Kick Off Meeting Tim Task Force Aset Non Produktif; - Cascading KPI; - Review Konsultan terkait Rencana Pengambilalihan PT Artas Energi Petrogas; - Pembahasan Kondisi Permasalahan Terkini Entitas Anak PPAK.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
24 Juli 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-37/PPA/BOD/0720	Penawaran Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp250 Miliar.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
27 Juli 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-38/PPA/BOD/0720	Pembahasan Penerimaan PPA dalam rangka Kerja Sama Investasi PT Widodo Makmur.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
4 Agustus 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-39/PPA/BOD/0820	- Penanganan NPL PPA Finance; - Evaluasi Pemberian Pinjaman kepada PT Magnesium Gosari Internasional; - Tindak Lanjut rencana Holding PPA dengan Danareksa.	R. Muhammad Irwan - Nasrizal Nazir - Dikdik Permadi Yoffana - Sekretaris Perusahaan	-
10 Agustus 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-40/PPA/BOD/0820	Strategic Direction terkait Project Selamat.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
11 Agustus 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-41/PPA/BOD/0820	- Pembahasan Cash Flow dan Obligasi; - Tindak Lanjut Penanganan Aset Non Produktif; - Penetapan Nomenklatur dan Pengelompokan Akun; - Penetapan Struktur Organisasi dan GM Bisnis; - Lain-lain.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
12 Agustus 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-42/PPA/BOD/0820	Penawaran Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp128 Miliar.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
13 Agustus 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-43/PPA/BOD/0820	Pembahasan <i>Cash Flow</i> .	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
13 Agustus 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-44/PPA/BOD/0820	- Pembahasan <i>Fund Structure</i> PEN; - Lain-lain.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
25 Agustus 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-45/PPA/BOD/0820	- Rencana Pembentukan <i>Asset Liability Committee</i> (ALCO); - Perkembangan Pendanaan dan Produk Pembiayaan PPA; - Pembahasan Proyeksi <i>Cash Flow</i> Agustus-Desember 2020; - Pembahasan Kebijakan Manajemen Risiko; - Perkembangan Unit Investasi Khusus; - Pembahasan Pembiayaan LSS dari Bank BTN.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
1 September 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-46/PPA/BOD/0920	<i>Update Personil Corporate Secretary</i>; - Usulan Skema Pendampingan Bank Mayapada Internasional Tbk; - Kewajiban PT LSS dengan Pembiayaan BTN; - Pengelolaan <i>Asset Non Produktif</i> melalui Skema <i>Zero Coupon Sukuk</i>; - Obligasi I PPA 2020; - Pendampingan PT Istaka Karya; - Kewajiban PPA kepada BTN; - Implementasi PSAK 71; - Rencana relokasi kantor PPA; - Pendampingan KPK dan Kejaksaan Agung; <i>Update PPA Holding</i>; - Lain-lain.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
3 September 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-47/PPA/BOD/0920	Penawaran Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp200 Miliar.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
8 September 2020	Media <i>Video Conference</i> di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-48/PPA/BOD/0920	- KPI RKAP 2020; - Tindak Lanjut Konfirmasi Kasus Positif COVID-19 di PPA; - Proposal Inbreng PPA- Danareksa untuk Wamen II KBUMN; - Kewenangan Ruang Lingkup Bisnis PPA ke Depan.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-



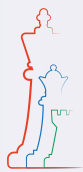
Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
15 September 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-49/PPA/BOD/0920	- Usulan Skema PPA Asset Clean Up dan ZCS; - Pergantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan Kepala SPI; - Update Penugasan PT Istaka Karya; - Lain-lain.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
22 September 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-50/PPA/BOD/0920	- Kebutuhan Pendanaan untuk Pipeline Investasi sampai dengan Desember 2020; - Pengelolaan Asset Liabilities; - Kinerja Juli 2020; - Penyelesaian Kewajiban PT Penas kepada PPA; - Penunjukan Konsultan untuk Kajian Pengelolaan BUMN Non Klaster; - Alternatif Skema Pencairan Pinjaman PT PPAF kepada PT Inti; - Penunjukan Komisaris pada Cucu Perusahaan PPA; - Lain-lain.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
29 September 2020	Media Video Conference di Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-51/PPA/BOD/0920	- Pengadaan Konsultan Inbreng BUMN; - Rencana Penunjukan Konsultan SDM; - Kajian Exit Strategy PPA atas PT BIM.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
2 dan 8 Oktober 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-52/PPA/BOD/1020	- Presentasi Empat Bider Calon Penyedia Jasa Konsultan Design Interior New Office PPA di Gedung Menara Mandiri II, Jalan Jend Sudirman Kav. 54-55 Jakarta; - Konversi Cadangan Menjadi Modal Dasar PT KBL terkait CCP SNBT; - Prioritas Pekerjaan masing-masing Direktorat yang akan diselesaikan pada Tahun 2020.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
13 Oktober 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-53/PPA/BOD/1020	Courtesy Meeting BOC BOD.	- Ari Soerono - Muhammad Teguh Wirahadikusumah R. Muhammad Irwan - Andry Setiawan - Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Sekretaris Perusahaan	-
20 Oktober 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-54/PPA/BOD/1020	- Prognosa Revenue 2020; - Update Persiapan Materi ke BOC; - SDM.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
26 Oktober 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-55/PPA/BOD/0120	Kepersonaliaan.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
3 November 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-56/PPA/BOD/1120	Potensial <i>Cash-In</i> atas akun-akun existing.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
3 November 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-57/PPA/BOD/1120	- Update Project Paris; - Update Project Breeze; - Update Project Home.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
4 November 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-58/PPA/BOD/1120	Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas Fasilitas Kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Persero) Tbk Rp200 Miliar.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
10 November 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-59/PPA/BOD/1120	Potensial <i>Cash-In</i> atas akun-akun existing.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
11 November 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-60/PPA/BOD/1120	- Update Project Paris; - Update Project Dakota.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
24 November 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-61/PPA/BOD/1120	Potensial <i>Cash-In</i> atas akun-akun existing.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
30 November 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-62/PPA/BOD/1120	Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas Fasilitas Kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank").	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
1 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-63/PPA/BOD/1220	Potensial <i>Cash-In</i> atas akun-akun existing.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
2 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-64/PPA/BOD/1220	Pembahasan RKAP BUMN RR.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
3 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-65/PPA/BOD/1220	Kepersonaliaan.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
8 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-66/PPA/BOD/1220	- Pembahasan Penyelesaian PT National Utility Helicopters; - Pembahasan Penyelesaian PT Lintas Samudera Sejahtera.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
10 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-67/PPA/BOD/1220	Pembahasan Penanganan BUMN Titip Kelola: PT Indah Karya dan PT MNA.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
14 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-68/PPA/BOD/1220	Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas Fasilitas Kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Persero) Tbk Rp200 Miliar.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Tempat	No. Risalah Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Direksi yang Tidak Hadir
14 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-69/PPA/BOD/1220	Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri Tbk.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
15 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-70/PPA/BOD/1220	- Penyelesaian Kewajiban ISN melalui Penjualan Aset Grati; - Penyelesaian Kewajiban Istaka Karya; - Review Proses Penunjukan Konsultan BUMN RR; - Review NPF PPA dan Rencana Perbaikan; - Opsi kelanjutan MKB dan MKS; - Review Pendanaan untuk Pindad.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
16 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-71/PPA/BOD/1220	Pembahasan Capaian KPI RKAP 2020.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
18 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-72/PPA/BOD/1220	- PT National Utility Helicopters; - PT Lintas Samudera Sejahtera; - PT Bina Patria Transmirta; - PT Indah Perkasa Sentosa, Tbk.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-
29 Desember 2020	Ruang Stewardship Lantai 12, Sampoerna Strategic Square, North Tower	MOM-73/PPA/BOD/1220	- Pembahasan mengenai PMN yang diterima PT PPA; - Pembahasan Proses Pengadaan dan Penunjukan Konsultan BUMN RR; - Pengelolaan Anak Perusahaan: Pembahasan PT Sipra Kemasan Internasional; - Pembahasan Penjadwalan Ulang Pembayaran Kewajiban Pokok Perumnas; - Pembahasan Update penanganan PT Istaka Karya; - Pembahasan Opsi Penyelesaian Kewajiban PT Inti Adhiyasa; - Diskusi Takeover NPL Bank Mandiri.	- Yadi J Ruchandi - Rizwan Rizal - Adi Pamungkas Daskian - Sekretaris Perusahaan	-

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi tidak diperbolehkan merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku terkait penerapan GCG. Berikut ini tabel yang menunjukkan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam periode tahun 2020:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020

Nama dan Jabatan	Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain
Dewan Komisaris	
Krisna Wijaya (Komisaris Utama)	Direktur LPPI
Marwanto Harjowirjono (Komisaris)	-
Direksi	
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	Komisaris Utama PT PPA Kapital
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	-
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	-

Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku terkait penerapan GCG.



Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Pasal 15 Ayat 17, anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Pasal 10 Ayat 15, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya secara berkala melalui daftar khusus yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020

	Kepemilikan Saham		
	Perusahaan	Entitas Anak dan Afiliasi	Perusahaan Lain (Lebih dari 5%)
Dewan Komisaris			
Krisna Wijaya (Komisaris Utama)	Nihil	Nihil	Nihil
Marwanto Harjowirjono (Komisaris)	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi			
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	Nihil	Nihil	Nihil
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	Nihil	Nihil	Nihil
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2)	Nihil	Nihil	Nihil

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Perusahaan dan Entitas Anak juga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Oleh karena itu, manajemen tidak memiliki saham baik saham Perusahaan maupun Entitas Anak.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki seluruh saham Perusahaan atau sebesar 100,00%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

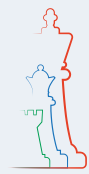
Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk diantaranya hutang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya; sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/ anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

**Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali per 31 Desember 2020**

	Hubungan Afiliasi		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)
Dewan Komisaris			
Krisna Wijaya (Komisaris Utama)	Nihil	Nihil	Nihil
Marwanto Harjowirjono (Komisaris)	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi			
Yadi J. Ruchandi (Direktur Utama)	Nihil	Nihil	Nihil
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	Nihil	Nihil	Nihil
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Invetasi 2)	Nihil	Nihil	Nihil

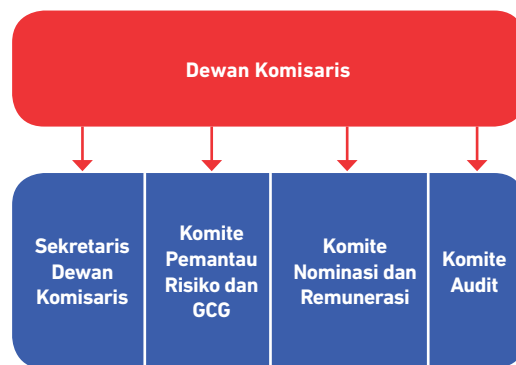




ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris membentuk organ pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organ pendukung tersebut terdiri Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Komite Pemantau Risiko dan GCG. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Organ Pendukung



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris adalah Organ Dewan Komisaris yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur administrasi dan pelaksanaan tata kelola yang baik dan benar untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif guna melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. Pengangkatan Sekretaris Dewan komisaris sesuai amanat Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Ibu Diah Triana menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 17/KEP.KOM/PPA/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan.

**Diah Triana**
Sekretaris Dewan Komisaris**Periode Jabatan**

30 November 2020 - 30 November 2025, Periode Ke-1

Pendidikan

S1 Universitas Bangkalan (1990)

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 53 Tahun

Kelahiran Bangkalan, 6 Januari 1968

Pengalaman Kerja

- Pengendalian Sub Kelompok (9 Juni 2020 - sekarang)
- Kementerian BUMN

Domisili

Duren Sawit, Jakarta, Indonesia

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris

Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat Dewan Komisaris dan gabungan Direksi & Dewan Komisaris, maupun dokumen penting lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Besaran dan jenis penghasilan yang diperoleh Sekretaris Dewan Komisaris adalah meliputi honorarium sebesar 15% dari gaji Direktur Utama, tunjangan *transport* maksimal 20% dari honorarium dan tunjangan komunikasi maksimal 5% dari honorarium serta diberikan fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan. Fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan diberikan dengan pertimbangan kemampuan Perusahaan dan kewajaran anggaran.



Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh organ pendukung Dewan Komisaris, realisasi pencapaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2020 mencapai 98,20% dengan kriteria Sangat Baik.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan maksud membantu Dewan Komisaris mengawasi fungsi Direksi dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. Ruang lingkup kerja Komite Audit yaitu membantu Dewan Komisaris mengawasi hal-hal terkait informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit diwajibkan sesuai dengan amanat Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan ditekankan pembentukannya berdasarkan Penjelasan Pasal 121 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui Komite ini, diharapkan Dewan Komisaris lebih terbantu dalam pelaksanaan pengawasan Perusahaan secara umum untuk seluruh lingkup pengawasan sepanjang belum dibentuknya Komite Dewan Komisaris yang lain.

Pedoman Kerja Komite Audit

Perusahaan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja berupa Piagam Komite Audit yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Piagam Komite Audit Perusahaan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Piagam (*Charter*) Komite Audit Edisi 2014.

Dalam Piagam Komite Audit diatur struktur dan persyaratan keanggotaan, masa tugas, dan tanggung jawab, wewenang, rapat Komite Audit, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas atau aktivitas Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup integritas, objektif dan independen, kerahasiaan, serta kompetensi.

Persyaratan Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan profesional dalam bidang akuntansi, manajemen operasional, sistem pengendalian internal, dan pemahaman mengenai prosedur audit secara umum.

2. Tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *Conflict of Interest* ataupun dampak negatif;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam hal melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif; dan
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Audit melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut:

1. Komite Audit Perusahaan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Profil Anggota Komite Audit dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Audit;
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama;
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris;
4. Seluruh Anggota Komite Audit Perusahaan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik;
5. Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perusahaan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai ketua Komite Audit Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.



Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perusahaan, masa jabatan Komite Audit Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dengan perodesasi pertama maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode kedua paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2020

Anggota Komite Audit Perusahaan di tahun 2020 berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merupakan Komisaris Independen Perusahaan, 1 (satu) Wakil Ketua Komite yang merupakan Komisaris Perusahaan dan 2 (dua) anggota yang berasal dari luar manajemen. Komposisi dan susunan Komite Audit di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Audit 1 Januari - 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Didyk Choireol	Ketua Komite Audit/ Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.2/KEP. KOM/PPA/V/2018 tanggal 1 Mei 2018	1 Mei 2018 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris	
Tirta Hidayat	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP. KOM/PPA/IV/2020 tanggal 13 April 2020	13 April 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris	
Krisna Wijaya	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/KEP. KOM/PPA/V/2020 tanggal 13 Oktober 2020	13 Oktober 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris	
Marwanto Wirjowiryo	Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/KEP. KOM/PPA/V/2020 tanggal 13 Oktober 2020	13 Oktober 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris	
Iko Marita Mustokoweni	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/KEP. KOM/PPA/IV/2018 tanggal 10 April 2018	10 April 2018 – 20 April 2020	Ke-2
Awal Susmanto	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP. KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020	20 April 2020 – 20 April 2023	Ke-1
Ahmad Malkan Lubis	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP. KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020	20 April 2020 – 20 April 2023	Ke-1

Profil Komite Audit



Krisna Wijaya
Ketua Komite Audit/
Komisaris Independen

Profil Ketua Komite Audit Krisna Wijaya dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini



Marwanto Wirjowiryo
Wakil Ketua Komite Audit/
Komisaris

Profil Anggota Komite Audit Marwanto Wirjowiryo dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini



Awal Susmanto
Anggota Komite Audit/
Pihak Independen

Periode Jabatan:

20 April 2020 – 20 April 2023, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 37 tahun
Kelahiran Kebumen, 11 Juli 1984

Domisili

Serang, Banten, Indonesia

Pendidikan

D IV, STAN Bintaro, lulus tahun 2010

Pengalaman Kerja

- Inspektorat (2013-Sekarang) Kementerian BUMN
- Komite Kebijakan Risiko (Agustus-November 2017) PT PELNI
- Komite Audit (2012-Juli 2017) PT PELNI
- Sekretariat (2005-2013) Kementerian BUMN

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

- Sertifikasi CRMP, PPM tahun 2019
- Auditor Muda, BPKP tahun 2018
- Infografis, GCG, RM tahun 2017



Ahmad Malkan Lubis
Anggota Komite Audit/
Pihak Independen

Periode Jabatan:

20 April 2020 – 20 April 2022, Periode Ke-2

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 67 tahun
Kelahiran Medan, tanggal 15 Maret 1953

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ekonomi dari University of the District of Columbia, Amerika Serikat, tahun 1986. Memperoleh gelar Master of Art jurusan Ekonomi pada Virginia Polytechnic Institute and State University di Virginia, Amerika Serikat (1986-1988) dan Doktor jurusan Ekonomi pada University of Maryland, Amerika Serikat (1989-1993).

Pengalaman Kerja

Anggota Tim Sistem Investasi *Online Single Submission* (OSS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Tim Nasional Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), Penasihat ASEAN *Connectivity Through Trade and Investment* (ACTI), Penasihat *Support for Economic Analysis Development in Indonesia* (SEADI)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

-

Independensi Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perusahaan serta mempunyai latar belakang keuangan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang industri Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Audit tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Audit pada saat pengangkatan tahun 2018 yang dijabarkan aspek independensi sebagai berikut:

Aspek Independensi	Nama	Nama	Nama
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi	x	x	x
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah	x	x	x

v = ada | x = tidak ada



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/ XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal;
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit dan Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta penerapannya;
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

Pembagian Tugas Antar Komite Audit

Pembagian tugas bertujuan untuk memastikan kejelasan peran antar anggota komite. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Pembagian Tugas
Krisna Wijaya (Ketua Komite Audit/Komisaris Independen)	Bertanggung Jawab untuk Menangani bidang Umum
Marwanto Harjowiryo (Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris)	Bertanggung Jawab untuk Menangani bidang Umum
Awal Susmanto (Anggota Komite Audit)	Bertanggung Jawab untuk menangani bidang Teknis
Ahmad Malkan Lubis (Anggota Komite Audit)	Bertanggung Jawab untuk menangani bidang Administrasi dan Keuangan

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Audit, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Audit. Pertemuan dengan auditor eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Divisi SPI untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 16 (enam belas) kali sepanjang tahun 2020. Berikut risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite Audit sebagaimana terlampir di bawah ini.



Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Didyk Choeroel (Ketua Komite Audit)*	1	1	100
Tirta Hidayat (Ketua Komite Audit)**	1	1	100
Krisna Wijaya (Ketua Komite Audit)***	3	3	100
Iko Marita Mustokoweni (Anggota)****	3	3	100
Ahmad Malkan Lubis (Anggota)	16	16	100
Awal Susmanto (Anggota)*****	12	12	100
Rata-rata			100

*) Didyk Choeroel tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 13 April 2020

**) Tirta Hidayat menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 13 April 2020

***) Krisna Wijaya menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 13 Oktober 2020

****) Iko Marita Mustokoweni tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 20 April 2020

*****) Awal Susmanto menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 20 April 2020

Risalah Rapat Komite Audit dan Kehadiran Komite Audit

RAPAT KOMITE AUDIT #01	
Tanggal Dan tempat Rapat: 21 Januari 2020; Ruang Meeting Dewan Komisaris PT PPA Lantai 9 Sampoerna Strategic Square Nomor Risalah Rapat: No. RIS-01/PPA/KA/0120 Agenda Rapat: - Pembahasan Manajemen Risiko Tahun 2019; - Lain-lain	Peserta Rapat: - Iko Marita Mustokoweni - Ahmad Malkan Lubis - Hendy M. Fakhruddin - Awal Susmanto Komite Audit yang Tidak Hadir: - -
RAPAT KOMITE AUDIT #02	
Tanggal Dan tempat Rapat: 6 Februari 2020; Ruang Meeting Dewan Komisaris PT PPA Lantai 9 Sampoerna Strategic Square Nomor Risalah Rapat: No. RIS-02/PPA/KA/0220 Agenda Rapat: - Pembahasan Laporan Audit atas Progress Pelaksanaan Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2019 oleh KAP RSM Indonesia; dan - Lain-lain	Peserta Rapat: - Didyk Choeroel - Iko Marita Mustokoweni - Ahmad Malkan Lubis - Hendy M. Fakhruddin - Awal Susmanto Komite Audit yang Tidak Hadir: - -
RAPAT KOMITE AUDIT #03	
Tanggal Dan tempat Rapat: 5 Maret 2020; Ruang Meeting Dewan Komisaris PT PPA Lantai 9 Sampoerna Strategic Square Nomor Risalah Rapat: No. RIS-03/PPA/KA/0320 Agenda Rapat: - Pembahasan Mengenai Rencana Jadwal Penggunaan Dana PMN Tahun 2015; dan - Lain-lain	Peserta Rapat: - Iko Marita Mustokoweni - Ahmad Malkan Lubis - Hendy M. Fakhruddin - Awal Susmanto Komite Audit yang Tidak Hadir: -
RAPAT KOMITE AUDIT #04	
Tanggal Dan tempat Rapat: 6 April 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting Nomor Risalah Rapat: No. RIS-04/PPA/KA/0220 Agenda Rapat: - Pembahasan Mengenai Rencana Jadwal Penggunaan Dana PMN Tahun 2015; dan - Lain-lain	Peserta Rapat: - Iko Marita Mustokoweni - Ahmad Malkan Lubis - Hendy M. Fakhruddin - Awal Susmanto Komite Audit yang Tidak Hadir: - -



RAPAT KOMITE AUDIT #05

Tanggal Dan tempat Rapat:

29 Mei 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-05/PPA/KA/0520

Agenda Rapat:

- Pembahasan Area Of Improvement (AOI) GCG PT PPA; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT Komite Audit #06

Tanggal Dan tempat Rapat:

2 Juni 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-06/PPA/KA/0620

Agenda Rapat:

- Pembahasan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2020; dan
- Dashboard Cashflow PT PPA

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE AUDIT #07

Tanggal Dan tempat Rapat:

24 Juni 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-07/PPA/KA/0620

Agenda Rapat:

- Pembahasan Potensi Bisnis dan Penanganan Debitur Bermasalah; dan
- Dashboard Cashflow PT PPA

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

-
-

RAPAT KOMITE AUDIT #08

Tanggal Dan tempat Rapat:

3 Juli 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-08/PPA/KA/0720

Agenda Rapat:

- Pembahasan Laporan Kegiatan DSPI Triwulan I Tahun 2020; dan
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019 pada PPA;

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE AUDIT #09

Tanggal Dan tempat Rapat:

24 Agustus 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-10/PPA/KA/0820

Agenda Rapat:

- Pembahasan Laporan DSPI Triwulan II Tahun 2020; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE AUDIT #10

Tanggal Dan tempat Rapat:

23 September 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-10/PPA/KA/0920

Agenda Rapat:

- Pembahasan Pending Meters Komite; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -



RAPAT KOMITE AUDIT #11

Tanggal Dan tempat Rapat:

28 September 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-11/PPA/KA/0920

Agenda Rapat:

Pembahasan Laporan Audit atas Kegiatan Investasi pada PT Bintang Abadi Sampurna (PT BAS);

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

-

RAPAT KOMITE AUDIT #12

Tanggal Dan tempat Rapat:

13 Oktober 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-12/PPA/KA/1020

Agenda Rapat:

- Pembahasan Mengenai Penggantian Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit;
- Pembahasan Usulan Direksi Mengenai Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT PPA Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Krisna Wijaya
- Marwanto Harjowiryo
- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -

RAPAT KOMITE AUDIT #13

Tanggal Dan tempat Rapat:

11 November 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-13/PPA/KA/1120

Agenda Rapat:

- Pembahasan Laporan Audit DSPI Triwulan II Tahun 2020 dan Pembahasan Laporan Reviu Portopolio Investasi PT PPA (31 Agustus 2020); dan
- Pembahasan Perkembangan Audit KAP RSM Indonesia Tahun Buku 2020.

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- Hendy M. Fakhruddin, sakit.
- -

RAPAT KOMITE AUDIT #14

Tanggal Dan tempat Rapat:

24 November 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-14/PPA/KA/1120

Agenda Rapat:

Pembahasan Pelaksanaan Bidang GCG dan Manajemen Risiko

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -

RAPAT KOMITE AUDIT #15

Tanggal Dan tempat Rapat:

16 Desember 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-15/PPA/KA/1220

Agenda Rapat:

- Evaluasi Progress Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2020 oleh KAP RSM Indonesia; dan
- Perkembangan Rencana Kerja Divisi SPI Tahun 2021

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -

RAPAT KOMITE AUDIT #16

Tanggal Dan tempat Rapat:

18 Desember 2020; *Video Conference* dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

- No. RIS-16/PPA/KA/1220

Agenda Rapat:

- Pembahasan Permintaan Tanggapan Dewan Komisaris atas PT Penas; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Awal Susmanto
- Ahmad Malkan Lubis
- Iko Marita Mustokoweni
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Mengacu pada Piagam Komite Audit, penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium dengan jumlah maksimal 15-20% dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lainnya selain honorarium tersebut.



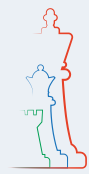
Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaah/evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja perseroan dalam bentuk konsep Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020.
2. Menyiapkan Surat Tanggapan Komisaris atas Laporan Manajemen Perseroan untuk tahun 2019, dan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020.
3. Melakukan telaah/evaluasi atas Laporan Penggunaan PMN Tahun 2020 yang diajukan oleh Direksi.
4. Kegiatan yang berhubungan dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern ("DSPI") Perseroan:
 - a. Melakukan pembahasan perubahan Piagam DSPI.
 - b. Melakukan pembahasan hasil audit DSPI Tahun 2019; hasil audit Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020; dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Semester II tahun 2019.
 - c. Melakukan pembahasan audit DSPI atas Anak Perusahaan, atas Investasi pada PT Dutacipta Pakarperkasa, PT Bintang Abadi Sampurna, dan Reviu Portofolio Investasi (s.d. Agustus 2020).
 - d. Berpartisipasi pada pembahasan *Closing Audit* Laporan Keuangan tahun 2019, dan penetapan/ penunjukkan KAP serta memantau pelaksanaan Audit Laporan Keuangan 2020.
5. Kegiatan yang berhubungan dengan Kebijakan Akuntansi dan Pelaksanaannya:
 - a. Melakukan pembahasan dengan Divisi Akuntansi dan Keuangan mengenai pelaksanaan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan (PSAK 65, PSAK 71-73).
 - b. Melaporkan hasil pembahasan mengenai hal tersebut di atas di dalam Rapat Internal Dewan Komisaris untuk selanjutnya dibahas di dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Mendukung kegiatan Komite Pemantau Risiko & GCG dengan mengikuti dan berdiskusi secara aktif dalam pembahasan:
 - a. Tindak lanjut pemenuhan *Area of Improvement* GCG tahun 2019 dan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020.
 - b. Laporan Profil Risiko tahun 2019 dan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020 dengan PIC dari manajemen (Divisi Manajemen Risiko dan Sekretariat Perusahaan).
7. Melakukan pembahasan atas Surat Manajemen mengenai Perubahan Struktur Organisasi Perseroan.
8. Melakukan pembahasan atas Permohonan Tanggapan Komisaris tentang Penyelesaian Kewajiban PT Survai Udara Penas.
9. Menyiapkan telaah/analisa dan arahan Dewan Komisaris kepada Direksi, termasuk:
 - a. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja PT PPA.
 - b. Pendapat dan Saran atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun Buku 2020.
 - c. Pendapat dan Saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun Buku 2021.
 - d. Usulan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT PPA (Persero) sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2017.
10. Menghadiri Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris (sesuai penugasan, 16 (enam belas) rapat), sepanjang tahun 2020.
11. Berpartisipasi pada kunjungan kerja Dewan Komisaris:
 - a. PT National Utility Helicopter ("PT NUH"), Balikpapan.
 - b. PT Survai Udara Penas ("Penas"), secara virtual.
 - c. PT Widodo Makmur Unggas, secara virtual.
12. Menghadiri Seminar Online:
 - a. "Executing Business Strategy 2020", 31 Januari 2020, Narasumber: Arvan Pradiansyah.
 - b. "CMA Professional Forum Series: Restructuring as a Way to Bounce Back after COVID-19", 20 Juni 2020, CMA Indonesia.
 - c. "Treasury Indonesia: Modernisasi Pengelolaan Perbendaharaan Berkelas Dunia", 26 Oktober 2020, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
 - d. "Compliance Risk During COVID-19", 21 Juli 2020, PT SAI Global dan SustalN.
 - e. "Optimalisasi Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Anti Penyuapan Selama Pandemi COVID-19", 26 Agustus 2020, SustalN, PT Pupuk Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia.
 - f. "Revitalisasi UMKM, Pembiayaan dan Digitalisasi", 22 Oktober 2020, LPPI.
 - g. "Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN", 4 November 2020, Kementerian BUMN dan IFC.
 - h. "Visualizing the New Normal in Bank Leading", 2 Desember 2020, BARA Risk Forum

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Kinerja Komite Audit pada periode tahun 2020 tergolong sangat baik dengan pencapaian nilai sebesar 99,20.



KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pemantauan atas implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) dan GCG di Perusahaan. Komite Pemantau Risiko dan GCG bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/ VI/2011 tentang Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG merupakan komitmen dan inisiatif Dewan Komisaris dalam mendukung terbentuknya perusahaan yang *well-managed* dan *well-governed*. Melalui Komite ini, diharapkan Dewan Komisaris mampu mendorong dan mendukung implementasi Manajemen Risiko secara terintegrasi (ERM) dan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses bisnis dan aktivitas di Perusahaan Anak.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris No. PER-03/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Desember 2014.

Piagam tersebut antara lain mencakup keanggotaan, tugas dan fungsi, masa jabatan, persyaratan keanggotaan, program kerja dan penganggaran, rapat-rapat Komite, pelaporan, akses dan kerahasiaan informasi, evaluasi kinerja Komite dan penghasilan anggota Komite Pemantauan Risiko dan GCG.

Piagam Komite ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, peraturan atau regulasi terkait lain yang berlaku dan relevan dengan kondisi Perusahaan saat ini.

Persyaratan Komite Pemantau Risiko dan GCG

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan profesional dalam bidang hukum, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan;
2. Tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *Conflict of Interest* ataupun dampak negatif;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam hal melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif; dan
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG. Profil Anggota Komite dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Pemantau Risiko dan GCG;
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama;
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris;
4. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite PR dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.



Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan, masa jabatan Komite Pemantau Risiko dan GCG Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dengan periodisasi pertama maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode kedua paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2020

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan di tahun 2020 berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merupakan Komisaris Independen Perusahaan, dan 1 (satu) anggota yang berasal dari luar manajemen. Komposisi dan susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG 1 Januari - 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Marwanto Harjowiryo	Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/ Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. S-15/ KEP.KOM/PPA/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris	Ke-1
Krisna Wijaya	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 15/KEP. KOM/PPA/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020	9 Oktober 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris	Ke-1
Iko Marita Mustokoweni	Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No 09/KEP. KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020	20 April 2020 – 20 April 2025	Ke-1

Profil Komite Pemantau Risiko dan GCG

Marwanto Harjowiryo
Ketua Komite
Pemantau Risiko dan GCG/
Komisaris



Profil Ketua Komite Audit Krisna Wijaya dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Krisna Wijaya
Wakil Ketua Komite
Pemantau Risiko dan GCG
/Komisaris



Profil Anggota Komite Audit Marwanto Wirjowiryo dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Iko Marita Mustokoweni
Anggota Komite Pemantau Risiko
dan GCG/Pihak Independen



Periode Jabatan:
20 April 2020 – 20 April 2022, Periode Ke-2

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun
Kelahiran Malang, 24 Mei 1966

Domisili
Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Indonesia

Pendidikan
S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 1989

Pengalaman Kerja

Memiliki pengalaman sebagai staff Dewan Komisaris Perseroan, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, Kepala Divisi Kebijakan Perusahaan dan Administrasi di PT Bank Niaga.

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

-



Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perusahaan serta mempunyai latar belakang Keuangan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang industri Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG pada saat pengangkatan pada tahun 2017 yang dijabarkan aspek independensi sebagai berikut:

Aspek Independensi	Nama	Nama	Nama
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak Perusahaan maupun Entitas Afiliasi	x	x	x
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah	x	x	x

v = ada | x = tidak ada

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah membantu Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi pada seluruh proses bisnis (ERM);
2. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) termasuk penerapan GCG pada Perusahaan Anak;
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola perusahaan yang baik;
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewangnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.



Pembagian Tugas Antar Komite Pemantau Risiko dan GCG

Pembagian tugas bertujuan untuk memastikan kejelasan peran antar anggota komite. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset, lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah sebagai berikut:

Nama	Pembagian Tugas
Marwanto Harjowiryo (Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris)	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Umum
Krisna Wijaya (Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Independen)	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Umum
Iko Marita Mustokoweni (Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG)	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Aspek Teknis, Aspek Administrasi Dan Keuangan

Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG. Dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Divisi Manajemen Risiko untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG diselenggarakan sebanyak 19 (sembilan belas) kali sepanjang tahun 2020. Berikut risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagaimana terlampir di bawah ini.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko dan GCG pada Rapat

Komite Pemantau Risiko dan GCG	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Tirta Hidayat (Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG)*	1	1	100
Didyk choiroel (Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG)**	1	1	100
Marwanto Harjowiryo (Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG)***	3	3	100
Krisna Wijaya (Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG)	3	3	100
Hendy M. Fakhruddin (Anggota)****	4	4	100
Awal Susmanto (Anggota)*****	4	4	100
Iko Marita Mustokoweni (Anggota)*****	15	15	100
Rata-rata			100

*) Tirta Hidayat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko & GCG sejak 13 April 2020

**) Didyk Choiroel menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko & GCG sejak 13 April 2020

***) Marwanto Harjowiryo menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko & GCG sejak 13 Oktober 2020

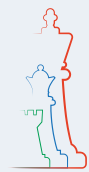
****) Hendy M. Fakhruddin tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & GCG sejak 20 April 2020

*****) Awal Susmanto tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & GCG sejak 20 April 2020

*****) Iko Marita Mustokoweni menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & GCG sejak 20 April 2020

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko dan GCG

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #01	
Tanggal Dan tempat Rapat: 24 Januari 2020, Nomor Risalah Rapat: No. RIS-01/PPA/KPR&GCG/0120 Agenda Rapat: - Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Tahun 2019; dan - Lain-lain	Peserta Rapat: - Hendy M. Fakhruddin - Awal Susmanto - Iko Marita Mustokoweni - Malkan Lubis Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir: - -



RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #02

Tanggal Dan tempat Rapat:

6 Februari 2020; Ruang Meeting Dewan Komisaris PT PPA Lantai 9 Sampoerna Strategic Square

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-02/PPA/KPR&GCG/0220

Agenda Rapat:

- Pembahasan Laporan Audit atas Laporan Pelaksanaan Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2019 oleh KAP RSM Indonesia; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Hendy M. Fakhruddin
- Awal Susmanto
- Iko Marita Mustokoweni
- Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #03

Tanggal Dan tempat Rapat:

5 Maret 2020; Ruang Meeting Dewan Komisaris PT PPA Lantai 9 Sampoerna Strategic Square

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-03/PPA/KPR&GCG/0320

Agenda Rapat:

- Pembahasan Mengenai Rencana Jadwal Penggunaan Dana PMN Tahun 2015; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Hendy M. Fakhruddin
- Awal Susmanto
- Iko Marita Mustokoweni
- Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT Komite Pemantau Risiko dan GCG #04

Tanggal Dan tempat Rapat:

6 April 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-04/PPA/KPR&GCG/0420

Agenda Rapat:

- Pembahasan Draft Surat Saran dan Masukan Dewan Komisaris dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja PT PPA; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Hendy M. Fakhruddin
- Awal Susmanto
- Iko Marita Mustokoweni
- Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #05

Tanggal Dan tempat Rapat:

29 Mei 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-05/PPA/KPR&GCG/0520

Agenda Rapat:

- Pembahasan Area Of Improvement (AOI) GCG PT PPA; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #06

Tanggal Dan tempat Rapat:

2 Juni 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-06/PPA/KPR&GCG/0620

Agenda Rapat:

- Pembahasan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2020; dan
- Dashboard Cash Flow PT PPA

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #07

Tanggal Dan tempat Rapat:

24 Juni 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-07/PPA/KPR&GCG/0720

Agenda Rapat:

- Pembahasan Potensi Bisnis dan Penanganan Debitur Bermasalah; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -



RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #08

Tanggal Dan tempat Rapat:

3 Juli 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-08/PPA/KPR&GCG/0720

Agenda Rapat:

- Pembahasan Laporan DSPI Triwulan I Tahun 2020; dan
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BP, Semester II Tahun 2019.

Peserta Rapat:

Iko Marita Mustokoweni
Awal Susmanto
Malkan Lubis
Hendy M. Fakhruddin

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #09

Tanggal Dan tempat Rapat:

21 Juli 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-09/PPA/KPR&GCG/0720

Agenda Rapat:

- Pembahasan Mengenai Revisi Kebijakan Akuntansi dan Keuangan ;
- Tindak Lanjut Penunjukan KAP untuk Audit Umum Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2020; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #10

Tanggal Dan tempat Rapat:

24 Agustus 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-10/PPA/KPR&GCG/0820

Agenda Rapat:

- Pembahasan Laporan DSPI Triwulan II Tahun 2020; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #11

Tanggal Dan tempat Rapat:

23 September 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-11/PPA/KPR&GCG/0920

Agenda Rapat:

- Pembahasan Pending Metters Komite; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #12

Tanggal Dan tempat Rapat:

28 September 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-12/PPA/KPR&GCG/0920

Agenda Rapat:

- Pembahasan Hasil Audit DSPI atas PT Bintang Abadi Sampurna; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #13

Tanggal Dan tempat Rapat:

13 Oktober 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-13/PPA/KPR&GCG/0920

Agenda Rapat:

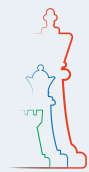
- Pembahasan Mengenai Penggantian Ketua dan Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG;
- Pembahasan Usulan Direksi Mengenai Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT PPA Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Marwanto Harjowiryo
- Krisna Wijaya
- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -



RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #14

Tanggal Dan tempat Rapat:

11 November 2020; Video Conference dengan Aplikasi Microsoft Teams

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-14/PPA/KPR&GCG/1120

Agenda Rapat:

- Pembahasan Laporan Audit DSPI Triwulan III Tahun 2020;
- Pembahasan Laporan Reviu Portofolio Investasi PT PPA (31 Agustus 2020);
- Pembahasan Perkembangan Audit KAP RSM Indonesia Tahun Buku 2020; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

Iko Marita Mustokoweni
 Awal Susmanto
 Malkan Lubis
 Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #15

Tanggal Dan tempat Rapat:

23 November 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-15/PPA/KPR&GCG/1120

Agenda Rapat:

- Evaluasi Kinerja Arus Kas sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Manajemen Risiko;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Marwanto Harjowiryo
- Krisna Wijaya
- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #16

Tanggal Dan tempat Rapat:

24 November 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-16/PPA/KPR&GCG/1120

Agenda Rapat:

- Pembahasan Pelaksanaan Bidang GCG dan Manajemen Risiko; dan
- Lain-lain

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #17

Tanggal Dan tempat Rapat:

16 Desember 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-17/PPA/KPR&GCG/1220

Agenda Rapat:

- Pembahasan Evaluasi Progress Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2020 oleh KAP RSM Indonesia; dan
- Pembahasan Rencana Kerja Divisi Satuan Pengawasan Intern (DSPI) Tahun 202

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #18

Tanggal Dan tempat Rapat:

18 Desember 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-18/PPA/KPR&GCG/1220

Agenda Rapat:

Pembahasan Permintaan Tanggapan Dewan Komisaris atas PT Penas

Peserta Rapat:

- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #19

Tanggal Dan tempat Rapat:

18 Desember 2020; Video Conference dengan Aplikasi Zoom Meeting

Nomor Risalah Rapat:

No. RIS-19/PPA/KPR&GCG/1220

Agenda Rapat:

- Evaluasi Kinerja Arus Kas sampai dengan bulan November 2020;
- Evaluasi Program Investasi Lainnya dalam RKAP 2020; dan
- Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris atas Skema Penyelesaian Kewajiban PT Survai Udara Penai

Peserta Rapat:

- Marwanto Harjowiryo
- Krisna Wijaya
- Iko Marita Mustokoweni
- Awal Susmanto
- Malkan Lubis
- Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:

- -
- -



Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Pemantau Risiko dan GCG, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko dan GCG di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Kebijakan Remunerasi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Sesuai yang tercantum pada Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Komite Pemantau Risiko dan GCG berupa honorarium dengan jumlah 15-20% dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lainnya selain honorarium tersebut.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan dalam bentuk konsep:
 - a. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2019, dan Triwulan I – III Tahun 2020;
 - b. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perseroan tahun 2019, dan Triwulan I – III Tahun 2020.
2. Mengevaluasi Laporan PMN tahun 2015 yang disiapkan oleh Direksi sebelum ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk tahun 2019, Triwulan I – III Tahun 2020.
3. Bersama dengan Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi:
 - a. Melakukan pembahasan Laporan Kegiatan DSPI dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019 pada PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (Persero) – Temuan BPK;
 - b. Melakukan pembahasan mengenai Kebijakan Akuntansi dan Keuangan, serta rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik;
 - c. Melakukan pembahasan Laporan SPI tahun 2019, dan Triwulan I – III Tahun 2020;
 - d. Melakukan pembahasan mengenai Laporan Hasil Audit DSPI atas Kegiatan Investasi pada PT Bintang Abadi Sampurna (PT BAS).
 - e. Menyiapkan kajian atas usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penerapan KBLI.

- f. Sehubungan dengan Kantor Akuntan Publik:
 - Mengikuti Pembahasan *Progress Closing Audit* Laporan Keuangan PT PPA dan Perusahaan Anak Tahun Buku 2019;
 - Menyiapkan surat Dewan Komisaris tentang Penetapan Honorarium (*Fee*) Jasa Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/ PT PPA (Persero) untuk Tahun Buku 2020.
 - g. Melakukan Pembahasan tindak lanjut *Area Of Improvement* (AOI) GCG PT PPA dengan Manajemen Tahun 2019 dan Triwulan I – III Tahun 2020.
 - h. Melakukan Pembahasan Profil Risiko PT PPA dengan Manajemen Tahun 2019 dan Triwulan I – III Tahun 2020.
 - i. Melakukan pembahasan Potensi Bisnis dan Penanganan Debitur Bermasalah dengan manajemen.
 - j. Melakukan pembahasan Surat Dirut PT PPA (Persero) tentang Struktur Organisasi Baru PT PPA (Persero) dengan manajemen.
 - k. Melakukan pembahasan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko dengan manajemen.
 - l. Melakukan Pembahasan dengan manajemen mengenai Permohonan Tanggapan Komisaris terkait penyelesaian kewajiban PT Survei Udara Penas.
4. Menyiapkan telaahan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris:
 - a. Materi-materi yang dibahas di dalam Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020;
 - b. Materi-materi usulan Direksi kepada Dewan Komisaris dan arahan Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain terkait dengan:
 - Saran dan masukan Dewan Komisaris dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja PT PPA.
 - Pendapat dan Saran atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun Buku 2020.
 - Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT PPA (Persero) Menyesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2017.
 - Pendapat dan Saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun Buku 2021.
 - Tanggapan Dewan Komisaris atas Skema Penyelesaian Kewajiban PT Survei Udara Penas (Persero).
 5. Hadir dalam Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 16 (enam belas) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai penugasan.



6. Mengikuti kunjungan Dewan Komisaris:
 - a. PT National Utility Helicopter ("PT NUH") di Balikpapan;
 - b. PT Survai Udara Panas ("Penas") dilakukan secara virtual;
 - c. PT Widodo Makmur Unggas dilakukan secara virtual.
7. Mengikuti kegiatan seminar *online* (webinar):
 - a. *Workshop Executing Business Strategy 2020* tanggal 31 Januari 2020 dengan narasumber Arvan Pradiansyah.
 - b. *Compliance Risk During COVID-19 ABMS* tanggal 21 Juli 2020 yang telah dilaksanakan oleh PT SAI Global selaku penyelenggara bekerja sama dengan SustalN.
 - c. Optimalisasi Penerapan ISO 37001 :2016 Sistem Anti Penyuapan Selama Pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 yang diselenggarakan oleh SustalN, bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia.
 - d. Revitalisasi UMKM, Pembiayaan dan Digitalisasi tanggal 22 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh LPPI.
 - e. Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN tanggal 4 November 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan IFC.
 - f. *Visualizing the New Normal in Bank Leading* tanggal 2 Desember 2020 yang diselenggarakan oleh BARA Risk Forum.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Kinerja Komite Pemantau Risiko & GCG pada periode tahun 2020 tergolong sangat baik dengan pencapaian nilai 98,40.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sehubungan dengan aktivitas PPA (Persero) menerbitkan surat berharga pasar modal (berupa *Medium Term Note*/MTN dan Obligasi Korporasi) yang merupakan Surat Berharga Jangka Menengah dan Surat Berharga Jangka Panjang yang diterbitkan pada tahun 2020, maka PPA diwajibkan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi juga berdasarkan kewajiban dari Kementerian BUMN.

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan	Masa Jabatan
Krisna Wijaya	Ketua	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP. KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-habis masa periode jabatan Dewan Komisaris
Marwanto Harjowiryo	Wakil Ketua	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP. KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-habis masa periode jabatan Dewan Komisaris
Marta Kurniawan	Anggota	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP. KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-13 Oktober 2023
Indra Budi Cahyono	Anggota	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP. KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-13 Oktober 2023
Hendy M. Fakhruddin	Anggota	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP. KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-13 Oktober 2023

Dasar Hukum

POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi juga berdasarkan kewajiban dari Kementerian BUMN.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk pada tahun 2020. Hingga 31 Desember 2020, Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi masih dalam tahap proses penyusunan.

Pelaksanaan Tugas Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan Tugas Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari Komite Audit yang secara khusus mengelola kebijakan nominasi dan remunerasi. Tim tersebut dibentuk dalam rangka memenuhi implementasi GCG namun tetap memperhatikan ketentuan berdasarkan Surat Menteri BUMN yang mengamanatkan hanya 1 (satu) Komite yang wajib dan 1 (satu) Komite tambahan.



Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai bagian tak terpisahkan dalam Komite Audit, Fungsi Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria seleksi pejabat yang pantas/ layak untuk dinominasikan menjadi tenaga eksekutif Perusahaan;
2. Menyusun prosedur nominasi bagi para Pejabat di Perusahaan;
3. Membuat sistem penilaian bagi para Pejabat Perusahaan;
4. Melakukan evaluasi terhadap proses penyetaraan sistem remunerasi/insentif bagi Pejabat dan pegawai Perusahaan.

Program Kerja

Fungsi Nominasi dan Remunerasi memiliki program kerja yang merupakan bagian dari program kerja Komite Audit terkait nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

1. Menelaah dan memantau implementasi nominasi dan remunerasi;
2. Menelaah dan memantau proses rekrutmen dan pengembangan karir;
3. Menelaah rumusan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat *variable* untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan penugasan program kerja bidang nominasi dan remunerasi selama 2020, diantaranya:

1. Memantau pelaksanaan Komite *Talent* dan pembentukan *Talent PPA* (Persero) sebagai bahan analisis Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memantau perubahan susunan Direksi dan dampaknya secara keseluruhan atas perubahan struktur organisasi dan pengaturan terkait perubahan tersebut.
3. Menyiapkan bahan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan dalam bentuk konsep:
4. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris triwulan I, II, III tahun 2020;
5. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perseroan triwulan I, II, III tahun 2020.
6. Mengevaluasi Laporan PMN tahun 2015 yang disiapkan oleh Direksi sebelum ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk triwulan I, II, III tahun 2020.
7. Melakukan evaluasi dan melakukan pembahasan dengan manajemen atas tindak lanjut atas *Area of Improvement* hasil *assessment* GCG Tahun 2019, selanjutnya dilaporkan di dalam rapat Internal Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan melakukan pembahasan dengan manajemen atas *Risk Profile* Perseroan triwulan I, II, III Tahun 2020 yang disampaikan oleh Direksi, selanjutnya

dilaporkan di dalam rapat Internal Dewan Komisaris.

9. Melakukan evaluasi dan melakukan pembahasan dengan manajemen atas Profil Bisnis Perseroan dan Entitas dengan data posisi 31 Maret 2020 yang disampaikan oleh Sekretariat Perusahaan, selanjutnya dilaporkan di dalam rapat Internal Dewan Komisaris.
10. Menyusun konsep surat Dewan Komisaris kepada Direksi tentang Saran dan Masukan Dewan Komisaris dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Perseroan.
11. Mengikuti secara aktif Rapat Internal Dewan Komisaris.
12. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai penugasan Dewan Komisaris.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat Komite Audit sebagai penanggung jawab pelaksana fungsi nominasi dan remunerasi. Informasi lebih jelas terkait pelaksanaan rapat Komite Audit dan frekuensi kehadiran anggota Komite dapat dilihat pada bagian Komite Audit.

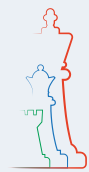
Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam mewujudkan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, calon anggota Direksi Perusahaan telah melalui beberapa rangkaian proses sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham.

Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 mengatur bahwa sumber Bakal Calon Direksi BUMN dapat berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas:
 - a. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak usaha dari BUMN/perusahaan patungan BUMN.
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Sumber Lain yang terdiri dari:
 - a. Pejabat BUMN lain;
 - b. Sumber lainnya.



Direksi diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham. Proses pencalonan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan mekanisme penilaiannya tercantum dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-09A/MBU/02/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut disampaikan bagan pengusulan hingga penetapan Direksi di lingkup Perusahaan.

Skema dan Mekanisme Suksesi Direksi: Pengusulan Hingga Penetapan



Di samping persyaratan formal dan material, Bakal Calon Direksi diwajibkan memenuhi persyaratan lainnya, yaitu:

1. Bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
2. Bukan merupakan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bukan merupakan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
4. Tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMN yang sama.



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, Direksi dibantu oleh organ pendukung yang menjalankan fungsi bisnis serta pengawasan internal. Fungsi bisnis dijalankan oleh Direktur Utama dan Direksi lainnya beserta organ perangkat di bawahnya. Sedangkan fungsi pengawasan internal terhadap berbagai aspek didukung oleh Satuan Pengawasan Internal, Sekretariat Perusahaan, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko, serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

Direksi dan Organ Pendukung



SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki peran dalam memfasilitasi komunikasi antara Organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan dan hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola Perusahaan serta nilai-nilai Perusahaan.

Perusahaan menyadari pentingnya peran Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan, hubungan antar Perusahaan dengan *Stakeholders* serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung peranan tersebut, Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-57/PPA/0919 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.



Pejabat Sekretaris Perusahaan

Perusahaan telah menunjuk Agus Widjaja sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-10/PPA/0221 tanggal 25 Februari 2021.



Agus Widjaja
Kepala Divisi Sekretariat
Perusahaan

Menjabat Sejak
25 Februari 2021

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Bekasi, 25 November 1971

Domisili
Depok, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas Jakarta (1994)

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (Oktober 2020 - Sekarang)
- Kepala Grup Komunikasi Perusahaan (2018 - 2020)
- Kepala Unit *Communication External & Stakeholder - Group Corporate Communication* (2014 - 2018)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

-

Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan

Struktur organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan



Secara struktural, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan berada langsung di bawah Direktur Utama. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. SK-53/PPA/0919 tanggal 11 September 2019 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).



Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Sekretariat Perusahaan sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Jabatan	Jumlah (orang)
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	1
Kepala Grup Urusan Perusahaan	-
Kepala Grup Komunikasi Perusahaan	-
Kepala Unit Administrasi Perusahaan	1
Kepala Unit Komunikasi Perusahaan	1
Kepala Unit PKBL	1
Staff	6
Jumlah	10

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*);
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, dan risalah rapat Direksi serta risalah rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
5. Mengkoordinasikan kegiatan PKBL.

Secara khusus, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas untuk mewujudkan keterbukaan informasi oleh Direksi, serta komunikasi dan hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Peran dan Fungsi Sekretariat Perusahaan

Keterbukaan Informasi Perusahaan	Komunikasi dan Hubungan Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

Dalam hal keterbukaan informasi, Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Triwulanan/Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Selain pengungkapan informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya, antara lain mengenai:

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan;
2. Penilaian terhadap Perusahaan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
3. Riwayat hidup anggota Dewan komisaris, Direksi dan pimpinan senior Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka;
4. Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor Perusahaan;
5. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
7. Informasi material mengenai karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan;
8. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan;
9. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung; dan
10. Pelaksanaan pedoman GCG.

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan prinsip GCG dan materialitas masalah yang dihadapi. Seluruh Organ Perusahaan memastikan bahwa semua informasi dan/atau suatu produk Perusahaan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif kepada segenap pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik milik Perusahaan, antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling menghormati berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan milik Perusahaan meliputi:

1. Karyawan;
2. Instansi Pemerintah terkait;
3. BUMN lain;
4. Kreditur;
5. Rekanan;
6. Masyarakat;
7. Pemangku kepentingan lain yang mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan.



Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Sekretariat Perusahaan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Agung Yulianto	Inhouse Training	Media Handling and Crisis Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Sosialisasi Penerapan GCG Berdasarkan SK-16 Tahun 2012	Jakarta, 22 Juni 2020	PT PPA
	Public Training	Memahami A-Z Good Corporate Governance	Jakarta, 24 September 2020	DPS Consulting
	Public Training	GCG Self Assessment : Skoring Penilaian GCG dan Pendalaman Materi Indikator Berdasarkan SK 16	Jakarta, 25 September 2020	DPS Consulting
	Inhouse Training	Effective Leadership for First Line Managers Batch 2	Jakarta, 1 Oktober 2020	IPDC Training Institute
Agus Widjaja	Inhouse Training	Media Handling and Crisis Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30-31 Januari 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Teams for The Best Team – How to Use Microsoft Teams	Jakarta, 21 April 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Sosialisasi Penerapan GCG Berdasarkan SK-16 Tahun 2012	Jakarta, 22 Juni 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Digital News & Media Creative Content	Jakarta, 10 September 2020	PT Vidio Dot Com
	Inhouse Training	Leadership in the Era Crisis for Senior Managers Batch 1	Jakarta, 7 Oktober 2020	IPDC Training Institute
Prayogo Witjaksono	Inhouse Training	Media Handling and Crisis Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30-31 Januari 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Sosialisasi Penerapan GCG Berdasarkan SK-16 Tahun 2012	Jakarta, 22 Juni 2020	PT PPA
Johana Alva Orchita	Inhouse Training	Media Handling and Crisis Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Public Training	Digital Leadership: Adapting To The New Normal by Prof. Rhenald Kasali	Jakarta, 18 Mei 2020	Mahir Academy
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Sosialisasi Penerapan GCG Berdasarkan SK-16 Tahun 2012	Jakarta, 22 Juni 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Digital News & Media Creative Content	Jakarta, 10 September 2020	PT Vidio Dot Com
	Public Training	GCG Self Assessment : Skoring Penilaian GCG dan Pendalaman Materi Indikator Berdasarkan SK 16	Jakarta, 25 September 2020	DPS Consulting
	Inhouse Training	Effective Leadership for First Line Managers Batch 1	Jakarta, 30 September 2020	IPDC Training Institute



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Nova Arhansyah	Inhouse Training	Media Handling and Crysic Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Workshop Executing Business Strategy	Bogor, 30-31 Januari 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Teams For The Best Team, How To Use Microsoft Teams	Jakarta, 21 April 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Financial, Legal and Commercial Due Dilligence	Jakarta, 30 April 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Obligasi sebagai alternative Sumber Pendanaan	Jakarta, 15 Mei 2020	PT PPA
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Pilih PKPU atau Pailit	Jakarta, 17 Juni 2020	PT PPA
	Public Training, Online	Legal Officer	Bandung, 19-20 Oktober 2020	PT Lambert Performa Indonesia
Nathania Siwalette	Inhouse Training	Media Handling and Crysic Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Sosialisasi Penerapan GCG Berdasarkan SK-16 Tahun 2012	Jakarta, 22 Juni 2020	PT PPA
	Webinar	The Essence of Corporate Governance	Jakarta, 7 Mei 2020	Indonesian Governance Professionals Association (IGPA)
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
Amanda Felicia	Inhouse Training	Media Handling and Crysic Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	Inhouse Training
	Inhouse Training	Sosialisasi Penerapan GCG Dasar SK-16 Tahun	Jakarta, 22 Juni 2020	Inhouse Training
	Inhouse Training	Internal Audit ISO 37001:2016 - SMAP	Jakarta, 6 Juli 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
Gina Agustina	Inhouse Training	Media Handling and Crysic Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Public Training	Membangun Sinergi Komunikasi di Era Disrupsi	Jakarta, 26 Oktober 2020	Forum Humas BUMN
Indira	Inhouse Training	Media Handling and Crysic Communication	Bandung, 3-4 Januari 2020	PT Kaya Tjokro Beriman
	Inhouse Training	Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19	Jakarta, 10 Juni 2020	Bahar Law Firm
	Inhouse Training	Impressive Presentation Skill	Jakarta, 17 Juli 2020	PERFORMAX
	Public Training	Digital Marketing	Jakarta, 2 September 2020	PT Pakar Anugerah Gemilang
	Public Training	Workshop Social Media Marketing	Jakarta, 12 September 2020	PT Pakar Anugerah Gemilang
	Public Training	Membangun Sinergi Komunikasi di Era Disrupsi	Jakarta, 26 Oktober 2020	Forum Humas BUMN

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Perusahaan Tahun 2020

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

No.	Kegiatan	RKAP 2020	Realisasi 2020
1.	Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi yang dilaksanakan sekurangkurangnya sekali dalam setiap bulan	12	73
2.	Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris & Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan	12	12
3.	Membuat Risalah Rapat Direksi	12	73
4.	Mengelola Dokumen Perusahaan: Penatausahaan dokumen setiap kali dokumen diterima	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan
5.	Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi	2 Keputusan RUPS dan 12 Risalah Rapat Direksi	2 Keputusan RUPS dan 73 Risalah Rapat Direksi
6.	Membuat Laporan Manajemen: • Triwulan • Tahunan	- Laporan Manajemen Triwulan 1 Laporan Manajemen Tahunan	- Laporan Manjemen Triwulan I, II, III 1 Laporan Manajemen Tahunan



No.	Kegiatan	RKAP 2020	Realisasi 2020
7.	Membuat Laporan Tahunan	Penyusunan Laporan Tahunan	Laporan Tahunan tahun 2020
8.	Melaksanakan Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru setiap ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru	Setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru	3 anggota Direksi dan 2 Dewan Komisaris baru
9.	Menyalurkan dana Program Kemitraan	Penyaluran diatas 80% dari dana tersedia	Realisasi penyaluran dana PK sebesar 97,28%
10.	Monitoring kolektibilitas Pinjaman Program kemitraan	Kolektibilitas Pinjaman diatas 80% dari dana yang disalurkan	Realisasi kolektibilitas penyaluran pinjaman sebesar 99,00%
11.	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan diatas 80% dari dana tersedia	Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan sebesar 100%
12.	Media Monitoring	Rutin dilakukan harian	Rutin dilakukan harian
13.	News Analysis	Rutin dilakukan bulanan	Rutin dilakukan bulanan
14.	Publikasi Berita PPA	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan
15.	Transparansi Informasi: website Perusahaan & Portal BUMN	Update dan Maintenance Data	Update dan Maintenance Data
16.	Transparansi Informasi: pengelolaan email corpsec@ptppa.com	Rutin dilakukan harian	Rutin dilakukan harian
17.	Dukungan pada kegiatan acara peringatan hari besar nasional	Disesuaikan dengan program acara Pemerintah	Pelaksanaan: • Upacara HUT RI ke-75 • Upacara Kesaktian Pancasila • Upacara Hari Pahlawan
18.	Company Visit	Disesuaikan dengan kegiatan Perusahaan	
19.	Penyusunan Infrastruktur Branding	Pelaksanaan distribusi kalender 2020 Perseroan kepada stakeholder eksternal dan media.	Selesai
20.	Dukungan kegiatan Perusahaan	Disesuaikan dengan kebutuhan	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan
21.	Protokol Direksi	-	Dilaksanakan sesuai kebutuhan

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus diberikan oleh Direksi dengan berbagai strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada publik. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Perseroan. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dengan KPI Sekretaris Perusahaan.

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan bagian dari pengendalian internal dan sebagai mitra strategi (*strategic partner*) yang profesional serta terpercaya bagi Perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), melalui auditor yang kompeten dan independen untuk mencapai tujuan Perusahaan. Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh Kepala Divisi atau *General Manager* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Satuan Pengawasan Intern

Merujuk pada Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kepala Divisi SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pejabat Satuan Pengawasan Intern

Perusahaan telah menunjuk Wahyu Widodo sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-106/PPA/1220 tanggal 10 Desember 2020.

Wahyu Widodo
Kepala Divisi
Satuan Pengawasan Intern



Menjabat Sejak
10 Desember 2020

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran tempat, 8 Desember 1974

Domisili
Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2001)

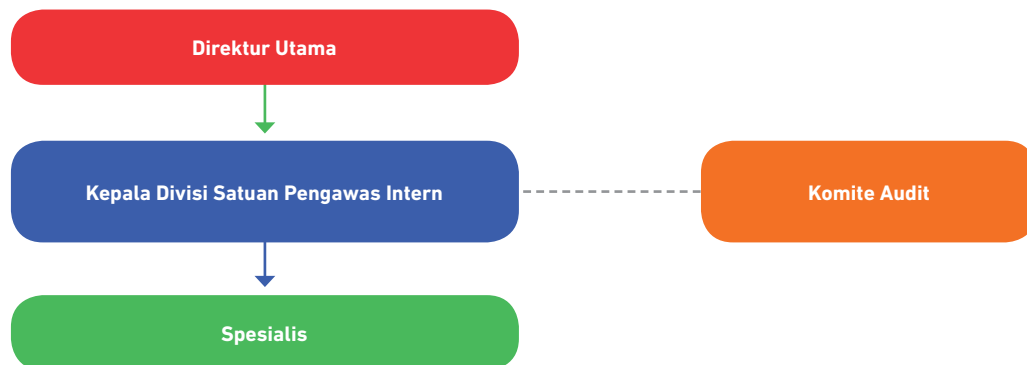
Bergabung di Perusahaan
8 Juni 2010

Pengalaman Kerja
Kepala Grup Pajak dan Akuntansi PT PPA (Mei 2018 – 2020), Kepala Unit Akuntansi PT PPA (Juni 2010 – Mei 2018), Auditor BPKP (Januari 2002– Mei 2010)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku
Certified Accountant

Struktur Organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-84/PPA/1120 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), struktur organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Secara struktural, Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern berada langsung di bawah Direktur Utama. Di setiap jenjangnya, setiap Auditor mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan penugasan audit internal mengacu pada panduan profesi dan rencana kegiatan yang telah disusun.



Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Satuan Pengawasan Intern sebanyak 5 (lima) orang.

Jabatan	Jumlah (orang)
Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern	1
Kepala Grup/Spesialis Madya	-
Kepala Unit/Spesialis	1
Junior Spesialis	3
Staf	-
Jumlah	5

Piagam Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern Perusahaan memiliki Piagam Audit Internal atau *Internal Audit Charter* yang merupakan dokumen formal Perusahaan mengenai keberadaan dan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi atas fungsi *Audit Internal*. Piagam Audit Internal menjelaskan mengenai Visi, Misi, Ruang Lingkup, Struktur dan Kedudukan, Tanggung jawab, Wewenang dan Kode Etik, serta Hubungan Kerja dari Audit Internal.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga perlu ditinjau secara berkala. Di tahun 2019, telah dilakukan perubahan atas Piagam Audit Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan No. SK-1/KEP.KOM/PPA/I/2020 dan SK-9/PPA/0120 tentang Piagam Audit Internal, sehingga Piagam Audit Internal yang ditetapkan tanggal 22 Juni 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Persyaratan Menjadi Auditor Internal

Perusahaan telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk menjadi auditor Perusahaan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit, Piagam Internal Audit mengharuskan auditor memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu:

1. Memiliki integritas serta perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
6. Mematuhi kode etik Auditor Internal;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau penetapan, atau putusan pengadilan, atau kewajiban profesi;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesi secara terus-menerus.

Sertifikasi Profesi

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi auditor, sertifikasi dibutuhkan untuk menunjukan kualitas auditor yang memadai dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Adapun karyawan SPI yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Nama Sertifikat Profesi	Lembaga Penerbit
1.	Wahyu Widodo	Auditor Ahli <i>Chartered Accountant (CA)</i>	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
2.	Erwin Adiyatno	Auditor Ahli <i>Certified Management Accountant (CMA)</i> <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>The Institute of Certified Management Accountant (ICMA)</i> Australia Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)



No.	Nama	Nama Sertifikat Profesi	Lembaga Penerbit
3.	Dady Atma Priyagi	Auditor Ahli Certified Professional Management Accountant (CPMA) Associate Certified Public Accountant (ACPA) Certified Risk Management Professional (CRMO) ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMII) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Chartered Professional Accountant Coordinating Committee
4.	Hidayah Widyaningrum	Auditor Ahli	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
5.	Fajar Setianto	Auditor Ahli Chartered Accountant (CA)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Divisi Satuan Pengawasan Intern

Divisi SPI berperan melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Divisi SPI sesuai Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja rencana audit internal berbasis risiko sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun;
2. Menyampaikan rencana audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan review dan persetujuan;
3. Menguji, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
4. Melakukan audit/review serta penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, manajemen risiko, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit/review dengan tujuan tertentu pada satuan kerja dan/atau kegiatan, sesuai dengan rencana audit internal tahunan;
6. Memberikan informasi yang objektif serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang diperlukan tentang kegiatan yang diaudit kepada *stakeholder* terkait;
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi yang telah diberikan;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
10. Melakukan kegiatan konsultasi (*consulting*) atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen;
11. Melakukan tugas lain yang dipandang perlu oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama Perusahaan dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.
13. Baik dalam penugasan audit maupun konsultasi, Auditor Internal hanya bertanggung jawab pada rekomendasi dan/atau masukan serta opini dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur yang dilakukan secara memadai dari penugasan tersebut.

Pengembangan Kompetensi Auditor Internal

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Auditor Internal, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan baik secara internal maupun yang diadakan oleh lembaga eksternal.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh auditor internal sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Wahyu Widodo, Erwin Adiyatno, Dady Atma Priyagi, Hidayah Widyaningrum, Fajar Setianto	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	Aurora Bisnis Internasional
Wahyu Widodo, Erwin Adiyatno, Dady Atma Priyagi, Fajar Setianto	Internal Audit ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Suap	Jakarta, 6 Juli 2020	Aurora Bisnis Internasional



Nama	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Erwin Adiyatno	<i>Effective Leadership for First Line Managers Batch 1</i>	Jakarta, 30 September 2020	<i>Inhouse Training</i>
Erwin Adiyatno	<i>Impressive Presentation Skill</i>	Jakarta, 17 Juli 2020	<i>Inhouse Training</i>
Dady Atma Priyagi	<i>Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19</i>	Jakarta, 10 Juni 2020	ICMA
Dady Atma Priyagi, Fajar Setianto	Sosialisasi Penerapan GCG Berdasarkan SK-16 Tahun 2012	Jakarta, 22 Juni 2020	<i>Inhouse Training</i>
Hidayah Widyaningrum	<i>Financial Auditing for Internal Auditor</i>	Jakarta, 23-24 November 2020	IIA
Erwin Adiyatno	<i>Digital Disruption Online Program</i>	Jakarta, 6 November 2020	IMD – FEB BUMN
Erwin Adiyatno, Dady Atma Priyagi	Pelatihan Anti Korupsi	Jakarta, 9-12 November 2020	ACLK KPK
Wahyu Widodo, Erwin Adiyatno	<i>Workshop Executive Business Strategy</i>	Bogor, 30-31 Januari 2020	<i>Inhouse Training</i>
Erwin Adiyatno	<i>Teams for The Best Team - How to Use Microsoft Teams</i>	Jakarta, 21 April 2020	<i>Inhouse Training</i>

Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern Tahun 2020

Selama tahun 2020, SPI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan SPI, antara lain:

1. Layanan *assurance* sebanyak 11 (sebelas) penugasan;
2. Layanan *consulting* sesuai dengan permintaan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi, permintaan dari Unit Bisnis atau Unit Kerja lainnya, serta penawaran yang dilakukan oleh SPI;
3. Kegiatan pendampingan/*counterpart* atas audit/kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asesor GCG, dan Pihak terkait lainnya;
4. Manajemen SPI yang meliputi pemantauan tindak lanjut rekomendasi Auditor (SPI, BPK, KAP), administrasi penugasan, pemutakhiran rencana, serta pelaporan kegiatan (Perencanaan Tahunan/RKAP dan Laporan Tahunan), *meeting* dengan Komite Audit, serta pengembangan kapasitas SDM SPI.

Realisasi Penugasan Audit/Reviu

Dari 11 (sebelas) penugasan *assurance* yang direncanakan, selama tahun 2020 SPI telah melakukan penugasan *assurance* sebanyak 8 (delapan) penugasan dari RKAP 2020, sebanyak 5 (lima) penugasan non-RKAP 2020, dan sebanyak 2 (dua) penugasan yang merupakan penyelesaian penugasan pada RKAP 2019. Dengan demikian, total penugasan *assurance* yang dilaksanakan SPI selama tahun 2020 adalah sebanyak 15 (lima belas) penugasan atau mencapai 136,36% dari RKAP 2020. Adapun rincian penugasan *assurance* selama tahun 2020, sebagai berikut:

Penugasan dari RKAP 2020

1. Audit atas Kegiatan Investasi pada PT Lintas Samudra Sejahtera;
2. Audit atas Kegiatan Investasi pada PT CDM Swarnadipa;
3. Audit atas Laporan Keuangan PT PPA Kapital dan Entitas Anak Perusahaan Periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
4. Audit atas Kegiatan Investasi pada PT Dutacipta Pakarperkasa;
5. Audit Operasional atas Kerja Sama PPA – Nindya (Proyek Perumahan Cempaka Hijau Bandung);
6. Audit atas Kegiatan Investasi pada PT Bintang Abadi Sempurna;
7. Reviu atas Portofolio Investasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) per 31 Agustus 2020;
8. Reviu atas Kegiatan Operasional PT Rejeki Intilogam Jaya (PT RILJ).

Penugasan non-RKAP 2020

1. Audit Keuangan, Operasional dan Sistem pada PT Nindya Beton (Audit Bersama dengan SPI PT Nindya Karya);
2. Telaahan atas Surat Pengaduan Masyarakat terhadap Pabrik Milik BUMN (PT Magnesium Gosari International) yang Tidak Berizin dan Mencemari Lingkungan;
3. Audit Investigasi atas Kegiatan Investasi pada PT CDM Swarnadipa;
4. Verifikasi atas Penggunaan Modal Disetor PT Magnesium Gosari Internasional Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI;
5. Audit Khusus atas Kegiatan Investasi PT PPA Kapital pada PT Asia Kaolin Raya.



Penyelesaian RKAP 2019

1. Audit atas Kegiatan Operasional pada PT Magnesium Gosari Internasional Periode Tanggal 29 Agustus 2018 sampai 30 November 2019;
2. Audit atas Kegiatan Operasional pada PT Duta Mentari Raya Periode Tanggal 1 Januari 2018 sampai 30 Oktober 2019.
3. Terdapat perubahan obyek audit atas rencana kegiatan audit sesuai dengan Revisi RKAP 2020 sebanyak 4 (empat) penugasan *assurance* dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini yang lebih prioritas.

Realisasi Penugasan Consulting

Selama tahun 2020, SPI tidak melaksanakan penugasan *consulting* dalam bentuk formal dikarenakan tidak terdapat permintaan konsultasi dari unit-unit kerja. Kegiatan *consulting* yang dilakukan terbatas pada diskusi-diskusi dengan unit-unit kerja yang dilakukan secara non formal.

Realisasi Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Divisi SPI adalah:

1. Sebagai *observer* dalam kegiatan pengadaan;
2. Sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
3. Rapat-rapat berkala dengan Komite Audit;
4. Pendamping/*Counterpart* atas Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI;
5. Pendamping/*Counterpart* atas Kegiatan Audit Laporan Keuangan PT PPA (Persero) Konsolidasian dan Entitas Anak Tahun Buku 2019 dan 2020 oleh KAP RSM Indonesia;
6. Sebagai Ketua dan Anggota Tim Penerapan dan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal (BPK RI, Kantor Akuntan Publik), maupun tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh SPI.

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN KINERJA

Pembentukan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja bertujuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perumusan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), mengevaluasi implementasi program-program strategis, melakukan analisa dan kajian perkembangan usaha untuk mencapai target perusahaan serta manajemen kinerja perusahaan dan entitas anak.

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-23/PPA/0418 tanggal 4 April 2018 tentang Penerimaan dan Pengangkatan Sdri. Pramuwati sebagai Karyawan tetap.

Pramuwati
Kepala Divisi Perencanaan
Strategis Perusahaan dan
Manajemen Kinerja



Menjabat Sejak
9 April 2018

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran Semarang, 26 April 1974

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Diponegoro (1997)

Bergabung di Perusahaan
9 April 2018

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, 2018-sekarang, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
- *Vice President Large Commercial*, 2017-2018, PT Bank Mandiri, Tbk (Persero)
- *Regional Risk Head Kanwil IV*, 2016-2017, PT Bank Mandiri, Tbk (Persero)
- *Vice President Corporate Risk Group*, 2013-2016, PT Bank Mandiri, Tbk (Persero)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

-



Hingga akhir tahun 2020, Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja dilaksanakan oleh 6 orang dengan posisi dan jabatan sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Kepala Divisi	1
Kepala Unit	4
Senior Officer	1
Jumlah	6 orang

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja

Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perumusan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), mengevaluasi implementasi program-program

strategis, melakukan analisa dan kajian perkembangan usaha untuk mencapai target Perusahaan serta manajemen kinerja Perusahaan dan entitas anak.

Pengembangan Kompetensi Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Pramuwati	Eksternal	<i>Restructuring as a Way to Bounce Back After COVID-19</i>	Jakarta, 20 Juni 2020	<i>Institute of Certified Manage Acc</i>
Andika Gunawan	Eksternal	Internal Audit ISO 37001:2016	Jakarta, 6 Juli 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
Ricky Firmansyah	Eksternal	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional

Notes: pada bagian ini, pelatihan mencakup kepada seluruh karyawan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja.

Pelaksanaan Tugas Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja Tahun 2020

Selama tahun 2020, Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Menyusun RJPP Perusahaan 2019-2023;
2. Menyusun *roadmap* Perusahaan 2019-2023;
3. Berfungsi sebagai PMO dalam rangka pembentukan *Holding* PPA;
4. Koordinator penyusunan KPKU
5. Melakukan supervisi terhadap entitas anak PPA;
6. Melakukan *monitoring* pencapaian kinerja Perusahaan dan anak usaha Perusahaan baik secara bulanan maupun triwulanan;
7. Melakukan kajian.

Penilaian kinerja oleh Direksi

Penilaian kinerja oleh Direksi dilakukan atas dasar KPI yang telah ditetapkan.

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Direksi membentuk Divisi Manajemen Risiko dalam rangka mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko secara korporasi. Pembentukan Divisi Manajemen Risiko yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada SEVP2 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-84/PPA/1120 tanggal 6 November 2020.

Pedoman Manajemen Risiko

Perusahaan telah melengkapi penerapan manajemen risiko melalui penetapan pedoman manajemen risiko, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-14/PPA/0320 tanggal 18 Maret 2020. Pedoman Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perusahaan yang mengacu pada standar ISO 31000 : 2018 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko.



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Divisi Manajemen Risiko

Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal Perusahaan.

Pejabat Divisi Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0415 tanggal 27 April 2015, Perusahaan telah menunjuk Sarda Yunus sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko.

Sarda Yunus
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Menjabat sejak 1 Mei 2015



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Binjai, 16 November 1971

Domisili

Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Bergabung di Perusahaan

1 Juni 2004

Pendidikan

Sarjana Teknik, Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, 1995

Pengalaman Kerja

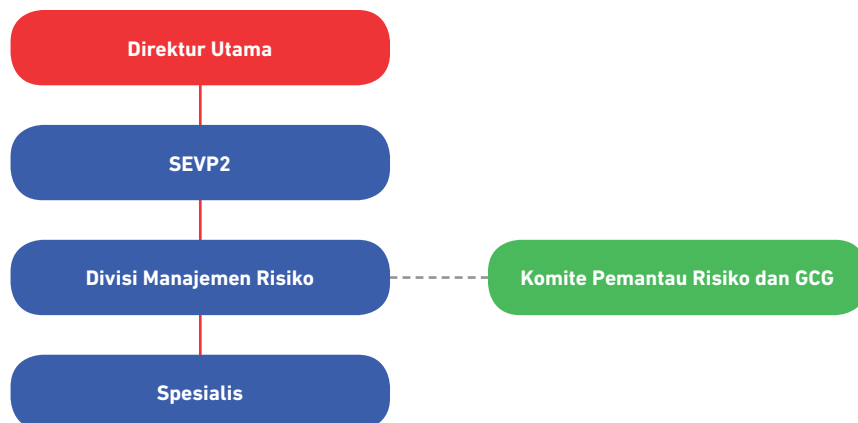
- Kepala Divisi Manajemen Risiko (2015-saat ini)
- Kepala Grup Manajemen Risiko (2009-2015)
- Kepala Unit Divisi Manajemen Risiko (2005-2009)
- Staf Divisi Manajemen Risiko pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2005)
- Kepala Tim Manajemen Risiko pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2004)
- Auditor Internal pada PT Bank Niaga Tbk (1997-1999)

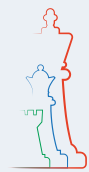
Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Pemegang sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko sejak tahun 2014

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko

Agar dapat menggambarkan cakupan fungsi Divisi Manajemen Risiko dan koordinasi antar organ, berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko per 31 Desember 2020.





Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko sebanyak 5 orang.

Jabatan	Jumlah (orang)
Kepala Divisi Manajemen Risiko	1
Spesialis (setara Kepala Grup)	1
Spesialis (setara Kepala Unit)	1
Spesialis Junior	2
Jumlah	5

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Dalam rangka terus meningkatkan mutu dan kompetensi pengelolaan risiko, Perusahaan melakukan program pengembangan kompetensi manajemen risiko secara sistematis dan berjenjang. Daftar sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jenis dan Level Sertifikasi	Jumlah Karyawan Divisi yang Memiliki	Komposisi Terhadap Jumlah Karyawan Divisi
<i>Certified Risk Management Professional</i> ("CRMP")	2	40%
<i>Certified Risk Management Officer</i> ("CRMO")	1	20%
Jumlah	3	60%

Jumlah karyawan Divisi Manajemen Risiko yang memiliki sertifikasi profesi manajemen risiko sebanyak 3 orang, atau 60% dari jumlah keseluruhan karyawan Divisi Manajemen Risiko yang sebanyak 5 orang. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan level sertifikasi karyawan Divisi Manajemen Risiko, yang diharapkan mampu memberikan imbas positif terhadap proses pengelolaan risiko di lingkup Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko dalam mendorong terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun/mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan utama Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi efektivitas penerapan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Perusahaan;
3. Memfasilitasi penyusunan laporan Profil Risiko pada satuan kerja Pemilik Risiko (*Risk Owner*);
4. Melakukan pelaporan Profil Risiko Perusahaan sebagai *early warning signal* kepada Direksi;
5. Memberikan layanan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan;
6. Melaksanakan *review* risiko atas kegiatan Perusahaan.

Program Pengembangan Kompetensi Divisi Manajemen Risiko

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Divisi Manajemen Risiko, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Divisi Manajemen Risiko sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

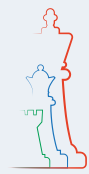


Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Sarda Yunus	Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
	Workshop	Leadership in the Era of Crisis for Senior Managers	Jakarta, 7 Oktober 2020	Indonesia Professional Development Center
Johny Hasudungan Marpaung	Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
		Certified Risk Management Profesional (CRMP)	Jakarta, 24 - 27 Agustus 2020	Risk Advisory & Performance
Edo Nugraha	Training	Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
		Internal Audit ISO 37001:2016 -SMAP	Jakarta, 6 Juli 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
Martina Trisiskawaty	Training	Risk Key Risk Indicator	Bandung, 26-28 Februari 2020	CRMS Indonesia
		Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
		Internal Audit ISO 37001:2016 -SMAP	Jakarta, 6 Juli 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
Devina Ardelia	Training	Financial, Legal dan Commercial Due Dilligigance	Jakarta, 30 April 2020	PPA
		Awareness ISO 37001:2016	Jakarta, 4 Juni 2020	PT Aurora Bisnis Internasional
		Financial Statement Analysis Basic	Jakarta, 2-6 Oktober 2020	PPM Manajemen

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020, Divisi Manajemen Risiko berhasil melaksanakan seluruh program kerja yang ditetapkan. Kegiatan/program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan revisi atas 13 kebijakan;
2. Melakukan penyusunan 1 SOP;
3. Melakukan *review* dan memberi masukan atas 15 kebijakan yang disusun oleh satuan kerja di luar Divisi Manajemen Risiko;
4. Melakukan evaluasi atas 3 kebijakan dalam rangka menilai kesesuaian Kebijakan yang berlaku dengan perkembangan kegiatan Perseroan;
5. Melakukan *review* risiko atas 84 dokumen usulan kegiatan Perusahaan;
6. Memfasilitasi penyusunan Profil Risiko pada *risk owner* dan menyusun Laporan Profil Risiko Perusahaan secara triwulanan;
7. Memberi masukan dan/atau pendapat terkait manajemen risiko kepada satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan;
8. Menjadi anggota Tim Evaluasi untuk 1 pengadaan barang dan 26 pengadaan jasa.



AUDIT INDEPENDEN/AKUNTAN PUBLIK

Akuntan publik adalah organ eksternal Perusahaan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Anggota *Holding* terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Auditor Eksternal tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan terhadap SAK di Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan;
4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen;
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait;
6. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Hubungan auditor eksternal dengan organ internal Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan Auditor Eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan.



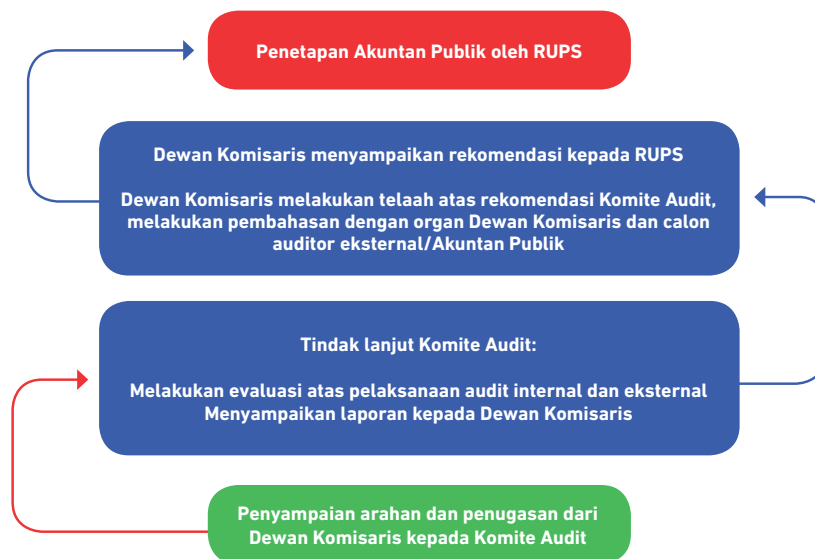
MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa;
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan;
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/ imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan perusahaan;
4. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik



AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2020

Perusahaan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020. Penunjukan ini berdasarkan surat No. S-40/PPA/KOM/0921 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Honorarium Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA untuk Tahun Buku 2020. Perusahaan menunjuk Auditor Eksternal yang tidak memiliki benturan kepentingan untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan.

Akuntan Publik Tahun 2020

Kantor Akuntan Publik	: Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)
Akuntan	: Benny Andria
Tahun Audit	: Tahun Buku 2020
Periode Penugasan	: Desember 2020-Maret 2021
Jasa	: Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Jasa Lainnya	: Audit Laporan Keuangan PKBL; Audit Kepatuhan; Audit Hasil Evaluasi Kinerja.
Biaya	: Rp682.000.000



PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dilakukan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit fee atas dasar kewajaran. Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit, melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, serta memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK

Komite Audit berkoordinasi dengan Divisi SPI Perusahaan melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja, baik dari segi keuangan maupun operasional. Perusahaan berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan di tahun berikutnya.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (*Partner*) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut.

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan daftar Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2015 hingga 2020 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Publik	Lingkup Audit	Opini	Biaya	Izin AP
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	Audit atas Laporan Keuangan; Audit Laporan Keuangan PKBL; Audit Kepatuhan; Audit Hasil Evaluasi Kinerja.	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp682.000.000	AP.0181
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	Audit atas Laporan Keuangan; Audit Laporan Keuangan PKBL; Audit Kepatuhan; Audit Hasil Evaluasi Kinerja.	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp594.000.000	AP.0181
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Saptoto Agustomo	Audit atas Laporan Keuangan; Audit Laporan Keuangan PKBL; Audit Kepatuhan; Audit Hasil Evaluasi Kinerja.	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp500.000.000	AP.0499
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo	Audit atas Laporan Keuangan; Audit Laporan Keuangan PKBL; Audit Kepatuhan; Audit Hasil Evaluasi Kinerja.	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp528.000.000	AP.0499
2016	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Saptoto Agustomo	Audit atas Laporan Keuangan; Audit Laporan Keuangan PKBL; Audit Kepatuhan; Audit Hasil Evaluasi Kinerja.	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp522.500.000	AP.0499
2015	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Saptoto Agustomo	Audit atas Laporan Keuangan; Audit Laporan Keuangan PKBL; Audit Kepatuhan; Audit Hasil Evaluasi Kinerja.	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp709.500.000	AP.0499



MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan salah satu aspek penting bagi Perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif, efisien dan konsisten sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Perusahaan senantiasa menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan serta prosedur untuk mendukung kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan efektivitas strategi manajemen risiko agar tetap sejalan dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Sebagai salah satu bentuk mandat dan komitmen Perusahaan dalam penerapan manajemen risiko secara luas dan terintegrasi, serta dalam rangka menunjang kepastian pencapaian tujuan dan rencana jangka panjang, Perusahaan telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-62/PPA/1109 tanggal 16 November 2009.

Pada tahun 2015, Perusahaan telah melakukan revisi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0915 tanggal 17 September 2015. Selanjutnya pada tahun 2020, Kebijakan Manajemen Risiko telah dievaluasi dan diperbaharui kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-14/PPA/0320 tanggal 18 Maret 2020. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perusahaan yang mengacu pada standar ISO 31000 : 2018 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko.

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko, penerapan manajemen risiko di Perusahaan dilakukan pada:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
2. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/transaksi yang akan dilaksanakan;
3. Pembuatan laporan profil risiko;
4. Penyusunan/pengembangan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Tujuan dari penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan adalah:

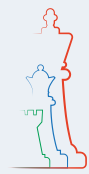
1. Memberikan perlindungan dan kesinambungan kegiatan Perusahaan dari kemungkinan timbulnya kejadian dengan tingkat risiko signifikan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan Perusahaan yang diakibatkan dari berbagai aktivitas bisnisnya serta menjaga tingkat risiko pada level yang dapat diterima oleh Perusahaan;
2. Menyediakan *early warning signal* bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik;
3. Membantu manajemen dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan guna memberikan nilai tambah (*operational excellence*);
4. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja Perusahaan;
5. Mendorong setiap insan Perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko Perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai Perusahaan demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama;
6. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Perusahaan sesuai dengan filosofi manajemen risiko yaitu manajemen risiko bersifat melekat pada setiap Karyawan dan Direksi Perusahaan dan harus diintegrasikan ke dalam proses kerja.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Komite Pemantau Risiko dan GCG yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris;
4. Divisi Manajemen Risiko;
5. *Risk Owner* (seluruh satuan kerja bisnis dan *support*);
6. Divisi Satuan Pengawasan Intern.



KEBERADAAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengkordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko yang independen. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-53/919 tanggal 11 September 2019, Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha, Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi dan menempatkan Divisi Manajemen Risiko dibawah *Senior Executive Vice President* 2 (SEVP2) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-84/PPA/1120 tanggal 6 November 2020.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyusun dan memastikan tersedianya Kebijakan dan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan dan penerapan manajemen risiko.
2. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan, antara lain dengan cara:
 - a. Melakukan kajian risiko atas sasaran strategis Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. Menerapkan pelaksanaan kajian risiko atas setiap usulan kegiatan/proyek yang akan dilakukan oleh Perusahaan;
 - c. Melakukan asesmen risiko secara berkala dan menyusun laporan profil risiko Perusahaan.
3. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan.

Selain itu, Direksi mengkomunikasikan secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perusahaan tentang pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif dalam rangka memastikan pencapaian tujuan Perusahaan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PPA

Perusahaan mengembangkan sistem manajemen risiko yang sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Perusahaan serta sesuai dengan standar manajemen risiko yang berlaku umum.

Secara umum sistem manajemen risiko tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Manajemen Risiko
Prinsip manajemen risiko merupakan landasan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan, di mana prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Manajemen risiko merupakan bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi;
- b. Manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
- c. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaanya (*customized*);
- d. Manajemen risiko bersifat inklusif;
- e. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan;
- f. Manajemen risiko didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. Manajemen risiko harus mempertimbangkan faktor budaya dan manusia;
- h. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan secara berkelanjutan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

a. Mandat dan Komitmen.

Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara efektif, manajemen melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mensosialisasikan/mengkomunikasikan akan pentingnya manajemen risiko bagi Perusahaan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko;
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran Perusahaan;
- Memastikan bahwa tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko

b. Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Hal-hal yang diperhatikan dalam merencanakan kerangka kerja manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang secara jelas menyatakan komitmen Manajemen terhadap penerapan manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai;
- Mengintegrasikan proses manajemen risiko sebagai bagian dari seluruh praktik manajemen serta proses bisnis Perusahaan. Proses Manajemen Risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis dan proses manajemen perubahan;
- Pengembangan proses Manajemen Risiko dan memastikan kecukupan tindakan pengendalian risiko;
- Pemenuhan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko baik sumber daya manusia, proses dan prosedur, sistem dan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko;
- Penyusunan mekanisme pelaporan dan komunikasi dalam pelaksanaan manajemen risiko.



- c. Penerapan Manajemen Risiko
Dalam menerapkan manajemen risiko, manajemen memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan proses manajemen risiko pada setiap kegiatan Perusahaan;
 - Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan;
 - Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para *stakeholder* terkait.
- d. Pemantauan dan Peninjauan Ulang
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif dan mendukung kinerja Perusahaan, maka manajemen:
 - Menetapkan ukuran kinerja;
 - Melakukan *review* atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan perkembangan kegiatan Perusahaan;
 - Melakukan tindak lanjut atas hasil kaji ulang.
- e. Perbaikan Kerangka Kerja Secara Berkelanjutan
Diperlukan sebagai bagian dari proses peningkatan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan antara lain perubahan struktur organisasi, ketentuan perundang-undangan baru yang terkait dengan kegiatan Perusahaan, penetapan strategi baru atau perubahan strategi Perusahaan.

Selain itu, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan penilaian risiko secara berkala atas kegiatan utama Perusahaan melalui pendekatan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA);
2. *Review* atas Kebijakan dan SOP untuk memastikan bahwa Perusahaan senantiasa memiliki Kebijakan dan SOP terkini sesuai dengan perkembangan kegiatan Perusahaan;
3. Rapat berkala antara Divisi Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, maka Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan asesmen risiko (*self assessment*);
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan;

3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif;
4. Ketersediaan sumber daya;
5. Risiko-risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja, dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan;

Perusahaan menyadari bahwa penerapan manajemen risiko bersifat dinamis sesuai dengan tantangan Perusahaan kedepan, sehingga akan terus dikembangkan sesuai *road map* pengembangan Manajemen Risiko yang telah disusun.

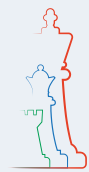
PROFIL RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

Sejalan dengan komitmen Direksi untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek yang akan dijalankan bagi kelangsungan Perusahaan.

Dalam rangka melindungi dan memberi nilai tambah serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan, penerapan manajemen risiko di Perusahaan antara lain dilakukan pada aktivitas sebagai berikut:

1. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/proyek
Dalam menyusun suatu usulan kegiatan/proyek, satuan kerja pengusul harus melakukan kajian risiko yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat timbul dari kegiatan yang diusulkan serta mitigasi atas risiko tersebut. Selanjutnya Divisi Manajemen Risiko akan melakukan *review* atas kecukupan kajian risiko yang dilakukan oleh satuan kerja pengusul sebagai masukan/pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
Secara berkala setiap satuan kerja/*risk owner* melakukan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka menyusun profil risiko dari satuan kerjanya. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko oleh *risk owner* akan difasilitasi oleh Divisi Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan penilaian risiko tersebut, Perusahaan menggunakan pendekatan RCSA.

Identifikasi risiko untuk tahun 2020 dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pencapaian RKAP 2020. Berdasarkan kajian yang dilakukan selama periode tahun 2020, risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan terbagi ke dalam beberapa jenis risiko yaitu risiko strategis, risiko bisnis, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko operasional.



Risiko Strategis #01

Potensi Penyebab:

Pemilihan target investasi yang tidak tepat sehingga Perusahaan tidak dapat melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Upaya Pengelolaan Risiko:

Melakukan uji tuntas dan kajian kelayakan yang cukup (antara lain aspek komersial, aspek hukum) atas target investasi dalam penyusunan rencana bisnis dan membuat keputusan investasi;
Menyusun Pedoman Investasi.

Risiko Strategis #02

Potensi Penyebab:

Ketidaktepatan pengambilan strategi penanganan BUMN Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R).

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Pelaksanaan kajian secara menyeluruh antara lain dari aspek keuangan, aspek hukum, aspek operasional dan aspek lainnya untuk mendapat gambaran menyeluruh dari BUMN terkait, termasuk permasalahan yang dihadapi BUMN;
- Analisa industri untuk mendukung analisa prospek bisnis BUMN ke depan termasuk analisa atas prediksi kondisi perekonomian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penetapan strategi/opsi penanganan R/R BUMN dan rencana bisnisnya;
- Memperoleh dukungan dan kewenangan dari Kementerian BUMN dalam rangka pengelolaan BUMN R/R.

Risiko Strategis #03

Potensi Penyebab:

Tidak tercapainya target kinerja sebagian Entitas Anak.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Pemantauan kinerja Anak Perusahaan melalui Laporan Perkembangan Proyek yang dibiayai Anak Perusahaan;
- Pertemuan dengan Anak Perusahaan secara triwulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja;
- Memberi masukan kepada Anak Perusahaan untuk melakukan pengawasan atas proyek-proyek yang dibiayai;
- Anak Perusahaan dapat menempatkan wakilnya di dalam proyek-proyek yang dibiayai.

Risiko Bisnis

Potensi Penyebab:

Potensi ketidaktercapaian target pendapatan yang ditetapkan dalam RKAP.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Menyusun rencana kerja dan *pipeline* untuk mencapai target pendapatan;
- Merencanakan dan mempersiapkan sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang optimal;
- Mencari target investasi/*advisory* pengganti apabila investasi/*advisory* yang direncanakan tidak dapat direalisasikan;
- Menyusun skema transaksi yang sesuai dengan sumber pendanaan.

Risiko Kredit #01

Potensi Penyebab:

Tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan R/R BUMN kepada beberapa BUMN ("Debitur") yang antara lain dipengaruhi oleh:

- Operasional Debitur terganggu atau tidak efisien;
- Beban utang terlalu besar;
- *Revenue* lebih rendah dari biaya usaha;
- Kondisi fasilitas produksi yang relatif kurang baik;
- Kurangnya komitmen beberapa manajemen Debitur untuk memenuhi kewajibannya ke Perusahaan;
- Ketidadaan pembiayaan untuk modal kerja dan revitalisasi alat produksi pada beberapa Debitur;
- Sebagian BUMN R/R sudah berhenti beroperasi dan/atau diputus pailit.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Mengupayakan penyelesaian pinjaman BUMN R/R melalui antara lain *asset settlement* dan/atau sumber pelunasan lainnya;
- Melakukan restrukturisasi terhadap beberapa BUMN R/R yang masih memiliki prospek bisnis;
- Memperkuat posisi Perusahaan dari aspek persyaratan jaminan/agunan yang nilainya memadai dan diharapkan dapat mem-backup pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada Debitur;
- Pemantauan atas pemenuhan persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan antara Perusahaan dan Debitur;
- Memantau pencapaian target kinerja Debitur dan mengusulkan langkah antisipasi untuk meningkatkan kinerja;
- Melakukan upaya penagihan yang efektif agar pembayaran kewajiban Debitur dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan;
- Mencari mitra atau investor yang memiliki pendanaan kuat dan kompetensi untuk bekerja sama dalam mengembangkan bisnis Debitur.

**Risiko Kredit #02****Potensi Penyebab:**

Kerugian atau kehilangan dana yang diinvestasikan pada pembiayaan proyek tertentu.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Melakukan *due diligence* dan kajian kelayakan investasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi;
- Penetapan persyaratan jaminan/agunan yang nilainya dapat *membackup* pembiayaan;
- Mengupayakan penyelesaian pembiayaan/investasi bermasalah melalui penjualan jaminan, *asset settlement*, dan/atau tindakan hukum lainnya;
- Menerapkan mekanisme *escrow account* (*rekening joint signature*) untuk menampung dana pembayaran proyek;
- Pemantauan dan evaluasi atas kinerja debitur/proyek untuk memastikan terpenuhinya persyaratan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya;
- Membentuk *Tim Task Force* dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dan upaya penagihan secara intensif.

Risiko Likuiditas #01**Potensi Penyebab:**

Perusahaan tidak memiliki dana yang cukup dan/atau tidak mampu mendapatkan pendanaan dari pihak lain dalam rangka membiayai kegiatan usahanya.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Penetapan skala prioritas investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai, di mana hasil kegiatan usaha dapat dipergunakan kembali untuk mengembangkan kegiatan bisnis Perusahaan;
- Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perusahaan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain (*bank/investor strategies*);
- Penanganan investasi Perusahaan yang tidak produktif secara tepat sehingga diharapkan terdapat pemasukan dana yang cukup bagi Perusahaan untuk membiayai kegiatan Perusahaan;
- Mencari sumber pendanaan dari berbagai sumber termasuk dari pasar modal melalui penerbitan surat utang Perseroan;
- Melakukan penagihan secara intensif;
- Melakukan restrukturisasi atas debitur bermasalah agar mampu membayar kewajibannya kepada Perseroan sesuai dengan *cashflow* hasil usahanya.

Risiko Likuiditas #02**Potensi Penyebab:**

- Keterbatasan dana untuk kesinambungan pelaksanaan program R/R BUMN karena:
- Keterlambatan/tidak diperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas penggunaan dana PMN untuk program R/R;
- Sebagian besar BUMN yang telah di R/R tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan.

Upaya Pengelolaan Risiko:

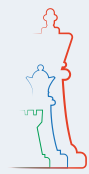
- Melakukan restrukturisasi dan penagihan kepada BUMN yang di R/R sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan;
- Melakukan kajian mengenai potensi optimalisasi aset milik beberapa BUMN yang di R/R sehingga diharapkan BUMN tersebut memiliki sumber pendapatan untuk membiayai operasionalnya maupun memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan;
- Melakukan peninjauan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi aset milik beberapa BUMN dalam program R/R).

Risiko Likuiditas #03**Potensi Penyebab:**

- Keterbatasan dana untuk pembayaran bunga pinjaman dan/atau kupon surat utang (MTN dan Obligasi) karena:
- *Cashflow* Perusahaan yang terbatas;
- Kualitas aset/investasi Perusahaan yang menurun sehingga pengembalian investasi terganggu.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Penetapan jenis dan skala prioritas investasi Perusahaan di mana hasil kegiatan investasi Perusahaan tersebut akan digunakan sebagai sumber pembayaran bunga dan kupon kepada kreditur dan pemegang surat utang Perusahaan;
- Pengaturan penggunaan arus kas Perusahaan secara tepat sesuai skala prioritas pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada para krediturnya dan investor;
- Penanganan investasi Perusahaan yang tidak produktif secara tepat sehingga diharapkan terdapat pemasukan dana yang cukup bagi Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan pemegang surat utang Perusahaan.



Risiko Reputasi

Potensi Penyebab:

Perusahaan tidak mampu mengelola ekspektasi *stakeholder* dalam melakukan kegiatan R/R BUMN.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Menyusun strategi *public relation* yang tepat dan memadai;
- Pemenuhan atas hal-hal atau rencana kerja yang telah disepakati dengan para pihak;
- Berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam rangka memenuhi aspek GCG;
- Pemantauan secara rutin atas publikasi yang bernuansa negatif tentang Perusahaan.

Risiko Operasional

Potensi Penyebab:

Pelatihan dan pengembangan tidak efektif mendukung peningkatan kompetensi karyawan.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Terdapat Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan;
- Terdapat kurikulum pelatihan yang disusun bersama;
- Perencanaan pelatihan dan pengembangan didasarkan pada hasil penilaian kinerja karyawan, perkembangan bisnis perusahaan, dan/atau rencana suksesi karyawan;
- Melakukan evaluasi hasil pelatihan;
- Survey kepuasan karyawan.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Faktor penting untuk mendukung efektivitas implementasi manajemen risiko Perusahaan adalah adanya budaya risiko yang kuat (*strong risk culture*) di dalam suatu organisasi. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan dilakukan melalui:

1. Direksi secara berkesinambungan mengkomunikasikan dan mendorong agar seluruh satuan kerja (*risk owner*) untuk terus mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) dan meningkatkan *quality risk management* serta kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan;
2. Penyusunan Kebijakan, prosedur persetujuan kegiatan (*approval procedure*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko;
3. Divisi Manajemen Risiko secara aktif memberikan dukungan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko di Perusahaan;
4. Mengikuti pelatihan, seminar serta sertifikasi di bidang manajemen risiko dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi manajemen risiko.

KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Direksi membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam rangka memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka pengambilan keputusan investasi; termasuk pertimbangan terkait pengelolaan risiko dalam keputusan investasi yang diambil oleh Direksi. Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-50/PPA/0819 tanggal 27 Agustus 2019.

Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite dan dasar pengangkatan anggota komite ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-50/PPA/0819 tanggal 27 Agustus 2019.

Sarda Yunus
Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Menjabat sejak 11 September 2019

Profil mengenai Sarda Yunus dapat dilihat di bagian Pejabat Divisi Manajemen Risiko



Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi Perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan Investasi atas:
 - a. Usulan kegiatan Investasi yang diajukan oleh satuan kerja bisnis;
 - b. Usulan penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, antara lain pelampauan limit/batasan transaksi yang diatur dalam Pedoman Investasi, penyimpangan ketentuan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan, penyimpangan atas ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian transaksi (perjanjian pinjaman/ penerbitan surat utang, dan lain-lain).
2. Melakukan pembahasan dan memberikan saran/masukan atas usulan kegiatan Investasi dari Anak Perusahaan;
3. Memberikan masukan/saran atas Kebijakan Investasi dan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Memberikan masukan/saran atas Pedoman Investasi antara lain tingkat pengembalian minimal Investasi, batas Investasi per sektor industri, dan *negative list* Investasi.

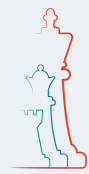
Pelaksanaan Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko Tahun 2020

Pada tahun 2020, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan tugas sebagai berikut:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan 92 (sembilan puluh dua) rapat untuk membahas rencana investasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan investasi;
2. Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (Memo Evaluasi Risiko) atas 126 dokumen memo usulan kegiatan baik usulan investasi maupun usulan atas kegiatan penanganan investasi.

Evaluasi Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Evaluasi kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilihat dari pelaksanaan review dan rekomendasi (Memo Evaluasi Risiko) yang diberikan atas 126 memo usulan kegiatan.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal perusahaan yang efektif merupakan unsur penting dalam pengelolaan perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan aman. Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Perusahaan sebagai Perusahaan yang tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki Perusahaan juga dimaksudkan untuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan Perusahaan merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh karyawan, baik pada jajaran pimpinan sampai dengan staf. Hal tersebut dilakukan untuk membangun komitmen yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang ditetapkan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

TUJUAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
2. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Konsistensi penerapan kebijakan/ketentuan baik internal maupun eksternal;
4. Akurasi dan keandalan akuntansi.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. SK-35/PPA/0713. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan suatu proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) terdiri atas unsur:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*);
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perusahaan. Semua pihak di Perusahaan bertanggungjawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif. SPI sesuai dengan Piagam Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan seluruh proses pengendalian pada Perusahaan berjalan secara efektif. SPI juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Direksi serta Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada Perusahaan, yang disertai dengan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengendalian.

KESESUAIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Manajemen Perusahaan secara terus-menerus memberikan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal Perusahaan kepada seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yang diterapkan perusahaan yaitu:



1. Lingkungan Pengendalian, diterapkan melalui:
Seluruh tingkatan manajemen dalam Perusahaan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) di lingkungan kerja Perusahaan melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran pengawasan intern yang efektif.
2. Penilaian Risiko dilakukan oleh Perusahaan dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko/potensi risiko yang timbul dari kegiatan Perusahaan untuk merumuskan mitigasi/langkah penanganan, dan memantau penerapan kontrol atas risiko/potensi risiko dimaksud;
3. Kegiatan Pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit Perusahaan;
4. Informasi dan Komunikasi Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan;

5. Pemantauan (*Monitoring*) Pemantauan adalah suatu proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*), termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

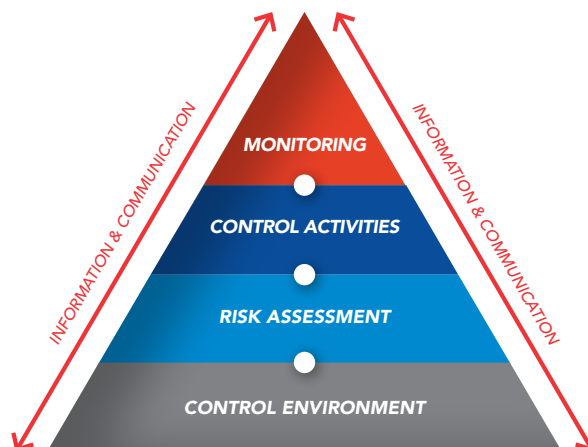
Pemantauan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

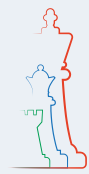
MEKANISME KERJA PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilakukan dengan melalui pembuatan prosedur proses bisnis sebagai pedoman untuk setiap rangkaian bisnis yang ada serta melakukan asesmen secara berkala atas penerapan yang utamanya ialah melakukan perbaikan desain dalam pengendalian internal guna mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis terkini.

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen pengendalian internal tersebut berlaku dalam audit setiap unit bisnis.

COSO INTERNAL CONTROL MODE





PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN PELAPORAN KEUANGAN

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang meliputi seluruh elemen yang terdapat di Perusahaan. Pengendalian Keuangan dan Operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan penasihatian terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi karyawan.

Divisi SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan audit internal di Perusahaan, Divisi SPI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (*internal control*) dalam pelaporan keuangan berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Perusahaan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.

TINJAUAN DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan selalu berupaya dalam meningkatkan sistem pengendalian internal agar penerapannya efektif. Sistem Pengendalian Internal selalu ditinjau dan dievaluasi oleh manajemen. Dalam hal ini, Divisi SPI memiliki peranan penting dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur di setiap kegiatan pada unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

REVIU ATAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN

Pengendalian internal dalam pelaporan keuangan adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan dan penyiapan laporan keuangan yang ditujukan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Divisi SPI telah melakukan reviu pengendalian internal atas operasional Perusahaan dan Pelaporan Keuangan Perusahaan dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional yaitu *COSO-Internal Control Framework*. Menurut *framework* COSO tersebut terdapat 5 (lima) komponen yang dievaluasi sebagaimana disebutkan di atas yaitu: Lingkungan Pengendalian Intern, Kajian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

Sesuai dengan Rencana Pemeriksaan Tahun 2020, Divisi SPI telah melakukan audit operasional di seluruh Unit Kerja dan beberapa entitas anak, evaluasi atas penerapan manajemen risiko Perusahaan, dan Audit atas Permintaan/Audit Khusus sebagaimana telah dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2020.

Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian internal dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal.

Dari hasil audit terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, Manajemen Perusahaan menilai aspek pengendalian internal perusahaan cukup memadai.



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, masyarakat pada umumnya dan bagi generasi yang akan datang. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 7 (tujuh) aspek, sesuai ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial.



Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



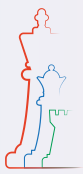
PERKARA PENTING

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Pengawas dan Direksi di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	2020		2019	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Perusahaan				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	7	-	-	-
Jumlah	7	-	-	-
Dewan Komisaris dan Direksi				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
Entitas Anak				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	1	1	-	-
Dalam proses penyelesaian	5	-	3	-
Jumlah	6	1	3	-
Jumlah Keseluruhan	13	1	3	-

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perkara #1:	
Pihak yang Berperkara: - CV Delima Jaya - PT PPA (turut tergugat II)	Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: -
Pokok Perkara: PERDATA No. 104/Pdt.G/2016 PN Bgr	Tindak Lanjut: Monitor perkara
Status Perkara: - Putusan banding No. 523/PDT/2018/PT BDG tgl.20 Desember 2018, amarnya: - Menerima permohonan banding; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tgl 4 Oktober 2017, No. 104/Pdt/2016/PN Bgr - KPKNL ajukan Kasasi di MA tgl. 08 Maret 2019	
Perkara #02:	
Pihak yang Berperkara: - Anthony Handoko - PT PPA (tergugat II)	Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: -
Pokok Perkara: PERDATA No. 279/Pdt.G/PN.Jkt Sel	Tindak Lanjut: Monitor perkara
Status Perkara: - Putusan tgl. 07 Desember 2017, amarnya: - Mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya; - Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; - Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah SHM No. 1065/Kemanggisian	



Perkara #03:

Pihak yang Berperkara:

- Syafruddin A. Temenggung
- PT PPA (turut tergugat II)

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Pokok Perkara:

PERDATA No. 637/Pdt.G/2016 PN Jkt Pst

Tindak Lanjut:

-

Status Perkara:

- Tgl. 24 Juli 2018, telah ada putusan akhir dari PN Jakarta Pusat, amarnya:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Note:

Gugatan tidak diterima dikarenakan eksepsi kompetensi absolut dari Kemenkeu dikabulkan

Perkara #04:

Pihak yang Berperkara:

- PT Batam Island Marina (dalam pailit)
- PT PPA (selaku kreditor)

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Pokok Perkara:

KEPAILITAN No. 16/Pdt.-Sus-PKPU/2018 PN Niaga Mdn

Tindak Lanjut:

-

Status Perkara:

- PT BIM dinyatakan pailit tgl.24 Februari 2019.
- Kurator:
- Deni Amsari Purba, SH, LLM;
- Hakim Pengawas:
- Masrul, SH, MH
- Tagihan PPA: Rp305.334.176.892,-
- PPA telah ajukan permohonan lelang atas aset BIM yang terletak di Desa Kubutambahan, Singaraja, Kab. Buleleng, Bali
- Rencana lelang di tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan oleh PPA

Perkara #05:

Pihak yang Berperkara:

- PT Kertas Leces (Persero)
- PT PPA (selaku kreditor)

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Pokok Perkara:

1. KEPAILITAN No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Jo, No.05/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Sby;
2. Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit

Tindak Lanjut:

Monitor putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI

Status Perkara:

- PT Kertas Leces (KL) dinyatakan pailit pada tanggal 25 September 2018.
 - Tim Kurator KL: Anggi Gitaharani; Rayi Baskara dan Febry Arisandi, SH
 - Hakim Pengawas: BP. Sarwedi, SH
 - Tagihan PPA: Rp104.706.182.222,-
 - Tim Kurator telah menjual persediaan kertas pabrik KL di Leces namun tidak laku.
 - Tim Kurator akan melakukan lelang atas mesin-mesin, persediaan dll pada tanggal 2 Agustus 2019 di KPKNL Jember, Jawa Timur
- Penjualan oleh Kreditor separatis (PPA):
 - Tgl. 11 Desember 2018 telah dilaksanakan lelang atas jaminan milik KL, HGB No.227/Kramat Pela, terletak di Jalan Radio IV No.5, Jakarta Selatan melalui Pejabat Lelang KPKNL Jakarta V telah laku terjual Rp11.495.000.000,-
 - Pemenang Lelang: PT PPA Kapital
 - Terkait Daftar pembagian harta pailit tertanggal 26 April 2019 ("daftar pembagian") yang dibuat oleh Tim Kurator diajukan perlawanan atau keberatan oleh PPA selaku Pelawan.
 - Dalam daftar pembagian, PPA memperoleh Rp1.291.375.490,-
 - Putusan keberatan tgl.29 Agustus 2019 atas keberatan dari PPA dinyatakan ditolak
 - PPA melalui kuasa hukum AZP *legal consultant* mengajukan kasasi di Mahkamah Agung tgl.06 September 2019

Perkara #06:

Pihak yang Berperkara:

- PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP)
- PT PPA (selaku kreditor)

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Pokok Perkara:

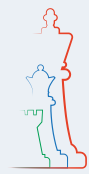
PKPU No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Niaga Surabaya, Jawa Timur

Tindak Lanjut:

-

Status Perkara:

Perpanjangan PKPU tetap selama 45 Hari



Perkara #07:

Pihak yang Berperkara:

1. PT Petro Energy
2. PT PPA (selaku kreditor)

Pokok Perkara:

PKPU No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Jakarta Pusat

Status Perkara:

Putusan tgl. 16 Januari 2020, Perpanjangan PKPU Tetap selama 43 (empat puluh tiga) hari

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/ Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

-

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai induk, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

Perusahaan	Sanksi Administratif
Perusahaan	
Perusahaan	Tidak Ada
Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak Ada
Entitas Anak	
PT PPA Finance	Tidak Ada
PT PPA Kapital	Tidak Ada
PT Nindya Karya	Tidak Ada

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Di sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perusahaan senantiasa membangun citra baik di mata publik terutama para *stakeholders*, salah satunya melalui keterbukaan dan pengelolaan informasi. Perusahaan juga berupaya untuk selalu mempermudah komunikasi dan akses para pemangku kepentingan termasuk informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, non-keuangan, dan data Perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan, Perusahaan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga sebagaimana diatur dalam pada Pedoman Kebijakan Perusahaan. Beberapa akses Informasi yang disediakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

KOMUNIKASI EKSTERNAL

1. Website

Situs web memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi. Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat <http://www.ptppa.com> yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi yang tersedia antara lain:

- Struktur grup Perusahaan;
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan;
- Pemegang saham;
- Informasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
- Informasi mengenai tata kelola perusahaan;
- Informasi pelaksanaan RUPS.

2. Surat Elektronik

Perusahaan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui surat elektronik untuk mengakomodir berbagai pertanyaan terkait dengan Perusahaan dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan pada email: corpsec@ptppa.com.

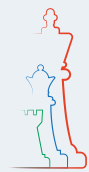
3. Hubungan dengan Media Massa

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Perusahaan juga selalu menjaga hubungan baik dengan media massa untuk memberikan pembaruan informasi penting Perusahaan dengan melakukan kunjungan media dan melalui *workshop*. Selama tahun 2020, Perusahaan telah melakukan beberapa kunjungan baik ke kantor media cetak maupun media elektronik.

4. Siaran Pers

Perusahaan secara aktif memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarkan informasi tentang Perusahaan kepada khalayak. Berikut disampaikan siaran pers yang dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2020.

Nomor	Tanggal	Judul Siaran Pers
PR-01-PPA-CS-0220	11 Februari 2020	PPA Pastikan Pengelolaan NPL Perbankan Patuhi Regulasi
PR-03-PPA-CS-0420	23 April 2020	Bantu Tangani Covid PPA Salurkan Bantuan APD dan Bahan Pangan
PR-04-PPA-CS-0520	18 Mei 2020	PPA Distribusikan Bantuan Kemanusiaan Penanganan Pandemi COVID-19 Senilai Rp1,1 Miliar ke Beberapa Wilayah Hingga Pedalaman Mentawai
PR-05-PPA-CS-0820	6 Agustus 2020	Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT PPA (Persero)
PR-06-PPA-CS-1020	10 Oktober 2020	Perubahan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PPA (Persero)



5. Laporan Tahunan

Perusahaan menyediakan sarana informasi melalui Laporan Tahunan atau *Annual Report* yang disusun setiap tahun. *Annual Report* disampaikan kepada pemegang saham, regulator serta seluruh *stakeholders* lainnya.

Tahun	Tema
2013	<i>Striving in the Face of Challenges</i>
2014	<i>Challenging The Boundaries Creating The Future</i>
2015	<i>Strengthening the Foundation Penetrating the Market</i>
2016	<i>Creating and Sustaining Value: Uncovering the Hidden Potentials</i>
2017	<i>Optimizing Strengths Into Excellence, Enhancing Capacity for Growth</i>
2018	<i>Repositioning For the Future Growth</i>
2019	<i>Strengthening the Strength</i>
2020	<i>Strategic Roles for Better Performance</i>

6. Laporan Keberlanjutan

Perusahaan juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan sosial dan kemasyarakatan Perusahaan secara menyeluruh melalui Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report*.

Tahun	Tema
2014	<i>Building Commitment Towards Sustainability</i>
2015	<i>Creating Shared Value. Sustaining Our Future</i>
2016	<i>Creating and Sustaining Value for a Better Future</i>
2017	<i>Sustaining Growth with Strong Values of Responsibilities</i>
2018	<i>Achieving Excellence for Sustainable Growth</i>
2019	<i>Continue to Grow Increasing Benefits</i>
2020	<i>Strengthening the Role, Integrating Sustainability</i>

7. Laporan Manajemen

Perusahaan telah menyampaikan informasi-informasi yang relevan dengan menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Pemegang Saham.

KOMUNIKASI INTERNAL

Perusahaan menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi karyawan dengan manajemen yang secara berkala dilakukan, baik secara korporasi maupun per masing-masing unit kerja.

1. Town Hall Meeting

Perusahaan menyelenggarakan pertemuan secara berkala yang melibatkan interaksi langsung antara manajemen dengan seluruh karyawan Perusahaan, untuk membahas pencapaian target Perusahaan serta membahas isu-isu terkini Perusahaan.

2. Meet and Greet

Perusahaan menyelenggarakan *talkshow* yang dihadiri oleh seluruh karyawan Perusahaan dengan mengundang narasumber dari berbagai instansi negara maupun lainnya untuk menjadi pembicara dan memaparkan hal-hal yang bersifat inspiratif. *Meet and Greet* ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan karyawan Perusahaan dengan maksud untuk menciptakan *talkshow* yang interaktif.

3. Peringatan Hari Besar Nasional

Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara senantiasa menghargai jasa para pahlawan dengan cara melaksanakan Upacara, seperti Upacara memperingati Hari Pahlawan, Upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Upacara memperingati Hari Kartini dan lainnya. Adapun yang menjadi petugas pelaksana adalah dari karyawan Perusahaan.

MEDIA SOSIAL

Perusahaan memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi mengenai kegiatan Perusahaan kepada masyarakat melalui *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*.



PT PPA (Persero)



PTPPersero



PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)





KOMUNIKASI LANGSUNG

Adapun permintaan komunikasi secara langsung dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan melalui:

PT PPA (Persero)
Gedung Menara Mandiri II 7th – 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 54-55, RT.5/RW.3, Jakarta 12190
Telepon: +62 21 5798 2222
Faksimili: +62 21 5798 2233
E-mail: corpsec@ptppa.com

Dalam menyampaikan/mengeluarkan informasi secara umum, Perusahaan telah mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0516 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan.

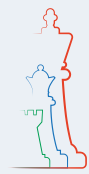
Pada tahun 2020, tidak terjadi kejadian/kasus atau temuan Divisi SPI terkait pelanggaran terhadap Kebijakan Komunikasi Keluar atau Pedoman Kebijakan Perusahaan, seperti kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

RAGAM MEDIA KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Pemangku Kepentingan	Bentuk-bentuk Media
Regulator	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen
Pemegang Saham	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen
Investor	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Lembaga Publik	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Konsumen	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Karyawan	Buletin Internal, Intranet
Perusahaan Sejenis Lainnya	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Mitra Kerja dan Rekanan	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Organisasi Profesi	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Masyarakat/Ummum	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan

Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.



TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI

“Teknologi Informasi (TI) memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan usaha Perusahaan untuk menjamin pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang cepat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.”

Perusahaan menyadari pentingnya peran Teknologi Informasi (TI) dalam menunjang proses bisnis Perusahaan. Cepatnya perkembangan akan kebutuhan bisnis dan organisasi mengharuskan Perusahaan untuk selalu bersiap dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan bisnis. Melalui penerapan teknologi informasi (TI) yang tepat, akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi Perusahaan. Karena itu, Perusahaan yakin bahwa dengan mendayagunakan teknologi secara efisien, tepat waktu, dan *cost effective*, dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, andal, dan aman. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi sarana penunjang keberlanjutan usaha sekaligus pendukung efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan kepada konsumen.

Tujuan pengembangan TI di Perusahaan antara lain untuk mendukung pengelolaan Perusahaan secara strategis; menyediakan dan mengembangkan proses bisnis yang efisien dan efektif dengan senantiasa memperhatikan keselarasan dengan tujuan perusahaan; memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko TI yang kuat dan komprehensif; memastikan penyediaan layanan berkualitas berbasis teknologi informasi yang andal dan inovatif; mendukung sekaligus menjadi faktor pendorong untuk pengembangan usaha Perusahaan.

Perusahaan terus berupaya untuk mengembangkan sistem teknologi informasi Perusahaan secara terarah dan terukur guna mendukung strategi bisnis Perusahaan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pengembangan TI di Perusahaan mengacu pada suatu sistem tata kelola yang dimuat dalam *Master Plan* Teknologi Informasi periode 2020-2024, yang dikembangkan secara bersinergi antar sesama BUMN.

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perusahaan, pemanfaatan TI di seluruh lini organisasi sehingga pergerakan bisnis dapat berjalan cepat dan tepat. Dalam pengembangan TI, Perusahaan juga mempertimbangkan kepentingan dan manfaat jangka panjang sesuai dengan kebutuhan segmen bisnis perusahaan di lapangan sekaligus rencana kerja Perusahaan ke depan.

Sebagai bagian dari upaya perkembangan berkelanjutan tersebut, Grup TI Perusahaan menyusun program kerja berdasarkan RKAP 2020 (Revisi) dan *Master Plan* TI untuk tahun 2020-2024. Landasan lain yang digunakan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-18/PPA/0315 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku.

Pencapaian di tahun 2020 tidak terlepas dari komitmen, daya tahan dan daya juang dari Grup TI yang konsisten mengimplementasikan kebijakan pengelolaan yang telah disepakati. Pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia berimbas pada Perusahaan yang harus menerapkan *work from home* dan *work from office* bagi karyawan. Namun, Grup TI dapat menanganinya dengan dilakukannya penerapan konsep *Mobile Office*-implementasi *Office 365*, peremajaan infrastruktur wifi dan perangkat pendukungnya serta *collocation* yang telah diimplementasikan pada akhir tahun 2019 sehingga mampu mendukung pelaksanaan pekerjaan bagi karyawan dengan baik. Untuk melengkapi layanan *Mobile Office* maka pada tahun 2020 telah diimplementasikan layanan Telepon *extension* meja secara *Cloud* yang dapat diakses melalui *Smartphone*, *Gadget* serta *Laptop*.



Selain itu, Grup TI juga melakukan pemindahan *Data Center* ke *Collocation Data Center*, sehingga memudahkan Perusahaan selama masa pandemi karena manajemen dan pengawasan *data center* berada di pihak ketiga secara profesional. Pemindahan ini juga membantu Perusahaan dalam rencana perpindah kantor PPA dari Gedung Sampoerna Strategic Square ke Gedung Menara Mandiri sehingga tidak perlu dilakukannya pemindahan *data center* dan terjadinya *downtime* layanan.

Pengembangan Aplikasi PPA *Mobile* untuk platform Android dan Apple juga terus dikembangkan di tahun 2020. Dengan ditambahkannya beberapa Aplikasi baru di PPA *Mobile* seperti Aplikasi PPA Group (Sappa, *Teaser* PPA, *Subsidiary* PPAK, *Induction Kit*), Aplikasi *Survey* (*Survey* Kegiatan Komunikasi, *Survey* Keterikatan dan Kepuasan Karyawan, *Survey* Manajemen Risiko, *Survey* Tata Kelola), Aplikasi *Monitoring* Kesehatan Karyawan (*Health*) dan Grafik, Aplikasi Protokol Covid (internal dan eksternal), menu Pernyataan Kesehatan dan juga Aplikasi Multi Menu.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Menjawab persaingan usaha yang terus meningkat dan semakin kompetitif, penerapan tata kelola yang baik juga diwujudkan Perusahaan dalam pengembangan TI. Pada praktiknya, Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan berkala serta pemenuhan kepatuhan terhadap aturan-aturan sebagaimana yang termuat dalam Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan tanggal 18 Februari 2013.

Demi pelaksanaan sesuai dengan rencana, Perusahaan menyusun *Master Plan* Teknologi Informasi sebagai *blue print* pengembangan TI Perusahaan selama tahun 2015-2019 dan juga mendasar pada Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta *Standard Operating Procedure*. Formulasi *Master Plan* tersebut diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) guna menentukan strategi bisnis Perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang *solid*, Perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan di masa mendatang.

STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI TI

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Perusahaan berada di bawah Divisi Teknologi Informasi dan Operasi Bisnis, Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja. Tugas pokok Grup TI berdasarkan No. SK-57/PPA/0919 adalah menyediakan dan mengoptimalkan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data.

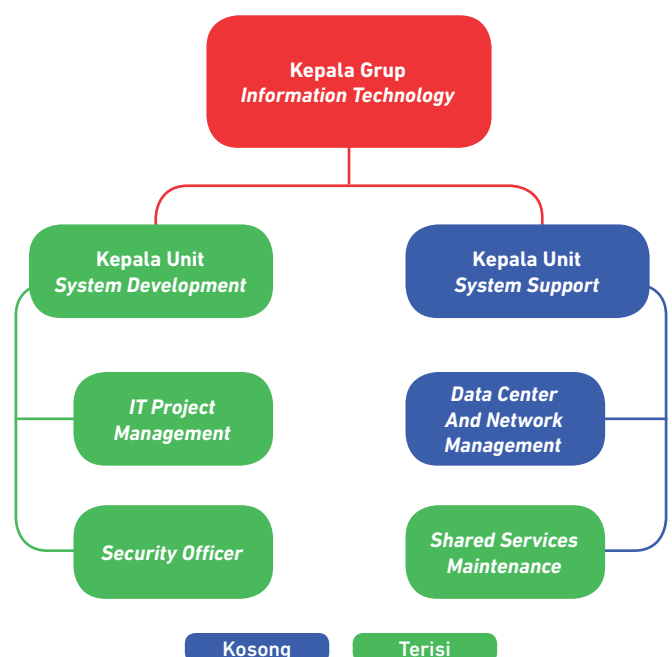
Dalam melaksanakan tugasnya, Grup TI menjalankan fungsi sebagai berikut:

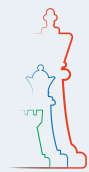
1. Penyiapan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data;
2. Pelaksanaan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Penyediaan dan pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk melalui proses pengamanan dan duplikasi (*back up*) data secara berkala dan penyediaan sarana untuk penanggulangan kondisi bencana (*disaster recovery plan*).

Sesuai dengan surat keputusan direksi No. SK-84/PPA/1120 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sampai dengan Jabatan Kepala Unit, Grup TI terdiri dari 2 (dua) unit yaitu:

1. Unit Pengembangan Sistem;
2. Unit Dukungan dan Administrasi Sistem;

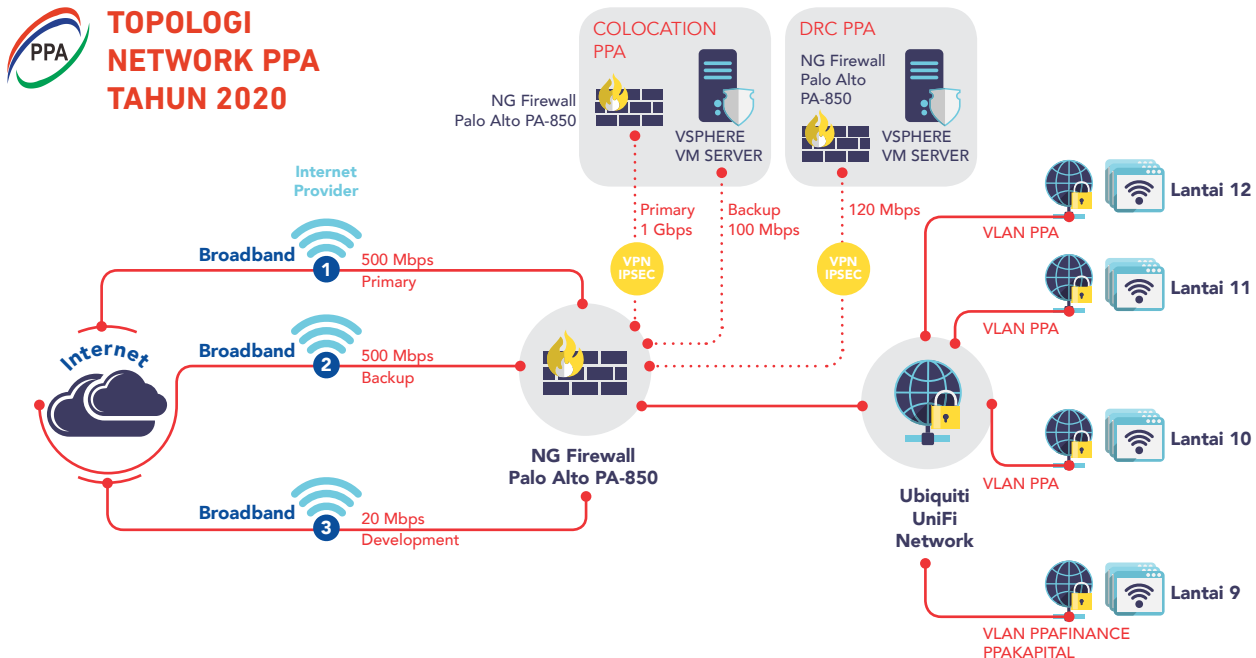
Struktur organisasi Grup TI selengkapnya adalah sebagai berikut:





INFRASTRUKTUR TIK PERUSAHAAN

Infrastruktur TIK Perusahaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Kondisi infrastruktur TIK PPA 2020 adalah:

1. PT PPA juga memiliki sebuah *collocation* 1 rak 42U di Data Center PT NAPINFO yang terletak di Gedung Plaza Kuningan yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi bagi PT PPA;
2. Perangkat jaringan PT PPA memakai ekosistem *UniFi* dari *Ubiquiti* yang terintegrasi dengan *Unifi Cloud Key Controller* sebagai perangkat manajemen jaringan yang mendistribusi segmentasi jaringan (VLAN) berdasarkan struktur organisasi di PT PPA. Segmentasi ini menjaga sistem keamanan agar lebih maksimal;
3. Perangkat keamanan jaringan PT PPA menggunakan perangkat *Next Generation Firewall* dari Palo Alto yang berfungsi melindungi jaringan komputer internal dari serangan *cyber*, melindungi *Virtual Private Network* (VPN) dengan enkripsi data ke jaringan DRC dan partner serta meningkatkan kualitas IP telekomunikasi dengan *Quality of Services* (QoS) yang dapat memprioritaskan data VoIP;
4. *Bandwidth* total jaringan internet adalah 1,02 Gbps terdiri dari 3 koneksi *broadband* masing-masing 500 Mbps, 500 Mbps dan 20 Mbps;
5. Server yang dimiliki PT PPA saat ini sebagian besar berumur lebih dari 5 tahun (9 unit), namun ada 3 unit server baru yg berumur dibawah 5 tahun dengan spesifikasi tinggi. Untuk operasional aplikasi inti, menggunakan server yg berumur kurang dari 5 tahun, sedangkan yang berumur diatas 5 tahun hanya digunakan untuk aplikasi penunjang, *backup* dan pengembangan;
6. *Domain Controller* menggunakan *Microsoft Windows Server 2016* di mana performansi jaringan, keamanan jaringan, dan kemudahan pemeliharaan masih terjaga dengan baik;
7. *Microsoft Office 365 Business Premium* digunakan untuk mendukung kerja secara kolaborasi di PT PPA dengan memanfaatkan *Microsoft Teams*, *OneDrive*, dan *Sharepoints*;
8. Sistem Email menggunakan *hybrid Microsoft Exchange 2016* dan *Exchange Office 365* yang mendukung *smart device* dengan keamanan yang cukup baik;
9. Implementasi *wireless connection* (wifi) menggunakan ekosistem *UniFi* dari *Ubiquiti* yang menerapkan teknologi terbaru yang mengintegrasikan satu *hotspot* dengan *hotspot* lain (SID : *single id*) dan memungkinkan koneksi *devices* tidak terputus selama berada di area kantor PPA serta penggunaan dua gelombang 2,4 Ghz dan 5 Ghz dengan protokol terbaru AC untuk kualitas sinyal wifi yang lebih baik;
10. Sistem komunikasi menggunakan teknologi *Unified Communication* yang mengintegrasikan *voice over IP*, *video telephony*, *video conferencing*, *fax* dan *email*;



11. Teknologi virtualisasi server menggunakan VMWARE 6.7 yang sudah dilengkapi dengan fitur teknologi backup Veeam;
12. PT PPA memiliki DRC yang berlokasi di Jatiluhur. *Disaster Recovery Center* dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan backup sistem PT PPA dan juga sebagai tempat pemulihan pada saat terjadi kondisi *disaster* sebagai bagian dari *Business Continuity Plan*.

Pengembangan infrastruktur TI dilakukan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.

PORTOFOLIO LAYANAN TIK PERUSAHAAN

Portofolio Aplikasi PPA 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Kegiatan
SUPPORT	
Unified Communication & Work Facility	Menyediakan layanan email, <i>mobile devices</i> , <i>video conference</i> , <i>Unified Communication</i> , <i>virtual private network</i> , <i>dealing room</i> dan fasilitas kerja karyawan yang mendukung kegiatan perusahaan
Data Center dan DRC	Menyediakan dan mengoperasikan <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> yang mampu menjaga ketersediaan dan kehandalan informasi PT PPA
Aplikasi Pendukung Kegiatan	Menyediakan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Aplikasi <i>Meeting Room</i> , aplikasi <i>Carpool</i> , aplikasi <i>Helper</i> di mana dapat digunakan oleh seluruh karyawan yang dapat diakses secara <i>mobile</i> dan aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi dengan proyek <i>Paperless Office</i> serta aplikasi pelaporan kegiatan perusahaan untuk menunjang <i>green environment</i>
Pusat Layanan TIK	Menyediakan layanan TIK terintegrasi dan dapat memberikan solusi tepat waktu untuk seluruh permasalahan terkait pemanfaatan TIK dengan menyediakan <i>Single Point of Contact (SPOC)</i> , termasuk dukungan operasional TIK anak perusahaan
KEY OPERATIONAL	
Aplikasi Document Management	Memiliki aplikasi pengelolaan dokumen elektronik untuk menciptakan, <i>review</i> , persetujuan, dan publikasi dokumen dan kemudahan pengaksesan terhadap informasi
Corporate Communication	Memiliki Website Perusahaan yang menjadi ujung tombak penyampaian informasi mengenai PT PPA, intranet sebagai sarana komunikasi internal karyawan PT PPA
Aplikasi Keuangan	Menyediakan aplikasi keuangan (PUM, SPM, kas kecil, penagihan), Sistem Informasi Investasi (saham dan obligasi) dan <i>treasury</i> yang bermuara ke dalam aplikasi ERP (<i>Oracle E-business Suites</i>)
Aplikasi Pengelolaan Pinjaman Debitur dan Kreditur	Menyediakan aplikasi <i>Core System</i> untuk mengelola Pinjaman Debitur dan Kreditur yang bermuara ke dalam aplikasi ERP (<i>Oracle E-Business Suites</i>)
STRATEGIC	
Pengelolaan Aset	Memiliki aplikasi pengelolaan aset yang terintegrasi untuk aset <i>property</i> , hak tagih, saham, dan surat berharga
Restrukturisasi dan Revitalisasi	Implementasi <i>Microsoft Project</i> dan pelaporan ringkasan eksekutif untuk setiap BUMN di PPAWORLD untuk mendukung pelaksanaan dan <i>monitoring</i> kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN
Laporan Kinerja	Memiliki sistem pelaporan kinerja perusahaan melalui <i>Dashboard</i> untuk mempermudah manajemen dalam melakukan <i>monitoring</i> kinerja perusahaan
IT Shared Services dan Due Diligence TIK	Menyediakan layanan <i>shared services</i> untuk anak perusahaan dan layanan <i>Due Diligence</i> TIK dalam rangka kegiatan <i>business advisory</i>
Forum antar BUMN dan Kementerian BUMN	Terlibat aktif dalam Forum teknologi Informasi (FORTI) BUMN dan mengkoordinir pengisian Portal BUMN

PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Perusahaan yang menggunakan jasa layanan IT *Shared Services* adalah:

1. PT PPA Finance;
2. PT PPA Kapital;
3. PT Sejahtera Eka Graha;
4. PT PPAirborne.



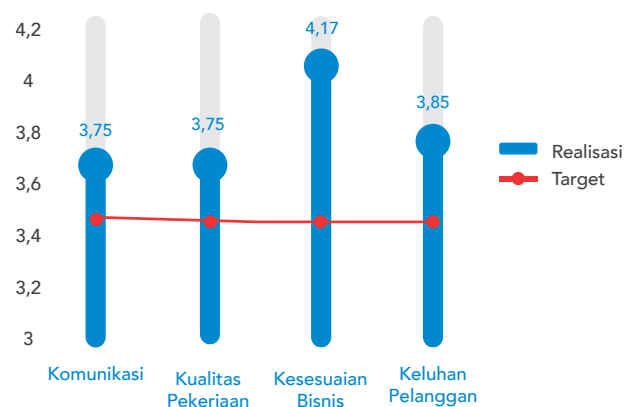
Sementara layanan yang diberikan TI Perusahaan untuk layanan *shared services*, dapat dilihat melalui tabel berikut:

	Layanan Data Center	Layanan IT Helpdesk	Layanan E-mail	Layanan PABX (telepon)	Layanan Aplikasi Kesekretariatan	Instalasi Ruang Data Center	Instalasi LAN (Workstation dan Wifi)	Layanan Aplikasi Payroll	Layanan Pengawasan CCTV
PT PPA Finance	√	√	√	√	√				
PT PPA Kapital	√	√	√	√	√				
PT Sejahtera Eka Graha	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PT PPAirborne	√	√	√	√					

Pada bulan November 2020 telah dilakukan survei kepuasan pengguna layanan TI terhadap *shared service* yang mencakup aspek:

1. Komunikasi;
2. Kualitas Pekerjaan;
3. Kesesuaian Bisnis;
4. Keluhan Pelanggan.

Hasil dari survei tersebut adalah:



KEGIATAN TI UNTUK Mendukung Unit Bisnis

Dalam mendukung kegiatan unit bisnis, Grup TI terlibat aktif dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Core System

Pengembangan *Core System* yang dimulai pada akhir tahun 2018, telah berhasil diimplementasikan dan *live* digunakan pertama kali pada bulan Juni 2019. Implementasi *Core System* dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan tugas di unit Operasi Bisnis untuk mendukung kegiatan satuan kerja bisnis baik di Direktorat Investasi 1 & Restrukturisasi maupun Direktorat Investasi yang meliputi proses pencatatan debitur, perhitungan angka kewajiban, *monitoring* pembayaran dan *billing*.

Pada tahun 2019 juga telah disepakati bahwa mulai tahun 2020 proses penyampaian *invoice* dan *monitoring* pembayaran akan melalui satuan kerja Keuangan, di mana sebelumnya berada di unit Bisnis.

Agar tidak terdapat *re-entry* oleh satuan kerja Akuntansi maka pada telah diimplementasikan *interface* dari *Core System* ke *Oracle Financials*. Proses *interface* melibatkan satuan kerja lain dalam diskusi dan pengetesannya.

Dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa kali sosialisasi kepada satuan kerja Bisnis maupun satuan kerja Keuangan dan Akuntansi mengenai penggunaan *Core System* dan telah dibuat *Helpdesk* Operasi Bisnis yang dapat diakses dari PPAWORLD agar segala keluhan dan permintaan dapat dimonitor.

Pada tahun 2020 Grup TI mengembangkan Sistem Administrasi Investasi dan Sistem Informasi Dokumen Perjanjian yang terintegrasi dengan *Core System*. Kedua sistem tersebut memberikan informasi yang komprehensif bagi para pihak yang menggunakan *Core System* baik yang menggunakan laptop maupun yang menggunakan *mobile device* via PPA Mobile.

2. Mobile Office

Implementasi *mobile office* di PPA dengan penerapan *Office 365*, peremajaan perangkat *WiFi Ubiquiti* seri *UniFi* dengan tujuan antara lain untuk menghilangkan *blankspot* *Wifi* di kantor serta *data center collocation* sangat membantu karyawan dalam melakukan pekerjaan dan pada tahun 2020 kualitas layanan terus dilakukan antara lain dengan penambahan kapasitas internet serta adanya *backup* internet untuk *Office 365*.

3. PPA Mobile

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis.

Banyak perusahaan telah memulai perjalanan transformasi digital untuk mencoba cara digital baru dalam berbisnis. Ini berarti, data dimanfaatkan secara lebih cerdas untuk menghadirkan tingkat efisiensi, kelincuhan (*agility*) dan produktivitas yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Teknologi, dari ponsel hingga *cloud*, kini telah menjadi bagian integral dari setiap bisnis di semua jenis industri. Perusahaan yang gagal menentukan strategi digital yang efisien dan



memaksimalkan dampak digitalisasi, berisiko tertinggal oleh perusahaan/pesaing lainnya.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan transformasi digital dan peningkatan kinerja organisasi maka telah berhasil diimplementasikan PPA *Mobile* yang berbasis *Android* dan *iOS*.

PPA *Mobile* memiliki kekuatan sebagai berikut:

- Performa lebih cepat dibandingkan *web base application*;
- User interface* yang nyaman dan mudah;
- Kualitas keamanan yang handal;
- Pengguna memiliki akses penuh ke perangkat *mobile*, seperti kamera, *gesture*, *notification*, *speaker*, dan fitur lainnya;
- Kemudahan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun;
- Kemudahan untuk menambah modul baru.

Tujuan PPA *Mobile* adalah untuk:

- peningkatan kinerja organisasi sebagai bagian dari penguatan sistem Manajemen Bisnis PT PPA yang bertujuan untuk menyiapkan sistem Teknologi Informasi serta perangkat pendukungnya yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan hubungan kerja PT PPA dengan para *stakeholder* maupun pengguna jasa;
- membangun kesadaran merek dan pengakuan, dengan membangun Sebuah *Mobile Application Platform* untuk PT PPA yang diharapkan akan dapat memberikan kontribusi untuk kesadaran merek dan dalam rangka pembangunan pengakuan. Kesadaran merek akan terbangun dari kualitas produk bisnis perusahaan yang tentunya dapat diinformasikan melalui *Mobile Application Platform* baik secara verbal ataupun visual. Kemudian pengakuan akan mulai terbentuk seiring dengan banyaknya user yang *men-download* dan menggunakan PPA *Mobile*;
- membangun suatu tempat/platform bagi aplikasi-aplikasi PPA baik yang saat ini sudah berjalan dan yang dalam proses pengembangan. Aplikasi yang sudah berjalan antara lain adalah Layanan *Helpdesk*, *Carpool*, *Helper*, *Paperless* (Disposisi Surat), *Meeting Room*, HRIS.

4. Dashboard Kinerja Keuangan

Dashboard untuk *monitoring* kinerja keuangan yang bertujuan untuk mempermudah manajemen untuk melihat dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan yang meliputi:

- Cash Management*;
- KPI Kinerja Kunci;
- KPI Tingkat Kesehatan;
- Laba Rugi Konsolidasi;
- Pendapatan dan Beban.

Aplikasi *Dashboard* Kinerja Keuangan secara terus menerus telah dikembangkan demikian juga pada tahun 2020 dengan bertambahnya aplikasi *Core System* yang datanya dapat dimasukkan ke dalam *dashboard*.

5. Server Collocation

Sejalan dengan implementasi *Mobile Office*, bisnis PT PPA yang semakin berkembang, maka kemudahan dan kecepatan dalam mengakses data dan informasi dari berbagai macam *device* dimanapun dan kapanpun, serta kebutuhan untuk dapat berkolaborasi harus didukung dengan perangkat dan teknologi yang sesuai agar perusahaan dapat lincah (*agile*) dalam menjalankan tugasnya.

Untuk dapat *agile* maka salah satu opsi yang dipilih adalah memindahkan *data center* ke penyedia layanan *colocation* di Gedung Cyber atau sejenis sehingga kualitas *data center*, performa jaringan dan penghematan dapat ditingkatkan. Dengan pindahnya *data center* maka PPA akan lebih *agile* lagi dalam infrastruktur IT karena dapat berpindah gedung atau lokasi kerja tanpa beban infrastruktur *data center*. Hal ini bisa terwujud karena saat ini PPA telah berhasil mereduksi jumlah rak dalam *data center* dari 13 rak tahun 2009 menjadi 1 rak di tahun 2019 sehingga perhitungan ekonomis untuk pindah ke *colocation* menjadi memungkinkan dan menguntungkan. Perpindahan *data center* PPA ke Gedung Kuningan pada bulan Februari 2020.

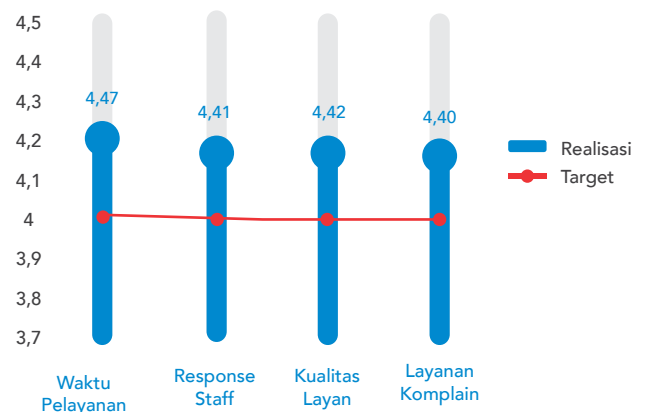
6. Kegiatan Rutin dan Insidentil

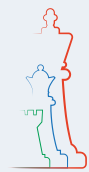
Kegiatan rutin Grup TI PT PPA antara lain menindaklanjuti permasalahan dan keluhan karyawan dalam penggunaan TI, operasional *data center* dan *disaster recovery center*, *Rehearsal Disaster Recovery Center*, memonitor kualitas jaringan data dan telepon, pengisian portal BUMN, penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru, koordinasi kegiatan *scanning*, mengelola *website* perusahaan (www.ptppa.com) dan intranet perusahaan (*PPAWorld*).

7. Pada bulan November 2020 telah dilakukan survey kepuasan pengguna layanan TI internal yang mencakup aspek:

- Waktu Pelayanan;
- Response Staff*;
- Kualitas Layanan;
- Layanan Komplain.

Hasil dari survei tersebut adalah:





STRATEGI DAN RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Secara keseluruhan rencana kerja Grup TI telah dipenuhi. Sedangkan terkait evaluasi *roadmap* proyek TI yang dibuat di awal tahun 2020 dan yang akan terus dilakukan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan dokumen *Master Plan* Teknologi Informasi, sebagai berikut:

No	Proyek	Keterangan Tahun 2020
1	Pengembangan modul <i>Treasury</i>	Melakukan pengembangan Aplikasi Titipan Bilyet
2	<i>Dashboard</i> Manajemen	Menambahkan informasi mengenai debitur terkait dengan <i>Outstanding</i> Pokok dan jaminan, informasi <i>aging</i> piutang, bank kreditur serta informasi mengenai <i>monitoring</i> kesehatan karyawan
3	Pengembangan HRIS (<i>career path, performance management, development, e-learning</i>)	Integrasi berbasis digital (<i>mobile</i>) antara PPA <i>Mobile</i> dengan <i>Greatday</i>
4	Pengembangan <i>Core System</i> untuk pencatatan kewajiban Debitur	Integrasi berbasis pemrograman web (PHP) antara <i>Core Info</i> dengan Platform Aplikasi PPA (<i>Summary Fasilitas, Billing Item Requary, Laporan Portofolio, Laporan Kewajiban Tagihan Pembayaran, Laporan Jatuh Tempo, Informasi Jaminan</i>)
5	Integrasi <i>Oracle Financials</i> dengan aplikasi lain	Melakukan Pengembangan <i>interface</i> <i>Core system</i> ke dalam <i>oracle</i> dan pengembangan <i>prototype interface</i> aplikasi <i>moma</i> ke dalam <i>oracle</i>
6	Pengembangan <i>Mobile Office</i>	• Menambahkan Aplikasi PPA Group (<i>Sappa, Teaser PPA, Subsidiary PPAK, Induction Kit</i>) • Menambahkan Aplikasi <i>Survey</i> (<i>Survey Kegiatan Komunikasi, Survey Keterikatan dan Kepuasan Karyawan, Survey Manajemen Risiko, Survey Tata Kelola</i>) • Menambahkan Aplikasi <i>Monitoring</i> Kesehatan Karyawan (<i>Health</i>) dan Grafik • Menambahkan Aplikasi Protokol Covid (<i>internal dan eksternal</i>) • Menambahkan Aplikasi Pernyataan Kesehatan • Menambahkan Aplikasi Multi Menu
7	Pemanfaatan Teknologi untuk mendukung proses kerja: <i>Digital Signature, IOT</i> dan lainnya	<i>Draft MoU</i> dengan Peruri untuk <i>Digital Signature</i>
8	<i>Knowledge Management</i> dan <i>E-Learning</i>	Mulai memasukkan komponen-komponen <i>E-Learning</i> di aplikasi PPA <i>Mobile</i>





KODE ETIK

Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal/ Pemegang Saham namun juga segenap pemangku kepentingan. Untuk itu, Perusahaan memiliki Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etika yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan baik dalam etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan maupun kehidupan sehari-hari.

Sebagai upaya dalam menegakkan Pedoman Etika dan Perilaku, Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Selain itu, Pedoman Etika dan Perilaku juga mengatur tentang tata cara berperilaku Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika.

VISI, MISI DAN NILAI

Perusahaan telah menetapkan Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Pedoman Etika dan Perilaku diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai.

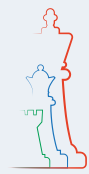
Seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari. Perusahaan secara berkala mengadakan acara untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para pegawai.

	VISI Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi.	MISI • Memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan <i>advisory</i>; • Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan memiliki integritas tinggi; • Menerapkan manajemen yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi; • Memberikan kontribusi kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.	

BUDAYA DAN NILAI PERUSAHAAN

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE 7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nilai-Nilai Utama AKHLAK yang perumusannya telah melalui proses kristalisasi nilai-nilai budaya yang telah ada di BUMN, diyakini selaras dengan kebutuhan transformasi budaya di BUMN yang dibutuhkan untuk mewujudkan 5 (lima) prioritas BUMN.

Core Values AKHLAK terdiri dari Nilai-Nilai AMANAH, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, dan KOLABORATIF.



PENETAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Perusahaan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Januari 2017.

Kode Etik Perusahaan menjadi pedoman dan panduan bagi:

1. Insan Perusahaan;
2. Pihak Eksternal yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan;
3. Perusahaan dan seluruh entitas Anak Perusahaan;
4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan Perusahaan.

KOMITMEN *CODE OF CONDUCT* DAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK KEPADA SELURUH LEVEL ORGANISASI

Komitmen dalam berperilaku dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan menjadi perhatian utama Perusahaan dan menjadi bagian dari etika bisnis dan etika kerja Perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (*value creation*) tidak saja bagi Perusahaan tetapi juga bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan menyusun dan mengembangkan *Code of Conduct/CoC* atau dikenal sebagai Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan standar yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk kriteria kepuasannya. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan yang menjunjung tinggi moral dan integritas dalam menjalankan roda bisnis Perusahaan.

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan di setiap jenjang organisasi Perusahaan, mulai dari pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan.

POKOK-POKOK ISI DAN KEBERLAKUAN *CODE OF CONDUCT* ATAU KODE ETIK

Untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku dengan tujuan mencapai penerapan GCG yang konsisten dan menjadi standar minimal yang harus dipatuhi oleh Insan Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan demi mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan memuat hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang;
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*;
3. Landasan Penyusunan *Code of Conduct*;
4. Visi dan Misi Perusahaan;
5. Definisi dan Istilah.

Bab II Etika Usaha

1. Etika Perusahaan dengan Karyawan;
2. Etika Perusahaan dengan Pemerintah;
3. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham;
4. Etika Perusahaan dengan Pelanggan;
5. Etika Perusahaan dengan Mitra Usaha;
6. Etika Perusahaan dengan Pesaing;
7. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor;
8. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa;
9. Etika Perusahaan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar;
10. Etika Perusahaan dengan Media Massa;
11. Etika Perusahaan dengan Anak Perusahaan.

Bab III Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan

1. Komitmen Insan Perusahaan.
2. Etika Kerja Insan Perusahaan.
 - a. Etika Kerja Sesama Insan Perusahaan;
 - b. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan.



3. Tata Perilaku Insan Perusahaan.
 - a. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya;
 - b. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan;
 - c. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi;
 - d. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan;
 - e. Kesempatan yang Sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
 - f. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*;
 - g. Perlindungan Harta Perusahaan;
 - h. Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan;
 - i. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok;
 - j. Aktivitas Politik.

4. Pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kerja sama Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK.

Setiap Insan Perusahaan telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penerapan kode etik dalam operasional Perusahaan. Persentase penandatanganan komitmen kode etik oleh Insan Perusahaan adalah sebanyak 100%.

Form Komitmen CoC

Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

**Pernyataan Kepatuhan
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
Nomor Induk Pegawai	:
Jabatan	:
Bagian/ Unit Kerja	:

Menyatakan bahwa, saya

- 1) Telah menerima Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- 2) Telah memahami isi dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- 3) Bersedia mematuhi isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- 4) Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sesuai ketentuan yang ditetapkan
- 5) Segera mengkonsultasikan dan/ atau melaporkan pada pihak-pihak berwenang yang telah ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/ atau potensi/ indikasi pelanggaran terhadap pedoman Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari manapun

Jakarta,
Yang memberi pernyataan

Mengetahui,

Nama Karyawan

Atasan yang memberikan pernyataan

26

Bab IV Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku

1. Komitmen Penegakan *Code of Conduct*;
2. Sosialisasi dan Internalisasi;
3. Pelanggaran;
4. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran;
5. Sanksi atas Pelanggaran.

Bab V Penutup

Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

SOSIALISASI DAN UPAYA PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Pedoman Etika dan Perilaku diungkapkan dan/atau disosialisasikan kepada semua Insan Perusahaan melalui berbagai media yang dimiliki Perusahaan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh Insan Perusahaan setiap saat.

Media sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku antara lain melalui:

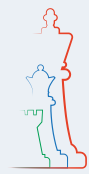
1. Website;
2. Peraturan Perusahaan;
3. Surat Elektronik;
4. Pernyataan Komitmen yang ditandatangani bersama;
5. Iklan di Koran;
6. Sosial Media.

Pada tahun 2020, upaya penegakan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Penandatanganan pakta integritas seluruh Insan Perusahaan yang diperbaharui setiap tahun;
2. Sosialisasi melalui media internal dan eksternal Perusahaan;
3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

1. Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
2. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi;
3. Dewan komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Sanksi bagi mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.



PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Bagi Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik, Perusahaan dapat memberikan sanksi dengan tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang berbeda.

Tingkat Pelanggaran	Jenis Sanksi
Hukuman Disiplin Ringan	Surat Peringatan Pertama
Hukuman Disiplin Sedang	Surat Peringatan Kedua
	Surat Peringatan Ketiga
Hukuman Disiplin Berat	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

LAPORAN DAN PENINDAKAN TAHUN 2020

Sebagai realisasi penegakan Kode Etik Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019.

Sanksi	2020	2019
Hukuman Disiplin Ringan	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-
Jumlah	-	-

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN CoC

Perusahaan telah melakukan survei pemahaman atas CoC sebagai evaluasi terhadap efektivitas pemahaman dan pelaksanaan CoC yang dilakukan pada tahun 2020 sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil asesmen penerapan GCG tahun 2019.

EVALUASI TERHADAP CoC

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, CoC dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai prinsip GCG dan perkembangan lingkungan usaha. Evaluasi terakhir yang dilakukan Perusahaan terhadap CoC pada tanggal 31 Januari 2017.



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah disahkan melalui Surat Keterangan No. SK-13/KEP/KOM/PPA/VII/2020 dan SK-58/PPA/0720 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di PPA.

LATAR BELAKANG

Perusahaan senantiasa terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta pertumbuhan usaha jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya kegiatan bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip GCG.

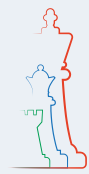
Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari adalah adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal terkait Gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap pengendalian Gratifikasi yang melibatkan Insan Perusahaan dalam kegiatan Perusahaan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Kebijakan ini disusun untuk mengatur penanganan gratifikasi antara Insan Perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perusahaan karena gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 4756);
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.1341/01-13/0312017 tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.



MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan;
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik;
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

PRINSIP DASAR GRATIFIKASI

1. Perusahaan mewajibkan semua Insan Perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Insan Perusahaan dilarang baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:
 - a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
 - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/karyawan.
 - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
2. Apabila Insan Perusahaan ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang diperkenankan dalam kebijakan ini sesuai dengan ketentuan pada Bagian 3.3.3 di bawah ini, wajib melakukan penolakan secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya kebijakan ini di Perusahaan.
3. Dalam hal Insan Perusahaan tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi karena kondisi tertentu seperti:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi; dan
 - d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, misalnya dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain maka untuk menghindari ancaman pidana, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut, atau melalui Tim Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK.
4. Terhadap barang Gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola oleh Perusahaan, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan sebagai barang *display* Perusahaan;
 - b. Digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan;
 - c. Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan; atau
 - d. Diserahkan kepada karyawan yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

KATEGORI GRATIFIKASI

1. Gratifikasi dikategorikan menjadi:
2. Gratifikasi terkait jabatan;
3. Gratifikasi dalam kedinasan;
4. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.

PEMANTAUAN GRATIFIKASI

Divisi Satuan Pengawasan Intern melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala setiap tahunnya kepada Direktur Utama.

MEKANISME PELAPORAN

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Kebijakan ini;
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Insan Perusahaan melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh atasannya minimal setingkat Kepala Grup selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan *form* penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ini;
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Kebijakan ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut;
4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah kadaluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 kebijakan ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern;
5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ini;
6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluwarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi yang melibatkan Insan Perusahaan.



PEDOMAN PERUSAHAAN TERKAIT KETERLIBATAN DALAM AKTIVITAS POLITIK

Perusahaan memiliki kebijakan tidak akan ada kontribusi yang berasal dari dana perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan independensi Perusahaan sebagai BUMN yang memiliki integritas dalam pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pelarangan pemberian dana juga berguna untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan yang ditetapkan.

Perusahaan tidak melarang seluruh karyawan untuk terlibat dalam politik. Namun demikian, Perusahaan melarang karyawan yang terlibat dalam politik menggunakan atribut Perusahaan.



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan memiliki kebijakan terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan akuntabel serta memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") telah menyusun Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, *Guideline* Pengadaan Jasa Konsultan dan *Guideline* Pengadaan Barang dan Jasa Operasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/ MBU/2012.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, maka perlu dilakukan revisi (yang merupakan revisi kedelapan) dan penggabungan atas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan *Guideline* tersebut di atas menjadi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (selanjutnya disebut "Kebijakan").

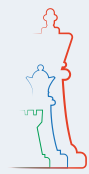
Tujuan penyusunan Kebijakan ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
2. Sebagai dasar penyusunan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih rinci dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disusun oleh satuan kerja yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ruang lingkup Kebijakan ini meliputi:

1. Prinsip, etika dan pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa;
2. Jenis pengadaan, pengguna, pelaksana pengadaan, tim evaluasi, serta penyedia barang/jasa;
3. Metode pengadaan barang/jasa, harga perkiraan sendiri, dan metode evaluasi penetapan pemenang;
4. Sanggahan dan pengadaan gagal;
5. Kontrak, serah terima dan pembayaran barang/jasa;
6. Administrasi dan pelaporan.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk pengadaan/penunjukan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan PPA mengingat pengadaan/penunjukan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud mengacu pada Anggaran Dasar PPA.



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Pasal 2 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

KEBIJAKAN LHKPN PERUSAHAAN

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, PT PPA diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan memperkuat peranan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi. Untuk itu, PPA telah menyusun ketentuan terkait LHKPN melalui Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0719 tentang Penetapan Pejabat Wajib Laporkan, Koordinator Pengelolaan dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Tujuan penyusunan Kebijakan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi LHKPN secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat dengan jabatan Kepala Divisi/General Manager dan jabatan fungsional setingkat Kepala Divisi/*General Manager*, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi entitas anak. Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelola LHKPN adalah Kepala Divisi/General Manager *Human Capital*.



Penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada KPK pada saat pengangkatan pertama kali menjabat, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Karyawan. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Karyawan.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

LHKPN disampaikan melalui aplikasi *e-LHKPN* pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pengumuman LHKPN dilaksanakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK. Dalam hal Wajib LHKPN tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat diberikan sanksi administratif kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan sebagai berikut:

Jabatan	Sanksi Administratif
Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	Penundaan Pembayaran Tantiem/Insentif Kinerja Atau Penundaan Pembayaran Santunan Purna Jabatan
Kepala Divisi/ <i>General Manager</i> dan Jabatan Fungsional Setingkatnya	Penundaan Pembayaran Apresiasi/Insentif Kinerja Tahun Berjalan Dan Penundaan Promosi Pangkat/Golongan
Dewan Komisaris & Anggota Direksi Entitas Anak	Penundaan Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja Penundaan Pengangkatan Kembali Sebagai Dewan Komisaris/Anggota Direksi Kembali

PENGELOLA LHKPN DI PT PPA

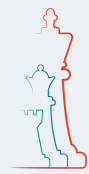
Pengelola dan administrator LHKPN di Lingkungan PT PPA ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0719 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lap, Koordinator Pengelolaan dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Adapun pengelola dan administrator LHKPN yang ditunjuk adalah Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2020

Di bawah ini disampaikan pelaporan LHPKN hingga akhir periode 2020.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2020

Pejabat Wajib LHKPN	Jumlah Wajib Lap	Telah Melaporkan	
		Jumlah	%
Dewan Komisaris	2	2	100,00%
Direksi	3	3	100,00%
Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak	15	15	100,00%
Kepala Divisi (BOD-1)	15	15	100,00%
Jumlah	35	35	100,00%



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) berperan penting dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta merupakan bagian dari pemeliharaan budaya dan kepedulian atas anti *fraud* di jajaran organisasi Perusahaan. Perusahaan menetapkan kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu bagian yang menjadi acuan perilaku dan budaya kerja Perusahaan. Kebijakan WBS Perusahaan senantiasa dilakukan pemutakhiran untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

DASAR KEBIJAKAN WBS

Perusahaan telah menyusun pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi: SK-49/PPA/0620 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*-WBS).

TUJUAN

Tujuan penyusunan WBS adalah sebagai pedoman dalam menerapkan dan mengelola pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan, sehingga tercipta hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dan terjadinya pelanggaran;
5. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

LINGKUP PELAPORAN PELANGGARAN

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Korupsi;
2. Kecurangan;
3. Gratifikasi;
4. Benturan kepentingan;
5. Pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan bisnis Perusahaan;
6. Pelanggaran peraturan/kebijakan/prosedur internal yang dapat merugikan Perusahaan;

7. Ketidapatutan dalam etika bisnis dan etika kerja yang berlaku secara umum.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Pihak yang mengelola Laporan Pelanggaran di Perusahaan adalah Fungsi Penerima Laporan yang berasal dari Divisi Satuan Pengawas Intern (SPI). Fungsi Penerima Laporan melakukan analisis laporan untuk pengumpulan bukti dan informasi. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada pihak atau fungsi yang berwenang sesuai dengan peraturan Perusahaan untuk penetapan dan pemberian sanksi.

Berikut adalah Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Perusahaan:

1. Ketua: Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern.
2. Anggota: Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi SDM dan Umum, Kepala Divisi Manajemen Risiko, dan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG.
3. Sekretaris: Personil dari Divisi SPI yang ditunjuk oleh Kepala Divisi SPI untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.

SALURAN LAPORAN PELANGGARAN

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap pihak terkait dengan Perusahaan atau pihak ketiga di luar Perusahaan yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui:

1. *E-mail* : whistleblowing@ptppa.com, atau
2. Surat : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran,
Gedung Menara Mandiri II 7th – 9 Floor
Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 54-55,
RT.5/RW.3, Jakarta 12190
3. *Website* : www.ptppa.co.id
Perusahaan

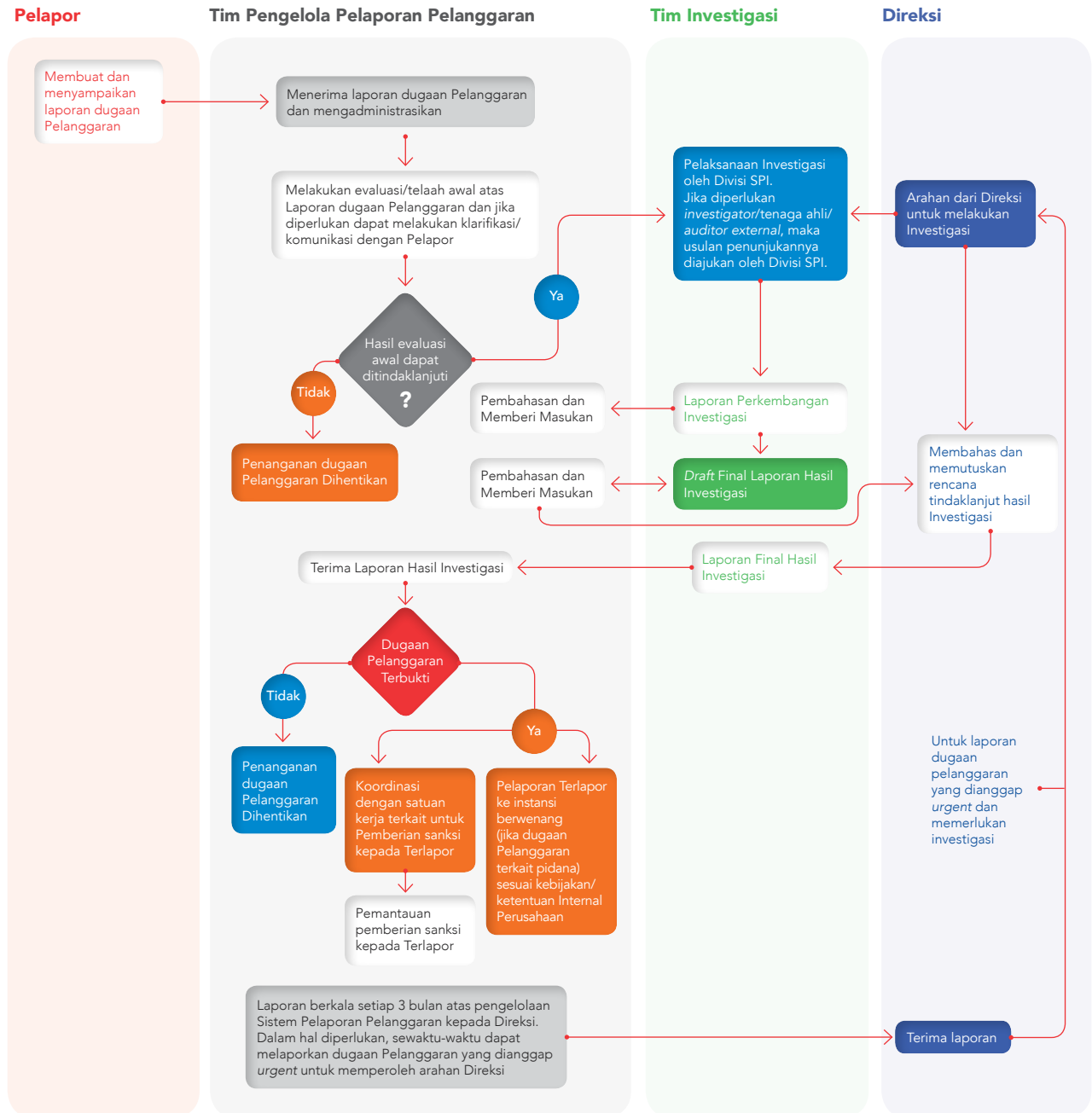
Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh personil Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Direktur Utama melalui media sebagai berikut:

- E-mail* : dirut-whistleblowing@ptppa.com, atau
- Surat : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
u.p Direktur Utama
Gedung Menara Mandiri II 7th – 9 Floor
Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 54-55, RT.5/RW.3,
Jakarta 12190



MEKANISME DAN ALUR PELAPORAN PELANGGARAN

Alur pelaporan melalui WBS adalah sebagai berikut:





PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan terhadap pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan terhadap identitas pelapor.
2. Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di Perusahaan sebagai akibat dari adanya laporan dugaan pelanggaran oleh insan Perusahaan antara lain:
 - a. Pemecatan yang tidak adil;
 - b. Penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
 - d. Catatan yang merugikan dalam personal *file record*.
3. Jaminan bagi *stakeholders* bahwa Perusahaan tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berhubungan dengan Perusahaan.

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Setiap laporan WBS yang masuk akan dicatat dan didaftarkan pada registrasi khusus yang dibuat oleh Tim WBS, kemudian dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan selanjutnya dibuat rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk melakukan pendalaman;
2. Jika laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat minimal pelaporan dalam sistem WBS Perusahaan, Tim WBS dapat menyatakan tidak akan melanjutkannya ke tahap investigasi, dan menutup masalah yang dilaporkan tersebut;
3. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan investigasi, maka Tim WBS menyampaikan perkembangannya kepada Direksi;
4. Setelah selesai investigasi, apabila terbukti maka Tim WBS akan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memberikan sanksi, jika terkait dengan adanya tindak pidana, maka tim WBS akan menyerahkan kepada instansi yang berwenang;
5. Hal-hal yang terkait dengan pelanggaran yang dianggap *urgent* maka akan dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

JUMLAH PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

Sepanjang tahun 2020, pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan sebanyak 2 (dua) dan berdasarkan verifikasi yang masuk ke tahap tindak lanjut sebanyak 2 (dua) laporan. Berikut laporan yang masuk ke tahap tindak lanjut sepanjang tahun 2020 dan 2019.

No	Status	Jumlah Aduan dan Tindak Lanjut Tahun 2020	Jumlah Aduan dan Tindak Lanjut Tahun 2019
Proses Klarifikasi & Pemenuhan Persyaratan			
1	Proses klarifikasi	-	1
2	Pemenuhan Persyaratan		
	a. Memenuhi syarat (untuk diinvestigasi)	2	-
	b. Tidak Memenuhi Syarat	-	1
	Jumlah Aduan	2	2
Proses Investigasi & Putusan			
1	Dalam proses Investigasi	2	-
2	Telah menjadi putusan		
	a. Memenuhi syarat (untuk diinvestigasi)	-	-
	b. Tidak Memenuhi Syarat	-	1
	Jumlah	2	1



Selama tahun 2020, Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menerima 2 (dua) pelaporan dugaan pelanggaran yaitu:

1. Surat Pengaduan dari Gerakan Pemuda Nusantara ("GENPATRA") No. 007/GenPATRA/VI/20 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pengaduan Pabrik Milik BUMN Tidak Berijin dan Mencemari Lingkungan, yang diterima pada tanggal 24 Juli 2020.
2. Resume Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ("KPK RI") melalui Surat No. R/1440/PM.00.00/40-43/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PPA perihal Koordinasi atas Informasi Pengaduan Masyarakat, yang diterima PT PPA dari KPK RI pada tanggal 25 Agustus 2020.

Laporan Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran untuk tahun 2020 telah dilaksanakan penanganan pengaduannya oleh tim *Whistleblowing System* dan telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin efektivitas penerapan WBS perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal penancangan sistem WBS dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku. *Monitoring* dan evaluasi dapat dilakukan oleh Direksi melalui Divisi SPI atau menggunakan pihak luar yang independen. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem WBS maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi asesmen penerapan GCG. Hasil *monitoring* dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.



TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan dari pihak lain atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Selama tahun 2020 Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak dari perusahaan, yaitu sebagai berikut.

Uraian	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	23,759	22,134
Pajak Penghasilan Pasal 22	-	97
Pajak Penghasilan Pasal 23	58,817	63,605
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	4,796
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	573,296	715,654
Pajak Penghasilan Pasal 22	3,957	11
Pajak Penghasilan Pasal 23	1,567	3,816
Pajak Penghasilan Pasal 25	2	820
Pajak Penghasilan Pasal 28a	-	1,641
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2	993	2
Jumlah	662,391	812,576

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Selama tahun 2020 tidak terdapat kasus terkait dengan buruh dan karyawan.

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan PPA untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

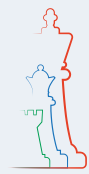
Laporan Tahunan *digital* Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PPA secara konsisten mengupayakan keseimbangan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*), serta menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang Perusahaan. PPA juga senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.





TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa sebuah organisasi, memiliki bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingannya dalam segala aspek operasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”. Di mana dalam melaksanakan aktivitasnya, setiap perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi sebuah perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

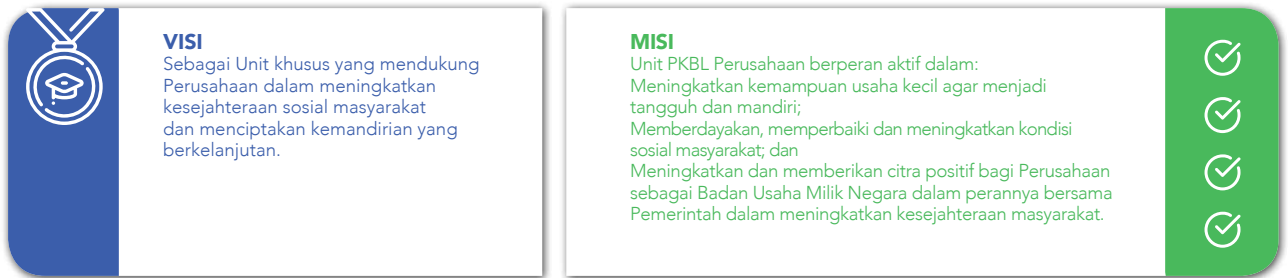
Perusahaan secara konsisten terus mengupayakan keseimbangan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*), serta menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Upaya-upaya tersebut telah membawa Perusahaan menjadi sebuah organisasi yang menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik. Bagi Perusahaan, CSR merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yang cukup berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari *corporate citizen*, Perusahaan berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan 5P (*people, planet, prosperity, partnership, and peace*). Dengan menggunakan pendekatan 5P diharapkan terwujudnya keseimbangan manusia, bumi, kesejahteraan, melalui kerja sama yang kuat untuk menciptakan perdamaian. Sehingga Perusahaan tidak hanya mementingkan kebermanfaatan bagi para pemegang saham, tetapi juga bertanggung jawab secara luas bagi para pemangku kepentingan baik pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

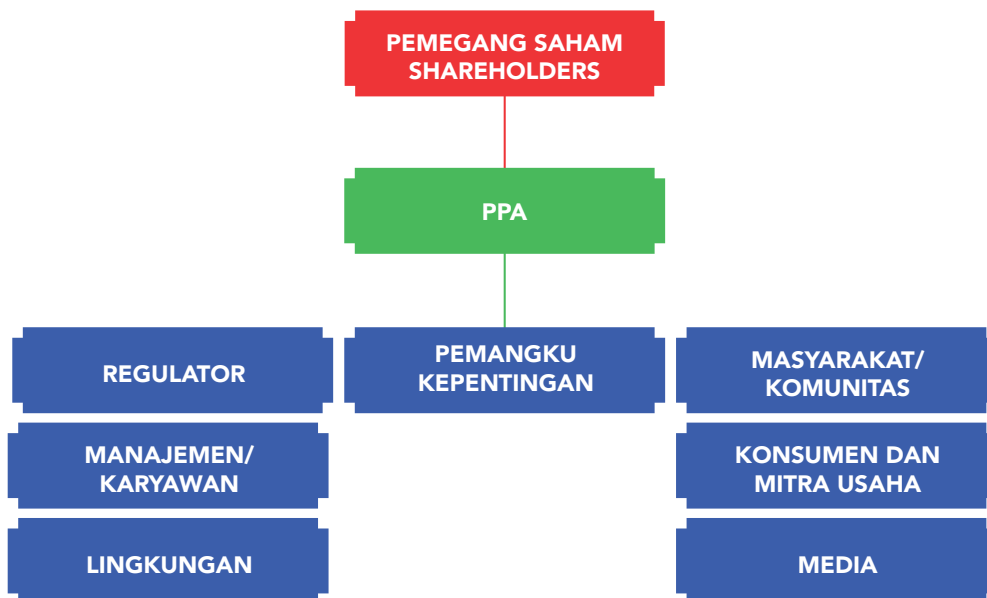
Perusahaan mengimplementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikarenakan kepercayaan Perusahaan bahwa untuk membuat sebuah kesinambungan usaha tidak hanya diperoleh melalui suatu pencapaian target *profit* dari kelangsungan usaha semata, tetapi juga perlu ditunjang dengan aspek lainnya di luar *profit oriented*, salah satunya melalui kontribusi Perusahaan terhadap pengembangan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta juga *responsive* terhadap bencana alam dan musibah besar lainnya yang terjadi di tengah masyarakat.

Secara konsisten Perusahaan melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang menyentuh langsung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik kebutuhan pengembangan usaha melalui Program Kemitraan, maupun kebutuhan langsung melalui Program Bina Lingkungan. Hal tersebut disebabkan Perusahaan menyadari bahwa dengan kondisi masyarakat sekitar yang sejahtera dan terjamin akan berdampak positif bagi keberlangsungan usaha Perusahaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan PKBL Perusahaan merujuk pada visi dan misi kegiatan PKBL Perusahaan.



Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka Perusahaan senantiasa melibatkan para pemangku kepentingan dalam setiap agenda dan program kegiatan TJSL Perusahaan, di mana Perusahaan menempatkan para pemangku kepentingan sebagai mitra strategis Perusahaan yang memiliki harapan serta kepentingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Dengan pelibatan tersebut Perusahaan meyakini akan terciptanya harmonisasi yang dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha Perusahaan.

Keseimbangan dalam Rantai Usaha PPA yang Berkelanjutan



PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN

Perusahaan mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang diperkirakan terpengaruh secara signifikan dari kegiatan, produk, dan/atau layanan Perusahaan. Untuk itu Perusahaan diharapkan dapat menerapkan strategi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, sebab bagi Perusahaan keberadaan, kegiatan, dan keberlanjutan usaha sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan.

Maka dari itu, Perusahaan senantiasa membina hubungan baik kepada para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen,

pemerintah, masyarakat dan lingkungan hidup; dengan senantiasa berupaya memenuhi harapan yang wajar dari semua pemangku kepentingan. Sebagai upaya untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan, Perusahaan senantiasa taat dan patuh kepada kebijakan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara aktif Perusahaan melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan dan memberikan informasi secara berkala yang salah satunya melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan berkala kepada publik. Perusahaan senantiasa menerima segala masukan dari pemangku kepentingan sebagai *feedback* dari dialog dan pelaporan yang ada, di mana selanjutnya *feedback* tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan terkait kegiatan operasional Perusahaan.



Adapun pemangku kepentingan yang signifikan terkait dengan kegiatan, strategi dan program kerja Perusahaan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan pelibatan *stakeholder* adalah sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	Isu-isu Penting	Harapan Pemangku Kepentingan kepada Perusahaan
Pemegang Saham & Pemodal	- Pertumbuhan laba - Pertumbuhan harga saham - Dividen	- Tata kelola perusahaan yang baik - Ketersediaan informasi mengenai Perusahaan
Pemasok	- Kontrak jangka panjang - Pembayaran yang cepat - Peningkatan pembelian	- Proses pemilihan pemasok (tender) yang <i>fair</i> - Perlakuan yang wajar dan adil - Ketepatan pemenuhan kewajiban kontraktual - Ketersediaan panduan bagi pemasok
Karyawan & Serikat Pekerja	- Gaji dan upah - Keamanan pekerjaan - Kepuasan kerja - Motivasi	- Kepatuhan pada peraturan Pemerintah mengenai ketenagakerjaan - Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan - Kesejahteraan karyawan
Konsumen	- Jaminan mutu - Kestabilan harga - Ketersediaan barang/jasa - Pelayanan konsumen	- Proses tender yang <i>fair</i> - Pemenuhan hak pelanggan - Kepuasan pelanggan
Pemerintah	- Legalitas operasi - Penerimaan pajak - Penyediaan lapangan kerja	- Kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan pemerintah - Ketersediaan informasi yang relevan dengan kepentingan pemerintah
Masyarakat	- Dampak ekonomi - Peluang pekerjaan lokal	- Peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan kerja dan kesempatan sebagai pemasok - Program pengembangan masyarakat - Ketersediaan informasi yang relevan dengan kepentingan masyarakat
Lingkungan	Pencemaran lingkungan	Keseimbangan ekosistem melalui pemeliharaan lingkungan, pelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati

ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki komitmen untuk menyelaraskan kinerja usaha dengan pemberian manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari pemangku kepentingan, baik manfaat aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Perusahaan berharap melalui kegiatan usahanya akan memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi kelompok masyarakat termasuk Pemerintah. Kegiatan usaha Perusahaan bidang keuangan tidak berdampak secara langsung terhadap pencemaran lingkungan, sehingga Perusahaan tidak memiliki program khusus terkait pemeliharaan lingkungan.

Keyakinan Perusahaan bahwa dengan kesinambungan usaha Perusahaan tidak hanya serta merta melalui pencapaian target *profit*, melainkan perlu juga ditunjang aspek *non financial* lainnya, sehingga memberikan dampak pada peningkatan nilai (*value*) bagi kepuasan seluruh *stakeholders* dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

LINGKUP DAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, BAIK YANG KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Sebagai Perseroan Terbatas di mana Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir, dasar pelaksanaan program TJSL oleh Perusahaan dilandasi pada kewajiban yang mengacu pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut:
 - Pasal 2: salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
 - Pasal 88: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.



6. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
11. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
13. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN") Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 02/MBU/04/2020 ("PER-02/2020").

Perusahaan melaksanakan kewajiban TJSL melalui kegiatan PKBL dan tidak melaksanakan secara khusus program CSR. Berikut disampaikan gambaran tentang kewajiban yang diemban oleh Perusahaan dalam pengimplementasian TJSL.

Faktor Pembentuk	Kewajiban dan Kepatuhan
Sebagai entitas usaha yang berdomisili di Indonesia	Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas yang berdomisili di Indonesia, seperti ketenagakerjaan, K3, perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, dsbnya.
Sebagai entitas usaha dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir sekaligus Pemegang Saham Pengendali	Meskipun statusnya bukan lagi BUMN, Perusahaan diperlakukan selayaknya BUMN dan wajib menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

ORGANISASI, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA

Pelaksanaan kegiatan TJSL di Perusahaan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Unit PKBL, di mana Kepala PKBL Perusahaan dijabat oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Struktur Organisasi Unit PKBL Perusahaan



Lingkup tugas dan tanggung jawab Unit PKBL adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan rencana kerja, kebijakan dan SOP PKBL dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Perusahaan;
2. Menyusun rencana, mengimplementasikan, dan mengawasi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. Melaksanakan kegiatan akuntansi PKBL sampai dengan pelaporan interim dan tahunan;
4. Menyusun Laporan PKBL secara berkala dan Laporan Tahunan PKBL termasuk pemutakhiran portal PKBL sesuai ketentuan.



PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Berikut disampaikan biaya dan/atau investasi yang dikeluarkan Perusahaan dalam kegiatan TJSL di tahun 2020.

Aspek	Realisasi 2020 (Rp-Juta)	Target 2020 (Rp-Juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)		Realisasi 2019 (Rp-Juta)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019	
	1	2	(1:2)		3	(1:3)	
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	6.590	6.533	100,87%	↑	11.158	-40,94%	↓
Program Kemitraan	4.590	4.533	101,26%	↑	9.158	-49,88%	↓
Program Bina Lingkungan	2.000	2.000	100,00%	↑	2.000	-	-
Pengembangan Kompetensi SDM	846	1.500	56,41%	↓	2.208	-61,68%	↓

Sebagian besar dana tanggung jawab sosial Perusahaan digunakan untuk kegiatan CSR pada aspek Sosial Kemasyarakatan dan kegiatan kepedulian terhadap Lingkungan Hidup melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sementara untuk aspek Ketenagakerjaan dan K3, serta aspek tanggung jawab terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen dan Pemasok, mengikat pada biaya operasional Perusahaan.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa mengedepankan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Perusahaan meyakini bahwa HAM merupakan hak dasar dari seorang manusia, di mana meliputi hak sosial, hukum, dan ekonomi.

Sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan terkait HAM, Perusahaan menjadikan HAM sebagai panduan prinsip keberlanjutan, diharapkan keberadaan Perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan Perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, mudah memperoleh akses terhadap modal, mampu mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis, mempermudah pengelolaan manajemen risiko serta terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat yang ingin bergabung dengan Perusahaan tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal perekrutan calon karyawan.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM

Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam HAM di setiap kegiatan operasionalnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM di Perusahaan ialah penegakkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.

SASARAN, RENCANA DAN TARGET KEGIATAN

Perusahaan menekankan betapa pentingnya hak-hak karyawan khususnya yang berkaitan dengan HAM, seperti mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak-hak dasar hidup lainnya seperti kelahiran.

Secara internal, Perusahaan telah memiliki prosedur tetap yang mengatur pemenuhan HAM bagi karyawan Perusahaan, di mana prosedur tersebut senantiasa dievaluasi dan dikembangkan yang selaras dengan kebutuhan hidup yang semakin berkembang.

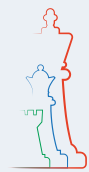
PENERAPAN INISIATIF HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan berkomitmen untuk memberi perhatian yang tinggi atas HAM yang berlandaskan pada kebijakan internasional yakni *Universal Declaration of Human Rights*, termasuk juga kovenan internasional pada hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan kultural serta Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dasar dan hak-hak dalam Bekerja, dengan penerapan dan pengelolaan yang baik terhadap praktik ketenagakerjaan serta hak asasi manusia sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa implementasi dalam tanggung jawab sosial yang terkait aspek HAM antara lain:

1. Sebagai penerapan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama baik pria maupun wanita untuk bergabung bersama Perusahaan;
2. Selama tahun 2020 tidak terjadi insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan Perusahaan. Hal ini merupakan bukti penerapan Perusahaan terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sekaligus mematuhi konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
3. Pegawai tidak tetap, hak-haknya dilindungi berdasarkan kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kebijakan Peraturan Perusahaan.

Kesetaraan peluang dalam bekerja di Perusahaan merupakan penerapan-penerapan prinsip hak asasi manusia di tempat kerja di mana hak semua orang yang bekerja dengan Perusahaan dihargai sebagaimana mestinya. Kondisi ini diperlukan agar bisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sekaligus terpenuhinya hak-hak asasi manusia.



Kesetaraan di tempat kerja diwujudkan dengan keberagaman dan inklusi untuk semua orang, dengan menghormati dan menghargai ragam perbedaan termasuk suku, *gender*, usia, asal bangsa, diskriminasi orientasi seksual, pendidikan dan agama. Sebaliknya inklusi keberagaman di tempat kerja memberikan bermacam-macam perspektif, pengalaman kerja, gaya hidup dan budaya. Bagi Perusahaan keberagaman dalam organisasi diperlukan untuk berkembang, keberagaman pikiran dan hati maupun bakat merupakan modal untuk membuka peluang bisnis.

DAMPAK DAN PENCAPAIAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait hak asasi manusia sebagian besar menitikberatkan pada isu ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak mendapatkan atau menerima pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia antara lain pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran HAM maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkup Perusahaan serta insiden kerja paksa yang dialami karyawan. Hal ini dipengaruhi oleh upaya penerapan dan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang telah dijalankan dengan baik oleh seluruh Insan Perusahaan.

Penerapan aspek HAM dalam program tanggung jawab sosial kepada karyawan telah memberikan sejumlah manfaat di antaranya terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman sehingga meningkatkan loyalitas karyawan dan membentuk citra positif Perusahaan.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Merujuk kepada ISO 26000 terkait program CSR yang berkenaan dengan praktik operasi yang adil di mana meliputi anti korupsi, keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*) dan penghargaan atas *property rights*. Hal tersebut dikarenakan bagi Perusahaan pelaksanaan tanggung jawab sosial haruslah bersifat menyeluruh dari hulu sampai hilir, kegiatan CSR tidak hanya mencakup kegiatan di luar operasional Perusahaan melainkan juga terkait kegiatan operasi Perusahaan.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel;
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan;
4. Konsumen dengan kepentingan atas mutu produk dan layanan;
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

RENCANA KEGIATAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan beserta organ internal Perusahaan yakni Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (GCG).

Selain itu Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan

konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan, yang juga sesuai dengan komitmen Perusahaan untuk terus melawan korupsi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

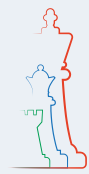
PENERAPAN INISIATIF OPERASI YANG ADIL

Komitmen Anti Korupsi dan Anti Fraud

Komitmen Perusahaan untuk terus mendukung dan berpartisipasi pada upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan bentuk implementasi Perusahaan pada penerapan GCG di lingkup internal Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga, segala bentuk pelanggaran atas integritas, etika, dan perilaku tidak pantas khususnya terkait *fraud* dan korupsi merupakan pelanggaran berat bagi Perusahaan.

Sebagai bentuk nyata dalam komitmen Perusahaan untuk menegakan peraturan tersebut ialah Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Perilaku dan Etika serta Peraturan Perusahaan. Di mana seluruh karyawan Perusahaan harus memiliki komitmen untuk mematuhi dan mengikuti pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas. Di dalam pedoman tersebut juga diatur tentang sanksi yang tegas dan tanpa kompromi kepada siapa saja jika terdapat indikasi korupsi, penipuan atau pelanggaran perilaku lainnya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan antikorupsi dan penyalahgunaan wewenang, Perusahaan menjalankan dua inisiatif utama, yakni implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian internal, serta implementasi kebijakan penindakan. Kebijakan pengawasan dan pengendalian internal, dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal. Sementara implementasi kebijakan penindakan dilakukan melalui Sistem *Whistleblowing* yang pada dasarnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan telah menetapkan *whistleblowing system* untuk mengumpulkan informasi pelanggaran, terutama yang menyangkut hukum dan peraturan, serta untuk menangani tindakan kesalahan melalui sistem perbaikan diri. *Whistleblowing* adalah mekanisme pelaporan internal untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya pelanggaran atau *fraud*.



Selain itu, Perusahaan memiliki perangkat kebijakan lainnya, antara lain:

1. Pakta Integritas
Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh karyawan Perusahaan telah berkomitmen dan menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan dan tata tertib perusahaan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas juga berlaku bagi seluruh *supplier* yang bekerja sama dengan Perusahaan. Tujuan dari pakta integritas tersebut adalah untuk mendorong keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis Perusahaan.
2. Kebijakan Anti Gratifikasi
Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pimpinan Senior Perusahaan.
3. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Perusahaan memiliki komitmen yang kuat akan kepatuhan insannya dalam menjaga citra Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang untuk mencemarkan nama baik Perusahaan melalui tindakan-tindakan yang merugikan citra Perusahaan. Seluruh insan Perusahaan dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Komunikasi dan Pelatihan Antikorupsi

Untuk menjamin kesamaan persepsi, kesamaan tekad dan efektivitas gerakan pencegahan tindak korupsi, Perusahaan juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertema *antifraud*/antikorupsi. Pendidikan dan pelatihan khusus menyangkut korupsi dilakukan melalui kegiatan *Workshop* dan *Training*, selain itu juga dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai perwujudan transparansi dan perilaku anti suap melalui pengungkapan harta kekayaan (LHKPN) dan Pengendalian Gratifikasi dengan peserta Dewan Komisaris dan Direksi.

DAMPAK DAN PENCAPAIAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Komitmen Perusahaan dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil turut berkontribusi pada semakin kuatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan juga berhasil meraih sejumlah pencapaian yang tercermin dari tidak terdapatnya laporan kasus indikasi korupsi dan suap yang dihadapi oleh anggota Dewan komisaris, anggota Direksi serta karyawan maupun anak usaha Perusahaan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan menyadari bahwa setiap kegiatan operasionalnya memiliki dampak bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Perusahaan senantiasa berupaya untuk meminimalisir dampak tersebut yang mana dilakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terkait lingkungan hidup. Kebijakan Perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal Perusahaan, yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait lingkungan hidup didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air maka dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan senantiasa melakukan penghematan energi dan air.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS LINGKUNGAN

Perusahaan menyadari aktivitas bisnis yang dilakukan memberikan dampak bagi lingkungan. Untuk itu Perusahaan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam

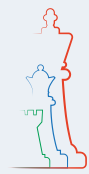
rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan. Kebijakan Perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal Perusahaan, yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Perusahaan memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kegiatan Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan sebagai acuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional. Perusahaan juga merealisasikan program penghematan energi dan air sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap lingkungan hidup adalah membangun dan menjaga pelestarian ekosistem alam, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan hidup.

SASARAN, RENCANA DAN TARGET

Perusahaan merumuskan program CSR terkait lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan hidup, karena Perusahaan menyadari dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus terdapat keharmonisan antara berbagai aspek salah satunya lingkungan sekitar. Perencanaan pelaksanaan CSR Perusahaan terkait lingkungan disebutkan sebagai berikut:

No	Strategi	Tujuan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
1	Implementasi Pengelolaan Emisi Udara	Pemenuhan baku mutu lingkungan dalam seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan kendaraan dinas	Pemantauan dan pengukuran rutin serta pengendalian proses agar baku mutu terpenuhi	Program keberlanjutan setiap tahun
2	Implementasi Penghijauan	Melakukan penanaman pohon	Penanaman pohon	Program keberlanjutan
3	Implementasi Efisiensi Energi	Penghematan listrik untuk pemakaian sendiri	Melaksanakan program-program efisiensi energi	Program keberlanjutan setiap tahun



PELAKSANAAN PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Kegiatan yang dilakukan sebagai wujud komitmen dalam menjaga lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Edukasi Pemeliharaan Lingkungan
Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan pemberian fasilitas tempat sampah.
2. Efisiensi Penggunaan Material Kertas (*Paperless*)
Mengurangi konsumsi kertas dengan beberapa inisiatif, seperti pemakaian kertas bolak balik, menghentikan penggunaan kertas untuk dokumen pembukaan tender, membiasakan mengirim dokumen melalui email, sehingga hanya mencetak halaman yang diperlukan, serta pemakaian kembali kertas bekas. Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan yaitu melalui dukungan Teknologi Informasi sehingga transaksi yang berbasis kertas diganti dengan tanpa kertas (*paperless*).
3. Pengaturan Penggunaan Kendaraan Operasional
Melakukan kontrol yang ketat pada penggunaan bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor serta pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara teratur sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan penghematan bahan bakar.
4. Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME)
Membantu mengurangi penggunaan energi dan listrik serta memperpanjang usia pemakaian peralatan ME yang dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dampak dari limbah peralatan ME.
5. Efisiensi Konsumsi Energi Listrik
Hemat listrik dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, mematikan komputer dan peralatan elektronik lain jika akan ditinggal atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, misalnya saat makan siang atau menghadiri rapat atau pulang kantor. Selain itu, sedapat mungkin mematikan lampu-lampu untuk ruangan yang telah cukup mendapatkan penerangan alamiah dari sinar matahari.
6. Pencapaian Udara Bersih dan Udara Sehat
Mengurangi polusi udara dengan cara menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (oktan tinggi) untuk kendaraan operasional kantor, rutin melakukan uji emisi dan peremajaan kendaraan operasional.
7. Pengelolaan Limbah
Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, Perusahaan melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya uji emisi dan penggunaan BBM dengan kualitas yang baik bagi kendaraan dinas dan operasional yang lebih ramah lingkungan. Untuk limbah beracun yang didapat dalam operasional sehari-hari, yaitu oli bekas dari kendaraan operasional, Perusahaan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Program Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan.

PENERAPAN INISIATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka menjaga keselarasan dan keselamatan bumi, Perusahaan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Selama tahun 2020 partisipasi aktif tanggung jawab Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan dalam program sebagai berikut:

1. Komitmen Perusahaan dalam melakukan hemat energi yaitu melalui kebijakan mematikan lampu-lampu di seluruh area kerja yang telah cukup mendapatkan penerangan alamiah dari sinar matahari pada saat istirahat dan waktu pulang kantor;
2. Komitmen Perusahaan dalam pengurangan penggunaan material berbahan plastik yaitu dengan menyediakan dispenser dan gelas berbahan nonplastik di setiap area kerja dan menghentikan penyediaan minuman dalam kemasan plastik.

SARANA PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Untuk merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, Perusahaan membuka segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, khususnya terkait aktivitas yang dilakukan Perusahaan jika ditemukan terkait dengan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Pengaduan bisa disampaikan melalui *website* Perusahaan, dengan alamat www.ptppa.com.

Pada tahun 2020, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan; termasuk juga tidak ada denda atas ketidakpatuhan Perusahaan terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan tidak memiliki operasi yang langsung berdampak terhadap lingkungan, dengan demikian tidak terdapat sertifikasi terkait lingkungan hidup.

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PENGELOLAAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2020, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya terkait pengelolaan aspek lingkungan hidup.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam tanggung jawab sosial Perusahaan terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perusahaan telah mencanangkan langkah strategis yang mana terdapat perumusan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Perusahaan. Perusahaan memandang bahwa SDM yang dimiliki bukan sekadar aset Perusahaan tetapi juga merupakan mitra kerja strategis untuk mencapai tujuan dari Perusahaan.

Perusahaan menjamin tidak terjadi diskriminasi di lingkungan Perusahaan sehingga tercipta perlakuan yang adil, jujur, dan transparan di kalangan karyawan, sehingga semua karyawan bisa bekerja dengan baik dan maksimal sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan baik dalam pengembangan kompetensi, penerimaan karyawan, penilaian kinerja, remunerasi maupun jenjang karier, serta menyediakan pemenuhan hak lainnya seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan dan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif di lingkungan Perusahaan.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Di dalam tanggung jawab sosial Perusahaan terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pemangku kepentingan yang berdampak ialah karyawan Perusahaan, di mana Perusahaan senantiasa untuk memberikan hak-hak dasar guna meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perusahaan juga memantau K3 dan memberikan pengembangan kompetensi bagi para karyawannya.

Terkait rekrutmen dan promosi karyawan, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat bekerja di Perusahaan. Hal itu juga berlaku untuk pengembangan karier bagi SDM Perusahaan.

SASARAN, RENCANA DAN TARGET

Perusahaan senantiasa merumuskan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi para karyawannya, di mana di dalamnya meliputi aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaan kegiatan CSR bidang Ketenagakerjaan dan K3 ini Perusahaan menerapkan sistem kesetaraan yang sama dalam proses rekrutmen dan juga pengembangan karier karyawan, diharapkan dengan demikian terjadi hubungan industrial yang baik antara Perusahaan dengan karyawannya. Perusahaan juga merencanakan review terhadap ketentuan remunerasi pegawai agar selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kompetitif pada industri yang sama. Rencana kerja ketenagakerjaan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

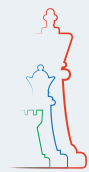
PENERAPAN INISIATIF BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kesetaraan Kesempatan

Dalam pengelolaan SDM, Perusahaan memastikan bahwa telah diterapkan prinsip kesetaraan bagi seluruh karyawan Perusahaan, tanpa adanya diskriminasi dan memandang perbedaan *gender*, ras, suku bangsa, dan agama. Sehingga seluruh karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kariernya.

Kesempatan Bekerja Bagi Masyarakat Setempat

Perusahaan mengundang seluruh putra putri daerah terbaik, berkualitas, memiliki komitmen, integritas, dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk



bergabung dan tumbuh bersama keluarga besar Perusahaan. Secara umum, kebijakan terkait kesempatan bekerja bagi warga setempat berlaku pada area aset kelolaan dan entitas anak Perusahaan.

Grup Pengelolaan SDM

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-35/PPA/0614 tentang Kebijakan Manajemen Karir Karyawan, Perusahaan telah mengatur kebijakan terkait pengelolaan SDM Perusahaan, di mana Grup Pengelolaan SDM merancang rencana pengembangan SDM Perusahaan yang sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019-2023 serta kebijakan terkait kepegawaian yang sejalan dengan RJPP tersebut.

Tugas pokok Grup Pengelolaan SDM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan SDM, dengan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan kepegawaian;
2. Menyusun dan melaksanakan sistem pengembangan dan pembinaan SDM;
3. Memenuhi kebutuhan SDM yang bersumber dari internal dan eksternal Perusahaan;
4. Melaksanakan sosialisasi ketentuan kepegawaian dan komunikasi internal terkait bidang kepegawaian;
5. Melakukan penatausahaan kegiatan dan administrasi kepegawaian; dan
6. Melakukan pembayaran remunerasi dan manfaat (*benefit*) karyawan (termasuk pembayaran dan pelaporan PPh 21, iuran dana pensiun serta program Jaminan Sosial).

Selama 2020 kegiatan yang telah dilaksanakan Perusahaan melalui Grup Pengelolaan SDM terkait kebijakan kepegawaian dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan

sebagaimana tercantum dalam RJPP tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan jabatan dan mutasi karyawan
2. Proses penjaringan bakal calon Direksi dan Komisaris anak Perusahaan
3. Penugasan Karyawan.
4. Penyusunan SOP.
5. Penyusunan *Man Power Planning* dan *Training Plan*.
6. Persetujuan SK Direksi tentang Kebijakan Penugasan Karyawan pada Kerja Sama Operasi.
7. Persetujuan SK Promosi dan Penetapan Jabatan Karyawan Dalam Satuan Kerja.
8. Persetujuan pengesahan laporan ketenagakerjaan

Grup Pengelolaan SDM juga mengorganisasi kegiatan karyawan berupa kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga dan seni serta upacara hari besar nasional.

Rekrutmen Karyawan dan Tingkat Turnover Karyawan

Grup Pengelolaan SDM mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Selama tahun 2020 Perusahaan melakukan rekrutmen sebanyak 21 orang untuk menjadi bagian dari Perusahaan, hal ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 22 orang.

Sementara itu, tingkat perputaran atau *turnover* karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perusahaan. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Tingkat *turnover* dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Turnover Karyawan} = \frac{\text{Jumlah Karyawan Mengundurkan Diri}}{[(\text{Jumlah Karyawan Awal Tahun} + \text{Jumlah Karyawan Akhir Tahun}) \times 1/2]}$$

Tingkat *turnover* karyawan di tahun 2020 tercatat sebesar 5,8% angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,3%.

Tabel Turnover Pegawai PT PPA tahun 2019-2020

Uraian	2020	2019
Karyawan Baru	21	22 orang
Karyawan yang memasuki masa pensiun	4	3 orang
Karyawan yang mengundurkan diri	10	11 orang
Karyawan yang berakhir masa tugas	11	4 orang
Total total karyawan akhir tahun	169	176 orang
Presentase <i>turnover</i>	5,8%	6,3%



Pelatihan dan Pengembangan SDM

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, Perusahaan melakukan pendidikan dan pelatihan berbagai bidang baik di internal maupun eksternal. Berikut ini pelaksanaan *training* yang telah dilakukan pada tahun 2020.

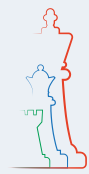
Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada tahun 2020 dibagi dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan Publik, adalah pelatihan yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh sumber eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll);
2. Pelatihan internal, adalah pelatihan teknis maupun non teknis yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll);
3. *Sharing Session/Friday Afternoon* adalah sarana memberikan pengetahuan secara singkat, minimal 1 jam yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll);
4. Keanggotaan adalah penggantian biaya keanggotaan (*membership*) karyawan pada suatu lembaga yang terkait dengan pekerjaannya;
5. Karyawan menjadi Narasumber, adalah di mana Karyawan memberikan *sharing* pengetahuan atau berpartisipasi aktif menjadi pembicara/narasumber:

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Subyek	Jumlah Peserta	Komposisi Karyawan yang Telah Mengikuti Pelatihan	Total Biaya
1	Pelatihan Publik	133	76	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi : 3,6 % Direktur Investasi 2 : 2,5 % Direktur Utama : 93,9 %	165.407.204
2	Pelatihan Internal	22	584	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi : 30 % Direktur Investasi 2 : 10,8 % Direktur Utama : 59,2 %	609.076.194
3	<i>Sharing Session/Friday Afternoon</i>	14	664	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi : 20,8 % Direktur Investasi 2 : 8,6 % Direktur Utama : 70,6 %	29.947.315
4	Keanggotaan	3	3	Direktur Utama : 100 %	41.750.000
5.	Karyawan menjadi Narasumber	10	9	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi : 20 % Direktur Investasi 2 : 10 % Direktur Utama : 70 %	-
Total					846.180.713

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai tambah bagi para karyawan yang dibuktikan melalui investasi pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Realisasi investasi pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp846.180.173 mengalami penurunan 61,68% dibandingkan tahun 2019, atau mencapai 56,41% terhadap anggaran tahun 2020. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)		Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%)	
	1	2	(1:2)		3	(3:1)	
Investasi Pelatihan dan Pendidikan	846	1.500	56,41%	↓	2.208	-61,68%	↓



Layanan Sumber Daya Manusia

Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan SDM yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antar unit kerja serta antara manajemen dengan karyawan tentang kebijakan-kebijakan terkait karyawan. Bentuk layanan tersebut adalah:

1. Sosialisasi dan orientasi kepada karyawan baru;
2. Pengumuman kelahiran anak karyawan, berita duka, karyawan baru, karyawan mutasi/perubahan data kepegawaian dan karyawan berakhir hubungan kerja;
3. Penyampaian informasi kepada karyawan yang akan pensiun;
4. Penyampaian pengumuman pembaharuan pelaporan wajib LHKPN;
5. Penyampaian pengumuman terkait layanan asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan serta pelaporan perpajakan; dan
6. *Leaders Meeting* secara rutin sepekan sekali dengan peserta para *General Manager* untuk saling berbagi informasi termasuk kajian-kajian sebagai masukan kepada Direksi dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Penatausahaan Kegiatan dan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan antara lain:

1. Administrasi dan pelaporan absensi dan cuti;
2. Administrasi karyawan baru, karyawan mutasi, karyawan dalam masa percobaan, promosi dan penetapan jabatan karyawan pada satuan kerja, perubahan/perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu serta karyawan yang berakhir hubungan kerja;
3. Administrasi permohonan pinjaman karyawan;
4. Administrasi permohonan surat keterangan bekerja karyawan untuk keperluan imigrasi, pengurusan visa, bank dan lain-lain;
5. Pemberian bunga/bingkisan bagi karyawan yang melahirkan, rawat inap, menikah dan berduka cita;
6. Administrasi permohonan praktik kerja dan penelitian; dan
7. Administrasi kegiatan karyawan berupa kegiatan olahraga dan seni serta kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar agama.

Remunerasi dan Pemenuhan Hak Karyawan

Strategi Remunerasi diperlukan guna meningkatkan pengembangan SDM serta meningkatkan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan di mana salah satunya adalah remunerasi berbasis kompetensi. Kompetensi karyawan akan mendukung laju perkembangan Perusahaan, karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal

dalam memuluskan langkah bisnis Perusahaan. Kompetensi karyawan ini akan dimulai dari asesmen terkait kinerja karyawan dalam bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem dan strategi Remunerasi ini juga akan dilakukan evaluasi secara berkala guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan kemampuan keuangan Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan struktur kepangkatan dan gaji karyawan yang berlaku, komponen remunerasi karyawan adalah sebagai berikut:

1. Gaji
Gaji karyawan yang diterima secara bulanan akan mengalami peninjauan berdasarkan:
 - a. Pertimbangan dampak inflasi yang berpengaruh terhadap nilai riil gaji karyawan (*Cost of Living Adjustment*);
 - b. Kinerja karyawan bersangkutan selama bekerja (*merit system*); dan
 - c. Besaran kenaikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan Perusahaan.
2. Tunjangan Hari Raya (THR)
Perusahaan memberikan THR sebesar satu kali upah. THR ini dibayarkan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja tiga bulan atau lebih di Perusahaan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Tunjangan Cuti Besar
Perusahaan memberikan tunjangan cuti besar kepada karyawan sebesar dua kali upah setelah memiliki masa kerja 6 (enam) tahun berturut-turut dan kelipatannya atau pada tahun ke-7, 13, 19, dan seterusnya. Karyawan yang mendapatkan tunjangan cuti besar tidak berhak lagi atas tunjangan cuti tahunan.
4. Tunjangan Jabatan, Komunikasi, BBM, Pengemudi dan Utilitas
Tunjangan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan/kepangkatan tertentu dalam Perusahaan.
5. Jaminan Sosial
Perusahaan juga memberikan sejumlah jaminan kepada karyawan melalui Jaminan Sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - d. Jaminan Hari Tua;
 - e. Jaminan Pensiun; dan
 - f. BPJS Kesehatan.



6. Apresiasi/Insentif Kinerja
Perusahaan memberikan apresiasi berupa insentif kinerja kepada karyawan yang didasarkan pada tolak ukur pencapaian RKAP, penilaian kinerja dan masa kerja karyawan.
7. Fasilitas Kesehatan dan Asuransi
Fasilitas ini diberikan Perusahaan kepada karyawan yang terdiri dari fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggungjawaban asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Perusahaan memahami bahwa budaya korporasi yang kuat membuat karyawan bangga untuk mewakili Perusahaan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan. Budaya Perusahaan menanamkan nilai-nilai melalui SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity and Teamwork*).

Seluruh nilai-nilai dan budaya Perusahaan tersebut senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam bentuk pelatihan formal maupun informal, *sharing session*, motivasi, bimbingan, penilaian kinerja karyawan, dan acara-acara kebersamaan karyawan di lingkungan Perusahaan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan berkomitmen untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan dengan senantiasa berupaya untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang terakreditasi sesuai standar nasional dan internasional. Untuk itu, Perusahaan melakukan berbagai aktivitas K3 secara berkala dengan terus menerus memperhatikan dan menjaga kesehatan karyawan, serta melengkapi karyawan dengan prosedur dan peralatan kerja yang memadai sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Perusahaan juga menjalankan pelatihan rutin untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari kecelakaan kerja.

Adapun prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja;
2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan, keselamatan kerja, kesehatan dan pelestarian lingkungan secara konsisten;
3. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;

4. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengonsumsi obat-obat terlarang, dan lain-lain sesuai ketentuan Perusahaan;
5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat;
6. Melaksanakan program kepedulian akan pelestarian lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan Program Bina Lingkungan Perusahaan.

Pembentukan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Perusahaan melakukan penunjukan 4 karyawan sebagai *emergency contact person* dan 8 karyawan yang bertindak sebagai *floor warden*. Di mana tugas dari *emergency contact person* yaitu untuk penanganan bencana/darurat di Gedung Kantor PPA atau dilingkungan sekitar gedung PPA pada saat jam kerja. Dan tugas-tugas *floor warden* antara lain sebagai berikut:

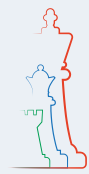
1. Saat keadaan darurat, memandu semua karyawan di lantainya, evakuasi melalui tangga darurat ke tempat aman (*assembly area*);
2. Memberitahukan kepada seluruh karyawan mengenai lokasi jalan keluar/jalur evakuasi;
3. Jika ada perintah evakuasi, menjamin seluruh karyawan meninggalkan gedung dengan menggunakan tangga darurat dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
4. Memastikan tidak ada penghalang apapun pada tangga darurat;
5. Memprioritaskan bantuan kepada wanita hamil, orang lansia, penyandang disabilitas, dan orang yang dalam keadaan sakit.

Pelatihan dan Sosialisasi K3 untuk Karyawan

Perusahaan secara berkala mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan K3 bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2020 telah diadakan 2 (dua) kali sosialisasi dan simulasi bencana serta kebakaran yang diikuti oleh seluruh karyawan sebagai bagian dari pelatihan K3 yang rutin dilakukan oleh Perusahaan bersama dengan pengelola gedung.

Peralatan Perlindungan Pribadi

Penyediaan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai dengan kondisi dan risiko K3 di masing-masing unit usaha telah menjadi salah satu upaya Perusahaan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi setiap insan Perusahaan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.



Perlindungan Kesehatan Karyawan

Perlindungan karyawan atas kecelakaan kerja diwujudkan dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu:

1. BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.
2. BPJS Kesehatan, yang mencakup Rawat Jalan, dan Rawat Inap. Selain itu, Perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap.

Selain hal tersebut di atas, Perusahaan juga memberikan fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggung jawaban asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja dari Penyedia jasa Asuransi lainnya.

Kecelakaan Kerja serta Layanan Medis

Perusahaan telah menetapkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk mencapai kecelakaan nihil pada setiap operasi. Program tersebut mencakup pelatihan, penyuluhan yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja, melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin. Selain itu seluruh karyawan juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up*) secara rutin.

Survei Kepuasan Karyawan

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para karyawan, Perusahaan melakukan survei kepuasan karyawan. Hasil survei tersebut memastikan seberapa baik Perusahaan memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karier, kesejahteraan, serta keamanan dan keselamatan lingkungan pekerja.

Survei kepuasan karyawan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pada tahun 2020, survei kepuasan karyawan memperoleh nilai sebesar 3,7 (skala 1-5) di atas target tahun 2020 sebesar 4

Hubungan Industrial

Perusahaan membangun hubungan industrial yang berlandaskan pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala sesuatu yang terkait hubungan antara karyawan dan Perusahaan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang diperbarui setiap dua tahun sekali dan dibagikan kepada seluruh karyawan.

Perusahaan melakukan komunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan langkah-langkah antara lain:

1. Melibatkan karyawan dalam pembahasan ketentuan Perusahaan;
2. Kebersamaan dalam penanganan penyelesaian permasalahan karyawan;
3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan karyawan seperti ibadah, sosial dan kegiatan olahraga karyawan.

Perusahaan berhadapan dengan terjalin antara Perusahaan dan karyawan maka diharapkan akan terjalin sinergi kinerja yang optimal sehingga akan memudahkan dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Pada tahun 2020, tidak tercatat adanya pelanggaran dalam hak kebebasan berserikat di Perusahaan.

Serikat Pekerja

Perusahaan memberikan kebebasan secara penuh kepada karyawan untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Hingga akhir tahun 2020 karyawan Perusahaan belum membentuk Serikat Pekerja.

MEKANISME PENGADUAN TERKAIT PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan Perusahaan, apabila terjadi ketidakpuasan dari karyawan atas hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsung minimal dengan jabatan Kepala Grup. Apabila belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada atasannya yang lebih tinggi sampai dengan tingkat Direktur. Apabila masih belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada Direktur yang membawahi Bidang Sumber Daya Manusia dan apabila ketidakpuasan tersebut berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan maka akan diserahkan kepada keputusan Direksi.

Apabila secara internal hal tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka akan ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup operasional, Perusahaan juga senantiasa mengacu terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun instansi terkait lainnya.

Pada tahun 2020, tidak tercatat adanya pengaduan terkait permasalahan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja di lingkup Perusahaan.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi	Jenis Sertifikat	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku Hingga
10 Agustus 2020	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	TUV NORD Indonesia	9 Agustus 2023

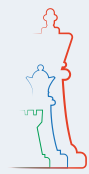
Penghargaan di Tahun 2020

Tanggal	Nama Penghargaan	Institusi yang Memberikan
4 Maret 2020	BUMN Performance Excellence Awards 2020	Forum Ekselen BUMN (FEB) dan Majalah Infobank
Juli 2020	Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik BUMN Non Terbuka (Tbk)	BUMN Track
Juli 2020	CEO Visioner Terbaik	BUMN Track
25 November 2020	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik Tahun 2020	Wakil Presiden Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat

BIAYA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Secara khusus, Perusahaan merealisasikan investasi terkait pengembangan kompetensi SDM tahun 2020 sebesar Rp846,18 juta, mengalami penurunan 61,68% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,21 miliar.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN PEMASOK

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Sebagai Perusahaan yang melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN, R/R BUMN, kegiatan investasi, dan kegiatan pengelolaan aset lainnya. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Pelanggan dari Perusahaan ialah BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya, yang memiliki tugas untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan memastikan bahwa mekanisme dan prosedur pemberian layanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada aspek pemasok, Perusahaan melaksanakan proses pengadaan mengacu pada pedoman sistem *procurement* yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan No. SK-71/PPA/1119 tanggal 4 November 2019 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Efisien, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- Efektif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- Kompetitif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/ atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka

bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat;

- Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun;
- Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung jawab pada aspek ini adalah konsumen dan pemasok. Perusahaan berupaya melakukan pemenuhan tanggung jawabnya terkait mutu kualitas produk/jasa.

Konsumen dan pemasok memiliki hak-hak yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Di samping kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, komitmen PPA atas tanggung jawab terhadap konsumen dan pemasok merupakan bagian dari perwujudan pertumbuhan yang berkelanjutan

SASARAN, RENCANA DAN TARGET

Dalam menetapkan rencana kegiatan sebagai upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyelesaikan pengaduan pelanggan dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan yang ditargetkan selalu mengalami peningkatan.

Sementara itu dari segi pemasok, Perusahaan menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip Efisien, Efektif, Kompetitif, Transparan, Adil, dan Akuntabel. Diharapkan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.



PENERAPAN INISIATIF PADA ASPEK TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/ JASA SERTA KONSUMEN DAN PEMASOK

Pemenuhan Hak-hak Konsumen

Realisasi kegiatan CSR terhadap pelanggan dilaksanakan melalui penyediaan sarana komunikasi dengan pelanggan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media. Selain itu, Perusahaan menyediakan *contact person* yang diperlukan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan.

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak pernah menerima sanksi denda atau sanksi hukum yang terkait dengan peraturan pengadaan jasa maupun informasi atau komunikasi pemasaran. Di samping itu sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap konsumen, Perusahaan melakukan usaha-usaha pemenuhan hak-hak pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja jasa, antara lain dengan:

- Memberikan pelayanan dengan kualitas prima dan bermutu;
- Memberikan solusi inovatif dan bertanggung jawab kepada pelanggan;
- Menyediakan informasi yang akurat;
- Menjalinkan hubungan kerja yang wajar;
- Meminimalkan risiko penggunaan jasa Perusahaan.

Membangun Hubungan dengan Pemasok

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait dengan Pemasok diantaranya dilakukan melalui hal-hal berikut ini.

- Seluruh kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengadaan barang dan/atau jasa, seluruhnya dilakukan melalui media elektronik (*e-Procurement*);
- *E-Procurement* menggunakan metode *e-Bidding* meliputi pemilihan langsung, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas;
- Melaksanakan survei kepuasan pemasok yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pemasok dalam bekerja sama dengan Perusahaan.

Tingkat kepuasan pemasok tahun 2020 untuk pengadaan barang sebesar 9,68 (skala 1-10) sedangkan untuk pengadaan jasa sebesar 8,63 (skala 1-10) yang menunjukkan bahwa kerja sama antara Perusahaan dengan pemasok telah berjalan dengan baik dan lancar.

SARANA PENGADUAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

Untuk menginformasikan layanan secara lengkap serta menerima pengaduan dari konsumen, Perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

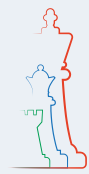
1. Pengembangan *website* Perusahaan, yaitu www.ptppa.com, di mana seluruh informasi layanan Perusahaan terus diperbaharui secara rutin.
2. Publikasi mengenai layanan Perusahaan di berbagai media.
3. Perusahaan juga menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan, yaitu melalui alamat pengaduan ke kantor:

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Gedung Sampoerna Strategic Square
North Tower 9th - 12 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Telepon : +62 21 5798 2222
Faksimili : +62 21 577 2443
Email: corpsec@ptppa.com

Pada tahun 2020, tidak terdapat adanya pengaduan dari konsumen atau mitra kerja yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Konsumen Perusahaan merupakan korporasi yang hampir seluruhnya merupakan BUMN. Tidak terdapat penghargaan maupun sertifikasi terkait aspek produk/ jasa maupun konsumen.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam pelaksanaan CSR, Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terutama pasal 2 dan 88 yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1) huruf e
Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
 - Pasal 88 ayat (1)
BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Pada Bab V Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mengatur mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, di mana Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Selain itu dasar kegiatan CSR Perusahaan tahun 2020 dilakukan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN-09") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-03/MBU/12/2016 ("PERMEN-03") dan Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-02/MBU/7/2017 ("PERMEN-02").

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Dalam rangka menjaga keselarasan kehidupan masyarakat dan lingkungan di atas bumi, Perusahaan turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial atas sosial kemasyarakatan yang tersebar di beberapa wilayah nusantara maupun di sekitar lokasi operasi perusahaan.

SASARAN, RENCANA DAN TARGET

Rencana kegiatan tanggung jawab sosial terhadap Pengembangan sosial kemasyarakatan pada tahun 2020 dibagi ke dalam 2 (dua) jenis program yaitu Program Kemitraan dengan biaya sebesar sebesar Rp4.590 juta dan Program Bina Lingkungan yang dipecah menjadi 7 (tujuh) kelompok kegiatan yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pelestarian alam, bantuan sarana dan/atau prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan dengan biaya sebesar Rp2.000 juta. Kedepan, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran kegiatan CSR seiring dengan peningkatan pendapatan Perusahaan.

PENERAPAN INISIATIF PADA ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Program Kemitraan

Program Kemitraan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dengan menyalurkan Program Kemitraan (dana bergulir) dalam bentuk pinjaman kepada usaha kecil dengan bunga yang rendah. Tujuan dari pemberian pinjaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri.

Perusahaan bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) untuk membantu dalam menyalurkan dana Program Kemitraan langsung kepada Mitra Binaan melalui Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Kerja sama ini dimaksudkan agar penyaluran dana Program Kemitraan dapat tersebar di seluruh Indonesia dengan target tepat sasaran.

Selama tahun 2020 Perusahaan telah menyalurkan dana pinjaman ke berbagai provinsi di Indonesia sebesar Rp4,59 miliar. Sebanyak 27 Mitra Binaan baru tergabung dalam Program Kemitraan dengan jenis usaha Perdagangan, Jasa, Industri, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.



Realisasi Dana Pinjaman Program Kemitraan Tahun 2020

Keterangan	Dana Realisasi (Rp-juta)
Pinjaman Program Kemitraan	4.500
Pelatihan Mitra Binaan	90
Jumlah	4.590

Selain memberikan pinjaman, Program Kemitraan juga melakukan pembinaan terhadap Mitra Binaan melalui Pendidikan/Pelatihan serta Pemasaran/ Promosi. Tujuan dari Pembinaan tersebut agar Mitra Binaan bukan hanya mendapatkan pinjaman namun nilai tambah bagi sumber daya manusianya.

Saldo Outstanding Piutang Program Kemitraan (Rp-juta)

Keterangan	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Outstanding Piutang	18.759	17.824

Untuk meningkatkan kualitas piutang, Perusahaan juga memantau pembayaran angsuran masing-masing Mitra Binaan. Selama tahun 2020, Mitra Binaan tertib dan tepat waktu dalam pengembalian pinjaman dengan tingkat kolektibilitas lancar. Hal ini terbukti dari rasio tingkat kolektibilitas mencapai 99,81% dengan 310 Mitra Binaan.

Tahun	Kolektibilitas
2014	99,41%
2015	99,38%
2016	99,29%
2017	99,74%
2018	97,15%
2019	87,99%
2020	99,81%

Rasio tingkat kolektibilitas lancar dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan hanya di tahun 2019 yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020, rasio tingkat kolektibilitas lancar kembali mengalami kenaikan yakni mencapai 99,81%. Hal ini membuktikan bahwa Mitra Binaan cukup tertib dan tepat waktu dalam melakukan pengembalian pinjaman.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2020

Nama Program	Dana Realisasi (Rp-juta)
Bantuan korban Bencana Alam	1.012
Bantuan Pendidikan	360
Bantuan Peningkatan kesehatan	88
Bantuan Pelestarian Lingkungan	0
Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana	90
Bantuan Sarana Ibadah	151
Bantuan Sosial Kemasyarakatan kemiskinan	298
Jumlah	2.000

Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha Perusahaan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pelestarian lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Realisasi penyaluran dana terkait Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan Perusahaan sepanjang 2020 adalah sebesar Rp2,00 miliar, dengan komposisi terbesar yakni bantuan untuk korban bencana alam yakni sebesar Rp1,01 miliar.

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PENGELOLAAN ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Berikut disampaikan rekapitulasi dana yang telah disalurkan oleh Perusahaan dalam rangka pengembangan sosial kemasyarakatan.

Perihal	2020 (Rp-juta) (1)	2019 (Rp-juta) (2)	Anggaran 2020 (Rp-juta) (3)	Kenaikan (Penurunan) 2019-2020 (%) ((1-2)/2)	Penyerapan Anggaran 2020 (1/3)
Program Kemitraan	4.590	9.158	4.533	-49,88% ↓	101,26% ↑
Program Bina Lingkungan	2.000	2.000	2.000	0,00%	100,00% ↑



LAPORAN KEUANGAN

Kebutuhan akan korporasi yang gesit, tangguh, efisien dan efektif, serta siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman, menjadi suatu keharusan yang kemudian diterjemahkan oleh PPA ke dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta modernisasi sistem melalui implementasi Teknologi Informasi serta penerapan kultur digital.







**PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

***PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019***

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended Desember 31, 2020 and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Laporan Keuangan Tersendiri – Induk Saja		<i>Separate Financial Statements – Parent Only</i>
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>
Informasi Tambahan (Entitas Induk)	V	<i>Additional Information (Parent Entity)</i>



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

State-owned Asset Management Company

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama / Name	:	Yadi Jaya Ruchandi
Alamat kantor / Office Address	:	Sampoerna Strategic Square North Tower 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID Card	:	Villa Kebagusan Kav A.03 RT.009/RW.002 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
Nomor Telpn / Phone Number	:	021-57982222
Jabatan / Position	:	Direktur Utama / President Director

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;	<i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;</i>
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	<i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	<i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i>
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	<i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i>
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.	<i>We are responsible for internal control system within the company and its subsidiaries.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter has been made truthfully.

Jakarta, 23 April 2021 / Jakarta, April 23, 2021

Direktur Utama/President Director,



(Yadi Jaya Ruchandi)

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSMIndonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00352/2.1030/AU.1/10/0181-2/1/IV/2021

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00090/2.1030/AU.1/10/0181-2/1/II/2021 bertanggal 26 Februari 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran V pada Catatan 3, atas laporan keuangan tersendiri entitas induk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perubahan pada laporan keuangan tersendiri entitas induk, yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi pelaporan investasi pada entitas anak yang semula dicatat menggunakan metode ekuitas menjadi metode biaya perolehan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, laporan keuangan konsolidasian tersebut harus disajikan kembali. Oleh karena itu, opini kami atas laporan keuangan konsolidasian sebelumnya tersebut tidak dapat digunakan lagi sejak tanggal penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2020 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

Prior to this report, we have issued an independent auditor's report No. 00090/2.1030/au.1/10/0181-2/1/II/2021 dated February 26, 2021 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2020 with an unqualified opinion.

As describe in Appendix V on Note 3 to the separate financial statements of the parent entity, the Company has re-issued the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020 with the changes in the separate financial statements of parent entity, caused by the accounting policies of investment in subsidiaries accounted previously using the equity method are changes to the cost method. In accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, the previously issued consolidated financial statements should be restated. Therefore, our opinion on the previously issued consolidated financial statements cannot be used starting on the re-issuance date of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020.

Kami juga membawa perhatian ke Catatan 2.c, atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan dan entitas anak menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan. Penerapan PSAK tersebut dilakukan secara retrospektif dengan mengakui dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 sebagai penyesuaian saldo awal dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Kami juga membawa perhatian ke Catatan 2.d, atas laporan keuangan konsolidasian, yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, Perusahaan dan Entitas Anak ("PPAK") merupakan entitas investasi sesuai kriteria dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian". Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tidak dimaksudkan untuk dapat diperbandingkan dengan informasi yang disajikan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kami juga membawa perhatian pada Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan dan entitas anak. Catatan tersebut telah mengungkapkan rencana yang disusun PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan entitas anaknya untuk menghadapi kondisi tersebut. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan suatu ketidakpastian yang dapat memberikan dampak material di masa mendatang. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut diatas.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut

We also draw attention to Note 2.c, to the accompanying consolidated financial statements which explains that effective January 1, 2020, the Company and its subsidiary implemented the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 71: Financial Instruments. The adoption of this PSAK was implemented retrospectively by recognizing the cumulative effect on the date of initial implementation beginning January 1, 2020 as an adjustment to the opening balance and did not restate the comparative information.

We also draw attention to Note 2.d, to the accompanying consolidated financial statements which explains that effective since 2020, the Company and its subsidiary ("PPAK") is considered a qualifying investment entity in accordance with the criteria stipulated in the Statement of Financial Accounting Standards No.65 "Consolidated Financial Statements". The financial information as of and for the year ended December 31, 2020 is not intended to be comparable with the information presented as of and for the year ended December 31, 2019.

We also draw attention to Note 48 to the consolidated financial statements which describes impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations of the Company and its subsidiary. The note has disclosed the plans of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and its subsidiaries to face these conditions. However, there is a possible uncertainty that gives material effect in the future. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the uncertainty.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2020, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

Jakarta, 26 Februari 2021, kecuali untuk Lampiran atas laporan keuangan tersendiri entitas induk dan Catatan 47 yang bertanggal 23 April 2021/
February 26, 2021, except for Appendix to the separate financial statements of the parent entity and Note 47, dated April 23, 2021

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	774,100	1,107,636	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	4			Short-term Investment Loans
Pihak Berelasi		197,913	32,449	Related Parties
Pihak Ketiga		1,333,794	1,413,181	Third Parties
Aset Keuangan Diperdagangkan				Trading Financial Assets
Pihak Berelasi		--	70,260	Related Parties
Piutang Usaha	5			Accounts Receivable
Pihak Berelasi		515,428	386,413	Related Parties
Pihak Ketiga		919,957	1,091,184	Third Parties
Piutang Retensi	6			Retention Receivables
Pihak Berelasi		42,186	68,983	Related Parties
Pihak Ketiga		108,826	101,138	Third Parties
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	7	306,082	296,623	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	8			Loans Receivable - Bailout
Pihak Berelasi		340,087	223,046	Related Parties
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	9			Gross Amount Due from Customers
Pihak Berelasi		530,686	394,037	Related Parties
Pihak Ketiga		1,800,538	2,024,069	Third Parties
Persediaan	10	146,770	216,340	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	11	149,655	102,187	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Di Muka	12.a.	662,391	812,576	Prepaid Taxes
Cessie Piutang Jangka Pendek	23	125,070	282,099	Receivable Cessie
Aset Lancar Lainnya	13	67,342	49,138	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar		8,020,825	8,671,359	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui				Financial Assets Measured at Fair Value Through
Penghasilan Komprehensif Lainnya	14	38,944	40,296	Other Comprehensive Income
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi				Loans Receivable - Restructuring
dan/atau Revitalisasi				and/or Revitalization
Pihak Berelasi	15	536,683	1,416,472	Related Parties
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	18	681,689	299,854	Long-term Investment Loans
Properti Investasi	16	816,998	865,583	Investment Property
Aset Pajak Tangguhan	12.e.	73,457	42,066	Deferred Tax Assets
Investasi pada Ventura Bersama	17	344,740	321,808	Investment in Joint Ventures
Piutang Lain-lain		238	238	Other Receivables
Investasi Jangka Panjang Lainnya	19	546,776	102,940	Other Long-Term Investments
Investasi pada Efek Ekuitas	20	220,626	--	Investment in Equity Securities
Aset Tetap	21	564,701	1,556,796	Property, Plant & Equipment
Goodwill	22	--	370,257	Goodwill
Cessie Piutang Jangka Panjang	23	247,441	283,493	Receivable Cessie
Aset Hak Guna	24	11,714	--	Right of Use Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	13	853,149	444,270	Other Non Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		4,937,156	5,744,073	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		12,957,981	14,415,432	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)**

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)**

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	25			Accounts Payable
Pihak Berelasi		18,264	140,455	Related Parties
Pihak Ketiga		1,449,181	1,789,101	Third Parties
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	26			Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi		1,804,378	1,522,238	Related Parties
Pihak Ketiga		1,734,175	1,297,720	Third Parties
Utang Surat Berharga Komersial	32	--	93,572	Commercial Paper
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	33	--	300,000	Short-Term Medium Term Notes
Pinjaman Bank Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo				Current Maturities of
Dalam Satu Tahun				Long Term Loan
Pihak Ketiga		--	17,043	Third Parties
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	27	929,472	1,342,936	Gross Amount Due to Third Parties
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	28			Short-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi		13,588	10,372	Related Parties
Pihak Ketiga		151,524	253,758	Third Parties
Utang Pajak	12.b.	22,122	74,004	Taxes Payable
Beban Akruai dan Utang Lain-lain	29	165,692	260,479	Accruals and Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		6,288,396	7,101,678	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	30	13,104	23,089	Employee Benefit Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Panjang	26			Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi		1,282,685	881,480	Related Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	33	748,545	807,455	Medium-term, Long-term Notes
Utang Obligasi	34	640,360	--	Bonds Payable
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	31			Long-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi		23,300	35,965	Related Parties
Pihak Ketiga		289,308	140,063	Third Parties
Liabilitas Sewa	24	14,179	--	Lease Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya		--	2,158	Other Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3,011,481	1,890,210	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		9,299,877	8,991,888	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owner of the Parent
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham	35			Share Capital - Rp 1,000,000 par value per share - Authorized Capital 5,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Issued and Fully Paid in
2.996.688 saham, per 31 Desember 2020 dan 2019		2,996,688	2,996,688	2,996,688, as of December 31, 2020 and 2019
Tambahan Modal Disetor		(308,059)	(308,059)	Additional Paid in Capital
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya		299,350	299,350	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		312,384	1,993,291	Unappropriated
Labas (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih		20,800	22,152	Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net
Surplus Revaluasi Aset Tetap		333,863	413,255	Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		3,655,026	5,416,677	Total Equity Attributable to Owner of the Parent
Kepentingan Non Pengendali		3,078	6,867	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		3,658,104	5,423,544	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		12,957,981	14,415,432	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
PENDAPATAN USAHA	36	4,397,844	6,669,457	REVENUES
BEBAN USAHA	37	(4,154,610)	(6,289,760)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA		243,234	379,697	OPERATING INCOME
Penghasilan Bunga		14,419	15,424	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap		–	237	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan		(91,805)	(89,230)	Interest Expense and Financial Charge
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi		26,169	41,528	Increase in Fair Value of Investment Property
Beban Pajak Penghasilan Final	41	(101,709)	(159,199)	Final Income Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	38	87,905	66,706	Share of the Profit of Joint Ventures
Penghasilan (Beban) Lain-lain	39	(15,200)	80,548	Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK		163,013	335,711	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAXES
Beban Pajak Kini		(38,319)	(17,007)	Current Tax Expense
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		(18,925)	8,368	Deferred Tax Benefit (Expenses)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(57,244)	(8,639)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		105,769	327,072	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti		4,802	(6,643)	Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities
Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar		(1,352)	(3,476)	Financial Assets Measured at Fair Value Through
Jumlah pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		3,450	(10,119)	Total Item that will not be reclassified to profit or loss
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		109,219	316,953	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		105,341	324,913	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		428	2,159	Non-Controlling Interests
JUMLAH		105,769	327,072	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		108,749	314,854	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		470	2,099	Non-Controlling Interest
JUMLAH		109,219	316,953	TOTAL
LABA PER SAHAM (dalam angka penuh)	40	35,152	108,424	EARNINGS PER SHARE (in full amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owner of the Parent

Catatan/ Notes	Aset Keuangan									
	Modal Saham/ Share Capital		Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital		Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Financial Assets measured at Fair Value through Other Comprehensive Income		Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment		Saldo Laba/Retained Earnings	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo tanggal 31 Desember 2018	2,996,688	(308,059)			25,628	477,889	171,528	1,760,157	5,144,431	5,262,943
Dampak Konsolidasi Entitas Anak di Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(110,315)	(110,315)
Cadangan umum	-	-	-	-	-	-	127,822	(42,608)	(42,608)	(46,137)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	(127,822)	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	324,913	324,913	327,072
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	(3,476)	-	-	(6,583)	(10,059)	(10,119)
Saldo tanggal 31 Desember 2019	2,996,688	(308,059)			22,152	413,255	299,350	1,993,291	5,416,677	5,423,544
Dampak Penerapan Awal PSAK Baru	-	-	-	-	-	-	-	(1,783,169)	(1,783,169)	-
Saldo tanggal 1 Januari 2020	2,996,688	(308,059)			22,152	413,255	299,350	210,122	3,633,508	3,640,375
Dampak Dekonsolidasi terhadap Ekuitas sebagai akibat PPAK memenuhi kualifikasi sebagai Entitas Anak	-	-	-	-	-	(59,935)	-	(27,296)	(87,231)	(91,490)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	105,341	105,341	105,769
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	-	(1,352)	-	-	4,760	3,408	3,450
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	(19,457)	-	19,457	-	-
Saldo tanggal 31 Desember 2020	2,996,688	(308,059)			20,800	333,863	299,350	312,384	3,655,026	3,658,104

Balance as of December 31, 2018
The Impact of Consolidation
Dividend
General Reserve
Income for The Year
Other Comprehensive Income for the Year
Reclassification of Revaluation Surplus Fixed Asset
Balance as of December 31, 2019
The Impact of Initial Implementation of New PSAK
Balance as of January 1, 2020
Impact of deconsolidation to equity, as a consequence of PPAK qualifying as an investment subsidiaries (Note 1.b)
Income for The Year
Other Comprehensive Income for the Year
Reclassification of Revaluation Surplus of Fixed Asset
Balance as of December 31, 2020

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		5,050,817	6,623,415	Cash Receipts from Customers
Penyaluran Pembiayaan Konsumen		(564,728)	(497,110)	Disbursement for Financing
Penerimaan Restitusi Pajak		24,258	22,147	Cash Receipts from Tax Refund
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(4,848,313)	(5,980,022)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Pembayaran Beban Bunga		(551,619)	(363,107)	Payment of Interest
Pembayaran Pajak		(171,918)	(226,249)	Tax Paid
Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya		19,142	39,537	Other Receipts (Disbursement)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(1,042,361)	(381,389)	Net Cash Flows Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pengeluaran Investasi		(499,179)	(19,990)	Disbursement from Investment
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan		1,927,179	2,076,443	Proceeds from Investment Loans
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan		(2,112,652)	(3,396,545)	Disbursement from Investment Loans
Penerimaan Pencairan Laba Ventura Bersama		64,973	80,983	Cash Received from Share of the Profit Joint Venture
Perolehan Aset Tetap & Aset Tak Berwujud	21	(16,832)	(231,067)	Acquisition of Property, Plant and Equipment
Hasil Penjualan Aset Tetap	21	--	1,525	Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(636,511)	(1,488,651)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman	26	7,834,696	13,066,442	Receipts from Loan
Pembayaran Pinjaman	26	(6,653,917)	(12,011,774)	Payment for Loan
Penerimaan Penerbitan Obligasi	34	642,100	--	Receipts from Bonds
Penerimaan Penerbitan Surat Utang	32, 33	--	841,027	Receipts From Securities
Pembayaran Penerbitan Surat Utang	34	(460,000)	(240,000)	Payment for Bonds
Pembayaran Dividen		--	(43,636)	Dividend Payment
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		1,362,879	1,612,059	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		(315,993)	(257,981)	NET (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1,107,636	1,365,617	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun dari entitas yang konsolidasi (tidak dikonsolidasi)		(17,527)	--	Cash and cash equivalents at the beginning of the year of a consolidated (unconsolidated) entity
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		774,116	1,107,636	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				Reconciliation of Total Cash & Cash Equivalents
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas		774,116	1,107,636	Amount as reported in statement of cash flows
Penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas		(16)	--	Allowance for impairment losses
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan		774,100	1,107,636	Amount as reported in statement of financial position

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. Umum

1. General

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan No. 4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2004 telah diubah dengan diterbitkannya PP No. 61 tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang menetapkan, antara lain perluasan maksud dan tujuan Perusahaan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688 menjadi sebesar Rp2.996.688. Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0029777 tanggal 8 Maret 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

1.a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("the Company") was established under Notarial Deed No. 7 dated February 27, 2004 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 14, 2004, Supplement 4541. The deed of establishment was made based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 10 Year 2004 dated February 27, 2004 on the Establishment of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in Asset Management Area. Several clauses in the PP No. 10 Year 2004 have been amended by the issuance of PP No. 61 Year 2008 dated September 4, 2008 on the Amendment to Government Regulation No. 10 Year 2004 which stipulates, among others expanded the purposes and objectives of the Company and its scope of activities.

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, dated February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1,000,000 (full amount) from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted Rp1,996,688 amounted to Rp2,996,688. This change has been noted by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration No. AHU-AH.01.03-0029777 dated March 8, 2016 concerning Acceptance of Notification of Amendments to the Company's Articles of the Company.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to undertake and support the Government's policies and programs in economics sector and national development programs in general. To achieve its purposes and objectives the Company conducting several business activities which comprise of:

1. *State's asset management which originated from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the termination and dissolution the task of IBRA, for and on behalf of the Minister of Finance.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pendapatan pengelolaan Aset eks BPPN sudah berakhir sejak 31 Desember 2017 karena mulai tahun 2018 tidak terdapat lagi Perjanjian Pengelolaan Aset dengan Kementerian Keuangan (Perjanjian Pengelolaan Aset sudah berakhir sejak tahun 2018);

2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN");
3. Kegiatan investasi; dan
4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 9 sampai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta.

1.b. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas-entitas anak pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2020/ Total Assets as of December 31, 2020 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2020/ Total Revenues For 2020 Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	1,392,691	136,797
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2012	829,585	93,625
PT Nindya Karya ("PT NK")	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	5,486,818	3,516,853
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.490	2013	194,717	155,796

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT NK/Indirectly Ownership through PT NK

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2019/ Total Assets as of December 31, 2019 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2019/ Total Revenues For 2019 Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	1,120,334	147,423
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2012	827,992	36,181
PT Nindya Karya ("PT NK")	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	5,972,492	5,598,005
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.490	2013	187,279	223,895
PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.997	2014	105,002	3,774
PT Magnesium Gosari International ("PT MGI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	51.00	2018	313,763	59,485
PT Bondi Syad Mulia**) ("PT BSM")	Surabaya	Pabrikasi/Manufacturing	75.00	1981	291,774	2,996
PT SIPPA Kemasan International **) ("PT SKI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.980	2018	159,769	--
PT Matoa Kidung Samudera**) ("PT MKS")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	60	2017	63,017	25,222
PT Matoa Kidung Bahtera**) ("PT MKB")	Jakarta	Kapal Isap Timah/Tin Vessel	60	2017	59,094	19,378
PT Rejeki Inti Logamjaya**) ("PT RILJ")	Tangerang	Pabrikasi/Manufacturing	73.53	1997	162,429	109,922

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT NK/Indirectly Ownership through PT NK

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPAK/Indirectly Ownership through PT PPAK

1.b. Subsidiaries Structure

The Company has control the Subsidiaries as at December 31, 2020 and 2019 as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sejak tahun 2020, PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi sehingga PT PPAK tidak mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikategorikan sebagai entitas anak (sesuai dengan PSAK 65).

Pengungkapan informasi entitas anak PPAK yang tidak dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Entitas yang tidak Dikonsolidasi/ <i>Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>
PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")	Jakarta
PT Magnesium Gosari International ("PT MGI")	Jakarta
PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")	Surabaya
PT SIPPA Kemasan International ("PT SKI")	Jakarta
PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")	Jakarta
PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB")	Jakarta
PT Rejeki Inti Logamjaya ("PT RILJ")	Tangerang

Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Grup".

• **PT PPAF**

Berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.

• **PT PPAK**

Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, dan memo M-10/PPA/ID/0317 saham Perusahaan pada PPAK sebesar 99,999%.

Anggaran dasar PT PPA Kapital telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Desman, S.H, M. Hum., Notaris di Jakarta Utara. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0035499.AH.01.02 Tahun 2020. Dengan adanya perubahan tersebut PPAK menjadi entitas investasi sehingga per 1 Januari 2020, PPAK tidak lagi mengkonsolidasi seluruh laporan keuangan entitas anaknya.

• **PT NK**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal pada PT NK sebesar Rp499.997 atau merupakan 99% dari modal disetor dan ditempatkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Since 2020, PT PPAK has met the requirements as an investment entity so that PT PPAK does not consolidate all entities that are categorized as subsidiaries (in accordance with PSAK 65).

Disclosure of information on unconsolidated subsidiaries of PPAK is as follows:

Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation
Pabrikasi/Manufacturing	99.997	2014
Pabrikasi/Manufacturing	51.00	2018
Pabrikasi/Manufacturing	75.00	2007
Pabrikasi/Manufacturing	99.980	2018
Kapal Isap Timah/Tin Vessel	60	2018
Kapal Isap Timah/Tin Vessel	60	2018
Pabrikasi/Manufacturing	73.53	1997

The Company and Subsidiaries hereinafter referred as "the Group".

• **PT PPAF**

Based on the letter of approval from the Minister of SOE's No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established PT PPAF, with share's ownership of 99.999%.

• **PT PPAK**

Based on the approval of the Minister of SOE's through letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, and memo of M-10/PPA/ID/0317 the Company's shares in PPAK amounted to 99.999%.

The Articles of Association of PT PPA Kapital have undergone a change based on deed No. 6 dated 6 May 2020 which was made before notary Desman, S. H, M. Hum., notary in North Jakarta. The act of change has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0035499. AH. 01.02 years 2020. With those changes, PPAK became an investment entity so that as of January 1, 2020, PPAK no longer consolidated all of the financial statements of its subsidiaries.

• **PT NK**

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2012, the Company made an equity investment in PT NK for Rp499,997 or 99% of the issued and paid up capital.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

• **PT NB**

PT NK dan Perusahaan mendirikan Akta Perseroan Terbatas PT NB No. 33 tanggal 19 Februari 2013 dari Khairina S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10206.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

PT PPAK

Sebelum 1 Januari 2020

Kepemilikan PT PPAK di entitas yang dicatat dengan metode ekuitas terdiri dari kepemilikan di entitas asosiasi dan ventura bersama.

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana PT PPAK memiliki pengaruh signifikan tetapi bukan pengendalian atau pengendalian bersama, atas kebijakan finansial dan operasional entitas tersebut. Pengaruh signifikan dianggap ada apabila PT PPAK memiliki paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% hak suara entitas tersebut. Ventura bersama adalah suatu pengaturan dimana PT PPAK memiliki pengendalian bersama, dimana PT PPAK memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut, dan bukan hak atas aset dan kewajiban atas liabilitasnya.

Entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ini, bagian PT PPAK atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian PT PPAK atas penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perubahan dan penerimaan distribusi dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi antara Perusahaan atau entitas anak dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sampai sebatas kepemilikan Perusahaan dalam entitas asosiasi dan ventura bersama.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

• **PT NB**

In 2013, PT NK and the Company establishes PT NB No. 33 based on The Limited Company Deed of PT NB dated February 19, 2013 of Khairina, S.H., Notary in Jakarta which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through Decision of The Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number AHU-10206.AH.01.01 Year 2013 regarding Authorization of the Company's Legal Entity.

PT PPAK

Before 1 January 2020

The PT PPAK's ownership in entities accounted for under the equity method consists of ownership in associates and joint ventures.

An associate is an entity over which the PT PPAK has significant influence, but not control or joint control, over the financial and operating policies of the entity. Significant influence is presumed to exist if the PT PPAK owns at least 20% but not more than 50% of the voting rights of the entity. A joint venture is an arrangement in which the PT PPAK has joint control, wherein the PT PPAK has rights to the net assets of the arrangement, and not rights to assets and liabilities over its liabilities.

Associates and joint ventures are accounted for using the equity method. Under this method, the PT PPAK's share in the profit or loss of associates and joint ventures after acquisition is recognized in profit or loss, and the PT PPAK's share of other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. Changes in and received from dividend distributions from associates and joint ventures after the date of acquisition are adjusted against the carrying amount of the investment.

Unrealized gains from transactions between the Company or its subsidiaries and associates and joint ventures are eliminated to the extent of the Company's ownership in associates and joint ventures.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Investasi pada entitas yang dicatat dengan metode ekuitas dihentikan pengakuannya apabila PT PPAK tidak lagi memiliki pengaruh signifikan, dan nilai investasi yang tersisa diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi atas investasi pada entitas yang dicatat dengan metode ekuitas dimana pengaruh signifikan atau pengendalian Bersama masih dipertahankan, diakui dalam laba rugi dan jika relevan hanya bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Sejak 1 Januari 2020

Mulai 2020, PT PPAK bersama-sama dengan Perusahaan memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasian sebagaimana diatur dalam PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian", oleh karena itu investasi di entitas yang dikendalikan - serta investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL) sesuai PSAK 71 dengan pengecualian untuk entitas anak yang dianggap perpanjangan tangan dari aktivitas investasi PT PPAK (yaitu entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi (sesuai dengan PSAK 65) yang hanya memberikan jasa manajemen investasi ke PT PPAK).

Sesuai dengan perubahan yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan PT PPAK, maka PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi (sesuai dengan PSAK 65) berdasarkan fakta bahwa PT PPAK:

- a. Memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada investor.
- b. Menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- c. Mulai mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya (yaitu investasi properti, investasi pada entitas anak, asosiasi, ventura bersama) secara substansial berdasarkan nilai wajar.

Investments in entities accounted for using the equity method are derecognized when the PT PPAK no longer has significant influence, and the remaining investment value is measured at fair value. Any difference between the carrying amount of the investment remaining at the date when significant influence is lost and its fair value is recognized in profit or loss.

Gains and losses arising from partial disposal or dilution of an investment in an entity that is accounted for under the equity method where significant influence or joint control is retained are recognized in profit or loss and, if relevant, only a proportionate share of the previously recognized amount of other comprehensive income will be reclassified to profit or loss.

Starting 1 January 2020

Starting 2020, PT PPAK together with the Company meets the requirements as a qualifying investment entity as stipulated in PSAK 65 "Consolidated Financial Statements", therefore investments in controlled entities - as well as investments in associates and joint ventures are measured at fair value through the income statement (FVTPL) in accordance PSAK 71 with the exception of subsidiaries that are considered extensions of PT PPAK's investment activities (namely subsidiaries that are not investment entities (in accordance with PSAK 65) which only provide investment management services to PT PPAK).

In accordance with changes that occur in the activities of PT PPAK, PT PPAK has met the requirements as an investment entity (in accordance with PSAK 65) based on the fact that PT PPAK:

- a. *Obtaining funds from one or more investors with the aim of providing investment management services to investors;*
- b. *Declare a commitment to investors that their business objective is to invest funds solely to obtain returns from increases in capital value, investment income, or both; and*
- c. *Start measuring and evaluating the performance of all its investments (i.e. property investment, investments in subsidiaries, associates, joint ventures) substantially based on fair value.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Selanjutnya, PT PPAK memenuhi karakteristik khusus beserta pedoman penerapan sesuai PSAK 65 yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi apakah PT PPAK merupakan entitas investasi atau bukan, yaitu:

- (a) Memiliki lebih dari satu investasi;
- (b) Memiliki lebih dari satu investor;
- (c) Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas; dan
- (d) Memiliki bagian kepemilikan saham dalam bentuk ekuitas dan kepentingan serupa.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham, No.SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, No.SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, No.SK-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, No.SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, No.SK-128/MBU/04/2020 tanggal 27 April 2020, No. SK-159/MBU/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, No. SK-76/MBU/04/2019 tanggal 1 April 2019, No. SK-87/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018, No. SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017, No.SK-78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

	2020
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	Krisna Wijaya
Komisaris	Marwanto Harjowiryo
Direksi:	
Direktur Utama	Yadi J. Ruchandi
Direktur	Rizwan Rizal Abidin
Direktur	Adi Pamungkas Daskian
	2019
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	Edy Putra Irawady
Komisaris	Didyk Choireol
Komisaris	Tirta Hidayat
Direksi:	
Direktur Utama	Iman Rachman
Direktur	Nasrizal Nasir
Direktur	Dikdik Permadi Yoffana
Direktur	R. Muhammad Irwan

Manajemen kunci meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan masing-masing memiliki sejumlah 169 dan 170 karyawan tetap (tidak diaudit).

1.c. The Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on the Decree of the State Minister for BUMN as General Meeting of Shareholders, No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020, No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9 2020, No. SK-265/MBU/08/2020 dated 6 August 2020, No. SK-198 / MBU / 06/2020 dated 12 June 2020, No. SK-128 / MBU / 04/2020 dated 27 April 2020, Number SK-159/MBU/07/2019 dated 23 July 2019, Number SK-76/MBU/04/2019 dated 1 April 2019, Number SK-87/MBU/04/2018 dated 12 April 2018, No. SK-104/MBU/06/2017 dated 5 June 2017, No.SK-78/MBU/04/2016 dated 14 April 2016, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Directors:
President Director
Director
Director
Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Directors:
President Director
Director
Director
Director

Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company.

As of December 31, 2020 and 2019 the Company has 169 and 170 permanent employees (unaudited).

1.d. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp642.100 pada tahun 2020 dengan tanggal efektif 19 Agustus 2020. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2020 dengan nomor Surat Pencatatan S-04942/BEI.PP3/08/2020.

Terbagi atas 3 (tiga) seri Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount (Rp Juta/ Million)	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Pemeringkat/ Rating Agency	Peringkat/ Rating	Tenor/ Tenor (Tahun/ Years)	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Status/ Status
1	Obligasi I PPA Tahun 2020/ Bonds I PPA Year 2020								
	Seri/ Serie A	100,000	9.95%	PEFINDO	id A	3	19 Agustus 2020/ August 19, 2020	19 Agustus 2023/ August 19, 2023	Belum Lunas/ Outstanding
	Seri/ Serie B	345,000	10.55%	PEFINDO	id A	5	19 Agustus 2020/ August 19, 2020	19 Agustus 2025/ August 19, 2025	Belum Lunas/ Outstanding
	Seri/ Serie C	197,100	11.00%	PEFINDO	id A	7	19 Agustus 2020/ August 19, 2020	19 Agustus 2027/ August 19, 2027	Belum Lunas/ Outstanding

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

1.d. The Company's Bonds Public Offering

The company has issued bonds amounting to Rp642,100 in 2020 with an effective date of 19 August 2020. The listing is made on the Indonesia Stock Exchange on 2 September 2020 with registration letter number S-04942 / BEI.PP3 / 08/2020.

Divided into 3 (three) series of bonds, with detail as follows:

2. Significant Accounting Policies

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparation the Group's financial statements, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun pada Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71 Instrumen Keuangan
- PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 Sewa
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2020, are as follows:

- *PSAK 71 Financial Instruments*
- *PSAK 72 Revenues from Contracts with Customers*
- *PSAK 73 Leases*
- *PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;*
- *PSAK 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;*
- *PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;
- PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;
- PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;
- ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;
- ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable;
- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases
- PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Group's accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

PSAK 71: Financial Instrument

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) Financial Instruments: Recognition and Measurement and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Group chose to applies retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Berdasarkan hasil kajian Grup terhadap dua kriteria dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 71.

Based on the results of the Group's review of the two criteria in determining the classification of financial assets, there is a change in classification and measurement of long-term investments classified as available for sale and measured using the cost method under PSAK 55 are changed to the classification of financial assets at fair value through other comprehensive income in accordance with PSAK 71.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Grup pada awal penerapan PSAK 71.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets have an impact on the carrying value of the Group's financial assets at the beginning of the implementation of PSAK 71.

Dampak atas penerapan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 pada laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

The effect of the implementation of PSAK 71 on January 1, 2020 in consolidated financial statements as of January 1, 2020 are as follows:

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019/ As previously reported as of December 31, 2019	Penerapan PSAK 71/ Implementation of PSAK 71	Disesuaikan pada 1 Januari 2020/ Adjusted as of January 1, 2020	
	Rp	Rp	Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	1,107,636	(82)	1,107,554	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	1,445,630	(99,803)	1,345,827	Short-term Investment Loans
Piutang Usaha	1,477,597	(153,950)	1,323,647	Accounts Receivable
Piutang Retensi	170,121	(27,773)	142,348	Retention Receivables
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	296,623	(77,839)	218,784	Joint Venture Construction Receivables
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	2,418,106	(50,959)	2,367,147	Gross Amount Due from Customers
Pinjaman yang diberikan - Dana Talangan	223,046	(139,111)	83,935	Loans Receivable-Bailout
Cessie Piutang Jangka Pendek	282,099	(154,704)	127,395	Short Term Receivable Cessie
Aset Lancar Lainnya : Piutang Lain-Lain	22,254	(101)	22,153	Other Current Assets: Other Receivables
Aset Pajak Tangguhan (Penyisihan Penurunan Nilai)	-	(61,691)	(61,691)	Deferred Tax Assets (Allowance for Impairment Losses)
Jumlah	7,443,112	(766,013)	6,677,099	Total
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	299,854	(73,866)	225,988	Long-term Investment Loans
Pinjaman yang diberikan - Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	1,416,472	(880,238)	536,234	Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Cessie Piutang Jangka Panjang	283,493	(70,028)	213,465	Long Term Receivable Cessie
Aset Tidak Lancar Lainnya : Deposito yang dijaminkan	390,786	(185)	390,601	Other Non-Current Assets: Pledged Deposits
Investasi Jangka Panjang Lainnya	102,940	(81,595)	21,345	Other Long-Term Investments
Jumlah	2,419,648	(1,134,955)	1,366,288	Total
EQUITAS				EQUITY
Saldo Laba	1,993,291	(1,778,194)	215,097	Retained Earnings
Jumlah	1,993,291	(1,778,194)	215,097	Total

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

PSAK72: Revenue from Contracts with Customers

The Group applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Grup juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;

Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the review that the Group has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replace PSAK 30: Leases, which requires the Group as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The Group has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Group's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

At the initial implementation date, the Group also adopted the following practical policies:

- *Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics;*
- *Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of 1 January 2020;*

Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap PSAK 73, berikut adalah dampak terhadap laporan keuangan di saldo awal 1 Januari 2020:

Based on the review that the Group's has conducted on PSAK 73, below is the impact on the financial statements in the opening balance on January 1, 2020:

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019/ As previously reported as of December 31, 2019 Rp	Penerapan PSAK 73/ Implementation of PSAK 73	Disesuaikan pada 1 Januari 2020/ Adjusted as of January 1, 2020 Rp	
ASET				ASSETS
Aset Hak Guna	--	23,287	23,287	Rights of Use Assets
Jumlah	--	23,287	23,287	Total
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Sewa	--	28,263	28,263	Lease Liabilities
Jumlah	--	28,263	28,263	Total
EKUITAS				EQUITY
Saldo Laba	1,993,291	(4,975)	1,988,316	Retained Earnings
Jumlah	1,993,291	(4,975)	1,988,316	Total

**2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi
Sebelum 1 Januari 2020**

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset, liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Grup menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

**2.d. Principles of Consolidation
Before 1 January 2020**

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e., the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries that are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date when the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control is over.

The Group prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah di mana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that result in the loss of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- (e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Setelah 1 Januari 2020

Mulai 2020, PT PPAK memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasian sebagaimana diatur dalam PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian", oleh karena itu investasi di entitas anak yang tidak dikonsolidasi, investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL) sesuai PSAK 71.

Sesuai dengan perubahan yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan PT PPAK, maka PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi (sesuai dengan PSAK 65) berdasarkan fakta bahwa Perusahaan:

- a. Memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan jasa manajemen investasi kepada investor;
- b. Menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- c. Mulai mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya (yaitu investasi properti, investasi pada entitas investasi, asosiasi dan ventura bersama) secara substansial berdasarkan nilai wajar.

Selanjutnya, PT PPAK memenuhi karakteristik khusus beserta pedoman penerapan sesuai PSAK 65 yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi apakah Perusahaan merupakan entitas investasi atau bukan, yaitu:

- a. Memiliki lebih dari satu investasi;
- b. Memiliki lebih dari satu investor;
- c. Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas; dan
- d. Memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa.

Oleh karena itu, sejak 2020 PT PPAK tidak mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikategorikan sebagai entitas anak (sesuai dengan PSAK 65).

Perbedaan antara nilai tercatat investasi di entitas anak yang tidak dikonsolidasi tersebut dengan nilai wajarnya pada 1 Januari 2020 diakui dalam laba rugi tahun 2020 (lihat Catatan 11).

Perusahaan memberikan dukungan keuangan kepada PT PPAK sebagai entitas investasi berupa pinjaman investasi guna mendukung kegiatan operasional.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

After 1 January 2020

Starting 2020, PT PPAK meets the requirements as a qualifying investment entity as stipulated in PSAK 65 "Consolidated Financial Statements", therefore investments in unconsolidated subsidiaries, investments in associates and joint ventures are measured at fair value through the income statement (FVTPL) in accordance with PSAK 71.

In accordance with changes that occur in the activities of PT PPAK, PT PPAK has met the requirements as an investment entity (in accordance with PSAK 65) based on the fact that the Company:

- a. Obtaining funds from one or more investors with the aim of providing investment management services to investors;
- b. Declare a commitment to investors that their business objective is to invest funds solely to obtain returns from an increase in the value of capital, investment income, or both; and
- c. Start measuring and evaluating the performance of all its investments (i.e. property investments, investments in investment entities, associations and joint ventures) substantially based on fair value.

Furthermore, PT PPAK fulfills the special characteristics along with the implementation guidelines in accordance with PSAK 65 that must be considered in evaluating whether the Company is an investment entity or not, namely:

- a. Have more than one investment;
- b. Have more than one investor;
- c. Having investors who are not related parties of the entity; and
- d. Has an ownership interest in the form of equity or similar interest.

Therefore, since 2020 PT PPAK has not consolidated all entities that are categorized as subsidiaries (in accordance with PSAK 65).

The difference between the carrying amount of the investment in the unconsolidated subsidiary and its fair value as of January 1, 2020 is recognized in 2020 profit or loss (see Note 11).

The Company provides financial support to PT PPAK as investment entity in the form of investment loans to support operational activities.

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
1 USD	14,105	13,901	1 USD

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

2.e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions.

At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2020 and 2019 as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.f. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.g. Instrumen Keuangan

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by government. Government refers to government, government agencies and similar agency whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.g. Financial Instrument

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a

keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) *Financial assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) *Loans and Receivables*
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:
 - (a) *those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or
- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-maturity (HTM) investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Since January 1, 2020

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) *The objective of the Company's business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and*
- (2) *The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held*

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (1) The objective of business model to hold the financial assets is to collect contractual cash flows and to sell the assets; and
- (2) The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

for trading) untuk diukur pada *FVTOCI*. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

**Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan
Sebelum 1 Januari 2020**

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (*FVTPL*)
Liabilitas keuangan yang diukur pada *FVTPL* adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada *FVTPL* diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada *FVTPL* dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

**Subsequent Measurement of Financial Liabilities
Before January 1, 2020**

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) *Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Since January 1, 2020

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis Ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (a) *financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- (b) *financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.*
- (c) *financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:*
 - (i) the amount of the loss allowance*
 - (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.*
- (d) *contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss*

An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as 'an accounting mismatch') that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- (b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.*

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup dan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan
Sebelum 1 Januari 2020**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

**Impairment of Financial Assets
Before January 1, 2020**

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The following are objective evidence that a financial asset or Company of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a Company of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada *FVTOCI*.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada *FVTOCI* yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

After January 1, 2020

*The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at *FVTOCI*.*

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Company is exposed to credit risk.

*Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at *FVTOCI* where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.*

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat “*investment grade*” berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menggunakan metode *roll rate* untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with ‘investment grade’ according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Group is using the roll rate method to measure the provision for impairment of account receivable.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

**Reklasifikasi
Sebelum 1 Januari 2020**

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Sejak 1 Januari 2020

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

**Reclassification
Before January 1, 2020**

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Since January 1, 2020

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi *FVTPL*, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari *FVTPL* menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi *FVTOCI*, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari *FVTOCI* menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran *FVTPL* menjadi kategori pengukuran *FVTOCI*, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori *FVTOCI* menjadi kategori pengukuran *FVTPL*, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 2.g.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi dan dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, yang akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, adalah pendapatan administrasi proses pembiayaan dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pembiayaan konsumen tersebut.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diberlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

2.j. Anjak Piutang

Anjak piutang diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode kontrak menggunakan suku bunga efektif.

2.h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in bank (demand deposit) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Consumer Financing Receivables

Consumer financing receivables are classified into loans and receivables.

Recognition, initial measurement, measurement after initial recognition, reclassification, determination of fair value, impairment and derecognition of consumer financing receivables refers to Note 2.g.

Consumer financing receivables represent the amount of receivables plus (less) unamortized transaction costs (income) and less unrecognized consumer financing income and allowance for impairment losses on consumer financing receivables.

Unrecognized consumer financing income represents the difference between the total installment payments to be received from consumers and the principal amount, plus (less) unamortized transaction costs (income), which will be recognized as income over the term of the contract using the interest rate method. effective consumer financing receivables.

Unamortized transaction costs (revenues) are administrative income for the first-time financing process and transaction costs that are directly related to consumer financing.

The settlement of the contract before the end of the consumer financing period is treated as a cancellation of the consumer financing contract and the resulting gain is recognized as profit or loss for the year.

2.j. Factoring

Factoring with recourse is recognized as the amount of receivables acquired and is stated at net realizable value, net of deferred income factoring. The difference between the factoring receivables and the amount of payments made to the client is recognized as deferred factoring income and will be amortized over the period of respective factoring agreements using the effective interest rate.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Dalam anjak piutang, klien mempunyai kewajiban membayar seluruh dana yang diperoleh dari piutang alihan, atau membeli kembali piutang alihan, dalam hal nasabah tidak membayar piutang alihan tersebut kepada factor pada saat jatuh tempo.

2.k. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diperoleh dari pembelian dan diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 10-20 tahun.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

2.l. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.m. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi jasa merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

In factoring with recourse, the client has the obligation to pay all (full recourse) of the funds obtained from the transferred receivables, or to buy back the transferred receivables, in the event that the customer does not pay the transferred receivables to the factor at maturity.

2.k. Intangible Assets

Intangible asset are acquired on a purchase basis and measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite. Intangible assets are amortized by using straight line method based on estimated useful lives of 10-20 years.

Amortization is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value.

Intangible assets are derecognized if they are disposed of. When no future economic benefits are expected from their use or disposal.

2.l. Retention Receivables

Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.m. Gross Amount due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

2.n. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.o. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar namun pembelanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

2.n. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.o. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the periods benefits using straight-line method.

2.p. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.q. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi

After initial recognition, the Group decides to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.q. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, property, plant and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of property, plant and equipment starts when it is available for use and it is computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Kelompok	Tahun/Years	Group
Bangunan	20	Building
Kendaraan Bermotor	3 - 8	Vehicle
Peralatan Proyek	2 - 8	Project Equipment
Peralatan Kantor	2 - 8	Office Equipment

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed Property, Plant and Equipment are presented as part of the Property, Plant and Equipment under "Asset in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective Property, Plant and Equipment items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of Property, Plant and Equipment is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk aset tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

The Group choose to use revaluation model for an item of Property, Plant and Equipment whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated impairment losses.

If asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.

If asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss which is recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.r. Aset Lain-lain

Persediaan properti berupa tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan yaitu beban-beban yang dikeluarkan serta beban bunga yang menjadi beban atas kredit yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

2.s. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

2.t. Sewa

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Grup sebagai penyewa

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai utang sewa pembiayaan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.r. Other Assets

Property inventory in form of land and building are recorded based on the acquisition cost that are incurred and interest expenses that are used for such activities.

2.s. Impairment of Non Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

2.t. Leases

Accounting treatment before 1 January 2020

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

The Group as lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statement of financial position as a finance lease obligation.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the

(tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontingen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontingen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup sebagai Penyewa

Pada tanggal insepisi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- (a) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi; dan
- (b) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa

liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group as Lessee

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

- (a) *the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and*
- (b) *the right to direct the use of the identified asset, only if either:*
 - (i) *the Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or*
 - (ii) *the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
 - *the Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
- Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- having the right to change those operating instructions; or*
- *the Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.*

At the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset at cost, which includes the amount of the initial measurement of the lease liability, any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received, any initial direct costs incurred by the Group, and an estimate of costs to be incurred by the Group in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories.

After the commencement date, the Group measures the right-of-use asset by applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Grup sebagai Pesewa

Grup melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan beberapa kapal.

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan sebagai jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

2.u. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
- reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
- remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Lease liability is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group as Lessor

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to some of vessels.

Leases for which the Group is a lessor are classified as operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a operating leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

2.u. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as joint venture.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai *venturer* bersama.

Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.w. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

2.w. Gross Amount Due to Third Parties

Gross amount due to third parties represents uncertificated subcontractor working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress since it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

Utang bruto pihak ketiga disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi rugi yang diakui.

Gross amount due to the third parties is presented as the differences between costs occurred added by gain or deducted by realized loss.

2.x. Pengakuan Pendapatan dan Beban Sebelum 1 Januari 2020

Grup menerapkan PSAK 23 (2014), "Pendapatan". Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima.

2.x. Revenues and Expenses Recognition Before January 1, 2020

The Group adopted PSAK 23 (2014), "Revenues". Income is recognized when it is probable that the economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably. Income is measured at the fair value of the payment received.

Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran pertama, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

Sejak 1 Januari 2020

Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian atas barang atau jasa diakui dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak Grup dalam pertukaran dengan barang dan jasa tersebut. Grup telah menetapkan secara umum bahwa Grup merupakan prinsipal dalam kontrak pendapatannya karena Grup biasanya mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkan kepada pelanggan.

Since January 1, 2020

The Group adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers". Revenue from contracts with customers is recognized when control over the goods or services is recognized is transferred to the customer in an amount that reflects the consideration that the Group is expected to be entitled to in exchange for the goods and services. The Group has generally determined that the Group is the principal in its revenue contracts because the Group usually controls the goods or services before transferring them to customers.

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Grup berupa penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti dan dividen selama suatu periode jika arus masuk tersebut

Revenue is the gross inflow of economic benefits arising from the Group's domestic activities in the form of sales of goods, sales of services, interest, royalties and dividends during a period if the inflows result in an

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dari yang dijanjikan kepada pelanggan (kontrak dengan pelanggan) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- Kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan

Grup mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada awal kontrak Grup akan menentukan apakah penyelesaian kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu.

Pendapatan Pengelolaan Aset

Pendapatan pengelolaan aset diakui pada periode terjadinya yang terdiri dari:

- Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN berupa imbalan pengelolaan aset, imbalan kinerja dan pendapatan yang berkaitan dengan biaya pengelolaan aset yang dapat diperoleh kembali.
- Pendapatan pengelolaan Aset eks BPPN sudah berakhir sejak 31 Desember 2017 karena mulai tahun 2018 tidak terdapat lagi Perjanjian Pengelolaan Aset dengan

increase in equity that does not originate from investment contributions. Revenue from promised to customers (contracts with customers) meets the following criteria:

- The parties to the contract have agreed to the contract (in writing, oral or in accordance with general business practices) and are committed to carrying out their respective obligations;*
- An entity can identify each party's rights regarding the goods or services to be transferred;*
- An entity can identify the period of payment for the goods or services to be transferred*
- The contract has commercial substance (i.e. the risk, time, or amount of the entity's future cash flows expected to change as a result of the contract); and*
- It is probable that the entity will collect the rewards that will be its right in the exchange of goods or services that will be transferred to the customer. In evaluating whether the collectibility of the amount of benefit is likely to occur, the entity only considers the ability and intention of customers to pay the amount of compensation when due. The amount of the benefit that the entity will be entitled to may be less than the price recorded in the contract if the reward is variable because the entity can offer a price concession to the customer*

The Group recognizes revenue when (or as long as) the entity fulfills its performance obligations by transferring promised goods or services (ie assets) to customers. Assets are transferred when (or during) the customer gains control of the asset. At the beginning of the contract the Group will determine whether the completion of the performance obligations at over time or a point in time.

Revenue from Asset Management

Revenue of Asset Management is recognized in the period when it is occurred consist of:

- Revenue from Asset Management ex-IBRA assets which is made up of asset management fees, success fees and revenues related with reimbursable costs;*
- Revenue from Asset Management ex-IBRA assets has ended since December 31, 2017 when starting in 2018 there are no more Asset Management Agreements with the*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kementerian Keuangan (Perjanjian Pengelolaan Aset sudah berakhir sejak tahun 2018)

- Pendapatan Pengelolaan Aset BUMN berupa jasa pengelolaan rutin dan jasa keberhasilan.

Pendapatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pendapatan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN berupa pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Pendapatan Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada hasil survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Ministry of Finance (Asset Management Agreements have expired since 2018)

- Revenue from Asset Management SOEs' assets which are routine management fees and success fees.

Revenue from Restructuring and/or Revitalization

Revenues of SOEs' restructuring and/or revitalization which comprise loan interest income and income from restructuring and/or revitalization are recognized as incurred on an accrual basis.

Construction Revenue

Revenues related to construction contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the surveys results of work performed.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognised as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognised as current year expenses in profit or loss.

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognised as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognised as nonproject expenses (operating expenses).

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan Dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Penjualan Barang

Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dengan dasar akrual).

2.y. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Rental Revenue

Rental revenue from operating leases are recognized as revenue on a straight line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating and rental arrangements are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Advances received from rental are recorded in unearned revenue account and will be recognized as revenue on a regular basis over the rental periods.

Dividend Revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Interest Income

Interest income is recognized based on timely basis, with an appropriate interest rate or the effective interest rate.

Interest income from finance leases is recognized when it is probable the Subsidiary will obtain economic benefits related with these transactions and the revenues could be measured reliably.

Sale of Goods

Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group's warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Expenses

Expenses are recognized as incurred (on an accrual basis).

2.y. Borrowing Cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.z. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.z. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *Deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *The same taxable entity; or*
 - ii. *Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.aa. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (UU 13/2003).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.aa. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (Law 13/2003).

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.ab.Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

2.ab.Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah

Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared. And assumptions about the future development of the situation, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Accounting Estimates and Assumptions

Estimated Useful Lives

Group intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.

Group performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the The Company and subsidiaries property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The determination of Group's post-employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Management believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense.

Fair Value of Investment Property and Land

The Group's fair value of investment property and land depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai untuk instrumen keuangan telah diukur sejumlah sepanjang umur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. *Expected Credit Loss* pada instrumen keuangan diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar pelanggan di masa lalu dan analisis posisi keuangan pelanggan saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari pelanggan, kondisi ekonomi umum industri di mana pelanggan beroperasi. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari 36 bulan karena pengalaman historis mengindikasikan bahwa instrumen keuangan tersebut umumnya tidak dapat dipulihkan.

Instrumen keuangan dihapuskan ketika terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa pelanggan dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi untuk perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 dan PSAK 71 untuk perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020. Dengan demikian, aset

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its investment property.

Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

Allowance for impairment losses for financial instruments has been measured at an amount equal to lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since its initial recognition. The *Expected Credit Loss* on financial instruments are estimated using a provision matrix refer to past default history of the customers and an analysis of the customers current financial position, and adjusted for specific factors to the customers, general economic conditions of the industry in which the customers operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables over 36 months past due because historical experience has indicated that financial instruments aren't generally recoverable.

Financial instrument is written off when there is information indicating that the customers is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

Judgement in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014. for accounting treatment before January 1, 2020 and PSAK 71 for accounting treatment since January 1, 2020. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.g.

2.ac.Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar masing-masing sebesar 2.996.688 lembar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

2.ad.Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

accordance with the Group accounting policies disclosed in Note 2.g.

2.ac.Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculationg diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares. The numbers of weighted average shares outstanding are 2,996,688 shares as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

2.ad. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

	2020 Rp	2019 Rp	
Kas	706	894	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	194,923	137,354	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36,072	110,483	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,843	27,572	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	823	465	Other (each below Rp 1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,487	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	11,823	327	Other (each below Rp 1,000)
Jumlah Pihak Berelasi	248,971	276,201	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	15,183	--	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5,494	--	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3,197	4,217	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	--	2,551	PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	2,844	4,999	Other (each below Rp 1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	--	185	Other (each below Rp 1,000)
Jumlah Bank - Pihak Ketiga	26,718	11,952	Total Banks - Third Parties
Jumlah Bank	275,689	288,153	Total Cash in Banks
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	406,367	444,662	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	66,454	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,000	77,965	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi	473,821	522,627	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Capital	11,000	--	PT Bank Capital
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	10,000	97,133	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	2,900	2,900	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	195,540	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	--	389	Other (each below Rp 1,000)
Jumlah Pihak Ketiga	23,900	295,962	Total Third Parties
Jumlah Deposito Berjangka	497,721	818,589	Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	774,116	1,107,636	Total Cash and Cash Equivalents
Dikurangi: Kerugian Kredit Ekspektasian	(16)	--	Less: Expected Credit Losses
Jumlah Kas dan Setara Kas - bersih	774,100	1,107,636	Total Cash and Cash Equivalents - net
 Tingkat Suku Bunga Deposito per Tahun	4.5%-7%	6.5%-8%	 Interest Rate on Time Deposit per Annum
Jangka Waktu	1 - 3 bulan/months	1 - 3 bulan/months	Maturity Period

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi penyisihan Kerugian Kredit
Ekspektasian kas dan setara kas adalah
sebagai berikut:

The movements in amount of the allowance for
Expected Credit Losses of cash & cash
equivalent is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	--	--	Balance at Beginning of The Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(82)	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(13)	--	Additions in Current Year
Pemulihan di Tahun Berjalan	79	--	Recovery in Current Year
Saldo Akhir Periode	(16)	--	Balance at Ending of The Period

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek

4. Short-term Investment Loans

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pokok			Short Term Investment - Principal
PT Bondi Syad Mulia	106,220	--	PT Bondi Syad Mulia
PT Magnesium Gosari International	44,951	--	PT Magnesium Gosari International
PT Artha Bangun Pratama	31,711	26,506	PT Artha Bangun Pratama
PT Energy Management Indonesia (Persero)	14,173	5,713	PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Duta Mentari Raya	11,444	--	PT Duta Mentari Raya
Jumlah Pinjaman Pokok	208,499	32,219	Investment Loans - Principal
Bunga Pinjaman Investasi			Interest of Investment Loans
PT Magnesium Gosari International	3,634	--	PT Magnesium Gosari International
PT Bondi Syad Mulia	1,573	--	PT Bondi Syad Mulia
PT Duta Mentari Raya	470	--	PT Duta Mentari Raya
PT Artha Bangun Pratama	244	206	PT Artha Bangun Pratama
PT Energy Management Indonesia (Persero)	53	24	PT Energy Management Indonesia (Persero)
Jumlah Pinjaman Pihak Berelasi - Bunga	5,974	230	Total Interest of Investment Loans
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(16,560)	--	Less: Allowance for Impairment Losses
Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pihak Berelasi	197,913	32,449	Short Term Investment Loans - Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pokok			Short Term Investment - Principal
PT Lintas Samudra Sejahtera	432,935	443,475	PT Lintas Samudra Sejahtera
PT Alim Investindo	300,000	--	PT Alim Investindo
PT Varia Intra Finance	160,000	--	PT Varia Intra Finance
PT Polowijo Gosari	131,742	4,539	PT Polowijo Gosari
PT Carpediem Mandiri	42,658	42,658	PT Carpediem Mandiri
PT Bintang Abadi Sempurna	35,730	35,730	PT Bintang Abadi Sempurna
PT Inti Adhiyasa	33,279	33,746	PT Inti Adhiyasa
PT Niaga Bumi Energi	31,583	--	PT Niaga Bumi Energi
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	26,706	26,706	PT Duta Cipta Pakar Perkasa
PT Varuna Tirta Prakasya	25,634	24,473	PT Varuna Tirta Prakasya
PT Gali Terus Sejahtera	25,401	31,175	PT Gali Terus Sejahtera
PT Pratama Persada Airbone	23,050	23,050	PT Pratama Persada Airbone
PT Bina Patria Transmirta	16,176	16,748	PT Bina Patria Transmirta
PT Indah Prakasa Sentosa	14,891	16,184	PT Indah Prakasa Sentosa
PT CDM Swarnadipa	14,351	14,351	PT CDM Swarnadipa
PT Wintermar	10,351	13,779	PT Wintermar
PT Risco Duta Sarana	9,000	9,000	PT Risco Duta Sarana
PT Prabu Wahana International	8,343	8,419	PT Prabu Wahana International
PT Bangun Sarana Baja	7,846	9,997	PT Bangun Sarana Baja
PT Gasuma Federal Indonesia	--	311,895	PT Gasuma Federal Indonesia
PT Polyrama Propindo	--	270,000	PT Polyrama Propindo
PT SIG Asia	--	9,564	PT SIG Asia
PT Widodo Makmur Unggas	--	50,000	PT Widodo Makmur Unggas
Jumlah Pinjaman Pokok	1,349,676	1,395,489	Investment Loans - Principal
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(72,643)	(803)	Less: Allowance for Impairment Losses
Provisi	1,091	420	Provision
Jumlah Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pihak Ketiga	1,333,794	1,413,181	Total Short Term Investment Loans - Third Parties
Jumlah Pinjaman Investasi Jangka Pendek - bersih	1,531,707	1,445,630	Total Short Term Investment Loans - net

Mutasi penyisihan penurunan nilai
usaha adalah sebagai berikut:

The movements in amount of the allowance for
impairment losses of accounts receivable is as
follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Penyisihan	(803)	--	Beginning Allowance for impairment Short Term Investment
Dampak Penerapan awal PSAK 71	(99,803)	--	Impact on initial implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(5,261)	(803)	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	16,664	--	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Penyisihan	(89,203)	(803)	Ending Allowance for impairment Short Term Investment

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

a. PT Artha Bangun Pratama

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Perusahaan melakukan Addendum Ketujuh atas Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek No. PP-20/PPA/1219, perubahan terkait dengan penambahan faslitas *Tranche J* yang digunakan sebagai talangan pinjaman kepada PT Industri Sandang Nusantara (Persero) untuk pembayaran biaya PBB atas Aset Tanah PT Artha Bangun Pratama, serta pada tanggal 8 Oktober 2019 dilakukan Addendum III Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek kepada PT Artha Bangun Pratama No. PP-25/PPA/1019 terkait dengan penambahan plafon pinjaman sebesar Rp70 dan perpanjangan jangka waktu pinjaman.

Pada tanggal 3 Desember 2019 kembali dilakukan Addendum VII atas Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek No. PP-20/PPA/1219 terkait dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas dan penambahan plafon pinjaman.

Pada tanggal 10 Desember 2020, dilakukan Addendum IX perubahan secara menyeluruh pemberian pinjaman jangka pendek No. PP-026/PPA/1220 dengan PT Artha Bangun Pratama. Tujuan Perubahan adalah penambahan plafon fasilitas sebesar Rp5.365 dan perpanjangan jangka waktu fasilitas sampai dengan 14 Desember 2021.

Addendum IV No-025/PPA/1220 bertujuan untuk penambahan plafon fasilitas pinjaman konsultan JLL sebesar Rp85.000 dan perpanjangan jangka waktu sampai dengan 21 November 2021.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp26.506 Total pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp5.205. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp31.711.

b. PT Energy Management Indonesia (Persero)

Pada tanggal 18 November 2019, dilakukan perubahan kondisi pada perjanjian yang tertuang dalam Addendum II No. 20 atas tujuan penggunaan dana, suku bunga, dan besaran bagi hasil untuk setiap penggunaan dana fasilitas pinjaman yang ditunjukkan untuk Bank Garansi atau Jaminan Pelaksanaan. dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, bunga pinjaman untuk penggunaan Bank Garansi sebesar 17%, serta tidak dibebankannya bagi hasil atas fasilitas pinjaman untuk Bank Garansi atau Jaminan Pelaksanaan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

a. PT Artha Bangun Pratama

On August 30, 2019, the Company was made seventh addendum in agreement through in short terms loans Agreement Number PP-20/PPA/1219 with the additional new loan facility of tranche J which is used as a loan bailout to PT Industri Sandang Nusantara (Persero) for the payment of PBB on PT Artha Bangun Pratama's Land Assets, and on October 8, 2019, Addendum III of the Agreement to Provide Short-Term Loans to PT Artha Bangun Pratama No. PP-25/PPA/1019 relates to an additional loan ceiling of Rp70 and an extension of the loan term.

On Desember 3, 2019 was made seventh addendum in agreement through in short terms loans Agreement Number PP-20/PPA/1219 for extension of the loan term of 1 (one) year as well as an additional loan's plafond.

On December 10, 2020, Addendum IX was thoroughly amended to present short-term loans No. PP-026 / PPA / 1220 with PT Artha Bangun Pratama. The purpose of the Amendment is an additional facility amounting to Rp5,365 and an extension of the facility period until 14 December 2021.

Addendum IV No-025/PPA/1220 aims to increase the JLL consultant loan facility ceiling of Rp85,000 and an extension of the period until November 21, 2021.

The balance at the beginning of the year is Rp26,506 Total loan disbursement of loans in 2020 amounting to Rp5,205. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp31,711.

b. PT Energy Management Indonesia (Persero)

On November 18, 2019, there was a change in the conditions of the agreement contained in Addendum II No. 20 for the purpose of using funds, interest rates, and the profit sharing amount for each use of the loan facility indicated for the Bank Guarantee or Performance Guarantee. with a period of 12 months from the signing of the agreement, the loan interest for the use of the Bank Guarantee is 17%, and there is no sharing of profit sharing on the loan facility for the Bank Guarantee or Performance Guarantee.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 20 Desember 2019, dilakukan perpanjangan perjanjian tertuang dalam Addendum III No. 51 atas fasilitas pinjaman berupa pinjaman modal kerja *revolving* maksimal sebesar Rp25.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, serta peningkatan jaminan melalui fidusia atas tagihan maupun jaminan asuransi.

Pada tanggal 22 Desember 2020, dilakukan perpanjangan perjanjian tertuang dalam Addendum IV No. 62 atas fasilitas pinjaman berupa pinjaman modal kerja *revolving* dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh HT II senilai Rp1.100 atas SHGB No. 00034 berupa sebidang tanah seluas 9.156 m² berikut bangunan pabrik, HT III senilai Rp3.000 atas SHGB No. 00034 berupa sebidang tanah seluas 9.156 m² berikut bangunan pabrik dan Fidusia Piutang senilai Rp17.193.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp5.713. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp25.500. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp17.040. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp14.173.

c. PT Lintas Samudera Sejahtera

Pada tanggal 30 Desember 2020 Perusahaan melakukan addendum IV No. 14 Perjanjian Kerjasama Pendanaan Proyek Pengadaan Kapal FSU, addendum dilakukan bertujuan untuk perpanjangan waktu jatuh tempo pinjaman PT Lintas Samudera Sejahtera sampai dengan 31 Maret 2021.

Nilai jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa hipotek kapal senilai Rp486.731, piutang usaha senilai Rp170.697, saham senilai Rp12.500 sehingga total nilai jaminan sebesar Rp669.928.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp443.475. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp10.540. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp432.935.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On December 20, 2019, an extension of the agreement stated in Addendum III No. 51 for a loan facility in the form of a revolving working capital loan with a maximum of Rp25,000 with a period of 12 months from the signing of the agreement, as well as increased collateral through fiduciary over claims and insurance guarantees.

On December 22, 2020, the agreement stipulated in Addendum IV No.62 was extended for the loan facility in the form of a revolving working capital loan with a period of 12 months from the signing of the agreement.

Collateral value for loan obligations covered by HT II in the amount of Rp1,100 for SHGB No. 00034 in the form of a plot of land covering an area of 9,156 sqm following a factory building, HT III valued at Rp3,000 on SHGB No. 00034 in the form of a plot of land covering an area of 9,156 sqm including factory buildings and Fiduciary Receivables valued at Rp17,193.

The balance at the beginning of the year is Rp5,713. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp25,500. Receipt of loan payment in 2020 is Rp17,040. Balance at December 31, 2020 amounting to Rp14,173.

c. PT Lintas Samudera Sejahtera

On December 30, 2020, the Company conducted addendum IV No. 14 Cooperation Agreement for FSU Ship Procurement Project Funding, an addendum was carried out aimed at extending the maturity period of PT Lintas Samudera Sejahtera's loan until March 31, 2021.

Collateral value for loan obligations covered in the form of ship mortgage amounted to Rp486,731, accounts receivable amounted to Rp170,697, shares amounted to Rp12,500 with total collateral value amounted to Rp669,928.

The balance as at the beginning of the year is Rp443,475. Total disbursement of loan in 2020 is Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Rp10,540. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp432,935.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

d. PT Alim Investindo

Berdasarkan Perjanjian No. 8 pada tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Perusahaan memberikan Fasilitas pembiayaan Jangka Pendek kepada PT Alim Investindo yang digunakan untuk modal kerja PT Alumindo Light Metal Industry Tbk, dengan total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp300.000, tingkat suku bunga 10,25% per tahun, biaya provisi sebesar 2,25% dari fasilitas pinjaman yang dibayarkan secara bertahap. Jaminan berupa tanah dan *Corporate Guarantee* senilai Rp1.030.000 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021.

Nilai jaminan atas kewajiban PT Alim Investindo dilindungi oleh jaminan berupa HT I Tanah seluas 538.575 m² yang berlokasi di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atas nama PT Maspion Industrial Estate dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No.693. Total kecukupan jaminan sebesar Rp390.000.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Total pencairan di tahun 2020 sebesar Rp300.000. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp300.000.

e. PT Varia Intra Finance

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Fasilitas Pembiayaan kepada PT Varia Intra Finance pada tanggal 29 November 2019 No.86, Perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, maksimum sebesar Rp160.000 dengan tingkat suku biaya pendanaan sebesar 14% per tahun yang jatuh tempo pada 28 November 2021.

Jaminan berupa fidusia piutang sebesar Rp208.000 dari 10.955 debitur, *corporate guarantee* atas nama PT Alter Abadi Tbk dan *personal guarantee* atas nama Rachman Hakim.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp160.000 karena jatuh tempo dalam satu tahun, maka dipindahkan ke pinjaman investasi jangka pendek. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran ditahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp160.000.

d. PT Alim Investindo

Based on Agreement No. 8 dated February 28, 2020 which made in front of the Notary Rismalena Kasri, SH, the Company provided short-term financing facilities to PT Alim Investindo which used for working capital for PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. with a maximum total principal of the loan facility of Rp300,000, an interest rate of 10.25% per annum, a provision fee of 2.25% of the loan facility paid in stages. Collateral in the form of land and Corporate Guarantee worth Rp1,030,000, due on February 27, 2021.

The collateral value for PT Alim Investindo's obligations is protected by collateral in the form of HT I Land covering an area of 538,575 sqm located in Sukomulyo Village, Manyar District, Gresik Regency, East Java Province on behalf of PT Maspion Industrial Estate with proof of ownership in the form of SHGB No.693. Guarantee cover is Rp390,000.

The balance as at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp300,000. Receipt of loan payment in 2020 is Nil. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp300,000.

e. PT Varia Intra Finance

Based on the Financing Facility Loan Facility Agreement to PT Varia Intra Finance on November 29, 2019 No.86, the Company provide financing facilities for working capital needs, maximum amounted to Rp160,000 with funding rate of 14% per annum, which will mature on November 28, 2021.

A guarantee in the form of fiduciary receivables of Rp208,000 from 10.955 debtor, corporate guarantee under PT Alter Abadi, tbk and a personal guarantee under the name of Rachman Hakim.

The balance as at the beginning of 2020 is Rp160,000 because it matures in one year, then it is transferred to a short-term investment loan. The total balance of loan disbursements in 2020 is Nil. Receipts for payments in the current year are Nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp160,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

f. PT Polowijo Gosari

Berdasarkan akta addendum III Perjanjian Pinjaman kepada PT Polowijo Gosari No. PP-11/PPA/0519 Tanggal 27 Mei 2019 tentang perpanjangan jangka waktu pinjaman fasilitas modal kerja kepada PT Polowijo Gosari.

Pada tanggal 27 Mei 2020 dilakukan addendum IV Perjanjian Pinjaman No. PP-1012/PPA/0520 berisi tentang perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 28 Mei 2021 dan pemberian pinjaman fasilitas baru yang bertujuan untuk pembiayaan Bahan Baku dan Biaya Transporter atas kontrak Pengadaan Pupuk Majemuk / Tunggal dan pembiayaan biaya transporter atas kontrak Pengadaan pupuk berbasis dolomit.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp4.539 Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp134.546. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp7.343. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp131.742.

g. PT Bondi Syad Mulia

Pada tanggal 26 April 2019 Perusahaan melakukan perpanjangan perjanjian melalui Addendum I dengan PT Bondi Syad Mulia (PT BSM) atas perjanjian pemberian Pinjaman Modal Kerja No. 5 terkait pemberian tambahan nilai fasilitas pinjaman modal kerja dengan penambahan plafond dari Rp85.000 menjadi Rp110.000 untuk memenuhi kebutuhan modal kerja operasional pabrik Gresik dan perpanjangan jangka waktu hingga 30 April 2020.

Pada tanggal 29 April 2020 Perusahaan melakukan addendum II dengan PT BSM No. PP-10/PPA/2020 dengan tujuan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 30 April 2021.

Pada 31 Desember 2019 PT BSM masih konsolidasian oleh PT PPAK sehingga saldo awal pada laporan konsolidasian sebesar nihil. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp106.220.

h. PT Magnesium Gosari Internasional

Pada tanggal 17 Januari 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman investasi proyek pengembangan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

f. PT Polowijo Gosari

Based on the deed of addendum III of the Loan Agreement to PT Polowijo Gosari No. PP-11 / PPA / 0519 Dated 27 May 2019 concerning the extension of the working capital loan term to PT Polowijo Gosari.

On 27 May 2020, addendum IV to the Loan Agreement No. PP-1012 / PPA / 0520 contains the extension of the loan period until May 28, 2021 and the provision of new loan facilities aimed at financing Raw Materials and Transporter Costs for the procurement of compound / single fertilizer contracts and financing of transporter costs for dolomite-based fertilizer procurement contracts.

The balance as at the beginning of the year is Rp4,539. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp134,546. Receipt of loan payment in 2020 is Rp7,343. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp131,742.

g. PT Bondi Syad Mulia

On April 26, 2019, the Company made the extension agreement through Addendum I with PT Bondi Syad Mulia (PT BSM) on the agreement to grant a Working Capital Loan No. 5 concerning additional working capital loan facility from Rp85,000 to Rp110,000 to meet the operational working capital needs of the Gresik factory and extension of the period until April 30, 2020.

On April 29, 2020, the Company conducted addendum II with PT BSM No. PP-10/PPA/2020 with the aim of extending the loan facility period until April 30, 2021.

On December 31, 2019 PT BSM was still being consolidated by PT PPAK so that beginning balance in consolidated financial statement amounting to nil. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method. Receipts from payments in the current year amounted to Nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp106,220.

h. PT Magnesium Gosari Internasional

On January 17, 2019, an agreement was signed on the granting of investment loan facilities for the development of the Fertilizer Factory Area to

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kawasan Pabrik Pupuk kepada PT Magnesium Gosari Internasional (PT MGI) oleh Perusahaan sesuai dengan PP-03/PPA/0119.

Pinjaman fasilitas ini terdiri dari *Tranche A* sebesar Rp23.000 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembelian mesin dolomit train II. *Tranche B* sebesar Rp59.200 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembelian dan pemasangan mesin dolomit III.

Tranche C sebesar Rp9.800 dengan tujuan penggunaan dana untuk Pembelian 2 bidang tanah. *Tranche D* sebesar Rp57.200 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembangunan Gudang dan infrastruktur pendukung Gudang serta pabrik pupuk.

Tranche E sebesar Rp15.800 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan *improvement* pabrik II dan III dan *Tranche F* sebesar Rp20.000 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan *Interest during construction* dengan total pokok sebesar Rp185.000. Jangka waktu Pinjaman fasilitas selama 84 bulan dengan tingkat suku bunga 15% per tahun.

Pada 31 Desember 2019 PT MGI masih dikonsolidasi oleh PT PPAK sehingga saldo awal pada laporan konsolidasian sebesar Nihil. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp12.500 dan saldo awal 2019 yang tidak tercatat pada laporan konsolidasian sebesar Rp48.000. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp15.549. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp44.951.

i. PT Carpediem Mandiri

Penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT Carpediem Mandiri No. 40 pada tanggal 9 Agustus 2019, dengan melakukan perpanjangan Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.

Pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan perubahan perjanjian restrukturisasi hutang dengan PT Carpediem Mandiri.

PT Carpediem Mandiri telah melakukan tambahan pengikatan jaminan kepada Perusahaan melalui gadai atas seluruh saham PT Carpediem Aviassi Mandiri (anak perusahaan PT Carpediem), yaitu:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT Magnesium Gosari Internasional (PT MGI) from the Company in accordance with PP-03/PPA/0119.

This facility loan consists of Tranche A in the amount of Rp23,000 with the aim of using funds to finance the purchase of dolomite train II machines. Tranche B in the amount of Rp59,200 with the aim of using funds to finance the purchase and installation of dolomite III machines.

Tranche C amounting to Rp9,800 with the purpose of using funds for the purchase of 2 plots of land. Tranche D of Rp57,200 with the aim of using funds to finance the construction of warehouses and supporting infrastructure of warehouses and fertilizer factories.

Tranche E amounting to Rp15,800 with the purpose of using funds to finance the improvement of factories II and III and Tranche F of Rp20,000 with the purpose of using funds to finance Interest during construction with a total principal of Rp185,000. The term of the facility loan is 84 months with an interest rate of 15% per annum.

On December 31, 2019, PT MGI was still being consolidated PT PPAK so that the beginning balance in consolidated financial statements was Nil. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method. The total balance of loan disbursements in 2020 is Rp12,500 and the beginning balance of 2019 which is not recorded in the consolidated statement is Rp48,000. Receipts from payments in the current year amounted to Rp15,549. Balance as of December 31, 2020 is Rp44,951.

i. PT Carpediem Mandiri

The signing of the Deed of Amendment to PT Carpediem Mandiri's Debt Restructuring Agreement No. 40 on August 9, 2019, by extending the Agreement until August 31, 2019.

On August 9, 2019, the debt restructuring agreement was changed with PT Carpediem Mandiri.

PT Carpediem Mandiri has made additional collateral bonds to the Company through a pledge of all shares of PT Carpediem Aviassi Mandiri (a subsidiary of PT Carpediem) as below:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- 1) Akta Gadai Saham PT Carpediem Mandiri kepada Perusahaan No. 66 tanggal 18 Februari 2020 setara dengan Rp90.000 (60% saham PT CAM);
- 2) Akta Gadai Saham Bp. Syafruddin Rachman kepada Perusahaan No. 67 tanggal 18 Februari 2020 setara dengan Rp60.000 (40% saham PT CAM).

Perusahaan melalui surat Direktur Utama No. S-4467/PPA/DU/1020 tanggal 20 Oktober 2020 memohon bantuan pendampingan hukum dan dukungan aspek hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp42.658. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp42.658.

j. PT Bintang Abadi Sempurna

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman *Invoice Financing* kepada PT Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) No. 99 tanggal 20 Agustus 2019, dibuat di hadapan Desman S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman dengan total jumlah pokok *plafond* sebesar Rp50.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 13% per tahun, biaya *monitoring* 7% per tahun dan biaya provisi sebesar 0,5% dari jumlah dana yang dicairkan dalam setiap penarikan. Jatuh tempo pada 19 Agustus 2020. Tujuan penggunaannya adalah untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja untuk pengadaan batubara kepada PT PLN Batubara.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa (1) Dana di *joint signature account* atas nama Perusahaan dan PT BAS yang dibuka pada kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditunjuk oleh Perusahaan yang dibuka secara bertahap sesuai jumlah penarikan dana Fasilitas Pinjaman dengan nilai serendah-rendahnya 30% dari outstanding pokok Fasilitas Pinjaman. Dana Deposito tersebut diblokir untuk kepentingan pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada Perusahaan; (2) Fidusia atas piutang Debitur kepada PLNBB berdasarkan Proyek PLNBB dengan nilai serendah-rendahnya 125% dari *plafond* Fasilitas Pinjaman.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- 1) *PT Carpediem Mandiri Shares Pledge Deed to the Company No. 66 dated 18 February 2020, equivalent to Rp90,000 (60% shares of PT CAM);*
- 2) *Bp. Syafruddin Rachman to the Company No. 67 dated February 18, 2020, equivalent to Rp60,000 (40% shares of PT CAM).*

The Company through the letter of the President Director No. S-4467/PPA/DU/1020 dated 20 October 2020 requested legal assistance and legal support from the Junior Attorney General for Civil and State Administration, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.

The balance as at the beginning of the year is Rp42,658. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Nil. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp42,658.

j. PT Bintang Abadi Sempurna

Based on investment cooperation Agreement in the form of loan lending Financing to PT Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) No. 99 dated August 20, 2019, made in front of Desman S.H., M. Hum., M.M., notary in North Jakarta administrative city, The company provides loan facilities with a total number of basic ceiling of Rp50,000 with interest rate of 13% p.a., monitoring fee of 7% p.a. and provision fee of 0.5% of the amount of funds disbursed in each Withdrawal. It is due on August 19, 2020. The purpose of its use is to finance the working capital needs for coal procurement to PT PLN Batubara

As collateral for the repayment of all debts, a guarantee is submitted in the form of (1) Funds in a joint signature account in the name of the Company and PT BAS which are opened at a branch office of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Which is appointed by the Company, which are opened in stages according to the amount of withdrawal of funds from the Loan Facility with a value of as low as 30% of the outstanding principal of the Loan Facility. The Deposit Fund is blocked for the purpose of paying all of the Debtor's liabilities to the Company; (2) Fiduciary on Debtor's receivables to PLNBB based on the PLNBB Project with a value of at least 125% of the loan facility ceiling.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp35.730. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp35.730.

k. PT Inti Adhiyasa

Nilai jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa Tanah seluas ±4,7 Hektar dengan bukti kepemilikan SHGB atas nama PT Inti Adhiyasa (PT IA) yang diatasnya telah berdiri perumahan lama dan sebagian besar telah terjual, Tanah seluas ±5,2 Hektar berikut dengan bangunan yang berdiri diatasnya atas nama PT IA, Tanah seluas 2.8 Hektar berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan SPH yang telah dilakukan proses pengukuran dan telah memperoleh peta bidang. Tanah seluas 6,1 Hektar dengan bukti kepemilikan SPH dan belum dilakukan proses pengukuran. Total Nilai Jaminan sebesar Rp38.800.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp33.746. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp467. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp33.279.

l. PT Niaga Bumi Energi

Pada tanggal 1 Februari 2019 dilakukan addendum II perjanjian No. 06 perihal penambahan plafond fasilitas pinjaman *Tranche A* sebesar Rp1.000 pada tanggal 24 Juli 2019 No. 101 perihal penambahan plafond fasilitas pinjaman *Tranche A* sebesar Rp2.500 dan plafond fasilitas pinjaman *Tranche B* sebesar Rp5.000.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp33.883 karena dalam jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp32.783. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp35.083. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp31.583.

m. PT Duta Cipta Pakar Perkasa

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan putusan (sela) mengabulkan permohonan karyawan PT Duta Cipta Pakar Perkasa (PT DCP) masuk dalam PKPU sementara. Pengadilan Negeri Surabaya melakukan sidang pembacaan putusan pada tanggal 28 Februari 2020, dengan putusan PT Duta Cipta Pakar Perkasa dinyatakan pailit dengan segala konsekuensinya dan mengangkat Tim Pengurus Harta Kepailitan (Kurator).

The balance as at the beginning of the year is Rp35,730. Total disbursement of loan in 2020 is Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Nil. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp35,730.

k. PT Inti Adhiyasa

Collateral value for the loan obligation covered in the form of ± 4.7 hectares of land with proof of ownership of SHGB in the name of PT Inti Adhiyasa (PT IA), on which old housing has been established and most of it has been sold, land of ± 5.2 hectares, along with the building that stands on top of the name of PT IA, land with an area of 2.8 hectares along with the building that stands on it with proof of ownership of SPH that has been carried out the measurement process and has obtained a map of the area. Land of 6.1 hectares with proof of ownership of SPH and has not been measured. The total guarantee value is Rp38,800.

The balance as at the beginning of the year is Rp33,746. Total disbursement of loan in 2020 is Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Rp467. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp33,279.

l. PT Niaga Bumi Energi

On February 1, 2019, addendum II of agreement No. 06 regarding the additional ceiling of the Tranche A loan facility of Rp1,000 on 24 July 2019 No. 101 regarding the additional ceiling of the Tranche A loan facility of Rp2,500 and a Tranche B loan facility ceiling of Rp5,000.

The balance as at the beginning of the year is Rp33,883 then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments loan. The total loan disbursement balance in 2020 was Rp32,783. Receipts from payments in the current year amounted to Rp35,083. The balance as of December 31, 2020 is Rp31,583.

m. PT Duta Cipta Pakar Perkasa

On October 15, 2019, the District Court of Surabaya released a temporary decision granting the demands of PT Duta Cipta Pakar Perkasa (PT DCP) entered in a state of suspension payment. The Surabaya District Court conducted a hearing to read the decision on February 28, 2020, with the decision of PT Duta Cipta Pakar Perkasa being declared bankrupt with all the consequences and appointing the Bankruptcy Asset Management Team (Curator).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tahun 2020, Perusahaan berupaya mendapatkan hasil eksekusi boedel pailit yang dilakukan oleh kurator. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dapat terlaksana sehubungan dengan Tim Kurator dalam proses penyusunan boedel pailit.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh PT DCP berupa HT Peringkat 2-8 dari 52 Sertifikat Tanah yang merupakan jaminan bersama dengan Bank Mandiri (*Security Sharing Agreement*), jaminan Fidusia tagihan dan persediaan, dan HT Peringkat satu Tanah & Bangunan. Nilai yang tercover dari jaminan tersebut sebesar Rp226.554.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp26.706. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp26.706.

n. PT Varuna Tirta Prakasya

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (PT VTP) No. 14 Tanggal 2 Desember 2019 dengan memberikan fasilitas pinjaman Modal Kerja dengan jumlah plafond Rp45.000. Sifat fasilitas pinjaman bersifat *revolving*. Tujuan penggunaan dana fasilitas pinjaman hanya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sehubungan dengan pekerjaan proyek yang diterima dari pemberi kerja. Untuk tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 17% (tujuh belas persen) per tahun, provisi sebesar 0,5% persen dari setiap jumlah dana fasilitas pinjaman yang dicairkan, dan denda sebesar 6%. Jaminan yang diberikan PT VTP yaitu hak tanggungan atas 2 bidang tanah dan bangunan dan aset atau kekayaan lainnya yang telah dan akan dimiliki PT Varuna Tirta Prakasya.

Pada tanggal 10 Juli 2020, dilakukan addendum II No. 018/PPA/0720 dengan PT VTP untuk penurunan suku bunga pinjaman dari 17% menjadi 15% gross per tahun.

Pada tanggal 15 Desember 2020 dilakukan Adeddum III No. 47 PT VTP bertujuan perpanjangan jangka waktu selama 1 (satu) tahun sampai dengan 1 Desember 2021.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp24.473. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp22.941. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp21.780. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp25.634.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

In 2020, the Company seeks to obtain the results of the execution of the bankruptcy boedel by the curator. However, as of December 31, 2020 it has not been implemented due to the Curatorial Team in the process of drafting the bankruptcy board.

The Collateral Value of the loan obligations covered by PT DCP in the form of HT Rank 2-8 of 52 Land Certificates which are joint guarantees with Bank Mandiri (Security Sharing Agreement), Fiduciary guarantees for bills and supplies, and HT Rank one Land & Buildings. The value covered by the guarantee amounted to Rp226,554.

The balance as at the beginning of the year is Rp26,706. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Nil. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp26,706.

n. PT Varuna Tirta Prakasya

Based on the Deed of Loan Agreement of Working capital to PT Varuna Tirta Prakasya (PT VTP) No. 14 dated 2 December 2019 by providing working Capital loan facility with the number of the plafond of Rp45,000. The nature of the loan facility is revolving. The purpose of using the loan facility funds only to meet the needs of working capital in relation to project work received from employers. For interest rates charged at 17% (seventeen percent) per annum, provision of 0.5% percent of each loan facility funds are disbursed, and a fine of 6%. The guarantee provided by PT VTP is the right to the responsibility of 2 areas of land and buildings and assets or other wealth that has been and will be owned by PT Varuna Tirta Prakasya.

On July 10, 2020, addendum II No. 018/PPA/0720 with PT VTP to reduce loan interest rates from 17% to 15% gross per annum.

On December 15, 2020, Adeddum III No. 47 PT VTP aims to extend the period for 1 (one) year until December 1, 2021.

The balance as at the beginning of the year Rp24,473. Total disbursement of loan in 2020 amounting Rp22,941. Receipt of loan payment in 2020 is Rp21,780. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp25,634.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

o. PT Gali Terus Sejahtera

Pada tanggal 27 Juni 2019 dilakukan Addendum I Perjanjian investasi No. 15 dengan PT Gali Terus Sejahtera (PT GTS).

Pada tanggal 26 Agustus 2019, dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman melalui Addendum II Perjanjian Investasi No.121 yang berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan antara Perusahaan dan PT GTS dengan disaksikan oleh Kantor Pengacara Negara – Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang utamanya berisi kesanggupan PT GTS untuk menyelesaikan/melunasi seluruh kewajiban terutang kepada Perusahaan dan penambahan jaminan pribadi dari Tuan Andry Yunus dengan tanggal jatuh tempo yaitu 1 Desember 2020.

Sampai dengan tanggal jatuh tempo PT GTS belum dapat melunasi kewajibannya kepada Perusahaan sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 telah diadakan rapat antara Perusahaan dan PT GTS yang disaksikan oleh Kantor Pengacara Negara – Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Akan dilakukan rapat lanjutan pada bulan Maret 2021.

Nilai jaminan atas kewajiban PT GTS dilindungi oleh jaminan berupa fidusia mesin dan alat, Jaminan Perusahaan dari PT Kelsri, Jaminan Pribadi, HT No. 0785/2018 dan HT No.3619/2019. Total cover jaminan sebesar Rp35.193.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp31.175. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp5.774. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp25.401.

p. PT Pratama Persada Airborne

Pada tanggal 15 April 2019 dilakukan addendum III No. 68 dengan PT Pratama Persada Airbone bertujuan untuk perpanjangan waktu pinjaman. Pada tanggal 14 Juni 2019 dilakukan addendum Addendum IV No. 12 bertujuan untuk penambahan plafon pinjaman *Standby Loan* sebesar Rp12.500. Pada tanggal 29 Januari 2020 dilakukan addendum V antara Perusahaan dengan PT Pratama Persada Airbone No. 73 untuk perpanjangan waktu fasilitas pinjaman.

Pada tanggal 18 Januari 2021 dilakukan addendum VI No. 50 yang bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman selama sepuluh 10 (sepuluh) bulan yang jatuh tempo tanggal 21 Agustus 2021.

o. PT Gali Terus Sejahtera

On June 27, 2019, Addendum I of Investment Agreement No. 15 with PT Gali Terus Sejahtera (PT GTS).

Then on August 26, 2019, the loan term was extended through Addendum II to the Investment Agreement No. 121 which is based on the Minutes of Agreement between the Company and PT GTS witnessed by the State Attorney's Office - the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia which mainly contains the ability of PT GTS to settle / settle all obligations owed to the Company and additional personal guarantees from Mr. Andry Yunus with a due date of December 1, 2020.

Until the due date, PT GTS had not been able to pay off its obligations to the Company so that on December 18, 2020 a meeting was held between the Company and PT GTS which was witnessed by the State Law Office - Attorney General of the Republic of Indonesia. There will be a follow-up meeting in March 2021.

The value of PT GTS's liability guarantee is covered by a guarantee in the form of machinery and equipment fiduciary, Kelsri company guarantee, personal guarantee, HT No. 0785/2018 and HT No. 3619/2019. The total guarantee cover is Rp35,193.

The balance as at the beginning of 2020 is Rp31,175. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Rp5,774. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp25,401.

p. PT Pratama Persada Airborne

On April 15, 2019, addendum III No. 68 with PT Pratama Persada Airbone for the purpose of extending the loan period. On June 14, 2019, addendum Addendum IV No. 12 aims to increase the Standby Loan loan ceiling of Rp12,500. On January 29, 2020 an addendum V was carried out between the Company and PT Pratama Persada Airbone No. 73 for the extension of the loan facility.

On January 18, 2021, addendum VI No. 50 which aims to extend the term of the loan facility for 10 (ten) months due on August 21, 2021.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp23,050. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp23.050.

q. PT Bina Patria Transmitta

Pada tanggal 16 Oktober 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pinjaman Kepada PT Bina Patria Transmitta dengan No. PP-07/PPA/1018. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja dengan plafond sebesar Rp24.500 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun dan biaya provisi sebesar 1% dari *plafond*, jatuh tempo pada 15 Oktober 2020, terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan Investasi dengan *plafond* sebesar Rp12.000, tujuan penggunaannya yaitu untuk *refinancing* pinjaman investasi dan pembiayaan kebutuhan capital; dan Fasilitas Pinjaman *Tranche B* diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp12.500, digunakan untuk pembiayaan modal.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa dua bidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp12.760, jaminan fidusia atas mesin dan alat berat sesuai nilai pasar berdasarkan hasil penilaian dari KJPP, dan jaminan fidusia tagihan/piutang dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp17.500.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses pengurusan.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp16.748 Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp572. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp16.176.

r. PT Indah Prakasa Sentosa

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Proyek Distribusi Bahan Bakar Minyak pada tanggal 11 Januari 2019 untuk plafond pinjaman senilai Rp20.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Adapun rincian atas fasilitas tersebut dibagi menjadi kedalam 2 *Tranche* dengan tujuan *Tranche A* -

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as at the beginning of 2020 is Rp23,050. The total loan disbursement balance in 2020 is Nil. Receipts from payments in the current year amounted to Nil. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp23,050.

q. PT Bina Patria Transmitta

On October 16, 2018 an Investment Cooperation Agreement was Formed in the Form of Providing Loan Facilities to PT Bina Patria Transmitta with No. PP-07/PPA/1018. The Company provides loan facilities in the form of investment loans and working capital loans with the plafond of Rp24,500 with an interest rate of 13% per annum and a provision fee of 1% of the ceiling, due on October 15 2020, which is consisting of *Tranche A* Loan Facility in the form of Investment Financing with a ceiling of Rp12,000, the purpose of which is to refinancing investment loans and financing capital requirements; and the *Tranche B* Loan Facility is provided in the form of working capital financing with a ceiling of Rp12,500, which is used for financial working capital.

As a guarantee of repayment of all debts, the collateral in the form of two units of land and buildings and all of the pledges that will be burdened with the First Rank Mortgage amounting to Rp12,760, fiduciary guarantees for machinery and heavy equipment according to market value based on the results of the assessment of KJPP, and collateral fiduciary bills or receivables with a guarantee value of at least Rp17,500.

Until the issued date of this consolidated financial statement, agreement extension is still on process.

The balance as at the beginning of the year is Rp16,748. Total disbursement of loan in 2020 amounting is Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Rp572. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp16,176.

r. PT Indah Prakasa Sentosa

The Company has signed investment Cooperation Agreement of financing Facility for oil fuel distribution project on January 11, 2019 for the loan of Rp20,000 with a period of 12 months. The details of the facility are divided into 2 *Tranche* with the purpose of *Tranche A* financing for refinancing working capital financing of Inprase Group at Bank Central Asia

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pembiayaan untuk *refinancing* Pembiayaan modal kerja Inprase Grup di Bank Central Asia (BCA) dan *Tranche B* - Pembiayaan modal kerja Pembelian Bahan Bakar Minyak dalam rangka pemenuhan pesanan dari konsumen.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa SHGB No 1537 (luas 3280 m²) dan SHGB No 1538 (luas 2960 m²) di Jl Raya Serang-Cilegon Km 17,3, Kab. Serang atas nama PT Indah Prakasa Sentosa, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa Kantor Cabang dan garasi armada truk milik PT Indah Prakasa Sentosa.

Hak Tanggungan atas kedua SHGB tersebut telah diikat dengan nilai pengikatan sebesar Rp18.000 atas nilai pasar berdasarkan penilaian KJPP. Berdasarkan Laporan Penilai Independen KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, per 27 Maret 2018, Gadai Saham PT Indah Prakasa Sentosa, yang dimiliki oleh PT Surya Prakasa Sentosa dan atau Eddy P. Winata, yang diikat minimum senilai Rp2.312, dimana sebesar Rp12.000 merupakan pengikatan eksisting, dan Rp11.500 Gadai Saham akan ditambahkan untuk penambahan Fasilitas. dan *Personal Guarantee* atas nama Eddy Purwanto Winata.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp16.184. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp225. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp1.518. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp14.891.

s. PT CDM Swarnadipa

Pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dengan Perusahaan berupa pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas sebesar Rp14.600. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pembiayaan *Tranche A* sebesar Rp7.300 dan fasilitas pembiayaan *Tranche B* sebesar Rp7.300. Tujuan penggunaan pinjaman *Tranche A* adalah untuk pembiayaan investasi dan untuk pembelian mesin sedangkan *Tranche B* untuk pembiayaan modal kerja seperti pembelian batu dari tambang, biaya produksi operasional dan lainnya.

Pemberian pinjaman dengan tingkat suku bunga 14,5% pertahun dengan pembayaran bunga setiap bulan. Perusahaan juga berhak atas hak bonus, yaitu dana yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan yang berasal dari margin penjualan batu split dengan pembayaran dan formula sesuai kesepakatan.

(BCA) and *Tranche B* - working capital financing of oil fuel purchases to fulfill the consumer's order.

Collateral value for loan obligations covered in the form of SHGB No. 1537 (area of 3280 sqm) and SHGB No. 1538 (area of 2960 sqm) on Jl Raya Serang-Cilegon Km 17.3, Kab. Serang on behalf of PT Indah Prakasa Sentosa, in the form of land and buildings that stand above it in the form of Branch Offices and garage trucks owned by PT Indah Prakasa Sentosa.

Mortgage rights for the two SHGB have been tied with a binding value of Rp18,000 on the market value based on KJPP's assessment. Based on the KJPP Independent Appraiser's Report Budi, Edy, Saptono & Rekan, as of March 27 2018, Pawn of PT Indah Prakasa Sentosa shares, owned by PT Surya Prakasa Sentosa and / or Eddy P. Winata, tied to a minimum value of Rp2,312, of which Rp12,000 represents existing commitments, and Rp11,500 Shares Pledge will be added for additional Facilities. and Personal Guarantee on behalf of Eddy Purwanto Winata.

The balance as at the beginning of the year is Rp16,184. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp225. Receipt of loan payment in 2020 is Rp1,518. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp14,891.

s. PT CDM Swarnadipa

On February 20, 2019 a Working Capital Loan Loan Agreement with the Company was conducted in the form of investment financing and working capital financing with a facility of Rp14,600. The facility consists of a tranche A financing facility of Rp7,300 and a tranche B financing facility of Rp7,300. The purpose of using a tranche A loan is financing for investment and to purchase machinery while tranche B is for financing working capital such as the purchase of stones from the mine, operational and other production costs.

Loans is given with an interest rate of 14.5% per annum with monthly interest payments every month. The Company is also entitled to bonus rights, ie. funds that must be paid to the Company originating from the margin of rock split sales with payments and formulas as agreed.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp14.351
Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp14.351.

t. PT Duta Mentari Raya

Pada tanggal 15 Maret 2019, dilakukan penandatanganan perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja No. PP-08/PPA/0319 dengan PT Duta Mentari Raya (PT DMR) untuk tujuan Pendanaan PT DMR. Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp20.400 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2020 dengan tingkat suku bunga 12,95% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT DMR No.PP-07/PPA/0320 pada tanggal 16 Maret 2020 Perusahaan melakukan Restrukturisasi Hutang kepada PT DMR. Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yaitu Hutang Pokok Restrukturisasi sebesar Rp9.000. Fasilitas Pinjaman *Tranche B* yaitu Hutang Bunga dan Denda Restrukturisasi sebesar Rp570. Fasilitas Pinjaman *Tranche C* Perusahaan memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan nilai maksimum sebesar Rp1.965. Tanggal jatuh tempo pelunasan Fasilitas Pinjaman yaitu tanggal 12 Maret 2021. Tingkat suku bunga yang diberlakukan atas Fasilitas Pinjaman adalah sebesar Rp14,5% pertahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan tertulis dari Perusahaan kepada PT DMR.

Pada 31 Desember 2019 PT DMR masih konsolidasian oleh PT PPAK sehingga saldo awal pada laporan konsolidasi nihil. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp2.444 dan saldo awal yang tidak tercatat pada laporan konsolidasi 2019 sebesar Rp9.000. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp11.444.

u. PT Wintermar

Pada tanggal 16 Juni 2020 dilakukan addendum II oleh perusahaan dengan PT Wintermar Perjanjian No. PP-015/PPA/0620 bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas Pinjaman sampai dengan 27 Juni 2021.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh PT Wintermar berupa Hipotek Kapal dengan nilai Rp34.450, Fidusia atas piutang

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as at the beginning of the year is Rp14,351. Total disbursement of loan in 2020 is Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Nil. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp14,351.

t. PT Duta Mentari Raya

On March 15, 2019, the signing of the Working Capital Loan Facility Agreement No. PP-08/PPA/0319 with PT Duta Mentari Raya (PT DMR) for the purpose of PT DMR Funding. The total principal amount of the loan facility is Rp20,400, which will mature on March 15, 2020 with an interest rate of 12.95% per annum.

Based on the Debt Restructuring Agreement of PT DMR No.PP-07/PPA/0320 on March 16, 2020, the Company conducted Debt Restructuring to PT DMR. Tranche A Loan Facility is a Principal Debt Restructuring of Rp9,000. Tranche B Loan Facility is Interest Payable and Restructuring Fine of Rp570. Tranche C Loan Facility the Company provides additional working capital loan facility with a ceiling of Rp1,965. Loan Facility repayment due date is March 12, 2021. The interest rate applied to the Loan Facility is Rp14.5% per annum and is subject to change at any time according to written notice from the Company to PT DMR.

As of December 31, 2019 PT Duta Mentari Raya is still being consolidated by PT PPAK so that the initial balance in the consolidated report amounting to nil. In 2020, PT PPAK made changes to the bookkeeping method. The total loan disbursement balance in 2020 is Rp2,444 and the initial balance not recorded in the 2019 consolidated report is Rp9,000. Receipts from payments in the current year amounted to nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp11,444.

u. PT Wintermar

On June 16, 2020 an addendum II was carried out by the company with PT Wintermar Agreement No. PP-015/PPA/0620 aims to extend the period of the Loan facility until 27 June 2021.

Collateral value for loan obligations covered by PT Wintermar in the form of Ship Mortgage with a value of Rp34,450, Fiduciary for receivables of

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

sebesar Rp34.450, dan Pemberian *Corporate Guarantee* dari perusahaan induk. Jaminan-jaminan tersebut memenuhi *collateral coverage* 260% dari nilai maksimum pinjaman PT Wintermar.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp13.779
Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp5.192. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp8.620. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.351.

v. PT Riscon Duta Sarana

Menindaklanjuti batas akhir penyelesaian SUK pada tanggal 31 Oktober 2019, PT Riscon Victory (PT RV) selaku *corporate guarantor* PT Riscon Duta Sarana (PT RDS) telah memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengambil alih penyelesaian kewajiban PT RDS kepada Perusahaan.

Dalam perkembangannya RV telah diputus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga PT RDS mengajukan perubahan permohonan melalui restrukturisasi penyelesaian Surat Utang Konversi ("SUK").

Menanggapi permohonan tersebut, pada tanggal 18 Mei 2020, telah dilakukan rapat Komite Investasi dengan menyetujui restrukturisasi SUK menjadi fasilitas pinjaman PT RDS dengan jangka waktu 24 bulan dan PT RDS telah menandatangani dan menyetujui surat penawaran restrukturisasi yang disampaikan oleh Perusahaan, surat PPA No. S-2635/PPA/DI/0620 pada tanggal 18 Juni 2020.

Pada tanggal 29 September 2020, PT RDS telah menyetorkan kepada Perusahaan pembayaran biaya provisi sebesar 0,5% p.a. dari outstanding pokok kewajiban untuk proses syarat penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Hutang (PRH) PT RDS. Berdasarkan hasil pengecekan sertifikat dan pengukuran/plotting aset jaminan Kalisuren Bogor di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) rekanan PPA yang telah ditunjuk PT RDS, terdapat overlapping 3 (tiga) bidang tanah di aset jaminan Kalisuren, sehingga BPN menawarkan solusi untuk diadakan mediasi antara PT RDS dengan pihak-pihak terkait pada overlapping tanah tersebut. Pada tanggal 30 Desember 2020, BPN telah mengeluarkan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rp34,450, and providing corporate guarantees from the parent company. These guarantees meet 260% collateral coverage of PT Wintermar's loan plafond.

The balance as at the beginning of the year is Rp13,779. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp5,192. Receipt of loan payment in 2020 is Rp8,620. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp10,351.

v. PT Riscon Duta Sarana

Following up the deadline for settlement of the SUK on 31 October 2019, PT Riscon Victory (PT RV) as the corporate guarantor of PT Riscon Duta Sarana (PT RDS) has issued a statement of commitment to take over the settlement of PT RDS obligations to the Company.

The RV has decided the Request for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) by the Central Jakarta Commercial Court, so that PT RDS submits an amendment to the application through restructuring the settlement of Convertible Debt Securities ("SUK").

Responding to the request, on 18 May 2020, an Investment Committee meeting was held by approving the restructuring of the SUK into an PT RDS loan facility with a term of 24 months and PT RDS has signed and approved the restructuring offer letter submitted by the Company, letter No. S-2635/PPA/DI/0620 on 18 June 2020.

On September 29, 2020, PT RDS has paid the provision fee amounted to 0.5% p.a. to the Company. of the outstanding principal of obligations for the signing of the PT RDS Debt Restructuring Agreement (PRH) requirements. Based on the results of checking the certificate and measuring / plotting the Kalisuren collateral asset in Bogor at the Bogor National Land Agency (BPN) by the PPA Partner Land Deed Making Officer (PPAT) appointed by PT RDS, there is an overlapping of 3 (three) land parcels in the Kalisuren collateral asset, so that BPN offers a solution to be held mediation between PT RDS and related parties on the overlapping of the land. On December 30, 2020, BPN has issued an official schedule for the mediation process which will be conducted at BPN Bogor

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

jadwal resmi untuk proses mediasi tersebut yang akan dilakukan di BPN Bogor pada tanggal 3 Februari 2021. Akan ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang masing – masing pihak.

Saat ini Perusahaan masih menunggu hasil mediasi jaminan aset tanah Kalisuren di BPN Bogor sebelumnya dilakukannya penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Hutang (PRH) PT RDS dan pengikatan Hak Tanggungan (HT) jaminan PT RDS.

Nilai Jaminan PT RDS berupa Tanah, 8 Kavling ruko, 2 Unit ruko, dan 5 Unit Rumah. Total Nilai Jaminan sebesar Rp9.900.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp9.000. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.000.

w. PT Prabu Wahana International

Pada tanggal 31 Januari 2019 dilakukan perjanjian pemberian pinjaman modal kerja proyek subsidi Angkatan udara perintis di wilayah Nabire No.PP-06/PPA/0119 dan perjanjian pemberian pinjaman modal kerja proyek subsidi Angkatan udara perintis di wilayah Sitoli.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa gadai 100% saham PT Prabu Wahana International sebesar Rp2.000.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp8.419. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp76. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8.343.

x. PT Bangun Sarana Baja

Pada tanggal 26 Maret 2020 dilakukan addendum III No.PP-09/PPA/0320 antara Perusahaan dengan PT Bangun Sarana Baja bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Maret 2021.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp9.997. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp3.473. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp5.624. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp7.846.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

on February 3, 2021. This will be followed up by re-measuring each party.

Currently, the Company is still waiting for the mediation result of Kalisuren's land asset guarantee at BPN Bogor before signing the PT RDS Debt Restructuring Agreement (PRH) and binding Mortgage (HT) guarantee of PT RDS.

The value of PT RDS's collateral in the form of land, 8 shop houses, 2 shop units, and 8 housing units worth Rp9,900.

The balance as at the beginning of the year is Rp9,000. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Nil. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp9,000.

w. PT Prabu Wahana International

On January 31, 2019, an agreement was made to provide a working capital loan for a pioneering Air Force subsidy project in the Nabire area No.PP-06/PPA/0119 and an agreement to provide a working capital loan for a pioneering Air Force subsidized project in the Sitoli region.

Collateral value for the loan obligation covered in the form of a 100% pledge of PT Prabu's shares in the amount of Rp2,000.

The balance as at the beginning of the year is Rp8,419. Total disbursement of loan in 2020 amounting is Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Rp76. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp8,343.

x. PT Bangun Sarana Baja

On March 26, 2020, addendum III No.PP-09 / PPA / 0320 was carried out between the Company with PT Bangun Sarana Baja which aims to extend the loan period until March 31, 2021.

The balance as at the beginning of the year is Rp9,997. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp3,473. Receipt of loan payment in 2020 is Rp5,624. Balance as at December 31, 2020 amounting to Rp7,846.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

y. PT Gasuma Federal Indonesia

Pada 6 Desember 2019, Perusahaan telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Kepada PT Gasuma Federal Indonesia (PT GFI) No. 32 dengan nilai maksimum Rp320.000. Sifat fasilitas pinjaman bersifat *non revolving*. Tujuan penggunaan dana fasilitas pinjaman adalah untuk pelunasan pinjaman PT GFI kepada United Orient Capital Pte, Ltd dan *Refinancing* pembelian mesin dan/atau peralatan baru milik PT GFI diluar mesin dan/atau peralatan yang di jaminkan kepada United Orient Capital Pte, Ltd. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 1 tahun dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2020.

Atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut, PT GFI diwajibkan membayar biaya *Management Fee* sebesar 4% dari jumlah *plafond*, yang dibayarkan sekaligus sebelum penarikan pinjaman dilakukan; bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun; dan denda sebesar 2% per tahun diatas tingkat suku bunga yang berlaku, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. Jaminan yang diberikan PT GFI yaitu fidusia atas seluruh bangunan pabrik dan peralatan pengolahan *flare gas (plant)* milik PT GFI di Sukowati-Tuban dan jaminan yang lainnya yang diminta oleh Perusahaan berupa saham PT Super Capital Indonesia (SCI) di PT Super Energi Tbk (SURE) sebanyak 225.000.000 saham. Pinjaman PT GFI sudah dilunasi pada tanggal 30 November 2020.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp311,895. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp311.895. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Nihil.

z. PT Polytama Propindo

Berdasarkan *Addendum IV* Perjanjian Pinjaman No. PP-35/PPA/129, jangka waktu pinjaman dan perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. PP-02/PPA/0119 tanggal 16 Januari 2019, Perusahaan memberikan tambahan *plafond* pinjaman modal kerja III kepada PT Polytama Propindo dengan *plafond* pinjaman sebesar Rp100.000 dan jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian. Atas fasilitas pinjaman ini PT Polytama Propindo

y. PT Gasuma Federal Indonesia

On December 6, 2019, the Company signed the Deed of Agreement on the Provision of Working Capital Loan Facility to PT Gasuma Federal Indonesia (PT GFI) No. 32 with a ceiling of Rp320,000. The nature of the loan facility is *non revolving*. The purpose of using the loan facility fund is to repay the loan of PT GFI to United Orient Capital Pte, Ltd and Refinancing the purchase of new machinery and / or equipment owned by PT GFI outside the machinery and / or equipment guaranteed to United Orient Capital Pte, Ltd. The term of the loan facility is 1 year and the due date is December 5, 2020.

For this loan facility, PT GFI is required to pay a Management Fee fee of 4% of the Ceiling amount, which is paid at once before the loan is withdrawn; loan interest of 13.5% per annum; and a fine of 2% per annum above the prevailing interest rate, in the event of late payment of obligations. Collateral given by PT GFI is fiduciary for all factory buildings and gas flare processing equipment (plant) owned by PT GFI in Sukowati-Tuban and other guarantees requested by the Company in the form of PT Super Capital Indonesia (SCI) shares in PT Super Energi Tbk (SURE) as many as 225,000,000 shares/ The PT GFI loan was fully repaid on November 30, 2020.

The balance as at the beginning of the year is Rp311,895. Total disbursement of loan in 2020 is Nil. Receipt of loan payment in 2020 is Rp311.895. Balance as at December 31, 2020 amounting to Nil.

z. PT Polytama Propindo

Based on *Addendum IV* Loan Agreement No. PP-35/PPA/129, the term of the loan and extension until 31 December 2020.

Based on Loan Agreement No. PP-02/PPA/0119 dated January 16, 2019, the Company granted an additional maximum working capital loan III facility to PT Polytama Propindo amounting to Rp100,000 and the term of the loan facility is 12 (twelve) months from the date of signing the Agreement. For this loan facility, PT Polytama Propindo is subject to a loan interest of 12.25% per annum, a provision fee of 0.5% of the loan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

dikenakan bunga pinjaman sebesar 12,25% per tahun, biaya provisi sebesar 0,5% dari plafond pinjaman, biaya administrasi penarikan sebesar Rp3 dan biaya bagi hasil sebesar USD8 dari total produksi *polypropylene* yang dibiayai oleh Perusahaan.

ceiling, a withdrawal administration fee of Rp3 and a profit sharing fee of USD8 of total polypropylene production financed by Company.

Jaminan berupa fidusia persediaan barang dan piutang dengan total per 29 Februari 2020 sebesar Rp330.000.

Collateral in the form of fiduciary inventory of goods and receivables with a total as of Februari 29, 2020 of Rp330,000.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp270.000. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp583.000. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp853.000. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah nihil.

The balance as at the beginning of the year is Rp270,000. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp583,000. Receipt of loan payment in 2020 is Rp853,000. Balance as at December 31, 2020 is nil.

aa. PT SIG Asia

Pada tanggal 21 Desember 2018 dilakukan penandatanganan addendum dengan Nomor PP-22/PPA/1218 PT SIG Asia berupa perpanjangan jangka waktu pinjaman dan penjadwalan pembayaran pokok fasilitas pinjaman.

aa. PT SIG Asia

On December 21, 2018, an addendum was signed with PT SIG Asia No. PP-22/PPA/1218 in the form of an extension of the loan term and scheduling of loan facility principal repayments.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp9.564. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp9.564. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Nihil.

The balance as at the beginning of 2020 is Rp9,564. The total balance of loan disbursement in 2020 is Nil. Receipts from payments in the current year amounting to Rp9,564. Balance as at December 31, 2020 amounting to Nil.

5. Piutang Usaha

5. Accounts Receivable

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	283,161	142,348	Financial Lease Receivables - Net
Piutang Jasa Konstruksi	123,096	110,548	Construction Services Receivable
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	79,051	--	Factoring Receivables - Net
Piutang Bunga dan Monitoring	45,532	105,792	Monitoring and Interest Receivables
Piutang Advisory	16,746	27,466	Advisory Receivable
Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur	11,753	5,808	Asset Management Fee Bailouts
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	13,302	15,064	Consumer Finance Receivables - Net
Piutang Hasil Investasi Surat Berharga	--	189	Investment Income on Securities Receivables
Jumlah Pihak Berelasi	572,641	407,215	Total Related Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(57,213)	(20,802)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	515,428	386,413	Total Related Parties - Net
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	871,367	788,707	Financial Lease Receivables - Net
Piutang Jasa Konstruksi	104,222	231,352	Construction Services Receivables
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	85,491	135,614	Factoring Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	5,354	12,247	Consumer Finance Receivables - Net
Bunga Deposito Berjangka	2,554	1,471	Interest on Time Deposits
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	45,003	4,875	Others (belows Rp 1,000 each)
Jumlah Pihak Ketiga	1,113,991	1,174,266	Total Third Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(194,034)	(83,082)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	919,957	1,091,184	Total Third Parties - Net
Jumlah - Bersih	1,435,385	1,477,597	Total - Net

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable to the customers are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Sipka Kemasan Internasional	85,854	78,438	Related Parties
PT Ciremai Putera Mandiri	38,729	40,774	PT Sipka Kemasan Internasional
PT Manggala Usaha Manunggal	30,589	28,862	PT Ciremai Putera Mandiri
PT Pertamina (Persero)	30,403	--	PT Manggala Usaha Manunggal
PT Survai Udara Penas (Persero)	24,601	24,132	PT Pertamina (Persero)
Perorangan	22,690	39,555	PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	18,903	18,873	Individual
PT Chrystal Garden	18,267	--	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Rejeki Intilogam Jaya	15,629	--	PT Chrystal Garden
PT Bhanda Graha Rekso (Persero)	14,354	--	PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Hakaaston	13,828	--	PT Bhanda Graha Rekso (Persero)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13,302	--	PT Hakaaston
PT KNE Global Persada	12,391	10,044	The Ministry of Public Work and Public Housing
PT Angkasa Pura II (Persero)	11,339	29,036	PT KNE Global Persada
PT Asia Kaolin Raya	10,663	--	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Sarana Sirkuitindo Utama	10,223	--	PT Asia Kaolin Raya
PT Angkasa Pura I (Persero)	8,926	25,326	PT Sarana Sirkuitindo Utama
PT Duta Mentari Raya	8,442	--	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT CK Pakan Indonesia	5,880	14,889	PT Duta Mentari Raya
PT Ade Textile Industries	3,883	10,314	PT CK Pakan Indonesia
Kementerian Pemuda dan Olahraga	--	100,114	PT Ade Textile Industries
PT Polowijo Gosari	--	53,227	Ministry of Youth and Sports
PT Barakomindo Shipping	--	28,455	PT Polowijo Gosari
PT Karyaputra Suryagemilang	--	20,256	PT Barakomindo Shipping
PT Fajar Mitra Krida Abadi	--	14,489	PT Karyaputra Suryagemilang
Politeknik Kesehatan Pangkal Pinang	--	11,653	PT Fajar Mitra Krida Abadi
PT Hutama Karya Infrastruktur	--	11,525	Pangkal Pinang Health Polytechnic
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	1,287,736	1,021,518	PT Hutama Karya Infrastruktur
Jumlah Piutang Usaha	1,686,632	1,581,481	Others (each below Rp10 Billion)
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(251,247)	(103,884)	Total Related Parties
Jumlah	1,435,385	1,477,597	Less: Allowance for Impairment of Receivables
			Total Related Parties - Net

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

Total accounts receivable by aging (day) are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
< 12 Bulan	1,091,340	549,237	< 12 Months
> 12 - 24 Bulan	277,433	279,662	> 12 - 24 Months
> 24 Bulan	317,859	752,581	> 24 Months
Jumlah	1,686,632	1,581,481	Total
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(251,247)	(103,884)	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Jumlah Bersih	1,435,385	1,477,597	Total - Net

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements in amount of the allowance for impairment losses of accounts receivable is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	(103,884)	(106,506)	Balance of Beginning of the Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(153,950)	(22,656)	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(27,262)	--	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	33,849	25,278	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(251,247)	(103,884)	Balance at Ending of The Period

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses of receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible receivables in the future.

6. Piutang Retensi

6. Retention Receivables

Rincian saldo piutang retensi pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of retention receivables to the related parties and third parties are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Angkasa Pura II (Persero)	28,704	26,854	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	7,048	6,334	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	4,356	4,356	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)
Perum Perumnas (Persero)	3,485	3,485	Perum Perumnas (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,563	2,563	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Magnesium Gosari Internasional	2,562	2,562	PT Magnesium Gosari Internasional
PT Hutama Karya (Persero)	1,846	1,846	PT Hutama Karya (Persero)
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	1,387	1,387	Joint Venture Nindya - Dewa Ruci
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	8,749	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Ventura Bersama Nindya - Surya	--	7,758	Joint Venture Nindya - Surya
PT Angkasa Pura I (Persero)	--	4,769	PT Angkasa Pura I (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	1,769	883	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah	53,720	71,546	Total
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(11,534)	(2,563)	Less: Allowance for Impairment of Losses
Jumlah Pihak Berelasi	42,186	68,983	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	106,114	53,644	The Ministry of Public Work and Public Housing
PT Sinergi Solusi Utama	10,377	10,377	PT Sinergi Solusi Utama
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	4,943	4,943	Pesisir Barat District Government
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	4,110	--	Public Works and Spatial Planning Office West Sumatera
Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4,077	4,077	Kotabaru District Government
Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,883	3,883	The Ministry of Youth and Sports
PT Karya Unggulan	3,528	3,528	PT Karya Unggulan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	2,603	1,302	Dharmasraya District Government
PT Mandiri Karya Cipta Indah	2,126	2,126	PT Mandiri Karya Cipta Indah
PT Royal Residen	1,540	1,540	PT Royal Residen
PT Maju Santosa Cemerlang	1,228	1,228	PT Maju Santosa Cemerlang
Pemerintah Kabupaten Sikka	--	31,407	Sikka District Government
PT Maleo	--	1,849	PT Maleo
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	2,658	3,201	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah	147,187	123,105	Total
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(38,361)	(21,967)	Less: Allowance for Impairment of Losses
Jumlah Pihak Ketiga	108,826	101,138	Total Third Parties
Jumlah Piutang Retensi - Bersih	151,012	170,121	Total Retention Receivables - Net

Jumlah piutang retensi berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

Total retention receivable by aging (day) are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
< 12 Bulan	123,709	163,265	< 12 Months
> 12 - 24 Bulan	36,348	13,939	> 12 - 24 Months
> 24 Bulan	40,850	17,447	> 24 Months
Jumlah	200,907	194,651	Total
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(49,895)	(24,530)	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Jumlah - Bersih	151,012	170,121	Total - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements in amount of the allowance for allowance for impairment losses of retention receivables is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	(24,530)	(27,532)	Beginning Balance of The Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(27,773)	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(713)	--	Addition in the Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	3,121	3,002	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(49,895)	(24,530)	Ending Balance of The Year

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan Kerugian penurunan nilai piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses of retention receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible retention receivables in the future.

7. Piutang Ventura Bersama Konstruksi

7. Joint Venture Construction Receivables

	2020 Rp	2019 Rp	
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan	70,741	31,763	Joint Venture Nindya - Pembangunan Perumahan
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	48,643	40,873	Joint Venture Nindya - Adhi Karya
Ventura Bersama Nindya - Sacna	40,045	34,649	Joint Venture Nindya - Sacna
Ventura Bersama Nindya - Sarana	28,334	14,415	Joint Venture Nindya - Sarana
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangunnusa	21,124	--	Joint Venture Nindya - Bahagia Bangunnusa
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	27,738	39,205	Joint Venture Nindya - Bumi Karsa
Ventura Bersama Nindya - Waskita - Jaya Purnama	19,645	19,884	Joint Venture Nindya - Waskita - Jaya Purnama
Ventura Bersama Nindya - PT Bunga Raya Lestari	17,027	--	Joint Venture Nindya - PT Bunga Raya Lestari
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	15,772	89	Joint Venture Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	15,600	5,706	Joint Venture Nindya - Citra - Kharisma
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja	13,034	8,684	Joint Venture Nindya - Gerbang Saranabaja
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	13,023	13,177	Joint Venture Nindya - Dewa Ruci
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	8,840	684	Joint Venture Nindya - Resis Mangku Buana
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	8,768	18,795	Joint Venture Nindya - MCC - Wika - Waskita
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan - HK	7,709	7,709	Joint Venture Nindya - Pembangunan Perumahan - HK
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	6,892	6,892	Joint Venture Nindya - Cipuga
Ventura Bersama Nindya - Brantas	4,531	4,531	Joint Venture Nindya - Brantas
Ventura Bersama Nindya - Inti	1,650	2,783	Joint Venture Nindya - Inti
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Abipraya	1,572	--	Joint Venture Adhi - Nindya - Abipraya
Ventura Bersama Nindya - Surya	162	3,275	Joint Venture Nindya - Surya
Ventura Bersama Nindya - Catur Perkasa	--	4,613	Joint Venture Nindya - Catur Perkasa
Ventura Bersama Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	9,384	38,896	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah	380,234	296,623	Total
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(74,152)	--	Less: Allowance for Impairment of Receivables
Jumlah Piutang Ventura Bersama - Bersih	306,082	296,623	Total Joint Venture Receivables - Net

Merupakan piutang kepada ventura bersama (JV) untuk pembelian material, biaya bank, overhead, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ventura bersama.

Represents receivable from the Joint Venture (JV) to purchase the material, bank fees, overhead, and others for the joint venture purposes.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada ventura bersama (JV) sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of receivable from the Joint Venture (JV) receivable is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	--	--	Beginning Balance of The Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(77,839)	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(6,614)	--	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	10,301	--	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(74,152)	--	Ending Balance of the Year

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Ventura Bersama cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang ventura bersama.

Management considered that allowance for impairment losses of joint venture receivable is sufficient to cover possible losses on uncollectible joint venture receivables.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**8. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan
Kepada Pihak-Pihak Berelasi**

8. Loans Receivables - Bailouts Related Parties

	2020 Rp	2019 Rp
Pokok Pinjaman Dana Talangan		
PT Survai Udara Penas (Persero)	123,057	123,057
PT Perum Perumnas (Persero)	100,000	--
PT Boma Bisma Indra (Persero)	67,829	--
PT Istaka Karya (Persero)	62,443	62,069
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	51,346	52,126
PT Iglas (Persero)	49,962	49,962
PT Kertas Leces (Persero)	38,500	38,500
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	26,000	26,000
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	20,800	20,800
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Talangan	539,937	372,514
Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan		
PT Istaka Karya (Persero)	8,378	905
PT Survai Udara Penas (Persero)	3,131	1,583
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	1,927	1,016
PT Kertas Leces (Persero)	1,535	1,534
PT Perum Perumnas (Persero)	397	--
PT Boma Bisma Indra	150	--
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	99	18
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan	15,617	5,056
Jumlah Pinjaman Dana Talangan	555,554	377,570
Dikurangi:		
Pemulihan (Penyisihan) Penurunan Nilai		
PT Istaka Karya (Persero)	(65,610)	--
PT Boma Bisma Indra (Persero)	(32,428)	--
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(51,346)	(49,617)
PT Kertas Leces (Persero)	(39,180)	(30,534)
PT Iglas (Persero)	(17,999)	--
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	(5,566)	--
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	(2,799)	--
PT Survai Udara Penas (Persero)	(522)	(74,373)
PT Perum Perumnas (Persero)	(17)	--
Jumlah Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(215,467)	(154,524)
Jumlah Pinjaman Dana Talangan - Bersih	340,087	223,046

Principal Bailout Loans
PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Perum Perumnas (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Iglas (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Total Principal Bailout Loans
Interest Receivable on Bailout Loans
PT Istaka Karya (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Perum Perumnas (Persero)
PT Boma Bisma Indra
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Total Receivable on Bailout Loans Interest
Total Bailout Loans
Less:
Recovery (Allowance) of Impairment
PT Istaka Karya (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Iglas (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Perum Perumnas (Persero)
Total Allowance for Impairment of Losses
Total Bailout Loans - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of loans are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal Tahun	(154,524)	(80,151)
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(139,111)	--
Penambahan di Tahun Berjalan	(1,295)	(74,373)
Pemulihan di Tahun Berjalan	79,463	--
Saldo Akhir Periode	(215,467)	(154,524)

Balance at Beginning of The Year
Impact on initial implementation PSAK 71
Additions in the Current Year
Recovery in Current Year
Balance at Ending of The Period

9. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

9. Gross Amount Due from Customers

Rincian saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customer are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Biaya Konstruksi	3,260,843	5,123,960
Laba yang diakui	(2,291,747)	(3,772,330)
Sub Jumlah	969,096	1,351,630
Penagihan	1,413,087	1,066,476
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	2,382,183	2,418,106
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(50,959)	--
Jumlah Tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih	2,331,224	2,418,106

Constructions Costs
Recognized profit
Sub Total
Progress billing
Gross amount due from customer
Allowance for Impairment Losses
Total Gross amount due from customer - net

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rincian saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customer are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi		
PT Angkasa Pura I (Persero)	150,118	69,743
PT Pertamina (Persero)	148,307	42,273
PT Angkasa Pura II (Persero)	104,458	153,841
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	38,418	--
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25,250	--
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	22,791	--
PT Pertamina EP	14,536	--
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	11,469	88,135
PT Bhandra Graha Reksa (Persero)	9,211	5,000
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	3,600	--
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2,528	27,911
PT Krakatau Engineering	--	7,134
Jumlah Pihak Berelasi	530,686	394,037
Pihak Ketiga		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,577,326	1,690,308
Kementerian Pemuda dan Olahraga	86,395	74,361
PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia	50,062	--
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	32,110	9,824
Bank Indonesia	29,562	59,513
Kementerian Perhubungan	25,755	3,033
Pemerintah Daerah Kota Makassar	6,033	--
Universitas Islam Negeri Raden Fatah	--	67,272
RSUD Wates	--	50,527
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	41,692	41,692
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	--	1,117
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	2,562	26,422
Jumlah Pihak Ketiga	1,851,497	2,024,069
Total Tagihan Bruto	2,382,183	2,418,106
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(50,959)	--
Total Tagihan Bruto - Net	2,331,224	2,418,106

Related Parties
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Pertamina (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)
PT Pertamina EP
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Bhandra Graha Reksa (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Krakatau Engineering
Total Related Parties
Third Parties
The Ministry of Public Work and Public Housing
The Ministry of Youth and Sports
PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia
Dharmasraya District Government
Bank Indonesia
The Ministry of Transportation
Local Government of Makassar City
Raden Fatah State Islamic University
Wates Regional Public Hospital
Pesisir Barat District Government
Public Works and Spatial Planning Office Banjarbaru
Others (each below Rp 1 Billion)
Total Third Parties
Total Gross Amount Due from Customers
Less: Allowance for Impairment Losses
Total Gross Amount Due from Customers - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto kepada pemberi pekerja adalah sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses on gross amount due from customers are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal Tahun	--	--
Penyesuaian Penerapan PSAK 71	(50,959)	--
Saldo Akhir Tahun	(50,959)	--

Beginning Balance of The Year
Adjustment on Application of PSAK 71
Ending Balance of The Year

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian nilai tagihan bruto cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto.

Management considered that derecognize gross amount due to customer is sufficient to cover possible losses on uncollectible gross amount due to customers.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

10. Persediaan

10. Inventories

	2020 Rp	2019 Rp	
Persediaan Jasa Konstruksi			Construction Inventory
Material Bahan Baku Konstruksi	116,734	144,702	Material Construction Supplies
Beton Pracetak	4,396	5,858	Precast Concrete
Suku Cadang	298	418	Spare Parts
Jumlah Persediaan Jasa Konstruksi	121,428	150,978	Total Inventory of Construction
Persediaan Properti			Property Inventory
Tanah Sedang Dikembangkan	12,553	3,066	Real Estate Assets Inventories
Bangunan Dalam Konstruksi	7,625	5,612	Buildings under Construction
Bangunan dan Tanah Siap Jual	5,164	56,684	Buildings and Land Ready for Sale
Jumlah Persediaan Properti	25,342	65,362	Total Inventory of Property
Jumlah	146,770	216,340	Total

Persediaan merupakan material bahan baku konstruksi berupa perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh PT NK.

The inventories are the material construction supplies such as project's supplies that are still available in the project's warehouse of PT NK.

Tanah sedang dikembangkan yaitu tanah yang berlokasi di Jalan Mustofa Bandung, Maros Makassar, Mataram dan Bontosungu.

Land underdevelopment located at Jalan Mustofa at Bandung, land at Maros Makassar, Mataram and Bontosungu.

Bangunan dalam konstruksi yaitu Kavling Badak di Semarang dan Perumahan Permata Gowa yang berlokasi di Jalan Ardio Syam, Gowa, Makassar, dan Perumahan Cilangkap.

Buildings under construction include the Kavling Badak in Semarang and the Permata Gowa Housing located on Jalan Ardio Syam, Gowa, Makassar, and Cilangkap Residence.

Bangunan dan tanah siap jual yaitu Ruko Pabaeng-baeng yang berlokasi di Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng dan di Gowa, Makassar dan Perumahan Cilangkap

Building and land for sale, namely Ruko Pabaeng-baeng located at Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng and Gowa, Makassar.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan manajemen PT NK berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan dan tidak ada penghapusan persediaan yang rusak atau usang.

Based on a review of the condition of inventory, PT NK believes that there is no need for provision for decline in inventory value and no write-off for damaged or obsolete inventory.

11. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

11. Advances and Prepaid Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Uang Muka Pihak Ketiga	92,980	55,635	Advance to Third Parties
Biaya Dibayar di Muka	56,675	46,552	Prepaid Expenses
Jumlah	149,655	102,187	Total

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka kepada *supplier* dan subkontraktor. Biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi.

Advance to third parties represents prepayment to suppliers and subcontractor. Prepaid expenses are for rent and insurance.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

12. Perpajakan

12. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai	23,759	22,134	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 22	--	97	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	58,817	63,605	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	--	4,796	Income Tax Article 25
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai	573,296	715,654	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 22	3,957	11	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	1,567	3,816	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	2	820	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 28a	--	1,641	Income Tax Article 28a
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2	993	2	Income Tax Article 4 (2)
Jumlah	662,391	812,576	Total

Surat ketetapan lebih bayar pajak yang diterima selama tahun 2020 sebagai berikut:

The tax assessment letter received during 2020 is as follows:

No. / No.	Entitas/ Entity	Jenis Surat / Tax Letter	Nomor Surat / Tax Letters No.	Tanggal Surat / Date Issued	Periode / Period	Jumlah Total
1	PT PPA	SKP Lebih Bayar PPh Badan/ Overpayment CIT	00001/406/18/093/20	10 Januari 2020/ January 10, 2020	2018	28,666
2	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00011/407/18/093/20	20 Februari 2020/ February 20, 2020	Mei 2018	20,716
3	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00010/407/18/093/20	20 Februari 2020/ February 20, 2020	Juni 2018	15,620
4	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00009/407/18/093/20	20 Februari 2020/ February 20, 2020	Juli 2018	14,032
5	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00008/407/18/093/20	20 Februari 2020/ February 20, 2020	Agustus 2018	13,286
6	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00077/407/18/093/20	03 Juli 2020/ July 03, 2020	September 2018	21,248
7	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00078/407/18/093/20	03 Juli 2020/ July 03, 2020	Oktober 2018	27,459
8	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00079/407/18/093/20	03 Juli 2020/ July 03, 2020	November 2018	20,820
9	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00080/407/18/093/20	03 Juli 2020/ July 03, 2020	Desember 2018	16,924
10	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00013/407/19/093/20	07 Desember 2020/ December 07, 2020	Januari 2019	24,427
11	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00014/407/19/093/20	07 Desember 2020/ December 07, 2020	Februari 2019	15,842
12	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00015/407/19/093/20	07 Desember 2020/ December 07, 2020	Maret 2019	19,913
13	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00039/407/19/093/20	23 Desember 2020/ December 23, 2020	April 2019	16,726
14	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00040/407/19/093/20	23 Desember 2020/ December 23, 2020	Mei 2019	12,288
15	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00041/407/19/093/20	23 Desember 2020/ December 23, 2020	Juni 2019	10,913
16	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00043/407/19/093/20	30 Desember 2020/ December 30, 2020	Juli 2019	15,676
17	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00044/407/19/093/20	30 Desember 2020/ December 30, 2020	Agustus 2019	21,124
18	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00045/407/19/093/20	30 Desember 2020/ December 30, 2020	September 2019	16,595
19	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00046/407/19/093/20	30 Desember 2020/ December 30, 2020	Oktober 2019	23,571
20	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment VAT	00047/407/19/093/20	30 Desember 2020/ December 30, 2020	November 2019	22,083
						377,929

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan status Lebih Bayar Rp28.873, Perusahaan telah menerima SKLB No. 00001/406/18/093/20 sebesar Rp28.666 dengan selisih Rp207 merupakan koreksi pajak dibayar dimuka.

Based on the results of the tax audit on the 2018 Annual Corporate Income Tax Return with the status of Overpaying of Rp28,873, the Company has received SKLB No. 00001/406/18/093/20 amounting to Rp28,666 with a difference of Rp207 is a correction for prepaid taxes.

Penerimaan uang sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 00201A adalah sebesar Rp24.258 dengan selisih Rp4.407 yang merupakan pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) atas koreksi hasil pemeriksaan, yang dicatat pada akun Beban Operasional Lainnya.

Receipt of money in accordancing to SPMKP No. 00201A amounting to Rp24,258 with a difference amounting to Rp4,407 which is the payment of a Tax Collection Letter (STP) for corrections to the audit results, which are recorded in the Other Operating Expenses account.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

b. Utang Pajak

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Perusahaan</u>		
PPH Pasal 21	6,393	2,860
PPH Pasal 23	911	962
PPH Pasal 4(2)	118	8
PPH Pasal 22	2	6
PPH Pasal 26	2	--
<u>Entitas Anak</u>		
PPH Pasal 4(2)	6,116	4,083
PPH Pasal 29	1,425	3,765
PPH Pasal 22	3,430	1,863
Pajak Pertambahan Nilai	691	55,491
PPH Pasal 21	1,910	2,773
PPH Pasal 23	1,044	2,193
PPH Pasal 25	80	--
Jumlah	22,122	74,004

b. Taxes Payable

<u>The Company</u>
Income Article 21
Income Article 23
Income Article 4(2)
Income Article 22
Income Article 26
<u>Subsidiaries</u>
Income Article 4(2)
Income Article 29
Income Article 22
Value Added Tax
Income Article 21
Income Article 23
Income Article 25
Total

c. Manfaat (Beban) Pajak

	2020 Rp	2019 Rp
Pajak Kini	(38,319)	(17,007)
Pajak Tangguhan	(18,925)	8,368
Jumlah	(57,244)	(8,639)

c. Tax Benefit (Expenses)

Current Tax
Deferred Tax
Total

d. Pajak Penghasilan Badan

	2020 Rp	2019 Rp
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian (Laba)/ Rugi Sebelum Pajak Entitas Anak	163,013 (24,137)	335,711 (190,844)
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final	(59,158)	(68,761)
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	79,718	76,106
<u>Beda Temporer:</u>		
Apresiasi Karyawan	(7,802)	13,420
Penyisihan Penurunan Nilai	56,177	(118,573)
Beban Imbalan Pasca Kerja - Bersih	4,519	(1,545)
Tantiem	7,548	4,912
Penyusutan Aset Tetap	(50)	(131)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	60	381
Lain-lain	5,353	--
<u>Beda Tetap:</u>		
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	1,036	(11,012)
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	36,759	24,206
Jumlah Koreksi Fiskal	103,601	(88,342)
Laba Kena Pajak Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal (Akumulasi Rugi Fiskal)	183,319	(12,236)
Kompensasi Rugi Fiskal:		
Tahun 2019	(6,234)	--
Tahun 2018	(32,628)	(32,628)
Laba Fiskal (Akumulasi Rugi Fiskal)	144,457	(44,864)
Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan (22%)	31,780	--

Income Before Tax Based on Consolidated Statement of (Profit) or Loss and Other Comprehensive Income
Income Before Tax of Subsidiaries
Portion of Income Accounted for Final Income Tax
Income Before Corporate Income Tax
<u>Temporary Differences:</u>
Employees' Appreciation
Allowance for Impairment Loss
Employee Benefits Expense - Net
Tantiems
Fixed Assets Depreciation
Intangible Assets Amortization
Others
<u>Permanent Differences:</u>
Increase in Fair Value of Investment Property
Non Deductible Expenses
Total Tax Correction
Taxable Income Before Tax Losses Compensation (Accumulated Tax Losses)
Fiscal Tax Losses Compensation:
Year 2019
Year 2018
Taxable Income (Accumulated Tax Losses)
Corporate Income Tax Expense on Current Year (22%)

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020, Pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH Badan) dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Based on Law No. 2 of 2020 concerning the Determination of Perppu 1 of 2020, the Government has lowered the Income Tax rate in accordance with Article 17 of the Income Tax Law (Corporate Income Tax) from the previous 25% to 22% for the 2020 and 2021 tax years, and to 20 percent starting tax year 2022.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

	2018	Dampak Konsolidasi Entitas Anak/ Impact Consolidation on Subsidiaries	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	2019	Penyesuaian Saldo atas Penerapan PSAK 71 dan 73/ Balance Adjustments on the Adoption of PSAK 71 and 73	Efek Dekonsolidasi/ the Impact of Deconsolidation	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	Penyesuaian Akibat Perubahan Tarif Pajak/ Adjustment due to Changes Tax rate	2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan												Deferred Tax Assets
<u>Perusahaan</u>												<u>Company</u>
Rugi Fiskal Tidak Bisa Terpulihkan	4,907	--	2,058	--	6,965	--	--	(6,965)	--	--	--	Unrecoverable Tax Losses
Liabilitas Imbalan Kerja	623	--	(388)	--	235	--	--	143	--	--	378	Employee Benefit Liabilities
Akumul Tantien	2,683	--	1,228	--	3,911	--	--	1,191	--	--	5,102	Accrued Tantien
Akumul Agresiasi Karyawan	6,585	--	3,355	--	9,940	--	--	(2,909)	--	--	7,031	Accrued Employees Appreciation
Aset Tetap	84	--	(39)	--	45	--	--	(16)	--	--	29	Property, Plant and Equipment
Aset Taktenwujud	282	--	(261)	--	21	--	--	11	--	--	32	Intangible Assets
Pinjaman Yang Diberikan	(149)	--	--	--	(149)	--	--	--	--	--	(149)	Loans Receivable
Sub Jumlah	15,015	--	5,953	--	20,968	--	--	(8,546)	--	--	12,422	Sub Total
<u>PT PPA Finance</u>												<u>PT PPA Finance</u>
Akumul Tantien dan Agresiasi Karyawan	165	--	136	--	301	--	--	38	--	(9)	330	Accrued Tantien and Employees Appreciation
Pinjaman Sewa Pembiayaan	--	--	1,413	--	1,413	24,900	--	(2,509)	--	(3,167)	20,637	Finance Lease Receivables
Tagihan Anjak Piutang	4,542	--	--	--	4,542	1,014	--	(741)	--	(588)	4,227	Factoring
Pinjaman Pembiayaan Konsumen	2	--	126	--	128	(20)	--	(90)	--	(13)	5	Consumer Financing Receivables
Liabilitas Imbalan Kerja	30	--	(30)	--	--	--	--	--	--	--	--	Employee Benefit Liabilities
Sub Jumlah	4,739	--	1,645	--	6,384	25,894	--	(3,302)	--	(3,777)	25,199	Sub Total
<u>PT PPA Kapital</u>												<u>PT PPA Kapital</u>
Rugi Fiskal	10,483	--	702	--	11,185	--	(8,857)	(1,950)	--	--	378	Fiscal Losses
Liabilitas Imbalan Kerja	143	733	449	(31)	1,294	--	(1,398)	51	--	(31)	(84)	Employee Benefit Liabilities
Agresiasi	--	--	385	--	385	--	(177)	(12)	--	--	196	Accrued Employees Appreciation
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasi	8	(8)	203	--	203	30,925	(44)	--	--	525	31,609	Expected Credit Losses
Sub Jumlah	10,633	726	1,739	(31)	13,067	30,925	(10,476)	(1,911)	--	494	32,099	Sub Total
<u>PT Nindya Beton</u>												<u>PT Nindya Beton</u>
Imbalan Pasca Kerja	--	--	86	--	86	--	--	--	27	(4)	109	Employee Benefit Liabilities
Aset Tetap	2,396	--	(835)	--	1,561	--	--	(739)	--	(78)	744	Property, Plant & Equipment
Aset Hak Cuna Usaha	--	--	--	--	--	32	--	--	--	--	32	Lease Assets
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasi	--	--	--	--	--	4,840	--	(1,144)	--	(844)	2,852	Expected Credit Losses
Sub Jumlah	2,396	--	(749)	--	1,647	4,872	--	(1,883)	27	(926)	3,737	Sub Total
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	32,783	726	8,588	(31)	42,066	61,691	(10,476)	(15,842)	27	(4,209)	73,457	Total Deferred Tax Assets

f. Pemeriksaan Pajak dan Sengketa Pajak

f. Tax Examination and Tax Disputes

**Perusahaan
Pemeriksaan Tahun 2019**

Pemeriksaan pajak tahun 2019 dilaksanakan karena adanya kelebihan pembayaran pajak Perusahaan sebagaimana tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019, dengan status SPT Lebih Bayar sebesar Rp37.583

Pemeriksaan dilaksanakan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PEMB-063/WPJ.19/KP.0405/ RIK.SIS/2020 tanggal 2 Juli 2020, dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan untuk tahun pajak 2020. Namun demikian taksiran penghasilan kena pajak tersebut diatas akan dilaporkan dalam SPT tahun 2020 (2019: Laba kena pajak dan beban pajak tahun 2019 yang tercatat tidak berbeda material dengan yang dilaporkan dalam SPT 2019).

**Company
Tax Audit 2019**

Tax Audit 2019 was carried out due to an overpayment of the Company's taxes as stated in the 2019 Annual Corporate Income Tax Return, with the status of Overpaying SPT of Rp37,583.

The audit is carried out in accordance with the Audit Warrant Number: PEMB-063/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS /2020 dated 2 July 2020, from the Large Tax Office (LTO) - 4 and is currently still in the audit process.

As of the date of this financial report, the Company has not submitted an Annual Tax Return (SPT) for the 2020 tax year. However, the estimated taxable income mentioned above will be reported in the 2020 Annual Tax Return (2019: Reported taxable income and tax expense for the year 2019 immaterially varied from SPT 2019 submitted by the Company to the tax office).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

13. Aset Lain-lain

13. Other Assets

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Aset Lancar Lainnya</u>		
Piutang Proyek	64,493	65,450
Piutang Talangan Biaya BUMN	14,031	12,743
Lain-lain	35,951	21,933
Sub Total	114,475	100,126
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(47,133)	(50,988)
Jumlah	67,342	49,138
<u>Aset Tidak Lancar Lainnya</u>		
Deposito Berjangka yang Dijamin	815,253	390,786
Uang Jaminan	9,578	6,648
Aset Tak Berwujud	6,479	5,364
Persediaan Properti	6,092	6,092
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	--	29,043
Lain-lain	15,932	6,337
Jumlah	853,334	444,270
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(185)	--
Jumlah - bersih	853,149	444,270

<u>Other Current Assets</u>
Project Receivable
SOEs' Bailout Loans Receivable
Others
Sub Total
Less: Allowance for Impairment Losses
Total
<u>Other Non-Current Assets</u>
Time Deposits Pledged as Collateral
Deposit Guarantee
Intangible Assets - Software
Property Inventory
Restricted Bank
Others
Total
Less: Allowance for Impairment Losses
Total - net

- a. Piutang Proyek Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kuansing adalah tagihan kepada PT Manunggal Muara Palma (MMP) dari PT NK. Proyek ini bernilai Rp94.272 dan USD2.912 (termasuk PPN). Proyek dihentikan sebab MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI). Dalam Putusan BANI PT NK telah memenangkan dan MMP diharuskan membayar sejumlah Rp93.801 ditambah dengan Rp576 atas beban perkara yang ditalangi terlebih dahulu oleh PT NK. Status hukum perkara saat ini adalah menunggu terbitnya surat penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Pengacara Novian & Partners No. 1139/NP.XII/BK/2012 Tanggal 28 Desember 2012, Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi telah diterbitkan oleh PN Rengat sesuai surat No. 01/Eks.ARB/2012.-PN.RGT, tanggal 27 November 2012. PT NK melalui surat No. 008/SEKPER/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 meminta kepada Novian & Partners untuk dibuatkan time frame tahapan dan biaya pelaksanaan lelang eksekusi terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 27 November 2012.

PT NK telah mengajukan permohonan Lelang Sita Eksekusi kepada Pengadilan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang telah disita tersebut tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana surat Pengacara Novian & Partners No. 0729/NP.VIII/BK/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Pengadilan Negara Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan lelang

- a. The receivables of Project construction of the palm oil (PKS) Kuansing Factory area billed to PT Manunggal Muara Palma (MMP) from PT PT NK. This project worth Rp94,272 and USD2,912 (include VAT). The project was suspended because MMP could not fulfill the payment obligations in accordance with the agreements that have been made by Badan Arbitrase Nasional (BANI). In BANI's decision PT NK has won and MMP is required to pay Rp93,801 plus Rp576 on caseload who bailed in advance by PT NK. The legal status of case is currently awaiting the publication of a letter from the Chairman of the State Court Jakarta Selatan. Based on Letter Lawyer Novian & Partners No. 1139/NP.XII/BK/2012 dated December 28, 2012, the implementation of the seizure execution has been issued by PN Rengat according to letter No. 01/Eks.ARB/2012.-PN.RGT dated November 27, 2012. PT NK through the letter No. 008/SEKPER/01/2013 dated January 7, 2013 asked Novian and Partners to make a time frame phase and the cost of execution auction of the seizure execution report, dated November 27, 2012.

PT NK has filed a petition about Seizure Execution Auction to the Court against the moving goods and non moving goods that has been seized in August 1, 2013 as well as Letter of Lawyer Novian & Partners No. 0729/NP.VIII-BK/2013 dated August 21, 2013. South Jakarta District Court has issued a determination of execution date auction, November 6, 2013. On November

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

eksekusi tanggal 06 November 2013. Tanggal 18 November 2014, pelaksanaan lelang dengan harga limit Rp21.000 terhadap barang-barang pabrik kelapa sawit Kuansing tidak dihadiri oleh peminat lelang dan Ketua Pengadilan Negeri Rengat menyampaikan apabila PT NK menghendaki lelang lanjutan, maka PT NK harus melakukan appraisal ulang yang terkini terhadap peralatan/mesin di pabrik PKS. Sampai dengan 31 Desember 2020, PT NK sudah melakukan penurunan nilai sebesar Rp39.239.

- b. Piutang talangan biaya BUMN merupakan piutang atas restrukturisasi/ revitalisasi BUMN.

Berdasarkan Akta Gadai Deposito Nomor: 001/AG/CSTD/CLS/VIII/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 antara PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bahwa debitur telah menerima fasilitas kredit dari bank sebesar Rp390.000. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang debitur kepada bank sehubungan dengan perjanjian kredit maka debitur dengan akta ini memberikan gadai berupa deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk senilai Rp390.000.

Berdasarkan Akta Gadai Deposito Nomor: 002/AG/CSTD/CLS/IX/2020 pada tanggal 3 September 2020 antara PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bahwa debitur telah menerima fasilitas kredit dari bank sebesar Rp200.000. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang debitur kepada bank sehubungan dengan perjanjian kredit maka debitur dengan akta ini memberikan gadai berupa deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk senilai Rp200.000.

Deposito berjangka yang dijaminan sebesar Rp200.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas fasilitas pinjaman kredit.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

18, 2014, the auction with the price limit of Rp21,000 toward project construction of the palm oil Kuansing's goods was not attended by any auction enthusiast and The Chairman of Rengat District Court had conveyed that PT NK wanted to hold an advanced auction, so PT NK should do re-appraisal toward the tools/engines in PKS factory. Until December 31, 2020, PT NK has done an impairment amount to Rp39,239.

- b. SOE's Fund advance loans receivable represent receivable to SOE's restructuring/ revitalization.
- c. Based on Deposit Pawn Deed Number: 001/AG/CSTD/CLS/IX/2020 on August 28, 2020 between PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that the debtor has received a credit facility from the bank of Rp390.000. That to guarantee the repayment of debtor debtors to the bank in connection with the credit agreement then the debtor with this deed provides a mortgage in the form of a term deposit in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk worth Rp390.000.

Based on the Deposit Pledge Deed No: 002/AG/CSTD/CLS/IX/2020 on September 3, 2020 between PT Aset Management Company (Persero) and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, the debtor has received a credit facility from the bank amounting to Rp200. 000. Whereas in order to guarantee the repayment of debtor's debts to the bank in connection with the credit agreement, the debtor with this deed provides a pledge in the form of a time deposit at PT. State Savings Bank (Persero) Tbk worth Rp200,000.

A guaranteed time deposit of Rp200,000 is the company's time deposit of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for credit loan facilities.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Deposito berjangka yang dijaminan sebesar Rp25.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten atas fasilitas pinjaman kredit.

A guaranteed time deposit of Rp25,000 is the company's time deposit of PT. Bank Pembangunan Daerah Banten for credit loan facilities.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of other assets are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Aset Lancar Lainnya</u>			<u>Other Current Assets</u>
Saldo Awal Tahun	(50,988)	(47,363)	Balance at Beginning of The Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(101)	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan di Tahun Berjalan	(63)	(3,625)	Addition in Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	4,019		Recovery in Current Year
	<u>(47,133)</u>	<u>(50,988)</u>	
<u>Aset Tidak Lancar Lainnya</u>			<u>Non Other Current Assets</u>
Saldo Awal Tahun	--	--	Balance at Beginning of The Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	--	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan di Tahun Berjalan	(185)	--	Addition in Current Year
Saldo Akhir Tahun	<u>(185)</u>	<u>--</u>	Balance at Ending of The Year

14. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

14. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income

	2020 Rp	2019 Rp	
Saham	38,944	40,296	Shares
Nilai Wajar	<u>38,944</u>	<u>40,296</u>	Fair Value

Investasi pada saham di tahun 2020 dan 2019 merupakan investasi pada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dalam kelompok LQ 45 dengan jumlah lembar saham dan nilai wajar sebagai berikut:

Investments in shares in 2020 and 2019 are investments in shares of PT Waskita Karya (Persero) Tbk which are in the LQ 45 group with the following number of shares and fair value, as follows:

	2020	2019	
Jumlah Lembar	27,044,608	27,044,608	Number of Share
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	1,440	1,485	Fair Value (in full English)

Kenaikan (penurunan) nilai yang belum direalisasi untuk Aset Keuangan Tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

Unrealized Gain (loss) on Available for Sale Financial Assets are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	22,152	25,628	Beginning Balance
Kenaikan (Penurunan) Tahun Berjalan	(1,352)	(3,476)	Current Year Increase (Decrease)
Saldo Akhir	<u>20,800</u>	<u>22,152</u>	Ending Balance

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**15. Pinjaman yang Diberikan – Restrukturisasi
dan/atau Revitalisasi kepada Pihak Berelasi**

**15. Loans Receivable – Restructuring and/or
Revitalization Related Parties**

	2020 Rp	2019 Rp	
Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Restructuring/Revitalization
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	605,000	605,000	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	663,995	662,174	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	211,670	215,345	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	141,612	141,612	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Iglas (Persero)	89,084	89,085	PT Iglas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	28,507	28,638	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	1,739,868	1,741,854	Total Principal Loan Restructuring/Revitalization
Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Interest Receivables on Restructuring/Revitalization Loans
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	23,484	10,075	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Iglas (Persero)	12,359	12,359	PT Iglas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2,893	1,901	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	38,736	24,335	Total Interest Receivables on Restructuring/Revitalization Loans
Jumlah Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	1,778,604	1,766,189	Total Restructuring/Revitalization Loans
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman			Allowance for Impairment of Loans
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(624,030)	(221,669)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	(273,330)	--	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	(157,215)	--	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
PT Iglas (Persero)	(33,572)	--	PT Iglas (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(141,612)	(127,451)	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	(11,565)	--	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman	(1,241,324)	(349,120)	Total Allowance for Impairment of Principal Loans
Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi			Unamortized Cost
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	(228)	(228)	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(208)	(208)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Iglas (Persero)	(161)	(161)	PT Iglas (Persero)
Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi	(597)	(597)	Total Unamortized Cost
Jumlah Pengurangan	(1,241,921)	(349,717)	Total Deduction
Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi - Bersih	536,683	1,416,472	Total Loans Restructuring/Revitalization Receivable - Net

Sesuai PSAK 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020, Pinjaman yang Diberikan – Restrukturisasi/Revitalisasi adalah aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

According to PSAK 71 effective January 1, 2020, the Restructuring/Revitalization Loans Provided are financial assets measured at amortized cost which are subsequently measured at amortized cost.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of other assets are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	(349,120)	(461,151)	Balance at Beginning of The Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(880,238)	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan di Tahun Berjalan	(15,637)	--	Addition in Current Year
Pemulihan di Tahun Berjalan	3,671	112,031	Recovery in Current Year
Saldo Akhir Tahun	(1,241,324)	(349,120)	Balance at Ending of The Year

Perikatan dan Perjanjian terkait Pinjaman yang diberikan restrukturisasi dan/atau revitalisasi kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan Catatan 43.

Commitments and agreements related to loans receivable-restructuring and/or revitalization related parties are disclosed in Note 43.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

16. Properti Investasi

16. Investment Property

2020						
	1 Januari/ January 1	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Dampak Dekonsolidasi/ Impact of Deconsolidation	31 Desember/ December 31	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	552,470	29,150	--	(63,886)	517,734	Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	552,470	29,150	--	(63,886)	517,734	Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	313,113	26,169	--	(40,018)	299,264	Fair Value
Nilai Tercatat	865,583				816,998	Carrying Value
2019						
	1 Januari/ January 1	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	511,952	3,055	--	37,463	552,470	Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	511,952	3,055	--	37,463	552,470	Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	274,857	41,528	--	(3,272)	313,113	Fair Value
Nilai Tercatat	786,809				865,583	Carrying Value

Perusahaan

Tanah dan Bangunan Eks PT EMI (Persero)

SHGB Nomor 1393 Tanggal 6 Oktober 2010 terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta dengan luas 985 m². Diatas tanah ini berdiri bangunan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 2862/IMB/PG/1977 Tanggal 16 Juni 1977.

Pada tahun 2020, Nilai Wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 31 Desember 2020.

Asset Settlement dari PT MNA (Persero)

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh aset tanah Syamsudin Noor dan Tompo Balang dengan nilai sebesar Rp11.080 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

Pada tahun 2017, Perusahaan memperoleh aset tanah Maros dengan total nilai sebesar Rp57.675 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

The Company

Land and Building Ex PT EMI (Persero)

SHGB Number 1393 Date October 6, 2010 located at Melawai Village, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta with an area of 985sqm. The building stands on land in accordance with the Building Permit Number: 2862/IMB/PG/1977 on June 16, 1977.

In 2020, The fair value of investment properties as of December 31, 2020 is estimating based on market value method based on valuation report of KJPP Jimmy Prasetyo & Partners (registered in OJK) dated on December 31, 2020.

Asset Settlement from PT MNA (Persero)

In 2016, the Company acquired land at Syamsudin Noor and Tompo Balang amounting to Rp11,080 which owned by PT MNA, handed over to the Company as compensation payment for partial loan given by the Company.

In 2017, the Company acquired land assets Maros amounting to Rp57,675 which owned by PT MNA, handed over to the Company as compensation payment for partial loan given by the Company, otherwise.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tahun 2020, nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 31 Desember 2020.

Asset Settlement PT Kertas Leces (Persero)

Aset yang dinilai milik Perusahaan berupa Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan total luas LT/LB +/- 1.314/816 m disertai sarana pelengkap yang terletak di Jalan Cimanuk No.29-31, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2020, nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 31 Desember 2020.

Hierarki nilai wajar Tingkat 2 dari properti investasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dihitung berdasarkan hasil penilaian pendekatan berikut ini:

- Pendekatan Pendapatan
Input yang paling signifikan dalam pendekatan ini adalah asumsi-asumsi digunakan dalam perhitungan tingkat kapitalisasi seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan.
- Pendekatan Biaya
Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Biaya pengganti baru disesuaikan dengan estimasi penyusutan dengan mempertimbangkan tingkat umur ekonomis, kemunduran fisik dan keusangan.

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp184.643. Penurunan nilai wajar dicatat sebesar Rp1.036.

PT NK

Properti Investasi merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Bajak V Medan (tanah) dengan luas tanah 9.363 m²; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian Sidoarjo (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 10.440 m²; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (tanah) dengan luas tanah 4.572 m²; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.828 m²; Jl Majapahit Nomor 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan kota Mataram (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.977 m²; Jl. Bontosunggu nomor 22 Makassar dengan luas tanah 1.559 m²; dan Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan dengan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

In 2020, The fair value of investment properties as of December 31, 2020 is estimating based on market value method based on valuation report of KJPP Jimmy Prasetyo & Partners (registered in OJK) dated on December 31, 2020.

Asset Settlement of PT Kertas Leces (Persero)

Assets rated by the Company in the form of Land and Residential Buildings with total area of Land/Building of 1,314/816 m and complementary facilities located at Jalan Cimanuk No.29-31, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, East Java Province.

In 2020, the fair value of investment properties as of December 31, 2020 is estimating based on market value method based on valuation report of KJPP Jimmy Prasetyo & Partners (registered in OJK) dated on December 31, 2020.

The Level 2 fair value hierarchy of investment properties for land and buildings that are rented is calculated using following approaches:

- *Income Approach*
The most significant input in this valuation approach is the estimated cost that used in capitalized rate for disconto and growth rate.
- *Cost Approach*
The most significant input in this valuation approach is the estimated cost of the new reproduction or replacement. The replacement costs are adjusted for depreciation estimation by considering the rate of economic age, physical deterioration and obsolescence.

Increase from accumulated fair value of investment property was revalued on December 31, 2020, amounted to Rp184.643. Decreasing of fair value is recorded on other income amounted to Rp1,036.

PT NK

Investment Properties are the land and buildings located at Jl. Bajak V Medan (land) with area of 9,363 sqm; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo (land and building) with area of 10,440 sqm; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (land) with area of 4,572 sqm; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (land and building) with area of 5,828 sqm; Jl Majapahit Number 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan city of Mataram (land and buildings) with a land area of 5,977 sqm; Jl. Bontosunggu number 22 Makassar with a land area of 1,559 sqm; and Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan with a land area of 1,057 sqm; Jl.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

luas tanah 1.057 m²; Jl. Bridgend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan kota Semarang (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 3.768m². Jl. Mustofa no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan luas 1.338 m². Tanah di Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Kota Bandung dengan luas 2.720 m².

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Pendapatan Sewa	9,044	14,739
Beban Langsung yang Timbul dari		
Properti Investasi yang menghasilkan		
Penghasilan Sewa	7,485	10,672

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan laporan tertanggal 31 Desember 2020.

Hierarki nilai wajar Tingkat 2 dari properti investasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dihitung berdasarkan hasil penilaian pendekatan berikut ini:

- Pendekatan Pendapatan
Input yang paling signifikan dalam pendekatan ini adalah asumsi-asumsi digunakan dalam perhitungan tingkat kapitalisasi seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan.
- Pendekatan Biaya
Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Biaya pengganti baru disesuaikan dengan estimasi penyusutan dengan mempertimbangkan tingkat umur ekonomis, kemunduran fisik dan keusangan.

Properti investasi berupa tanah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 22).

PT PPAK

PT PPAK melakukan pembelian atas tanah dan bangunan lelang jaminan PT Kertas Leces (Persero) berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas keseluruhan kurang lebih 434 m², serta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas satu bidang tanah dengan luas yang berdasarkan dokumen kepemilikan 623 m² senilai 11.725. Aset tersebut terletak di Jalan Radio IV No. 5, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Bridgend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan, city of Semarang (land and buildings) with a land area of 3,768 sqm . Jl. Mustofa no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung 1,338 sqm. Land in Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Kota Bandung dengan luas 2,720 sqm.

Lease income and direct operating expenses from investment properties in the consolidated profit or loss are as follows:

Rental Income
Direct Operating Cost Arises from
the Rental Generated Investment
Properties

The fair value of investment properties as of December 31, 2020 is estimating based on market value method based on valuation report dated on 31 December 2020.

The Level 2 fair value hierarchy of investment properties for land and buildings that are rented is calculated using following approaches:

- Income Approach
The most significant input in this valuation approach is the estimated cost that used in capitalized rate for disconto and growth rate.
- Cost Approach
The most significant input in this valuation approach is the estimated cost of the new reproduction or replacement. The replacement costs are adjusted for depreciation estimation by considering the rate of economic age, physical deterioration and obsolescence.

Investment property of land were used as collateral to borrowings (Note 22).

PT PPAK

PT PPAK made purchases of land and buildings for the guarantee auction of PT Kertas Leces (Persero) in the form of a plot of land and buildings with a total area of approximately 434 m², as well as other complementary facilities that stood on one plot of land with an area based on ownership documents of 623 m² valued at 11,725. The asset is located at Jalan Radio IV No. 5, Kramat Pela Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tahun 2019, berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 17 Januari 2019, terdapat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikapitalisasi sebesar Rp571.

Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan penilaian nilai wajar dari properti investasi yang diukur berdasarkan perhitungan dari penilai berkualifikasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki & Rekan dengan laporan tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan teknik pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan pasar (*market approach*) (nilai wajar level 2).

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.445 dan dampak dekonsolidasi entitas anak PPAK sebesar Rp40.018.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

In 2019, based on the Regional Tax Payment Letter for Fees for Acquisition of Land and Building Rights on January 17, 2019, there is a Tax on Acquisition of Rights on Land and Buildings which is capitalized in the amount of Rp571.

In 2020, PT PPAK assessed the fair value of investment properties measured based on calculations from qualified appraisers by the Herman Meirizki & Partners Public Appraisal Service Office with a report dated December 31, 2020 using the cost approach and market approach techniques. (fair value level 2).

The accumulated increase in fair value of investment properties after being revalued on December 31, 2020 amounted to Rp7,445 and the impact of the deconsolidation of PPAK's subsidiaries amounted to Rp40,018.

17. Investasi pada Ventura Bersama

17. Investments in Joint Venture

Nama Ventura Bersama / Name of Joint Venture	Proyek / Project	Persentase/ Percentage	2020	2019
Ventura Bersama - Pembangunan Perumahan Green Teksin	Proyek Pembangunan Perumahan Green Teksin	86%	60,974	60,289
Ventura Bersama - ISN - LBD - PPA	Proyek Pembangunan Perumahan Bekasi	33%	41,875	45,259
Ventura Bersama PPA - PT Rumah Cerdas	Proyek Mutiara Java Regency	94%	--	8,891
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Bendungan Sadawarna	60%	48,793	23,379
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Bendungan Meninting	73%	24,705	20,650
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Cisumdawu	9%	20,750	22,323
Ventura Bersama Nindya - Bahagia bangunnusa	Bendungan Tiusuntuk	65.0%	20,491	--
Ventura Bersama Nindya - PT Modern Widya Tehnical	Fasilitas Sisi Udara Bandara Nabire Baru I	60.0%	11,669	--
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Bendungan Bomberay	70.0%	11,352	6,419
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Kalimati	60.0%	10,299	12,526
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau	70.0%	10,237	1,519
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	Irigasi Doplang	70.0%	6,140	10,893
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	Waduk Bendo	33.0%	8,128	--
Ventura Bersama Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Pembangunan Jl. Depapre	35.0%	7,169	7,169
Ventura Bersama Nindya - Passokkorang	Jalan Tompe-Dalam kota Palu	70.0%	7,044	350
Ventura Bersama Nindya - Surya	Irigasi Lematang	70.0%	5,680	14,619
Ventura Bersama Nindya - PT Rapi Tirta Treatmind	SPAM Kalidendeng KAP. 150 liter/detik	70.0%	5,133	--
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Jalan Rianiate	60.0%	4,898	4,898
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Bendungan Tanju Mila	60.0%	3,937	7,537
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Tol Solo - Kertosono	31.0%	3,823	3,823
Ventura Bersama Nindya - PT Bumi Agung Annusa	Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika	70.0%	3,731	--
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Sei Wampu	45.0%	3,151	5,131
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara	60%	3,151	1,875
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja	Tangki Balck Product RU IV Cilacap	76%	3,029	3,238
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	Pantai Marore	60%	2,854	2,910
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	Takengon - Uning	75%	2,611	2,611
Ventura Bersama Nindya - Inti	Ipal Aceh	60%	2,479	4,279
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Sukodono	70%	1,522	7,100
Ventura Bersama Nindya - Andesmont	Rembele Tahap II	70%	1,855	1,855
Ventura Bersama Nindya - Kencana	Irigasi Batang Anai Tahap 2	70%	1,738	2,612
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Sungai Ciliwung	40%	1,300	1,300
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Pembangunan Universitas Jember	45%	--	8,260
Ventura Bersama Nindya - Jaya Konstruksi	Tol Trans. Marga Jateng	60%	--	9,282
Ventura Bersama Nindya - Wijaya Karya	Bendungan Logung	40%	--	6,882
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	BKT Semarang	60%	--	2,938
Ventura Bersama Nindya - Barata	Bendungan Cieunteung	75%	--	1,388
Ventura Bersama Nindya - PP - Hutama Karya	Jembatan Holtekam	15%	--	1,124
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar/ each below Rp1 Million)			4,222	8,479
Jumlah/ Total			344,740	321,808

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investment in joint ventures are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Tercatat Awal Tahun	321,808	336,085	Carrying Amount at Beginning of Year
Mutasi Investasi - bersih	(64,973)	(80,983)	Investment Movements - Net
Bagian Laba Ventura Bersama	87,905	66,706	Share in Profit of Joint Venture
Nilai Tercatat Akhir Tahun	344,740	321,808	Carrying Amount at the end of Year

Ringkasan informasi keuangan dibawah ini merupakan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ventura bersama dengan rincian berikut ini:

The summarized financial information below represents amount shown in joint venture's financial statements with the details belows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Aset Lancar	3,367,127	2,033,068	Current Asset
Aset Tidak Lancar	81,281	135,791	Non-Current Asset
Liabilitas Jangka Pendek	2,213,659	989,096	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	275,803	359,444	Non-Current Liabilities
Pendapatan Usaha	1,582,618	2,136,796	Revenue
Laba Bersih Tahun Berjalan	147,518	254,067	Net Income
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	Other Comprehensive Income of The Year
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	147,870	254,067	Comprehensive Income of The Year

18. Pinjaman Investasi Jangka Panjang

18. Long Term Investment Loans

	2020 Rp	2019 Rp	
Pinjaman Investasi Jangka Panjang - Pokok			Long Term Investment Loan
PT National Utility Helicopters	174,293	62,641	PT National Utility Helicopters
PT Magnesium Gosari International	154,691	--	PT Magnesium Gosari International
PT Rejeki Inti Logam Jaya	128,437	--	PT Rejeki Inti Logam Jaya
PT Widodo Makmur Unggas	99,750	--	PT Widodo Makmur Unggas
PT Bondi Syad Mulia	47,000	--	PT Bondi Syad Mulia
PT Matoa Kidung Samudera	38,859	--	PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera	35,746	--	PT Matoa Kidung Bahtera
PT Wisarada Sarana Aviassi	26,765	8,580	PT Wisarada Sarana Aviassi
PT Pratama Persada Airbone	22,665	22,665	PT Pratama Persada Airbone
PT Tropisindo Sumber Energi	9,438	9,438	PT Tropisindo Sumber Energi
PT Varia Intra Finance	--	160,000	PT Varia Intra Finance
PT Pusaka Bumi Transportasi	--	10,706	PT Pusaka Bumi Transportasi
PT Niaga Bumi Energi	--	33,883	PT Niaga Bumi Energi
Total Pokok Pinjaman	737,644	307,913	Total Long Term Investment Loan
Pinjaman Investasi Jangka Panjang - Bunga			Long Term Investment Interest Loan
PT Magnesium Gosari International	12,474	--	PT Magnesium Gosari International
PT Rejeki Inti Logam Jaya	8,427	--	PT Rejeki Inti Logam Jaya
PT Matoa Kidung Samudera	5,896	--	PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera	5,769	--	PT Matoa Kidung Bahtera
PT National Utility Helicopters	2,930	113	PT National Utility Helicopters
PT Pratama Persada Airbone	1,175	--	PT Pratama Persada Airbone
PT Widodo Makmur Unggas	381	--	PT Widodo Makmur Unggas
PT Wisarada Sarana Aviassi	357	37	PT Wisarada Sarana Aviassi
PT Bondi Syad Mulia	251	--	PT Bondi Syad Mulia
PT Varia Intra Finance	--	684	PT Varia Intra Finance
PT Niaga Bumi Energi	--	525	PT Niaga Bumi Energi
PT Prabu Wahana International	--	17	PT Prabu Wahana International
Total Bunga Pinjaman	37,660	1,376	Total Long Term Investment Interest Loan
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(93,623)	(9,438)	Allowance for Impairment Losses
Provisi	8	3	Provision
Total Pinjaman Investasi Jangka Panjang - Bersih	681,689	299,854	Total Long Term Investment

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of loans are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	(9,438)	(13,899)	Balance at Beginning of The Year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(73,866)	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan di Tahun Berjalan	(10,319)	--	Addition in Current Year
Pemulihan di Tahun Berjalan	--	4,461	Recovery in Current Year
Saldo Akhir Tahun	(93,623)	(9,438)	Balance at Ending of The Year

a. PT National Utility Helicopters

Pada tanggal 8 Maret 2019, Perusahaan dan PT National Utility Helicopters (PT NUH) melakukan penandatanganan Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman melalui Akta Notaris Desman SH, M.Hum.MM., No.18 tanggal 8 Maret 2019. PT NUH memperoleh tambahan plafond pinjaman setinggi-tingginya Rp37.500 melalui 3 (tiga) Fasilitas Pinjaman baru yaitu *Tranche II*, *Tranche III* dan *Tranche IV*. Tingkat suku bunga 17% per tahun, biaya provisi sebesar 1,5% dari plafond pinjaman dan biaya administrasi penarikan sebesar Rp3 untuk setiap penarikan pinjaman.

a. PT National Utility Helicopters

On March 8, 2019, the Company and PT National Utility Helicopters (PT NUH) signed the Comprehensive Amendment to the Loan Agreement through Notarial Deed Desman SH, M.Hum, MM., No. 18 dated March 8, 2019. PT NUH obtained an additional loan limit of Rp37,500 through 3 (three) new Facility Loan which is *Tranche II*, *Tranche III* and *Tranche IV*. Interest rate of 17% per annum, a provision fee of 1.5% of the loan ceiling and a withdrawal administration fee of Rp3 for each loan withdrawal.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan PT NUH melakukan penandatanganan Addendum I Perubahan secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman melalui Akta Notaris Desman SH, M.Hum, MM., No. 113. PT NUH memperoleh tambahan plafond pinjaman untuk Modal Kerja sebesar Rp98.000 melalui 5 (lima) Fasilitas Pinjaman baru yaitu *Tranche V*, *Tranche VI*, *Tranche VII*, *Tranche VIII* dan *Tranche IX*. Tingkat suku bunga 17% per tahun, biaya provisi sebesar 1,8% dari plafond pinjaman dan biaya administrasi penarikan sebesar Rp5 untuk setiap penarikan pinjaman.

On December 20, 2019, the Company and PT NUH signed the 1st Amendment to Overall Loan Agreement through Notarial Deed Desman SH, M.Hum, MM., No. 113. PT NUH received an additional loan limit of Rp98,000 for working capital through 5 (five) new Facility Loan which is *Tranche V*, *Tranche VI*, *Tranche VII*, *Tranche VIII* and *Tranche IX*. Interest rate of 17% per annum, a provision fee of 1.8% of the loan ceiling and an administration fee of withdrawal of Rp5 for each loan withdrawal.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Perusahaan melakukan Addendum II Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 7 yang dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH. Addendum ini terkait dengan pelepasan sebagian jaminan gadai saham PT Dinamika Danatama Dirgantara.

On January 24, 2020, the Company made Addendum II Amendment to Overall Loan Agreement Number 7 through Notary Rismalena Kasri, SH. This addendum is related to the release of part of the pledge of shares of PT Dinamika Danatama Dirgantara.

Pada tanggal 3 Maret 2020 dilakukan Addendum III Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 06 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, SH., M.Hum. Addendum ini terkait dengan perubahan tujuan penggunaan dana Fasilitas Pinjaman *Tranche VII* dan penambahan jaminan fidusia berupa mesin pesawat helikopter AW 119Kx reg. PK-USE dengan nilai jaminan Rp40.500.

On March 3, 2020, was made Addendum III Amendment to Overall Loan Agreement through Number 06 through Notary Desman, SH., M.Hum. This addendum is related to the change the purpose of the *Tranche VII* Loan Facility and the addition of fiduciary guarantees in the form of an AW 119Kx reg. PK-USE with a collateral value of Rp40,500.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 18 Maret 2020 dilakukan Addendum IV Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 76 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, SH., M.Hum. Addendum ini terkait dengan penambahan plafond Fasilitas Pinjaman *Tranche X* senilai Rp65.000, sehingga total plafond pinjaman yang diberikan kepada PT National Utility Helicopters adalah sebesar Rp180.932. Tujuan fasilitas pinjaman ini untuk modal kerja dan pembelian helikopter, sparepart dan equipment serta pembayaran asuransi helikopter. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 24 (dua puluh empat) bulan. Perusahaan juga memperoleh tambahan jaminan fidusia berupa mesin pesawat helikopter Bell 412EP reg. PK-URB dengan nilai jaminan Rp55.000.

Pada tanggal 26 Juni 2020 dilakukan Addendum V Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 96 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, SH., M.Hum. PT NUH memperoleh tambahan plafon pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp24.000 melalui Fasilitas Pinjaman *Tranche XI*. Jatuh tempo Fasilitas Pinjaman *Tranche XI* adalah tanggal 31 Desember 2020. Selain itu PPA akan mendapatkan *Management Fee* sebesar Rp6.856 dan Provisi sebesar Rp144. Perusahaan juga mendapatkan tambahan jaminan berupa fidusia atas tagihan/piutang usaha PT NUH setinggi-tingginya Rp31.200 serta penyerahan Bilyet Giro senilai Rp10.000.

Pada tanggal 3 September 2020, PT NUH telah melunasi outstanding pokok dan bunga atas Fasilitas Pinjaman *Tranche VII* senilai total Rp13.300 melalui Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Chailease International Financial Services Co, Ltd. Pada hari yang sama juga dilakukan penghapusan (roya) atas salah satu aset yang dijaminkan ke PPA yaitu berupa 1 unit mesin helicopters PK-USE dengan nilai jaminan Rp40.500, sehingga total nilai jaminan PT NUH di Perusahaan saat ini menjadi sebesar Rp271.898 dengan collateral coverage ratio sebesar 154%.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp62.641 Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp144.969. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp33.317. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp174.293

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On March 18, 2020, was made Addendum IV Amendment to Overall Loan Agreement through Number 76 through Notary Desman, SH. This addendum is related to the addition of the *Tranche X* Loan Facility amounting to Rp65,000, so that the total loan ceiling granted to PT National Utility Helicopters is Rp180,932. The purpose of this loan facility is for working capital and for purchase of helicopters. The term of the loan facility is 24 (twenty four) months. The Company also obtained additional fiduciary security in the form of a Bell 412EP reg. PK-URB with a guarantee value of Rp55,000.

On June 26, 2020, was made Addendum V Amendment to Overall Loan Agreement through Number 96 through Notary Desman, SH. PT NUH obtained an additional loan ceiling of Rp24,000 for working capital through the *Tranche XI* Loan Facility. The maturity date of the *Tranche XI* Loan Facility is December 31, 2020. In addition, PPA will receive a Management Fee of Rp6,856 and a Provision of Rp144. The company also receives additional guarantees in the form of fiduciary over accounts receivable / accounts receivable of PT NUH of a maximum amount of Rp31,200 and submission of a Giro of Rp10,000.

On September 3, 2020, PT NUH has paid the outstanding principal and interest on the *Tranche VII* Loan Facility totaling Rp13,300 through the Loan Facility obtained from Chailease International Financial Services Co., Ltd. On the same day, one of the assets pledged 1 unit of PK-USE as collateral to PPA was also release, helicopters with a collateral value of Rp40,500, so that the total PT NUH guarantee value in the Company is currently Rp271,898. collateral coverage ratio of 154%.

The balance at the beginning of the year is Rp62,641. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp144,969. Receipt of loan payment in 2020 is Rp33,317 Balance at December 31, 2020 amounting to Rp174,293.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

b. PT Magnesium Gosari Internasional (PT MGI)

Pada tanggal 17 Januari 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman investasi proyek pengembangan Kawasan Pabrik Pupuk dengan PT MGI No. PP-03/PPA/0119. Pinjaman fasilitas ini terdiri dari *Tranche A* sebesar Rp23.000 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembelian mesin dolomit train II, *Tranche B* sebesar Rp59.200 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembelian dan pemasangan mesin dolomit III, *Tranche C* sebesar Rp9.800 dengan tujuan penggunaan dana untuk Pembelian 2 bidang tanah, *Tranche D* sebesar Rp57.200 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembangunan Gudang dan infrastruktur pendukung Gudang serta pabrik pupuk.

Tranche E sebesar Rp15.800 dengan tujuan pembiayaan *improvement* pabrik II dan III dan *Tranche F* sebesar Rp20.000 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan *Interest during construction* dengan total pokok sebesar Rp185.000. Jangka waktu Pinjaman fasilitas selama 84 bulan dengan tingkat suku bunga 15% per tahun.

Pada 31 Desember 2019 PT MGI masih dikonsolidasi oleh PPAK sehingga saldo awal pada laporan konsolidasi sebesar nihil. Pada tahun 2020, PPAK melakukan perubahan metode pembukuan. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp9.247 dan saldo awal 2019 yang tidak tercatat pada laporan konsolidasi 2019 sebesar Rp148.376. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp2.932. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp154.691.

c. PT Rejeki Inti Logam Jaya (PT RILJ)

PT Rejeki Inti Logam Jaya pada tanggal 29 Mei 2019 dilakukan penandatanganan addendum I perjanjian pemberian fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi.

Pada 31 Desember 2019 PT RILJ masih konsolidasian oleh PT PPAK sehingga saldo awal pada laporan konsolidasi sebesar nihil. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan. Saldo awal 2019 yang tidak tercatat pada laporan konsolidasi 2019 sebesar Rp128.437. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp128.437.

b. PT Magnesium Gosari Internasional (PT MGI)

On January 17, 2019, an agreement was signed on the granting of investment loan facilities for the development of the Fertilizer Factory Area between PT MGI and PP-03/PPA/0119 Companies. This facility loan consists of *Tranche A* in the amount of Rp23,000 with the aim of using funds to finance the purchase of dolomite train II machines, *Tranche B* in the amount of Rp59,200 with the aim of using funds to finance the purchase and installation of dolomite III machines, *Tranche C* amounting to Rp9,800 with the purpose of using funds for the purchase of 2 plots of land, *Tranche D* of Rp57,200 with the aim of using funds to finance the construction of warehouses and supporting infrastructure of warehouses and fertilizer factories.

Tranche E amounting to Rp15,800 with the objective of financing improvements to factories II and III and *Tranche F* amounting to Rp20,000 with the aim of using the funds to finance Interest during construction with a total principal amount of Rp185,000. The facility loan period is 84 months with an interest rate of 15% per annum.

As of December 31, 2019 PT MGI is still being consolidated by PPAK so that the initial balance in the consolidated report was Nil. In 2020, PPAK made changes to the bookkeeping method. The total loan disbursement balance in 2020 was Rp9,247 and the 2019 initial balance not recorded in the 2019 consolidated report was Rp148,376. Receipts from payments in the current year amounted to Rp2,932. The balance as of December 31, 2020 is Rp154,691.

c. PT Rejeki Inti Logam Jaya (PT RILJ)

PT Rejeki Inti Logam Jaya on May 29, 2019, the signing of the addendum I agreement to provide working capital and investment loan facilities.

As of December 31, 2019 PT RILJ is still being consolidated by PT PPAK so that the initial balance in the consolidated report was Nil. In 2020, PT PPAK made changes to the bookkeeping method. The 2019 initial balance not recorded in the 2019 consolidated report was Rp128,437. Receipts from payments in the current year amounted to Nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp128,437.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

d. PT Widodo Makmur Unggas

Pada tanggal 4 November 2019 dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pembelian Surat Utang PT Widodo Makmur Unggas ("PT WMU") No. 09 dengan tujuan penggunaan dana untuk investasi pembangunan peternakan ayam terinteragasi milik PT WMU yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Besarnya kupon yang dikenakan sebesar 12,50% dan *monitoring fee* sebesar Rp125 dibayarkan setiap bulan. Jaminan yang diberikan PT WMU kepada Perusahaan yaitu jaminan pembayaran, fidusia piutang usaha, fidusia persediaan, *corporate guarantee* (termasuk di dalamnya *Cash Deficit Guarantee*) dari PT Widodo Makmur Perkasa (dahulunya Perusahaan *Holding*).

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp99.750. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp99,750.

e. PT Bondi Syad Mulia (PT BSM)

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi (SUK) PT BSM Nomor No. 20 tanggal 20 April 2018, dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp64.000 Juta dan jatuh tempo tanggal 30 April 2023, dengan tujuan untuk pembelian pabrik dan dalam rangka rencana pengalihan saham eksisting ke Perusahaan. Sampai per tanggal 31 Desember 2020, saldo SUK yang belum ditebus/dikonversi sebesar Rp27.000 dengan rate bunga 13% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 49 tanggal 24 Agustus 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit investasi kepada Bondi Syad Mulia dengan total jumlah pokok maksimum sebesar Rp25.000 untuk mempergunakan seluruh dana fasilitas pinjaman hanya untuk tujuan pembelian asset gresik dengan tingkat suku bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu pinjaman terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.

Pada 31 Desember 2019 PT Bondi Syad Mulia masih konsolidasian oleh PT PPAK sehingga saldo awal pada laporan konsolidasi sebesar nihil. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan. Total saldo

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

d. PT Widodo Makmur Unggas

On November 4, 2019, a Deed of Investment Cooperation Agreement in the Form of Purchasing PT Widodo Makmur Unggas ("PT WMU") No. 09 with the aim of using the funds for the construction investment of an integrated chicken farm owned by PT WMU which is located in West Java, Central Java and Yogyakarta Special Province.

The coupon amount is 12.50% and a monitoring fee of Rp125 is paid every month. The guarantees given by PT WMU to the Company are payment guarantees, fiduciary accounts receivable, fiduciary inventory, corporate guarantee (including Cash Deficit Guarantee) from PT Widodo Makmur Perkasa (formerly Holding company).

The balance at the beginning of the year Nil. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp99,750. Receipt of loan payment in 2020 is Nil. Balance at December 31, 2020 amounting to Rp99,750.

e. PT Bondi Syad Mulia (PT BSM)

Based on the Deed of the Convertible Bond Sale and Purchase Agreement (SUK) of PT BSM Number No. 20 dated April 20, 2018, with a maximum value of Rp64,000 million and will mature on April 30, 2023, for the purpose of purchasing a factory and planning to transfer existing shares to the Company. As of December 31, 2020, the unredeemed / converted SUK balance is Rp27,000 with an interest rate of 13% per annum.

Based on the Loan Agreement No. 49 dated 24 August 2018, the Company signed an investment credit agreement with Bondi Syad Mulia with a total maximum principal amount of Rp25,000 to use the entire loan facility proceeds only for the purpose of purchasing new assets with an interest rate of 13% per annum with a loan period starting from the effective date until 23 August 2023.

As of December 31, 2019, PT Bondi Syad Mulia is still being consolidated by PT PPAK so that the beginning balance in the consolidated report amounting to Nil. In 2020, PT PPAK made changes to the bookkeeping method. The total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar nihil dan saldo awal yang tidak tercatat pada laporan konsolidasi 2019 sebesar Rp49.600. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp2.600. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp47.000.

balance of loan disbursements in 2020 was nil and the opening balance that was not recorded in the 2019 consolidated report was Rp49,600. Receipts from payments in the current year amounted to Rp2,600. The balance as of December 31, 2020 is Rp47,000.

f. PT Matoa Kidung Samudera (PT MKS)

Pada tanggal 22 Oktober 2018 dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Investasi No.16. Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp26.250 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT Matoa Kidung Samudera (PT MKS) mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan *refinancing* pengadaan KIP Matoa 1.

f. PT Matoa Kidung Samudera (PT MKS)

On 22 October 2018, the Investment Financing Cooperation Agreement No. 16 was carried out. The total principal amount of the loan facility is Rp26,250, which will mature on October 22, 2023 with an interest rate of 13.5% per annum. Purpose of Use of Financing Facilities PT Matoa Kidung Samudera uses any and all fund facilities for the purpose of refinancing the procurement of KIP Matoa 1.

Pada tanggal yang bersamaan Perusahaan dan PT MKS menandatangani perjanjian Modal Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja dilakukan Perjanjian No. 18 yaitu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp7.500 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun.

On the same date the Company and PT MKS signed the Agreement on Working Capital for Working Capital Financing Cooperation. 18 that is the Working Capital Financing Cooperation Agreement The total principal amount of the loan facility is Rp7,500 which will mature on October 22, 2023 with an interest rate of 13.5% per annum.

Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT Matoa Kidung Samudera untuk mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan modal kerja operasional PT MKS atas KIP Matoa 1.

Purpose of Using PT Matoa Kidung Samudera Financing Facility to use any and all fund facilities for the purpose of financing PT MKS operational working capital for KIP Matoa 1.

Pada 31 Desember 2019 PT Matoa Kidung Samudera masih konsolidasian oleh oleh PT PPAK. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan sehingga Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp38.859. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp38.859.

On December 31, 2019 PT Matoa Kidung Samudera was still being consolidated by PT PPAK. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method so that the balance at the beginning of 2020 was Nil. The total loan disbursement balance in 2020 is Rp38,859. Receipts from payments in the current year amounted to nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp38,859.

g. PT Matoa Kidung Bahtera (PT MKB)

Pada tanggal 22 Oktober 2018 dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Investasi No.17. Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp26.250 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT Matoa Kidung Bahtera (PT MKB) untuk mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan *refinancing* pengadaan KIP Matoa 2.

g. PT Matoa Kidung Bahtera (PT MKB)

On October 22, 2018, an Investment Funding Cooperation Agreement was signed with No.17. The total principal amount of the loan facility is Rp26,250 which will mature on October 22, 2023 with an interest rate of 13.5% per annum. Purpose of Using PT Matoa Kidung Bahtera (PT MKB) Financing Facility to use any and all fund facilities for financing the purpose of financing the procurement of Matoa KIP 2.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kemudian pada tanggal yang bersamaan Perusahaan dan PT MKB menandatangani perjanjian Modal Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja dilakukan Perjanjian No. 19 yaitu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp7.500 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT MKB untuk mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan modal kerja operasional PT MKB atas KIP Matoa 1.

Pada 31 Desember 2019 PT MKB masih konsolidasian oleh oleh PT PPAK. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan sehingga saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp35.746. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp35.746.

h. PT Wisarada Sarana Aviasi

Pada tanggal 7 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pengadaan Dan Pengoperasian Pesawat Fixed Wing BN-2T dengan No. PP-28/PPA/0818 bertujuan pengadaan dan pengoperasian Pesawat BN-2T.

Total pendanaan modal dengan limit maksimal sebesar Rp9.900, tingkat suku biaya pendanaan sebesar 14% per tahun yang jatuh tempo pokok pada tahun 2022.

Jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa fidusia atas Mesin Pesawat BN-2T dengan nilai obyek dan nilai penjaminan sebesar Rp9.543, fidusia atas Badan/Airframe Pesawat BN-2T dan kelengkapan lainnya dengan nilai obyek dan nilai pinjaman sebesar Rp3.181, fidusia atas tagihan WISE AIR dengan nilai obyek dan nilai penjaminan sebesar Rp9.279, dan pemberian jaminan pribadi.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp8.580. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp25.000. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp6.815 Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp26.765.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Then on the same date the Company and PT MKB signed the Agreement on Working Capital for Working Capital Financing Cooperation. 19 that is the Working Capital Financing Cooperation Agreement The total principal of the loan facility is Rp7,500 which will mature on October 22, 2023 with an interest rate of 13.5% per annum. Purpose of Using PT MKB Financing Facility to use any and all fund facilities for the purpose of financing PT MKB operational working capital for KIP Matoa 1.

On December 31, 2019 PT MKB was still being consolidated by PT PPAK. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method so that the balance at the beginning of 2020 was Nil. The total loan disbursement balance in 2020 is Rp35,746. Receipts from payments in the current year amounted to nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp35,746.

h. PT Wisarada Sarana Aviasi

On August 7, 2018, an Investment Cooperation Agreement was signed in the form of Procurement and Operation of BN-2T Fixed Wing Aircraft with No. PP-28 / PPA / 0818 aims to procure and operate BN-2T aircraft.

Total capital funding with a maximum ceiling of Rp9,900, the rate of funding costs is 14% per annum with a principal maturity in 2022.

Guarantee for the repayment of all debts, a guarantee is given in the form of fiduciary over the BN-2T aircraft engine with an object value and a guarantee value of Rp9,543, fiduciary over the BN-2T Aircraft Body / Airframe and other equipment with an object value and a loan value of Rp3,181, fiduciary over the WISE AIR bill with an object value and guarantee value of Rp9,279, and the provision of personal guarantees.

The balance at the beginning of the year is Rp8,580. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp25,000. Receipt of loan payment in 2020 is Rp6,815. Balance at December 31, 2020 amounting Rp26,765.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

i. PT Pratama Persada Airborne

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi Standby Loan No. PP-50/PPA/1217 pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp23.891 dengan tingkat suku bunga 15,3% per tahun dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman. Jatuh tempo pada 11 Desember 2022.

Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk membayar harga pembelian LIDAR Tipe ALS100. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi Standby Loan dengan No.PP-09/PPA/0818. Para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai nama Lidar dari semula Lidar Tipe ALS100 menjadi Leica Terrain Mapper.

Saldo awal pada tahun 2020 sebesar Rp22.665 total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar nihil penerimaan pembayaran ditahun berjalan sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp22.665.

j. PT Tropisindo Sumber Energi

Pada tanggal 22 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi nomor SU-10/PPA/1216 dengan limit sebesar Rp12.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) Sengak 1 dengan tingkat suku bunga 12,5% pper tahun (bersih) ditambah dengan insentif bunga yang dibayarkan secara tahunan.

Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Tropisindo Sumber Energi pada tanggal jatuh tempo surat utang. PT Tropisindo Sumber Energi belum melakukan penerbitan atas surat utang tersebut.

Selain Perjanjian Surat Utang Konversi PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman nomor PP-23/PPA/1216 tertanggal 22 Desember 2016 dengan limit sebesar Rp1.500. Perjanjian tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan untuk Pembayaran bunga surat utang konversi selama masa konstruksi / *Interest During Construction (IDC)*. Fasilitas

i. PT Pratama Persada Airborne

Based on the Standby Loan Investment Loan Agreement No. PP-50/PPA/1217 on December 12, 2017, the Company provided a Loan Facility in the form of a Standby Loan Investment Loan with a total maximum principal amount of Rp23,891 with an interest rate of 15.3% per annum and a provision fee of 0.5% of the loan facility. Due on December 11, 2022.

The purpose of using the loan facility is to pay for the purchase price of ALD100 LIDAR Type. Then on August 10, 2018 an addendum was made to the Amendment to the Standby Loan Investment Loan Agreement with No.PP-09 /PPA/0818. The parties agreed to change the provisions regarding the name Lidar from the original Lidar Type ALS100 to Leica Terrain Mapper.

The initial balance in 2020 is Rp22,665 total loan disbursement balance in 2020 amounting to zero payment receipts in the current year amounting to nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp22,665.

j. PT Tropisindo Sumber Energi

On December 22, 2016 PT Tropisindo Sumber Energi and the Company signed a Conversion Purchase Agreement for SU-10/PPA/1216 with a ceiling of Rp12,000 which will be used to finance the development of the Sengak Mini Hydro Power Plant (PLTMH) project 1 with an interest rate of 12.5% per annum (net) plus an interest incentive paid annually.

The notes have a period of 60 months from the effective date and can be converted into shares in PT Tropisindo Sumber Energi on the maturity date of the debt securities. PT Tropisindo Sumber Energi had not yet issued the bonds.

*In addition to the PT Tropisindo Sumber Energi Conversion Debt Securities Agreement and the Company has also signed a Loan Facility Provision Number PP-23 / PPA / 1216 dated December 22, 2016 with a ceiling of Rp1,500. The agreement is a facility provided by the Company for the payment of interest on convertible debt securities during the construction period/*Interest During Construction (IDC)*. The loan facility bears an interest rate of 12.5% per annum (net) with a*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 12,5% per tahun (bersih) dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 48 bulan sejak di tanda tangannya perjanjian. Pada tahun 2017, Pembangunan dan penyelesaian Proyek PLTMH Sengak-1 terhenti karena terjadi *cost overrun* dan eskalasi biaya, sehingga membutuhkan tambahan biaya dalam melanjutkan pembangunan proyek.

Pada tanggal 26 April 2019 Perusahaan dan PT Tropisindo Sumber Energi telah melakukan penandatanganan *Addendum* Perjanjian Jual Beli Surat Utang yang isi perjanjiannya antara lain a) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Surat Utang terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, b) Perubahan suku bunga Surat Utang dari 12,5% (bersih) menjadi 3,6%, c) PT Tropisindo Sumber Energi akan membayar sebesar Rp4.000 kepada Perusahaan secara bertahap yaitu Rp2.000 pada tanggal 30 April 2019 dan Rp2.000 pada tanggal 25 Agustus 2019.

Pembayaran tersebut digunakan pertama kali untuk melunasi utang pokok Perjanjian PP-23/PPA/1216 tertanggal 22 Desember 2016 dan selanjutnya digunakan untuk penebusan pokok Surat Utang. Sisa outstanding pokok senilai Rp9.438 akan dilunasi dalam jangka waktu 9 tahun sesuai dengan jadwal penebusan pokok surat utang.

Progress penyelesaian Proyek PLTMh Sengak I masih terhambat pada tahap finishing karena adanya pembatasan operasional waktu kerja selama pandemi Covid-19. Hingga akhir Desember 2020 pembangunan proyek telah mencapai 95,10%. Kondisi tersebut menyebabkan PT Tropisindo Sumber Energi belum memenuhi kewajiban jatuh tempo kepada Perusahaan serta kewajiban lanjutan lainnya.

Melalui surat No.0017/TSE/UM-PPA/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 PT Tropisindo Sumber Energi mengajukan permohonan untuk penggantian aset jaminan sehingga kewajiban lanjutan pengikatan jaminan dapat segera dipenuhi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

term of the loan facility for 48 months from the signing of the agreement. In 2017, the construction and completion of the Sengak-1 PLTMH Project was halted due to cost overrun and cost escalation, thus requiring additional costs in continuing the construction of the project.

On April 26, 2019 the Company and PT Tropisindo Sumber Energi signed the Addendum of the Purchase and Purchase of Debt Securities Agreement, which contains, among others, a) Extension of the term of the Debt Securities Agreement from December 22, 2016 to March 31, 2029, b) Changes in rates Debt interest from 12.5% (net) to 3.6%, c) PT Tropisindo Sumber Energi will pay Rp4,000 in stages to the Company in the amount of Rp2,000 on April 30, 2019 and Rp2,000 on August 25 2019.

The payment is used for the first time to pay off the principal debt of the PP-23 / PPA / 1216 Agreement dated December 22, 2016 and subsequently is used for the redemption of the principal of the Debt. Remaining outstanding principal amounting to Rp9,438 will be repaid within a period of 9 years in accordance with the principal redemption schedule debt securities.

The progress of the completion of the Sengak I PLTMh Project is still hampered at the finishing stage due to operational work time restrictions during the Covid-19 pandemic. Until the end of December 2020 the project development had reached 95.10%. This condition causes PT Tropisindo Sumber Energi to fail to meet its maturing obligations to the Company and other further obligations.

Through letter No.0017 / TSE / UM-PPA / XII / 2020 dated 17 December 2020 PT Tropisindo Sumber Energi submitted an application for replacement of collateral assets so that the continued obligation of the guarantee bond can be fulfilled immediately.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp9.438. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 adalah nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.438

The balance at the beginning of the year is Rp9,438. Total disbursement of loan in 2020 is nil. Receipt of loan payment in 2020 is nil. Balance at December 31, 2020 amounting to Rp9,438.

k. PT Pusaka Bumi Transportasi

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Pusaka Bumi Transportasi ("PT PBT") berupa Investasi pembelian dan perakitan truk dan/atau alat berat yang diproduksi oleh Kamaz-rusia dan Belaz-belaruzia. Skema perjanjian ini adalah dengan tiga skema; Penjualan Tunai, Proyek Pengangkutan dan penjualan dengan fasilitas pinjaman dari Perusahaan.

k. PT Pusaka Bumi Transportasi

The Company cooperates with PT Pusaka Bumi Transportasi ("PT PBT") in the form of investing in purchasing and assembling trucks and / or heavy equipment produced by kamaz-russia and Belaz-belaruzia. The scheme of this agreement is with three schemes; Cash Sales, Transportation Projects and sales with loan facilities from the Company.

Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dengan limit fasilitas Rp500.000. yang terdiri dari; Fasilitas pinjaman *Tranche A* berupa pinjaman modal kerja jangka pendek yang diberikan kepada PT PBT untuk pembiayaan pembelian dan perakitan truk dan/atau alat berat yang diperuntukan untuk dijual tunai. Fasilitas pinjaman *Tranche B* berupa pinjaman angsuran tetap yang diberikan kepada PT PBT untuk pembiayaan pembelian dan perakitan truk dan/atau alat berat yang diperuntukan untuk proyek pengangkutan hasil tambang, Fasilitas pinjaman *Tranche C* pinjaman yang diberikan untuk membeli truk dan/atau alat berat dari pabrikan.

The Company provides a loan facility with a facility limit of Rp500,000 which is consisting of; Tranche A loan facilities in the form of short-term working capital loans given to PT PBT for financing the purchase and assembly of trucks and / or heavy equipment intended for sale in cash. Tranche B loan facility in the form of fixed installment loans given to PT PBT for financing the purchase and assembly of trucks and/or heavy equipment intended for mining product transportation projects, Tranche C loan facilities provided to purchase trucks and/or heavy equipment from manufacturers.

Tingkat suku bunga untuk *Tranche A* dan *B* adalah sebesar 13 % dan akan jatuh tempo pada tahun 2022 sedangkan untuk *Tranche C* akan diatur dalam perjanjian terpisah.

The interest rates for Tranche A and B are 13% and will mature in 2022 while Tranche C will be arranged in a separate agreement.

Nilai Jaminan kewajiban PT PBT ditanggung oleh jaminan aktif berupa Fidusia truk dan atau alat berat dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp20.400.

The Collateral Value of PT PBT liabilities is covered by active collateral in the form of Fiduciary trucks and or heavy equipment with a value of mortgage of Rp20,400.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp10.706. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp65.334. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp76.040. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Nihil.

The balance at the beginning of the year is Rp10,706. Total disbursement of loan in 2020 amounting to Rp65,334. Receipt of loan payment in 2020 is Rp76,040. Balance at December 31, 2020 amounting to Nil.

l. Varia Intra Finance

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp160.000, karena jatuh tempo dalam 1(satu) tahun maka dipindahkan ke investasi jangka pendek.

l. Varia Intra Finance

The balance at the beginning of 2020 is Rp160,000, due to maturity in 1 (one) year, it was transferred to short-term investments.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

19. Investasi Jangka Panjang Lainnya

19. Other Long Term Investment

	2020 Rp	2019 Rp	
Surat Berharga - Surat Utang			Securities - Notes
PT Rejeki Intilogam Jaya	357,461	--	PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Duta Mentari Raya	115,600	--	PT Duta Mentari Raya
PT SIPPA Kemasan Internasional	95,901	--	PT SIPPA Kemasan Internasional
PT KNE Global Persada	49,477	49,477	PT KNE Global Persada
PT Asia Kaolinraya	15,000	15,000	PT Asia Kaolinraya
PT Ciptaindah Permata	10,000	10,000	PT Ciptaindah Permata
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	4,028	1,592	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
Jumlah Surat Berharga - Surat Utang	647,467	76,069	Total Securities - Notes
Surat Berharga - Lainnya			Securities - Others
PT Super Exim Sari	--	78,438	PT Super Exim Sari
Jumlah Surat Berharga - Lainnya	--	78,438	Total Securities - Others
Jumlah Investasi Jangka Panjang Lainnya	647,467	154,507	Total Other Long-Term Investments
Dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(100,691)	(51,567)	Less Allowance for Impairment Losses
Jumlah Investasi Jangka Panjang Lainnya - Bersih	546,776	102,940	Total Other Long Term Investments - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of loans are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	51,567	15,000	Balance at Beginning of The Year
Efek Perubahan menjadi Entitas Investasi	(36,567)	--	Effect of change to become Investment Entities
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	81,595	--	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan di Tahun Berjalan	4,096	36,567	Addition in Current Year
Pemulihan di Tahun Berjalan	--	--	Recovery in Current Year
Saldo Akhir Tahun	100,691	51,567	Balance at Ending of The Year

1. PT Duta Mentari Raya

PPAK memiliki Surat Utang dengan DMR sesuai perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian no. SU-02/PPAK/0216 tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 23 Februari 2020 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
2. Perjanjian no. SU-01/PPAK-DMR/0517 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp15.400 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 23 Mei 2023 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
3. Perjanjian no. SU-02/PPAK-DMR/1017 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp7.217 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).

1. PT Duta Mentari Raya

PPAK has debt securities with DMR in accordance with the following agreements:

1. Agreement no. SU-02/PPAK/0216 dated 23 February 2016 amounting to Rp15,000 with a period from the effective date to 23 February 2020 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
2. Agreement no. SU-01/PPAK-DMR/0517 dated 24 May 2017 amounting to Rp15,400 with a period from the effective date to 23 May 2023 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
3. Agreement no. SU-02 / PPAK-DMR / 1017 dated 24 October 2017 amounting to Rp7,217 with a period from the effective date to 31 December 2019 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

4. Perjanjian no. SU-03/PPAK-DMR/1217 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp745 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
5. Perjanjian no. SU-01/PPAK-DMR/0218 tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp2.534 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 28 Februari 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
6. Perjanjian no. SU-02/PPAK-DMR/0918 tanggal 26 September 2018 sebesar Rp1.604 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 25 September 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
7. Perjanjian no. SU-03/PPAK-DMR/1218 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp69.847 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 27 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
8. Perjanjian no. SU-02/PPAK-DMR/0119 tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp1.253 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 27 Januari 2024 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
9. Perjanjian no. SU-03/PPAK-DMR/0219 tanggal 7 Februari 2019 sebesar Rp2.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 6 Februari 2020 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).

Pada 31 Desember 2019 PT DMR masih konsolidasian oleh PT PPAK. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan sehingga saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp115.600.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Agreement no. SU-03 / PPAK-DMR / 1217 dated 27 December 2017 amounting to Rp745 with a period from the effective date to 31 December 2019 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
5. Agreement no. SU-01 / PPAK-DMR / 0218 dated 22 February 2018 amounting to Rp2,534 with a period from the effective date to 28 February 2019 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
6. Agreement no. SU-02 / PPAK-DMR / 0918 dated 26 September 2018 amounting to Rp1,604 with a period from the effective date to 25 September 2019 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
7. Agreement no. SU-03 / PPAK-DMR / 1218 dated 28 December 2018 amounting to Rp69,847 with a period from the effective date to 27 December 2019 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
8. Agreement no. SU-02 / PPAK-DMR / 0119 dated January 28, 2019 amounting to Rp1,253 with a period from the effective date to January 27, 2024 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
9. Agreement no. SU-03 / PPAK-DMR / 0219 dated 7 February 2019 amounting to Rp2,000 with a period from the effective date to 6 February 2020 which has an interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).

On December 31, 2019 PT DMR was still being consolidated by PT PPAK. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method so that the balance at the beginning of 2020 was Nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp35,746.

2. PT KNE Global Persada

PPAK memiliki Surat Utang Konversi ("SUK") dengan PT KNE Global Persada (KNE) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 86 tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu dari mulai tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2025, yang memiliki tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak). Realisasi surat utang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.500. Pada Januari dan Maret 2017 telah dilakukan pencairan atas sisa limit Surat Utang Konversi PT KNE sejumlah Rp3.500.

PPAK memiliki SUK kedua dengan PT KNE sesuai dengan Akta Perjanjian No. 59 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp12.600 dengan jangka waktu perjanjian satu tahun sejak tanggal efektif, yang memiliki tingkat suku bunga 11% per tahun (sudah termasuk pajak).

Perusahaan memiliki Surat Utang yang berasal dari pengalihan cession piutang Perusahaan dengan PT KNE Global Persada sesuai dengan Perjanjian No. PJ-08/PPAK/1218 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp21.826 dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Utang sampai dengan tanggal 28 Desember 2024, yang memiliki tingkat suku bunga 11% per tahun (sudah termasuk pajak).

PT PPAK memiliki tambahan surat utang dengan PT KNE sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Surat Utang No. 01 tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp102, dengan jangka waktu perjanjian satu tahun sejak tanggal efektif dan memiliki tingkat suku bunga 11% per tahun netto.

3. PT Asia Kaolinraya

PPAK memiliki SUK dengan PT Asia Kaolinraya (AKR) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 56 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Desember 2022 yang memiliki tingkat suku bunga 20% per tahun (tidak termasuk pajak). Pada tahun 2017, Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai investasi atas seluruh Surat Utang Konversi Perusahaan kepada PT AKR senilai Rp15.000.

2. PT KNE Global Persada

PPAK has a Convertible Bond ("SUK") with PT KNE Global Persada (KNE) in accordance with the Deed No. 86 dated 30 August 2016 amounting to Rp15,000 with a period starting from the effective date until 31 December 2025, which has an interest rate of 16% per annum (including tax). Actual debt securities as of December 31, 2016 amounted to Rp11,500. In January and March 2017, the remaining ceiling of PT KNE Convertible Bonds amounting to Rp3,500 was disbursed.

PPAK has a second SUK with PT KNE in accordance with the Deed No. 59 dated 26 May 2017 amounting to Rp12,600 with an agreement term of one year from the effective date, with an interest rate of 11% per annum (including tax).

The company has a debt securities originating from the transfer of accounts receivable cession PPA with PT KNE Global Persada in accordance with Agreement No. PJ-08 / PPAK / 1218 dated December 28, 2018 amounting to Rp21,826 with an agreement period starting from the issuance date of the Notes until December 28, 2024, which has an interest rate of 11% per annum (including tax).

PT PPAK has additional debt securities with PT KNE in accordance with the Bond Sale and Purchase Agreement No. 01 dated January 4, 2019 amounting to Rp102 with an agreement term of one year from the effective date and having an interest rate of 11% per net year.

3. PT Asia Kaolinraya

PPAK owns SUK with PT Asia Kaolinraya (AKR) in accordance with the Deed No. 56 dated 18 January 2016 amounting to Rp15,000 with a period from the effective date until 30 December 2022 which has an interest rate of 20% per annum (excluding tax). In 2017, the Company established an allowance for impairment of investment for all of the Company's Convertible Notes to PT AKR amounting to Rp15,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

4. PT Ciptaindah Permata

PPAK memiliki SUK dengan PT Ciptaindah Permata (CIP) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 90 tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp10.000 dengan jangka waktu 33 bulan, dengan tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak).

5. PT SIPPA Kemasan Internasional

PT SKI mengadakan perjanjian jual beli surat utang No. SU-01/SKI/0918 pada tanggal 26 September 2018 yang menjelaskan bahwa, PT SKI akan menerbitkan dan menjual surat utang kepada Perusahaan berupa surat utang dengan nilai dan tanggal penerbitan surat utang yang disesuaikan dengan kebutuhan dana oleh PT SKI dengan nilai total pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp206.750 dalam jangka waktu 8 tahun dengan nilai kupon sebesar 16% per tahun.

Pada tanggal 20 Juni 2020 telah dilakukan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang Kupon sebesar Rp19.139 menjadi Surat Utang baru.

Pada tanggal 28 Juli 2020 PPAK melakukan pembelian surat utang PT SKI sebesar Rp517 dan surat utang tersebut dilunasi sebesar Rp517 pada tanggal 23 November 2020. Pada tanggal 14 Desember 2020 Perusahaan melakukan pembelian surat utang PT SKI sebesar Rp541, sehingga Nilai Surat Berharga – Surat Utang pada PT SKI pada 31 Desember 2020 sebesar Rp95.900.

Pada 31 Desember 2019 PT SKI masih konsolidasian oleh PT PPAK. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan sehingga saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp95.901.

6. PT Rejeki Intilogam Jaya

PPAK telah mengambil alih utang PT RILJ kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp357.586 berdasarkan Akta Perjanjian Utang Piutang No. 39 tanggal 27 Maret 2019. Atas hal tersebut utang PT RILJ kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk beralih menjadi utang kepada Perusahaan (novasi kredit). Jangka waktu angsuran sampai dengan tahun 2028 dengan tingkat suku bunga 5,88%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Ciptaindah Permata

PPAK owns SUK with PT Ciptaindah Permata (CIP) in accordance with the Deed No. 90 dated 29 March 2016 amounting to Rp10,000 with a period of 33 months, with an interest rate of 16% per annum (including tax).

5. PT SIPPA Kemasan Internasional

PT SKI entered into a debt sale and purchase agreement No. SU-01 / SKI / 0918 on September 26, 2018 which explains that, PT SKI will issue and sell debt securities to the Company in the form of debt securities with a value and date of issuance of debt securities that are adjusted to the needs of funds by PT SKI with a total loan value as high as amounting to Rp206,750 over a period of 8 years with a coupon value of 16% per annum.

On June 20, 2020, there was a restructuring of the Coupon debt repayment obligation amounting to Rp19,139 to become new Notes.

On July 28, 2020, PPAK purchased PT SKI debt securities amounting to Rp517 and the bonds were repaid in the amount of Rp517 on November 23, 2020. On December 14, 2020 the Company purchased PT SKI debt securities for Rp541, so that the Securities PT SKI on December 31, 2020, amounting to Rp95,900

On December 31, 2019 PT SKI was still being consolidated by PT PPAK. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method so that the balance at the beginning of 2020 was Nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp95,901.

6. PT Rejeki Intilogam Jaya

PPAK has taken over the debt of PT RILJ to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp357,586 based on the Deed No. 39 dated 27 March 2019. For this reason, PT RILJ's debt to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has turned into a debt to the Company (credit novation). The installment period is until 2028 with an interest rate of 5.88%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 21 Juli 2020 dan 18 Agustus 2020, PT RILJ membayar sebagian utang masing-masing sebesar Rp63, sehingga Nilai Surat Berharga – Surat Utang pada PT RILJ pada 31 Desember 2020 sebesar Rp357.461.

Pada 31 Desember 2019 PT RILJ masih konsolidasian oleh PT PPAK. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan sehingga saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp357.461.

7. PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah melaksanakan perusahaan Jalan Tol Kunciran - Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan- ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT NK memiliki saham sebanyak 442.680 lembar saham senilai Rp4.028 dan persentase kepemilikan sebesar 0,32%. Aset ini dikelompokkan ke dalam aset yang tersedia untuk dijual.

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2020, PT NK melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp2.437 atau sebesar 0.32% total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Jasamarga Kunciran Cengkareng perihal permohonan tambahan setoran modal. Sehingga pada 31 Desember 2020, saldo investasi jangka panjang setelah pembayaran tambahan setoran modal adalah sebesar Rp4.028.

20. Investasi pada Efek Ekuitas

PT PPAK

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 2.ab., mulai tahun 2020, PT PPAK memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasian, oleh karena itu, PT PPAK tidak lagi mengkonsolidasi dan diharuskan untuk mencatat investasinya di entitas anak pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On July 21, 2020 and August 18, 2020, PT RILJ paid a portion of the debt amounting to Rp63 each, so that the Value of Securities - Debt Securities with PT RILJ on December 31, 2020 was Rp357,461.

On December 31, 2019 PT RILJ was still being consolidated by PT PPAK. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method so that the balance at the beginning of 2020 was Nil. The balance as of December 31, 2020 is Rp357,461.

7. PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng is a company whose business activities are to carry out the exploitation of the Kunciran - Cengkareng Toll Road, which includes funding, engineering planning, construction, operation and maintenance of toll roads, as well as other efforts in accordance with the provisions and laws and regulations applies.

PT NK owns 442,680 shares valued at Rp4,028 and the ownership percentage is 0.32%. These assets are grouped into assets available for sale.

In the period from January to December 2020, PT NK paid an additional capital injection to PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp2,437 or 0.32% of the total shares issued based on a letter from PT Jasamarga Kunciran Cengkareng regarding a request for additional capital injection. So that on December 31, 2020, the long-term investment balance after the additional paid-in capital is Rp4,028.

20. Investment in Equity Securities

PT PPAK

As explained in note 2.ab., starting from 2020, PT PPAK has met the requirements as a qualifying investment entity, and therefore, PT PPAK are no longer consolidated and required to record its investment in subsidiaries at fair value through the profit or loss (FVTPL).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Nilai Tercatat/ 1 Januari 2020/ Carrying Value January 1, 2020 Rp	Nilai Wajar 1 Januari 2020 (saat perubahan status menjadi entitas investasi)/ Fair Value January 1, 2020 (when the status changes to an investment entities) Rp	Perbedaan/ Difference Rp	
Efek dekonsolidasi terhadap ekuitas sebagai akibat PPAK memenuhi kualifikasi sebagai entitas investasi				Deconsolidation effect on equity as a result of PPAK met qualification as an investment entities
PT Bondi Syad Mulia	37,000	71,000	34,000	PT Bondi Syad Mulia
PT Matoa Kidung Samudera	18,750	13,385	(5,365)	PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera	18,750	16,650	(2,100)	PT Matoa Kidung Bahtera
PT Duta Mentari Raya	33,054	--	(33,054)	PT Duta Mentari Raya
PT Magnesium Gosari Internasional	51,000	25,351	(25,649)	PT Magnesium Gosari Internasional
PT SIPPA Kemasan Internasional	5,078	--	(5,078)	PT SIPPA Kemasan Internasional
PT Rejeki Intilogam Jaya	6,000	2	(5,998)	PT Rejeki Intilogam Jaya
Total	169,632	126,388	(43,244)	Total

PT PPAK mencatat jumlah perbedaan nilai tercatat dan nilai wajar investasi saat perubahan status menjadi entitas investasi sebagai pendapatan (beban) lain-lain. (Catatan 39)

PT PPAK records the difference between the carrying value and the fair value of the investment when the status changes to an investment entity as other income (expense). (Note 39)

a. Investasi pada Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi

a. Investments in Unconsolidated Subsidiaries

	Nilai Wajar 1 Januari 2020 (saat perubahan status menjadi entitas investasi)/ Fair Value January 1, 2020 (when the status changes to an investment entities) Rp	Nilai Wajar 31 Desember 2020/ Fair Value December 31, 2020 Rp	Perbedaan/ Difference Rp	
PT Bondi Syad Mulia	71,000	83,945	12,945	PT Bondi Syad Mulia
PT Matoa Kidung Samudera	13,385	14,378	993	PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera	16,650	17,439	789	PT Matoa Kidung Bahtera
PT Duta Mentari Raya	--	--	--	PT Duta Mentari Raya
PT Magnesium Gosari Internasional	25,351	48,427	23,076	PT Magnesium Gosari Internasional
PT SIPPA Kemasan Internasional	--	--	--	PT SIPPA Kemasan Internasional
PT Rejeki Intilogam Jaya	2	2	--	PT Rejeki Intilogam Jaya
Total	126,388	164,191	37,803	Total

Pada tahun 2020, PT PPAK mencatat jumlah perbedaan nilai wajar investasi sebagai bagian dari keuntungan atas investasi pada efek ekuitas (Catatan 36)

In 2020, PT PPAK recorded the difference in the fair value of the investment as part of the gain on investment in equity securities (Notes 36).

b. Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi

b. Investment in Joint Ventures and Associates

	Nilai Tercatat/ 1 Januari 2020/ Carrying Value January 1, 2020 Rp	Nilai Wajar 1 Januari 2020 (saat perubahan status menjadi entitas investasi)/ Fair Value January 1, 2020 (when the status changes to an investment entities) Rp	Perbedaan/ Difference Rp
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	4,846	7,062	2,216
PT National Utility Helicopters	32,209	31,958	(251)
	37,055	39,020	1,965

PT PPAK mencatat jumlah perbedaan nilai tercatat dan nilai wajar investasi saat perubahan status menjadi entitas investasi sebagai pendapatan (beban) lain-lain (Catatan 39).

PT PPAK records the difference between the carrying value and the fair value of the investment when the status changes to an investment entity as other income (expense) (Notes 39).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Nilai Wajar 1 Januari 2020 (saat perubahan status menjadi entitas investasi)/ Fair Value January 1, 2020 (when the status changes to an investment entities) Rp	Nilai Wajar 31 Desember 2020/ Fair Value December 31, 2020 Rp	Perbedaan/ Difference Rp
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	7,062	5,894	(1,168)
PT National Utility Helicopters	31,958	50,541	18,583
	39,020	56,435	17,415

Pada tahun 2020, PT PPAK mencatat jumlah perbedaan nilai wajar investasi sebagai bagian dari keuntungan atas investasi pada efek ekuitas (Catatan 36).

In 2020, PT PPAK recorded the difference in the fair value of the investment as part of the gain on investment in equity securities (Note 36).

2019						
		Nilai Penyertaan			Nilai Penyertaan	
		Awal/ Beginning Participation Amount	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Disposal)	Bagian Laba 2019/ Profit Portion 2019	Pembagian Laba/ Profit Share 2019	Akhir/ Ending Participation Amount
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	94.17	11,591	(2,500)	1,682	(1,883)	8,890
		11,591	(2,500)	1,682	(1,883)	8,890

Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama antara PT PPAK dengan PT Rumah Cerdas No. 52 tanggal 19 Februari 2016, Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, dibentuklah suatu Ventura Bersama antara PT PPA Kapital dengan PT Rumah Cerdas, dimana ventura bersama ini melaksanakan pembangunan dan penyelesaian Proyek Mutiara Java Regency yaitu berupa bangunan hunian dan/atau komersial beserta dengan sarana dan prasarannya untuk ditawarkan dan dijual kepada konsumen. Pada tanggal 19 Februari 2016, PT PPAK melakukan penyeteroran modal sebesar Rp9.700 dengan persentase kepemilikan sebesar 94,17%.

Pada tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ventura Bersama PPAK RC No.S- 351/PPAK/DIR/0919 tanggal 10 September 2019 Ventura Bersama PPAK RC melakukan penarikan modal sebesar Rp2.500.

Berdasarkan Surat Pembagian Laba Ventura Bersama PPAK RC No. S-927/KSOPPAKRC/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, Ventura Bersama PPAK RC membagikan laba sebesar Rp1.883.

Joint Venture PPAK Rumah Cerdas

Based on the Deed of Cooperation Agreement between PT PPAK and PT Rumah Pintar No. 52 dated 19 February 2016, Notary Mala Mukti, SH, LL.M, Notary in Jakarta, formed a Joint Venture between PT PPA Kapital and PT Rumah Pintar, where this joint venture carries out the construction and completion of the Mutiara Java Regency Project, namely in the form of residential buildings and / or commercial along with its facilities and infrastructure to be offered and sold to consumers. On February 19, 2016, PT PPAK paid in capital amounting to Rp9,700 with an ownership interest of 94.17%.

In 2019, based on the Joint Venture Decree PPAK RC No.S- 351/PPAK/DIR/0919 dated September 10, 2019, the PPAK RC Joint Venture made a capital withdrawal of Rp2,500.

Based on the Joint Venture Profit Sharing Letter of PPAK RC No. S-927/KSOPPAKRC/III/2019 dated March 14, 2019, PPAK RC Joint Venture distributed a profit of Rp1,883.

Pada tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan No.S-165/PPAK/DIR/0620 tanggal 12 Juni 2020 PT PPAK melakukan penarikan modal sebesar Rp2.354.

PT National Utility Helicopter

PT PPAK membeli sebanyak 31.551 lembar saham atau 18,43% saham kepemilikan PT National Helicopter (PT NUH) milik PT Dinamika Danatama Dirgantara dengan nilai Rp31.551 pada tanggal 24 Januari 2020 dan PT PPAK membeli sebanyak 11.260 lembar saham kepemilikan PT National Helicopter (PT NUH) milik PT Dinamika Danatama Dirgantara dengan nilai Rp11.260 pada tanggal 30 Juli 2020, berdasarkan Akta Notaris Rismalena Kasri, SH nomor 6 tanggal 24 Januari 2020 dan nomor 9 tanggal 30 Juli 2020 serta telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.-0044181.

c. Pengukuran Nilai Wajar (Level 2)

Perhitungan metode nilai wajar menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan nilai aktiva bersih

PT PPAK menggunakan nilai tercatat aktiva bersih pada perusahaan investasi dalam menentukan nilai investasi mereka. Investasi yang dinilai dengan menggunakan pendekatan ini, umumnya hanya berlaku untuk entitas (entitas dimana Grup melakukan investasi) yang memiliki pos-pos dalam laporan keuangan di mana nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan

PT PPAK menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan (analisa arus kas terdiskonto (DCF) dan pendekatan pasar (berdasarkan pada beberapa pasar dari perusahaan sejenis) untuk mengestimasi nilai wajar dari investasi tersebut. Pendekatan pasar digunakan untuk memeriksa kembali nilai estimasi berdasarkan analisa DCF.

Pada tahun 2020, nilai wajar investasi pada efek ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Iskandar & Rekan dan KJPP Herman Meirizky & Rekan (terdaftar di OJK).

In 2020, based on Decree No.S-165/ PPAK /DIR/0620 dated 12 June 2020, PT PPAK made a capital withdrawal of Rp2,354.

PT National Utility Helicopter

PT PPAK purchased 31,551 shares or 18.43% ownership shares of PT National Helicopter (PT NUH) owned by PT Dinamika Danatama Dirgantara with a value of Rp31,551 on January 24, 2020 and PT PPAK purchased 11,260 shares of ownership of PT National Helicopter (PT NUH) owned by PT Dinamika Danatama Dirgantara with a value of Rp11,260 on July 30, 2020, based on the Notary Deed of Rismalena Kasri, SH number 6 dated January 24, 2020 and number 9 dated July 30, 2020 and has been approved by the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03.-0044181.

c. Fair Value Measurement (Level 2)

The calculation of the fair value method uses the following approaches:

Approach to net asset value

PT PPAK uses the carrying value of the net assets of investment companies in determining the value of their investments. Investments that are valued using this approach generally only apply to entities (entities in which the Group invests) that have items in the financial statements where their carrying values approximate their fair values.

Market approach and income approach

PT PPAK uses two approaches, namely the income approach (discounted cash flow analysis (DCF) and the market approach (based on several markets from similar companies) to estimate the fair value of the investment. The market approach is used to re-examine the estimated value based on the DCF analysis.

In 2020, The fair value of investment equity securities as of December 31, 2020 is estimating based on market value method based on valuation report of KJPP Jimmy Prasetyo & Partners and KJPP Herman Meirizky & Partners (registered in OJK).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

21. Aset Tetap

21. Fixed Assets

2020							
1 Januari / January 1	Dampak Dekonsolidasi/ The Impact of Deconsolidation	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	31 Desember/ December 31	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:							Acquisition Cost:
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership
Tanah	699,658	(290,387)	--	--	(29,150)	--	Lands
Bangunan	333,618	(225,655)	--	--	29,682	--	Buildings
Kendaraan Bermotor	17,591	(8,669)	208	--	--	--	Vehicles
Peralatan Proyek	614,373	(440,511)	--	--	--	--	Project Equipments
Peralatan Kantor	32,235	(5,008)	216	(66)	--	--	Office Equipments
Prasarana umum	12,895	(10,681)	--	--	--	--	Asset in Progress
Aset dalam penyelesaian	173,537	(145,095)	16,408	--	(29,682)	--	Assets in settlement
Jumlah	1,883,907	(1,126,006)	16,832	(66)	(29,150)	--	Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	82,064	(46,238)	9,660	--	--	--	Buildings
Kendaraan Bermotor	11,562	(6,239)	939	--	--	--	Vehicles
Peralatan Proyek	207,990	(123,801)	--	(66)	--	--	Project Equipments
Peralatan Kantor	19,954	(2,849)	27,830	--	--	--	Office Equipments
Prasarana umum	5,541	(5,531)	--	--	--	--	Public Infrastructure
Jumlah	327,111	(184,658)	38,429	(66)	--	--	Total
Nilai Tercatat	1,556,796					564,701	Carrying Value
2019							
1 Januari / January 1	Penambahan dari akuisisi Entitas Anak/ Addition from Acquisition of Subsidiaries	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	31 Desember/ December 31	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:							Acquisition Cost:
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership
Tanah	668,762	--	14,383	16,512	--	--	Lands
Bangunan	160,139	124,945	52,718	8,052	--	(12,236)	Buildings
Kendaraan Bermotor	19,800	3,352	533	(2,100)	(7,343)	3,350	Vehicles
Peralatan Proyek	327,173	197,549	54,087	(7,459)	(21,208)	64,231	Project Equipments
Peralatan Kantor	23,823	972	3,753	5,545	(2,343)	485	Office Equipments
Prasarana umum	12,895	--	--	--	--	--	Asset in Progress
Aset dalam penyelesaian	44,592	--	123,171	20,598	(14,824)	--	Assets in settlement
Jumlah	1,257,184	326,818	248,645	41,148	(45,718)	55,830	Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	39,281	25,873	17,759	(1,378)	--	528	Buildings
Kendaraan Bermotor	14,673	2,767	1,285	(766)	(7,343)	946	Vehicles
Peralatan Proyek	113,003	55,160	51,790	2,153	(21,208)	7,093	Project Equipments
Peralatan Kantor	18,510	838	2,408	1,278	(2,343)	(737)	Office Equipments
Prasarana umum	3,673	--	2,437	(617)	--	48	Public Infrastructure
Jumlah	189,140	84,638	75,678	670	(30,894)	7,830	Total
Nilai Tercatat	1,068,044					1,556,796	Carrying Value

Perusahaan

Aset yang dinilai milik Perusahaan berupa Tanah dan Bangunan Gudang dengan total luas LT/LB +/- 576/406,5 m disertai sarana pelengkap yang terletak di Jalan Tekno 1 Kav C 2 I, Kelurahan Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Bangunan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.000 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance).

The Company

Assets rated by the Company in the form of Land and Warehouse Building with a total area of LT / LB + - 576 / 406.5 m accompanied by complementary facilities located on Jalan Tekno 1 Kav C 2 I, Pasir Gombang Village, North Cikarang Subdistrict, Bekasi Regency, West Java Province.

Building and vehicle are insured with of coverage value amounting to Rp2,000 against the risk of fire accident and others to PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 2019.

PT NK

PT NK melakukan reklasifikasi atas aset tetap berupa tanah ke properti investasi atas tanah yang terletak di Jl. PH Mustofa, Bandung dan tanah yang terletak di Jl. Rancabolang, sebesar Rp29.150 (Catatan 16).

Aset tetap berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 26).

Bangunan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp133.272 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, dan PT Asuransi Jasa Tania.

Akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp37.371 dan Rp32.827 yang dialokasikan ke beban pokok pendapatan serta beban administrasi dan umum.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 2019.

22. Goodwill

Sejak tahun 2020, PT PPAK tidak lagi melakukan konsolidasi atas entitas anak sebagai konsekuensi atas Perusahaan telah memenuhi kualifikasi sebagai entitas investasi.

Pada tahun 2019, PT PPAK melakukan akuisisi atas PT MKS, PT MKB dan PT RILJ sehingga mendapatkan goodwill dengan rincian sebagai berikut:

	2019 Rp
Perusahaan yang Diakuisisi	
PT MKS	10,522
PT MKB	3,124
PT RILJ	356,611
Jumlah	370,257

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on Management review, there are no events or changes in circumstances indicating impairment of fixed asset, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

PT NK

PT NK reclassified their fixed asset into investments properties, i.e land which located in Jl. PH Mustofa, Bandung and land which located in Jl. Rancabolang, Surabaya amounting to Rp29,150 (Note 16).

Fixed asset, such as land and building, are used as collateral for bank loans in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 26).

Building and vehicle are insured with of coverage value amounting to Rp133,272 against the risk of fire accident and others to PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, and PT Asuransi Jasa Tania.

Depreciation expenses up to December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp37,371 and Rp32,827 respectively, which were allocated to cost of revenues and general and administrative expenses.

Based on Management review, there are no events or changes in circumstances indicating impairment of fixed asset, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

22. Goodwill

Since 2020, PT PPAK has no longer consolidated its subsidiaries as a consequence of the Company having met the qualifications as an investment entity.

In 2019, PT PPAK acquired PT MKS, PT MKB and PT RILJ to obtain goodwill with the following details:

Company Acquisition
PT MKS
PT MKB
PT RILJ
Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT MKS

PT PPAK mengakuisisi PT MKS tanggal 23 Januari 2019. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PT MKS pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan Kas yang Dibayar	18,750
Dikurangi Saldo Kas yang Diperoleh:	
Kas	(3,149)
Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi	15,601
Harga Perolehan	
Kas yang Dibayar	18,750
Imbalan Kontinjensi	--
Jumlah Imbalan yang Dialihkan	18,750
Nilai Wajar Kepemilikan PT MKS	
Sebelum Kombinasi Bisnis	--
Jumlah Imbalan	18,750
Nilai Wajar diakui pada akuisisi	
Kas dan Setara Kas	3,149
Aset Lancar Lainnya	7,722
Aset Tetap	53,754
Aset tidak lancar lainnya	--
Liabilitas Jangka Pendek	(8,635)
Liabilitas Jangka Panjang	(42,278)
Jumlah Aset Teridentifikasi, Bersih	13,712
Kepentingan Non-Pengendali	(5,485)
Goodwill	10,522
Jumlah Imbalan	18,749

Aset neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya.

PT MKB

PT PPAK mengakuisisi PT MKB tanggal 23 Januari 2019. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PT MKB pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan Kas yang Dibayar	18,750
Dikurangi Saldo Kas yang Diperoleh:	
Kas	(455)
Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi	18,295
Harga Perolehan	
Kas yang Dibayar	18,750
Imbalan Kontinjensi	--
Jumlah Imbalan yang Dialihkan	18,750
Nilai Wajar Kepemilikan PT MKB	
Sebelum Kombinasi Bisnis	--
Jumlah Imbalan	18,750
Nilai Wajar diakui pada akuisisi	
Kas dan Setara Kas	455
Aset Lancar Lainnya	10,207
Aset Tetap	53,694
Aset tidak lancar lainnya	--
Liabilitas Jangka Pendek	(12,063)
Liabilitas Jangka Panjang	(26,250)
Jumlah Aset Teridentifikasi, Bersih	26,042
Kepentingan Non-Pengendali	(10,417)
Goodwill	3,124
Jumlah Imbalan	18,749

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT MKS

PT PPAK acquired PT MKS on 23 January 2019. The fair values of PT MKS identifiable assets and liabilities at the acquisition date are as follows:

Benefits Cash Paid	
Less Cash Obtained	
Cash	
Cash Flow Out - Investing Activities	
Acquisition Cost	
Cash Paid	
Contingency Benefits	
Total Transferable Benefits	
Fair Value of Ownership of PT MKS	
before Business Combination	
Total Benefits	
Cash & Cash Equivalent	
Other Current Assets	
Fixed Assets	
Non Current Assets	
Short-term Liabilities	
Long-term Liabilities	
Identified Assets, Net	
Non-Controlling Interest	
Goodwill	
Total Benefits	

Net assets recognized in the consolidated financial statements as of December 31, 2019 are based on an assessment of their fair value.

PT MKB

PT PPAK acquired PT MKB on 23 January 2019. The fair values of PT MKB's identifiable assets and liabilities at the acquisition date are as follows:

Benefits Cash Paid	
Less Cash Obtained	
Cash	
Cash Flow Out - Investing Activities	
Acquisition Cost	
Cash Paid	
Contingency Benefits	
Total Transferable Benefits	
Fair Value of Ownership of PT MKN	
before Business Combination	
Total Benefits	
Cash & Cash Equivalent	
Other Current Assets	
Fixed Assets	
Non Current Assets	
Short-term Liabilities	
Long-term Liabilities	
Identified Assets, Net	
Non-Controlling Interest	
Goodwill	
Total Benefits	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Aset neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya.

PT RILJ

PT PPAK mengakuisisi PT RILJ tanggal 22 Maret 2019. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PT RILJ pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan Kas yang Dibayar	6,000
Dikurangi Saldo Kas yang Diperoleh:	--
Kas	(5,166)
Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi	834
Harga Perolehan	
Kas yang Dibayar	6,000
Imbalan Kontinjensi	--
Jumlah Imbalan yang Dialihkan	6,000
Nilai Wajar Kepemilikan PT RILJ	
Sebelum Kombinasi Bisnis	--
Jumlah Imbalan	6,000
Nilai Wajar diakui pada akuisisi	
Kas dan Setara Kas	5,166
Aset Lancar Lainnya	6,432
Aset Tetap	183,913
Aset tidak lancar lainnya	8,944
Liabilitas Jangka Pendek	(579,774)
Liabilitas Jangka Panjang	(101,509)
Jumlah Aset Teridentifikasi, Bersih	(476,828)
Kepentingan Non-Pengendali	126,218
Goodwill	356,610
Jumlah Imbalan	6,000

Aset neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Net assets recognized in the consolidated financial statements as of December 31, 2019 are based on an assessment of their fair value.

PT RILJ

PT PPAK acquired PT RILJ on March 22, 2019. The fair values of PT RILJ's identifiable assets and liabilities at the acquisition date are as follows:

Benefits Cash Paid	
Less Cash Obtained	
Cash	
Cash Flow Out - Investing Activities	
Acquisition Cost	
Cash Paid	
Contingency Benefits	
Total Transferable Benefits	
Fair Value of Ownership of PT MKN before Business Combination	
Total Benefits	
Cash & Cash Equivalent	
Other Current Assets	
Fixed Assets	
Non Current Assets	
Short-term Liabilities	
Long-term Liabilities	
Identified Assets, Net	
Non-Controlling Interest	
Goodwill	
Total Benefits	

Net assets recognized in the consolidated financial statements as of December 31, 2019 are based on an assessment of their fair value.

23. Cessie Piutang

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Cessie Piutang Jangka Pendek</u>		
Cessie Piutang PT Batam Islands Marina		
ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	243,000	243,000
Cessie Piutang KPR		
ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	38,269	41,535
Subtotal	281,269	284,535
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(156,199)	(2,436)
Jumlah	125,070	282,099
<u>Cessie Piutang Jangka Panjang</u>		
Cessie Piutang PT Ade Textile Industries		
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	288,924	259,535
Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure		
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29,390	23,958
Subtotal	318,314	283,493
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(70,873)	--
Jumlah	247,441	283,493

23. Cessie Receivables

<u>Short-term Cessie Receivables</u>	
Cessie Receivable of PT Batam Islands Marina	
ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
Cessie Receivable of KPR (Mortgage)	
ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
Subtotal	
Less: Allowance for Impairment Losses	
Total	
<u>Long-Term Cessie Receivable</u>	
Cessie PT Ade Textile Industries	
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Cessie Receivable of PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk	
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Subtotal	
Less: Allowance for Impairment Losses	
Total	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal Tahun	(2,436)	(1,843)
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	(224,732)	--
Penambahan di Tahun Berjalan	(845)	(593)
Pemulihan di Tahun Berjalan	941	--
Saldo Akhir Periode	(227,072)	(2,436)

Cessie Piutang KPR Ex Debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

- Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No.72 tanggal 21 Desember 2018 dan No.104 tanggal 28 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") menjual piutang nasabah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada Perusahaan, dengan harga jual masing-masing sebesar Rp31.143 dan Rp16.302.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang Nomor 105 tanggal 28 Desember 2018 di depan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dinyatakan bahwa dalam penyelesaian transaksi aset yang dialihkan tersebut, mekanisme yang dilakukan yaitu:
 - Melakukan eksekusi aset yang merupakan jaminan atas piutang sesuai dengan Perjanjian Kredit;
 - Menjual aset yang dijaminkan tersebut kepada pihak ketiga;
 - Menerima pelunasan dari Debitur.

Cessie Piutang PT BIM Ex Debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No 115 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan membeli piutang BTN kepada PT Batam Island Marina (PT BIM). Jumlah piutang yang dialihkan sebesar Rp300.669, dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman sebesar Rp243.000
- Tunggakan Bunga dari bunga berjalan sebesar Rp56.352
- Tunggakan denda dari denda berjalan sebesar Rp1.317

Berdasarkan Akta Cessie Piutang No. 116 tanggal 31 Desember 2018, BTN dan Perusahaan mengefektifkan pengalihan piutang tersebut beserta seluruh hak-hak yang melekat pada piutang berdasarkan syarat dan kondisi dalam Akta Cessie Bank BTN dan Perusahaan sepakat bahwa jual beli piutang berdasarkan akta jual beli ini dilakukan dengan harga Rp243.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The movements in allowance for impairment losses of loans are as follows:

Cessie Receivable KPR Ex Debtor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

- Based on the Deed of Sale and Purchase No.72 dated December 21, 2018, and No.104 dated December 28, 2018. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") sold Mortgage receivables (KPR) to the Company, with selling price amounting to Rp31,143 and Rp16,302.
- Based on the Deed of Debt Management Cooperation Agreement Number 105 dated December 28, 2018 in front of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., stated that in the settlement of the transferred asset transaction, the mechanism carried out is:
 - Carry out assets which are collateral for accounts receivable in accordance with the Credit Agreement;
 - Sell the collateral assets to third parties;
 - Receiving repayments from the Debtor.

Cessie Receivables PT BIM Ex Debtor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Based on the Receivable Sale and Purchase of Receivable Deed No. 115 dated December 31, 2018, The Company purchased BTN receivables from PT Batam Island Marina (PT BIM). The amount of receivables transferred amounted to Rp300,669, with details as follows:

- The loan principal is Rp243,000
- Interest from current period amounting to Rp56,352
- Fines from current period amounting to Rp1,317

Based on the Cessie Receivable Deed No. 116 dated December 31, 2018, BTN and the Company make effective the transfer of the receivables along with all rights attached to the receivables based on the terms and conditions in the Cessie Deed. BTN and the Company agree that the sale and purchase of receivables based on the Sale and Purchase Deed is carried out at Rp243,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kemudian berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelola Piutang No. 117 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menunjuk BTN sebagai pengelola piutang tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018.

Kemudian dilakukan Addendum No. 11 Pada tanggal 8 April 2020 atas Perjanjian Kerjasama Pengelola hutang yang merubah jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2020 dan tata cara penerimaan dan Penggunaan Dana Hasil Koleksi dari Bank BTN.

Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan telah mengambil alih piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk sebesar USD1,720,046.

Pada hari yang sama juga ditandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk yang berisi restrukturisasi hutang atas pengambilalihan piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan pembiayaan modal kerja dengan limit sebesar USD1,279,953.36 dengan tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 6% per tahun.

Cessie Piutang PT Ade Textile Industries

Perusahaan mengambil alih piutang bank mandiri kepada PT Ade Textile Industries ("PT Adetex") serta seluruh hak bank mandiri berdasarkan perjanjian kredit bank mandiri termasuk jaminan telah dialihkan kepada Perusahaan berdasarkan perjanjian pengalihan piutang (cessie) Nomor 38 dibuat di hadapan Adrian Juani, Notaris di Jakarta tertanggal 20 Desember 2019. Jumlah Keseluruhan pengalihan hutang pokok PT Adetex kepada Perusahaan adalah sejumlah USD18,526,367.

Pada Tanggal 20 Desember 2019 telah ditandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang Nomor 44 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak S.H., Notaris di Jakarta termasuk penambahan fasilitas modal kerja sejumlah USD3,900,000.

Tujuan penambahan fasilitas modal kerja adalah untuk kebutuhan modal kerja perusahaan dan perbaikan / penggantian fasilitas produksi yang rusak. Tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 5% per tahun. Jaminan yang diberikan kepada Perusahaan adalah berupa jaminan tanah bangunan, jaminan fidusia persediaan, piutang dan mesin-mesin serta peralatan lainnya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Then based on the Deed of Collaboration Management No. 117 dated December 31, 2018, the Company appoints BTN as the manager of the receivables for one year period of starting from December 31, 2018.

Then do Addendum No. 11 On April 8, 2020, the Agreement between the Managing Debt Managers which changed the maturity date to December 31, 2020 and the procedures for receiving and using Collection Funds from Bank BTN.

Cessie Receivables PT Primarindo Asia Infrastructure

On December 20, 2019, the Company took over the receivables from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk in the amount of USD1,720,046.

On the same day the PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk Debt Restructuring Agreement was signed, which contained debt restructuring for the takeover of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk debt and working capital financing with a limit USD1,279,953.36 with an applicable interest rate of 6 % per annum.

Cessie Receivables PT Ade Textile Industries

The Company took over the Bank Mandiri receivables from PT Ade Textile Industries ("PT Adetex") and all the rights of the Bank Mandiri based on the Bank Mandiri Credit Agreement, including collateral, has been transferred to the Company based on the Credit Receipt Agreement (Cessie) Number 38 made before Adrian Juani, Notary in Jakarta, dated December 20, 2019. The total transfer of PT Adetex's principal debt to the Company was USD18,526,367.

On December 20, 2019 a Debt Restructuring Agreement No. 44 was signed in the presence of Lenny Janis Ishak S.H., Notary in Jakarta, including the addition of a working capital facility of USD3,900,000.

The purpose of adding working capital facilities is for the company's working capital needs and repair / replacement of damaged production facilities. The interest rate applied is 5% per annum. Collateral given to the Company is in the form of collateral for building land, fiduciary guarantee for supplies, accounts receivable and machinery and other equipment.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

24. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

24. Right of Use Assets and Lease Liabilities

a. Aset Hak Guna

a. Right of Use Assets

	Tanah dan Bangunan/ <i>Land and Buildings</i>	Kendaraan Bermotor/ <i>Motor Vehicles</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Saldo per 1 Januari 2020	--	--	--	<i>Balance at January 1, 2020</i>
Dampak Penerapan Awal PSAK 73	14,048	9,239	23,287	<i>Impact of Early Implementation of PSAK No. 73</i>
Penambahan selama periode berjalan	--	3,084	3,084	<i>Additions for the period</i>
Beban penyusutan selama periode berjalan	(12,041)	(2,616)	(14,657)	<i>Depreciation charge for the period</i>
Reklasifikasi	--	--	--	<i>Reclassification</i>
Saldo per 31 Desember 2020	<u>2,007</u>	<u>9,707</u>	<u>11,714</u>	<i>Balance at 31 December 2020</i>

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarizes the component of changes in the liabilities arising from leases:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo awal	--	--	<i>Beginning balance</i>
Dampak Penerapan Awal PSAK 73	28,263	--	<i>The Impact of Initial Implementation PSAK 73</i>
Arus kas	(17,168)	--	<i>Cash flows</i>
Perubahan nonkas			<i>Non-cash changes</i>
Penambahan	3,084	--	<i>Additions</i>
Saldo akhir	<u>14,179</u>	<u>--</u>	<i>Ending balance</i>

Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

There are exceptions to the recognition of short-term leases and rents for low value goods.

Beban penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.657. Beban bunga liabilitas sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.146. Liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp11.536.

Depreciation expenses per 31 Desember 2020 amounted to Rp14,657. Lease liability interest expenses per 31 Desember 2020 amounted to Rp4,146. Short term lease liabilities amounted to Rp11,536.

25. Utang Usaha

25. Accounts Payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi	18,264	140,455	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	1,449,181	1,789,101	<i>Third Parties</i>
Jumlah	<u>1,467,445</u>	<u>1,929,556</u>	<i>Total</i>

Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

Total accounts payable by aging (day) are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
< 3 bulan	86,273	208,914	<i>< 3 months</i>
3-6 bulan	139,897	137,904	<i>3-6 months</i>
6-12 Bulan	1,090,520	977,111	<i>6-12 months</i>
12-24 bulan	131,800	493,838	<i>12-24 months</i>
> 24 bulan	18,955	111,789	<i>> 24 months</i>
Jumlah	<u>1,467,445</u>	<u>1,929,556</u>	<i>Total</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

26. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

26. Bank and Financial Institution Loans

	2020 Rp	2019 Rp
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Pendek		
Pihak Berelasi		
Perusahaan		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	889,839	939,791
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	451,106	312,447
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	84,890	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23,843	--
Entitas Anak		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	188,200	100,000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	166,500	25,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	145,000
Jumlah	1,804,378	1,522,238
Pihak Ketiga		
Perusahaan		
PT Bank Mega Tbk	873,851	521,584
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	350,076	313,328
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	134,674	122,398
Shinhan Bank Indonesia	91,213	93,391
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	25,067	25,071
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	40,093
Entitas Anak		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	217,400	110,000
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	41,894	7,489
PT Bank Pan Indonesia Tbk	--	35,000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	--	25,000
PT Bank DBS Indonesia Tbk	--	4,366
Jumlah	1,734,175	1,297,720
Jumlah Pinjaman Jangka Pendek	3,538,553	2,819,958
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun		
Pihak Ketiga		
Entitas Anak		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	--	17,044
Jumlah Pinjaman yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	--	17,044
Pinjaman Bank Jangka Panjang dan Non Bank Jangka Panjang		
Pihak Berelasi		
Perusahaan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	53,274	64,743
Entitas Anak		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	614,630	625,690
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	359,817	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	131,895	47,394
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	68,465	83,192
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	54,604	60,461
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	1,282,685	881,480

Short Term Bank and Financial Institution Loans

Related Parties
The Company
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subsidiaries
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total

Third Parties

The Company
PT Bank Mega Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Shinhan Bank Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Subsidiaries
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia Tbk
Total

Total Short Term Loans

**Current Maturities of
Long Term Loans**

Third Party
Subsidiaries
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Total

**Long Terms Bank and
Financial Institution Loans**

Related Parties
The Company
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subsidiaries
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total Long Term Loans

**1) Shinhan Bank Indonesia
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No.341/PPWK/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 dihadapan Notaris Glenna Marthin S.H., M.K., dimana bank telah setuju untuk memberikan kepada Debitur berupa Fasilitas Kredit Pinjaman *Demand Loan* sebesar Rp100.000. Bank telah setuju untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit Pinjaman *Demand Loan* yang semula jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2020, untuk selanjutnya diperpanjang 12 bulan sampai dengan tanggal 27 Desember 2021. Atas perpanjangan jangka waktu kredit ini Debitur wajib membayar kepada bank berupa suku bunga 8,75% per tahun, biaya provisi 0,25% per tahun dari limit kredit.

Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung, Debitur wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Membayar bunga dan pembayaran kembali hutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kredit;

**1) Shinhan Bank Indonesia
The Company**

Based on Credit Extension Agreement No.341/PPWK/XII/2020 dated December 23, 2020 before Notary Glenna Marthin S.H., M.K., where the bank has agreed to provide to the Debtor in the form of a Demand Loan Facility of Rp100,000. The Bank has agreed to extend the term of the Demand Loan Facility which was originally due on December 27, 2020, to be further extended by 12 months until December 27, 2021. Upon extension of this loan period the Debtor is obliged to pay to the bank in the form of an interest rate of 8.75% per annum, a provision fee of 0.25% per annum from the credit ceiling.

During the Credit Agreement is still ongoing, the Debtor is obliged to carry out the following matters:

- Pay interest and repayment of debt in accordance with the time stipulated under the Credit Agreement;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- b. Melaksanakan pengikatan jaminan, baik secara di bawah tangan maupun di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh Bank;
- c. Debitur dan/atau Penjamin (jika berbadan hukum), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila merubah bentuk/status hukum perusahaan, Anggaran Dasar perusahaan, susunan pengurus dan susunan pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin;
- d. Bagi Debitur berbentuk perseroan yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, termasuk setiap perubahan dan penggantinya, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Audited dan harus diserahkan selambatnya-lambatnya pada akhir semester I tahun berikutnya;
- e. Memelihara keberadaan usahanya serta menjalankan usahanya dengan rajin, baik dan efisien sesuai dengan praktek keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasa menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku;
- f. Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Bank serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Debitur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang ditetapkan secara terus menerus;
- g. Senantiasa memberikan ijin, dan/atau membantu diperolehnya ijin kepada Bank serta para pejabat Bank pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Bank untuk memasuki bangunan dan/atau tempat/bangunan dimana jaminan kredit berada serta kantor Debitur dan/atau Penjamin untuk mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap bangunan jaminan-jaminan, tagihan-tagihan asli invoice tagihan, bukti-bukti pengiriman barang-barang, perjanjian/kontrak, pembukuan dan administrasi Debitur. Biaya-biaya dan ongkos-ongkos pemeriksaan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh Debitur;
- h. Memberitahukan kepada Bank bilamana terjadi perubahan dalam ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur;
- i. Memberitahukan kepada Bank bilamana terjadi perubahan bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha Debitur;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- b. Carry out a binding guarantee, either under the arm or in the presence of a Notary designated by the Bank;
- c. The debtor and/or Guarantor (if a legal entity), shall notify in writing to the Bank if change the shape/status of the law the company, the articles of association of the company, composition of the board and the composition of the shareholders of the Debtor and/or Guarantor;
- d. For the Debtor the form of a company which meets one of the criteria as stipulated in the Law No. 40 Year 2007 on limited Company and Regulation of Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 concerning Assets Quality Rating for commercial Banks, including any amendments and successor, is obliged to submit annual financial statements Audited and must be submitted by the latest at the end of the first semester of the next year;
- e. Maintain the existence of its business and conduct its business diligently, properly and efficiently in accordance with the practice of finance and of business that applies and always obey all regulations that apply;
- f. Create and maintain bookkeeping system and the supervision cost for the Bank as well as maintaining records and administration which reflect true and fair financial condition and results of operations of the Debtor in accordance with the accounting principles applicable in Indonesia and set continuously;
- g. Always give permission, and/or help obtaining the license to the Bank as well as officials of the Bank at any time when deemed necessary by the Bank to enter the building and/or premises/building where the guarantee credit is as well as the office of the Debtor and/or Guarantor to conduct the examination (audit) of building guarantee-the best, bill-bill the original invoice bill, proof of delivery of goods, agreements/contracts, bookkeeping and administration of the Debtor. The costs and expenses of such examination shall be borne and paid by the Debtor;
- h. Notify Bank in the event of a change in the scope of business of the Debtor or if an event occurs or circumstances which may affect in depth the state of the Debtor's business;
- i. Notify Bank in the event of a change in the shape/of legal status and/or line of business of the Debtor;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- j. Memberitahukan kepada Bank bilamana hendak mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, atau kewajiban-keajiban tersebut timbul atas dasar keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, setelah tanggal Perjanjian Kredit;
- k. Membayar kewajiban pajak, upah buruh, rekening-rekening listrik, air PAM dan telpon pada waktunya dan dengan cara sebagaimana mestinya;
- l. Menyerahkan kepada Bank semua asli dokumen jaminan dan asli persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh Bank untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian, dokumen jaminan, surat promes-surat promes dan perjanjian jaminan serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan;
- m. Bank berhak untuk meminta:
 - i. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak akhir setiap 6 (enam) bulan dari suatu tahun buku Debitur, laporan keuangan Debitur (yang dinyatakan sah oleh Direksi Debitur) untuk 6 (enam) bulan yang bersangkutan, paling sedikit terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi untuk jangka waktu yang lalu;
 - ii. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan Debitur (yang telah diperiksa/diaudit oleh akuntan publik) untuk tahun buku yang baru lalu, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disusun menurut prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia serta diterapkan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku-tahun buku yang lalu;
- n. Membuka rekening pada bank, baik rekening pinjaman dan/atau maupun rekening penampungan serta mengupayakan mengalihkan seluruh aktivitas melalui rekening Debitur pada Bank;
- o. Menyetorkan ke rekening Debitur pada Bank dan/atau langsung kepada Bank untuk setiap pembayaran termasuk akan tetapi tidak terbatas pada jumlah pokok, bunga,

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- j. *Inform the Bank when going to bind themselves as insurer/guarantor against another party and/or ensure and/or transfer his wealth to another party, or liability-keajiban that arise on the basis of the decision of the judge which has the force of law which is fixed and definite, after the date of the Credit Agreement;*
- k. *Pay tax liabilities, wages, accounts, electric, water PAM and the phone at the time and in the manner as it should be;*
- l. *Submit to the Bank all original documents guarantee and the original approval-the approval required by the Bank to make, submit and implement the Agreement, the security documents, promissory notes-a promissory note and guarantee agreement and other covenants relating;*
- m. *The Bank reserves the right to request:*
 - i. *Within 90 (ninety) days from the end of every 6 (six) months of a fiscal year of Debtor, Debtor financial statement (which was declared valid by the board of Directors of the Debtor) to 6 (six) months are concerned, the least consists of balance sheet and profit and loss prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia and applied continuously and in harmony with the manufacture of the balance sheet and profit and loss for a period of time ago;*
 - ii. *Within 180 (one hundred eighty) days from the end of a fiscal year, the financial statements of the Debtors (which had been audited by a public accountant) for the new fiscal year and then at least consists of Balance sheet and Profit and Loss statement prepared according to accounting principles generally accepted in Indonesia and applied continuously and in harmony with the manufacture of the balance sheet and profit and loss for the financial year-the financial year before;*
- n. *Open an account at the bank, better loan account and/or to take account of the shelter and seek to divert all activity through the accounts of the Debtor at the Bank;*
- o. *Depositing to the account of the Debtor on the Bank and/or directly to the Bank for any payment including but not limited to the principal amount, interest,*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- denda-denda dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Debitur;
- p. Menggunakan seluruh dana yang ditarik dari Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit;
 - q. Memelihara harta kekayaan Debitur termasuk harta jaminan yang dijaminkan kepada Bank;
 - r. Memberikan informasi kepada bank atas hal-hal yang dianggap dapat membahayakan keadaan usaha Debitur dan/atau Penjamin dan mengizinkan Bank untuk meninjau usaha Debitur setiap saat bila dianggap perlu oleh Bank, dan Debitur wajib menginformasikan setiap perkembangan usaha Debitur;
 - s. Menandatangani segala dan setiap akta dan dokumen yang diminta oleh Bank untuk melengkapi dan memperkuat hak Bank berdasarkan Perjanjian, dokumen jaminan, perjanjian jaminan dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan;
 - t. Memenuhi dan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - u. Mengizinkan dan memberi bantuan sepenuhnya kepada Bank atau pihak yang ditunjuk Bank untuk setiap waktu memeriksa fasilitas, aktivitas, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Debitur yang dianggap perlu oleh Bank guna menilai kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen jaminan, perjanjian jaminan dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dan segala biaya yang timbul untuk keperluan tersebut merupakan beban Debitur;
 - v. Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank, apabila terjadi proses perkara, baik perdata maupun pidana yang mempengaruhi usaha Debitur maupun harta kekayaannya. Lebih lanjut, Debitur akan dengan segera memberikan pemberitahuan kepada Bank mengenai terjadinya setiap peristiwa kelalaian/cidera janji, atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya, merupakan suatu peristiwa kelalaian/cidera janji;
 - w. Mengupayakan untuk menyalurkan aktivitas usaha Debitur melalui rekening Debitur pada Bank;
 - x. Menjamin bahwa kewajibannya untuk melaksanakan pembayarannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian jaminan serta dokumen jaminan mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kewajiban pembayarannya atas

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- finances and fees becomes an obligation of the Debtor;*
- p. Use all of the funds drawn from the Loan Facility under the Credit Agreement;*
 - q. Maintain the assets of the Debtor including property collateral pledged to the Bank;*
 - r. Provide information to bank on things that are considered to harm the state of the business of the Debtor and/or Guarantor and allows the Bank to review the Debtor's business at any time when deemed necessary by the Bank, and the Debtor is obliged to inform the development of any business of the Debtor;*
 - s. Sign all and any deeds and documents requested by the Bank to complement and strengthen the rights of the Bank under the Agreement, the security documents, the guarantee agreement and other covenants relating;*
 - t. Meet and comply with all laws and regulations applicable;*
 - u. Allow and give the fullest help to the Bank or a person designated by the Bank for any time inspect the facilities, activities, books and records made by the Debtor that are deemed necessary by Bank in order to assess the ability of the Debtor and/or Guarantor to meet all of its obligations under the Credit Agreement, the security documents, the guarantee agreement and other covenants related and all costs incurred for these purposes is the burden of the Debtor*
 - v. Giving notice to the Bank, in case of proceedings, both civil and criminal proceedings affecting the Debtor's business and assets. Further, the Debtor will immediately give notice to the Bank of the occurrence of any events of default/default, or event which, given notice or the passage of time, or both, would constitute an event of negligence/injury appointments;*
 - w. Seek to channel business activities of the Debtor through the Debtor's account at the Bank;*
 - x. Ensure that its obligations to carry out the payment to the Bank under the Credit Agreement and the guarantee agreement and the guarantee document have been preferred against the payment obligations on the loan-other loans, including but not limited to*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- pinjaman-pinjaman lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman pemegang saham baik yang sekarang maupun yang akan timbul dikemudian hari;
- y. Melaksanakan pengikatan atas barang jaminan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan Perjanjian Kredit;
- z. Membayar semua biaya yang timbul dan relevan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit;
- aa. Setiap waktu atas permintaan Bank dapat dilakukan penilaian terhadap jaminan melalui konsultan/perusahaan penilai yang disetujui oleh Bank dengan biaya yang ditanggung oleh Debitur;
- bb. Melaksanakan pengikatan jaminan dan/atau hutang sebagaimana yang diminta/disyaratkan Bank, dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Bank, apabila Bank meminta penambahan jaminan, atas biaya Debitur;
- cc. Melaksanakan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp93.391. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp102.758. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp104.936. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.213.

**2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan perubahan keempat atas Perjanjian Kredit No.694/APK/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020, bahwa Bank setuju untuk memperpanjang Jangka Waktu Fasilitas Kredit *Demand Loan* selama 12 bulan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2021. Jenis Fasilitas Kredit adalah *Demand Loan* dengan limit penarikan maksimal Rp400.000. Tingkat suku bunga 9% per tahun *floating rate* dengan denda keterlambatan 2% per tahun di atas suku bunga yang berlaku. Biaya provisi 0,25% per tahun.

shareholder loans either now or that will arise in the future;

- y. *Carry out the binding on the collateral in accordance with applicable regulations and with the terms and conditions set by the Bank based on the Credit Agreement;*
- z. *Pay all costs that arise and are relevant to the provision of Loan Facilities under the Credit Agreement as well as the implementation of the provisions of the Credit Agreement;*
- aa. *At any time upon the request of the Bank can do an assessment of the collateral through the consultant/appraisal companies approved by Bank with the cost borne by the Debtor;*
- bb. *Carry out the fastening of the collateral and/or debt as requested/required by the Bank, before a Notary and/or Land Deed Official (PPAT) appointed by the Bank, if the Bank asks for the addition of collateral, over the cost of the Debtor;*
- cc. *Carry out a binding guarantee in accordance with the provisions and laws applicable in the Country of the Republic of Indonesia.*

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

The balance in the beginning of year 2020 amounted to Rp93,391. Total disbursement during the year of Rp102,758. The payment in the year is Rp104,936. The balance on December 31, 2020 is Rp91,213.

**2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
The Company**

Based on the fourth amendment to The Credit Agreement No.694/APK/XII/2020 on December 23, 2020, the Bank agreed to extend the Term of the Demand Loan Facility for 12 months from September 28, 2020 to September 28, 2021. Credit Facility type is a Demand Loan with a maximum withdrawal ceiling of Rp400,000. Interest rate of 9% per annum floating rate with a late penalty of 2% per annum above the applicable interest rate. Provision fee is 0.25% per annum from the credit facility ceiling.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Ketentuan Khusus:

- a. Sebelum penarikan, Debitur wajib menyerahkan kepada Bank, dokumen yang mendasari (*underlying documents*) yang akan diperiksa oleh Bank terlebih dahulu, dimana Bank berhak untuk menolak permintaan penarikan dari Debitur berdasarkan layak atau tidak layaknya dokumen yang mendasari (*underlying documents*) menurut Bank;
- b. Menyerahkan salinan Perjanjian Kredit antara debitur Debitur dengan Debitur yang dilegalisir dengan minimum CCR 100% dari *outstanding*;
- c. Hasil penarikan tidak diperkenankan untuk melakukan restrukturisasi (*restructuring*) atau revitalisasi;
- d. Nasabah/pelanggan Debitur tidak termasuk dalam daftar investasi yang dilarang (*List of Negative Investment*);
- e. Memberi izin Bank untuk memeriksa aktivitas bisnis, buku dan catatan Debitur dan informasi lain yang diperlukan oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya;
- f. Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan laporan keuangan triwulanan *in-house* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal periode laporan keuangan berakhir;
- g. Debitur wajib membuka rekening operasional pada Bank;
- h. Debitur tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berkaitan dengan perubahan bidang usaha, penurunan modal dan perubahan pemegang saham mayoritas (minimum 51% wajib dimiliki oleh Republik Indonesia);
- i. Debitur wajib melakukan subordinasi hutangnya kepada para pemegang sahamnya baik yang telah ada (jika ada) maupun yang akan ada;
- j. Apabila Debitur melakukan pelunasan dipercepat dengan menggunakan dana pinjaman yang diperoleh dari bank/pihak lain, maka Debitur wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pembayaran dipercepat tersebut;
- k. Debitur wajib mengupayakan aktivitas bisnis melalui rekening Debitur pada Bank;
- l. Debitur wajib menjaga *Current Ratio* (rasio anantara jumlah aktiva lancar dengan pasiva lancar) minimal satu kali;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Special Provisions:

- a. Before the withdrawal, the Debtor is obliged to submit to Bank, documents that the underlying (*underlying documents*) which will be checked by the Bank first, where the Bank reserves the right to reject a withdrawal request from the Debtor based on the worth or not the right documents that the underlying (*underlying documents*) according to the Bank;
- b. Submit a copy of the Credit Agreement between the debtor and the Debtor with the Debtor legalized with a minimum CCR of 100% of *outstanding*;
- c. The results of the withdrawal are not allowed to do the restructuring or revitalization;
- d. Clients/customers of the Debtor not included in the list of investments that are prohibited (*the List of Negative Investment*);
- e. Give the Bank permission to examine the activity of the business, the books and records of the Debtor and other information required by the Bank with prior notice;
- f. The debtor is obliged to submit annual financial reports audited by a Public Accountant who is registered no later than 6 (six) months and quarterly financial reports *in-house* no later than ninety (90) days after the date of the reporting period finance ends;
- g. The debtor is obliged to open operating accounts at the Bank;
- h. The debtor is not allowed to change the articles of association related with the change of business, reduction of capital and change of shareholders a majority (minimum 51% must be owned by the Republic of Indonesia);
- i. The debtor is obliged to make subordinated debt to the holders of its shares either have been there (if any) and who will be there;
- j. If the Debtor made payment of accelerated with the use of the loan funds obtained from banks/other parties, then the Debtor is obliged to pay a fine of 2% (two percent) of the amount of the accelerated payment of such;
- k. The debtor is obliged to pursue business activity through the account of the Debtor on the Bank;
- l. The debtor is obliged to maintain a *Current Ratio* (the ratio between the amount of current assets by liabilities) of at least one time;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- m. Debitur wajib untuk menyerahkan dan mendaftarkan tagihan yang dijadikan jaminan setiap pertiga bulanan dan apabila setiap kali tagihan yang diberikan jatuh tempo dan/atau tidak lancar, Debitur wajib memberikan kepada Bank penggantian tagihan yang belum jatuh tempo dan lancar dan penggantian tersebut akan didaftarkan pada masa pendaftaran ulang yang terdekat;
- n. Debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional-Bank Indonesia;
- o. Fasilitas Kredit hanya dapat digunakan apabila Debitur tidak lalai melaksanakan atau mematuhi salah satu dari janji-janji atau kewajibankewajiban, atau ketentuan-ketentuan dari persyaratan-persyaratan lainnya dan dokumen-dokumenlainnya berdasarkan SKU dan Perjanjian Kredit yang dibuat dengan Bank, maupun perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya antara Debitur dengan bank dan/atau kreditur lainnya;
- p. Menghapus ketentuan yang terdapat dalam huruf b ayat 2 Pasal 11 pada SKU, sehingga untuk selanjutnya ayat 2 Pasal 11 SKU;
- q. Khusus untuk Debitur badan usaha, tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - ii. Mengumumkan dan membagikan dividen an/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur;
- r. Menghentikan salah satu kegiatan usahanya untuk mengubah jenis usaha yang dilakukan secara substansial berakibat buruk pada keuangan Debitur;
- s. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (*corporate structure*) antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan;
- t. Menambah ketentuan ayat 11 Pasal 10 pada SKU, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Debitur wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank, maksimum 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya keputusan RUPS atas tindakan mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham, atau pengurus atau pihak lainnya yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- m. *The debtor is obliged to submit and register the bills that serve the best each-thirds of the monthly and if every time a bill given the maturity and/or not current, the Debtor is obliged to provide to the Bank the replacement of bills that have not matured and smoothly and the replacement of such will be registered in the registration facility;*
- n. *The debtor is not included in the Black List of National-Bank Indonesia;*
- o. *Credit facilities can only be used if the Debtor does not negligently perform or comply with any of the promises or kewajibankewajiban, or the provisions kletentuan of the other requirements and documents-dokumenlainnya based on the SKU and Credit Agreements made with the Bank, and the agreements and other documents between the Debtor bank and/or other creditors;*
- p. *Removing the provisions contained in letter b paragraph 2 Article 11 on SKU, so that the next paragraph 2 Article 11 SKU;*
- q. *Special to the Debtor business entity, the action related to the corporate structure of the Debtor such as, but not limited to:*
 - i. *To make amendments to the intent, purpose and business activity of the Debtor;*
 - ii. *Announce and distribute dividends an/or form of advantage of other businesses to shareholders and/or parties other equivalent in the Debtor company;*
- r. *Stop the one of its business activities to change the type of business that is done in a substantial adverse effect on the Debtor financial;*
- s. *Make changes to the capital structure of the company (corporate structure), among others, consolidation, merger and takeover;*
- t. *Add to the provisions of paragraph 11 of Article 10 on the SKU, so that henceforth read as follows: The debtor is obliged to make the notification in writing to Bank, a maximum of 15 (fifteen) Working Days after receipt of the decision of the AGM on the actions to change the composition of the board of directors, the board of commissioners and the shareholders, or the board or other parties other equivalent in the Debtor company;*

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp313.328. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp127.956. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp91.208. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp350.076.

3) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit Swadana No.001/PK/CSTD/CLS/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp390.000. Sifat kredit *Revolving* jangka waktu kredit 12 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2021. Tingkat suku bunga 6.90% dengan biaya provisi 0,01%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 tanggal 3 September 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan kredit swadana plafond Rp200.000. Sifat kredit *Revolving* dengan jangka waktu kredit 12 bulan. Tingkat suku bunga 7,25% dan biaya provisi sebesar 0,01%. Jatuh tempo kredit tanggal 3 September 2021. Denda tunggakan 2% dan jenis agunan kredit adalah deposito berjangka.

Jaminan atas fasilitas kredit ini berupa deposito yang dijaminkan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk senilai Rp390.000.

Berdasarkan Akta Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 68 tanggal 30 Juli 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp187.453. Tujuan Fasilitas Kredit adalah untuk *refinancing* modal kerja pendanaan Debitur kepada PT Lintas Samudera Sejahtera ("PT LSS") untuk pembelian Kapal *Floating Storage Unit* (FSU). Fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur bersifat *Non-Revolving*.

Jangka waktu perpanjangan Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur berdasarkan Addendum III adalah selama 1 bulan terhitung sejak tanggal efektif Addendum III ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Biaya provisi dan biaya administrasi sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Addendum III ini sebesar Rp100 wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank selambat lambatnya pada tanggal efektif Addendum III ini.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance in the beginning of year 2020 amounted to Rp313,328. Total disbursement during the year of Rp127,956. The payment in the year is Rp91,208. The balance on December 31, 2020 is Rp350,076.

3) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

The Company

Based on Swadana Credit Agreement No.001/PK/CSTD/CLS/VIII/2020 dated August 28, 2020, the Company signed a Credit Agreement from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with a maximum loan limit of Rp390,000. Nature of *Revolving* credit 12-month credit term due on August 30, 2021. Interest rate is 6.90% with a provision fee of 0.01%.

Based on Credit Agreement Number: 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 dated September 3, 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by providing self-funded credit ceiling Rp200,000. Nature of *Revolving* credit with a credit period of 12 months. Interest rate is 7.25% and provision fee is 0.01%. Credit maturity is dated September 3, 2021. A 2% arrears penalty and credit collateral type are term deposits.

The guarantee on this credit facility is a deposit guaranteed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk amounted to Rp390,000.

Based on Addendum III Deed of Working Capital Loan Agreement No. 68 dated July 30, 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by providing Working Capital Credit of Rp187,453. The purpose of credit facility is to refinancing the working capital of debtor funding to PT Lintas Samudera Sejahtera ("PT LSS") for the purchase of *Floating Storage Unit* (FSU). The credit facility provided to the Debtor is *Non-Revolving*.

The extension period of the Credit Facility provided by the Bank to the Debtor under Addendum III is for 1 month nosed from the effective date of this Addendum III until August 31, 2020. Provision fees and administrative costs in connection with the extended time of this Addendum III Credit Facility amounting to Rp100 shall be paid in full by the Debtor to the Bank no later than the effective date of this Addendum III.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.24 tanggal 28 Agustus 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp128.000. Tujuan kredit adalah untuk *Refinancing* Modal Kerja pembiayaan usaha kepada PT Varia Intra Finance. Kredit yang diberikan kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini bersifat Non Revolving. Jangka waktu kredit yang diberikan bank kepada Debitur adalah selama 15 bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kredit ini tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Debitur diwajibkan untuk membayar biaya provisi sebesar 0,10% dihitung dari limit kredit yang diberikan. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya administrasi sebesar 0,05% dari plafond kredit yang diberikan. Bunga atas pokok jumlah kredit yang terutang sebesar 9,75% per tahun.

Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan *non-financial covenant* kepada Bank BTN, antara lain sebagai berikut:

- Menyerahkan laporan dan melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank terkait laporan perkembangan piutang, laporan penerimaan uang/*cash in* dan laporan penggunaan dana per triwulan atau laporan lainnya apabila dianggap perlu atau diminta oleh Bank;
- Melakukan pengikatan secara fidusia atas piutang usaha yang dijadikan agunan di Bank setiap proses pencairan. Apabila terdapat *end user* menunggak maka Debitur wajib mengganti dengan piutang lancar yang lain;
- Menyerahkan laporan nilai fidusia atas piutang yang diikat sebagai agunan Bank setiap triwulan.
- Menjaga rasio agunan selalu dalam rasio lebih dari atau sama dengan 120% (seratus dua puluh persen) selama masa kredit berlangsung;
- Menyerahkan laporan keuangan (neraca dan laba rugi bersama penjelasannya). Laporan Keuangan Semesteran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaporan. Laporan Keuangan Tahunan Audited selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal pelaporan.

Bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya dari selisih atau kekurangan biaya (*cost over run*) atas proyek yang dijadikan usaha pembiayaan oleh Debitur, jika ternyata

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on Deed of Working Capital Loan Agreement No.24 dated August 28, 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by providing Working Capital Credit amounting to Rp128,000. The purpose of credit is to *Refinancing* Working Capital of business financing to PT Varia Intra Finance. The credit provided to the Debtor under this Credit Agreement is Non Revolving. The credit period provided by the bank to the Debtor is 15 months from the signing of this Credit Agreement on August 28, 2020 to November 28, 2021.

Debtors are required to pay a provision fee of 0.10% calculated from the given credit ceiling. Debtors are required to pay an administration fee of 0.05% of the credit plafond provided. Interest on the principal amount of loans owed is 9.75% per Annum.

The company is obliged to submit the non-financial covenant clause to Bank BTN, with following:

- Submit reports and perform reconciliation with the Bank related statements development of receivables, reports the receipt of money/cash in and report use of funds per quarter or other reports if deemed necessary or requested by the Bank;
- Do the binding for fiduciary over accounts receivable are used as collateral in the Bank each disbursement process. If there is a end user in arrears then the Debtor is obliged to replace with the current receivables the other;
- Submit the report the value of the fiduciary over receivables that are tied as collateral of the Bank every quarter;
- Keep the ratio of collateral is always in a ratio of more than or equal to 120% (one hundred and twenty percent) during the credit lasts;
- Submit financial statements (balance sheet and income statement together with the explanation). The Financial statements Semi-annually, not later than 30 (thirty) days after the date of reporting. The Annual Financial statement Audited not later than one hundred twenty (120) days after the date of reporting.

Willing and able to bear the costs of the excess or deficiency of the cost (*cost over run*) for the project that made the financing of business by the Debtor, if it turns out to exceed the project

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

melebihi *project cost* dalam anggaran Debitur. Bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya dari selisih atau kekurangan biaya (*cost over run*) atas proyek yang dijadikan usaha pembiayaan oleh Debitur, jika ternyata melebihi *project cost* dalam anggaran Debitur.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* diatas 100% (seratus persen);
- b. *Debt Service Coverage* diatas 100% (seratus persen);
- c. Rasio modal disetor terhadap total hutang Debitur (hutang yang ada dan yang akan ada) di Bank minimal sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. *Debt to Equity Ratio* (rasio hutang terhadap total modal) maksimal sebesar 500% (lima ratus persen).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp939.791. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp764.402. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp814.354. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp889.839.

PT PPAF

Pada tanggal 31 Maret 2017, PT PPAF menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dihadapan Notaris Eddy. F. Saparung, S.H., M.H dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000. dengan tingkat bunga 10,75% efektif per tahun. Sifat kredit dari pinjaman ini adalah revolving. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan, yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2022. PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan Piutang dengan kolektibilitas lancar dengan *coverage* minimal 110% yang terdiri dari piutang yang ada dan yang akan dibiayai oleh bank dan tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

Pada tanggal 5 Maret 2018, PT PPAF menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dihadapan Notaris Eddy. F. Saparung, S.H., M.H dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp43.000. dengan tingkat bunga 10,25% efektif per tahun. Sifat kredit dari pinjaman ini adalah Kredit Angsuran Berjangka

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

cost in the budget of the Debtor. Willing and able to bear the costs of the excess or deficiency of the cost (cost over run) for the project that made the financing of business by the Debtor, if it turns out to exceed the project cost in the budget of the Debtor.

The Company must maintain the financial covenant for the duration of the Credit as reflected in the financial statements as follows:

- a. Current Ratio above 100% (one hundred percent);*
- b. Debt Service Coverage above 100% (one hundred percent);*
- c. Ratio of paid-up capital to total debtors (existing and future debts) in the Bank at least 10% (ten percent);*
- d. Debt to Equity Ratio (ratio of debt to total capital) is a maximum of 500% (five hundred percent).*

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

The balance in the beginning of year 2020 amounted to Rp939.791. Total disbursement during the year of Rp764.402. The payment in the year is Rp814.354. The balance on December 31, 2020 is Rp889.839.

PT PPAF

On March 31, 2017, PT PPAF signed the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 30 with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in the presence of Notary Eddy. F. Saparung, S.H., M.H with a maximum loan value of Rp100,000. with an interest rate of 10.75% effective per annum. The credit nature of this loan is revolving. The credit period is 60 months from the date of signing, which is due on March 30, 2022. PT PPAF submits a guarantee to the bank in the form of binding fiduciary guarantee on receivables bill with current collectibility with a minimum coverage of 110% consisting of existing receivables and which will be financed by the bank and not being guaranteed to other parties.

On March 5, 2018, PT PPAF signed the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in the presence of Notary Eddy. F. Saparung, S.H., M.H with a maximum loan value of Rp43,000. with an interest rate of 10.25% effective per annum. The credit nature of this loan is a Term Installment Credit For a period of 48 months

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2022. PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan Piutang dengan kolektibilitas lancar sebesar Rp95.675.

Saldo awal tahun 2020 pinjaman sebesar Rp83.192. Total pencairan di tahun 2020 sebesar Nihil. Total pembayaran di tahun berjalan adalah Rp14.727. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp68.465.

4) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Perusahaan

Berdasarkan addendum perjanjian kredit nomor: 006/2020 antara PT PPA dan PT Bank BPD Banten, Bank setuju memberikan perpanjangan jangka waktu pinjaman kepada debitur selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021. Cara pembayaran pokok dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo Fasilitas Kredit. Untuk Fasilitas dengan jaminan *cash collateral* 100% tidak perlu dilakukan *clean up* pada saat Fasilitas Kredit Jatuh Tempo.

Selama Pinjaman belum dinyatakan lunas oleh Bank, Perusahaan berjanji dan menyanggupi untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan diserahkan paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahunnya;
- b. Menyerahkan Laporan Keuangan Triwulan (internal) paling lambat tanggal 31 Agustus untuk laporan keuangan Juni, 30 November untuk laporan keuangan September, 28 Februari untuk laporan keuangan Desember dan 31 Mei untuk laporan keuangan Maret;
- c. Memperbaharui segala perijinan yang terkait dengan bidang usaha Debitur dan menyerahkan *copy*nya kepada Bank apabila telah diperbaharui pada kesempatan pertama;
- d. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila terdapat:
 - i. Pemberian pinjaman kepada pihak terkait dengan Bank;
 - ii. Perubahan Pemegang Saham/Pengurus/Anggaran dasar;
- e. Menyerahkan *copy* akta-akta terkait perubahan Pemegang Saham/Pengurus/anggaran dasar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akta-akta tersebut selesai dan diterima oleh Debitur;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

from the date of signing, which is due on March 5, 2022. PT PPAF submits a guarantee to the bank in the form of binding fiduciary guarantee on receivables bill with current collectibility of Rp95,675.

The initial balance of 2020 in loans amounted to Rp83,192. Total disbursement in the year 2020 of Nihil. Total payment in the year is Rp14,727. The balance on December 31, 2020 is Rp68,465.

4) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk The Company

Based on the Credit agreement addendum number: 006/2020 between PT PPA and PT Bank BPD Banten, the Bank agrees to provide an extension of the loan term to the debtor for 12 months from 21 June 2020 to 21 June 2021. The basic payment method is done at once due to credit facilities. For facilities with a guarantee of cash collateral 100% does not need to be done clean up at the time of credit facility maturity. The latest interest is paid on the 21st of every month

For Loans not considered as paid by the Bank, the Debtor promises and undertakes to meet the following:

- a. Submit Annual Financial Reports audited by Public Accountant Office and submitted no later than 30 June each year;
- b. Submit Quarterly Financial Reports (internal) no later than August 31 to the financial statements June, 30 September monthly financial report-September, February 28 for the report of financial of December and 31 May for the financial statements March;
- c. Renew all licensing associated with the business of the Debtor and submit a copy to the Bank if it has been updated at the first opportunity;
- d. Giving written notice if there is:
 - i. The granting of loans to related parties with the Bank;
 - ii. Change of Shareholders/Board/statutes;
- e. Submit a copy of the deed-deed related to change of Shareholders/Board/statutes no later than 7 (seven) working days after the deed-the deed is completed and accepted by the Debtor;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- f. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit;
- g. Apabila jangka waktu promes akan habis dan diperkirakan masih diperlukan oleh Debitur, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu promes harus diajukan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku jangka waktu promes habis dengan jangka waktu perpanjangan promes yang berlaku maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat kembali diperpanjang setiap bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan dengan tetap memperhatikan sisa jangka waktu kredit;
- h. Debitur wajib melakukan "clean up" (penurunan baki debet/pelunasan baki debet) dengan catatan sebagai berikut:
 - i. *Clean Up* dilakukan terhadap fasilitas kredit transaksional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan clean up period minimal 3 (tiga) hari kerja;
 - ii. *Clean Up* wajib dilakukan sebelum penarikan kredit selanjutnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp25.071. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Nihil. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp4. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.067.

PT PPAF

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Kredit tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., PT PPAF telah mendapatkan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran maksimum sebesar Rp42.000. dengan tingkat bunga 10,5%. Sifat fasilitas Pinjaman Rekening Koran bersifat *revolving*. Jangka waktu Pinjaman Rekening Koran adalah 9 bulan.

PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan piutang bersih senilai minimal 110% dari pokok pinjaman. PT PPAF diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan mempertahankan *Debt Equity Ratio* maksimal 8 kali. Pada tanggal 31 Desember 2020,

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- f. *The Bank reserves the right to suspend and/or cancel the disbursement of the credit which has not been withdrawn if it turns out that the Debtor use the credit funds are not reasonable and/or deviate from its original purpose in accordance the Credit Agreement;*
- g. *If the term of the promissory note will be discharged and estimated still required by the Debtor, then a letter requesting the extension of the term of the promissory notes must be submitted a maximum of 14 (fourteen) working days before the expiry of the valid term of the promissory notes out with the extension term of the promissory note, which applies the maximum is 6 (six) months and can be re-extended each subsequent month during the 6 (six) months with regard to the remaining term of the credit;*
- h. *The debtor is obliged to perform a "clean up" (decrease in debit balance/repayment of a debit balance) with the following records:*
 - i. *Clean Up is made against the credit facilities transactional a minimum of 1 (one) time in 1 (one) year, with a clean up period of at least 3 (three) working days;*
 - ii. *Clean Up must be done before the withdrawal of further credit.*

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

The balance in the beginning of 2020 amounted to Rp25,071. Total disbursement during the year Nil. The payment in the year is Rp4. The balance on December 31, 2020 is Rp25,067.

PT PPAF

Based on The Addendum III Credit Agreement dated August 18, 2020 Number 20 made before Notary Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., PT PPAF has obtained a maximum Current Account Loan Facility of Rp42,000. with an interest rate of 10.5%. The nature of the Current Account Loan facility is revolving. Current Account Loan term is 9 months.

PT PPAF submits a guarantee to the bank in the form of a fiduciary guarantee for net receivables of at least 110% of the principal. PT PPAF are required to comply with financial condition constraints by maintaining a maximum Debt Equity Ratio of 8 times. As of December 31, 2020, PT PPAF has

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PPAF telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2020 untuk fasilitas kredit rekening koran sebesar Rp7.489. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp66.163. Total pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp31.758. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 atas fasilitas rekening koran sebesar Rp41.894.

**5) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1/ADDPK/01/2020 dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Perusahaan telah disepakati bahwa fasilitas yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur diperpanjang untuk jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai tanggal 28 November 2020 dengan ketentuan *tenor* per Penarikan adalah sesuai dengan *underlying* dokumen penarikan dan tidak melampaui jangka waktu Fasilitas.

Berdasarkan Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No:548/ADDPK/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Kreditur setuju memberikan Kredit kepada Perusahaan dengan Limit Kredit Sebesar Rp11.894. Jangka waktu 5 bulan sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan 28 April 2021. Melalui surat No.BS.0135/BMN/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari Bank LPEI menyatakan bahwa pinjaman PPA dinyatakan lunas pada tanggal 30 Desember 2020.

PT NK

Berdasarkan surat persetujuan kredit No. BMN/SP3/14/2020 dan No. 005/PJMN/SP3/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, PT NK, memperoleh kredit modal kerja dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), antara lain:

- 1) Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor;
 - a. Pagu kredit yang diberikan Rp400.000;
 - b. Tingkat suku bunga sebesar 9,30%;
 - c. Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2021;
 - d. Jaminan berupa:
 - Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh LPEI minimal 125% dari total pagu kredit;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

complied with the loan terms and conditions determined by the bank.

The initial balance of 2020 for the bank account credit facility amounted to Rp7,489. Total disbursement during the year of Rp66,163. Total payment during the year of Rp31,758. The balance on December 31, 2020 for the bank account facility amounted to Rp41,894.

**5) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
The Company**

Under the Working Capital Loan agreement No. 1/ADDPK/01/2020 with Indonesian Export Financing Institute and the Company has been agreed that the facilities provided by the creditor to the debtor are extended for a period of 12 months from November 28, 2019 until November 28, 2020 with the terms of tenor per withdrawal is in accordance with the underlying withdrawal documents and not exceeding the facility period.

Based on the Second Amendment of Export Working Capital Credit Agreement No:548/ADDPK/12/2020 dated December 2, 2020, creditors agreed to provide Credit to companies with a Credit Limit of Rp11,894. Period of 5 months from November 28, 2020 to April 28, 2021. Through letter No.BS.0135/BMN/12/2020 from LPEI Bank stated that ppa loan is declared fully paid on December 30, 2020.

PT NK

Based on the credit agreement letter No. BMN/SP3/14/2020 and 005/PJMN/SP3/06/2020 date June 4, 2020, PT NK, obtained working capital credit from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), such as:

- 1) *Financing facility of Working Capital Export Credit;*
 - a. *Maximum limit amounting to Rp400,000;*
 - b. *Interest rate at 9.30%;*
 - c. *The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2020 until June 9, 2021;*
 - d. *Collaterals:*
 - *Accounts receivable over a contract that financed and/or guaranteed by LPEI minimum 125% of total Maximum limit;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Tanah dan bangunan diatas SHGB No. 19 yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.918;
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama PT NK telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862;
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp11.563;
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133;
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999;
 - Tanah di atas SHGB No. 1347 yang berlokasi di Jl. Cisait, Kelurahan Walantaka, Kragilan, Serang, Banten.
- 2) Fasilitas Penerbitan dan/atau Pembiayaan LC/SKBDN
- a. Pagu kredit yang diberikan Rp250.000;
 - b. Tujuan penggunaan untuk proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor);
 - c. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2020 s/d 9 Juni 2021;
 - d. Jaminan: piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Indonesia Eximbank minimal sebesar 125% dari total limit kredit.
- Land and buildings on SHGB No. 19 located at Jl. Padma No.6 Kotamadya Denpasar, Bali registered under the name of PT NK tied with mortgage right rating I amounting to Rp1,918;
 - The land and building on SHGB No. 352, located at Jl. Ciung Wanara no.1 Bandung registered under the name of PT NK tied with mortgage right rating I amounting to Rp4,862,
 - The land and building on SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A Sumerta Kelod Village, East Denpasar, Bali registered under the name of PT NK tied with mortgage right rating I amounting to Rp11,563);
 - The land and building on SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Ampenan Selatan Village, Mataram, West Nusa Tenggara registered under the name of PT NK tied with mortgage right rating I amounting to Rp10,133;
 - The land and building on SHGB No. 356, located at Jl. Parikesit No.10, West Cakranegara Village, Cakranegara, West Nusa Tenggara, registered under the name of PT NK tied with mortgage right rating I amounting to Rp999;
 - The Land on SHGB No. 1347, located at Jl. Cisait, Walantaka Village, Kragilan, Serang, Banten.
- 2) LC/SKBDN Publishing and/or Financing Facilities
- a. Maximum credit limit amounting to Rp250,000;
 - b. The Purpose of use is for the overseas or domestic projects, which related to projects that support international trade (exports);
 - c. The period is for 1 (one) year starting June 9, 2020 until June 9, 2021;
 - d. Guarantees: accounts receivable for contracts financed and / or guaranteed by Indonesia Eximbank at a minimum of 125% of the total credit limit.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- 3) Fasilitas Penjaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Pagu kredit yang diberikan Rp200.000;
 - Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor;
 - Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2021.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp25.000. Total pencairan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp286.500. Total pelunasan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp145.000. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp166.500.

**6) PT Bank Mega Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.121 tanggal 27 Mei 2019 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mega Tbk. Bahwa berdasarkan perjanjian Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank dalam bentuk:

- Fasilitas *Demand Loan* 1 dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000;
- Fasilitas *Demand Loan* 2 dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000.

Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 telah ditandatangani Perjanjian Kredit Ketujuh Nomor: 050/ADD-PK/COLG-LCCL/2020 untuk perpanjangan waktu fasilitas sebagai berikut:

- Untuk Fasilitas *Demand Loan* 1 selama 11 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal akhir 9 Mei 2021;
- Untuk Fasilitas *Demand Loan* 2 selama 11 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal akhir 9 Mei 2021.

Tingkat suku bunga untuk Fasilitas DL 1 dan DL 2 sebesar 10,75% per tahun yang dihitung dari jumlah baki debet/*outstanding* fasilitas pinjaman dengan ketentuan tingkat bunga tersebut dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh bank (*floating rate*). Sehubungan dengan perpanjangan perjanjian ini dikenakan biaya provisi sebesar 0,25% per tahun dari *outstanding* terakhir untuk setiap fasilitas pinjaman dan *advisory fee* sebesar 0,25% yang akan dibayar dalam 3 tahap.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- 3) *Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Guarantee Facilities*
- Maximum credit limit amounting to Rp200,000;*
 - The Purpose of use is for infrastructure projects undertaken in both domestic and foreign, which support export activities;*
 - The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2020 until June 9, 2021.*

The balance at the beginning of 2020 is Rp25,000, The total loan disbursement for the period of 2020 is Rp286,500. The total loan repayment period 2020 is Rp145,000. The balance as of December 31, 2020 is Rp166,500.

**6) PT Bank Mega Tbk
The Company**

Based on the Credit Agreement No.121 dated May 27, 2019 before the notary Desman, S.H., M.Hum., M.M., The Company signed a Credit Agreement with PT Bank Mega Tbk. Based on the agreement, the Company obtained a loan facility from the Bank in the form of:

- Demand Loan 1 facilities in a principal amount of not more than Rp500,000;*
- Demand Loan 2 facility in the principal amount of not more than Rp500,000.*

On Monday the 8th of June 2020 was signed the seventh Credit Agreement number: 050/ADD-PK/COLG-LCCL/2020 for the extension of the facility period as follows:

- For facilities DL 1 for 11 months from the maturity date of June 9, 2020 until the end date of 9 May 2021;*
- For facilities of DL 2 for 11 months from the maturity date of June 9, 2020 until the end date of 9 May 2021.*

The interest rate for the DL 1 and DL 2 facilities is 10.75% per annum which is calculated from the number of debit/outstanding balance of loan facilities with the provision of the interest rate subject to change and will be reviewed at any time by the floating rate. In connection with the extension of this agreement, a provision fee of 0.25% per annum from the final outstanding for each loan facility and advisory fee of 0.25% will be paid in 3 phases.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan wajib menjaga *non-financial covenant* selama jangka waktu Kredit sebagai berikut:

- a. Penggunaan Fasilitas Pinjaman Perusahaan wajib, menggunakan fasilitas pinjaman semata-mata hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dan tidak untuk keperluan lain;
- b. Penarikan Modal Disetor Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi penarikan modal disetor;
- c. Perubahan Anggaran Dasar, Struktur Modal, Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi Perubahan anggaran dasar yang mengakibatkan berubahnya struktur modal, susunan pemegang saham atau susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Perubahan Usaha Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi perubahan bidang atau jenis kegiatan usaha Perusahaan;
- e. Pembagian Dividen Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terdapat persetujuan untuk pembayaran/pembagian dividen baik dari pendapatan maupun modal;
- f. Mengalihkan Usaha atau Jaminan Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi penjualan, pengalihan atau beralihnya usaha atau jaminan Perusahaan kepada pihak lain;
- g. Menyerahkan Laporan Perusahaan wajib, menyampaikan kepada Bank Mega:
 - i. Laporan Keuangan Tahunan Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang independen dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah berakhir setiap tahun buku yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Company must maintain the financial covenant for the duration of the Credit as follows:

- a. The use of the Loan Facility, the Company must, using the loan facility solely for the purposes referred to in the Agreement and not for other purposes;
- b. The withdrawal of the Paid-up Capital of the Company shall, within a period of 15 (fifteen) Working Days of receipt of the decision of the General Meeting of Shareholders, notify the Bank of the Mega event of the withdrawal of the paid-up capital;
- c. Amendment of articles of association, Capital Structure, Shareholders and the Board of the Company shall, within a period of 15 (fifteen) Working Days of receipt of the decision of the General Meeting of Shareholders, notify the Bank of the Mega event of Changes to the budget basis which resulted in changes in the capital structure, the composition of the shareholders or of the board of Directors and Board of Commissioners;
- d. Change of Business the Company shall, within a period of 15 (fifteen) Working Days of receipt of the decision of the General Meeting of Shareholders, communicate with Bank Mega if there is a change field or type of business activities of the company;
- e. Distribution of Dividend the Company shall, within a period of 15 (fifteen) Working Days of receipt of the decision of the General Meeting of Shareholders, communicate with Bank Mega if there is approval for payment/distribution of dividend either from income or capital;
- f. Divert Business or Assurance Company shall, within a period of 15 (fifteen) Working Days of receipt of the decision of the General Meeting of Shareholders, notify the Bank of the Mega event sale, diversion or transfer of business or guarantees of the Company to other parties;
- g. Submit Reports of the Company shall, deliver to Bank Mega:
 - i. Annual Financial report annual financial Report audited by public accountant office registered independent in a period of at least 180 (one hundred eighty) calendar days after the end of each financial year consisting of balance sheet and income statement, prepared in accordance with accounting principles and practices generally accepted in Indonesia and

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui Bank Mega;

- ii. Laporan Keuangan Enam Bulanan
Laporan keuangan enam bulanan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya setiap periode enam bulanan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang disertifikasi oleh Direksi Perusahaan;
- iii. Laporan Aging Bulanan atas Portofolio Piutang yang Dibiayai
Laporan aging bulanan atas portofolio piutang yang dibiayai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya setiap periode pelaporan tersebut.
- h. Membuka dan Mengaktifkan Rekening Perusahaan wajib, segera setelah tanggal Perjanjian ini tetapi tidak kurang dari tanggal Penarikan pertama dilakukan, membuka rekening koran pada kantor atau kantor-kantor Bank Mega dan mengaktifkan transaksi keuangan usahanya melalui rekening atau rekening-rekening yang dibuka pada Bank Mega;
- i. Pemeriksaan Perusahaan wajib, setiap saat dalam jam kerja atau tidak, mengizinkan Bank mega atau karyawannya atau wakilnya masuk ke kantor dan tempat lain milik Perusahaan, termasuk lokasi usaha Perusahaan, dan memeriksa, meneliti dan membuat salinan buku-buku keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas kepada piutang-piutang) dan catatan Perusahaan sehubungan dengan usaha Perusahaan, dan kunjungan tersebut bukan merupakan suatu tindakan memasuki pekarangan tanpa hak;
- j. Sengketa Perusahaan wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank Mega apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perkara dimana Perusahaan menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau harta kekayaan Perusahaan dan berdampak terhadap kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian;

consistently applied, audited by a registered public accounting firm approved by Bank Mega;

- ii. Of Financial statements Six Monthly financial Report six monthly in the period of at least sixty (60) calendar days after the end of each period, six-monthly, consisting of the balance sheet and income statement, prepared in accordance with accounting principles and practices generally accepted in Indonesia and consistently applied, certified by the board of Directors of the Company;
- iii. Report of Aging Monthly on the Portfolio of Receivables
Report aging monthly on a portfolio of receivables financed no later than 15 (fifteen) calendar days after the end of each reporting period such.
- h. Open and Activate the Account of the Company shall, immediately after the date of this Agreement but not less than the date the first Withdrawal is done, open a newspaper account at the office or offices of the Bank Mega and to enable financial transactions of its business through the account or accounts opened in Bank Mega;
- i. Inspection the Company shall, at any time in the working hours or not, allow a mega Bank or any of its employees or its representatives entry to the offices and other premises belonging to the Company, including the location of the Company's business, and inspect, examine and make copies of the financial books (including but not limited to accounts receivable-accounts receivable) and notes of the Company in connection with the Company's business, and the visit was not an act of entering the yard without the right;
- j. The dispute the Company shall, immediately within a period of 7 (seven) Working Days since its occurrence, notify the Bank Mega if there is a dispute, the dispute or cases where the Company becomes a party to or is involved concerning the amount of money or assets of the Company and have an impact on the ability of the Company to perform its obligations under the Agreement and other documents related to the Agreement;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- k. Kejadian Pelanggaran Perusahaan wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank Mega apabila terjadi Kejadian Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian atau kejadian lain yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu Kejadian Pelanggaran, termasuk sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh Perusahaan untuk menanggulangnya;
- l. Penggunaan Laba Usaha Perusahaan wajib menggunakan laba usaha untuk pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Bank Mega berdasarkan Perjanjian;
- m. Pencatatan Pembukuan dan Pengawasan Pengeluaran Perusahaan wajib mengelola sistem pencatatan pembukuan dan mengawasi pengeluaran biaya serta pencatatan transaksi keuangan lainnya dengan benar dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia;
- n. Membayar Pajak Perusahaan wajib, membayar tepat pada waktunya pajak-pajak dan bebanbeban lain seperti itu yang wajib dibayar oleh Perusahaan, baik atas pendapatan yang diperoleh maupun atas harta kekayaan Perusahaan;
- o. Kerugian Perusahaan wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank Mega apabila terjadi kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan yang dibiayai oleh Bank Mega sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha Perusahaan;
- p. Mematuhi Peraturan Perusahaan wajib mematuhi dan menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga dan memelihara izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang yang perlu untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara tertib, termasuk namun tidak terbatas kepada Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- q. Perizinan di Kemudian Hari, Perusahaan wajib atas biayanya sendiri dalam mengurus, membuat dan mendapatkan izin serta persetujuan atau dokumen lain yang disyaratkan dikemudian hari oleh, dan harus melakukan pemberitahuan atau laporan yang diperlukan di kemudian hari kepada, setiap badan pemerintah yang berwenang guna melaksanakan usaha atau

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- k. *The incidence of Violations the Company shall, immediately within a period of 7 (seven) Working Days since its occurrence, notify the Bank Mega if the Event of a Violation as referred to in the Agreement or other event which with notice or the passage of time, or both, Occurrence of the Violation, including the nature of the incident and the steps taken by the Company to mitigate them;*
- l. *The use of the Business Profit of the Company is obliged to use business profits to the payment of the obligations of the Company to the Bank Mega based on the Agreement;*
- m. *Recording and Monitoring Expenses the Company shall, manage the system of recording and watching expenses as well as the recording of other financial transactions correctly and honestly in accordance with the accounting principles of Indonesia;*
- n. *Pay Tax the Company is obliged, to pay on time the taxes and charges others like it which shall be paid by the Company, either on the income earned and the assets of the Company;*
- o. *Losses of the Company shall, immediately within a period of 7 (seven) Working Days since its occurrence, notify the Bank of the Mega event of loss or damage to the assets of the Company relating to the business activities of the Company are financed by Mega-Banks resulting in the disruption of the business activities of the Company;*
- p. *Comply with Regulations the Company shall comply with and obey any laws and regulations that apply as well as keep and maintain the permits and approval-the approval required by the relevant authorities who need to carry out their business activities in an orderly manner, including but not limited to, taxpayer identification Number, Sign the List of Companies, Business license of Industry and Trade Permit;*
- q. *Licensing at a Later date, the Company shall, at its own expense, take care of, create and get a permit, approval or other document required in the future by, and must perform notification or report required at a later date to, any government agency authorized in order to carry out pengoperasiona business or carry out their business activities and make and carry out*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

melaksanakan kegiatan usahanya dan membuat serta melaksanakan perjanjian ini (apabila ada) dan tepat pada waktunya mengirimkan salinan daripadanya kepada Bank Mega;

- r. Penandatanganan Dokumen Jaminan Atas permintaan Bank Mega dan atas biayanya sendiri Perusahaan wajib membuat dan menandatangani setiap Dokumen Jaminan yang disyaratkan oleh Bank Mega dalam Perjanjian ini;
- s. Pengikatan Jaminan Perusahaan harus mengikat atau menyebabkan diikatnya Jaminan berdasarkan Perjanjian menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan hak preferensi kepada Bank Mega;
- t. Menjaga Harta Kekayaan, Eksistensi dan Izin Perusahaan wajib menjaga: (i) harta kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; (ii) kelangsungan eksistensi hak-hak, ijin-ijin dan, kepentingan yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara tertib dan efisien;
- u. Dokumen Tambahan Perusahaan wajib, tepat pada waktunya dan atas permintaan Bank Mega, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan dan mendaftarkan atas biayanya sendiri semua perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen, sertifikat dan surat-surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya serta melakukan tindakan-tindakan seperti itu sebagaimana yang harus atau wajar dilakukan guna melaksanakan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian;
- v. Informasi Lain Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permintaan oleh Bank Mega, menyampaikan kepada Bank Mega, setiap informasi, sehubungan dengan Perjanjian dan kegiatan operasional usahanya sebagaimana Bank Mega setiap saat memintanya;
- w. Penyerahan Piutang yang Menjadi Jaminan Perusahaan wajib, menyerahkan piutang yang dijaminkan kepada Bank Mega, dengan kondisi:
 - i. Piutang dalam kondisi lancar (current);
 - ii. Piutang berkaitan dengan proyek BUMN atau anak perusahaan BUMN;
 - iii. Piutang tidak *double pledge* dengan kreditur lainnya;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

this agreement (if any) and just in time send a copy thereof to the Bank Mega;

- r. *The signing of the Guarantee Document at the request of the Bank Mega and at its own expense the Company is obliged to make and sign any Guarantee Documents required by Bank Mega in this Agreement;*
- s. *A binding Guarantee of the Company should be binding or causing the bound Guarantee on the basis of Agreements according to legal and statutory provisions applicable in Indonesia so that it can provide the right preference to Bank Mega;*
- t. *Keep the Wealth, the Existence and Permits the Company shall maintain: (i) assets that are important to its business activities; (ii) the continuity of the existence of the rights, licenses and interests necessary to carry out its business in an orderly and efficient manner;*
- u. *Additional documents the Company is obliged, on time and at the request of Bank Mega, sign, acknowledge, fulfill, invoke, and register at its own expense all agreements, documents, certificates, and additional papers which should be created next, as well as do actions such as that must be or reasonable in order to carry out other agreements related to the Agreement;*
- v. *Other information the Company shall, within a period of 14 (fourteen) calendar days since the date of the request by the Mega Bank, deliver to Bank Mega, any information, in connection with the Agreement and the operational activities of the business as a Mega Bank at any time asked for it;*
- w. *Submission of Receivables to Be the Best of the Company shall, submit the receivables pledged as collateral to Bank Mega, with conditions:*
 - i. *Accounts receivable in the conditions of the current (current);*
 - ii. *Receivables associated with the project state-owned or subsidiaries of state-owned;*
 - iii. *Accounts receivable do not double the pledge with the other creditors;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- iv. Tidak termasuk kategori piutang bailout atau revitalisasi BUMN yang ditugaskan langsung oleh pemerintah;
- x. Rekonsiliasi dan Verifikasi Piutang Perusahaan wajib, mengizinkan Bank Mega, setiap bulannya, untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi piutang yang dijaminkan;
- y. Penukaran Piutang
 - i. Perusahaan wajib, melakukan penukaran piutang dengan piutang yang lancar dan clear, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilakukannya rekonsiliasi dan verifikasi, apabila dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, ditemukan:
 - a) Piutang yang *Date Past Due* (DPD) lebih besar dari 0 (nol) hari;
 - b) Piutang *double pledge/double financing* dengan kreditur lain;
 - c) Piutang fiktif/piutang yang telah lunas;
 - ii. Dalam hal Perusahaan tidak dapat melakukan penukaran piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka seluruh fasilitas pinjaman akan dihentikan (*freeze*)/tidak dapat melakukan pencairan sebelum dilakukannya penukaran piutang dimaksud;
- z. Pendaftaran/Pengkinian Data List Piutang Perusahaan wajib, melakukan pendaftaran piutang yang dijaminkan pada Bank Mega melalui Kantor Pendaftaran Fidusia serta melakukan pengkinian data list piutang yang dijaminkan setiap 3 (tiga) bulan.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal 1,3 kali;
- b. *Leverage* minimal 1,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp521.584. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp527.868. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp175.601. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp873.851.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- iv. Not belongs to the category of receivables bailout or revitalization of SOES are assigned directly by the government;
- x. Reconciliation and Verification of accounts Receivable of the Company shall, permit Bank Mega, every month, to perform the reconciliation and verification of accounts receivable pledged as collateral;
- y. Exchange of accounts Receivable
 - i. The company shall, exchange of receivables with the receivables that is smooth and clear, no later than within 1 (one) week after doing the reconciliation and verification, if of the result the reconciliation and verification as referred to in this Agreement, is found:
 - a) accounts Receivable Date Past Due (DPD) is greater than 0 (zero) days;
 - b) Receivables the double pledge/double financing with other creditors;
 - c) Accounts Receivable fictitious/receivables that have been paid off;
 - ii. In the event that the Company can not exchange the receivables referred to in this paragraph, then the entire loan facility will be stopped (*freeze*)/can't do redemptions prior to the redemption of the receivables in question;
- z. Registration/Data Update a List of accounts Receivable of the Company shall, conduct the registration of accounts receivable pledged as collateral on Bank Mega through Fiduciary Registration Office as well as updating the data list of the receivables pledged every 3 (three) months

The Company must maintain the financial covenant for the duration of the Credit as reflected in the financial statements as follows:

- a. *Current Ratio* minimum 1.3 times;
- b. *Leverage* minimum 1.5 times.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

The balance in the beginning of year 2020 amounted to Rp521,584. Total disbursement during the year of Rp527,868. Payment in the year of Rp175,601. The balance on December 31, 2020 is Rp873,851.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No.24 tanggal 7 November 2018 berdasarkan surat No. CRO.KP/397/KMK/2018 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank memberikan Fasilitas Kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat perjanjian dengan limit sebesar Rp500.000. Minimal limit untuk setiap *underlying* Perjanjian Pinjaman antara Debitur dengan nasabah Debitur yang dapat dibiayai Fasilitas KMK Transaksional Bank sebesar Rp20.000.

Bank memberikan waktu pinjaman selama 48 bulan terhitung dari tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 November 2022. Untuk tingkat suku bunga ditentukan 8,50% selama 12 bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. Bank memberikan provisi sebesar 0,25% dari nilai limit yang menjadi Fasilitas Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No.CRO.KP/547/2019 pada tanggal 15 Desember 2020 dihadapan Notaris Desman S.H., M.H., bahwa jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional diperpanjang selama 12 bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Atas Fasilitas Kredit Modal Kerja yang digunakan debitur wajib membayar bunga sebesar 8,50% per tahun.

Berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No.CRO.KP.548/KMK/2019 pada tanggal 15 Desember 2020, bahwa Perusahaan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional USD dari Bank dengan plafond 30.000 USD. Jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional ditetapkan untuk diperpanjang 12 bulan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Non Performing Financing* piutang di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Pernyataan Modal Negara (PMN) maksimal 5% (lima persen);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
The Company**

Based on the transactional working Capital Credit Agreement No. 24 dated November 7, 2018 based on letter No. Cro.KP/397/KMK/2018 before notary Desman, S.H., M. Hum., M.M., The Company signed a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank provides credit facilities with respect to the terms and conditions of the agreement with a limit of Rp500,000. Minimum limit for each underlying loan agreement between the debtor and debtor customer who can be financed by the Bank transactional facility amounting to Rp20,000.

The Bank provides loan time for 48 months from November 7, 2018 to November 6, 2022. Interest rates are determined to be 8.50% for 12 months and are subject to change at any time in accordance with the Bank's regulations. The Bank provides an provision of 0.25% of the limit value to be a transactional working capital credit facility.

Based on Addendum I of Transactional Working Capital Credit Agreement No.CRO.KP/547/2019 on December 15, 2020 before Notary Desman S.H., M.H., that the period of Transactional Working Capital Credit Facility is extended for 12 months starting from December 16, 2020 to December 15, 2021. For Working Capital Credit Facility used by debtors must pay interest of 8.50% per annum.

Based on Addendum I of Transactional Working Capital Credit Agreement No.CRO.KP.548/KMK/2019 on December 15, 2020, that the Company obtained the USD Transactional Working Capital Credit Facility from the Bank with a ceiling of 30,000 USD. The period of Transactional Working Capital Credit Facility is set to be extended for 12 months starting from December 16, 2020 to December 15, 2021.

The Company must maintain the financial covenant for the duration of the Credit as reflected in the financial statements as follows:

- a. *Non Performing Financing* accounts receivable outside of Restructuring and/or Revitalization financing and/or related party bailout funds using maximum State Capital Statement (PMN) funds of 5% (five percent);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- b. Total *outstanding* piutang di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Pernyataan Modal Negara (PMN) dengan tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari kalender dibagi dengan total *outstanding* piutang (di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Pernyataan Modal (PMN) sama dengan maksimal 5% (lima persen);
- c. *Leverage* maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dengan perhitungan total liabilitas dibagi dengan total ekuitasi sama dengan maksimal 150% (seratus lima puluh persen);
- d. Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank Mandiri Kategori A, paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan;
- e. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap daftar piutang pembiayaan yang dibiayai oleh Bank Mandiri dan checklist pemenuhan kriteria jenis piutang setiap 3 (tiga) bulan;
- f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk dan memperoleh kuasa dari Bank Mandiri (sepanjang bukan melakukan kompetitor Perusahaan) untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha, aktivitas usaha, dokumen pembiayaan termasuk memeriksa asli bukti kepemilikan obyek pembiayaan terkait dengan Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan 5 (lima) Hari Kalender sebelumnya. Di samping itu, Perusahaan juga mengizinkan Bank Mandiri untuk masuk ke dalam database piutang Perusahaan secara nasional untuk dapat meyakinkan tingkat *accuracy* dan *integrity* dan laporan-laporan/informasi yang disampaikan Perusahaan kepada Bank Mandiri;
- g. Selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlaku, Perusahaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender dalam hal telah dilakukan sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- b. Total *outstanding receivables* excluding *Restructuring and/or Revitalization financing and/or bridging funds of related parties using State Capital Statement (PMN) funds with arrears in principal and / or interest of more than 90 (ninety) Calendar days divided by total outstanding receivables excluding financing for Restructuring and/or Revitalization and / or Bailout related parties using the Capital Statement (PMN) fund equal to a maximum of 5% (five percent);*
- c. *Maximum leverage of 150% (one hundred and fifty percent) with the calculation of total liabilities divided by total equations equal to a maximum of 150% (one hundred and fifty percent);*
- d. *Submitting unaudited financial reports every quarter and at the latest has been received by Bank Mandiri 60 (sixty) days after the end of the audited annual report and audited financial statements by Category A Bank Mandiri Public Accountant Firm, at the latest has been received by Bank 180 (one hundred eighty) days after the end of the reporting period;*
- e. *Allow Mandiri Bank or the party appointed to conduct an examination of the list of financing receivables financed by the Bank and a checklist of fulfillment of the criteria of the type of accounts receivable every 3 (three) months;*
- f. *Allow Bank Mandiri or any other party appointed and have power of Bank Mandiri (throughout instead of doing a competitor of the Company) to at any time perform the inspection/supervision of a business, business activity, document the financing, including check out the original proof of ownership of the object of financing related to Credit Facility from Bank Mandiri in advance notify in writing to the Company 5 (five) Calendar Days in advance. In addition, the Company also allowed Bank Mandiri to enter into the database the receivables of the Company nationally to be able to assured levels of accuracy and integrity, and reports/information submitted to the Company's Bank Mandiri;*
- g. *For the Credit Agreement with respect applicable, the Company must notify in writing to the Bank no later than 30 (thirty) Calendar Days in the case has been carried out as follows:*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- i. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (*subordinate loan*);
- ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman/hutang dari pihak lain dimana pemberitahuan tersebut dapat disampaikan melalui laporan pemberitahuan tersebut dapat disampaikan melalui laporan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- iii. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, mengadakan atau melakukan pemanggilan rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun Dewan Komisaris) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi perubahan pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham mayoritas;
- h. Perusahaan wajib menjaga saldo minimum Dana Pihak Ketiga di Bank Mandiri setiap bulannya minimal sebesar Rp15.000 (lima belas miliar Rupiah);
- i. Perusahaan menggunakan fasilitas Mandiri *Cash Management* untuk operasional Perusahaan;
- j. Pengikatan dan pembaharuan daftar piutang pembiayaan yang dijaminkan ke Kantor Fidusia dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dimana biaya pendaftaran piutang tersebut menjadi beban Perusahaan;
- k. Bahwa pelaksanaan penandatanganan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian lain antara Perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, termasuk tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga lainnya atas Fasilitas Kredit yang diberikan;
- l. Perusahaan dalam menjalankan usahanya wajib mengikuti/tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- m. Perusahaan dapat melakukan pembagian dividen dan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk membagikan dividen selama Perusahaan tidak lalai melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Mandiri;
- n. Menyampaikan rencana pelunasan atas *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan Perusahaan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo MTN;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- i. Pay the debt to the shareholders/owners of the company own (*subordinate loan*);
- ii. Obtaining credit facilities or loans/debts of the other party where such notice can be delivered through reports such notice may be delivered via a report in accordance with the provisions in this Agreement;
- iii. Hold mergers, acquisitions, sell assets except in the transaction of business reasonable, hold or perform the calling of the general meeting of shareholders annual or extraordinary general meeting of shareholders with the agenda of changing capital and or change the name of the board (board of Directors or Board of Commissioners) as well as recorded delivery/transfer of the shares, provided that in the event of a change in the shareholders of the Government The republic of Indonesia remains the majority shareholder;
- h. The company must maintain a minimum balance of Third Party Funds in Bank Mandiri, every month a minimum amount of Rp15,000 (fifteen billion Rupiah);
- i. The company uses the Cash Management for the Company's operations;
- j. The binding and update the list of financing receivables that have been pledged to the Office of the Fiduciary is conducted every 6 (six) months where the cost of registration of these receivables into the Company's expenses;
- k. That the implementation of the signing of this Agreement does not violate any other agreement between the Company with other third parties, including the is not required the consent of other third parties on the Credit Facility given;
- l. Company in running the business is obliged to follow/subject to the provisions of the applicable law in Indonesia;
- m. The company can make dividend distribution and does not require prior written approval to distribute dividends for the Company did not negligently perform the payment obligation to Bank Mandiri;
- n. Delivered a repayment plan over the Medium Term Notes (MTN) issued by the Company, not later than 3 (three) months before the maturity of the MTN;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- o. Seluruh pembayaran kewajiban ke Bank Mandiri dilakukan dengan mekanisme debit rekening giro escrow atau operasional dan Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan dana dalam rekening tersebut selambat lambatnya pada tanggal pembayaran.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp377.190. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp760.924. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp633.734. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp504.380.

PT PPAK

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit CRO.KP/084/KMK/2019 No.37 tanggal 27 Maret 2019 dihadapan Notaris Adrian Djuaini, S.H. PT PPAK menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Plafond pinjaman tersebut sebesar Rp147.043. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dari 27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2029.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit CRO.KP/084/KMK/2019 No. 38 tanggal 27 Maret 2019 dihadapan Notaris Adrian Djuaini, S.H. PT PPAK menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Plafond pinjaman tersebut sebesar Rp210.542. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 2% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dari 27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2029.

Terhadap kewajiban bunga, ditangguhkan pembayarannya selama 6 bulan sejak tanggal efektif perjanjian dan bunga yang ditangguhkan dibayar pro rata selama 12 bulan.

Terkait dengan *debt covenant*, PT PPAK berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Bank Mandiri sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan Neraca, Laba/Rugi PT RILJ dan PT PPAK per 3 (tiga) bulanan paling lambat telah diterima 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode per bulan;
- b. Menyampaikan laporan aktivitas usaha meliputi laporan penjualan, laporan utang dan piutang usaha, dan rekening koran dari seluruh bank atas nama PT RILJ setiap

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- o. All payment obligations to the Bank Independent do with the mechanism of debit current accounts escrow or operations, and the Company is obliged to provide funds in such account no later than on the date of payment.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

The balance at the beginning of 2020 was Rp377,190. Total disbursement during the year of Rp760,924. The payment in the year is Rp633,734. The balance on December 31, 2020 is Rp504,380.

PT PPAK

Based on the Deed of Credit Agreement CRO.KP/084/KMK/2019 No.37 dated March 27, 2019 before Notary Adrian Djuaini, S.H. PT PPAK entered into a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the loan ceiling amounting to Rp147,043. The loan interest rate is 4% per annum with a loan term of 10 years from March 27, 2019 to March 27, 2029.

Based on the Deed of Credit Agreement CRO.KP/084/KMK/2019 No.38 dated March 27, 2019 before Notary Adrian Djuaini, S.H. PT PPAK entered into a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the loan ceiling amounting to Rp210,542. The loan interest rate is 2% per annum with a loan term of 10 years from March 27, 2019 to March 27, 2029.

With respect to interest obligations, payment is deferred for 6 months from the effective date of the agreement and the deferred interest is paid pro rata for 12 months.

Related to debt covenants, PT PPAK is obliged to provide reports to Bank Mandiri as follows:

- a. Submit reports Balance sheet, Profit/Loss PT RILJ and PT PPAK per 3 (three) monthly the latest have been received sixty (60) calendar days after the end of the period per months;
- b. Submit reports on the activities of the business include sales reports, report debt and accounts receivable, and account of newspapers from around the bank on

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

bulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir periode per bulan;

- c. Menyerahkan Laporan Keuangan audited tahunan PT RILJ yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik yang masih terdaftar sebagai rekanan Bank Mandiri dan paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
- d. Menyalurkan seluruh aktivitas transaksi keuangan dan operasional PT RILJ melalui kantor Cabang Bank Mandiri;
- e. Senantiasa menjaga dana di dalam rekening penampungan/escrow PT PPAK sebelum tangga jatuh tempo sekurang-kurangnya sebesar angsuran pokok dan atau bunga yang akan jatuh tempo;
- f. Menjaga rasio *covenant DSCR (Debt Service Coverage Ratio)* minimal 100%, *Current Ratio* minimal 100% dan *Equity* selalu positif yang tercermin dalam laporan keuangan PT PPAK mulai tahun 2019 dan seterusnya;
- g. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT PPAK;
- h. Melaporkan setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran PT PPAK dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan;
- i. Meningkatkan modal disetor, termasuk konversi hutang pemegang saham menjadi modal disetor, apabila disyaratkan oleh Bank Mandiri.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, PT PPAK telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo awal tahun 2020 untuk fasilitas kredit rekening koran sebesar Rp357.854. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Nihil. Total pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp5.324. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp352.260.

PT PPAF

Pada tanggal 29 November 2017, PT PPAF menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja I Nomor 154 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dihadapan Notaris M. Kholid

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

behalf of PT RIL every month later than has been received by the Bank Mandiri thirty (30) calendar days after the end of the period of per month;

- c. Submit audited Financial Statements annual PT RIL compiled by the Office of the Public Accountant who is still listed as a partner of Bank Mandiri and the slowest has been received by the Bank 180 (one hundred eighty) calendar days after the end of the reporting period;*
- d. Channel se whole activity of the financial transactions and operations of PT RIL through Mandiri Bank Branch office;*
- e. Always keep the funds in PT PPAK's escrow account/escrow before the ladder of maturity at least equal installment of principal and / or interest will be due;*
- f. Keep the ratio of covenant DSCR (Debt Service Coverage Ratio) of at least 100%, Current Ratio of at least 100% and Equity is always positive which is reflected in the financial statements PT PPAK start to the year 2019 and beyond;*
- g. Allow Bank Mandiri or any other party appointed from time to time perform inspection/supervision of business activities and financial statements PT PPAK;*
- h. Report any happenings and events that may affect the smooth PT PPAK in fulfilling its obligations under the Credit Agreement, including but not limited to the event of a fire, workplace accidents and strikes employees;*
- i. Increase the paid-up capital, including the conversion of the debts of shareholders to be paid-in capital, if required by Bank Mandiri.*

As of December 31, 2020 and 2019, PT PPAK has complied with the ratios and covenants as required.

The initial balance of 2020 for the bank account credit facility amounted to Rp357,854. Total disbursement during the year of Nil. Total payment during the year of Rp2,663. The balance on December 31, 2020 amounted to Rp352,260.

PT PPAF

Dated November 29, 2017, PT PPAF signed a Deed of Working Capital Credit Agreement No. 154 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the presence of Notary M. Kholid Artha, SH, with a

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Artha, S.H., dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000 dengan tingkat bunga 9,75% sampai dengan 1 tahun pertama, selanjutnya 9,90% dari tahun pertama sampai tahun kedua, selanjutnya 10,00% dari tahun kedua sampai dengan tahun ketiga.

Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 29 November 2021. PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan piutang bersih senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

Pada tanggal 29 Maret 2019, PT PPAF menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving Akta No. 111 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dihadapan Notaris M. Kholid Artha S.H., dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp150.000, dengan tingkat bunga 9,17% - 9,54% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 28 Maret 2023. PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank. PT PPAF diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan DPD (*Date Past Due*) lebih dari 60 hari atas seluruh portofolio tidak melebihi 3%. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT PPAF telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pada tanggal 29 Maret 2019, PT PPAF menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving Akta No. 112 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dihadapan Notaris M. Kholid Artha S.H., dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp150.000, dengan tingkat bunga 9,17% - 9,54% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 24 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 29 Maret 2021. PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank. PT PPAF diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan DPD (*Date Past Due*) lebih dari 60 hari atas seluruh portofolio tidak melebihi 3%. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT PPAF telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2020 pinjaman jangka panjang sebesar Rp238.106. Total pencairan di tahun berjalan sebesar Rp122.012. Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

maximum loan value of Rp75,000 with an interest rate of 9.75% up to the first year, then 9.90% from the first year to the second year, then 10.00% from the second year to the third year.

The credit period is 48 months from the date of signing up to November 29, 2021. PT PPAF submits collateral to banks in the form of binding fiduciary guarantees of net receivables totaling at least 110% of the principal amount of the credit facility to the bank.

On March 29, 2019, PT PPAF signed the Deed of Working Capital Credit Agreement Revolving Deed No. 111 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the presence of Notary M. Kholid Artha S.H., with a maximum loan value of Rp150,000, with an interest rate of 9.17% - 9.54% effective per annum. The credit period is 48 months from the signing date until March 28, 2023. PT PPAF submits a guarantee to the bank in the form of binding a fiduciary guarantee worth at least 110% of the principal amount of the credit facility to the bank. PT PPAF is required to comply with the limitations of financial conditions with DPD (*Date Past Due*) more than 60 days over the entire portfolio not exceeding 3%. As of December 31, 2020, PT PPAF has met the terms and conditions of the loan set by the bank.

On March 29, 2019, PT PPAF signed the Deed of Working Capital Credit Agreement Revolving Deed No. 112 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the presence of Notary M. Kholid Artha S.H., with a maximum loan value of Rp150,000, with an interest rate of 9.17% - 9.54% effective per annum. The credit period is 24 months from the signing date until March 29, 2021. PT PPAF submits a guarantee to the bank in the form of binding a fiduciary guarantee worth at least 110% of the principal amount of the credit facility to the bank. PT PPAF is required to comply with the limitations of financial conditions with DPD (*Date Past Due*) more than 60 days over the entire portfolio not exceeding 3%. As of December 31, 2020, PT PPAF has met the terms and conditions of the loan set by the bank.

The starting balance of 2020 long term loan is Rp238.105. Total disbursement in the year is Rp122.012. Total principal payment in the year

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

pembayaran pokok di tahun berjalan sebesar Rp163.748. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp196.370.

PT NK

Berdasarkan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 tanggal 02 September 2019 dan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.058/2019 tanggal 21 Agustus 2019. PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dan Tambahan Limit Fasilitas Non Cash Loan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1) Fasilitas Kredit Modal Kerja

- a. Pagu kredit sebesar Rp300.000.
- b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan akyproyek jasa Konstruksi a/d SPK/Kontrak;
- c. Jangka Waktu: Sejak penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan 25 Agustus 2022;
- d. Jaminan:
 - Piutang usaha dan/atau piutang retensi dan/atau piutang ventura bersama dan/atau tagihan bruto kepada pemberi kerja serta stock persediaan barang diikat fiducia
 - Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 414/Cipinang Cempedak, seluas 5.828 m², terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama PT NK;
 - Dua bidang tanah dan bangunan SHGB No. 1689 dan 1690, seluas 159 m² dan 100 m² di Komp. Sudirman Business Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru atas nama Perusahaan.

2) Non Cash Loan

- a. Pagu kredit sebesar Rp1.100.000;
- b. Jangka Waktu: sejak penandatanganan Perjanjian Kredit s.d. 25 Agustus 2021;
- c. Jaminan dikaitkan dengan jaminan KMK.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp30.000. Total pencairan pinjaman tahun 2020 sebesar 75.000. Total pelunasan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp39.000. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp66.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

is Rp163.748. The balance on December 31, 2020 on the loan facility amounted to Rp196.369.

PT NK

Based on the letter No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 date September 02, 2019 and No. CBG.CB2/SCD.SPPK.058/2019 dated on August 21, 2019. PT NK obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1) Working capital credit facility

- a. Maximum limit amounting to Rp300,000.
- b. Purpose of use: Additional working capital to support the implementation of construction services projects a / d SPK / Contract;
- c. Duration: Since the signing of the addendum to the Credit Agreement until August 25, 2022;
- d. Collateral:
 - Accounts receivable and / or accounts receivable retention and / or receivable from joint venture and / or gross amount due from customers and stock inventory fiduciary bound
 - Land and building SHGB No.414/Cipinang Cempedak, with a land area 5,828 Sqm, located at Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, East Jakarta registered under the name of PT NK;
 - Two land and buildings SHGB No.1689 and 1690, with a land area 159 Sqm and 100 Sqm, located at Sudirman Bussines Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru registered under the name of Company.

2) Non Cash Loan

- a. Maximum limit amounting to Rp1,100,000;
- b. Period: since the signing of credit add until August 25, 2021;
- c. Collateral is related with KMK revolving collateral.

The initial balance of 2020 is Rp30,000. The total loan disbursement 2020 is Rp75,000. Total repayment of loans 2020 amounting is Rp39,000. The balance on December 31, 2020 is Rp66,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**8) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk ("Bank BJB")**

Perusahaan

Berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK R/C) Terbatas dan Kredit Modal Kerja Umum No.1 tanggal 6 November 2020 dihadapan Notaris Nenny Yusni Hendriani, S.H., Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank BJB dengan plafond Rp100.000 untuk Fasilitas KMK/RC Terbatas dan plafond Rp100.000 untuk plafond KMK Umum. Jangka waktu KMK R/C Terbatas adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit awal yaitu tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2021. Jangka waktu KMK Umum adalah 84 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit awal yaitu tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2026. Pembayaran bunga dilakukan secara bulanan yaitu setiap tanggal 23 setiap bulan. Untuk Fasilitas KMK R/C Terbatas dan KMK Umum dikenakan provisi sebesar 0,25% dari nilai fasilitas kredit. Biaya administrasi yang dikenakan atas perpanjangan kredit sebesar Rp35.

Sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit, Perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan antara lain sebagai berikut:

a. Menyampaikan kepada Bank BJB:

- i. Laporan keuangan tahunan audited yang paling lambat diterima Bank BJB 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah akhir periode laporan;
- ii. Laporan keuangan *unaudited* setiap triwulan dan paling lambat diterima Bank BJB 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah akhir periode laporan;
- iii. Laporan bulanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk *hardcopy* yang terdiri atas:

- (a) Daftar Piutang yang dibiayai oleh Bank BJB dimana dalam daftar tersebut memuat *checklist* atas pemenuhan kriteria jenis piutang yang dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit ini dan nilainya tidak kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari *outstanding* Fasilitas Kredit per posisi akhir bulan sebelumnya dan disertai surat pernyataan yang menyatakan bahwa piutang sebagaimana Daftar Piutang sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- (b) Laporan portofolio pembiayaan secara keseluruhan;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**8) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk ("Bank BJB")**

The Company

Based on the First Addendum of Current Account Working Capital Credit Agreement (KMK R/C) Limited and General Working Capital Credit No.1 dated November 6, 2020 before Notary Nenny Yusni Hendriani, S.H., the company signed a Credit Agreement with Bank BJB with a ceiling of Rp100,000 for KMK/RC Limited Facilities and a ceiling of Rp100,000 for the General KMK ceiling. The limited period of KMK R/C is 24 months from the date of signing of the initial credit agreement, which is November 6, 2019 to November 6, 2021. The general kmk period is 84 months from the date of signing of the initial credit agreement, which is November 6, 2019 to November 26, 2026. Interest payments are made on a monthly basis every 23rd of every month. For Limited KMK R/C Facility and General KMK is subject to provision of 0.25% of credit facility value. Administration Fee charged for credit extension of Rp35.

In accordance with agreement credit loan, the Company should maintain the reporty properly to Creditor, as follows:

a. Deliver to Bank BJB:

- i. The annual financial statements audited slowest acceptable Bank BJB 180 (one hundred eighty) Calendar Days after the end of the reporting period;
- ii. Financial statements unaudited quarterly and no later than received by the Bank BJB sixty (60) Calendar Days after the end of the reporting period;
- iii. Monthly reports no later than 30 (thirty) days after the end of the month report in the form of *hardcopy* consisting of:

- (a) the List of Receivables which financed by Bank BJB where in the list contains a checklist for the fulfillment of the criteria of the types of accounts required under this Credit Facility and its value is not less than 125% (one hundred twenty five percent) of the outstanding Credit Facility per the position of the end of the previous month and accompanied by a written statement stating that the accounts receivable as a List of accounts Receivable in accordance with the actual conditions.
- (b) Report on the financing portfolio as a whole.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (c) Realisasi pembiayaan investasi baru yang mencantumkan nama nasabah, nominal pembiayaan, objek pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan;
- (d) Laporan *write off* dan pengambilalihan agunan secara keseluruhan;
- (e) *Outstanding* pinjaman di bank dan atau lembaga keuangan lainnya;
- b. Menyediakan dana dalam Rekening Pinjaman atau Operasional Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit;
- c. Menyerahkan copy perubahan Anggaran Dasar dan perpanjangan perizinan perusahaan (apabila telah jatuh tempo) paling lambat diserahkan kepada Bank 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo;
- d. Memperoleh, memiliki atau memenuhi ijin-ijin dan syarat-syarat yang diperlukan serta mempertahankan keberlakuan ijin-ijin tersebut, baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menjaga/memelihara dengan baik kualitas dan nilai barang-barang jaminan kredit sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan;
- f. Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank BJB paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
 - ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman/hutang dari pihak lain, kecuali fasilitas pinjaman yang akan digunakan dalam rangka kegiatan usaha Perusahaan;
 - iii. Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan acara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun komisaris) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Pemerintah Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham mayoritas;
- g. Menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan serta mengikuti/tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (c) the Realization of financing the new investment that lists the customer's name, nominal finance, object finance and term financing;
- (d) the Report write-off and takeover of the collateral as a whole;
- (e) Outstanding of loans at banks and or other financial institutions;
- b. Provide funds in the Loan Account or the Operating Company no later than on the payment date as set forth in the Credit Agreement;
- c. Submit a copy of the amendment and extension of licensing company (if due) latest submission to the Bank of 3 (three) months from the due date;
- d. Obtain, possess or meet the permit-the permit and the terms that are required as well as maintain the enforceability of permits, either now existing or arising at a later date in accordance with applicable regulations;
- e. Keep/maintain with the good quality and value of the goods the credit guarantee in accordance with the agreement binding the best;
- f. During the Credit Agreement is still ongoing, the Company is obliged to notify in writing to BJB within the latest 30 (thirty) Calendar Days in doing things as follows:
 - i. Pay the debt to the shareholders/owners of the company own (sub-ordinate loan);
 - ii. Obtain credit facility or loan/debt from the other parties, except for loan facilities which will be used in the framework of the business activities of the Company;
 - iii. Hold mergers, acquisitions, sell assets except in the transaction of business reasonable, hold or call an annual general meeting or extraordinary general meeting of shareholders with the event of changing capital and or change the name of the board (directors and commissioners) as well as recorded delivery/transfer of the shares, provided that in the event of a change of shareholder, the Government of the Republic of Indonesia remains the majority shareholder;
- g. Running the business with the best sustainably as well as to follow/subject to the provisions of the applicable law in Indonesia;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- h. Menjaga agunan dengan baik secara kualitas maupun nilainya;
- i. Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Total *outstanding* pembiayaan di luar pembiayaan Dana Talangan dan pembiayaan restrukturisasi dan revitalisasi dengan tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Total *outstanding* pembiayaan di luar pembiayaan Dana Talangan dan pembiayaan Restrukturisasi dan Revitalisasi maksimal 5% (lima persen);
 - b. *Current Ratio* (CR) di atas 1 (satu) kali dengan perhitungan total aktiva lancar di atas 1 (satu) kali;
 - c. *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 1,5 (satu koma lima) kali dengan perhitungan total ekuitas maksimal 1,5 (satu koma lima) kali;
 - d. Rasio antara lembaga keuangan dengan tujuan penggunaan piutang pembiayaan/*outstanding* pinjaman perbankan minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) sesuai dengan nilai penjaminan piutang kepada Bank BJB.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp40.093. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp39.892. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp79.985. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah Nihil

PT NK

Berdasarkan Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Nindya Karya (Persero) No. 141/KKO-KO2/SPPK/2020 tanggal 23 Maret 2020, PT NK mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebagai berikut:

- a. Jenis fasilitas kredit yaitu Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) *Standby Loan switchable* fasilitas *non cash loan*;
- b. Pagu kredit yang diberikan Rp700.000.
- c. Tujuan:
Modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN.
 - Fasilitas *Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000. yang dapat ditarik untuk pembiayaan proyek sedangkan Fasilitas *Non Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000.;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- h. *Maintain the collateral with better in quality and value;*
- i. *The company is required to maintain the financial covenant for the duration of the Credit as reflected in the financial statements as follows:*
 - a. *Total outstanding financing outside the bailout fund and restructuring and revitalization financing with arrears in principal and / or interest of more than 30 (thirty) Calendar Days. The total outstanding financing outside of the Bailout Fund and Restructuring and Revitalization financing is a maximum of 5% (five percent);*
 - b. *Current Ratio (CR) above 1 (one) time with the calculation of total current assets above 1 (one) time;*
 - c. *Debt Equity Ratio (DER) a maximum of 1.5 (one point five) times with a calculation of total equity maximum 1.5 (one point five) times;*
 - d. *The ratio between financial institutions with the purpose of using financing receivables / outstanding bank loans of at least 125% (one hundred and twenty-five percent) in accordance with the value of guarantee receivables to BJB Bank.*

The balance in the beginning of year 2020 amounted to Rp40,093. Total disbursement during the year of Rp39,892. Payment in the year is Rp79,985. Balance on December 31, 2020 is Nil.

PT NK

Based on the Letter of Offer for Extension of Credit Facility PT Nindya Karya (Persero) No. 141/KKO-KO2/SPPK / 2020 dated on March 23, 2020, PT NK obtained a loan from PT Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (BJB Bank), as follows:

- a. *Type of credit facility is Working Capital Credit Constructions facility Standby Loan switchable non cash loan;*
- b. *Maximum credit limit amounting to Rp700,000,*
- c. *Purposes:*
Working capital of construction and procurement services for the project which the funds originate from APBN/APBD/SOE.
 - *The maximum of Cash Loan Facility is Rp350,000, which could be drawn for project financing, while the maximum of Non-Cash Loan Facility is Rp350,000,*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Fasilitas KKKM *standby loan switchable* fasilitas *Non Cash Loan* dengan sifat *Revolving* dengan proyek yang berbeda. Sifat fasilitas *Non Cash Loan* II adalah *Uncommitted, Advised, Revolving*;
 - Fasilitas *Non Cash Loan* dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, *Supply Chain Financing* (SCF), dan *Hedging*;
- d. Jangka Waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2020 sampai dengan 11 April 2021;
- e. Jaminan:
Piutang proyek diikat secara fidusia sebesar 125% dari plafon kredit.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp110.000. Total pencairan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp330.500. Total pelunasan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp223.100. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp217.400.

**9) PT Bank Woori Saudara Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 109 tanggal 28 Februari 2019 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. Bank memberikan Fasilitas Kredit *General Financing* dalam rangka pembiayaan Modal Kerja dengan memperhatikan ketentuan dan syarat perjanjian dengan plafon tidak lebih dari Rp140.000. tingkat suku bunga ditentukan 9,6% selama 12 bulan.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No.104 tanggal 28 Februari 2020 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Bank memberikan Fasilitas Kredit *General Financing* dalam rangka pembiayaan Modal Kerja dengan memperhatikan ketentuan dan syarat perjanjian dengan plafond tidak lebih dari Rp140.000. Tingkat suku bunga ditentukan 9% selama 12 bulan. Biaya provisi yang dikenakan 0,3% dan administrasi 0,1%. Jatuh tempo perjanjian ini pada tanggal 26 Februari 2021.

- a. Berdasarkan persyaratan perjanjian pinjaman, Perusahaan akan:
- i. Menerapkan setiap Pencairan yang dibuat berdasarkan Perjanjian untuk atau dalam rangka tujuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- The KKKM *standby loan switchable* facility is a *Non Cash Loan* facility with a *Revolving* nature with different projects. The nature of the *Non Cash Loan* II facility is *Uncommitted, Advised, Revolving*;
 - *Non-Cash Loan Facility* can be used as a mean of disposition for such transactions, such as SKBDN, L/C, Bank Bond, *Supply Chain Financing* (SCF) and *Hedging*;
- d. Time Period
12 (twelve) months since the previous credit's due date on April 11, 2020 until April 11, 2021;
- e. Collaterals:
Project receivables are tied in fiduciary terms of 125% of the credit ceiling.

The initial balance of 2020 is Rp110,000. The total loan disbursement 2020 is Rp330,500. The total loan repayment 2020 amounting is Rp223,100. The balance on December 31, 2020 is Rp217,400.

**9) PT Bank Woori Saudara Tbk
The Company**

According to credit facility agreement No. 109 dated 28 February 2019 before the notary Desman, S.H., M. Hum., M. M Company signed a credit agreement with PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. Bank providing General credit facilities Financing for working capital financing with respect to the terms and conditions of the agreement with loan limit no more than Rp140,000. Interest rates are determined to be 9.6% for 12 months.

Based on The Credit Facility Agreement No.104 dated February 28, 2020 in the presence of notary Desman, S.H., M.Hum., the Company signed a Credit Agreement with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. The Bank provides General Financing Credit Facility in order to finance Working Capital with regard to the terms and conditions of the agreement with the ceiling not more than Rp140.000. Interest rate is determined 9% for 12 months. Provision fees are subject to 0.3% and administration 0.1%. The agreement is due on February 26, 2021.

- a. Based on clausuf of the loan agreement, The company will:
- i. Apply each Disbursement made under the Agreement to or in the framework of the purposes as specified in the Agreement.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- ii. Dari waktu ke waktu sesuai permintaan Bank Woori, memberikan kepada Bank Woori informasi mengenai kondisi keuangan dan bisnis dari Perusahaan sebagaimana diperlukan secara wajar oleh Bank Woori.
- iii. Mengizinkan perwakilan Bank Woori setidaknya sekali dalam setahun untuk memasuki kantor/wilayah tempat kerja Perusahaan dan untuk memiliki akses ke administrasi keuangan dari Perusahaan untuk melaksanakan inspeksi acak dari laporan keuangan, setelah disampaikannya suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang wajar oleh Bank Woori atau berdasarkan permintaan dari badan otoritas yang berwenang atau sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Mempertahankan asuransi dengan perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh Bank Woori dan dalam bentuk dan substansi yang memuaskan Bank Woori, atas semua properti dan aset dengan cakupan pertanggungan yang biasa dan lazim dalam bidang-bidang usaha dan operasional Perusahaan dan untuk property dan aset yang dimiliki dan dari waktu ke waktu sesuai permintaan Bank Woori, Perusahaan akan mengirimkan kepada Bank Woori daftar, yang disahkan oleh petugas yang berwenang dari Perusahaan sebagai suatu daftar yang tepat dan benar, yang berisikan semua asuransi Perusahaan yang pada saat itu berlaku.
- v. Tanpa mengabaikan ketentuan di atas, Perusahaan akan dalam hal apapun mempertahankan asuransi dengan perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh Bank Woori terhadap semua properti yang dijamin berdasarkan Dokumen Jaminan yang dirujuk dalam Perjanjian dengan cakupan dan dalam jumlah sebagaimana dapat diminta oleh Bank Woori dari waktu ke waktu. Semua polis asuransi atas properti tersebut harus memuat loss payable endorsement untuk kepentingan dan dalam bentuk yang memuaskan Bank Woori.
- b. Perusahaan tidak akan (tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang wajar kepada Bank Woori dan dengan ketentuan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan atau yang secara wajar dapat timbul sebagai akibat daripadanya):

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- ii. From time to time according to demand Woori Bank, deliver to Bank Woori information about the financial condition and business of the Company as reasonably necessary by Woori Bank
- iii. Permit representatives of Woori Bank at least once in a year to enter the office/region place of work of the Company and to have access to the financial administration of the Company to carry out random inspections of the financial reports, having delivered a prior written notice which is reasonable by Woori Bank or on request from agency authorities or as required by laws and regulations that apply.
- iv. Maintain insurance with insurance companies that can be accepted by Woori Bank and in form and substance satisfactory Woori Bank, on all property and assets with coverage coverage that is usual and prevalent in areas of the business and operations of the Company and for and assets owned and from time to time according to demand Woori Bank, the Company will send to Woori Bank list, certified by an authorized officer of the Company as a list of proper and correct, which contains all of the insurance Company at the time it applies.
- v. Without ignore the above provisions, the Company will in any event maintain insurance with insurance companies that can be accepted by Woori Bank against all property pledged as collateral based on Collateral Documents referenced in the Agreement with the coverage and in the amount as may be required by Bank Mega from time to time. All insurance policies upon the property shall contain loss payable endorsement for the benefit of and in form satisfactory Woori Bank.
- b. The company will not (without prior written notice a reasonable to Woori Bank and provided that no Event of default continuing or that can reasonably arise as a result therefore):

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- i. Menjual, mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh aset-asetnya atau bagian darimanapun dari Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan.
- ii. Mengubah struktur modal, kecuali untuk tujuan peningkatan modal dari laba ditahan atau langganan baru dari pemegang saham yang ada atau persentase dari kepemilikan saham masing-masing.
- iii. Memberikan pertanggungan atau ganti kerugian untuk pinjaman pihak manapun.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp122.398 Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp115.372. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp103.096. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp134.674.

**10) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk
PT PPAF**

Pada tanggal 17 November 2017 PT PPAF menandatangani Perjanjian KUP Modal Kerja No. Akta 38 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dihadapan Notaris Dini Handanayatie, S.H. dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000. dengan tingkat bunga 11,5% efektif per tahun *adjustable rate* yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan bank. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 17 November 2022.

Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas daftar piutang yang dijaminan kolektibilitas lancar minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan kondisi keuangan sebagai berikut:

1. *Gearing ratio* maksimum 9 kali
2. Tingkat NPF di atas 90 hari maksimum 5% dari piutang bersih
3. *Financing Asset Ratio* (FAR) minimum 40%
4. Rasio Modal Sendiri - Modal Disetor (MSMD) minimum 50%
5. Rasio penyertaan Modal (PEYT) maksimum 40%
6. Rasio likuiditas minimum 1 kali

Saldo pada awal tahun 2020 pinjaman sebesar Rp47.394. Total pencairan di tahun berjalan adalah Rp108.753. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp24.252. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp131.895.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- i. Sell, transfer, rent, lease, lend or release by other means over the entire assets or part wherever of this Agreement and the security Documents.
- ii. Change the capital structure, except for the purpose of the capital increase from retained earnings or new subscription from existing shareholders or the percentage of ownership of each shareholder.
- iii. Provide coverage or indemnity for the loan of any party.

Balance at the beginning of year 2020 amounting to Rp122,398. Total disbursement during the year of Rp115,372. The payment in the year is Rp103,096. The balance on December 31, 2020 is Rp134,674.

**10) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk
PT PPAF**

On November 17, 2017 PT PPAF signed the Working Capital KUP Agreement No. Deed 38 with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah before Notary Dini Handanayatie, S.H. with a maximum loan value of Rp75,000 with an effective interest rate of 11,5% per annum, an *adjustable rate* that can change at any time according to bank regulations. The credit period is 60 months from the date of signing up to November 17, 2022.

The company submits collateral to the bank in the form of binding fiduciary guarantees on the list of receivables guaranteed by a current collectability of at least 110% of the principal amount of the credit facility to the bank.

Companies are required to comply with several restrictions in order to maintain their financial condition as follows:

1. Maximum gearing ratio 9 times
2. The NPF rate above 90 days is a maximum of 5% of net receivables
3. *Financing Asset Ratio* (FAR) minimum 40%
4. Own Capital Ratio - Paid Up Capital (MSMD) minimum 50%
5. *Equity participation ratio* (PEYT) maximum 40%
6. Minimum liquidity ratio 1 time

Balance at the beginning of the year 2020 loans amounting to Rp47,394. Total disbursement in the year is Rp108,753. Payment in the year of Rp24,252. Balance on the date December 31, 2020 is Rp131,895.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**11) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.61 tanggal 24 Juli 2020 dihadapan Notaris Surjadi S.H., M.K., M.M., M.H., perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank BRI dengan memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja *Withdrawal Approval* (W/A) dengan plafond Rp250.000. Jangka waktu kredit adalah 12 bulan sejak penandatanganan akta perjanjian kredit tanggal 24 Juli 2021. Suku bunga kredit adalah 9,25%.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar nihil. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp84.890. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp28. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp84.890.

PT PPAF

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 08 tanggal 13 Juli 2018, PT PPAF memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Sewa Pembiayaan (*Leasing*) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp125.000. yang bersifat *non revolving* dengan suku bunga kredit sebesar 10,25% per tahun. Jangka waktu kredit adalah 60 bulan dihitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023. Atas pinjaman ini PT PPAF memberikan jaminan pengikatan jaminan fidusia atas tagihan lancar senilai 110%.

PT PPAF diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan kondisi keuangan sebagai berikut:

1. Tidak mengalami kolektabilitas 2/3/4/5 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank lain;
2. Tidak terdapat tunggakan pembayaran dengan angsuran pokok maupun bunga atas piutang debitur yang dibiayai dana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. *Gearing ratio* maksimal 8 kali;
4. *Non Performing Financing* atas piutang yang dibiayai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan atau piutang total milik debitur >3%.

Saldo awal tahun 2020 pinjaman sebesar Rp60.461. Total pencairan di tahun 2020 sebesar Nihil. Total pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp5.857. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp54.604.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**11) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
The Company**

Based on Credit Agreement No.61 dated July 24, 2020 before Notary Surjadi S.H., M.K., M.M., M.H., the company signed a Credit Agreement with Bank BRI by providing a Facility for Working Capital Loan Withdrawal Approval (W/A) with a ceiling of Rp250,000. Credit period is 12 months since the signing of the credit agreement deed dated July 24, 2021. The loan interest rate is 9.25% .

The balance at the beginning of 2020 amounted to nil. Total disbursements during the year amounted to Rp84,890. Payments on bank loans in the year amounted to Rp28. The balance at December 31, 2020 was Rp84,890.

PT PPAF

Based on Deed of Agreement No. 08 dated July 13, 2018, PT PPAF obtained a Leasing Working Capital Credit Facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum loan amount of Rp125,000. which is non-revolving with a credit interest rate of 10.25% per annum. The credit period is 60 months calculated from July 13, 2018 to July 12, 2023. Based on this loan, PT PPAF provides collateral for binding a fiduciary guarantee for a current bill of 110%.

PT PPAF are required to comply with several restrictions to maintain financial conditions as follows:

1. Not experiencing collectability 2/3/4/5 at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and other banks;
2. There are no arrears in principal or interest installments on debtors' receivables financed by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk funds;
3. Maximum gearing ratio of 8 times;
4. Non Performing Financing for receivables financed by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and / or total receivables owned by debtors > 3%.

The initial balance of 2020 loans amounted to Rp60,461. Total disbursement in the year 2020 amounting to Nil. Total payment in the year of Rp5,857. Balance on December 31, 2020 amounted to Rp54,604.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**12) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan akta perjanjian No.061/BIN/PK/2020 tanggal 24 April 2020 telah ditandatangani Perjanjian Kredit *Cash Collateral Credit* antara PT PPA (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) dengan permohonan Fasilitas plafond sebesar Rp200.000. Jaminan kredit atas Fasilitas pinjaman tersebut adalah Deposito Berjangka dengan waktu 12 bulan yang di blokir di bank dan diikat secara Gadai untuk kepentingan bank serta dilengkapi dengan surat kuasa pemblokiran dan pencairan deposito dibawah tangan

Fasilitas kredit diberikan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit ini ditandatangani tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021. Pembayaran pokok dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo fasilitas kredit. Bunga dikenakan sebesar 1% di atas bunga deposito IDR penerima kredit yang dijaminkan dan dibayar setiap 3 bulan yaitu setiap ahir periode 3 bulan tersebut. Provisi dikenakan sebesar 0,00 % dengan biaya administrasi sebesar Rp15.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp274.750. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp250.907. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.843.

PT NK

- 1) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/024/R tanggal 22 Januari 2020, PT NK mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal perpanjangan fasilitas kredit.

Jaminan berupa:

- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Brigjend Sudiarto No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Jateng di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama PT NK;
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama PT NK;
- Tanah/bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama PT NK;

**12) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Company**

Based on the agreement deed No. 061/BIN/PK/2020 dated April 24, 2020 was signed by the Cash Collateral Credit Agreement between PT PPA (Persero) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) with the application for ceiling facilities of Rp200.000. Credit collateral for the loan facility is a time deposit with 12 months blocked at the bank and tied in a mortgage for the benefit of the bank and is equipped with a blocking power mail and deposit disbursement under hand.

Credit facilities are given within 12 months since the credit agreement was signed on 24 April 2020 until 23 April 2021. Principal payment is done at once due to credit facility maturity. Interest is charged 1% on top of the deposit interest of IDR the credit is guaranteed and paid every 3 months i.e. every 3 months period. The provision will be charged 0.00% with an administration fee of RP15.

The balance at the beginning of year 2020 amounted to Nil. Total disbursement during the year of Rp274,750. The payment in the year is Rp250,907. The balance on December 31, 2020 is Rp23,843.

PT NK

- 1) Based on Letter No. BIN/2.1/024/R dated January 22, 2020, PT NK obtained a working capital loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding the addition of a transactional work credit facility

Collaterals:

- Land/office buildings and warehouse on Jl. Pedurungan No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Central Java on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of PT NK;
- Land/residential house on Jl. Tenggilis No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, East Java with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 registered under the name of PT NK;
- Land/building on Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung with SHGB No. 05 registered under the name of PT NK;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama PT NK;
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jatim di atas SHGB No. 2 atas nama PT NK.
- Tanah/bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197/Mangasa) atas nama PT NK;
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama PT NK;
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama PT NK;
- Tanah/bangunan gedung kantor pusat di Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur di atas SHGB No.36 atas nama PT NK.

Pagu Kredit KMK Transaksional

a. Pagu kredit sebesar Rp375.000.

b. Jangka Waktu:

- Pagu kredit: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 20 Januari 2021. Sesuai dengan surat No. BIN/2.1/024/R tanggal 22 Januari 2020, fasilitas pinjaman telah diperpanjang sampai 20 Januari 2021;
- Realisasi Kredit: Maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak.

Pagu Kredit KMK Revolving

a. Pagu kredit sebesar Rp50.000;

b. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 20 Januari 2021. Sesuai dengan surat No. BIN/2.1/024/R tanggal 22 Januari 2020, fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 20 Januari 2021;

c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk keperluan operasional.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra with SHGB No. 546 registered under the name of PT NK;
- Land/office building and warehouse on Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Krian, Sidorejo, Sidoarjo, East Java, on SHGB No. 2 registered under the name of PT NK.
- Land/building of House and warehouse located on Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, South Sulawesi on SHGB No. 20005/Manuruki (formerly 4197/Mangasa) registered under the name of PT NK;
- Land/residential house on Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 798/Gurabesi (formerly No. 508/Gurabesi) registered under the name of PT NK;
- Land/office building and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 599 registered under the name of PT NK;
- Land/main office building on Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, on SHGB No. 36 registered under the name PT NK.

Maximum limit of KMK Transactional

a. Maximum credit limit to Rp375,000.

b. Period:

- Maximum limit: 12 (twelve) months since maturity of the facility starting January 21, 2020 until January 20, 2021. Based on the letter No. BIN/2.1/024/R dated January 22, 2020, the loan facility has been extended until January 20, 2021;
- Credit realization: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract.

Maximum limit of KMK Revolving

a. Maximum limit to Rp50.000;

b. Period: 12 (twelve) months starting January 21, 2020 until January 20, 2021. Based on the letter No. No. BIN/2.1/024/R dated January 22, 2020, the loan facility has been extended until January 20, 2021;

c. The purpose: additional working capital for operating necessary.

Non Cash Loan

- a. Pagu kredit sebesar Rp2.675.000;
- b. Jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 20 Januari 2021. Sesuai dengan surat No. BIN/2.1/024/R tanggal 22 Januari 2020, fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 20 Januari 2021;
- c. Jaminan dikaitkan jaminan KMK revolving.
- 2) Berdasarkan Surat No. BIN/2.3/108/R tanggal 10 May 2019, PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

- a. Pagu kredit sebesar Rp175.000;
- b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket 1 (MYC);
- c. Jangka Waktu: 45 (empat puluh lima) bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit ;
- d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.
- 3) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/105/R tanggal 13 April 2020, PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

- a. Pagu kredit sebesar Rp123.818;
- b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Batang Asai Paket I Kabupaten Sorolangun (MYC);
- c. Jangka Waktu: 21 (dua puluh satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit ;
- d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.
- 4) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/188/R tanggal 02 Juni 2020, PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

- a. Pagu kredit sebesar Rp156.000;
- b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Spilway Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek (MYC);
- c. Jangka Waktu: 19 (sembilan belas) bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit ;
- d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

Non Cash Loan

- a. Maximum credit limit amounting to Rp2,675,000;
- b. The period is 12 (twelve) months since January 21, 2020 until January 20, 2021. Based on the letter No. BIN/2.1/024/R dated January 22, 2019, the loan facility has been extended until January 20, 2021;
- c. Collateral is related with KMK revolving collateral.
- 2) Based on the letter No. BIN/2.3/108/R dated May 10, 2019, PT NK obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Working capital credit facility

- a. Maximum limit amounting to Rp175.000;
- b. The purpose: additional working capital for The Rukoh Dam of Pidie District Package at 1 (MYC) Project;
- c. Period: 45 (Fifteen) months starting From the Credit Facility signed;
- d. Collateral: Accounts receivable of financed projects is tied with *cessie* and is associated with current facilities.
- 3) Based on Based on the letter No. BIN/2.1/105/R dated April 13, 2020, PT NK obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Working Capital Credit Facility

- a. Maximum limit amounting to Rp123,818;
- b. The purpose: additional working capital for The DI. Batang Asa of Sorolangun Districts Package at 1 (MYC) Irrigations Project;
- c. Period: 21 (Twenty One) months starting From the Credit Facility signed;
- d. Collateral: Accounts receivable of financed projects is tied with *cessie* and is associated with current facilities.
- 4) Based on the letter No. BIN/2.1/188/R dated June 2, 2020, PT NK obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Working capital credit facility

- a. Maximum limit amounting to Rp156.000;
- b. The purpose: additional working capital for The Tugu Spilway Dam of Trenggalek Districts (MYC) Project;
- c. Period: 19 (Nineteen) months starting From the Credit Facility signed;
- d. Collateral: Accounts receivable of financed projects is tied with *cessie* and is associated with current facilities.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp145.000.
Total pencairan pinjaman tahun 2020 sebesar
Rp3.939.745 Total pelunasan pinjaman tahun
2020 sebesar Rp3.724.927. Saldo pada
31 Desember 2020 sebesar Rp359.818.

**13) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk
PT NK**

- 1) Berdasarkan No. S-366/SMI/DPI/0620 tanggal 20 Juni 2020, PT NK mendapatkan kredit modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melalui Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Revolving Fasilitas Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan.
- a. Pagu kredit sebesar Rp200.000 (Total Fasilitas Pembayaran);
- b. Tingkat suku bunga sebesar 9%
- c. Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai berikut:
- Proyek Bendungan Temef berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/SNVT/PEM-BEND-NT.II/DSE.I/89/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
 - Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket – II) di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03-AS/ KONT/SNVT PB NT I/904/2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - Proyek Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk (Paket I) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/KONT/ SNVT PB NT I/38/2020 tanggal 23 Januari 2020;
 - Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA KM. 4+200 S/D KM.6+800 Dan Pembangunan BH.37 Dan Penataan Emplasemen ST. Batu Tulis Antara Batu Tulis – Ciomas Lintas Bogor – Sukabumi, berdasarkan Surat Perjanjian No. PL.107/8/JGBC.01/ PPK-BSP/BTP-JABAR/VIII-20 tanggal 18 Agustus 2020;
 - Proyek-proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Otoritas

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Balance at the beginning of 2020 is Rp145,000.
The total loan disbursement 2020 is
Rp3,939,745. Total loan repayments 2020
amounted to Rp3,724,927. The balance as of
December 31, 2020 is Rp359,818.

**13) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk
PT NK**

- 1) Based on the credit agreement No. S-366/SMI/DPI/0620 dated June 20, 2020, PT NK obtained working capital loans from PT Sarana Multi infrastructure (Persero) (PT SMI) through a Revolving Working Capital Financing Facility Agreement and Financing Facilities.
- a. Maximum credit limit amounting to Rp200,000, (total financing facilities);
- b. Interest rate is amounting at 9%;
- c. Working capital purposes to carry out the construction of infrastructure project as follow:
- The Temef Dam Project is located in Central Timor Regency South, Nusa Tenggara Province East, based on Unit Price Contract Agreement No. HK.02.03 / SNVT / PEM-BEND-NT.II / DSE.I / 89 / XII / 2017 dated 22 December 22, 2017;
 - Sila Beringin Dam Project (Package - II) in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, based on Unit No. Contract Agreement. HK.02.03-US / KONT / SNVT PB NT I / 904/2018 dated December 31, 2018;
 - Tiu Suntuk (Package I) Dam Project (Package - II) in West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, based on Unit No. Contract Agreement. HK.02.03 / KONT / SNVT PB NT I / 38/2020 date on January 23, 2020;
 - Double Track Development Project. 4 + 200 until KM.6 + 800 And Construction of BH.37 And Employment Arrangement ST. Slate Between Slate - Ciomas Lintas Bogor - Sukabumi, based on Letter of Agreement No. PL.107/8/JGBC.01/ PPK-BSP/BTP-JABAR/VIII-20 dated August 18, 2020;
 - Other infrastructure projects funded by APBN and sector funds are in accordance with Minister of Finance Regulation No. 100 / PMK.010 / 2009 dated May 27, 2009 and Letter of

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Jasa Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 dan Surat OJK No. S-7/D.05/2019 tanggal 12 Februari 2019.
- d. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak 28 Juni 2020 s/d 27 Juni 2021;
- e. Jaminan berupa jaminan yang lazim dipersyaratkan oleh Kreditur dalam Fasilitas Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Tanah dan bangunan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama PT NK dengan luas tanah sebesar 5.170 m² yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.442 m² yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 20019/Losari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 966 m² yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 601/Sukarami atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.619 m² yang terletak di Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 22/Neglasari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat;
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 23/Neglasari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Financial Services Authority No. S-48 / D.05 / 2015 April 30, 2015 and OJK Letter No. S-7 / D.05 / 2019 February 12, 2019.
- d. Period: 12 (twelve) months starting June 28, 2020 until June 27, 2021;
- e. Collateral in the form of a guarantee is normally required by creditors in this financing facility, including but not limited to:
- The land and building with SHGB No. 366/Harjosari II registered under the name of PT NK with a land area of 5,170 sqm on Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Medan Amplas, Medan, North Sumatra;
 - The land and building with SHGB No. 118/Harjosari II registered under the name of PT NK with a land area of 1,442 sqm located on Jl. Kampung/Hallway IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra;
 - The land and building with SHGB No. 20019/Losari registered under the name of PT NK with a land area of 966 sqm located on Jl. Lamadukelleng No. 28 Kec. Losari, Kel. Ujung Pandang, Makassar, South Sulawesi);
 - The land and building with SHGB No. 601/Sukarami registered under the name of PT NK with a land area of 1,619 sqm located in Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Palembang, South Sumatra;
 - The land and building with SHGB No. 22/Neglasari registered under the name of PT NK with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java;
 - The land and building with SHGB No. 23/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung City, West Java;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah dan bangunan SHGB No. 00023/Besusu Tengah atas nama PT Nindya Karya (Persero) dengan luas tanah sebesar 1.548 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 18/Besusu atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2.016 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 00022/Besusu Tengah atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.078 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 25/Besusu atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.169 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah;
- Tagihan/piutang (sisa termin) atas proyek yang dibiayai dan akan dilakukan pengikatan awal secara Fidusia minimal sebesar 150% dari Total Fasilitas Pembiayaan. Selanjutnya nilai tagihan /piutang (sisa termin) dijaga minimal 150% dari *outstanding* Fasilitas Pembiayaan;
- Pembayaran utang Pokok Fasilitas Pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi Kerja atau pemilik proyek infrastruktur (*bouwheer*) atau berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp100.000. Total pencairan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp145.000. Total pelunasan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp56.800. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp188.200.

**14) PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT NK**

Berdasarkan Surat No. 305/IBD/EXT/20 tanggal 6 Oktober 2020, PT NK mendapatkan Fasilitas Pinjaman *Money Market*, SKBDN/Bank Garansi dan Transaksi Valuta Asing dari Bank PAN Indonesia.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- The land and building with SHGB No. 00023/ Central Besusu registered under the name of PT Nindya Karya (Persero) with a land area of 1,548 sqm located in Kel. Central Basusu Kec. East Palu Kab. Dongkala, Central Sulawesi;
- The land and building ownership proven with SHGB No. 18/Besusu registered under the name of PT NK with a land area of 2,016 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Tengah Kab. Dongkala, Central Sulawesi;
- The land and building with SHGB No. 00022/Besusu Central registered under the name of Company with a land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi;
- The land and building with SHGB No. 25/Besusu registered under the name of PT NK with a land area of 1,169 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi;
- Receivables / receivables (remaining term) for projects financed and will be subject to initial fiduciary binding of at least 150% of the Total Financing Facility. Furthermore, the value of bills / receivables (remaining term) is maintained at least 150% of the outstanding Financing Facilities;
- Principal of payment financing facility is conducted no later than at the of expiry of the contractual agreements between the debtor and employer or the owner of the infrastructure projects or the expiry of the period of financing facility.

The initial balance in 2020 was Rp100,000. The total loan disbursement 2020 was Rp145,000. The total loan repayment 2020 amounted is Rp56,800. The balance as of December 31, 2020 was Rp188,200.

**14) PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT NK**

Based on Letter No. 305/IBD/EXT/20 dated October 6, 2020, PT NK obtained a Money Market Loan Facility, SKBDN / Bank Guarantee and Foreign Exchange Transactions from Bank PAN Indonesia.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- 1) Fasilitas Pinjaman *Money Market*:
 - a. Pagu kredit sebesar Rp100.000.;
 - b. Tujuan penggunaan: Modal kerja umum;
 - c. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
 - d. Jaminan: Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
- 2) Fasilitas Pembukaan SKBDN/ Bank Garansi
 - a. Pagu kredit sebesar Rp150.000;
 - b. Tujuan penggunaan: Merealisasi pembelian bahan baku, bahan pendukung produksi dan suku cadang;
 - c. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
 - d. Jaminan : Jaminan: Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
- 3) Fasilitas Transaksi Valuta Asing:
 - a. Plafond sebesar USD2,000,000;
 - b. Tujuan penggunaan: Memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung-nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional;
 - c. Jangka Waktu sejak tanggal perubahan Pedagang Valuta Asing (PVA) sampai dengan 7 Oktober 2021.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp35.000. Total pencairan pinjaman tahun 2020 sebesar Nihil. Total pelunasan pinjaman tahun 2020 sebesar Rp35.000. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Nihil.

- 1) *Money Market Loan Facility*:
 - a. *Maximum credit limit amounting to Rp100,000;*
 - b. *The purpose: general working capital;*
 - c. *Period: 12 (twelve) months from the signing of the credit until July 7, 2021;*
 - d. *Collateral: Fiduciary of an existing project contract with a value of at least 100% of Principal.*
- 2) *SKBDN Facility/Bank Guarantee Facility*
 - a. *Maximum credit limit amounting to Rp150,000;*
 - b. *The purpose: Realizing the purchase of raw materials, production support and spare parts;*
 - c. *Period: 12 (twelve) months from the signing of the credit until July 7, 2021;*
 - d. *Collateral: Guarantee: Guarantee: Fiduciary on existing project contracts with a minimum value of 100% of the Loan Principal.*
- 3) *Foreign Exchange Transaction Facility*:
 - a. *Maximum limit amounting to USD2,000,000;*
 - b. *The purpose: operational transaction for foreign exchange to fulfill the foreign exchange transaction needs and hedging which arising from the operational activities.*
 - c. *Duration from the date of change Foreign Exchange Traders (PVA) arrive by October 7, 2021.*

The initial balance of 2020 is Rp35,000. The total loan disbursement from is Nill. The total loan repayment 2020 amounting is Rp35,000. The balance on December 31, 2020 is Nill.

27. Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga

27. Gross Amount Due to Third Parties

	2020 Rp	2019 Rp	
Wilayah I	210,228	179,763	Region I
Wilayah II	143,217	208,076	Region II
Wilayah III	109,525	81,509	Region III
Wilayah IV	161,286	385,082	Region IV
Wilayah V	130,719	381,985	Region V
Divisi EPC	106,085	59,224	EPC Division
Divisi Properti	812	5,657	Division of Property
Unit Penunjang Produksi	3,362	574	Production Supporting Unit
PT Nindya Beton	59,891	36,604	PT Nindya Beton
PT Nindya Karya (Persero)	4,347	4,462	PT Nindya Karya (Persero)
Jumlah	929,472	1,342,936	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

28. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

28. Short-term Advances from Customers

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	8,746	--	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Ventura Bersama Nindya - PT PPA	4,122	4,122	Joint Venture Nindya - PT PPA
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	--	6,250	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	720	--	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah Pihak Berelasi	13,588	10,372	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	82,555	122,183	The Ministry of Public Works and Public Housing
Kementerian Pemuda dan Olahraga	25,771	47,928	Ministry of Youth and Sports
Dinas Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	12,856	--	North Sulawesi Provincial Settlement Infrastructure Office
Kementerian Perhubungan	9,089	19,684	Ministry of Transportation
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Dharmasraya	6,864	10,766	Public Works and Spatial Planning Office of Dharmasraya Regency
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	6,804	6,804	Pesisir Barat District Government
Bank Indonesia	3,627	23,577	Bank Indonesia
PT Bhandra Graha Rekasa (Persero)	2,533	--	PT Bhandra Graha Rekasa (Persero)
PT Karya Unggulan Gemilang	1,310	1,310	PT Karya Unggulan Gemilang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	--	11,766	Public Works and Spatial Planning Office of Banjarbaru Regency
Universitas Islam Negeri Raden Fatah	--	7,240	Raden Fatah State Islamic University
PT Maleo	--	2,500	PT Maleo
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	115	--	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah Pihak Ketiga	151,524	253,758	Total Third Parties
Jumlah Uang Muka Pemberi Kerja	165,112	264,130	Total Advances From Customers

Uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi akan dikompensasi dengan kemajuan pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan kemajuan di lapangan.

Advances for project implementation received from the employer in accordance with the construction work contract will be compensated with the progress of the work and payment terms in accordance with progress in the field.

29. Beban Akruai dan Utang Lain-lain

29. Accruals and Other Payables

	2020 Rp	2019 Rp	
Akrual Biaya Apresiasi Karyawan	31,957	40,420	Accrued Employee Appreciation
Utang Operasional Proyek	27,303	26,980	Projects Operational Payable
Akrual Biaya Tantiem	23,193	35,773	Accrued Tantiem
Akrual Bunga MTN dan Obligasi	16,932	11,263	Accrued MTN and Bonds Interest
Akrual Bunga Bank	1,401	5,712	Accrued Interest Loan
Akrual Beban Kantor dan Umum	1,049	1,606	Accrued Office and General Expenses
Akrual Gaji dan Upah	--	8,137	Accrued Salaries and Wages
Utang Lain-lain	63,857	130,588	Other Payables
Jumlah	165,692	260,479	Total

Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Utang-utang ini akan diperhitungkan dengan laba ataupun kerugian yang dialami oleh masing-masing ventura bersama, setelah proyek dinyatakan selesai dan ventura bersama ditutup.

Projects operational payables are joint venture payable that occurred over the temporary loans to projects that cooperated. These debts will be calculated with a profit or loss experienced by each of the joint venture, after the project was finished and ventura joint closed.

Akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Accrued tantiem and employee appreciation were recorded based on accrual basis in accordance with budget approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

30. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

30. Employee Benefit Liabilities

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan			<i>Employee Benefit Liabilities</i>
PT PPA	1,717	939	PT PPA
PT PPAK	796	6,871	PT PPAK
PT NK	10,591	15,279	PT NK
Jumlah	<u>13,104</u>	<u>23,089</u>	<i>Total</i>

Grup memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

Group provides minimum of employment benefits to its eligible employees based on Labor Law No. 13 about Employment.

Grup menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pascakerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Grup dengan DPLK BRI Nomor: PPJ-39/PPA/1111 dan No. B.51-DPLK/11/2011 yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2011. Bagi 3 orang karyawan yang tidak diikutkan dalam program tersebut, Perusahaan telah menghitung liabilitas imbalan sebesar Rp1.660 dan Rp939 per 31 Desember 2020 dan 2019.

The Group has organized the defined contribution program for post-employment benefits of employees working with Financial Institution Pension Fund ("Pension Fund") BRI, according to the Cooperation Agreement between the Group and Pension Fund BRI Number: PPJ-39/PPA/1111 and No. B.51-DPLK/11/2011 signed on November 21, 2011. For 3 employees who are not included in the program, the Company has calculated the liability for benefits amounted to Rp1,660 and Rp939 as of December 31, 2020 and 2019.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pascakerja Grup per 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan, berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)* dengan asumsi sebagai berikut:

Actuarial valuation post employment benefits of the Group as of December 31, 2020 and 2019 were conducted by the actuarial consulting firm of Muh Imam Basuki and Partners, based on the Projected Unit Credit Method (PUC Method), with assumptions as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Dasar Perhitungan	8.2% per tahun/ year	8.2% per tahun/ year	Basic Calculation
Tingkat diskonto	8.0% per tahun/ year	8.0% per tahun/ year	Discount Rate
Tingkat kenaikan gaji	56 tahun/ year		Salary increase rate
Usia pensiun	Tabel Mortalita Indonesia (TMI) II 2011/		Retirement age
Tabel mortalita	Indonesia Mortality Table (TMI) II 2011		Mortality table
Metode perhitungan	Projected Unit Credit		Method of calculation

Perusahaan

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company

The details of the Company's employee benefit expenses for the current year are as follow:

	2020 Rp	2019 Rp	
Biaya Jasa Kini	--	--	Current Service Cost
Beban Bunga	--	--	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	<u>--</u>	<u>--</u>	Total Post-employment Benefits

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1,717	939
Penambahan Cadangan	--	--
Liabilitas Imbalan Kerja	1,717	939

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Liabilitas pada Awal Tahun	939	2,493
Pembayaran Imbalan Kerja	(737)	(1,554)
Penambahan Cadangan	1,515	--
Liabilitas pada Akhir Tahun	1,717	939

PT NK

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NK adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Biaya Jasa Kini	2,322	3,514
Beban Bunga	3,245	3,187
Hasil Aset Program yang Diharapkan	(1,675)	(1,809)
Jumlah Beban Imbalan Kerja	3,892	4,892

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	32,022	38,224
Nilai Wajar Aset Program	(21,431)	(22,945)
Liabilitas Imbalan Kerja	10,591	15,279

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Liabilitas pada Awal Tahun	15,279	16,238
Beban Imbalan Kerja	3,892	4,893
Pembayaran Imbalan Kerja	(3,060)	(4,579)
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(4,306)	5,977
Iuran Dana Pensiun/Premi Asuransi	(1,214)	(7,250)
Liabilitas pada Akhir Tahun	10,591	15,279

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The details of the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

	2020 Rp	2019 Rp
Present Value of Defined Benefit Obligation	1,717	939
Additional of Reserve	--	--
Post-employment Benefits Liability	1,717	939

Movement in the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

	2020 Rp	2019 Rp
Beginning Balance of Liabilities	939	2,493
Employee Benefit Payment	(737)	(1,554)
Additional of Reserves	1,515	--
Ending Balance of Liabilities	1,717	939

PT NK

The details of the employee benefit expenses for PT NK the current year are as follow:

	2020 Rp	2019 Rp
Current Service Cost	2,322	3,514
Interest Cost	3,245	3,187
Expected Return on Plan Assets	(1,675)	(1,809)
Total Employee Benefit Expense	3,892	4,892

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

	2020 Rp	2019 Rp
Present Value of Defined Benefit Obligation	32,022	38,224
Fair Value of Plan Assets	(21,431)	(22,945)
Post-employment Benefits Liability	10,591	15,279

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

	2020 Rp	2019 Rp
Beginning Balance of Liabilities	15,279	16,238
Employee Benefit Expenses	3,892	4,893
Benefit Payment	(3,060)	(4,579)
Other Comprehensive Loss (Income)	(4,306)	5,977
Dues Pension Fund	(1,214)	(7,250)
Ending Balance of Liabilities	10,591	15,279

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PPAF

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Biaya Jasa Kini	--	--
Beban Bunga	--	--
Jumlah Beban Imbalan Kerja	--	--

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	--	--
Liabilitas Imbalan Kerja	--	--

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Liabilitas pada Awal Tahun	--	118
Penyesuaian atas Program Iuran Pasti	--	(118)
Liabilitas pada Akhir Tahun	--	--

PT PPAK

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Biaya Jasa Kini	354	365
Beban Bunga	163	119
Jumlah Beban Imbalan Kerja	517	484

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	796	1,025
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	796	1,025

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Liabilitas pada Awal Tahun	1,025	571
Beban Imbalan Kerja	517	484
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(602)	(30)
Pembayaran Imbalan Kerja Tahun Berjalan	(144)	--
Liabilitas pada Akhir Tahun	796	1,025

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PPAF

The details of the employee benefit expenses for PT PPAF the current year are as follow:

Current Service Cost
Interest Cost
Total Employee Benefit Expense

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

Present Value of Defined Benefit Obligation
Post-employment Benefits Liability

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

Beginning Balance of Liabilities
Adjustment to the Defined Contribution Plan
Ending Balance of Liabilities

PT PPAK

The details of the employee benefit expenses for PT PPAK the current year are as follow:

Current Service Cost
Interest Cost
Total Employee Benefit Expense

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

Present Value of Defined Benefit Obligation
Total Post-employment Benefit Expense

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

Beginning Balance of Liabilities
Employee Benefit Expense
Other Comprehensive Loss (Income)
Employee Benefit Payment
Ending Balance of Liabilities

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek reksadana dan saham, instrumen utang dan lainnya. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek reksadana dan saham dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The defined benefit pension plan typically provides exposure for the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit health care plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has relatively balanced investment in mutual fund and equity securities, and debt instruments and others. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested portion of the plan and equity securities and in debt instruments to leverage the return generated by the fund.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined liabilities are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constants.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligations as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligations has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

31. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi:		
PT Pupuk Kalimantan Timur	12,237	14,150
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	11,063	
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	--	21,815
Jumlah Pihak Berelasi	23,300	35,965
Pihak Ketiga:		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	276,009	140,063
Kementerian Perhubungan	13,299	--
Jumlah Pihak Ketiga	289,308	140,063
Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	312,608	176,028

Akun ini merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan (*bouwheer*) yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan.

31. Long-term Advances from Customers

	Related Parties:
	PT Pupuk Kalimantan Timur
	PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
	Total Related Parties
	Third Parties:
	The Ministry of Public Work and Public Housing
	The Ministry of Transportation
	Total Third Parties
	Total Long-Term Contract Advances

This account represents the advance balance that has been received from the customers (*bouwheer*), which is deducted with the payment for any work on progress that had been completed.

32. Utang Surat Berharga Komersial

	2020 Rp	2019 Rp
Surat Berharga Komersial	--	100,000
Biaya yang dapat diatribusikan	--	(6,428)
Jumlah	--	93,572

Perusahaan menerbitkan Surat Berharga Komersial ("SBK") melalui PT Danareksa Sekuritas sebagai Penata Laksana Penerbitan / *Arranger* dan menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai lembaga penata usaha dan penyelesaian SBK pada tanggal 27 November 2019 sebesar Rp100.000. SBK tersebut memperoleh peringkat idA1 (*single A-one*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Jangka Waktu SBK tersebut adalah 12 bulan dengan jatuh tempo 28 November 2020. Besar tingkat diskonto adalah sebesar 7,50%.

Berdasarkan surat dari KSEI No.KSEI22566/JKU/110 tanggal 16 November 2020, PT PPA berdasarkan M-130/PPA/DT-SEVP2/1120 melakukan pelunasan atas Pokok Surat Berharga (SBK) I pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp100.000.

32. Commercial Papper

	Commercial Paper
	Attributable cost
	Total

The Company issued Commercial Securities ("SBK") through PT Danareksa Sekuritas as the Arranging Issuance / Arranger and appointed PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") as the SBK administration and settlement agency on November 27, 2019 amounting to Rp100,000. The SBK received an idA1 (*single A-one*) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). SBK period is 12 months with a maturity date of November 28, 2020. The discount rate is 7.50%.

Based on a letter from KSEI No.KSEI22566/JKU/110 dated November 16, 2020, PT PPA based on M-130/PPA/DT-SEVP2/1120 made repayment of Principal Securities (SBK) I on November 27, 2020 amounting to Rp100,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

33. Surat Utang Jangka Menengah

33. Medium-term Notes

	2020 Rp	2019 Rp	
Surat Utang Jangka Pendek			Short Term Notes
PT NK	--	300,000	PT NK
Sub Jumlah	--	300,000	Sub Total
Surat Utang Jangka Menengah			Medium Term Notes
PT PPA	750,000	750,000	PT PPA
PT PPAF	--	60,000	PT PPAF
Biaya yang dapat diatribusikan	(1,455)	(2,545)	Attributable cost
Sub Jumlah	748,545	807,455	Sub Total
Jumlah	748,545	1,107,455	Total

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 No. 1 tanggal 1 November 2019 dari Notaris Lenny Jannis Ishak SH., Perusahaan menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) dengan cara penawaran terbatas untuk penambahan modal kerja dan/atau refinancing. Nilai pokok keseluruhan MTN sebesar Rp750.000, yang terdiri dari Seri A sebesar Rp300.000 dan Seri B sebesar Rp450.000 yang masing-masing akan jatuh tempo pada 8 November 2021 dan 8 November 2022. MTN Seri A dan Seri B dikenakan bunga masing-masing sebesar 10,05% dan 10,30% yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan MTN.

Perusahaan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai Arranger dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau.

PT NK

Pada tanggal 28 Juli 2017, PT NK menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan nilai Rp300.000 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Bunga surat utang jangka menengah adalah 10,35% per tahun. Jaminan berupa aset lancar PT NK sebesar 120% dari nilai surat utang menengah yang diterbitkan. Jangka waktu jatuh tempo surat utang jangka menengah adalah tanggal 28 Juli 2020 dan telah dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2020.

Pada tanggal 24 Juli 2020, PT NK telah melakukan pelunasan atas Surat Utang Jangka Menengah.

PT PPAF

Berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Medium Term Notes (MTN) II PPA Finance No. 52 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat di hadapan notaris Arry Supratno, S.H., telah diterbitkan MTN II PT PPA Finance Seri B dengan nilai pokok sebesar Rp60.000. Suku bunga MTN 11,99% per tahun dengan tenor 36 bulan. PT PPAF disyaratkan untuk menyerahkan jaminan berupa pengikatan jaminan fidusia atas piutang usaha dengan kolektibilitas lancar dengan

The Company

Based on the Deed of Medium Term Notes I Perusahaan Pengelola Aset Year 2019 Issuance Agreement No. 1 dated November 1, 2019 from Notary Lenny Jannis Ishak SH., the Company issued medium-term notes (MTN) by a limited offer for additional working capital and/or refinancing. Total nominal value of MTN is amounted to Rp750,000 consisting of Series A of Rp300,000 and Series B of Rp450,000 which will mature on November 8, 2021 and November 8, 2022, respectively. Series A and Series B MTNs bear interest rate of 10.05% and 10.30%, respectively, which will be paid every 3 (three) months from the date of issuance of the MTN.

The Company has appointed PT Danareksa Sekuritas as Arranger and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent.

PT NK

On July 28, 2017, PT NK issued Medium Term Notes amounting to Rp300,000 for 3 (three) years. Interest on Medium Term Notes is 10.35% per annum. Guarantee in the form of PT NK's current assets amounting to 120% of the value of medium term notes issued. The due date of the medium-term notes is July 28, 2020 and payment date on July 24, 2020.

On July 24, 2020, PT NK has fully paid the Medium Term Notes.

PT PPAF

Based on the Deed of Addendum I of the Agreement for the Issuance and Appointment of Trustee of Medium Term Notes (MTN) II PPA Finance No. 52 dated January 26, 2017 made before the notary Arry Supratno, S.H., PT PPA Finance Series B MTN II with a principal value of Rp60,000. MTN interest rate is 11.99% per year with a tenor of 36 months. PT PPAF is required to submit collateral in the form of fiduciary collateral for trade receivables with current collectibility with coverage equal to 110% of the

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

coverage senilai 110% dari MTN yang diterbitkan. Pada tanggal 24 Januari 2020, Perusahaan telah melunasi Medium Term Notes (MTN) II PPA Finance Seri B senilai Rp60.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

issued MTN. On January 24, 2020, the Company has paid the Medium Term Notes (MTN) II PPA Finance Series B amounting to Rp60,000.

34. Utang Obligasi

34. Bonds Payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Utang Obligasi			Bonds Payable
Obligasi - Seri A	100,000	--	Bonds - Series A
Obligasi - Seri B	345,000	--	Bonds - Series B
Obligasi - Seri C	197,100	--	Bonds - Series C
Biaya yang dapat diatribusikan	(1,740)	--	Attributable cost
Jumlah Utang Obligasi	640,360	--	Total Bonds Payable

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perusahaan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

In accordance with the provisions contained in the Trustee Agreement, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. has been appointed by the Company as Trustee representing the interests of the Bondholders.

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp642.100 yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

These bonds were issued with a principal amount of Rp642,100 which was guaranteed with full commitment. These bonds are issued scripless, except for Jumbo Bond Certificates which are issued on behalf of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

This bond provides an option for the public to choose the desired series, namely by having 3 (three) series of bonds offered as follows:

- Seri A Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,95% (sembilan koma sembilan puluh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp345.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp197.100 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Series A Principal Amount of Series A Bonds amounting to Rp100,000 with a fixed interest rate of 9.95% (nine point ninety five percent) per annum, with a term of 3 (three) years from the Issuance Date.

Series B Principal Amount of Series B Bonds amounting to Rp345,000 with a fixed interest rate of 10.55% (ten point five five percent) per annum, with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.

Series C The Principal Amount of Series C Bonds is Rp197,100 with a fixed interest rate of 11.00% (eleven point zero zero percent) per annum, with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir

These bonds are offered at a value of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds. Bond Interest is paid quarterly, according to the payment date of each Bond Interest. Payment of the first Bond Interest will be made on December 1, 2020, while the payment of Bond Interest and the maturity of each Bond is September 1, 2023 for

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 1 September 2023 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2025 untuk Obligasi Seri B dan 1 September 2027 untuk Obligasi Seri C.

Perusahaan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-313/PEF-DIR/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perusahaan adalah: idA (Single A). Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Series A Bonds, September 1, 2025 for Series B Bonds, and September 1, 2027 for Series C Bonds.

The company has carried out a rating carried out by Pefindo. Based on Pefindo letter No. RC-313/PEF-DIR/III/2020 dated 23 March 2020, the rating results for the Company's long-term debt securities (bonds) are: idA (Single A). The rating results are valid for the period March 23, 2020 to March 31, 2021.

35. Ekuitas

a. Modal Saham

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.996.688 yang mewakili 2.996.688 lembar saham.

Modal saham yang ditempatkan per tanggal 31 Desember 2020 seluruhnya berjumlah Rp2.996.688 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, terdiri dari:

	Lembar Saham/ Shares
Setoran modal awal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan telah dituangkan dalam akta Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak SH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.	300,000
Setoran Modal Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud eks BPPN yang telah ditetapkan nilainya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.32/KMK.06/2007 tanggal 31 Juli 2007 masing-masing sebesar Rp 1.205 dan Rp 153.	1,358
Setoran Modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari Laba Bersih Tahun 2007 sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 8 Mei 2008.	1
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008.	1,500,000

35. Shareholders' Equity

a. Share Capital

The Company is owned by the Republic of Indonesia. Issued and fully paid shares capital made by the Republic of Indonesia as of December 31, 2020 amounting to Rp2,996,688, representing 2,996,688 shares.

Shares capital issued and fully paid as of December 31, 2020 amounting to Rp2,996,688 have been fully paid by the Republic of Indonesia, consists of:

Initial capital contribution by Government Regulation no. 10 year 2004 juncto Decree of the Minister of Finance No.82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 and has stated under deed No. 7 dated February 27, 2004 in the presence of Notary Lenny Janis Ishak SH have been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 on March 9, 2004.
Capital from the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Article 2 Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 February 27, 2004 in form of fixed assets and intangible assets of ex-BPPN which were pre determined value based on the Minister of Finance Decree No.32/KMK.06/2007 July 31, 2007 amounted to Rp 1,205 and Rp 153, respectively.
Capital from the Government of the Republic of Indonesia were allocated from Net Income year 2007 in accordance with the General Meeting of Shareholders of PT PPA concerning the Approval of Annual Report for Year 2007 dated May 8, 2008.
Additional capital from the Government of Republic Indonesia from the 2008 state budget in accordance with the Government Regulation No 78 year 2008.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Lembar Saham/ Shares	
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009.	1,000,000	<i>Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 77 year 2009.</i>
Setoran modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA Nomor:SK-366/MOU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.	1	<i>Deposit the Government the Republic of Indonesia allocated capital of the Company pursuant to the general reserve Minister of SOEs as GMS PT PPA Number: SK-366/MOU/2012 dated October 9, 2012.</i>
Pengurangan penyertaan modal Negara RI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait dengan pengalihan saham PT PPA pada PT Waskita Karya (99%) kepada Pemerintah RI.	(804,672)	<i>RI State equity reduction in Government the Republic of Indonesia Regulation Number 86 Year 2012 Date October 20, 2012 relating to the transfer of the shares of PT PPA on PT Waskita Karya (99%) to the Government of Indonesia.</i>
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.	1,000,000	<i>Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2015.</i>
Jumlah Modal Saham per 31 Desember 2020	2,996,688	Total Shares Capital per December 31, 2020

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688 menjadi sebesar Rp2.996.688. Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 8 Maret 2016.

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, on February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1.000.000 (full amount) from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted Rp1,996,688. (full amount) amounted to Rp2,996,688. (full amount). These changes have been noted by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of Legal Administration on March 8, 2016.

b. Tambahan Modal Disetor

Dalam rangka restrukturisasi PT NK yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Nindya Karya (Persero) Tanggal 13 Agustus 2012, dilakukan penambahan modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya sebesar Rp499.997.421.000 (angka penuh) melalui penerbitan saham baru seri B dengan nominal per saham sebesar Rp84.882 (angka penuh).

Saham baru diambil bagian oleh Perusahaan untuk melaksanakan program restrukturisasi PT NK.

b. Additional Paid in Capital

In the framework of PT NK restructuring which was established with Government Regulation Number 11 of 1972 concerning the Transfer of the Form of Nindya Karya State Building Company to a Company Company (Persero) as stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 of 2012 Concerning Changes in the Structure of State Share Ownership through the Issuance of New Shares In the PT Nindya Karya (Persero) On August 13, 2012, an increase in capital of the Company Company (Persero) PT Nindya Karya in the amount of Rp499,997,421,000 (full amount) was through the issuance of new series B shares with a nominal value per share of Rp84,882 (full number).

New shares are taken up by the Company to carry out PT NK's restructuring program.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pengambilan bagian saham oleh Perusahaan mengakibatkan kepemilikan saham Negara secara langsung pada PT NK menjadi 1% (satu persen) dan kepemilikan saham Perusahaan pada PT NK menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Perusahaan yang menerima bisnis tersebut, dalam PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Pada tahun 2018, Perusahaan melalui anak usahanya PPAK melepas bisnis dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali yaitu PT Pratama Persada Airbone ke PT Survai Udara Penas (Persero) dan sesuai PSAK 38 mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Jumlah yang masuk kedalam pos tambahan modal disetor dari penerimaan bisnis dan pelepasan bisnis tersebut masing-masing sebesar Rp305.768 dan Rp2.291 sehingga total menjadi sebesar Rp308.059.

c. Dividen dan Cadangan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No.40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 3 Mei 2019 para pemegang saham memutuskan untuk membentuk cadangan masing-masing sebesar Rp127.822, serta membagikan dividen tunai masing-masing sebesar Rp42.608.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The acquisition of a share of the shares by the Company resulted in direct ownership of the State's shares in PT NK to 1% (one percent) and ownership of the Company's shares in PT NK to 99% (ninety nine percent).

The company that receives the business, in PSAK 38 business combinations of entities under common control recognize the difference between the amount of the transferred benefit and the carrying amount of each business transaction of entities under common control in equity and present it in the additional paid-in capital.

In 2018, the Company through its subsidiary PPAK relinquished business in the disposal of a jointly controlled business entity namely PT Pratama Persada Airbone to PT Survai Air Penas (Persero) and in accordance with PSAK 38 recognizes the difference between the benefits received and the carrying amount of the business released in equity and presents them in the additional paid-in capital.

The amount included in the additional paid-in capital post from business income and disposal of the business amounted to Rp305,768 and Rp2,291, respectively, totaling Rp308,059.

c. Dividend and Reserves

Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No.1/1995 issued in March 1995, and amended by Law No. 40/2007 which was published in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income to a minimum of 20% of the number of issued and fully paid. There is no time limit for the allowance.

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated May 3, 2019 Shareholders have decided to the shareholders decided to form reserves of Rp127,822, respectively, and distributed cash dividends of and Rp42,608, respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**d. Saldo Laba yang Belum Ditentukan
Penggunaannya**

d. Unappropriate Retained Earnings

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	1,993,291	1,780,757	Beginning Balance
Dampak Penerapan PSAK 71, 72 dan 73	(1,783,169)	--	The Impact of Implementation PSAK 71, 72 and 73
Dampak Dekonsolidasian	(27,296)	--	The Impact of Deconsolidation
Pembagian Dividen	--	(42,608)	Dividend Paid
Penambahan Cadangan Umum	--	(127,822)	Addition of General Reserve
Laba Bersih	105,341	324,913	Net Income
Penghasilan Komprehensif Lainnya	4,760	(6,583)	Other Comprehensive Income
Reklasifikasi atas Surplus Revaluasi Aset Tetap	19,457	64,634	Reclassification of Revaluation Surplus Fixed Asset
Saldo Akhir	312,384	1,993,291	Ending Balance

e. Kepentingan Non Pengendali

e. Non Controlling Interest

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	6,867	117,612	Beginning Balance
Atribusi Laba Tahun Berjalan	428	2,159	Attribution of Income for the Year
Atribusi Penghasilan Komprehensif Lain	42	(60)	Attribution of Other Comprehensive Income
Dampak Dekonsolidasi	(4,259)	--	The Impact of Deconsolidation
Dividen	--	(2,529)	Dividend
Dampak Perubahan Metode Akuntansi	--	(110,315)	The Impact of Accounting Method Changes
Jumlah	3,078	6,867	Total

36. Pendapatan Usaha

36. Revenues

	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan Jasa Konstruksi	3,616,483	5,783,502	Construction Services Revenues
Pendapatan Hasil Investasi	492,371	273,367	Revenue from Investment
Pinjaman yang Diberikan	184,829	198,908	Revenue from Interest and Provision of Loans
Keuntungan atas Investasi pada Efek Ekuitas	55,218	--	Gain on Securities Effect Investment
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi	46,243	60,432	Revenue from Consultation Fee
Pendapatan Penggantian Biaya	2,700	4,997	Revenue from Reimbursable Cost
Pendapatan Bunga dan Fee Penjualan	--	348,251	Interest Income and Fees on Sales
Jumlah	4,397,844	6,669,457	Total

**a. Dari hasil kegiatan investasi, Grup
memperoleh hasil sebagai berikut:**

**a. From the results of investment activities, the
Group earns the following:**

	2020 Rp	2019 Rp	
Hasil Investasi Bunga	424,164	203,218	Interest Income from Investment
Bunga Deposito Berjangka	54,174	66,631	Interest on Time Deposits
Keuntungan Perubahan Nilai Wajar	13,940	--	Gain on Fair Value Changes
Dividen Tunai	93	2,001	Cash Dividend
Laba Penjualan Saham	--	1,517	Gain on Sales of Shares
Jumlah	492,371	273,367	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- b. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

- b. *Interest revenue on loans in 2020 and 2019 primarily were as follows:*

	2020 Rp	2019 Rp
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	13,409	21,115
PT Istaka Karya (Persero)	9,094	8,857
PT Perum Perumnas (Persero)	7,276	--
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	4,250	4,322
PT Industri Sandang Nasional (Persero)	4,119	3,234
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2,013	3,232
PT Survey Udara Penas (Persero)	2,942	2,903
PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	3,278	--
PT Boma Bisma Indra (Persero)	1,650	--
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	--	7,598
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	136,798	147,647
Jumlah	184,829	198,908

PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)
PT Perum Perumnas (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)
PT Industri Sandang Nasional (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Survey Udara Penas (Persero)
PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
Others (each below Rp1,000)
Total

- c. Pendapatan imbalan jasa konsultasi terbesar terdiri dari Pendapatan Penyusunan *Business Plan*/Konsultasi yaitu kepada PT Gasuma Federal Indonesia sebesar Rp7.560, Pendapatan *Management Fee* kepada PT National Utility Helicopters sebesar Rp6.233. dan Pendapatan *Management Fee* kepada PT Varia Intra Finance sebesar Rp5.600.

- c. *The largest revenues from consultation fee consist of Business Plan / Consulting Income to PT Gasuma Federal Indonesia amounting to Rp7,560, Management Fee Income to PT National Utility Helicopters amounting to Rp6,233 and Management Fee Income to PT Varia Intra Finance amounting to Rp5,600.*

- d. Keuntungan perubahan nilai wajar atas 7 Entitas PPAK adalah sebesar Rp55.218 (Catatan 20).

- d. *Gain on investment equity securities of 7 PPAK investment entities amounted to Rp55,218 (Catatan 20).*

37. Beban Usaha

37. Operating Expenses

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Usaha		
Beban Proyek	3,299,319	5,158,970
Beban Bunga	446,080	304,095
Pegawai	281,716	307,175
Keperluan Kantor	38,931	41,558
Sewa dan Asuransi	28,093	39,180
Jasa Konsultan	16,136	8,543
Penyusutan	13,096	31,577
Perjalanan Dinas	12,341	24,647
Investasi	11,357	16,544
Pemasaran dan Penjualan	11,009	14,239
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	7,343	5,323
Harga Pokok Penjualan	--	318,800
Pemulihan Penurunan Nilai	(100,740)	(41,658)
Penyisihan Penurunan Nilai	37,736	8,794
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,000)	52,193	51,973
Jumlah Beban Usaha	4,154,610	6,289,760

Operating Expense
Constructions Services
Interest Expenses
Employee
Office Supplies
Rent and Insurance
Consultant Fees
Depreciation
Business Travelling
Investment
Sales and Marketing
Employees Benefit - Net
Cost of Good Sold
Recovery for Impairment
Allowance for Impairment
Others (each below Rp1,000)
Total Operating Expense

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

38. Bagian Laba Ventura Bersama

38. Share of the Profit of Joint Ventures

	2020 Rp	2019 Rp
Nindya - Adhi Karya	25,415	24,771
Nindya - Bahagia Bangun Nusa	20,491	--
Nindya - Modern WT	11,669	--
Nindya - Bangun Bejana Baja	8,718	1,519
Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	8,128	4,961
Nindya - Passokkorang	6,694	350
Nindya - Tirta	5,133	--
Nindya - Waskita - Jaya Purnama	4,933	6,419
Nindya - Sacna	4,055	20,650
Nindya - Rudy Jaya	3,888	22,510
Nindya - Surya	3,880	62
Nindya - Bumi Agung	3,731	--
Nindya - MCC - Wika - Waskita	3,428	10,131
Nindya - Hutama Karya	2,871	11,741
Nindya - Thamrin - Dwifarita	1,276	1,875
Nindya - Karya Sarana	(4,753)	7,370
Nindya - Pembangunan Perumahan	(19,577)	(8,622)
Nindya - Wijaya Karya	--	5,794
Nindya - PP - Hutama Karya	--	1,124
Nindya - Dewa Ruci	--	(2,418)
Nindya - Cipuga	--	(28,896)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	(2,075)	(12,635)
Jumlah	87,905	66,706

Nindya - Adhi Karya
Nindya - Bahagia Bangun Nusa
Nindya - Modern WT
Nindya - Bangun Bejana Baja
Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya
Nindya - Passokkorang
Nindya - Tirta
Nindya - Waskita - Jaya Purnama
Nindya - Sacna
Nindya - Rudy Jaya
Nindya - Surya
Nindya - Bumi Agung
Nindya - MCC - Wika - Waskita
Nindya - Hutama Karya
Nindya - Thamrin - Dwifarita
Nindya - Karya Sarana
Nindya - Pembangunan Perumahan
Nindya - Wijaya Karya
Nindya - PP - Hutama Karya
Nindya - Dewa Ruci
Nindya - Cipuga
Others (each below Rp1,000)
Total

39. Penghasilan (Beban) Lain-lain

39. Other Income (Expenses)

	2020 Rp	2019 Rp
Penghasilan Lain-lain		
Bunga/Jasa Giro	26,456	13,136
Pemulihan Piutang	43,975	--
Penerimaan atas Proyek Selesai	3,030	17,605
Selisih Kurs	825	2,250
Penerimaan atas Pekerjaan Tambah Ventura Bersama	59	--
Pemotongan Pinjaman Bank	--	141,509
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	1,108
Lain-lain	8,376	2,402
Sub Jumlah	82,721	178,010
Beban Lain-lain		
Kerugian atas Dampak Dekonsolidasian (Catatan 20)	(41,279)	--
Beban atas Proyek Selesai	(25,593)	(30,732)
Beban Penurunan Nilai	(15,809)	(36,425)
Beban Pajak	(2,955)	(3,406)
Lain-lain	(12,285)	(26,899)
Sub Jumlah	(97,921)	(97,462)
Jumlah Bersih	(15,200)	80,548

Other Incomes
Interest Deposit
Recovery of Receivables
Revenue from Completed Project
Different Exchange Rate
Receipt from Additional Work of Joint Venture
Haircut Bank loan
Gain from Sales of Fixed Assets
Others
Sub Total
Others Expense
Losses on Deconsolidation Impact (Note 20)
Expense from Completed Project
Impairment Receivables
Tax Expense
Others
Sub Total
Net Total

40. Laba per Saham

40. Earning per Share

Laba per saham 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah Rp35.152 dan Rp108.424 (angka penuh).

Earning per share December 31, 2020 and 2019 is calculated from income for the year attributable to owners of the parent is Rp35,152 and Rp108,424 (full amount).

	2020 Rp	2019 Rp
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk (dalam Rupiah penuh)	105,340,636,047	324,914,807,035
Jumlah Lembar Saham Beredar	2,996,688	2,996,688
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh)	35,152	108,424

Income attributable to Owners of the Parent Entity (in full of Rupiah)
Number of Shares
Basic Earning per Share (In full of Rupiah)

Tidak ada potensi dilusi sehingga tidak menghitung laba dilutif.

There is no potential for dilution so it does not calculate dilutive profit.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

41. Beban Pajak Penghasilan Final

41. Final Income Tax Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Jasa Konstruksi			Construction
Pendapatan Jasa Konstruksi	3,446,150	5,571,735	Construction Income
Pendapatan Jasa Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak	64,977	274,054	Construction Non-taxable Income
Jumlah Pendapatan Jasa Konstruksi	3,381,173	5,297,681	Construction Total Income
Non Jasa Konstruksi			Non-construction
Pendapatan Jasa Non Konstruksi	120,272	186,896	Construction Income
Pendapatan Jasa Non Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak Final	111,628	183,236	Non-Construction Non-Final taxable Income
Jumlah Pendapatan Non Jasa Konstruksi	8,644	3,659	Construction Total Income
Ditambah (Dikurangi):			Added (Less):
Penambahan Beda Waktu Pengenaan Pajak			Addition of Time Difference of Tax
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena pajak	3,381,173	5,297,681	Construction Taxable Income
Pendapatan Non Jasa Konstruksi Kena Pajak	8,644	3,660	Non-construction Taxable Income
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak	3,389,817	5,301,341	Total Taxable Income
Beban Pajak Final Konstruksi			Constructions Final Tax Expenses
3% x 2020 : Rp 3.381.173	101,435	--	3% x 2020 : Rp3,381,173
3% x 2019 : Rp5.297.681	--	158,931	3% x 2019 : RpRp5,297,681
Beban Pajak Final Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan			Land and Building Rental Final Tax Expenses
10% x 2020 : Rp774	77	--	10% x 2020 : Rp774
10% x 2019 : Rp2.361	--	236	10% x 2019 : Rp2,361
Beban Pajak Final atas Penjualan Properti			Sales of Property Final Tax Expenses
2,5% x 2020 : Rp7.870	197	--	2.5% x 2020 : Rp7,870
2,5% x 2019 : Rp1.298	--	32	2.5% x 2019 : RpRp1,298
Jumlah Beban Pajak Final	101,709	159,199	

42. Kontinjensi

42. Contingencies

PT NK

PT NK sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. PT NK meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT NK.

PT NK

PT NK is facing several legal cases both in the process of filing a lawsuit and currently waiting for a court verdict or cassation. PT NK believes that the decision of the court or cassation in such cases will not bring material impacts on the financial condition and performance of the PT NK.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 perkara hukum yang sedang berjalan antara lain:

Up to December 31, 2020, legal cases in progress, are as follows:

1. Piutang kepada PT Buana Risma (PT BR) adalah sisa tagihan proyek kerjasama pembangunan perumahan Malaka Asri. PT BR sebagai konsultan manajemen proyek pembangunan serta membuat program pemasaran, akan tetapi PT BR telah melampaui batas kewenangannya dengan melakukan penjualan atas rumah dan menerima pembayaran langsung dari pembeli. Namun hasilnya tidak disetorkan kepada PT NK.

1. Accounts receivable to PT Buana Risma (PT BR) is remaining billing of Malacca Asri residential construction cooperation project. PT BR as the projects construction management consultant as well as the creator of marketing program has exceeded its limit by selling home and receive direct payment from the buyer. Meanwhile, the payment has not been received by PT NK.

Berdasarkan kesepakatan PT BR mengakui memiliki utang kepada PT NK sebesar Rp3.083 termasuk bunga dan status penyelesaian tagihan saat ini adalah menunggu PT BR

Based on the deal, PT BR admits that it has debt to PT NK as Rp3,083 including interest. The current status of the bill is waiting PT BR to calculate liabilities and mortgage waiver for

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

melakukan perhitungan kewajiban dan pelepasan hak tanggungan untuk aset yang akan diserahkan kepada PT NK. Perkara ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun).

Pada Tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang dalam perkara tersebut PT NK sebagai Pihak Penggugat dan PT BR sebagai Tergugat. Putusan tersebut menyatakan gugatan PT NK tidak diterima. Sehingga PT NK mengajukan Banding.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 terbit putusan Pengadilan Tinggi yang isinya menerima permohonan banding PT NK dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga menyatakan PT BR telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap PT NK dan menghukum PT BR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.083.

Sesuai surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Permohonan Keterangan Inkracht, disampaikan bahwa dalam perkara perdata antara PT NK dan PT BR jika sampai dengan batas waktu yg ditentukan oleh Undang-undang para pihak (Penggugat & Tergugat) tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan PN Jakarta Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto No.131/PDT/2015/PT.DKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewisjde*).

Karena tidak ada upaya hukum lagi dari PT BR, dan sebagai tindak lanjut dari putusan PN Jakarta Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PT.DKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), PT NK mengajukan permohonan eksekusi putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, Tanggal 23 Agustus 2017 telah diterbitkan Surat Penetapan Eksekusi Putusan dari Ketua Pengadilan Negeri. Melalui Penetapan Eksekusi Tersebut, PT BR dipanggil sebanyak 2 kali oleh PN Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Oktober PT NK mengajukan permohonan sita dan eksekusi putusan perkara No. 171/PDT.G/2014/PN.JKT SEL juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PT.DKI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

assets which shall be submitted to PT NK. These matters are handled by the Young Attorney General Civil and TUN (Jamdatun).

On November 13, 2014 the District Court of South Jakarta has determined the verdict that contains Group accusation. The verdict stated that the Group lawsuit is not accepted. So that, Group decided to fill the appeal.

Then, on June 19, 2015 the Supreme Court declared the verdict which stated that the Supreme Court had received the appeal of Group and issued cancelation of the South Jakarta District Court Verdict. The Supreme Court also stated that PT BR had done a default that caused losses to Group and punished PT BR to pay compensation as much as Rp3,083.

Based on the letter from South Jakarta District Court Number: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 dated August 30, 2016 about Inkracht Certification Request, stated that the civil case between Group and PT BR up to the time limit specified by Law, the parties (Prosecutor & Defendant) would not filled a legal action, then the Sentence of South Jakarta District Court No. No.171/Pdt.G/ 2014PN.Jkt.Sel juncto No.131/PDT/2015/PT.DKI has a permanent legal course (*inkrach van gewisjde*).

Due to no further legal remedies from PT BR, and as a follow up to the South Jakarta DC decision No. 171/Pdt.G/2014PN.Jkt Sel juncto HC Decision No.131/PDT/2015/PT.DKI has legal force still (*incracht van gewisjde*), Group submitted an application for the execution of the verdict through the South Jakarta District Court. Then, on August 23, 2017, a Decision Letter on the Execution of Decisions has been issued from the Chair of the District Court. Through the Determination of Execution, PT BR was summoned twice by the South Jakarta DC. Then on October 10, Group submitted a petition for seizure and the execution of case decision No. 171/PDT.G/2014/PN.JKT SEL juncto HC Decision No.131/PDT/2015/PT.DKI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 11 Juli 2018, adanya surat dari PN Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Hal : Menindaklanjuti Pengajuan Bukti Pendaftaran Blokir Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HDB) No. 555 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017.

Tanggal 30 Juli 2018, adanya Surat dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat kepada Ketua PN Jakarta Selatan perihal menindaklanjuti pengajuan bukti pendaftaran blokir terhadap Sertipikat HGB No. 555 dan Sertipikat SHM No. 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017. Tanggal 21 Januari 2019 terbit pelaksanaan sita eksekusi.

Tanggal 22 April 2019 PT NK telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi oleh KJPP Dolly dan tim Lawyer untuk melakukan appraisal terhadap asetnya BR dalam rangka penentuan harga limit dari Pengadilan Negeri. pada tanggal 11 September 2019 telah dilakukan survey terhadap aset BR.

Tanggal 15 November 2019, KJPP Dolli Siregar & Rekan telah menyerahkan laporan final appraisal atas tanah kosong seluas 130 m² dan bangunan seluas 39m² dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. nilai pasar sebesar Rp543.
- b. nilai likuidasi sebesar Rp434.

Tanggal 6 Desember 2019, PT Nindya Karya telah menyerahkan hasil laporan penilaian appraisal atas tanah kosong dari KJPP Dolly & Siregar kepada kuasa hukum untuk selanjutnya diserahkan ke PN Bandung.

Tanggal 6 Februari 2020 telah diajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kantor Lelang Kabupaten Bandung. Dan Proses Lelang di jadwalkan pada 22 Juli 2020.

Tanggal 22 Juli 2020 telah di adakan lelang eksekusi namun belum ada peminatnya.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses pertimbangan manajemen.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On July 11, 2018, there was a letter from the South Jakarta District Court to the Head of the West Bandung Regency Land Office, p. 555 and Certificate of Property (SHM) No. 1452, for Determination of Number: 42 / Eks.Pdt / 2017.

On July 30, 2018, there was a letter from the Ministry of Agrarian & Spatial Planning / BPN West Bandung Regency Land Office of West Java Province to the Chairperson of the South Jakarta District Court regarding the follow up on the submission of blocking registration evidence to the Certificate of HGB No. 555 and Certificate of SHM No. 1452, for Determination of Number: 42 / Eks.Pdt / 2017. January 21, 2019 the execution of seizure execution.

April 22, 2019 the company has submitted an application for Execution Auction to the District Court.

On August 7, 2019 a location survey was conducted by KJPP Dolly and Tim Lawyer to conduct an appraisal of BR assets in the context of determining the price limit of the District Court. And on September 11, 2019, a survey of assets of BR.

On 15 November 2019, the KJPP Dolli Siregar & Partners has submitted a final appraisal report on vacant land measuring 130 square meter and building area of 39 square meter with the following conclusion:

- a. market value of Rp543.*
- b. liquidation value of Rp434.*

Date December 6, 2019, PT Nindya Karya has submitted the results of the assessment report on the appraisal of land left blank KJPP Dolly & Siregar to legal counsel to then submitted to the Bandung District Court.

On February 6, 2020, a bid for execution was submitted to the Bandung Regency Auction Office. And the Auction Process is scheduled for July 22, 2020.

July 22, 2020, an execution auction was held but there was no enthusiast yet.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on management's considerations.

2. Proyek Aston adalah proyek paket pekerjaan struktur dan general finishing Aston Mangga Dua Jakarta dengan PT Mandiri Karya Cipta Indah (PT MKCI) sebagai pemilik pekerjaan. Nilai proyek sebesar Rp52.000, proyek berakhir karena PT MKCI selalu menghindar untuk penetapan progress fisik pekerjaan termasuk menunda pembayaran sebagai akibat belum adanya kesepakatan progress. Tagihan yang diajukan sebesar Rp13.678 termasuk kenaikan harga (eskalasi) dan status penyelesaian tagihan pada 2013 adalah menunjuk Tim Jamdatun sebagai kuasa direksi PT NK untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dilakukan registrasi perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan PT NK tidak dapat diterima. PT NK mengajukan upaya banding dan pada tanggal 23 April 2013 telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 20 Mei 2014 Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. PT NK mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan dari Kasasi tersebut antara lain menolak permohonan Kasasi PT NK.

Tanggal 2 Oktober 2017 sesuai surat Direksi nomor: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 perihal Permohonan Pendapat Hukum, PT NK bersurat kepada Jamdatun meminta pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet pada proyek Aston Mangga Dua. Sampai saat ini Jamdatun masih mengkaji pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet tersebut.

Tanggal 3 Oktober 2019 telah dilakukan ekspose terhadap *Legal Opinion* (LO) untuk Nindya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Pada tanggal 29 Oktober 2019, melalui surat no. B- 569/G/Gph.1/10/2019, Kejaksaan RI mengeluarkan Pendapat Hukum (LO) atas permohonan pendapat hukum PT Nindya Karya pada perkara perdata, *Lawyer Opinion* tersebut pada intinya menyarankan untuk mengajukan kembali gugatan terhadap PT MKCI.

Tanggal 22 November 2019, LO (*Legal Opinion*) dari *Retainer* telah diterima PT NK, yang menyarankan PT NK harus mengajukan gugatan ulang.

2. *Aston Project is a structural work package project and general finishing for Aston Mangga Dua Jakarta with PT Mandiri Cipta Karya (PT MKC) as the owner of the project. The project which values for Rp52,000 had to be ended due to PT MKC always evading the establishment of physical work progress, included delaying payments as the result of the lack of progress agreement. The proposed Bill of Rp13,678 including price increases (escalation) and the status of the settlement Bill in 2013 is pointing to the Jamdatun Team as the power of the directors of the company to file a lawsuit through the Central Jakarta District Court and registration have been made through the Registrar of the District Court in Central Jakarta.*

Then the Central Jakarta PN issued a ruling stating that the Group lawsuit was not acceptable. Group submitted an appeal attempt and on April 23, 2013, delivered a memory of the appeal to the High Court through the Central Jakarta District Court. On May 20, 2014 the Central Jakarta High Court issued a ruling stating that the District Court's verdict was upheld. Group submitted a request for cassation at the Supreme Court. The decision of the Cassation, among others, rejected the application for the Cassation of Group.

On October 2, 2017 according to the Directors' letter number: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 regarding the Request for Legal Opinion, Group corresponded to Jamdatun asking for legal considerations for the elimination of bad debts in the Aston Mangga Dua project. Until now, Jamdatun is still reviewing legal considerations for the elimination of bad debts.

On October 3, 2019, an Legal Opnion was held for Nindya at the Deputy Attorney General for Civil and Administrative Affairs (Jamdatun).

On October 29, 2019, through letter No.B-569/G/Gph.1/10/2019, AGO RI issued a Legal Opinion (LO) on the request for a legal opinion PT Nindya Karya on civil cases, the Opinion Lawyer in essence advised to resubmit the lawsuit against PT MKCI.

On November 22, 2019, the Legal Opinion (LO) of the retainer has been received Company, which the advice the company must be boils down to the rule of law should.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 19 Juni 2020, hasil rapat dengan Dewan Direksi dan NSR, bagian hukum diminta untuk membuat rekap progres dan pembayaran yang telah direalisasikan dan tambahan dokumen terkait guna analisa lebih lanjut oleh NSR terkait posisi hukum Nindya dalam kasus proyek Aston ini.

Tanggal 14 September 2020 NSR memberikan kajian antara lain PT NK dapat mengupayakan penyelesaian secara negosiasi dengan MKCI guna melakukan set off atau Nindya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusbukuan piutang (*write off*) proyek Aston Mangga Dua.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses pertimbangan manajemen.

3. Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan proyek tahun Anggaran 2004-2011. Nilai total kontrak proyek sebesar Rp771.599 dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai pemilik pekerjaan. Dalam mengerjakan proyek tersebut PT NK menjalin kerjasama operasi dengan PT Tuah Sejati, dan membentuk perjanjian kerjasama dengan nama Nindya Sejati Joint Operation (JO).

Persentase nilai kepesertaan masing-masing PT NK tersebut adalah PT Nindya Karya (Persero) sebesar 55% dan PT Tuah Sejati 45%. Laba yang dibukukan dari pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Lanjutan porsi PT Nindya Karya (Persero) yaitu sebesar Rp44.681.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, PT NK telah melakukan penurunan nilai atas dana yang dibatasi penggunaannya.

4. Piutang kepada PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) adalah sisa tagihan kerjasama proyek Pada paket pekerjaan struktur dan arsitektur pembangunan Koja Trade Mall di Jakarta Utara, MSC tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 90,7696 % dan pekerjaan tambah / kurang kepada PT NK.

PT NK Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan isi putusan Mengabulkan gugatan MSC untuk sebagaian. PT NK mengajukan upaya banding melalui

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On June 19, 2020, the results of a meeting with Board of Directors and NSR, the legal department was asked to make a recap of progress and payment that had been realized and additional related documents for further analysis by NSR regarding Nindya's legal position in the Aston project case.

On September 14, 2020, NSR provided a study, among others, that PT NK could seek negotiations with MKCI to set off or Nindya could consider writing off (impairment) Aston Mangga Dua's Project receivables.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on management's considerations.

3. Sabang Loading Dock Construction Projects in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is a project for 2004-2011 fiscal year. Total project's value amounting to Rp771,599 with Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) as the project owner. In the project implementation, The Company established joint operations with PT Tuah Sejati, and formed a joint venture as Nindya-Sejati Joint Operation (JO).

The share value percentage for each companies is PT Nindya Karya (Persero) amounted to 55% and PT Tuah Sejati 45%. Accounted operating income from the Sabang Loading Dock Construction Projects in the portion of PT Nindya Karya (Persero) which amounted to Rp44,681.

Until December 31, 2020 the Company has make allowances for impairment losses of restricted fund.

4. Receivables from PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) are the remaining project collaboration debts. In the Koja Trade Mall construction structure and architecture package in North Jakarta, MSC did not pay 90.7696% for work performance and added / less work to PT NK.

PT NK Submits a lawsuit through the South Jakarta District Court, with the contents of the decision Granting the MSC claim for part. PT NK submitted an appeal effort through the

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan isi putusan Menyatakan MSC telah wanprestasi kepada PT NK; Menghukum MSC untuk membayar kerugian kepada PT NK seluruhnya sebesar Rp5.226. Putusan kasasi telah terbit, Pada tanggal 24 Oktober 2018 PT MSC minta waktu 2 minggu untuk menyiapkan usaha penyelesaian kewajiban MSC kepada PT NK.

DKI Jakarta High Court, with the contents of the decision stating MSC had defaulted to PT NK; Sentencing MSC to pay losses to PT NK for a total of Rp5,226. The decision on cassation has been issued. On October 24, 2018, PT MSC requested 2 weeks to prepare an effort to settle MSC's obligations to PT NK.

Pada tanggal 5 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi aset MSC oleh KJPP Dolly dan Tim Kuasa Hukum.

On August 5, 2019, MSC's asset location survey was conducted by KJPP Dolly and the Legal Counsel Team.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 telah keluar hasil appraisal dari KJPP Dolly Siregar & Rekan atas aset yang terletak di Jalan Kramat Jaya Koja, Jakarta Utara.

On August 20, 2019, an appraisal result was issued by KJPP Dolly Siregar & Partners for assets located at Jalan Kramat Jaya Koja, North Jakarta.

Pada tanggal 20 Januari 2020, Nindya bersurat ke Toni Hendarto dan Rekan perihal Permohonan Pendapat hukum terkait tindak lanjut dan upaya hukum yang dilakukan PT NK dengan dikeluarkannya penetapan PN Jakarta Utara. Dan Nindya telah bersurat kepada Kuasa Hukum untuk pengajuan KPKU.

On January 20, 2020, Nindya corresponded to Toni Hendarto and colleagues regarding the petition for legal opinions related to the follow-up and legal remedies carried out by PT NK with the issuance of the North Jakarta District Court. And Nindya has written to the Attorney General for filing KPKU.

Pada tanggal 23 Juni 2020 bagian hukum menyampaikan Kajian Pro Cons kasus koja untuk penanganan upaya hukum selanjutnya.

On June 23, 2020, the legal department submitted a Pro Cons Study on the Koja case for further handling of legal remedies.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses kajian lanjutan.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment process.

5. PT NK telah menyelesaikan Prestasi 94,76% kepada PT Fatimah Azzahra (FA) sehingga PT Fatimah Azzahra berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada NK sebesar Rp17.457 namun faktanya PT Fatimah Azzahra baru menyelesaikan kewajiban kepada PT NK sebesar Rp13.948.

5. *PT NK has completed the working progress 94.76% to PT. Fatimah (FA) so then PT Fatimah Azzahra is obliged to carry out payments to NK Rp17,457 but in fact the new PT Fatimah Azzahra settle liabilities to PT NK amounted to Rp13,948.*

Putusan BANI no. 861/VI/ARB-BANI/2016, tanggal 27 Maret 2017 yang memutuskan bahwa kewajiban PT Fatimah Azzahra kepada PT NK adalah sebesar Rp3.567 telah bersifat mengikat dan final.

BANI Decision no. 861 / VI / ARB-BANI / 2016, dated March 27, 2017 which decided that the obligation PT Fatimah to PT NK is Rp3,567 has to be final.

Pada tanggal 29 Oktober 2019 Kejati Riau menyampaikan surat ke PT NK, Perihal Penyampaian Proposal Rencana Pembayaran dari PT Fatimah Azzahra, yang pada intinya PT FA bersedia membayar sisa pembayaran dalam bentuk penyerahan sebuah aset apartemen di daerah Dago, Bandung dan terhadap kekurangan sisa pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil dalam rentang

On October 29, 2019 Attorney Lists deliver a letter to PT NK, Subject Submission of Proposals Payment Plan of PT Fatimah, who in essence PT FA are willing to pay the remainder of the payment in the form of delivery of an asset apartments in the area in Dago, Bandung and the shortage of the rest of the payment will be made by by installments within the period of 3 years

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

waktu 3 tahun terhitung sejak Januari 2020 sampai Desember 2022.

Tanggal 8 Juni 2020, PT NK bersurat setuju akan ambil unit dan furnish apartemen yang diajukan PT Fatimah Azzahra yang akan dikompensasikan sebagai bagian penyelesaian kewajiban PT Fatimah Azzahra kepada PT NK.

Tanggal 12 September 2020 PT NK dan FA menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Nomor 1 di hadapan Notaris Lili Lastari, S.H., M.Kn. Di Pekanbaru, kemudian FA menyerahkan 36 Bank Giro sebagai pelaksanaan dari Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses pengambilan apartemen.

6. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (PT DPS) tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan Pembangunan Landasan Galangan DPS-Lamongan yang telah diselesaikan oleh PT NK.

PT NK bersurat ke PT DPS sesuai surat nomor : 112/NK- WIL.IV/KEU/04/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Percepatan Penyelesaian *Outstanding* PT DPS. PT NK bersurat ke PT DPS sesuai surat nomor : 304/NK-WIL.IV/KEU/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian *Outstanding* PT DPS

PT DPS bersurat ke PT NK nomor : 16/3501-12/DS/IV/N-Awn tanggal 30 Des 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian *Outstanding*. Disampaikan bahwa berkaitan dg nilai outstanding PT DPS sebesar Rp4.730 akan dibahas dalam pertemuan pada minggu ke 2 bulan Januari 2017 dengan agenda acara Pembahasan Penyelesaian para pihak dalam bentuk sinergi BUMN seperti melakukan KSO, pengerjaan proyek bersama ataupun dengan cara lainnya untuk penyelesaiannya.

Adanya pertemuan dari pihak PT NK dengan PT DPS pada tanggal 28 Mei 2018, dengan kesepakatan PT DPS memutuskan untuk melepaskan Aset Tanah dan Bangunannya yang berlokasi di Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

commencing from January 2020 until December 2022.

On June 8, 2020, PT NK consented to take the apartment units and furnishings proposed by PT Fatimah Azzahra which would be compensated as part of the settlement of PT Fatimah Azzahra's obligations to PT NK.

On September 12, 2020 PT NK and FA signed the Debt Settlement Agreement Act No. 1 before Notary Lili Lastari, S.H., M.Kn. In Pekanbaru, the FA then handed over 36 Bank Giro as an implementation of the Debt Settlement Agreement Act.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and process to execute the apartment.

6. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (PT DPS) does not payments accomplishment of the Project Runway construction Shipyard DPS-Lamongan accomplished by PT NK.

PT NK sent a letter to PT DPS corresponded to the corresponding letter number: 112 / NK-WIL.IV / KEU / 04/2016 dated April 13, 2016, concerning the Acceleration Resolution *Outstanding* PT DPS. PT NK corresponded to PT DPS, the corresponding letter number 304 / NK-WIL.IV / KEU / 09/2016 on 14 September 2016 concerning the follow- up to Accelerate Completion of *Outstanding* PT DPS.

PT DPS sent a letter to PT NK number : 16 / 3501-12 / DS / IV / N-Awn Des 30th, 2016 concerning the Follow-Up to Accelerate Completion of *Outstanding*. Submitted that the outstanding amount related dg PT DPS. Rp4,730 will be discussed during the week to 2 months in January 2017 with the agenda discussion of the Settlement of the parties in the form of synergy as do KSO, jointly working on projects or otherwise for its completion.

A meeting of the PT NK with PT DPS on May 28, 2018, with the agreement of PT DPS decided to release the Assets Land and building located at Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 14 Agustus 2018, Direktur Utama PT DPS bersurat kepada Menteri BUMN RI. Sesuai surat nomor: 18/1958-8/DS/I/M-1 perihal Permohonan Persetujuan Ijin Pelepasan & Optimalisasi Aset PT NK.

Tanggal 23 September 2019 PT NK telah bersurat kembali untuk penagihan kepada PT DPS sesuai surat nomor. : 1689/DKS/SEKPER /09/2019, perihal: Penyelesaian *Outstanding* PT DPS.

PT NK bersurat ke Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN tanggal 11 Maret 2020 yang intinya setuju dengan usulan PT DPS pembayaran secara bertahap. PT NK telah menyerahkan konsep perjanjian penyelesaian kewajiban antara PT NK dan PT DPS kepada PT DPS tanggal 30 Maret 2020.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

7. PT NK dan PT Lampiri Djaya Abadi telah membentuk dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi nomor : 334/NKDI/TEKNIK/07/2013 tertanggal 2 Juli 2013 (NINDYA-LAMPIRI, JO) untuk Proyek Aceh Reconstruction Project (IP-545) – Road Sub Project Package No. I : Section Sp. Kraft-Batas Aceh Tengah dengan porsi kepesertaan PT Nindya Karya (Persero) : 51% dan PT Lampiri Djaya Abadi : 49%.

Tanggal 23 Agustus 2017, Kuasa Hukum PT NK mengajukan permohonan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Tanggal 13 Juli 2018 dibacakan putusan BANI, antara lain sebagai berikut:

- Lampiri dinyatakan telah wanprestasi
- Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan dan membayar hutang sisa pencairan/pinjaman dana kepada PT NK sebesar Rp16.422.289.899
- Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan biaya BANI kepada PT NK sebesar Rp280.

Tanggal 12 November 2019, Permohonan Sita Eksekusi telah diajukan permohonan oleh kuasa hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

August 14, 2018, President Director of PT DPS sent a letter to the Minister of State Owned Enterprises RI. Corresponding letter number: 18/1958-8/DS/I/M-1 regarding the Request Approval Waiver & Optimization Company Assets.

Date 23 September 2019 PT NK has sent a letter back to the billing to the DPS accordance with the letter number: 1689/DKS/SEKPER/09/2019, regarding: Completion of Outstanding PT DPS.

PT NK corresponded to the Deputy for Legal Affairs and Debt of the Ministry of BUMN on March 11, 2020, which basically agreed to the DPS proposal in stages. Nindya has submitted the concept of an obligation settlement agreement between PT Nindya and PT DPS to PT DPS on March 30, 2020.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment for the settlement agreement.

7. PT NK and PT Lampiri Djaya Abadi has formed and signed a Joint Operation Agreement number: 334 / NKDI / ENGINEERING / 07/2013 dated July 2, 2013 (Nindya-Lampiri, JO) to project the Aceh Reconstruction Project (IP-545) - Road Sub Project Package No. I: Section Sp. Kraft-Border Central Aceh with a portion of membership PT Nindya Karya (Persero): 51% and PT Lampiri Djaya Abadi: 49%.

On August 23, 2017, Attorney PT NK apply to BANI (Indonesian National Board of Arbitration).

On July 13, 2018 Date of BANI verdict was read, as follows:

- Lampiri was declared to have been in default
- Lampiri ordered to restore and pay the residual debt disbursement/ loan funds to PT NK of Rp16,422,289,899
- Lampiri ordered to refund the cost of the descendants of the PT NK for Rp280.

November 12, 2019, the application has been filed Sita execution request by the attorney to the West Jakarta District Court.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam tahap diskusi lanjutan atas eksekusi tersebut diatas.

8. Dalam Pekerjaan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipanisasi transmisi serta distribusi primer, sekunder dan tersier berikut pekerjaan sipil untuk pendistribusian air bersih kota Bontang- Kaltim), dimana PT NK masih memiliki tagihan sebesar Rp2.600 kepada PT Altra Excis Investama tetapi hingga saat ini PT Altra masih belum merealisasikannya.

Pada tanggal 26 Nopember 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Rekan selaku Kuasa Hukum Nindya mengirimkan Surat No : 7005.2611/TH.R/XI/2019 Perihal Somasi ke 1 (satu) kepada PT Altra.

Tanggal 26 Maret 2020, Kuasa hukum telah menyampaikan somasi ke-2 kepada Altra.

Tanggal 14 Mei 2020 Altra telah menyampaikan tanggapan somasi dari kuasa hukum PT NK, dimana isinya Altra akan melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp1.200 selama 5 tahun dan sisanya melalui Kerjasama Usaha.

43. Perikatan dan Perjanjian

a. Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-716/MBU/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penyehatan PT MNA dan Surat Menteri Keuangan No. S-478/MK.06/2008 tanggal 5 September 2008 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT MNA, Perusahaan memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku pada awal periode pembayaran bunga.

Pinjaman akan jatuh tempo 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 8 September 2016, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 8 Maret 2010.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still discuss for the execution request above.

8. *On Procurement and Installation of primary, secondary and tertiary transmission and distribution pipelines along with civil works for the distribution of clean water in the city of Bontang- East Kalimantan) Projects, where PT NK still has a bill of Rp2,600 to PT Altra Excis Investama but to date PT Altra still hasn't settled it.*

On November 26, 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Partners as Legal Counsel Nindya sent Letter No: 7005.2611 / TH.R / XI / 2019 Regarding the 1st (one) Somasi to PT Altra.

On March 26, 2020, the attorney has delivered the second summons to Altra.

On May 14, 2020 Altra has submitted a summons response from PT NK's attorney, wherein Altra will make a payment in the amount of Rp1,200 in stages over 5 years and the rest through cooperation.

43. Commitments and Agreements

a. Restructuring and Fund Advance of State Own Enterprise (SOE's) Agreement

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)

Based On The Letter Of The Minister of State-Owned Enterprises No. S-716/MBU/2008 September 4, 2008 subject Bank PT MNA and the letter of the Minister of Finance No. S-478/MK. 06/2008 dated September 5, 2008 subject to approval of restructuring and/or Revitalizing PT MNA, the company provides loans with a ceiling of Rp300,000 with an interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) in effect at the beginning of the the period of interest payments.

The loan will be due 8 (eight) years counted since the signing of the loan agreement or no later than September 8, 2016, while overdue interest payments the first time on March 8, 2010.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-152/MBU/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi MNA dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S-427/MK.06/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal persetujuan usulan Menteri BUMN terkait tambahan pemberian fasilitas pinjaman oleh Perusahaan kepada MNA sebesar Rp561.000 dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi MNA sebagai dana talangan untuk MNA sementara menunggu pencairan dana tambahan Penyertaan Modal Negara.

Pada Tanggal 16 Februari 2016, Perusahaan melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) Nomor 17 memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5 %per tahun bruto (termasuk pajak atas bunga). Pinjaman akan jatuh tempo 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2018. Pinjaman akan dialokasikan untuk membayar upah tertunggak dan/atau sebagian pesangon karyawan PT MNA serta biaya proses RR lainnya.

Pada tanggal 16 November 2016 dilakukan Adendum V No. 09 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman dengan masa perpanjangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman CLF serta penyampaian informasi perubahan.

Dalam proses masuknya mitra menjadi pemegang saham PT MNA, terdapat persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi, antara lain:

- i. Salinan putusan yang mengesahkan homologasi atas perdamaian PT MNA dari Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya;
- ii. Persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan (i) terdilusinya saham Negara dalam PT MNA sebagai konsekuensi atas masuknya modal dari investor dan dikonversinya piutang menjadi saham;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the decision letter of the Minister of State-owned enterprises no. KEP-152/MBU/2011 June 27, 2011 about the restructuring and revitalization of the MNA and/or approval of Finance Minister no. S-427/MK. 06/2011 July 27, 2011 subject to approval of the proposals of the Minister of State-Owned Enterprises the granting of additional related facilities loans by the company to the MNA Rp561,000 restructuring and/or revitalization of MNA as bailouts for MNA While waiting for the disbursement of additional Equity Capital of the country.

On February 16, 2016, based on Deed of Agreement Fund Lending for Restructuring and/or Revitalization Loan PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) No.17, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp500,000 with the interest rate of 10.5% per annum (including tax on interest). The loan will due date 2 (two) years from the signing of the loan agreement or at the latest dated February 15, 2018. The loan will be allocated to pay the owed wages and / or some of PT MNA employee severance and other RR process costs.

On November 16, 2016 do Adendum V No. 09 Loan Agreement can be converted in order to Rescue the MNA Ventures including arranging an extension period of loan facility with a maximum extension period 10 (ten) years from the date of the signing of the loan agreement as well as the delivery of information changes to CLF outstanding debt over loan facility CLF.

In the process of inclusion of the partners became shareholders of PT MNA, there is a preliminary requirement which must be met, including:

- i. copy of the verdict that affirms the homologation over peace PT MNA from Tribunal Judges on the Court of Commerce in Surabaya District Court;*
- ii. The approval of the Government of the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia people's representative Council related to (i) diluted shares of PT MNA as consequences of the influx of capital from investors and dikonversinya receivables into shares; and (ii) of changing the status of*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- dan (ii) berubahnya status PT MNA dari BUMN menjadi Perusahaan Swasta;
- iii. Persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas skema restrukturisasi utang Pajak;
- iv. Surat dan/atau dokumen lain terkait keabsahan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT MNA yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pada tahun 2019, PT MNA telah memperoleh dokumen *legal opinion* atau keabsahan proses Restrukturisasi dan Revitalisasi PT MNA dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Jaminan dari PT MNA adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 32 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp27.983, hipotik atas 18 unit pesawat dengan nilai Rp13.275, fidusia mesin pesawat Boeing 737-300 dan Boeing 737-400 dengan nilai Rp68.652, gadai 99,82% saham PT Merpati Maintenance Facility dan gadai 99,86% saham PT Merpati Training Center dengan nilai total Rp349.542.

2. PT PAL Indonesia (Persero)

Pada tanggal 30 Desember 2015, telah dilakukan restrukturisasi utang terhadap pemberian pinjaman untuk pembiayaan korporasi – *Tranche D* yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Utang PT PAL Indonesia (Persero) Nomor 47. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2030. Utang pokok sebesar Rp151.841 direstrukturisasi menjadi Fasilitas *Tranche A*, utang bunga sebesar Rp88.742 dan denda pokok sebesar Rp4.465 direstrukturisasi menjadi Fasilitas *Tranche B*.

Jaminan dari PT PAL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 9 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp25.194, fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai Rp190.241, fidusia piutang dengan nilai Rp27.697.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- STATE-OWNED PT MNA became a private company;*
- iii. approval of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia over Tax debt restructuring scheme;*
- iv. Letter and/or other related documents the validity of the process of restructuring and revitalization of the PT or MNA/issued by the Young Attorney General Civil and Administrative State.*

In 2019, PT MNA has obtained legal opinion document on the validity of PT MNA's Restructurization and Revitalization process from the Deputy Attorney General for Civil and State Administration.

The guarantee from PT MNA is in the form of mortgage of rank I for 32 land and / or building assets with a value of Rp27,983, mortgages for 18 aircraft with a value of Rp13,275, fiduciary Boeing 737-300 aircraft engines and Boeing 737-400 with value of Rp68,652, pawn of 99.82% stake in PT Merpati Maintenance Facility and pawn of 99.86% stake of PT Merpati Training Center with a total value of Rp349,542.

2. PT PAL Indonesia (Persero)

On December 30, 2015, a debt restructuring was made to a loan lent to finance corporation – Tranche D, as outlined in the Debt Restructuring Agreement PT PAL Indonesia (Persero) Number 47. The expiry date of the agreement is on December 31, 2030. Debt principal amounted to Rp151,841 was restructured into Facility Tranche A, interest payable amounted to Rp88,742, and fine charged to loan amounted to Rp4,465 were restructured into Facility Tranche B.

Collateral from PT PAL is in the form of a mortgage of rank I for 9 land and / or building assets with a value of Rp25,194, fiduciary machinery and production equipment with a value of Rp190,241, fiduciary receivables with a value of Rp27,697.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA)

Pada tanggal 19 November 2013, ditandatangani Perjanjian No PP-11/PPA/1113 antara Perusahaan dengan PT KKA perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan menjadi Pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Adapun pokok-pokok dari pinjaman tersebut antara lain:

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara BUMN selaku ketua Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN No. KEP-02/MBU/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan PT Kertas Kraft Aceh (Persero), maka Perusahaan melakukan pengalihan atas pinjaman dana talangan yang termasuk dalam program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. menjadi pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

Berdasarkan surat No. S-397/PPA/DU/0119 merupakan surat persetujuan Perpanjangan fasilitas Dana Talangan Modal Kerja Pengadaan Gas yang diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2019 dengan tujuan agar PT KKA dapat melakukan pembayaran atas pemakaian gas operasi periode Desember 2018 dan Januari 2019 tepat waktu.

Dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan diubah menjadi Perjanjian Sewa maka seluruh fasilitas pinjaman Perusahaan kepada PT KKA jatuh tempo. Atas sisa pinjaman PT KKA yang tidak terbayarkan dibuat suatu perjanjian Pengubahan Perjanjian Restrukturisasi Dana Talangan PT KKA dalam Rangka Penyelesaian Utang No. PP-16/PPA/0719 tanggal 31 Juli 2019.

Jaminan dari PT KKA adalah berupa Surat Senior Kreditur dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memegang jaminan atas aset PT KKA dengan nilai Rp300.080.

4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI)

Pada tanggal 18 Agustus 2011, Perusahaan dan PT DI telah menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55, dimana Perusahaan memberikan pinjaman sebesar Rp675.000. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2019, telah dilakukan beberapa kali addendum perubahan atas

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA)

On November 19, 2013, an agreement was signed, that is the Agreement No PP-11/PPA/1113 between the Company and PT KKA regarding the Comprehensive Amendment of Lending Bailout Loan Agreement to become Restructuring and/or Revitalization Loan. The basic terms of Loan are as follows:

As with the release of the Decision of State-Owned Enterprises Minister as the Chairman of State-Owned Enterprises Restructuring and Revitalizing Committee No. KEP-02/MBU/2012 on 4 January 2012 about Restructuring and/or Revitalization of PT Kertas Kraft Aceh (Persero), therefore the Company transferred the bailout loan that was included in Restructuring and Revitalizing Program into Restructuring and/or Revitalization Loan.

Pursuant to No.S-397 / PPA / DU / 0119 is an approval letter for the Extension of the Gas Procurement Working Capital Expansion Fund facility which is extended until February 28, 2019 with the aim that PT KKA can make payments for the use of operating gas for the period December 2018 and January 2019 on time.

With the termination of the Electricity Sale and Purchase Agreement and converted into a Lease Agreement, all of the Company's loan facilities to PT KKA are due. For the remaining outstanding loans of PT KKA, an agreement to amend the PT KKA Bailout Restructuring Agreement in the Debt Settlement Framework No. PP-16 / PPA / 0719 dated July 31, 2019.

The guarantee from PT KKA is in the form of a Senior Credit Creditor from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which holds a guarantee for the assets of PT KKA amounted to Rp300,080.

4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI)

On August 18, 2011, The Company and PT DI signed the Deed of PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55, in which The Company provided a loan of Rp675,000. Since 2011 until 2019, there have been several addendum changes to the Deed No.55 and the latest is the Deed of Amendment X (tenth) of PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.114 Corporate

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Akta No.55 tersebut dan yang terakhir adalah Akta Perubahan X (kesepuluh) Perjanjian Pembiayaan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.114 pada tanggal 20 Desember 2019. Akta perubahan X (kesepuluh) tersebut mengatur penurunan suku bunga menjadi 2,18% dan perpanjangan proses sertifikasi dan pengikatan aset tanah jaminan serta penyelesaian hutang pokok dan bunga kepada Perusahaan.

Jaminan dari PT DI adalah berupa fidusia piutang dengan nilai Rp16.482, fidusia mesin sebesar dengan nilai Rp270.368, dan PT DI telah menyerahkan 7 sertifikat aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp590.265 yang dalam proses persetujuan pemegang saham PT DI untuk pengikatan jaminan.

5. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI)

Pada tanggal 27 Desember 2016, telah dilakukan restrukturisasi utang terhadap seluruh kewajiban PT IKI kepada Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Utang PT Industri Kapal Indonesia (Persero) No. 42 ("Perjanjian") tanggal jatuh tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2022. Utang pokok sebesar Rp31.639 direstrukturisasi menjadi *Tranche A*, utang bunga sebesar Rp2.061 direstrukturisasi menjadi *Tranche B*.

Perubahan Perjanjian melalui Addendum I Perjanjian No. 11 tanggal 4 Desember 2019 mengenai perubahan tanggal jatuh tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2028.

Jaminan dari PT IKI adalah berupa hak tanggungan peringkat I dan 2 atas 4 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp185.000 dan fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai Rp45.000.

6. PT Iglas (Persero)

Pemberian pinjaman dalam rangka restrukturisasi dan atau revitalisasi PT Iglas (Persero) berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-15/MBU/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Iglas dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-621/MK.06/2010 tanggal 29 November 2010 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Financing Agreement on December 20, 2019. Deed of amendment X (tenth) regulates the reduction in interest rates to 2.18% and extends the certification process and the binding of collateral land assets and settlement of principal and interest payable to The Company.

Collateral from PT DI is in the form of fiduciary receivables with a value of Rp16,482, machine fiduciary at a value of Rp270,368 and PT has submit 7 certificate land asset and/or building with value amounting to Rp590,265 with approval process from shareholders PT DI regarding binding of guarantees.

5. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI)

On December 27, 2016, a debt restructuring was carried out on all obligations of PT IKI to the Company as set forth in the PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Debt Restructuring Agreement No. 42 ("Agreement") the maturity date of the agreement to December 31, 2022. The principal Debt of Rp31,639 was restructured into Tranche A, the interest payable of Rp2,061 was restructured into Tranche B.

The Agreement has been amended through Addendum I Agreement No. 11 December 4, 2019 concerning changes in the maturity date of the agreement to December 31, 2028.

The guarantee from PT IKI is in the form of mortgage of rights I and II for 4 land and / or building assets with a value of Rp185,000 and fiduciary machinery and production equipment with a value of Rp45,000.

6. PT Iglas (Persero)

Provision of loans for the restructuring and / or revitalization of PT Iglas (Persero), based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-15/MBU/2011 dated January 14, 2011 concerning the Assignment of the Restructuring and/or Revitalization of PT Iglas and the Minister of Finance Number S-621/MK.06/2010 dated November 29, 2010 concerning the approval of Restructuring and/or Revitalization

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero) No. 10 tanggal 15 April 2011, *plafond* pinjaman yang diberikan sebesar Rp106.770 untuk pembayaran kekurangan dana atas pembangunan kembali pabrik yang berlokasi di Gresik yang dikenal dengan rebuild G-1 serta pembayaran hutang, dengan tingkat bunga sebesar bunga SBI ditambah 3% per tahun (bersih).

Perubahan VII Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 33 tanggal 22 Mei 2019, Perusahaan menyetujui permohonan PT Iglas (Persero) untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pinjaman *Tranche A* dan Fasilitas Pinjaman *Tranche B* sampai dengan 29 Februari 2020 dengan pertimbangan masih belum adanya mitra strategis/ investor yang akan bekerja sama serta ketidakmampuan PT Iglas (Persero) untuk membayar Fasilitas Pinjaman tersebut.

Perusahaan dan PT Iglas (Persero) melakukan Perubahan kembali melalui Perubahan VIII Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 43 tanggal 20 Desember 2019 perihal penambahan *plafond* fasilitas pinjaman *Tranche A* maksimal Rp50.000 dan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai 31 Desember 2021.

Jaminan dari PT Iglas (Persero) adalah berupa hak tanggungan peringkat 6 dan 7 atas 14 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp139.100. Adapun atas peringkat HT 1 sampai dengan 5 yang sebelumnya dipegang oleh BNI sudah dilakukan *Roya*, sehingga saat ini posisi PT PPA dan BNI sudah setara.

**7. PT Survai Udara Panas (Persero)
Perjanjian Restrukturisasi Hutang**

Pada akhir Desember 2017, Perusahaan melakukan restrukturisasi seluruh hutang PT Penas yang tertuang pada Perjanjian Restrukturisasi Utang PT Survai Udara Panas (Persero) Nomor 40 tanggal 22 Desember 2017. Fasilitas Hutang ini dibagi menjadi 2 *tranche* yaitu *Tranche A* dan *Tranche B*, dengan detail sebagai berikut:

- a) Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang terdiri dari seluruh pokok utang PT Survei Udara Panas ke Perusahaan yaitu Pinjaman Dana Talangan, *Promissory Notes*, Pinjaman Jangka Pendek, *Promissory Notes* Seri A, dan jual beli piutang dari PT PPAF sebesar Rp80.739, dengan tingkat suku bunga sebesar 0,59%;

Based on the Loan Agreement in the Context of Restructuring and/or Revitalization of PT Iglas (Persero) No. 10 dated April 15, 2011, loan plafond amounting to Rp106,770 for the payment of underfunded funds for the rebuilding of a factory located in Gresik known as the G-1 rebuild and debt payments, with an interest rate of SBI plus 3% per annum (net).

Amendment VII of the Loan Agreement No. 33 dated May 22, 2019, the Company approved PT Iglas (Persero) 's request to extend the term of the Tranche A Loan Facility and Tranche B Loan Facility until February 29, 2020, considering that there are still no strategic partners / investors who will cooperate and PT Iglas (Persero) to pay the Loan Facility.

The Company and PT Iglas (Persero) made changes again through Amendment VIII No. 43 dated 20 December 2019 regarding the addition of a maximum Tranche A loan facility plafond of Rp50,000 and an extension of the term of the loan facility until 31 December 2021.

Collateral from PT Iglas (Persero) is in the form of a mortgage of rights rank 6 and 7 for 14 land and/or building assets with value of Rp139,100. As for the rank of 1 through 5 previously held by BNI has been Roya, so that currently the position of PT PPA and BNI is equal.

**7. PT Survai Udara Panas (Persero)
Debt Restructuring Agreement**

At the end of December 2017, the Company restructured all of PT Penas' debts as stipulated in the PT Survai Air Panas (Persero) Debt Restructuring Agreement No. 40 dated December 22, 2017. This debt facility is divided into 2 tranche namely tranche A and tranche B, with details as following:

- a) *Tranche A Loan Facility consisting of all principal debt of PT Survei Udara Panas to the Company, namely Bailout Loans, Promissory Notes, Short Term Loans, Series A Promissory Notes, and the sale and purchase of receivables from PT PPAF of Rp80,739 with an interest rate of 0.59%;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- b) Fasilitas Pinjaman *Tranche B* yang terdiri dari seluruh hutang bunga sebesar Rp26.007, dengan tingkat suku bunga sebesar 0,59%.

Pada tanggal 20 Desember 2019 telah dilakukan *Addendum I* atas Perjanjian Restrukturisasi Utang dengan Akta No. 39, yang menyatakan bahwa jatuh tempo pembayaran *Tranche A* berubah dari tanggal 29 Februari 2020 menjadi 31 Desember 2020.

Perjanjian Pinjaman Investasi

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi kepada PT Survai Udara Penas yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Akta No. 09, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman investasi dengan jumlah plafond maksimal sebesar Rp11.000. Tujuan fasilitas ini yaitu membiayai Kegiatan investasi berupa pengambilalihan 90% saham dalam PT Pratama Persada Airbone milik PT PPAK. Jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 2026 dengan tingkat suku bunga sebesar 14% per tahun.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa gadai atas 9.009 lembar saham dalam PT Pratama Persada Airbone dan aset – aset lainnya yang dimiliki oleh PT Survai Udara Penas dari waktu ke waktu yang belum dijaminakan untuk kepentingan pihak lain, untuk jumlah nilai penjamin yang dipandang cukup oleh Perusahaan. Pada tanggal 20 Desember 2019 telah dilakukan *Addendum I* atas Perjanjian Investasi nomor 38, yang menyatakan bahwa jatuh tempo pembayaran bunga berubah menjadi setiap 2 tahunan di akhir tahun untuk hutang pokok terutang sejak tanggal 1 Januari 2019.

Perjanjian Pinjaman Dana Talangan

Melalui Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Talangan kepada PT Survai Udara Penas (Persero) No. PP-16/PPA/0918 tanggal 18 September 2018, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman modal kerja dengan jumlah *plafond* maksimal sebesar Rp11.000. Tujuan fasilitas ini yaitu memberikan modal kerja kepada PT Survei Udara Penas dalam melakukan kegiatan proyek pemetaan.

Dalam perkembangannya dilatarbelakangi dengan diperolehnya proyek pemetaan dari Badan Informasi Geospasial, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman baru dengan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- b) *Tranche B Loan Facility* consisting of all interest debts of Rp26,007 with an interest rate of 0.59%.

On December 20, 2019 an *Addendum I* was made to the Debt Restructuring Agreement with Deed No. 39, which states that the due date for *Tranche A* payments changed from February 29, 2020 to December 31, 2020.

Loan Investment Agreement

Based on the Investment Lending Agreement to PT Survai Udara Penas conducted on January 11, 2018 with Deed no. 09, the Company provides a loan facility in the form of an investment loan with a maximum ceiling of Rp11,000. The purpose of this facility is to finance investment activities in the form of a takeover of a 90% stake in PT Pratama Persada Airbone owned by PT PPAK. The term of the loan facility is up to 2026 with an interest rate of 14% per annum.

As collateral for repayment of all debts, collateral in the form of a pledge of 9,009 shares in PT Pratama Persada Airbone and other assets owned by PT Survai Udara Penas from time to time that has not been guaranteed for the benefit of other parties, for the amount of the guarantor's value which is deemed sufficient by the Company. On December 20, 2019 *Addendum I* was made to Investment Agreement number 38, which states that the interest payment due will change to every two years at the end of the year for the principal debt due since January 1, 2019.

Bailout Loan Agreement

Through the Bailout Loan Facility Loan Facility Agreement to PT Survai Air Penas (Persero) No. PP-16 / PPA / 0918 dated September 18, 2018, the Company provided a loan facility in the form of working capital loans with a maximum ceiling of Rp11,000. The purpose of this facility is to provide working capital to PT Survei Udara Penas in conducting mapping project activities.

In its development, by obtaining mapping project from Badan Informasi Geospasial, the company provided a new loan facility using the available ceiling through Comprehensive

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

menggunakan plafond yang masih tersedia melalui Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pemberian Fasilitas Dana Talangan No. PP-017/PPA/0620 tanggal 24 Juni 2020. Perubahan atas Perjanjian ini adalah:

- a. Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang terdiri dari seluruh pokok utang PT Survei Udara Penas ke Perusahaan berdasar Perjanjian Pinjaman Awal (*non-revolving*) yaitu sebesar Rp5.267 yang wajib dilunasi pada tanggal 31 Januari 2021, dengan tingkat suku bunga sebesar 14%.
- b. Fasilitas Pinjaman *Tranche B* dengan plafond untuk modal kerja proyek (*revolving*) sebesar Rp5.732 yang wajib dilunasi pada tanggal 31 Januari 2021, dengan tingkat suku bunga sebesar 17,5%.

Jaminan dari PT SUP adalah berupa hak tanggungan peringkat I, 2 dan 3 atas 2 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp2.360, fidusia 2 airframe pesawat Cessna 402B dan C208 dengan nilai Rp2.373, fidusia 2 engine pesawat Cessna 402B dengan nilai USD93.752, fidusia 2 engine pesawat Cessna 402B dan 1 engine 208B dengan nilai Rp201, gadai 90% saham PT Pratama Persada Airborne dengan nilai Rp9.009, fidusia piutang proyek dengan nilai Rp1.050, dan 1 unit Camera Large Format dan 16 peralatan IT dalam proses pengikatan jaminan fidusia dengan nilai Rp24.102 oleh PT SUP.

8. PT Kertas Leces (Persero)

Berdasarkan surat menteri BUMN No. S-511/MBU/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Pemberian Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) untuk *Revolving Working Capital* yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) ("PT KL") No. 13 tanggal 11 Oktober 2012. Berdasarkan Perjanjian tersebut Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan dengan jumlah pokok fasilitas maksimum Rp50.000.

Tanggal 26 April 2019, Tim Kurator PT KL telah mengumumkan pembagian hasil dana lelang eksekusi dimana Perusahaan selaku kreditor separatist dan pemegangan HT peringkat I diberikan sebesar Rp1.291. Atas pembagian ini dinilai terlalu rendah sehingga Perusahaan mengajukan keberatan atau perlawanan (*Renvoi Prosedur*).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Amendment to the Bailout Loan Facility Agreement No. PP-017/PPA/0620 tanggal 24 Juni 2020. Amendments to this agreement are:

- a. *Tranche A Loan Facility consisting of the entire principal debt of PT Survei Udara Penas to the Company, based on the initial Bailout Loan Agreement (non-revolving) of Rp5,267 which must be repaid on 31 Januari 2021, with an interest rate of 14%.*
- b. *Tranche A Loan Facility with a ceiling for project working capital (revolving) of Rp5,732 which must be repaid on 31 Januari 2021, with an interest rate of 17,5%.*

The guarantee from PT SUP is in the form of mortgage of rank I, 2 and 3 for 2 land and / or building assets with a value of Rp2,360, fiduciary 2 airframe Cessna 402B and C208 aircraft with a value of Rp2,373, fiduciary 2 engine Cessna 402B with value of USD93,752, fiduciary 2 Cessna 402B aircraft engines and 1 208B engine with a value of Rp201, 90% pledge of PT Pratama Persada Airborne with a value of Rp9,009, fiduciary project receivables with a value of Rp1,050, and 1 unit of Large Format Camera and 16 IT equipment in the process of binding fiduciary guarantees with a value of Rp24,102 by PT SUP.

8. PT Kertas Leces (Persero)

Based on the Minister of SOE letter No. S-511 / MBU / 2012 dated 18 September 2012 concerning the Provision of Bailout Funds to PT Kertas Leces (Persero) for Revolving Working, the Bailout Loan Fund Loan Agreement has been signed to PT Kertas Leces (Persero) ("PT KL") No. 13 dated 11 October 2012. Based on the agreement, the Company provided a Bailout Loan with a maximum principal amount of Rp50,000.

*On April 26, 2019. PPA as a separatist creditor and holding HT rank I was given Rp1,291. With regard to this division, it is considered that the PPA has raised an objection or resistance (*Renvoi Procedure*).*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 29 Agustus 2019 telah dilaksanakan pembacaan putusan Renvoi Prosedur, yang mana putusnya Menolak keberatan atau perlawanan dari Pelawan (Perusahaan) untuk seluruhnya, Perusahaan melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Ari Zulfikar & Partners (AZP) telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan menyerahkan memori Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan surat Mahkamah Agung RI nomor 100/Pts.Pailit/VI/1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 12 Juni 2020 telah disampaikan Salinan Putusan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusnya MARI mengabulkan keberatan PPA dan memerintahkan agar Tim Kurator membuat daftar pembagian harta terbaru.

Perusahaan melalui surat no.S-2722/PPA/DKBAM/0620 tanggal 23 Juni 2020 telah menyampaikan surat kepada Tim Kurator agar dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI. Menanggapi surat tersebut, Tim Kurator melalui surat no.245/PAILIT-KL/AG-RB-FEB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 memberikan tanggapan bahwa akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut setelah diterimanya Salinan Putusan Kasasi dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Tanggal 9 Juli 2020, AZP selaku kuasa Perusahaan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Surabaya. Atas diterimanya salinan tersebut, Perusahaan kembali menyampaikan surat no.S-3077/PPA/DKBAM/0720 tanggal 20 Juli 2020 kepada Tim Kurator agar dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya 31 Juli 2020.

Tim Kurator beberapa kali melakukan lelang mesin dan peralatan pabrik PT KL, namun belum terjual.

Jaminan dari PT KL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 1 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp9.500, fidusia mesin dengan nilai Rp50.000.

44. Manajemen Risiko Keuangan

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar, dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

August 29, 2019 the reading of the decision of the Renvoi Procedure has been carried out, in which the decision rejects the objection or resistance of the Opponents (PPA) for all. , PPA through legal counsel from the Law Office of Ari Zulfikar & Partners (AZP) has filed an appeal Cassation and handed over the memory of Cassation in the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Based on the letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 100 / Pts.Pailit / VI / 1 K / Pdt.Sus-Pailit / 2020 dated 12 June 2020, a copy of the decision has been submitted to the Surabaya District Court. In its decision, MARI granted PPA's objection and ordered the Curatorial Team to make an updated list of asset distribution.

The company through letter no.S-2722/PPA/DKBAM/0620 dated 23 June 2020 has submitted a letter to the Curatorial Team in order to implement the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Responding to the letter, the Curatorial Team through letter no.245 / PAILIT-KL / AG-RB-FEB / VI / 2020 dated June 25, 2020 gave a response that they would implement the Supreme Court decision after receiving a copy of the Cassation Decision from the Surabaya District Court.

On July 9, 2020, AZP as the Perusahaan attorney received a copy of the Supreme Court's decision from the Surabaya District Court. Upon receipt of this copy, the Company again submitted letter no.S-3077 / PPA / DKBAM / 0720 dated July 20, 2020 to the Curatorial Team so that they could carry out the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia by July 31, 2020.

The Curatorial Team conducted auctions for PT KL factory machines and equipment, but they have not sold.

The guarantee from PT KL is in the form of a mortgage of right of rank I for 1 land and / or building asset with a value of Rp9,500, a machine fiduciary with a value of Rp50,000.

44. Financial Risk Management

a. Financial Risk Management Policies

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk, and define those risks as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa debitur atau pihak lawan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas: Grup menetapkan risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi terkait dengan kewajiban pembayaran atau penyediaan dana kepada pihak lain atau kewajiban untuk membiayai kegiatan Grup.
- Risiko pasar: Grup menetapkan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Menetapkan rasio jaminan terhadap pinjaman debitur 130%;
- Menetapkan diversifikasi sektor industri.
- Menetapkan daftar negatif investasi;
- Menetapkan maksimal penempatan dana pada satu pihak.

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari pihak lawan atas kewajiban kontraktual yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Grup tidak memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan. Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang yang timbul dari kegiatan investasi dan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN.

Grup mengelola risiko kredit terkait dengan penempatan dana di bank dengan hanya menempatkan dana pada bank-bank yang memiliki reputasi dengan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- *Credit risk: possibility that a customer or counterparty will not pay the whole or part of a receivable or will not pay in timely manner and hence, Group will incur loss.*
- *Liquidity risk: The Group determines that liquidity risk is the risk that occurs in relation to the obligation to pay or provide funds to other parties or the obligation to finance the Group's activities.*
- *Market risk: the Group defines the risk of fluctuation in the value of financial instrument as a result of changes in market price.*

In order to effectively manage those risks, the Board of Directors has approved some strategies for the management of financial risks, which are in line with corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks that the Group faced.

The major guidelines of this policy are the following:

- *Determine the guarantee ratio for debtor loans of 130%;*
- *Determine the diversification of the industrial sector.*
- *Establish a negative list of investments;*
- *Determine the maximum placement of funds on one party.*

Credit Risks

Credit risk arises from the risk of failure of the counterparty for contractual obligations that result in financial losses to the Group. The Group does not have significant credit concentration risk. The Group's credit risk is primarily inherent in cash and cash equivalents, receivables arising from investing activities and restructuring and/or revitalization of BUMN.

The Group manages credit risk associated with placing funds in banks by only placing funds with reputable banks with a good reputation to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Tabel berikut menyajikan jumlah eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan:

The following table presents the maximum amount of exposure to credit risk on financial assets:

			2020	
			Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Unimpaired in Value	Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired in Value
			Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Asset
Pinjaman dan Piutang				Loans and Receivables
Kas dan setara kas	--	774,100	774,100	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	--	1,531,707	1,531,707	Short-term Investment Loans
Piutang usaha	--	1,451,943	1,451,943	Accounts Receivable
Piutang retensi	--	151,012	151,012	Retention Receivables
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	--	306,082	306,082	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang diberikan - Dana Talangan	--	340,087	340,087	Loan Receivable - Bailout
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	--	2,331,224	2,331,224	Gross Amount Due from Customers
Cessie Piutang Jangka Pendek	--	372,511	372,511	Short Term Receivable Cessie
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	--	681,689	681,689	Long-term Investment Loans
Pinjaman yang diberikan - Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	--	536,683	536,683	Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Aset Lain-Lain	--	920,491	920,491	Other Assets
Jumlah	--	9,397,529	9,397,529	Total
			2019	
			Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Unimpaired in Value	Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired in Value
			Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Asset
Pinjaman dan Piutang				Loans and Receivables
Kas dan setara kas	--	1,107,636	1,107,636	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	--	1,445,630	1,445,630	Short-term Investment Loans
Aset Keuangan Yang Diperdagangkan	--	70,260	70,260	Held for Trading Financial Assets
Piutang usaha	--	1,477,597	1,477,597	Accounts Receivable
Piutang retensi	--	170,121	170,121	Retention Receivables
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	--	296,623	296,623	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang diberikan - Dana Talangan	--	223,046	223,046	Loan Receivable - Bailout
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	--	2,418,106	2,418,106	Gross Amount Due from Customers
Cessie Piutang	--	565,592	565,592	Short Term Receivable Cessie
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	--	299,854	299,854	Long-term Investment Loans
Pinjaman yang diberikan - Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	--	1,416,472	1,416,472	Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Aset Lain-Lain	--	920,491	920,491	Other Assets
Jumlah	--	10,411,428	10,411,428	Total

Kualitas Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan penempatan dana di Bank dan piutang kepada debitur dengan cara:

- Menempatkan dana pada bank-bank yang memiliki reputasi dengan predikat yang baik
- Penetapan persyaratan jaminan/agunan yang nilainya dapat mem-backup pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi kinerja debitur/penerbit surat utang untuk memastikan pemenuhan persyaratan / kondisi yang diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian penerbitan penerbitan utang

Quality Of Financial Assets

The Group manages the credit risk associated with the placement of funds in the Bank and receivables from debtors by:

- Placing funds in banks that have a good reputation
- Determination of guarantee / collateral requirements whose value can back up financing.
- Monitor and evaluate the performance of debtors / debt securities issuers to ensure fulfillment of the requirements / conditions stipulated in the credit agreement or debt issuance agreement

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

	2020 Rp	2019 Rp	
Kas dan Bank			Cash and Banks
Bank Pihak Berelasi			Cash in Banks Related Party
Dengan Pihak yang Memiliki			Counterparty With
Peringkat Kredit Eksternal			External Credit Rating
AAA	249,678	277,095	AAA
Subtotal	249,678	277,095	Subtotal
Bank Pihak Ketiga			Cash in Banks Third Parties
Dengan Pihak yang Memiliki			Counterparties With
Peringkat Kredit Eksternal			External Credit Rating
A	24,275	4,217	A
AA	2,435	5,184	AA
AAA		2,551	AAA
Subtotal	26,710	11,952	Subtotal
Deposito Berjangka			Time Deposit
Bank Pihak Berelasi			Cash in Banks Related Party
Dengan Pihak yang Memiliki			Counterparty With
Peringkat Kredit Eksternal			External Credit Rating
AA	406,367	444,662	AA
AAA	67,455	77,965	AAA
Sub Total	473,822	522,627	Sub Total
Bank Pihak Ketiga			Cash in Banks Third Parties
Dengan Pihak yang Memiliki			Counterparty With
Peringkat Kredit Eksternal			External Credit Rating
AA	--	195,540	AA
A	10,000	97,522	A
AAA	2,900	2,900	AAA
BBB-	11,000	--	BBB-
Subtotal	23,900	295,962	Sub Total
Total Kas dan Setara Kas	774,110	1,107,636	Total Cash and Cash Equivalents

Risiko Likuiditas

Manajemen telah menetapkan ketentuan/kebijakan terkait dengan pengelolaan likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menerapkan strategi:

- Penetapan skala prioritas untuk kegiatan investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai.
- Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perusahaan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain, baik sumber dana dari perbankan maupun dari hasil penerbitan surat utang.
- Melakukan restrukturisasi atas debitur bermasalah agar mampu membayar kewajibannya kepada Perusahaan sesuai dengan cashflow hasil usahanya.

Liquidity Risks

Management has set provisions / policies related to liquidity management. The Group manages liquidity risk by implementing strategies:

- *Determining the priority scale for investment activities to be financed by considering, among others, the level of returns, risks, and the strategic value of the projects to be financed.*
- *Build good relationships and networks with various parties and utilize the Company's resources in order to obtain funding from other parties, both sources of funds from banks and from the issuance of debt securities.*
- *Undertaking restructuring of problem debtors so that they are able to pay their obligations to the Company in accordance with the cash flow from their operations.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya dari tanggal laporan posisi keuangan:

The following table analyse financial liabilities based on their maturity since the date of statement of financial position:

2020							
Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months	3-12 Bulan/Months	1-5 Tahun/Years	Lebih dari 5 Tahun/More than 5 years	Jumlah/ Total			
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities		
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortised cost		
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	--	3,521,994	1,299,244	--	4,821,238	Bank and Financial Institution Loans	
Utang Surat Berharga Komersial	--	--	--	--	--	Commercial Paper	
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	--	--	748,545	--	748,545	Short-Term Medium Term Notes	
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	929,472	--	--	--	929,472	Gross Amount Due to Third Parties	
Obligasi	--	--	445,000	197,100	642,100	Bonds	
Jumlah	929,472	3,521,994	2,492,789	197,100	7,141,355	Total	
2019							
Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months	3-12 Bulan/Months	1-5 Tahun/Years	Lebih dari 5 Tahun/More than 5 years	Jumlah/ Total			
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities		
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortised cost		
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	--	2,837,002	881,480	--	3,718,482	Bank and Financial Institution Loans	
Utang Surat Berharga Komersial	--	93,572	--	--	93,572	Short-Term Medium Term Notes	
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	--	360,000	747,455	--	1,107,455	Short-Term Medium Term Notes	
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	--	1,342,936	--	--	1,342,936	Gross Amount Due to Third Parties	
Obligasi	--	--	--	--	--	Bonds	
Jumlah	--	4,633,510	1,628,935	--	6,262,445	Total	

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing terjadi apabila Grup memiliki posisi mata uang asing yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dengan debitor. Mitigasi risiko atas posisi mata uang asing ini antara lain melalui penetapan kebijakan natural hedging yaitu pemberian pembiayaan dalam mata uang asing menggunakan sumber dana dalam mata uang asing juga.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange rate risk occurs if the Group has a foreign currency position arising from transactions in foreign currencies with debtors. Mitigation of risk on foreign currency positions, among others, is through the establishment of a natural hedging policy, namely the provision of financing in foreign currency using sources of funds in foreign currencies as well.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat pada denominasi aset dan liabilitas Grup, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following table shows the sensitivity to possible changes in the United States Dollar exchange rate of the Group denominated assets and liabilities, with all other variables held constant, as of December 31, 2020 and 2019:

	Kenaikan (Penurunan) Dalam Mata Uang Asing Dalam Basis Poin/ Increase (Decrease) In Currency in Basis Points	Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak/Effect on Income Before Tax	
31 Desember 2020	+ 100	29,223,800	31 Desember 2020
	- 100	(29,223,800)	
31 Desember 2019	+ 100	1,400,300	31 Desember 2019
	- 100	(1,400,300)	

Tabel berikut menunjukkan instrumen keuangan Grup dalam mata uang asing:

The following table shows the financial instruments of the Group in foreign currency:

	2020		2019		
	Nilai Penuh/ Full Amount	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	Nilai Penuh/ Full Amount	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Kas dan Setara Kas	292,238	4,122,016,990	14,003	194,655,703	Cash and Cash Equivalents
Aset Keuangan	292,238	4,122,016,990	14,003	194,655,703	Financial Asset

Risiko Suku Bunga Pasar

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko nilai wajar instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Secara umum risiko suku bunga yang dihadapi Grup relatif kecil karena suku bunga sumber dana Grup dalam bentuk suku bunga tetap.

Aset atau liabilitas keuangan yang terpengaruh risiko suku bunga pasar adalah penerimaan pinjaman oleh Grup dari bank (kreditur).

Interest Rate Risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows for a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The fair value of interest rate risk is the risk that the fair value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. In general, the interest rate risk faced by the Group is relatively small because the interest rate on the Group's sources of funds is in the form of a fixed interest rate.

Financial assets or liabilities that are subject to market interest rate risk are the receipt of loans by the Group from banks (creditors).

b. Nilai Wajar Informasi Keuangan

Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan didalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut.

Instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi

Investasi berupa dana jaminan berbentuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo disajikan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif/Effective Interest Rate ("SBE/EIR"), dan tingkat diskonto yang digunakan mengacu pada tingkat suku bunga obligasi yang bersangkutan.

b. Fair Value of Financial Statements

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate their fair values.

Financial instruments are presented in financial statements are carried at fair value, or served in the carrying amount either because the amount is less than fair value or the fair value can not be measured reliably. Further explanation is given in the following paragraphs.

Financial instruments carried at fair value or amortized cost

Investment of insurance funds in the form of bonds held to maturity and bonds classified as held to maturity are presented at amortized cost using the Effective Interest Rate ("EIR"), and the discount rate used refers to interest rate of the bond.

Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya
Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan nilai nasional) investasi berupa dana jaminan berbentuk obligasi, penyertaan saham dan pinjaman polis, dan kas dan bank kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Financial instruments with carrying amount approximate their fair value
Management determined that the carrying value (based on the national value) of investment of obligation, investments and policyholder loan, and cash and bank, approximately equal to its fair value.

45. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada stakeholder lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

45. Capital Management

The objectives of the Group when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

	2020 Rp	2019 Rp	
Manajemen Permodalan			Capital Management
Total Liabilitas	9,299,877	8,991,888	Total Liability
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	774,100	1,107,636	Less: Cash and Cash Equivalent
Utang Neto	8,525,777	7,884,252	Net Debt
 Total Ekuitas	 3,658,104	 5,423,544	 Total Equity
 Rasio Utang terhadap Modal	 2.33	 1.45	 Debt to Equity Ratio

46. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

46. Related Parties Balance and Transactions

Disclosure of Related parties significant balance and transaction are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
JV Nindya - Sejahtera	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Adhi Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Andesmont	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Bahagia Bangunnusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Bangun Bejana Baja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Barata	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
JV Nindya - Bina Nusa Lestari	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Brantas	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Bumi Agung Annusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Bumi Karsa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Cipuga	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Citra - Kharisma	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Dewa Ruci	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Piutang Retensi/ <i>Retention Receivable</i>
JV Nindya - Gerbang Saranabaja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Utama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Inti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Jaya Konstruksi	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Karya Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Kencana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Leo Tunggal Mandiri	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - MCC - Wika - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Modern Widya Tehnical	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Passokkorang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - PP	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - PP - Utama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - PPA	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - PT PPA	Entitas Ventura Bersama Perusahaan / <i>The Company's Joint Ventures</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
JV Nindya - Rudy Jaya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Tamiang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Wijaya - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
JV Nindya - Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
PP - KPS KSO	Entitas Ventura Bersama Perusahaan / <i>The Company's Joint Ventures</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivable</i>
PT Hakaaston	Entitas Ventura Bersama Perusahaan / <i>The Company's Joint Ventures</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivable</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / <i>Placemet of Current Account, Bank and Non Bank Loans</i>
Perum LPPNPI (Airmav Indonesia)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ <i>Retention Receivable, Billing of Construction Service</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ <i>Account Receivable, Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ <i>Accounts Receivable, Retention Receivable, Billing of Construction Service</i>
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Pinjaman Investasi Jangka Pendek/ <i>Short-Term Investment Loans</i>
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Tagihan Bruto/ <i>Gross Amount due to from Customer</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/ <i>Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/ <i>Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/ Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/ Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Bhandra Graha Reksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto/ Account Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/ Fund Advance Loans Receivable
PT Bondi Syad Mulia	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ Unconsolidated Subsidiaries	Pinjaman Investasi/ Investment Loans
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Tagihan Bruto/ Gross Amount Due from Customers
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/ Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Piutang Usaha/ Fund Advance Loans Receivable, Accounts Receivable
PT Duta Mentari Raya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ Unconsolidated Subsidiaries	Pinjaman Investasi/ Investment Loans
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Investasi Jangka Pendek/ Short-Term Investment Loans
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Retensi/ Retention Receivable
PT Iglas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi, Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/ Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable/Revitalisasi/
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/ Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/ Fund Advance Loans Receivable
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/ Fund Advance Loans Receivable
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi, Dana Talangan/ Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable
PT Kertas Leces (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/ Fund Advance Loans Receivable
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi, Uang Muka Jk. Pendek/ Account Receivable, Retention Receivable, Billing of Construction Service, Revenues
PT Magnesium Gosari Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ Unconsolidated Subsidiaries	Pinjaman Investasi/ Investment Loans
PT Matoa Kidung Bahtera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ Unconsolidated Subsidiaries	Pinjaman Investasi/ Investment Loans
PT Matoa Kidung Samudera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ Unconsolidated Subsidiaries	Pinjaman Investasi/ Investment Loans

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/ <i>Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization</i>
PT Nindya Beton	Entitas Anak Perusahaan / <i>The Company's Subsidiary</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi, Uang Muka Jk. Pendek/ <i>Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service, Revenues</i>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Panjang/ <i>Gross Amount Due from Customers, Revenues</i>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi/ <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ <i>Account Receivable, Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ <i>Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service</i>
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/ <i>Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization</i>
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto/ <i>Account Receivable, Gross Amount Due from Customers</i>
PT Pertamina EP (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/ <i>Account Receivable, Gross Amount Due from Customers, Revenues</i>
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Perum Perumnas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Piutang Retensi/ <i>Fund Advance Loans Receivable, Retention Receivable</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pupuk Kaltim	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Panjang/ <i>Gross Amount Due from Customers, Revenues</i>
PT Rejeki Intilogam Jaya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiaries</i>	Pinjaman Investasi/ <i>Investment Loans</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Pinjaman Bank dan Non Bank / <i>Bank and Non Bank Loans</i>
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT SIPPA Kemasan Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiaries</i>	Pinjaman Investasi/ <i>Investment Loans</i>
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Piutang Retensi/ <i>Retention Receivable</i>
PT Survei Udara Panas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Control by the Central Government of the RI</i>	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/ <i>Fund Advance Loans Receivable</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Detail of items associated with the related parties transaction:

<u>Aset</u>	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %	<u>Asset</u>
Kas dan Setara Kas	722,792	798,828	5.58%	5.54%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	515,428	386,413	3.98%	2.68%	Accounts Receivable
Piutang Retensi	42,186	68,983	0.33%	0.48%	Retention Receivable
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	340,087	223,046	2.62%	1.55%	Loans Bailout
Tagihan Bruto	530,686	394,037	4.10%	2.73%	Gross Amount Due from Customers
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	536,683	1,416,472	0.00%	0.00%	Loans Receivable
			4.14%	9.83%	Restructuring and/or Revitalization
<u>Liabilitas</u>	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %	<u>Liabilities</u>
Utang Usaha	18,264	140,455	0.14%	0.97%	Accounts Payable
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	3,087,063	2,403,718	23.82%	16.67%	Bank and Financial Institution Loans
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	13,588	10,372	0.10%	0.07%	Short-Term Advances from Customers
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	23,300	35,965	0.18%	0.25%	Long-Term Advances from Customers
<u>Pendapatan</u>	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %	<u>Revenue</u>
Pendapatan Usaha	184,829	198,908	4.20%	2.98%	Sales Revenue

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset, total liabilitas, dan total pendapatan.

Above percentage is a comparison with total assets, total liabilities and total revenue.

47. Segmen Operasi

47. Operating Segment

Segmen operasi Grup dapat digambarkan sebagai berikut dengan pembagian per masing-masing entitas dimana penjelasan operasional masing-masing entitas dapat dilihat pada informasi umum.

The Group's operating segments can be displayed as follows by dividing each entity while the operational explanation of each entity can be seen in general information.

Berikut ini adalah informasi berdasarkan segmen operasi:

Segment information based on operating segments

	2020						
	Investasi/ <i>Investment</i>	Pembiayaan/ <i>Financing</i>	Fabrikasi Beton/ <i>Concrete Fabrication</i>	Konstruksi/ <i>Construction</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidation</i>	
PENDAPATAN USAHA	768,052	136,797	155,796	3,460,687	(123,488)	4,397,844	REVENUES
BEBAN USAHA	(648,179)	(136,227)	(154,472)	(3,348,670)	132,938	(4,154,610)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	119,873	570	1,324	112,017	9,450	243,234	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga	14,419	--	--	--	--	14,419	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	--	--	--	--	--	Advantages of Sales of Fixed Assets
Beban Bunga dan Keuangan	(2,693)	--	(1,290)	(87,821)	--	(91,805)	Interest and Financial Charges
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	7,445	--	--	18,724	--	26,169	Increase in Fair Value of Investment Properties
Beban Pajak Final	--	--	(1,502)	(100,207)	--	(101,709)	Final Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	(3,437)	--	--	91,342	--	87,905	Joint Venture Profit Section
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(45,522)	18,806	(13,125)	30,641	(6,000)	(15,200)	Other income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	90,085	19,376	(14,593)	64,695	3,450	163,013	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(41,792)	(8,173)	(1,883)	(5,396)	--	(57,244)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	48,293	11,203	(16,476)	59,299	3,450	105,769	INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA							INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
- Pemilik Entitas Induk	48,293	11,203	(16,311)	58,706	3,450	105,341	Owners of The Parent Entity
- Kepentingan nonpengendali	--	--	(165)	593	--	428	Non-Controlling Interests
TOTAL	48,293	11,203	(16,476)	59,299	3,450	105,769	TOTAL
TOTAL ASET	8,382,523	1,392,690	194,718	5,292,101	(2,304,051)	12,957,981	TOTAL ASSETS
Total Liabilitas	5,596,417	1,224,235	172,374	3,796,370	(1,489,519)	9,299,877	Total Liabilities
Total Ekuitas	2,786,106	168,455	22,344	1,495,731	(814,532)	3,658,104	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8,382,523	1,392,690	194,718	5,292,101	(2,304,051)	12,957,981	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2019						
	Investasi/ <i>Investment</i>	Pembiayaan/ <i>Financing</i>	Fabriksi Beton/ <i>Concrete Fabrication</i>	Konstruksi/ <i>Construction</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidation</i>	
PENDAPATAN USAHA	889,423	147,423	223,895	5,559,607	(150,891)	6,669,457	REVENUES
BEBAN USAHA	(874,624)	(124,897)	(235,492)	(5,142,660)	87,913	(6,289,760)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	14,799	22,526	(11,597)	416,947	(62,978)	379,697	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga	15,424	--	--	--	--	15,424	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	237	--	--	--	--	237	Advantages of Sales of Fixed Assets
Beban Bunga dan Keuangan	(3,198)	--	--	(86,032)	--	(89,230)	Interest and Financial Charges
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	41,528	--	--	--	--	41,528	Increase in Fair Value of Investment Properties
Beban Pajak Final	--	--	--	(159,199)	--	(159,199)	Final Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	1,929	--	--	64,777	--	66,706	Joint Venture Profit Section
Penghasilan (Beban) Lain-lain	75,562	167	--	(4,808)	9,627	80,548	Other income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	146,281	22,693	(11,597)	231,685	(53,351)	335,711	INCOME BEFORE TAX
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN	1,223	(5,649)	--	(4,213)	--	(8,639)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	147,504	17,044	(11,597)	227,472	(53,351)	327,072	INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA							INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
- Pemilik Entitas Induk	147,504	17,044	(11,481)	225,196	(53,350)	324,913	Owners of The Parent Entity
- Kepentingan nonpengendali	--	--	(116)	2,275	--	2,159	Non-Controlling Interests
TOTAL	147,504	17,044	(11,597)	227,471	(53,350)	327,072	TOTAL
TOTAL ASET	9,550,929	1,120,334	187,439	5,888,883	(2,332,153)	14,415,432	TOTAL ASSETS
Total Liabilities	5,230,878	885,400	125,690	4,263,995	(1,514,075)	8,991,888	Total Liabilities
Total Ekuitas	4,320,051	234,934	61,749	1,624,888	(818,078)	5,423,544	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9,550,929	1,120,334	187,439	5,888,883	(2,332,153)	14,415,432	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

47. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

**Penambahan
Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Februari 2021, telah diputuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan melakukan penambahan penyertaan modal di Perusahaan yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah di PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 1 April 2021, dinyatakan bahwa penetapan nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp2.955.935. Penambahan penyertaan modal Negara pada Perusahaan dilakukan untuk penyertaan saham minoritas Perusahaan pada PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT

47. Events after Reporting Period

Additional Government Equity Participation

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 51 Year 2021 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Share Capital of PT Perusahaan Pengelola Aset dated February 15, 2021, it has been decided that the Government of the Republic of Indonesia will make additional capital participation in the Company which originates from the transfer of all shares owned by the Government in PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, and PT Socfin Indonesia.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 135/KMK.06/2021 concerning Determination of the Value Added Equity Participation in the Company PT Perusahaan Pengelolaan Aset dated April 1, 2021, it is stated that the determination of the value of additional State equity participation in the Company's share capital amounting to Rp2,955,935. The additional state equity participation in the Company was made for the participation of the Company's minority shares in PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Indosat Tbk dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp2.232.811;
2. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp117.355;
3. PT Bank Bukopin Tbk dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp342.513;
4. PT Kawasan Industri Lampung dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp6.551; dan
5. PT Socfin Indonesia dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp256.725.

PT Survai Udara Penas (Persero)

Pada periode setelah pelaporan keuangan, Perusahaan telah menerima pelunasan seluruh kewajiban utang dari PT Survai Udara Penas (Persero) melalui pembayaran pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp120.537 dan *Share-Settlement* Saham PT Pratama Persada Airborne sebesar Rp13.959 berdasarkan Perjanjian Pelunasan Utang PT Survai Udara Penas (Persero) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. 129 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2020.

48. Dampak dari Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona (Covid-19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Manajemen berpendapat bahwa rencana-rencana tersebut dapat secara efektif dilakukan dan Perusahaan dapat terus beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai dimasa mendatang. Meskipun demikian, terdapat suatu ketidakpastian material mengenai dampak dari situasi saat ini terhadap bisnis dan operasi Grup di masa mendatang.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Lampung, and PT Socfin Indonesia, with the following details:

1. PT Indosat Tbk with an investment value amounted to Rp2,232,811;
2. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri with an investment value amounted to Rp117,355;
3. PT Bank Bukopin Tbk with an investment value amounted to Rp342,513 in shares;
4. PT Kawasan Industri Lampung with an investment value amounted to Rp6,551 in shares; and
5. PT Socfin Indonesia with an investment value amounted to Rp256,725 in shares.

PT Survai Udara Penas (Persero)

During the subsquence event period, the Company has received full payment of outstanding debts from PT Survai Udara Penas (Persero) through payment on January 21, 2021 amounting to Rp120,537 and *Share-Settlement* of PT Pratama Persada Airborne shares amounting to Rp13,959 based on the PT Survai Udara Penas (Persero) Debt Repayment Agreement to the Asset Management Company (Persero) No. 129 signed on December 31, 2020.

48. The Impact of COVID-19 Pandemic

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "the Specific Emergency Disasters Corona Virus Outbreak Status" after the discovery of several people who were identified as being affected by the corona virus (Covid-19). This emergency condition, together with the global economic situation affected by the Covid-19 pandemic, caused a downturn in the domestic economy in early 2020, which was characterized by a weakening of the rupiah exchange rate and a decline in the prices of securities on the capital market.

The financial statements have been prepared with the assumption that the Company was continued to operate as going concern. Management believes that the plans can be effectively carried out and the Company can continue to operate in according to the principle as going concern into the future. However, there is a material uncertainty about the impact of the current situation on the Group's business and operation in the future.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**49. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari
Aktivitas Pendanaan**

**49. Reconciliation of Liabilities Arising from
Financing Activities**

	2019 Rp	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Amortisasi Non Kas/ Non Cash Changes Amortization	2020 Rp	
		Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance Cost			
Pinjaman Bank	3,718,481	7,834,696	(6,653,917)	--	(78,022)	4,821,238	Bank Loans
Surat Berharga Komersial	93,572	--	(93,572)	--	--	--	Commercial Paper
Surat Utang Menengah Jangka Pendek	1,107,455	--	(366,428)	--	7,518	748,545	Medium Term Notes
Utang Obligasi	--	642,100	--	(3,134)	1,394	640,360	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	--	14,179	--	--	--	14,179	Lease Liabilities
	<u>4,919,508</u>	<u>8,476,796</u>	<u>(7,113,917)</u>	<u>(3,134)</u>	<u>(69,110)</u>	<u>6,224,322</u>	

	2018 Rp	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Amortisasi Non Kas/ Non Cash Changes Amortization	2019 Rp	
		Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance Cost			
Pinjaman Bank	2,204,704	13,066,442	(12,011,774)	--	459,109	3,718,481	Bank Loans
Surat Berharga Komersial	--	93,572	--	--	--	93,572	Commercial Paper
Surat Utang Menengah Jangka Pendek	600,000	747,455	(240,000)	--	--	1,107,455	Medium Term Notes
	<u>2,804,704</u>	<u>13,907,469</u>	<u>(12,251,774)</u>	<u>--</u>	<u>357,586</u>	<u>4,919,508</u>	

**50. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan
Keuangan**

**50. Management Responsibility on the Financial
Statements**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021.

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which are authorized by Directors for issuance on February 22, 2021.

51. Informasi Keuangan Tambahan

51. Supplementary Financial Information

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY

As of December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2020 *) Rp	2019 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	478,863	569,422	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek			Short-term Investment Loans
Pihak Berelasi	1,390,765	528,765	Related Parties
Pihak Ketiga	1,333,795	1,413,181	Third Parties
Piutang Usaha			Accounts Receivable
Pihak Berelasi	25,692	23,588	Related Parties
Pihak Ketiga	27,047	6,861	Third Parties
Piutang Anak Perusahaan	6,189	1,844	Subsidiaries Receivable
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan			Loans Receivable-Bailout
Pihak Berelasi	340,087	658,487	Related Parties
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	45,437	14,873	Advances and Prepaid Expenses
Cessie Piutang Jangka Pendek	125,070	282,099	Short-term Cessie Receivables
Pajak Dibayar Di Muka	82,575	90,632	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	6,240	4,952	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	3,861,760	3,594,704	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	38,944	40,296	Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi			Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Pihak Berelasi	536,683	1,416,472	Related Parties
Pinjaman Investasi jangka Panjang	681,689	690,850	Long term Investment Loan
Properti Investasi	365,026	366,062	Investment Property
Aset Pajak Tangguhan	12,422	20,968	Deferred Tax Assets
Investasi pada Ventura Bersama	151,341	155,184	Investment in Joint Ventures
Investasi Jangka Panjang - Entitas Anak	749,995	749,995	Long Term Investments-Subsidiary
Piutang Lain-lain	66,534	64,341	Other Receivables
Aset Tetap	3,355	4,127	Property, Plant and Equipment
Cessie Piutang Jangka Panjang	247,441	283,493	Long-term Cessie Receivables
Aset Hak Guna	11,714	--	Lease Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	826,034	398,290	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	3,691,178	4,190,078	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	7,552,938	7,784,782	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali pada Lampiran V Catatan 3

*) Restated on Appendix V Notes 3

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY (Continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2020 *) Rp	2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Accounts Payable
Pihak Ketiga	4,771	24,863	Third Parties
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan			Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi	1,449,678	1,252,238	Related Parties
Pihak Ketiga	1,474,881	1,115,864	Third Parties
Utang Surat Berharga Komersial	--	93,572	Commercial Debt Securities
Utang Pajak	7,427	3,836	Taxes Payable
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	287,678	266,089	Accrued Expenses and Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3,224,435	2,756,462	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	1,717	939	Employee Benefit Liabilities
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan			Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi	53,274	64,743	Related Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	748,545	758,717	Medium term, Long term Notes
Utang Obligasi	640,361	--	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	14,179	--	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,458,076	824,399	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4,682,511	3,580,861	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000			Share Capital - Rp 1,000,000 par value
per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham			per share - Authorized Capital 5,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			Issued and Fully Paid
31 Desember 2020 dan 2019	2,996,688	2,996,688	As of December 31, 2020 and 2019
masing-masing 2.996.688 dan 1.996.688 saham			2,996,688 and 1,996,688 respectively
Saldo Laba:			Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya	299,350	299,350	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	(446,411)	885,731	Unappropriated
Labanya (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk			Unrealized Gain (Loss) on Available
Dijual - Bersih	20,800	22,152	for Sale Securities - Net
JUMLAH EKUITAS	2,870,427	4,203,921	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7,552,938	7,784,782	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali pada Lampiran V Catatan 3

*) Restated on Appendix V Notes 3

LAMPIRAN II

APPENDIX II

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT COMPANY

For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2020 Rp	2019 Rp	
PENDAPATAN USAHA	674,427	540,637	REVENUES
BEBAN USAHA	(547,499)	(402,010)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	126,928	138,627	OPERATING INCOME
Penghasilan Bunga	14,419	15,424	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	237	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan	(2,693)	(3,198)	Interest Expense and Financial Charge
Bagian Laba Ventura Bersama	(1,746)	247	Share of the Profit of Joint Ventures
Beban Lain-lain	(5,828)	(6,468)	Other Expenses
LABA SEBELUM PAJAK	131,080	144,869	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAXES
Manfaat (Beban) Pajak Kini	(31,780)	--	Current Tax Benefit (Expenses)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	(8,546)	5,952	Deferred Tax Benefit (Expenses)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(40,326)	5,952	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	90,754	150,821	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(1,352)	(3,476)	Available for Sale Financial Assets
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(1,352)	(3,476)	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	89,402	147,345	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

LAMPIRAN III

APPENDIX III

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT COMPANY

For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Jumlah Ekuitas/Total Equity				
	Modal Saham/ Capital Stock	Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ Available for Sale Financial Assets	Saldo Laba/Retained Earnings Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated *)	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo tanggal 31 Desember 2018	2,996,688	25,628	171,528	905,340	4,099,184
Penggunaan Saldo Laba 2018	--	--	--	(42,608)	(42,608)
Dividen Tunai	--	--	127,822	(127,822)	--
Cadangan Umum	--	--	--	150,821	150,821
Laba Tahun Berjalan	--	(3,476)	--	--	(3,476)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	22,152	299,350	885,731	4,203,921
Saldo tanggal 31 Desember 2019	2,996,688	22,152	299,350	885,731	4,203,921
Dampak Penerapan PSAK 71,72,73	--	--	--	(1,422,896)	(1,422,896)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	90,754	90,754
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	(1,352)	--	--	(1,352)
Saldo tanggal 31 Desember 2020	2,996,688	20,800	299,350	(446,411)	2,870,427

Balance as of December 31, 2018

Distribution of 2018 Retained Earnings
 Cash Dividends
 General Reserve
 Income for the Year

Comprehensive Income for the Year
Balance as of December 31, 2019

Impact of the Application of PSAK 71,72,73

Income for the Year
Comprehensive Income for the Year
Balance as of December 31, 2020

*) Disajikan kembali pada Lampiran V Catatan 3/ Restated on Appendix V Notes 3

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
PARENT COMPANY

For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2020 Rp	2019 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	436,636	371,637
Penerimaan Restitusi Pajak	24,258	21,947
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(231,277)	(195,394)
Pembayaran Beban Bunga	(367,944)	(211,799)
Pembayaran Pajak	(63,668)	(56,008)
Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya	16,648	29,946
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(185,347)	(39,671)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengeluaran Investasi	(447,102)	--
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan	2,041,108	--
Hasil Penjualan Aset Tetap	--	237
Penerimaan dari Investasi pada Ventura Bersama	--	44,306
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan	(2,580,863)	(1,990,199)
Perolehan Aset Tetap & Aset Tak Berwujud	(186)	--
Penempatan Surat Berharga Tersedia untuk Dijual	--	(13,519)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(987,043)	(1,959,175)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman	2,745,981	4,248,734
Pembayaran Pinjaman	(2,206,250)	(3,293,260)
Penerimaan Penerbitan Obligasi	642,100	--
Penerimaan Penerbitan Surat Utang	--	842,933
Pembayaran Penerbitan Surat Berharga Komersial	(100,000)	--
Pembayaran Dividen	--	(42,608)
Penerimaan Dividen	--	38,694
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1,081,831	1,794,494
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(90,559)	(204,352)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	569,422	773,774
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	478,863	569,422

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Receipts from Customers

Cash Receipts from Tax Refund

Cash Paid to Suppliers

Payment of Interest Expenses

Tax Paid

Other Receipt

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Disbursement from Investment

Proceeds from Investment Loans

Proceeds from Disposal of Property, Plant and Equipment

Proceeds from Investment of Joint Ventures

Disbursement of Loans - Net

Acquisition of Property, Plant and Equipment

Placement Securities Available for Sale

Net Cash Used in Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Receipts from Loan

Payment for Loan

Receipts from Bonds

Receipts From Securities

Payment For Commercial Debt Securities

Dividend Payment

Dividend Receipt

Net Cash Provided by by Financing Activities

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
INFORMATION TAMBAHAN
INDUK PERUSAHAAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
ADDITIONAL INFORMATION
PARENT COMPANY**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

The statements of financial position, statements of comprehensive income, statement of changes in equity and the related statements of cash flows are separate financial statements which are additional information on the consolidated financial statements.

2. Investasi Pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

2. Investment in Subsidiaries

Investments in subsidiaries as stated in separate financial statements are recorded using the cost method.

Entitas Anak	Kepemilikan/ Ownership	Saldo Awal Biaya Perolehan/ Beginning Balance of Acquisition Cost	Penambahan Penyertaan/ Addition in Participation	Pengurangan Penyertaan/ Reduction in Participation	Saldo Akhir Biaya Perolehan/ Ending Balance of Acquisition Cost	Subsidiaries
Entitas Anak						Subsidiaries
PT PPA Finance	99.999	149,999	--	--	149,999	PT PPA Finance
PT PPA Kapital	99.999	99,999	--	--	99,999	PT PPA Kapital
PT Nindya Karya (Persero)	99.000	499,997	--	--	499,997	PT Nindya Karya (Persero)
PT Nindya Beton	49.000	49,000	--	--	49,000	PT Nindya Beton

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan saham baru pada PT Nindya Karya (Persero) tanggal 13 Agustus 2012, telah diputuskan Pengambilan bagian saham oleh PT PPA (Persero) untuk melaksanakan program restrukturisasi PT Nindya Karya (Persero) yang bersifat sementara.

According to Regulation of The Government of The Republic of Indonesia Number 69 of 2012 on the changes of state share ownership structure through issuing new shares through PT Nindya Karya (persero) dated 13th of August 2012, it was decided that the shares taken by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to carry out restructuring program for PT Nindya Karya (Persero) was temporary.

Sejak tahun 2020, PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi sehingga PT PPAK tidak mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikategorikan sebagai entitas anak (sesuai dengan PSAK 65).

Since 2020, PT PPAK has met the requirements as an investment entity so that PT PPAK does not consolidate all entities that are categorized as subsidiaries (in accordance with PSAK 65).

Pengungkapan informasi entitas investasi yang tidak dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

The disclosure of information on non-consolidated investment entities is as follows:

Entitas yang tidak Dikonsolidasi/ Unconsolidated Entities	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation
			%	
PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/ Manufacturing	99.997	2014
PT Magnesium Gosari International ("PT MGI")	Jakarta	Pabrikasi/ Manufacturing	51.00	2018
PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")	Surabaya	Pabrikasi/ Manufacturing	75.00	2007
PT SIPPA Kemasan International ("PT SKI")	Jakarta	Pabrikasi/ Manufacturing	99.980	2018
PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")	Jakarta	Kapal Isap Timah/ Tin Vessel	60	2018
PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB")	Jakarta	Kapal Isap Timah/ Tin Vessel	60	2018
PT Rejeki Inti Logamjaya ("PT RILJ")	Tangerang	Pabrikasi/ Manufacturing	73.53	1997

3. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Induk Saja

3. Re-issuance of Financial Statements Parent Only

a. Laporan Posisi Keuangan Induk Saja

a. Financial Statements Parent Only

	2020		
	Sebelum		Setelah
	Penyajian Kembali/ Before Restated Rp	Penyajian Kembali/ Restated Rp	Penyajian Kembali/ After Restated Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	478,863	--	478,863
Pinjaman Investasi Jangka Pendek			
Pihak Berelasi	1,235,829	154,936	1,390,765
Pihak Ketiga	1,488,731	(154,936)	1,333,795
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	25,692	--	25,692
Pihak Ketiga	27,047	--	27,047
Piutang Anak Perusahaan	6,189	--	6,189
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan			
Pihak Berelasi	340,087	--	340,087
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	45,437	--	45,437
Cessie Piutang Jangka Pendek	125,070	--	125,070
Pajak Dibayar Di Muka	82,575	--	82,575
Aset Lancar Lainnya	6,240	--	6,240
Jumlah Aset Lancar	3,861,760	--	3,861,760
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	38,944	--	38,944
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi			
Pihak Berelasi	536,683	--	536,683
Pinjaman Investasi jangka Panjang	681,689	--	681,689
Properti Investasi	365,026	--	365,026
Aset Pajak Tangguhan	12,422	--	12,422
Investasi pada Ventura Bersama	151,341	--	151,341
Investasi Jangka Panjang - Entitas Anak	1,533,280	(783,285)	749,995
Piutang Lain-lain	66,534	--	66,534
Aset Tetap	3,355	--	3,355
Cessie Piutang Jangka Panjang	247,441	--	247,441
Aset Hak Guna	11,714	--	11,714
Aset Tidak Lancar Lainnya	826,034	--	826,034
Jumlah Aset Tidak Lancar	4,474,463	(783,285)	3,691,178
JUMLAH ASET	8,336,223	(783,285)	7,552,938

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
Short-term Investment Loans
Related Parties
Third Parties
Accounts Receivable
Related Parties
Third Parties
Subsidiaries Receivable
Loans Receivable-Bailout
Related Parties
Advances and Prepaid Expenses
Short-term Cessie Receivables
Prepaid Taxes
Other Current Assets
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Related Parties
Long term Investment Loan
Investment Property
Deferred Tax Assets
Investment in Joint Ventures
Long Term Investments-Subsidiary
Other Receivables
Property, Plant and Equipment
Long-term Cessie Receivables
Lease Assets
Other Non-Current Assets
Total Non-Current Assets
TOTAL ASSETS

	2020		
	Sebelum		Setelah
	Penyajian Kembali/ Before Restated Rp	Penyajian Kembali/ Restated Rp	Penyajian Kembali/ After Restated Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	4,771	--	4,771
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan			
Pihak Berelasi	1,449,678	--	1,449,678
Pihak Ketiga	1,474,881	--	1,474,881
Utang Surat Berharga Komersial	--	--	--
Utang Pajak	7,427	--	7,427
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	287,678	--	287,678
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3,224,435	--	3,224,435
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	1,717	--	1,717
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan			
Pihak Berelasi	53,274	--	53,274
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	748,545	--	748,545
Utang Obligasi	640,361	--	640,361
Liabilitas Sewa	14,179	--	14,179
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,458,076	--	1,458,076
JUMLAH LIABILITAS	4,682,511	--	4,682,511
EKUITAS			
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31 Desember 2020 dan 2019			
masing-masing 2.996.688 dan 1.996.688 saham	2,996,688	--	2,996,688
Saldo Laba:			
Telah Ditentukan Penggunaannya	299,350	--	299,350
Belum Ditentukan Penggunaannya	336,874	(783,285)	(446,411)
Labas (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih	20,800	--	20,800
JUMLAH EKUITAS	3,653,712	(783,285)	2,870,427
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8,336,223	(783,285)	7,552,938

LIABILITIES AND EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Accounts Payable
Third Parties
Bank and Financial Institution Loans
Related Parties
Third Parties
Commercial Debt Securities
Taxes Payable
Accrued Expenses and Other Payables
Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES
Employee Benefit Liabilities
Bank and Financial Institution Loans
Related Parties
Medium term, Long term Notes
Bonds Payable
Lease Liabilities
Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share Capital - Rp 1,000,000 par value per share - Authorized Capital 5,000,000 shares
Issued and Fully Paid
As of December 31, 2020 and 2019
2,996,688 and 1,996,688 respectively
Retained Earnings:
Appropriated
Unappropriated
Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

b. *Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*

	2020			
	Sebelum Penyajian Kembali/ <i>Before Restated</i> Rp	Penyajian Kembali/ <i>Restated</i> Rp	Setelah Penyajian Kembali/ <i>After Restated</i> Rp	
PENDAPATAN USAHA	682,223	(7,796)	674,427	REVENUES
BEBAN USAHA	(547,499)	--	(547,499)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	134,724	(7,796)	126,928	OPERATING INCOME
Penghasilan Bunga	14,419	--	14,419	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	--	--	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan	(2,693)	--	(2,693)	Interest Expense and Financial Charge
Bagian Laba Ventura Bersama	(1,746)	--	(1,746)	Share of the Profit of Joint Ventures
Beban Lain-lain	(5,828)	--	(5,828)	Other Expenses
LABA SEBELUM PAJAK	138,876	(7,796)	131,080	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAXES
Manfaat (Beban) Pajak Kini	(31,780)	--	(31,780)	Current Tax Benefit (Expenses)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	(8,546)	--	(8,546)	Deferred Tax Benefit (Expenses)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(40,326)	--	(40,326)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	98,550	(7,796)	90,754	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(1,352)	--	(1,352)	Available for Sale Financial Assets
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(1,352)	--	(1,352)	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	97,198	(7,796)	89,402	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

c. Laporan Perubahan Ekuitas Induk Saja

c. *Statements of Changes in Equity Parent Only*

	2020			
	Sebelum Penyajian Kembali/ <i>Before Restated</i> Rp	Penyajian Kembali/ <i>Restated</i> Rp	Setelah Penyajian Kembali/ <i>After Restated</i> Rp	
Modal Saham	2,996,688	--	2,996,688	Capital Stock
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	20,800	--	20,800	Available for Sales of Financial Assets
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	299,350	--	299,350	Appropriated Retained Earnings
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	336,874	(783,285)	(446,411)	Unappropriated Retained Earnings
Jumlah Ekuitas	3,653,712	(783,285)	2,870,427	Total Equity

2020
Laporan Tahunan

STRATEGIC ROLES

FOR BETTER PERFORMANCE



■ **Kantor Pusat :**

Menara Mandiri II Lantai 7-9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190

■ Website: www.ptppa.com

■ Phone:
Fax:

021 - 5798 2222
021 - 5798 2233

